SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RKPD Tahun 2024.

(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

b. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan

c. acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2024, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024 dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

a. narasi RKPD Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
b. Data dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
c. Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 November 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA
IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar xv
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-5
1.4. Maksud dan Tujuan I-6
1.5. Sistematika I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.2 Kondisi Demografi II-9
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-14
2.3 Kondisi Perekonomian Daerah**.....** II-26
2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) II-26
2.3.2 PDRB Perkapita II-38
2.3.3 Inflasi II-41
2.3.4 Rasio Gini dan Indeks Williamson II-42
2.3.5 Indeks Daya Saing Daerah II-43
2.3.6 Investasi II-44
2.3.7 Pertanian (dalam arti luas) dan Ketahanan Pangan II-47
2.3.8 Koperasi, usaha kecil, dan menengah II-59
2.3.9 Perdagangan II-64
2.3.10 Perindustrian II-67
2.3.11 Pariwisata II-69
2.3.12 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-70
2.3.13 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman II-82
2.3.14 Perhubungan II-89
2.3.15 Pertambangan II-114
2.3.16 Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Desa II-117
2.4 Sumber Daya Manusia II-119
2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-120
2.4.2 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) II-124
2.4.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) II-124
2.4.4 Indeks Pembangunan Kebudayaan II-129
2.4.5 Pendidikan II-131
2.4.6 Kesehatan II-137
2.4.7 Kesejahteraan Sosial II-146
2.4.8 Tenaga Kerja II-151
2.4.9 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-159
2.4.10 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-162
2.4.11 Kepemudaan dan olahraga II-164
2.4.12 Perpustakaan II-166
2.4.13 Transmigrasi II-168

2.5 Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan II-169
2.5.1 Daya Dukung dan Daya Tampung II-169
2.5.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) II-172
2.5.3 Perubahan Iklim II-174
2.5.4 Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup II-181
2.5.5 Kualitas Lahan di Provinsi Jawa Tengah II-187
2.5.6 Pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan II-190
2.5.7 Penataan Ruang II-192
2.5.8 Energi dan Sumber Daya Mineral II-202
2.5.9 Penanggulangan Bencana II-211
2.6 Tata Kelola Pemerintahan II-226
2.6.1 Indeks Reformasi Birokrasi II-226
2.6.2 Indeks Kepuasan Masyarakat II-228
2.6.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik II-229
2.6.4 Penelitian dan Pengembangan II-241
2.6.5 Kearsipan II-244
2.6.6 Akuntabilitas II-245
2.6.7 Manajemen ASN II-246
2.6.8 Administrasi Kependudukan II-248
2.6.9 Perencanaan II-254
2.6.10 Pengawasan II-254
2.6.11 Pertanahan II-255
2.7 Kondusivitas Daerah II-265
2.8 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2022 ..... II-267
2.9 Permasalahan Pembangunan II-268
2.9.1 Permasalahan Pembangunan Daerah II-268
2.9.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-271
2.9.3 Isu Strategis Daerah II-281
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ... III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Dinamika Perekonomian Global III-1
3.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional III-2
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah III-3
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-5
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-5
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-9
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-13
3.2.4 Sumber Pendanaan Lainnya III-15
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 ..... IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah IV-2
4.2.1 Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-2
4.2.2 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024 ..... IV-7

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 ..... IV-10
4.2.4 Keselarasan RKPD Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024..... IV-181
4.2.5 Inovasi Daerah..... IV-191
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-1
5.1 Kebijakan Umum V-1
5.2 Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah..... V-3
5.3 Arah Per Wilayah Pengembangan. V-4
5.3.1 Wilayah Pengembangan Kedungsepur..... V-5
5.3.2 Wilayah Pengembangan Jekutibanglor V-12
5.3.3 Wilayah Pengembangan Purwomanggung..... V-18
5.3.4 Wilayah Pengembangan Subosukowonosraten V-23
5.3.5 Wilayah Pengembangan Bregasmalang..... V-29
5.3.6 Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb..... V-34
5.3.7 Wilayah Pengembangan Petanglong V-40
5.4 Arahan Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Provinsi. V-45
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-1
6.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2024..... VI-1
6.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah..... VI-2
A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar VI-2
B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar VI-7
C. Urusan Pilihan VI-16
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan VI-23
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan VI-24
F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan VI-26
G. Unsur Pemerintahan Umum VI-26
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VII-1
7.1 Indikator Kinerja Utama..... VII-1
7.2 Indikator Kinerja Daerah VII-1
BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah II-3
Tabel 2.2 Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2019 ..... II-4
Tabel 2.3 Sebaran kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa di Provinsi Jawa Tengah II-8
Tabel 2.4 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah.2018-2022 ..... II-10
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah (jiwa) Tahun 2018-2022..... II-10
Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Menurut Eks-Karesidenan di Jawa Tengah Tahun 2018-2022..... II-12
Tabel 2.7 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-13
Tabel 2.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Maret 2018 - September 2022 ..... II-15
Tabel 2.9 Komoditi Makanan dan Bahan Baku makanan yang Memberi Pengaruh Besar Pada Kenaikan Garis Kemiskinan di Jawa Tengah II-18
Tabel 2.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi se-Bali Tahun Periode September 2021 – September 2022 ..... II-23
Tabel 2.11 Persentase Kemiskinan Tahun 2021 dan Perubahan Persentase Kemiskinan Tahun 2021 - 2022 di Wilayah Setara..... II-24
Tabel 2.12 Jumlah dan Persentase Penduduk Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun Periode September 2021 – September 2022 ..... II-25
Tabel 2.13 Kabupaten / Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tnegah Tahun 2022-2024..... II-26
Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2022..... II-27
Tabel 2.15 Pertumbuhan Ekonomi (c-to-c) Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2018 –2022 (%)..... II-30
Tabel 2.16 Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah) II-31
Tabel 2.17 Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah) II-32
Tabel 2.18 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (%)..... II-33
Tabel 2.19 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (%) II-34

Tabel 2.20 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (Miliar Rupiah) II-34
Tabel 2.21 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%) II-35
Tabel 2.22 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%) II-36
Tabel 2.23 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022 (%) II-36
Tabel 2.24 PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)..... II-38
Tabel 2.25 PDRB Per Kapita Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)..... II-40
Tabel 2.26 Perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah Tahun 2022..... II-45
Tabel 2.27 Jumlah Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM dan Non LKPM Tahun 2016 – 2022..... II-46
Tabel 2.28 Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein Dan Lemak Provinsi Jawa Tengah II-53
Tabel 2.29 Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022 ..... II-54
Tabel 2.30 Pelabuhan, Perikanan, Pantai (PPP) di Provinsi Jawa Tengah II-56
Tabel 2.31 Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 Koperasi Se- Jawa Tengah II-60
Tabel 2.32 Jumlah KSP/USP Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022..... II-60
Tabel 2.33 Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022..... II-61
Tabel 2.34 Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari Tahun 2018-2022 per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah II-62
Tabel 2.35 Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022..... II-64
Tabel 2.36 Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (Juta US$) II-65
Tabel 2.37 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Juta$) II-65
Tabel 2.38 Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Juta US$)..... II-66
Tabel 2.39 Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022..... II-66
Tabel 2.40 Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022..... II-67
Tabel 2.41 Nilai dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-68
Tabel 2.42 Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022..... II-68

Tabel 2.43 Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-68
Tabel 2.44 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 ..... II-69
Tabel 2.45 Kondisi Permukaan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Kewenangan Tahun 2022 ..... II-70
Tabel 2.46 Kondisi Permukaan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Kewenangan Tahun 2022 ..... II-71
Tabel 2.47 Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-71
Tabel 2.48 Kondisi Permukaan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah Menurut Lebar Jalan Tahun 2022 ..... II-72
Tabel 2.49 Capaian Akses Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022 ..... II-73
Tabel 2.50 Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-73
Tabel 2.51 Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-74
Tabel 2.52 Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah II-77
Tabel 2.53 Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2016 – 2022 ..... II-77
Tabel 2.54 Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021 ..... II-78
Tabel 2.55 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-79
Tabel 2.56 Jumlah embung di Jawa Tengah berdasarkan sumbernya II-80
Tabel 2.57 Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022 ..... II-80
Tabel 2.58 Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis II-81
Tabel 2.59 Hasil Pendataan Kondisi Bangunan Gedung Provinsi Jawa Tengah II-81
Tabel 2.60 Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-82
Tabel 2.61 Backlog Kepenghunian dan Kepemilikan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022 ..... II-84
Tabel 2.62 Pembangunan Baru Rumah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 ..... II-85
Tabel 2.63 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2022 ..... II-85
Tabel 2.64 Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 Melalui APBD Prov II-88
Tabel 2.65 Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Kumuh Sampai Dengan Tahun 2022 Di Provinsi Jawa Tengah II-89
Tabel 2.66 Perkembangan Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-90
Tabel 2.67 Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-91

Tabel 2.68 Persebaran Terminal Tipe C di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-92
Tabel 2.69 Kondisi dan Status Aset Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-93
Tabel 2.70 Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-94
Tabel 2.71 Perkembangan pelayanan Angkutan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022..... II-95
Tabel 2.72 Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng Tahun 2018 – 2022 ..... II-96
Tabel 2.73 Hierarki Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah..... II-97
Tabel 2.74 Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-98
Tabel 2.75 Perkembangan Pelayanan ASDP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022..... II-98
Tabel 2.76 Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-99
Tabel 2.77 Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-101
Tabel 2.78 Progres Revitalisasi Jalur Kereta Api Non Aktif di Jawa Tengah II-102
Tabel 2.79 Tingkat Fasilitas Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Tengah 2018-2022 ..... II-103
Tabel 2.80 Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-103
Tabel 2.81 Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang dan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang di Perlintasan Sebidang KA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-104
Tabel 2.82 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-104
Tabel 2.83 Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di Ruas Jalan Provinsi yang Belum Tertangani Tahun 2022 ..... II-104
Tabel 2.84 Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2022 ..... II-105
Tabel 2.85 Pelaksanaan Ramp Check di Terminal Tipe B Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-106
Tabel 2.86 Perlintasan Rel Kereta Api di Jawa Tengah Tahun 2022..... II-106
Tabel 2.87 Perlintasan Rel Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi Tahun 2022 ..... II-106
Tabel 2.88 Aktivitas dan Kondisi Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-108
Tabel 2.89 Kebutuhan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan di Jawa Tengah II-109
Tabel 2.90 Perkembangan Jumlah Penumpang Moda Transportasi Umum di Perkotaan yang Dilayani Trans Jateng Tahun 2018 – 2022 ..... II-110
Tabel 2.91 Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Pelayanan Trans Jateng Tahun 2021 – 2022..... II-111
Tabel 2.92 Rekapitualasi Perbandingan Pendapatan dan Biaya Operasional Layanan Trans Jateng Tahun 2017-2022 ..... II-111
Tabel 2.93 Rekapitulasi Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 ..... II-112

Tabel 2.94 Rekapitulasi Perbandingan Anggaran Operasional Dan Perhitungan Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 ..... II-113
Tabel 2.95 Jumlah Penumpang (Orang) Pada Masa Angkutan Lebaran dan Nataru II-113
Tabel 2.96 Penerbitan Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO) Untuk Angkatan Sewa Khusus / Daring (Online) Tahun 2018-2022 ..... II-114
Tabel 2.97 Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-115
Tabel 2.98 Perkembangan Good Mining Practice (GMP) di Jawa Tengah Tahun 2016-2021 ..... II-116
Tabel 2.99 Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah lanjut usia terlantar Tahun 2018-2022..... II-117
Tabel 2.100 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2021 ..... II-118
Tabel 2.101 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022..... II-125
Tabel 2.102 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022..... II-126
Tabel 2.103 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022 (%) II-127
Tabel 2.104 Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi di Provinsi Jawa Tengah 2018-2022 (%) II-127
Tabel 2.105 Kondisi Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Nasional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (%)..... II-128
Tabel 2.106 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018 – 2022..... II-129
Tabel 2.107 Perkembangan Warisan Budaya Benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022 ..... II-130
Tabel 2.108 Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022 ..... II-131
Tabel 2.109 Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Jawa Tengah (Persen) Tahun 2016 - 2022 ..... II-131
Tabel 2.110 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021..... II-132
Tabel 2.111 Sebaran APK SMA/SMK/Sederajat di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 ..... II-134
Tabel 2.112 Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 ..... II-135
Tabel 2.113 Sertifikat Kompetensi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2021 ..... II-135
Tabel 2.114 Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2021 ..... II-135
Tabel 2.115 Kondisi Sarpras Pendidikan Tahun 2018-2021 ..... II-136
Tabel 2.116 Kemampuan Literasi, Numerasi dan karakter Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2022-2023..... II-136
Tabel 2.117 Prevalensi Stunting Jawa Tengah Tahun 2018-2022..... II-141

Tabel 2.118 Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-144
Tabel 2.119 Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022 ..... II-144
Tabel 2.120 Perkembangan Desa/Kelurahan ODF Di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-145
Tabel 2.121 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%) II-145
Tabel 2.122 Populasi dan Penanganan PPKS di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-146
Tabel 2.123 Kondisi PSKS Tahun 2018-2022 ..... II-147
Tabel 2.124 Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-148
Tabel 2.125 Jumlah dan Kondisi Bangunan Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah 2022 ..... II-149
Tabel 2.126 Kondisi dan Kebutuhan SDM Panti Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-149
Tabel 2.127 Pembentukan SLRT Desa/Kelurahan s/d Tahun 2021 ..... II-150
Tabel 2.128 Keterserapan Bansos Tahun 2022 ..... II-151
Tabel 2.129 Data KUBE Di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-151
Tabel 2.130 TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%) II-153
Tabel 2.131 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-155
Tabel 2.132 Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-155
Tabel 2.133 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%) II-156
Tabel 2.134 Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-156
Tabel 2.135 Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-157
Tabel 2.136 Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-157
Tabel 2.137 Jumlah Not in Employment, Education or Training (NEET) di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-158
Tabel 2.138 Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2018 - 2022 ..... II-158
Tabel 2.139 Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-160
Tabel 2.140 Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-160
Tabel 2.141 Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan dan Anak 2018-2022 ..... II-161

Tabel 2.142 Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022 ..... II-162
Tabel 2.143 Perkembangan CPR, TFR dan Unmetneed 2018-2022 ..... II-164
Tabel 2.144 Perkembangan Tri Bina 2018-2022 ..... II-163
Tabel 2.145 Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-164
Tabel 2.146 Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah pada Kejuaraan Tingkat Nasional II-165
Tabel 2.147 Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022 ..... II-166
Tabel 2.148 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022 ..... II-166
Tabel 2.149 Koleksi Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-167
Tabel 2.150 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa TengahTahun 2018-2022 (Orang) II-168
Tabel 2.151 Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022..... II-169
Tabel 2.152 Besaran Emisi GRK Untuk Setiap Sektor Pada Tahun 2022..... II-175
Tabel 2.153 Aksi Penurunan Emisi GRK untuk Setiap Sektor pada Tahun 2022 ..... II-177
Tabel 2.154 Besaran Penurunan Emisi GRK Tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Tahun 2019–2022 ..... II-179
Tabel 2.155 Lokasi Prioritas Ketahanan Iklim di Provinsi Jawa Tengah II-179
Tabel 2.156 Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-181
Tabel 2.157 Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-182
Tabel 2.158 Data TPA di Jawa Tengah per Tahun 2023..... II-183
Tabel 2.159 Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2018 – 2022..... II-186
Tabel 2.160 Rekapitulasi Jumlah Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah yang Mengikuti Proper Nasional Tahun 2021-2022 ..... II-186
Tabel 2.161 Luas Lahan Kritis Dan Penanganannya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022 ..... II-187
Tabel 2.162 Daerah Aliran Sungai Prioritas di Provinsi Jawa Tengah II-188
Tabel 2.163 Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-189
Tabel 2.164 Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove di Jawa Tengah..... II-189
Tabel 2.165 Rehabilitasi Mangrove Tahun 2018-2022 Di Jawa Tengah II-190
Tabel 2.166 Produksi Kayu Dari Hutan Rakyat dan Hutan Negara Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-190
Tabel 2.167 Jumlah Pengguna Kawasan, Industri Pengolahan Hasil Hutan dan SVLK di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-191
Tabel 2.168 Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah Tahun 2018–2022..... II-191
Tabel 2.169 Update Status RTRW Kab/Kota Di Jateng..... II-192

Tabel 2.170 Progress Legislasi RDTR Kab/Kota Di Jateng II-195
Tabel 2.171 Rata – Rata Luasan RTH Di Kawasan Perkotaan Jawa Tengah II-199
Tabel 2.172 Tabel Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang..... II-201
Tabel 2.173 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022..... II-204
Tabel 2.174 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Jawa Tengah Tahun 2018-2022..... II-204
Tabel 2.175 Indeks Ketersediaan Air Tanah di Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022..... II-209
Tabel 2.176 Potensi Air Tanah pada 31 CAT di Jawa Tengah..... II-209
Tabel 2.177 Potensi Ancaman Kekeringan Desa/Kelurahan di Jawa Tengah II-211
Tabel 2.178 Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-221
Tabel 2.179 Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018– 2022..... II-222
Tabel 2.180 Jumlah Korban Akibat Bencana di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-222
Tabel 2.181 Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-223
Tabel 2.182 Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah..... II-224
Tabel 2.183 Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota II-224
Tabel 2.184 Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Tahun 2018 – 2022..... II-225
Tabel 2.185 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2016 – 2022 ..... II-225
Tabel 2.186 Data Bantuan Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022..... II-226
Tabel 2.187 Catatan Hasil Evaluasi dari Kemenpan RB Tahun 2021 - 2022..... II-227
Tabel 2.188 Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Dalam Kurun Waktu 2020 s.d 2022 ..... II-239
Tabel 2.189 Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/Implementasi Penelitian II-242
Tabel 2.190 Jumlah Tenant Binaan Inwinov Jateng yang difasilitasi Program Penguatan Inkubator/Tenant..... II-243
Tabel 2.191 Jumlah Inovasi Hasil Krenova di Jawa Tengah Tahun 2017-2022..... II-244
Tabel 2.192 Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2022..... II-244
Tabel 2.193 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2018-2022..... II-245
Tabel 2.194 Jumlah Pengunjung Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah II-245
Tabel 2.195 Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022..... II-246
Tabel 2.196 Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-246

Tabel 2.197 PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Mengajukan Tugas Belajar II-248
Tabel 2.198 Peningkatan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2018-2022 ..... II-248
Tabel 2.199 Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2017-2022 ..... II-251
Tabel 2.200 Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa TengahTahun 2017-2022 ..... II-251
Tabel 2.201 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2022 ..... II-252
Tabel 2.202 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-255
Tabel 2.203 Penetapan lokasi aktif Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-256
Tabel 2.204 Capaian Penerbitan Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah II-257
Tabel 2.205 Capaian Kinerja urusan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 ..... II-257
Tabel 2.206 Capaian Sertifikasi Lahan LP2B Di Jawa TengahTahun 2022 ..... II-258
Tabel 2.207 Capaian Reforma Agraria Di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-258
Tabel 2.208 Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022 ..... II-266
Tabel 2.209 Penyelesaian Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-266
Tabel 2.210 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-267
Tabel 2.211 Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023 ..... II-268
Tabel 2.212 Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah II-282
Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-4
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2022 ..... III-6
Tabel 3.3 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2022 (%) III-7
Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-8
Tabel 3.5 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2022 ..... III-10
Tabel 3.6 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-13
Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2022 ..... III-13
Tabel 3.8 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-14
Tabel 3.9 Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-14

Tabel 3.10 Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... III-15
Tabel 3.11 Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... III-16
Tabel 3.12 Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... III-17
Tabel 3.13 Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2022 ..... III-19
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2022 ..... III-19
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 ..... IV-2
Tabel 4.2 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Musrenbang Provinsi Tahun 2024 ..... IV-3
Tabel 4.3 Konsistensi Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024, serta Konsistensi Permasalahan Daerah, Isu Strategis, dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2024 ..... IV-26
Tabel 4.4 Program Prioritas Daerah Mendukung Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah Disertai Pagu Indikatif Tahun 2024 ..... IV-28
Tabel 4.5 Keselarasan Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 ..... IV-181
Tabel 4.6 Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 ..... IV-182
Tabel 4.7 Keselarasan Target Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024 dengan Target Pengembangan Wilayah Jawa Tengah Dalam RKP Tahun 2024 ..... IV-182
Tabel 4.8 Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024 ..... IV-182
Tabel 5.1 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2022 ..... V-6
Tabel 5.2 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2024 ..... V-8
Tabel 5.3 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Jekutibanglor Tahun 2022 ..... V-12
Tabel 5.4 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Jekutibanglor Tahun 2024 ..... V-15
Tabel 5.5 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Purwomanggung Tahun 2022 ..... V-18
Tabel 5.6 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Purwomanggung Tahun 2024 ..... V-21
Tabel 5.7 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2022 ..... V-24
Tabel 5.8 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2024 ..... V-26
Tabel 5.9 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2022 ..... V-29

Tabel 5.10 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2024 ..... V-32
Tabel 5.11 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Barlingmascakeb Tahun 2022 ..... V-35
Tabel 5.12 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Barlingmascakeb Tahun 2024 ..... V-37
Tabel 5.13 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2022 ..... V-40
Tabel 5.14 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2024 ..... V-42
Tabel 6.1 Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... VI-1
Tabel 6.2 Rencana Program Priotitas dan Pagu Indikatif Profinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... VI-27
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... VII-1
Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen I-5
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah II-2
Gambar 2.2 Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-15
Gambar 2.3 Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2022..... ..... II-16
Gambar 2.4 Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022(%) II-17
Gambar 2.5 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022..... II-18
Gambar 2.6 Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2022 ..... II-20
Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022..... II-20
Gambar 2.8 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 ..... II-21
Gambar 2.9 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022..... II-22
Gambar 2.10 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 ..... II-22
Gambar 2.11 Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 – 2022 dengan Wilayah Setara II-24
Gambar 2.12 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 ..... II-25
Gambar 2.13 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional (c-to-c), Tahun 2011 – 2022 (Persen)..... II-28
Gambar 2.14 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (y-on-y) Tahun 2017-2022 (Persen) II-28
Gambar 2.15 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (q-to-q), Per-Triwulan Tahun 2017 -2022 (Persen) II-29
Gambar 2.16 Laju Pertumbuhan PDRB dan Distribusi PDRB Menurut Provinsi Sepulau Jawa Pada Triwulan IV-2022 (yoy, persen) II-29
Gambar 2.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Se Pulau Jawa dan Nasional Pada Tahun 2022 (c-to-c, persen)..... II-30
Gambar 2.18 Peta Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (c-to-c, persen)..... II-38
Gambar 2.19 PDRB Per Kapita Jawa Tengah Dibandingkan Nasional Tahun 2010 – 2022..... II-39

Gambar 2.20 PDRB Per Kapita Provinsi Se Pulau Jawa Tahun 2022 ..... II-39
Gambar 2.21 PDRB Per Kapita Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-41
Gambar 2.22 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – Maret 2023 (%) II-42
Gambar 2.23 Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022 ..... II-42
Gambar 2.24 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2021 ..... II-43
Gambar 2.25 Nilai IDSD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan 2021 ..... II-44
Gambar 2.26 Kawasan Industri Eksisting di Provinsi Jawa Tengah II-47
Gambar 2.27 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022..... II-48
Gambar 2.28 Gambar 2.28.Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022..... II-48
Gambar 2.29 Perkembangan Produksi Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2018-2022 ..... II-49
Gambar 2.30 Perkembangan Produksi Bawang Merah, Cabai Besar Tahun 2018-2022 ..... II-50
Gambar 2.31 Perkembangan Produksi Tebu, Kopi, Kelapa Tahun 2018-2022 ..... II-50
Gambar2.32 Perkembangan Populasi Sapi Potong dan Kambing Tahun 2018-2022 ..... II-51
Gambar 2.33 Perkembangan Produksi Daging, Susu, Telur Tahun 2018-2022 ..... II-52
Gambar 2.34 Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022..... II-52
Gambar 2.35 Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..... II-53
Gambar 2.36 Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022..... II-55
Gambar 2.37 Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022..... II-57
Gambar 2.38 Produksi Garam (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022 ..... II-58
Gambar 2.39 Angka Konsumsi Ikan di Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-59
Gambar 2.40 Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022 (%)..... II-77
Gambar 2.41 Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m3) Tahun 2017 - 2022 ..... II-79
Gambar 2.42 Persebaran Jumlah Sisa RTLH di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..... II-87
Gambar 2.43 Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah..... II-90
Gambar 2.44 Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah II-97
Gambar 2.45 Apron, Terminal dan Runway Bandara Dewadaru Karimunjawa II-100
Gambar 2.46 Apron dan Terminal Bandara Ngloram Kabupaten Blora II-100
Gambar 2.47 Apron dan Runway Bandara J.B. Soedirman Purbalingga II-101
Gambar 2.48 Peta Jaringan Loop Rel Kereta Api di Jawa Tengah II-101

Gambar 2.49 Distribusi Perjalanan Antar Wilayah Perkotaan Di Jawa Tengah..... II-109
Gambar 2.50 Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah II-115
Gambar 2.51 Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 ..... II-119
Gambar 2.52 IPM Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022..... II-120
Gambar 2.53 Pengeluaran/kapita/thn disesuaikan Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-121
Gambar 2.54 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-122
Gambar 2.55 Harapan Lama Sekolah (HLS) Jateng dan Nasional Tahun 2018 - 2022..... II-123
Gambar 2.56 Usia Harapan Hidup (UHH) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-123
Gambar 2.57 Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Tetangga dan Nasional Tahun 2021..... II-124
Gambar 2.58 IPG Provinsi Jawa Tengah Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2022 ..... II-126
Gambar 2.59 APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022 ..... II-132
Gambar 2.60 Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dan Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan TIK di Jawa Tengah Tahun 2017-2022 (%) II-137
Gambar 2.61 Tren Kasus Kematian Balita Tahun 2018-2022..... II-138
Gambar 2.62 Tren Kasus Kematian Bayi Tahun 2018-2022 ..... II-139
Gambar 2.63 Tren Kasus Kematian Balita Tahun 2018-2022..... II-139
Gambar 2.64 Tren Kasus Balita Gizi Buruk Tahun (BB/TB) 2018-2022 ..... II-140
Gambar 2.65 Angka Prevalensi Stunting Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Provinsi Lainnya Tahun 2022 ..... II-141
Gambar 2.66 Angka Prevalensi Stunting Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan SSGBI 2019 dan SSGI 2021 ..... II-142
Gambar 2.67 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – Agustus 2022 (%) II-152
Gambar 2.68 Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2022..... II-152
Gambar 2.69 Karakteristik Penduduk bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agustus 2022 ..... II-153
Gambar 2.70 Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022 (%)..... II-153
Gambar 2.71 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)..... II-154
Gambar 2.72 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2022 (Juta Rupiah)..... II-154
Gambar 2.73 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..... II-159
Gambar 2.74 Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020..... II-167
Gambar 2.75 Capaian Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat (NTGM) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020..... II-168

Gambar 2.76 Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Air Provinsi Jawa Tengah II-170
Gambar 2.77 Peta Status Daya Dukung air dan Daya Tampung Pangan Provinsi Jawa Tengah II-171
Gambar 2.78 Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Pangan Provinsi Jawa Tengah II-172
Gambar 2.79 *Peta* Status *Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah* II-172
Gambar 2.80 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022 ..... II-173
Gambar 2.81 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 ..... II-173
Gambar 2.82 Peta Kerentanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-175
Gambar 2.83 Tren Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2021 ..... II-176
Gambar 2.84 Aksi Penurunan Emisi GRK Setiap Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2022 ..... II-177
Gambar 2.85 Jumlah Limbah B3 Per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-185
Gambar 2.86 Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah dan DIY II-202
Gambar 2.87 Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2022 (GWh) II-203
Gambar 2.88 Program Listrik Gratis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2022 (Unit) II-204
Gambar 2.89 Potensi Teknis PLTS Terapung di Jawa Tengah II-206
Gambar 2.90 Potensi Biogenic Shallow Gas (Gas Rawa) di Jawa Tengah..... II-206
Gambar 2.91 Potensi Panas Bumi di Jawa Tengah II-207
Gambar 2.92 Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2022 ..... II-208
Gambar 2.93 Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Tengah II-210
Gambar 2.94 Peta Titik Lokasi Sumur Bor Badan Geologi dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah overlay dengan Peta Bencana Rawan Kekeringan II-211
Gambar 2.95 Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah..... II-223
Gambar 2.96 Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah II-226
Gambar 2.97 Jumlah UPP Bersertifikasi ISO dan UPP Yang Melakukan Pengukuran IKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (Unit) II-228
Gambar 2.98 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 ..... II-229
Gambar 2.99 Indeks SPBE Provinsi..... II-229
Gambar 2.100Perkembangan Anggaran Diskominfo Tahun 2018-2023 ..... II-230
Gambar 2.101Target dan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2019-2023 ..... II-231
Gambar 2.102Gambar Rencana Bangunan Data Center Provinsi Jawa Tengah..... II-232
Gambar 2.103Topologi Jaringan Perangkat Daerah..... II-232
Gambar 2.104Topologi Jaringan Metro Kab/Kota..... II-233
Gambar 2.105Kegiatan Live Streaming dan Video Conference II-233

Gambar 2.106Aplikasi Terintegrasi II-234
Gambar 2.107Capaian Kinerja Laju Pemanfaatan Data Sektoral II-236
Gambar 2.108Grafik Kunjungan Portal Data Tahun 2018-2022 ..... II-237
Gambar 2.109Tampilan Aplikasi Portal Data Jawa Tengah..... IV-238
Gambar 2.110Perkembangan Jumlah PNS Provinsi Jawa Tengah Kurun Waktu Tahun 2018-2022 ..... IV-247
Gambar 2.111Persentase Kepemilikan KTP (KTP-el) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 ..... IV-249
Gambar 2.112Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (%) IV-250
Gambar 2.113Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2022 ..... IV-253
Gambar 2.114 Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 ..... IV-254
Gambar 2.115 Rekap Kejadian Konflik di Provinsi Jawa Tengah..... IV-265
Gambar 5.1 Konsep Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah..... V-2
Gambar 5.2 Konsep Arahan Pengembangan Wilayah Jawa Tengah..... V-3
Gambar 5.3 Persandingan Sektor Unggulan Berdasarkan RTRWP V-5
Gambar 5.4 Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Kedungsepur Tahun 2022 ..... V-7
Gambar 5.5 Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur V-8
Gambar 5.6 Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur V-12
Gambar 5.7 Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Jekutibanglor Tahun 2022 ..... V-13
Gambar 5.8 Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Jekutibanglor V-14
Gambar 5.9 Arah Pengembangan Wilayah Jekutibanglor..... V-18
Gambar 5.10 Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2022 ..... V-19
Gambar 5.11 Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Purwomanggung..... V-20
Gambar 5.12 Arah Pengembangan Wilayah Purwomanggung V-23
Gambar 5.13 Nilai Dimensi IDSD Kabupaten/Kota di Subosukowonosraten..... V-25
Gambar 5.14 Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Subosukowonosraten V-26
Gambar 5.15 Arah Pengembangan Wilayah Subosukowonosraten..... V-29
Gambar 5.16 Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Bregasmalang Tahun 2022 ..... V-30
Gambar 5.17 Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Bregasmalang..... V-31
Gambar 5.18 Arah Pengembangan Wilayah Bregasmalang V-34
Gambar 5.19 Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Barlingmascakeb Tahun 2022 ..... V-36
Gambar 5.20 Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb..... V-37
Gambar 5.21 Arah Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb V-40

Gambar 5.22 Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Petanglong Tahun 2022 ..... V-41
Gambar 5.23 Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Petanglong..... V-42
Gambar 5.24 Arah Pengembangan Wilayah Petanglong V-45

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023. RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan masa transisi di mana RPJMD Tahun 2018-2023 telah berakhir sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2023. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026.

Dokumen RKPD Tahun 2024 disusun sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan perundang-undangan lainnya yang dipedomani dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2024 antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan-peraturan turunannya. Selain itu beberapa permendagri yang juga dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2022, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 juga memperhatikan keberlanjutan dari kebijakan pembangunan dan capaian RPJMD Tahun 2018–2023 serta proyeksi dalam RKPD Tahun 2023. Dengan berpedoman pada kebijakan dalam RPD Tahun 2024-2026, maka RKPD Tahun 2024 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yaitu "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari" dengan empat sasaran yaitu meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Untuk itu, pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada "Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas". Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan; meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif; meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 didukung dengan 10 (sepuluh) program prioritas daerah meliputi: 1) Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara Luber dan Jurdil; 2) Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat; 3) Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan; 4) Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting; 5) Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi serta kebakaran hutan dan lahan); 6) Peningkatan kualitas sistem pendidikan vokasi; 7) Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif; 8) Pengembangan sistem Ekonomi Sirkular dan Transisi Energi; 9) Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan 10) Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN).

RKPD Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Jawa Tengah, serta dalam rangka upaya meningkatkan dukungan konvergensi dan percepatan perwujudan kebijakan nasional tahun 2024 terutama pada penurunan *stunting*, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, implementasi Satu Data Indonesia (SDI), dan perluasan implementasi Desa Anti Korupsi. Selanjutnya, dalam RKPD Tahun 2024 disusun dengan menyinergikan program strategis Jawa Tengah dengan kabupaten/kota serta memanfaatkan *competitive* dan *comparative advantage* wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antarwilayah, lintas sektor, dan *pentahelix* pelaku pembangunan. Pengembangan pola kerja sama antarwilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah Jawa Tengah.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik serta berorientasi secara tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS). Selain itu penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (*outcome*), terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, berbasis risiko (*risk based planning*), dan berbasis pada riset (*research based planning*), dengan pendekatan *money follow program* dan *program follow result* serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

Dokumen RKPD Tahun 2024 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (renja) perangkat daerah; dan
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 meliputi: 1) Persiapan yaitu penyampaian surat edaran Gubernur Jawa Tengah tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan, serta pedoman penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2024; 2) Konsultasi publik sekaligus pembukaan masa musrenbang; 3) Forum perangkat daerah; 4) Musrenbang wilayah (musrenbangwil) dan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah (rakortekbangda); 5) Musrenbang provinsi; 6) Fasilitasi RKPD Tahun 2024 oleh Kemendagri; 7) Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan DPRD dalam bentuk dialog interaktif eksekutif dan legislatif; dan 8) Penetapan RKPD Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12).

1.3. Hubungan Antardokumen

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus manajemen pembangunan yang berkelanjutan sehingga dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD atau RPD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah (renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada saat memasuki tahapan penganggaran. Selanjutnya pada saat pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.

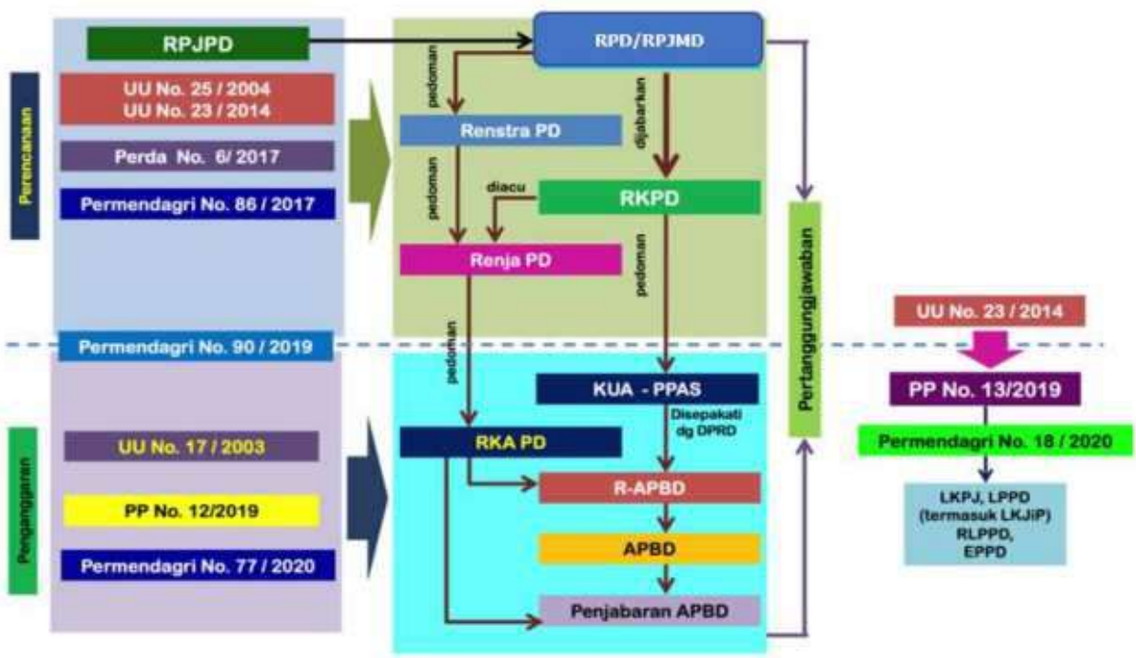

Gambar 1.1.
Hubungan Antardokumen

Selain itu, penyusunan dokumen RKPD juga tetap memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang sifatnya nasional, daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain dokumen tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*sustainable development goals* (SDGs), *road map* reformasi birokrasi,

strategi penanggulangan kemiskinan, percepatan pencegahan *stunting*, pangan dan gizi, penurunan emisi gas rumah kaca, dan pengurangan risiko bencana. Keselarasan dengan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2024.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024; dan
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPD Tahun 2024-2026.

Tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2024;
2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024; dan
3. Menjadi acuan penyelerasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota.

1.5. Sistematika

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

1. **Buku I,** narasi RKPD Tahun 2024 terdiri dari:
   - BAB I PENDAHULUAN
     Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antardokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.
   - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
     Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2022 dan capaian RPJMD sampai dengan tahun 2022; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.
   - BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
     Memuat kondisi perekonomian daerah; arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah.
   - BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
     Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2024, 10 program prioritas, pokir, keselarasan prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta inovasi pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2022 dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 dalam RPD.
   - BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
     Memuat arahan kebijakan pembangunan kabupaten/ kota yang ditetapkan oleh provinsi sebagai panduan penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2024.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2024.

BAB VIII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

2. **Buku II**, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, terdiri dari:
   1) Indikator Kinerja Utama Daerah;
   2) Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   3) Urusan wajib berkaitan pelayanan dasar;
   4) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
   5) Urusan pilihan;
   6) Unsur pendukung urusan pemerintahan;
   7) Unsur penunjang urusan pemerintahan;
   8) Unsur pemerintahan umum.
3. **Buku III**, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km^2 atau sebesar 25,34 persen dari luas pulau Jawa atau 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Secara administrasi terdiri dari 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.809 desa, dan 753 kelurahan, serta meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur pada bagian timur, Provinsi DIY pada bagian selatan, Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, Laut Jawa pada bagian utara, dan Samudera Hindia pada bagian Selatan.

b. Letak Geografis dan Kondisi Topografi

Secara geografis terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur, sehingga secara ekonomi posisi sangat strategis karena berada di diantara dua titik pertumbuhan Pulau Jawa (Jakarta – Surabaya). Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km.

Topografi wilayahnya sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Dengan kemiringan lereng yang beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 2018

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah

c. Kondisi Geologi

Kondisi geologi terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 5 (lima) gunung api aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Gunung api rata-rata mempunyai tingkat ancaman bahaya vulkanik tinggi sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

Jenis tanah meliputi *organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik*, dan didominasi jenis tanah *latosol, aluvial*, serta *gromosol* yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Potensi sumber daya mineral yang tersebar meliputi 32 jenis mineral non logam (*Phospat, Asbes, Talk, Mika, Leusite, Oker, Granit, Dasit, Diorit*, Batu Setengah Permata, Pasir Kuarsa, *Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonite*, Batuapung, *Trass, Diatome, Marmer*, Batu gamping, *Dolomit, Basal, Andesit*, Tanah Liat, Pasir, Tanah urug, *Kalsit, Zeolit*, Sirtu, Batu Sabak, *Tosek*i), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangaan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

d. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak dengan 19 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas untuk dipulihkan yaitu DAS Lasem, DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS

Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Dalam Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Jawa Tengah terdapat 10 (sepuluh) Wilayah Sungai (WS) yang kewenangan pengelolaannya terbagi pada kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Sungai yang pengelolaanya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah Wilayah Sungai Pemali Comal (panjang sungai 930,44 km dan luas DAS 4.425,36 km^2) dan Wilayah Sungai Bodri Kuto (panjang sungai 355,03 km dan luas DAS 1.647,40 km^2). Sedangkan 6 (enam) WS lainnya merupakan WS kewenangan Pusat dan 2 (dua) WS kewenangan kabupaten/kota.

Tabel 2.1.
Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah

Kewenangan	Wilayah Sungai	Luas DAS (km^2)
Pusat	Cimanuk Cisanggarung	6.888,35
	Jratun Seluna	9.576,01
	Bengawan Solo	19.778,00
	Progo Opak Serang	3.238,89
	Serayu Bogowonto	7.344,61
	Citanduy	4.450,44
Provinsi	Pemali Comal	4.425,36
	Bodri Kuto	1.647,40
Kabupaten/Kota	Wiso Gelis	654,27

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No 04/PRT/M/2015

e. Kondisi Klimatologi

Suhu udara tahun 2022 berkisar antara 22,00C sampai dengan 35,20C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata antara 74,0 persen sampai dengan 86,0 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap yaitu sebesar 4.661 mm3 dan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun Meteorologi Banjarnegara sebanyak 249 hari.

f. Penggunaan Lahan

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.436.615,35 hektar. Penggunaan lahan paling besar adalah sawah dengan luas 1.181.758,99 hektar (34,39%), dan luas penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah Kebun dengan luas 638.419,21 hektar (18,58%) dan Permukiman seluas 558.687,35 hektar (16,26%). Luas lahan sawah provinsi di Jawa Tengah mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2016, karena pada tahun tersebut luas lahan sawah sebesar 991.524 hektar (30,47). Penambahan luas lahan sawah merupakan salah satu komitmen Jawa Tengah dalam menjaga ketahanan pangan.

Sepanjang tahun 2014-2016, terjadi perubahan komposisi penggunaan lahan. Luas lahan sawah bertambah dari 990.652 hektar (30,44%) menjadi 991.524 hektar (30,47%), sementara lahan bukan sawah berkurang dari 2.263.760 hektar (69,56) menjadi 2.262.888 hektar (69,53%). Penambahan luas lahan sawah menunjukkan adanya upaya pengembangan sawah baru serta komitmen menjaga

pertanian lahan pangan berkelanjutan (LP2B). Penggunaan lahan di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2019

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Cagar Alam	2.770,02	0,08
2	Danau	16.731,58	0,49
3	Hutan Lindung	86.866,17	2,53
4	Hutan Produksi Terbatas	181.439,19	5,28
5	Hutan Produksi Tetap	366.459,45	10,66
6	Industri	10.547,83	0,31
7	Kebun	638.419,21	18,58
8	Lahan Terbuka	5.179,25	0,15
9	Mangrove	2.894,14	0,08
10	Pasir Darat	178,62	0,01
11	Permukiman	558.687,35	16,26
12	Sawah	1.181.758,99	34,39
13	Semak	30.941,91	0,90
14	Suaka Margasatwa	102,48	0,00
15	Sungai	23.718,78	0,69
16	Taman Hutan Raya	2.318	0,01
17	Taman Nasional	11.888,17	0,35
18	Taman Nasional Laut	183,65	0,01
19	Taman Wisata Alam	216,39	0,01
20	Tambak	56.925,79	1,66
21	Tegalan	260.456,73	7,58
	TOTAL	3.438.683,70	**100,00**

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2022

g. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Jawa Tengah memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus potensi wilayah yang harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alamnya.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, potensi dan karakter wilayahnya dibagi atas 8 wilayah pengembangan yang terdiri dari Wilayah Pengembangan (WP) Barlingmascakeb, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong, dan Bregasmalang. Potensi keseluruhan terbagi sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tertuang dibawah ini:

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, serta pesisir dan pulau-pulau kecil.

a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 546.290 hektar terbagi ke dalam 20 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), dengan fungsi hutan sebagai hutan produksi terbatas seluas ±362.360 hektar, dan hutan produksi tetap seluas ±183.930 hektar. Kawasan hutan produksi terbatas berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Sukoharjo) dan satu kota yaitu Kota Semarang. Sedangkan kawasan hutan produksi

tetap berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Karanganyar).

b) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat seluas 345.822,96 hektar (10,63% luas Jawa Tengah), berada di 29 kabupaten dan 5 kota, kecuali Kota Tegal.

c) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah seluas ±990.652 hektar, dan kawasan pertanian lahan kering seluas ± 995.587 hektar, yang diarahkan dikembangkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Lahan pertanian basah dan kering tersebut dikelola untuk mendukung program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Tengah dengan rencana seluas 1.022.570 hektar.

d) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Jawa Tengah seluas ±885.344 hektar, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 845.668 hektar (96%), PTPN IX seluas 28.212 hektar (3%), dan Perkebunan Besar Swasta/PBS seluas 11.464 hektar (1%).

e) Kawasan Peruntukan Peternakan

Pengembangan kawasan peruntukan peternakan meliputi kawasan peternakan besar, kecil dan kawasan peternakan unggas yang diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

f) Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan seluas ±24.802 hektar, diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan difungsikan menjadi lokasi budidaya ikan. Kawasan perikanan tersebut meliputi:

1) Kawasan perikanan tangkap, diarahkan pada perairan pantai utara dan pantai selatan, danau, waduk, rawa, sungai dan embung;
2) Kawasan perikanan budidaya (air tawar, air payau, air laut), diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

g) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Potensi kawasan peruntukan pertambangan hampir merata di sebagian besar wilayah kabupaten/kota, meliputi:

1) Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan batu bara, terletak di kawasan Majenang-Bantarkawung, Serayu-Pantai Selatan, Serayu-Pantai Utara, Gunung Slamet, Sindoro-Sumbing–Dieng, Merapi-Merbabu-Ungaran, Gunung Muria, Pegunungan Kendeng Utara, Kendeng Selatan, dan Gunung Lawu;
2) Kawasan pertambangan panas bumi, terletak di 9 (sembilan) lokasi komplek/kawasan panas bumi yang ada di 15 kabupaten, yaitu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi Dieng, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Baturraden, Guci, Banyugaram, Mangunan-Wanayasa, dan Condrodimuka;
3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal,

Brebes, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal, dan pengembangan sumur tua/marjinal yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan dan Kendal.

h) Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri skala wilayah diarahkan untuk pengembangan produk-produk unggulan berbasis industri manufaktur. Wilayah industri/kawasan peruntukan industri tersebar di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah kecuali Kota Magelang dan Kota Surakarta, sedangkan kawasan berikat berada di Kabupaten Cilacap, Semarang, Kendal dan Kota Semarang.

i) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi koridor Borobudur–Prambanan–Surakarta; Borobudur-Dieng; Semarang–Demak–Kudus–Jepara–Pati–Rembang–Blora; Semarang–Ambarawa–Salatiga; Batang –Pekalongan–Pemalang–Tegal–Brebes;Cilacap–Banyumas–Purbalingga–Banjarnegara; dan Cilacap–Kebumen–Purworejo.

j) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Jawa Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota, meliputi:

1) Kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada kawasan-kawasan yang sudah ada dan perluasan areal dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan pertanian yang merupakan peruntukan dominan di perdesaan;
2) Kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada intensifikasi kawasan-kawasan yang sudah ada melalui upaya pembangunan ke arah vertikal dan perluasan kawasan perkotaan, diikuti upaya pengendalian sehingga tidak mengganggu kawasan peruntukan lainnya terutama sawah di pinggiran kawasan perkotaan.

k) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada kawasan pesisir yang terletak di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Di Jawa Tengah terdapat 33 pulau-pulau kecil dimana 27 (dua puluh tujuh) pulau terletak di Kepulauan Karimunjawa, 2 (dua) pulau di Kabupaten Jepara (Pulau Panjang, dan Pulau Mandalika); 3 (tiga) pulau di Kabupaten Rembang (Pulau Marongan, Gede dan Sualan,); serta Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap.

2. Kawasan Lindung

Target rencana Kawasan lindung di Jawa Tengah tahun 2009–2029 seluas 561.404 hektar (17,4% dari luas wilayah provinsi). Pemanfaatan ruang hutan lindung fisiografis merupakan sub kawasan lindung yang paling besar, sedangkan pemanfaatan ruang yang paling kecil adalah kawasan pantai dan sempadan.

a) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung yang dikelola oleh negara diarahkan penyebarannya di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar,

Sragen, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes. Untuk kawasan hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat terus didorong setidaknya mencapai minimal 10% melalui alih fungsi lahan tidak produktif, yang diarahkan pengembangannya di 29 kabupaten dan 3 kota (Magelang, Salatiga, dan Semarang).

b) Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya berbentuk kawasan resapan air. Luas kawasan resapan air di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan seluas ±114.822 hektar. Kawasan resapan air tersebar di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

c) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar danau/waduk/rawa. Luas kawasan perlindungan setempat ditetapkan minimal seluas ±59.918 hektar, meliputi:

1) Kawasan sempadan sungai, direncanakan berada pada semua wilayah kabupaten/kota yang dilewati oleh sungai, seluas ±23.583 hektar;
2) Kawasan sempadan pantai, direncanakan seluas ±8.786 hektar yang terdiri dari kawasan pesisir pantura dan pansela sejauh 100 meter dari garis pasang tertinggi; dan kawasan pesisir pulau-pulau kecil sejauh 50 meter dari garis pasang tertinggi;
3) Kawasan sekitar danau/waduk/rawa, direncanakan seluas ±24.618,2 hektar, yang terdiri dari kawasan sempadan pagar terhadap danau/waduk/rawa sejauh 50 meter dari titik pasang tertinggi danau/waduk/rawa; dan kawasan sempadan bangunan terhadap danau/waduk/rawa sejauh paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan waduk tersebar di 15 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Pati, Semarang, Pemalang, Tegal dan Brebes;
4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan pengembangan RTH tersebar di tiap kabupaten/kota, terdiri dari RTH publik dan RTH privat, dengan luas minimal 30% dari kawasan perkotaan. Proporsi RTH publik minimal 20% sedangkan RTH privat 10%.

d) Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya meliputi:

1) Daerah perlindungan plasma nutfah, tersebar di 29 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kota Magelang, Salatiga, Semarang, dan Tegal;
2) Kawasan perlindungan plasma nutfah perairan, tersebar di kabupaten/ kota sepanjang pantai utara dan pantai selatan.

e) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya.

Kawasan lindung ini terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, suaka alam laut dan perairan, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:

1) Kawasan cagar alam, taman wisata alam, dan suaka marga satwa tersebar di 4 konservasi wilayah, meliputi Pati, Surakarta, Cilacap dan Pemalang, dengan luas yang telah ditetapkan sebesar ±2.923,3 hektar. Sebaran kawasan ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3.
Sebaran Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa di Provinsi Jawa Tengah

No	Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa	Lokasi	Luas (Ha)
A	**Konservasi Wilayah I Pati**		
1	Cagar Alam Keling I a, b, c	Kabupaten Jepara	6,8
2	Cagar Alam Keling II, III	Kabupaten Jepara	61
3	Cagar Alam Kembang	Kabupaten Jepara	1,8
4	Cagar Alam Gunung Celering	Kabupaten Jepara	1328,4
5	Cagar Alam Bekutuk	Kabupaten Blora	25,4
6	Cagar Alam Cabak I/II	Kabupaten Blora	30
7	Cagar Alam Gunung Butak	Kabupaten Rembang	45,1
B	**Konservasi Wilayah II Surakarta**		
1	Cagar Alam Gebugan	Kabupaten Semarang	1,8
2	Cagar Alam Sepakung	Kabupaten Semarang	10
3	Cagar Alam Donoloyo	Kabupaten Wonogiri	8,3
4	Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan	Kabupaten Sragen	103,9
C	**Konservasi Wilayah III Cilacap**		
1	Cagar Alam Pantodomas	Kabupaten Wonosobo	4,1
2	Cagar Alam Telogo Dringo	Kabupaten Banjarnegara	26,1
3	Cagar Alam Telogo Sumurup	Kabupaten Banjarnegara	20,1
4	Cagar Alam Pringamba I / II	Kabupaten Banjarnegara	58
5	Cagar Alam Nusakambangan Barat	Kabupaten Cilacap	675
6	Cagar Alam Nusakambangan Timur	Kabupaten Cilacap	277
7	Cagar Alam Wijaya Kusuma	Kabupaten Cilacap	1
8	Cagar Alam Karangbolong	Kabupaten Cilacap	0,5
D.	**Konservasi Wilayah IV Pemalang**		
1	Cagar Alam Pagerwunung Darupono	Kabupaten Kendal	33,2
2	Cagar Alam Peson Subah I	Kabupaten Batang	10,4
3	Cagar Alam Peson Subah II	Kabupaten Batang	10
4	Cagar Alam Ulolanang Kecubung	Kabupaten Batang	69,7
5	Cagar Alam Bantarbolang	Kabupaten Pemalang	24,5
6	Cagar Alam Curug Bengkawah	Kabupaten Pemalang	1,5
7	Cagar Alam Moga	Kabupaten Pemalang	3,5
8	Cagar Alam Vak 53 Comal	Kabupaten Pemalang	29,1

No	Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa	Lokasi	Luas (Ha)
9	Cagar Alam Guci	Kabupaten Tegal	2
10	Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara	Kabupaten Tegal	6,6
11	Cagar Alam Telaga Renjeng	Kabupaten Brebes	48,5
	Jumlah		**2.923.3**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

2) Kawasan Taman Nasional ditetapkan seluas ±12.135 hektar, meliputi: a) Taman Nasional Gunung Merapi seluas ±6.410 hektar berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan sebagian Sleman (Provinsi DIY); b) Taman Nasional Gunung Merbabu seluas ±5.725 hektar berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Semarang; serta c) Taman Nasional Karimunjawa seluas ±111.625 hektar berada di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
3) Kawasan pelestarian alam berupa taman hutan raya dan kebun raya, yaitu kawasan Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegoro I berada di Berjo – Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar seluas ± 2.318 Hektar, dan Kebun Raya Baturaden di Kabupaten Banyumas seluas ±150 hektar.
4) Pengembangan taman wisata alam dan taman wisata alam laut meliputi: Taman Wisata Alam Gunung Selok di Kabupaten Cilacap; Taman Wisata Alam Tlogo Warno/Pengilon di Kabupaten Wonosobo; Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar; Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kabupaten Rembang; Taman Wisata Alam Laut Ujung Negoro-Roban di Kabupaten Batang;
5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan untuk melindungi 597 benda cagar budaya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Benda cagar budaya tersebut terdiri dari candi, situs purbakala, benteng kuno, makam kuno, masjid, gereja, klenteng, dan bangunan bersejarah lainnya;
6) Daerah pantai berhutan bakau seluas ±10.718,51 hektar tersebar di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota Semarang. Kawasan mangrove terluas di pantai selatan berada di Kabupaten Cilacap (77,99%), sedangkan di pantai utara berada di Kabupaten Demak (9,19%).

2.1.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 36.516.035 jiwa, naik sebesar 4,1 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk 2010 atau rata-rata sebanyak 400 ribu jiwa setiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah per tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,17 persen meningkat 0,8 persen poin dibandingkan periode 2000-2010 sebesar 0,37 persen. Adapun jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim tahun 2020–2023 sebanyak 37.032.410 jiwa.

Tabel 2.4.
Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Provinsi Jawa Tengah, 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju pertumbuhan per tahun (%)	Rasio jenis kelamin
2018	34.358.487	0,77	98,49
2019	34.552.331	0,76	98,49
2020	36.516.035	1,17	101,15
2021	36.742.501	0,83	101,11
2022	37.032.410	0,81	101,07

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2021-2023

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada periode 2018-2022 terdapat 19 kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Pada tahun 2022, kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Cilacap yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26 persen. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk terbesar kedua adalah Kabupaten Purbalingga dengan laju pertumbuhan sebesar 1,20 persen, diikuti Kabupaten Banjarnegara 1,15 persen dan Kabupaten Pemalang 1,11 persen. Sedangkan 16 kabupaten/kota yang lain mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk terendah sebesar 0,05 persen terdapat di dua kabupaten/kota antara lain Kota Magelang dan Kota Surakarta.

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)
Tahun 2018-2022

Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab cilacap	1.712.871	1.718.824	1.944.857	1.963.824	1.988.622
Kab Banyumas	1.672.817	1.685.078	1.776.918	1.789.630	1.806.013
Kab Purbalingga	921.639	929.403	998.561	1.007.794	1.019.840
Kab Banjarnegara	914.523	918.715	1.017.767	1.026.866	1.038.718
Kab Kebumen	1.190.280	1.192.013	1.350.438	1.361.913	1.376.825
Kab Purworejo	713.761	714.816	769.880	773.588	778.257
Kab Wonosobo	784.353	786.703	879.124	886.613	896.346
Kab Magelang	1.274.881	1.284.627	1.299.859	1.305.512	1.312.573
Kab Boyolali	976.026	980.086	1.062.713	1.070.247	1.079.952
Kab Klaten	1.166.748	1.169.330	1.260.506	1.267.272	1.275.850
Kab Sukoharjo	881.673	887.484	907.587	911.603	916.627

Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab Wonogiri	953.250	954.646	1.043.177	1.049.292	1.057.087
Kab Karanganyar	875.946	882.473	931.963	938.808	947.642
Kab Sragen	884.448	886.196	976.951	983.641	992.243
Kab Grobogan	1.366.498	1.371.423	1.453.526	1.460.873	1.470.150
Kab Blora	858.153	860.957	884.333	886.147	888.224
Kab Rembang	631.293	635.294	645.333	647.766	650.770
Kab Pati	1.248.286	1.253.363	1.324.188	1.330.983	1.339.572
Kab Kudus	858.153	867.154	849.184	852.443	856.472
Kab Jepara	1.236.006	1.252.090	1.184.947	1.188.510	1.192.811
Kab Demak	1.147.557	1.157.421	1.203.956	1.212.377	1.223.217
Kab Semarang	1.036.929	1.049.002	1.053.094	1.059.844	1.068.492
Kab Temanggung	762.776	768.405	790.174	794.403	799.764
Kab Kendal	960.322	966.313	1.018.505	1.025.020	1.033.367
Kab Batang	759.529	764.970	801.718	807.005	813.791
Kab Pekalongan	888.491	893.290	968.821	976.504	986.455
Kab Pemalang	1.294.639	1.296.559	1.471.489	1.484.209	1.500.754
Kab Tegal	1.431.375	1.433.464	1.596.996	1.608.611	1.623.595
Kab Brebes	1.795.513	1.800.142	1.978.759	1.992.685	2.010.617
Kota Magelang	121.372	121.555	121.526	121.610	121.675
Kota Surakarta	515.865	517.045	522.364	522.728	523.008
Kota Salatiga	190.872	193.231	192.322	193.525	195.065
Kota Semarang	1.779.757	1.806.319	1.653.524	1.656.564	1.659.975
Kota Pekalongan	303.235	305.505	307.150	308.310	309.742
Kota Tegal	248.008	248.635	273.825	275.781	278.299
Jawa Tengah	34.358.487	34.552.531	36.516.035	36.742.501	37.032.410

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak homogen di setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kabupaten/kota dan kemungkinan adanya disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah angka pertumbuhan penduduk. Meskipun angka pertumbuhan penduduk di Jawa tengah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, akan tetapi tidak berarti peningkatan jumlah penduduk juga rendah. Secara absolut pertumbuhan penduduk Jawa Tengah lebih besar dibandingkan provinsi lain. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang memang sudah sangat besar bila dibandingkan provinsi lain terutama provinsi di luar Pulau Jawa.

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan dan masih harus dihadapi oleh Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Terdapat beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan pembangunan wilayah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

Tabel 2.6.
Kepadatan Penduduk Menurut eks-Karesidenan di Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

Tahun	Jawa Tengah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) eks- karesidenan					
		Banyumas	Kedu	Surakarta	Pekalongan	Pati	Semarang
2018	1.047	1.012	925	1.095	1.199	853	1.197
2019	1.053	1.018	929	1.099	1.203	860	1.209
2020	1.113	1.112	994	1.174	1.320	863	1.214
2021	1.120	1.122	1.000	1.180	1.329	866	1.221
2022	1.129	1.134	1.008	1.189	1.342	870	1.228

Sumber: BPS Jawa Tengah 2022 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020 – 2023)

Kepadatan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan eks-Keresidenan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 eks-Keresidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 1.342 jiwa/km2 diikuti eks-Keresidenan Semarang 1.228 jiwa/km2, sedangkan eks-Keresidenan Pati memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 870 jiwa/km2. Eks-Keresiden Pekalongan memiliki kepadatan penduduk tertinggi terutama didukung oleh Kota Pekalongan dengan kepadatan penduduk 6.845 jiwa/km2 yang merupakan wilayah terpadat keempat di Jawa Tengah dan Kota Tegal dengan kepadatan 7.014 jiwa/km2 yang merupakan wilayah terpadat ketiga di Jawa Tengah. Untuk kota dengan penduduk

terpadat di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk 11.367 jiwa/km2. Kota Surakarta merupakan pusat ekonomi dari daerah di sekitarnya. Para pendatang yang mencari rezeki di Kota Surakarta tersebut pada akhirnya memilih untuk bermukim di kota tersebut sehingga menambah populasi di wilayah yang luasnya hanya 46,01 km^2.

Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2018-2022 angka beban ketergantungan di Jawa Tengah Fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2022 angka beban ketergantungan Jawa Tengah sebesar 53,71 persen, artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 53 penduduk tidak produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas).Berdasarkan komposisi usia penduduk, menurunnya angka beban ketergantungan lebih dipengaruhi oleh menurunnya proporsi penduduk usia 0-14 tahun yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 proporsi penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 23,02 persen dan terus menurun hingga tahun 2022 menjadi 21,94 persen. Di sisi lain, proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas berfluktuasi dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah maupun proporsinya.

Pada tahun 2018 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 8,65 persen, meningkat menjadi 8,90 persen pada tahun 2019, menurun pada tahun 2020 menjadi 7,72 persen, namun kemudian terus meningkat menjadi 8,10 persen pada tahun 2021 dan mencapai 8,48 persen pada tahun 2022. Sementara proporsi penduduk usia produktif sendiri juga berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, proporsinya penduduk usia 15-64 tahun mencapai 68,33 persen, terus meningkat menjadi 69,85 persen pada tahun 2020 dan kemudian menunjukkan penurunan menjadi 69,58 persen pada tahun 2022.

Tabel 2.7.
Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65+ Tahun	Angka Beban Ketergantungan (%)
2018	7.909.540	23.476.490	2.972.460	46,35
2019	7.839.940	23.636.420	3.076.170	46,18
2020	8.190.778	24.506.691	2.818.566	43,15

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65+ Tahun	Angka Beban Ketergantungan (%)
2021	8.148.545	25.619.556	2.924.400	43,42
2022	8.123.792	25.768.441	3.140.177	53,71

Sumber: BPS Jawa Tengah 2022 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020 – 2023)

Peningkatan proporsi penduduk usia tua dapat dimaknai sebagai hal yang positif karena hal tersebut menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik sehingga penduduk memiliki usia dan harapan hidup yang lebih panjang. Di sisi lain, hal tersebut menjadi tantangan karena jika penduduk usia tua tersebut semakin banyak maka akan semakin meningkatkan angka beban ketergantungan.

Peningkatan proporsi penduduk usia produktif disebut sebagai bonus demografi. Kondisi ini juga merupakan dua sisi mata uang yang saling berseberangan. Bonus demografi bisa menguntungkan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi ketika sebagian besar penduduk usia produktif tersebut terserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya jika lapangan usaha yang ada saat ini ternyata tidak mampu menyerap sebagian besar dari penduduk usia produktif tersebut, maka justru akan mendorong peningkatan instabilitas sosial dan politik. Bonus demografi yang terjadi di Jawa Tengah sepertinya mulai berakhir. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan 0,38 poin dari tahun sebelumnya.

Hal ini perlu segera diwaspadai oleh pemerintah dengan mendorong peningkatan kualitas penduduk usia produktif yang saat ini proporsinya masih sangat besar. Jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik, maka akan mampu menanggung beban ketergantungan yang kemungkinan akan semakin besar di masa mendatang.

2.2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah di Jawa Tengah digambarkan dengan kondisi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem. Persentase penduduk miskinpada tahun 2018 – 2019 menurun dari 11,32% (3.897,20 ribu orang) menjadi 10,58% (3.679,40 ribu orang). Namun mengalami peningkatan pada periode Maret 2020 menjadi 11,41% (3.980,90 ribu orang) dan mengalami peningkatan lagi pada periode September 2020 menjadi 11,84% (4.119,93 ribu orang). Kenaikan tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Seiring dengan upaya intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 11,25 persen pada September 2021 menjadi 10,98 persen pada September 2022. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 75,78 ribu orang dari 3.934,01 ribu orang (September 2021) menjadi 3.858,23 ribu orang (September 2022). Periode September 2021 - September 2022, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari 10,16% menjadi 10,02% atau bertambah sebanyak 5,08 ribu orang. Sedangkan

persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 12,44% menjadi 12,05% atau berkurang sebanyak 80,86 ribu orang.

Tabel 2.8.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah
Maret 2018 – September 2022

Tahun	Bulan	Penduduk Miskin					
		(ribu orang)			(%)		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perko-taan	Perde-saan	Perkotaan + Perdesaan
2018	Maret	1.716,16	2.181,04	3.897,20	9,73	12,99	11,32
	September	1.709,56	2.157,86	3.867,42	9,67	12,8	11,19
2019	Maret	1.633,96	2.109,26	3.743,23	9,20	12,48	10,80
	September	1.602,26	2.077,15	3.679,40	8,99	12,26	10,58
2020	Maret	1.805,65	2.175,25	3.980,90	10,09	12,80	11,41
	September	1.890,49	2.229,44	4.119,93	10,57	13,20	11,84
2021	Maret	1.908,29	2.201,44	4.109,73	10,58	13,07	11,79
	September	1.847,09	2.086,92	3.934,01	10,16	12,44	11,25
2022	Maret	1.818.25	2.013,20	3.831,44	9,92	12,04	10,93
	September	1.852,17	2.006,06	3.858,23	10,02	12,05	10,98

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Maret 2018 - September 2022

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional.

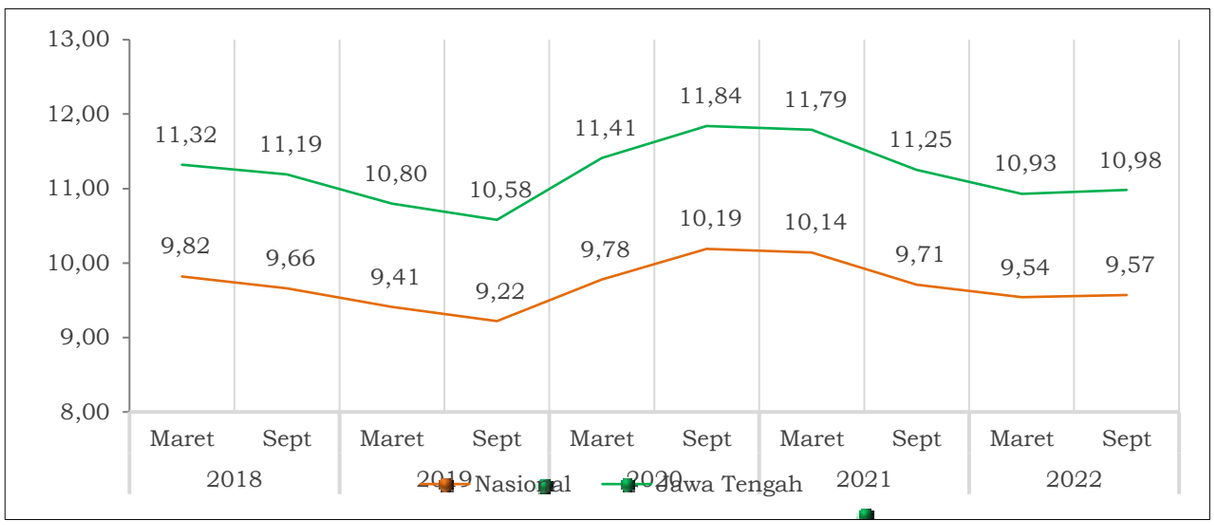

Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.2.
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018 – 2022

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi

persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota mendasarkan data per Maret tahun 2022 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 17 kabupaten meliputi Kabupaten Magelang, Blora, Purworejo, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Sragen, Rembang, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Brebes, Wonosobo, Kebumen, Wonogiri dan Cilacap;
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 3 kabupaten meliputi Kabupaten Karanganyar, Boyolali dan Pekalongan;
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 15 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Jepara, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kota Magelang, Kabupaten Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kendal.

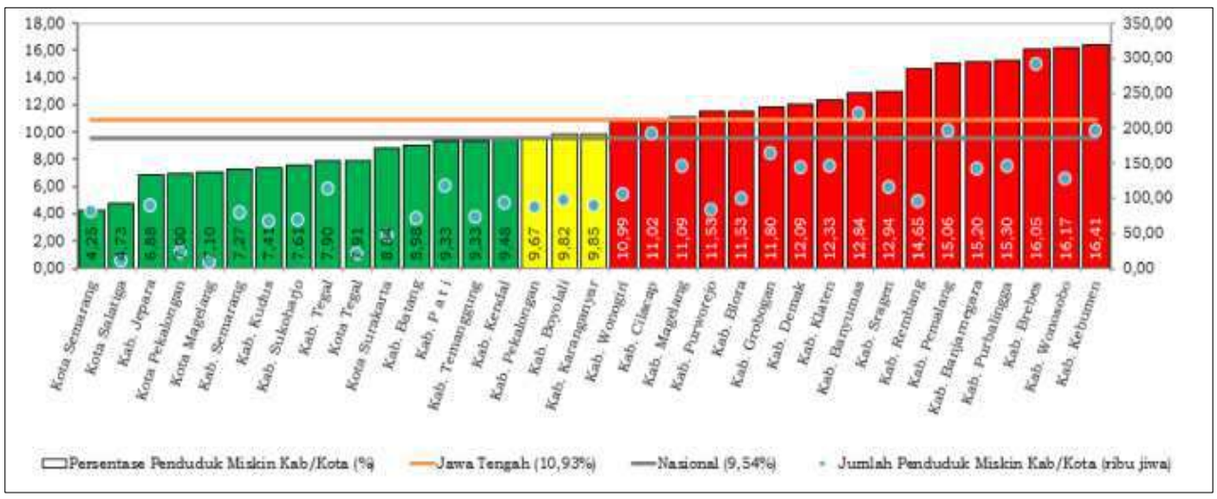

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.3.
Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2022

Dilihat dari rata-rata kinerja penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada kurun waktu lima tahun (2018-2022), kabupaten dengan kinerja yang paling tinggi adalah Kabupaten Banyumas yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,84 persen. Rata-rata kinerja tingkat kemiskinan kabupaten/kota tahun 2018-2022 sebagaimana gambar berikut.

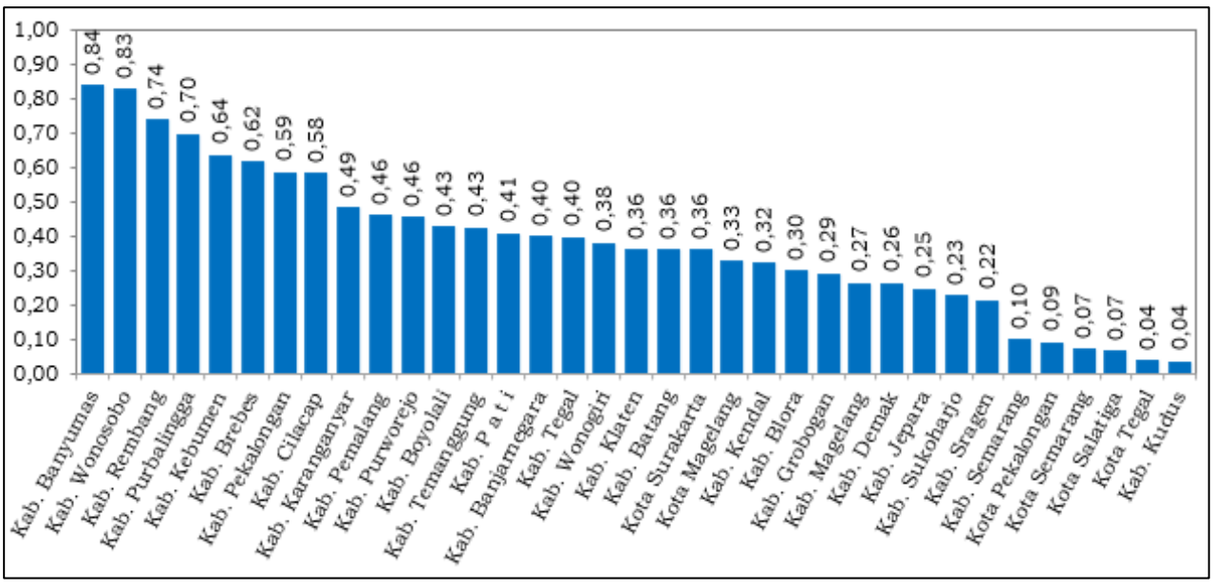

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018-2022

Gambar 2.4.
Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (%)

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Jawa Tengah periode September 2022 sebesar Rp. 464.879 per kapita per bulan, meningkat 9,83 persen dibandingkan dengan September 2021 yang sebesar Rp. 423.264 per kapita per bulan.

Pada daerah perkotaan Garis Kemiskinan periode September 2022 sebesar Rp. 469.623 per kapita per bulan atau naik 9,96 persen dari kondisi September 2021 yang sebesar Rp. 427.099 per kapita per bulan. Sedangkan Garis Kemiskinan di perdesaan periode September 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 9,70 persen menjadi sebesar Rp. 459.714 per kapita per bulan dibandingkan dengan September 2021 yang sebesar Rp. 419.064 per kapita per bulan.

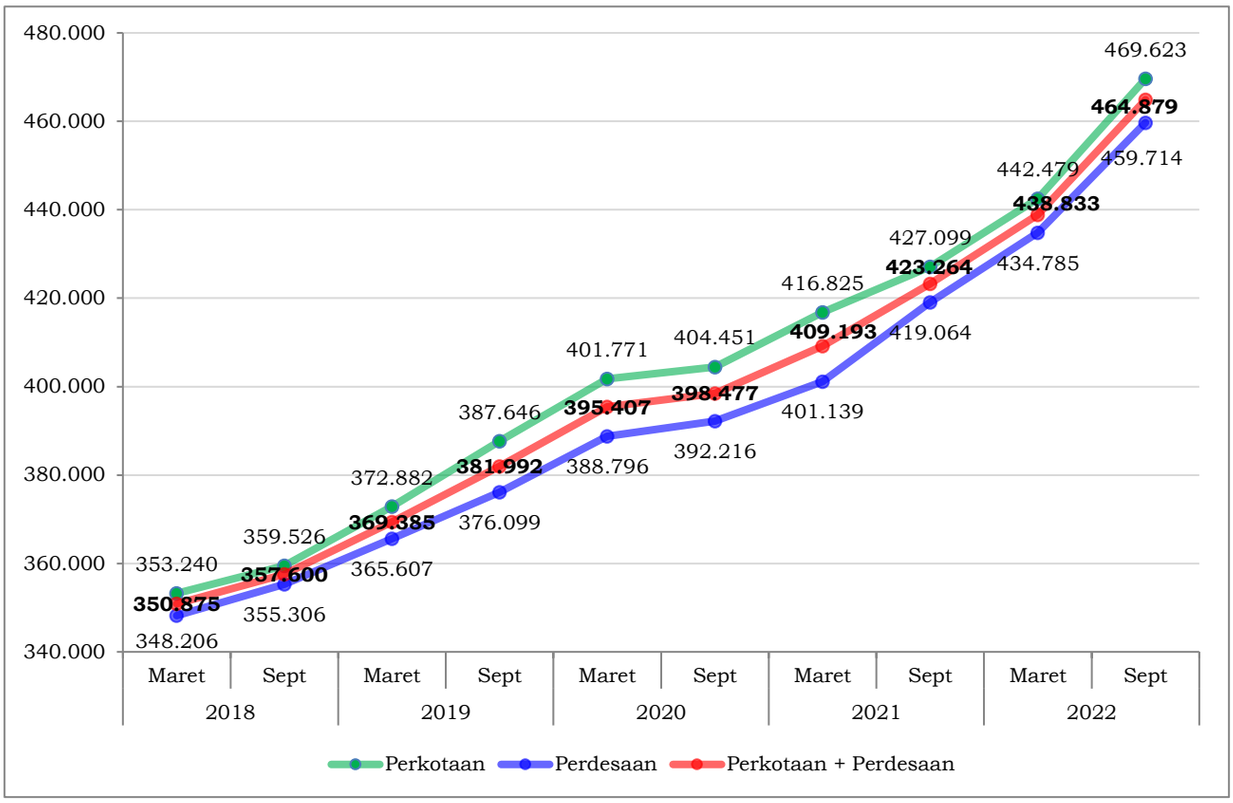

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018 – 2022

Gambar 2.5.
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Garis kemiskinan dipengaruhi komponen bahan makanan dan non makanan. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan masih jauh lebih besar (dominan) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Terdapat tiga komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan pada periode September 2022 baik di perkotaan maupun perdesaan yaitu beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras. Komoditi lainnya relatif berbeda antara perkotaan dan perdesaan. Untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, dan listrik.

Tabel 2.9.
Komoditi Makanan dan Bukan Makanan yang Memberi Pengaruh Besar Pada Kenaikan Garis Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2022

Perkotaan		**Perdesaan**	
Komoditi	**Kontribusi (%)**	**Komoditi**	**Kontribusi (%)**
Makanan	**74,66**	**Makanan**	**75,79**
Beras	18,16	Beras	19,58
Rokok kretek filter	9,55	Rokok kretek filter	8,76
Daging ayam ras	4,07	Daging ayam ras	4,29
Telur ayam ras	4,01	Telur ayam ras	4,12
Tempe	2,70	Tempe	2,78
Gula pasir	2,65	Tahu	2,54
Tahu	2,55	Gula pasir	2,44
Kue basah	2,54	Mie instan	2,40

Perkotaan		Perdesaan	
Komoditi	**Kontribusi (%)**	**Komoditi**	**Kontribusi (%)**
Mie instan	2,52	Bawang Merah	2,37
Bawang Merah	2,24	Cabe rawit	2,18
Lainnya	23,67	Lainnya	24,34
Bukan Makanan	**25,34**	**Bukan Makanan**	**24,21**
Perumahan	7,18	Perumahan	8,31
Bensin	4,73	Bensin	3,77
Listrik	2,30	Listrik	1,35
Pendidikan	2,00	Perlengkapan mandi	1,21
Perlengkapan mandi	1,26	Pendidikan	1,15
Pajak kendaraan bermotor	0,68	Kayu bakar	0,78
Kesehatan	0,65	Sabun Cuci	0,77
Lainnya	6,55	Lainnya	6,87

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Posisi relatif persebaran garis kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 (Maret) terhadap provinsi dan nasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Garis Kemiskinan Rendah, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi dan nasional, terdapat di 19 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Banjarnegara, Temanggung, Magelang, Wonogiri, Boyolali, Sragen, Cilacap, Blora, Wonosobo, Purworejo, Purbalingga, Kebumen, Karanganyar, Pemalang, Grobogan, Tegal, Kendal dan Sukoharjo
2. Garis Kemiskinan Sedang, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di atas garis kemiskinan provinsi dan di bawah garis kemiskinan nasional, terdapat di 10 kabupaten, yaitu Kabupaten Rembang, Semarang, Pekalongan, Banyumas, Jepara, Klaten, Demak, Brebes, Kudus dan Pati;
3. Garis Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang berada di atas garis kemiskinan provinsi dan nasional, terdapat di 6 kota, yaitu Kota Pekalongan, Salatiga, Surakarta, Tegal, Magelang dan Semarang.

Kabupaten/kota dengan garis kemiskinan paling rendah adalah Kabupaten Batang sebesar 341.252 rupiah per kapita per bulan, sedangkan garis kemiskinan paling tinggi adalah Kota Semarang sebesar 589.598 rupiah per kapita per bulan.

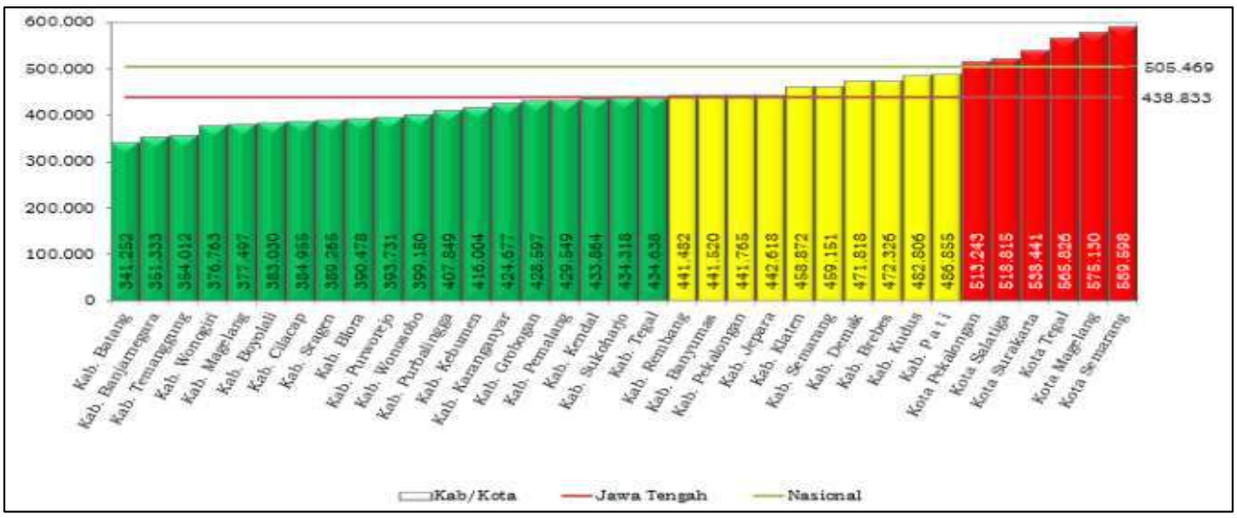

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.6.
Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2018 – 2019 menurun dari 1,847 menjadi 1,434 pada September 2019, namun pada September 2020 meningkat menjadi 1,835 dan meningkat kembali menjadi 1,938 pada September 2021 (naik 0,103 dibandingkan September 2020). Pada September 2022, P1 Provinsi Jawa Tengah turun menjadi 1,753 (turun sebesar 0,185 dibandingkan dengan September 2021). Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) September 2022 di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Pada September 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan sebesar 1,640 dari 1,746 (turun 0,106 dibandingkan September 2021) sedangkan di perdesaan sebesar 1,879 dari 2,147 (turun 0,268 dibandingkan September 2021). Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

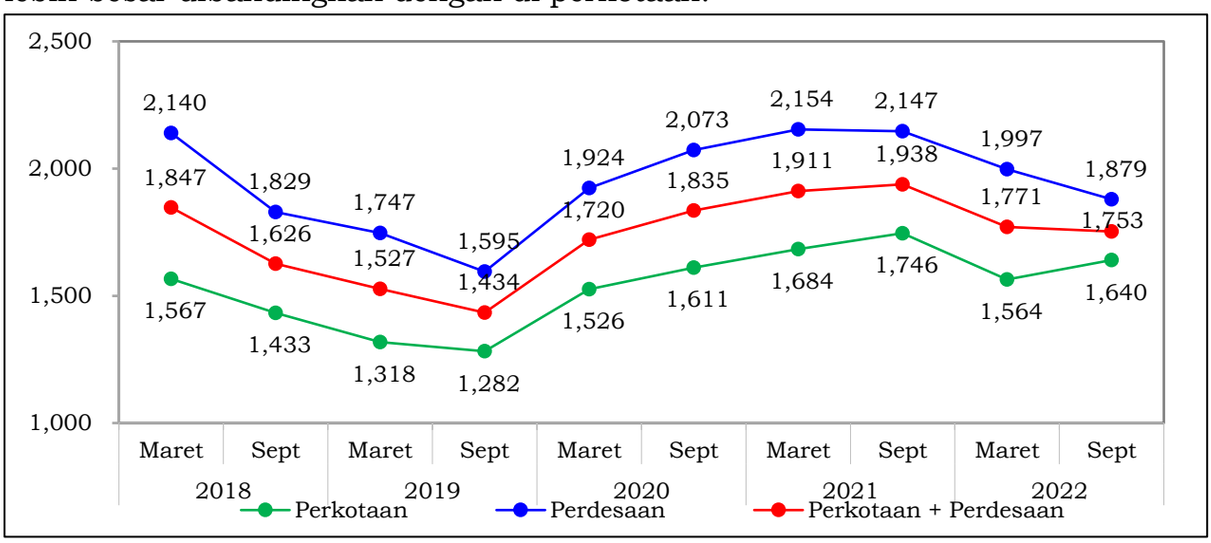

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018 – 2022 (September)

Gambar 2.7.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota pada periode Maret 2022, apabila dibandingkan dengan P1 Provinsi sebesar 1,77 dan P1 Nasional sebesar 1,59 diketahui bahwa Kabupaten Kebumen memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi sebesar 3,41 dan Kota Magelang terendah sebesar 0,47.

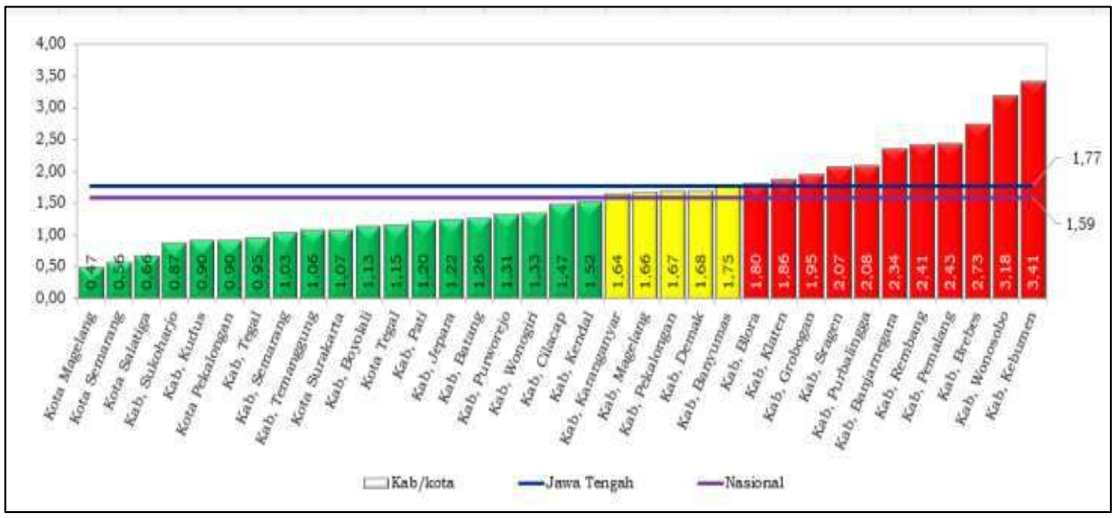

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.8.
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

Posisi relatif P1 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebagai berikut:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 diatas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten meliputi Kabupaten Purbalingga, Sragen, Wonosobo, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Brebes, Kebumen, Klaten, Blora dan Grobogan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 diatas nasional dan dibawah provinsi, sebanyak 5 kabupaten yaitu Kabupaten Demak, Banyumas, Pekalongan, Karanganyar dan Magelang;
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 19 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kabupaten Jepara, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Batang.

Selain dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018 – 2019 menurun dari 0,448 menjadi 0,279, namun meningkat pada September 2020 menjadi 0,431 dan meningkat kembali pada September 2021 menjadi 0,459. Periode September 2022, P2 Provinsi Jawa Tengah turun menjadi 0,422 (turun sebesar 0,037 dibandingkan dengan September 2021). Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai P2 pada Bulan September 2022 di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Periode September 2022, nilai P2 untuk daerah perkotaan sebesar 0,407 turun 0,012 poin dibandingkan September 2021.

Sedangkan pada periode yang sama nilai P2 untuk daerah perdesaan mencapai sebesar 0,439 turun 0,063 poin dibandingkan September 2021.

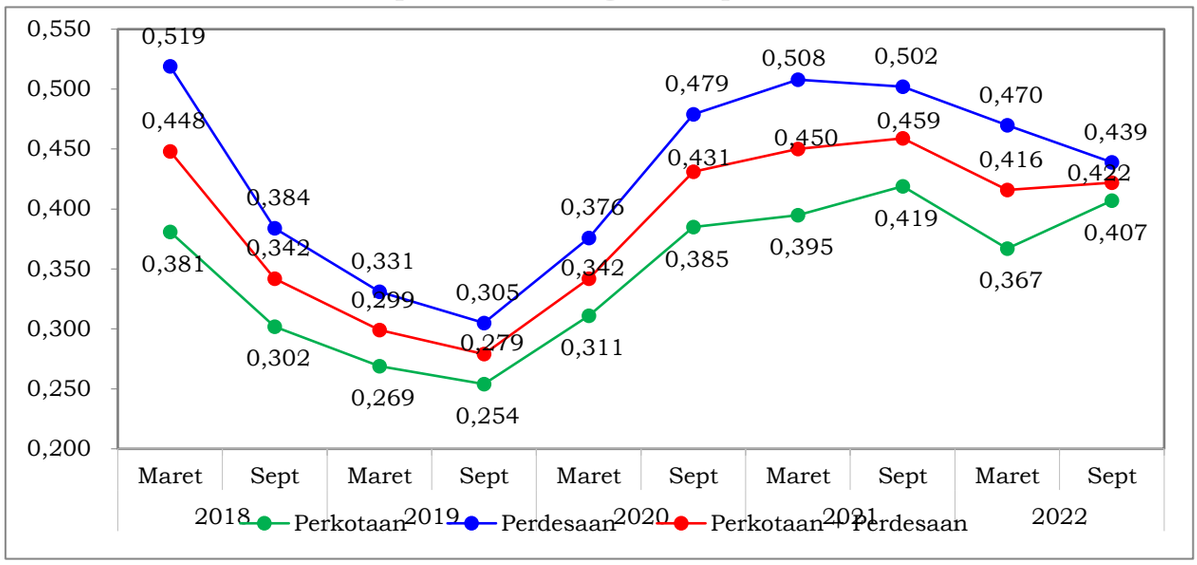

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.9.
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota pada periode Maret 2022, apabila dibandingkan dengan P2 Provinsi sebesar 0,42 dan P2 Nasional sebesar 0,39 diketahui bahwa Kabupaten Kebumen memiliki Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi sebesar 1,02 dan Kota Magelang terendah sebesar 0,06.

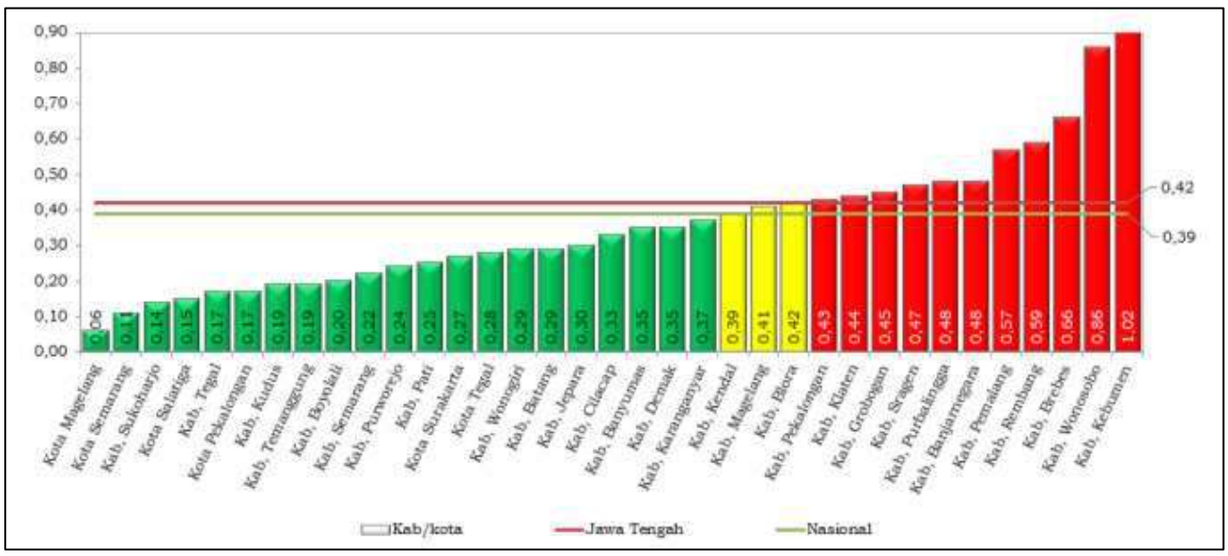

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.10.
Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebagai berikut:

1. Indeks Keparahan Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di atas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten meliputi, Kabupaten Purbalingga, Grobogan, Klaten, Pekalongan, Sragen, Wonosobo, Rembang, Brebes, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen;

2. Indeks Keparahan Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah nasional dan diatas provinsi, sebanyak 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Magelang, Blora dan Kendal;
3. Indeks Keparahan Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 21 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kabupaten Jepara, Pati, Semarang, Tegal, Sukoharjo, Kudus, Purworejo, Cilacap, Wonogiri, Karanganyar, Boyolali, Temanggung, Batang, Banyumas dan Demak.

Jika dibandingkan dengan Provinsi se Jawa-Bali, perubahan penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah periode September 2021 – September 2022 sebesar 0,27 persen atau menduduki urutan ke-1 dari 7 Provinsi se Jawa-Bali.

Tabel 2.10.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun Periode September 2021 – September 2022

No.	Provinsi	Periode				Perubahan Kenaikan	
		September 2021		September 2022			
		(Ribu Org)	(%)	(Ribu Org)	(%)	(Ribu Org)	(%)
1	JAWA TENGAH	3.934,01	11,25	3.858,23	10,98	-75,78	-0,27
2	JAWA TIMUR	4.259,60	10,59	4.236,51	10,49	-23,09	-0,10
3	BANTEN	852,28	6,50	829,66	6,24	-22,62	-0,26
4	DI YOGYAKARTA	474,49	11,91	463,63	11,49	-10,86	-0,42
5	BALI	211,46	4,72	205,36	4,53	-6,10	-0,19
6	DKI JAKARTA	498,29	4,67	494,93	4,61	-3,36	-0,06
7	JAWA BARAT	4.004,86	7,97	4.053,62	7,98	48,76	0,01

Sumber: BPS, 2022

Dengan membandingkan kondisi kemiskinan pada wilayah yang setara dengan Provinsi Jawa Tengah dari variabel persentase penduduk miskin tahun 2021 pada rentang 6,84 persen sampai dengan 11,86 persen, sebanyak 11 provinsi berada kelompok yang sama dengan Jawa Tengah, dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 9,25 persen. Dalam wilayah yang setara persentase penduduk miskin Jawa Tengah lebih tinggi 2,00 poin dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara. Sedangkan jika dilihat dari variabel perubahan persentase penduduk miskin tahun 2020-2021 pada rentang -0,53 sampai dengan -0,19 poin, sebanyak 10 provinsi berada dalam wilayah yang setara dengan Jawa Tengah, dengan rata-rata perubahan sebesar -0,86 poin. Dari variabel ini, angka Jawa Tengah tidak lebih baik dibandingkan dengan rata-rata wilayah yang setara atau berada lebih rendah 0,27 poin di bawah rata-rata. Dan jika membandingkan antara peresentase kemiskinan dan perubahan persentase kemiskinan, ada tiga provinsi yang setara dengan Jawa Tengah, yaitu Lampung, Sumatra Utara dan Jawa Timur.

Tabel 2.11.
Persentase Kemiskinan Tahun 2021 dan Perubahan Persentase Kemiskinan Tahun 2021 – 2022 Di Wilayah Setara

Provinsi	Persentase Kemiskinan (%)	Perubahan Persentase Kemiskinan (poin)	Provinsi
Kalimantan Barat	6,84	-1,69	Maluku
Riau	7,00	-1,09	Lampung
Sulawesi Utara	7,36	-0,89	DIY
Jambi	7,67	-0,88	Sulawesi Tengah
Jawa Barat	7,97	-0,87	Bengkulu
Sumatera Utara	8,49	-0,87	Jawa Timur
Sulawesi Selatan	8,53	-0,77	NTT
Jawa Timur	10,59	-0,65	Sumatera Utara
Jawa Tengah	11,25	-0,59	Jawa Tengah
Lampung	11,67	-0,59	Maluku Utara
Sulawesi Tenggara	11,74	-0,58	Kalimantan Utara
Sulawesi Barat	11,85		
Rata-rata	**9,25**	**-0,86**	**Rata-rata**

Sumber: BPS, 2022(hasil analisis)

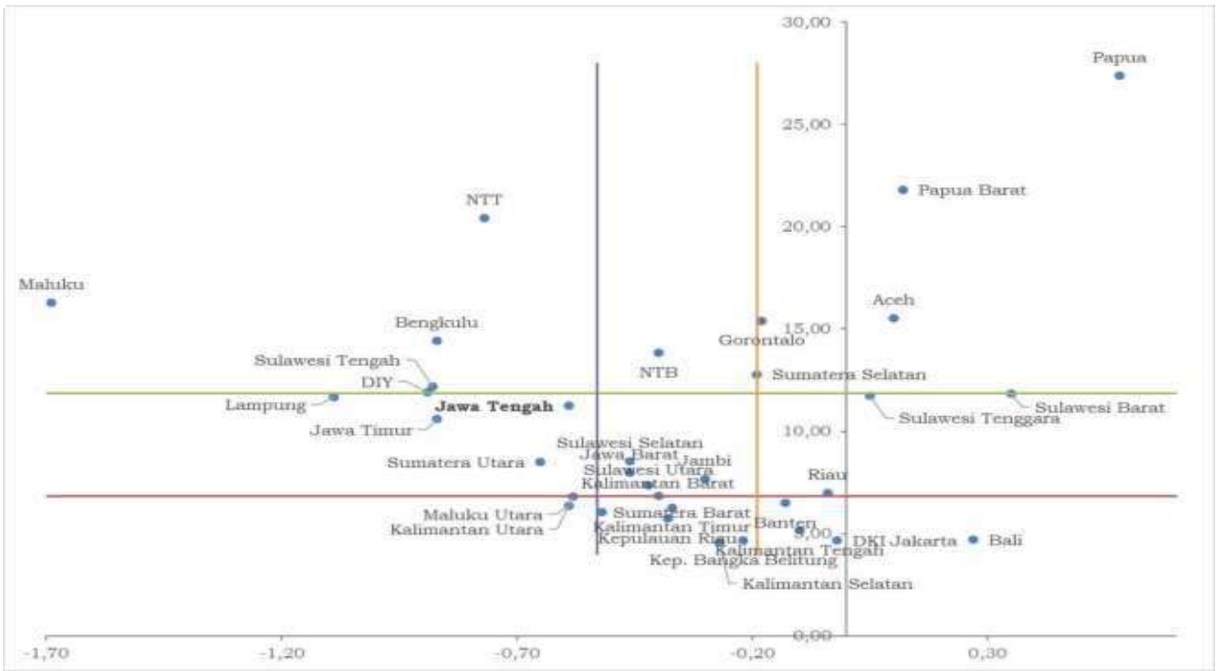

Sumber: BPS, 2021 (hasil analisis)

Gambar 2.11.
Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 – 2022 dengan Wilayah Setara

Selain kemiskinan, gambaran kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 berada di atas nasional, sedangkan pada tahun 2022 berada di bawah nasional. Persentase penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mengalami penurunan sebanyak 0,31 persen dari 2,28 persen pada tahun 2021 menjadi 1,97 persen pada tahun 2022. Secara absolut, jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah berkurang sebanyak 105,972 ribu orang dari 795,506 ribu orang pada tahun 2021 menjadi 689,714 ribu orang pada tahun 2022. Penurunan tersebut sejalan dengan berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem, sesuai dengan mandatori kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Tabel 2.12.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 - 2022

Provinsi	Persentase Kemiskinan Ekstrem 2021	Persentase Kemiskinan Ekstrem 2022	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem 2021 (ribu jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem 2022 (ribu jiwa)
JAWA TENGAH	2,28	1,97	795,506	689,714
NASIONAL	2,14	2,04	5.800,05	5.590,72

Sumber: BPS, 2022

Persebaran penduduk miskin ekstrem di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional dan kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin ekstrem di kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin ekstrem di atas provinsi dan nasional sebanyak 15 kabupaten meliputi Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Brebes, Rembang, Pemalang, Blora, Sragen, Kendal, Grobogan, Magelang, Klaten, Purbalingga, Cilacap, Demak dan Pekalongan
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin ekstrem di bawah provinsi dan nasional sebanyak 20 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Karanganyar, Jepara, Wonogiri, Batang, Banjarnegara, Banyumas, Semarang, Purworejo, Temanggung, Pati, Tegal, Kudus, Boyolali, Sukoharjo, Kota Salatiga, Tegal, Surakarta, Pekalongan, Semarang dan Magelang.

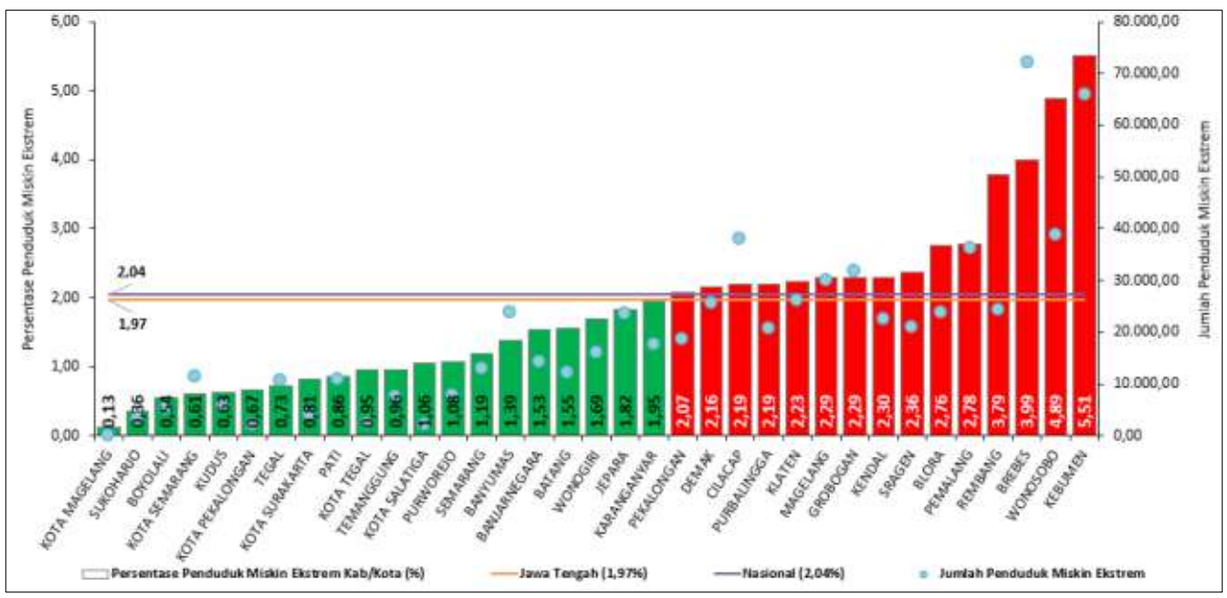

Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.12.
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

Pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2022 tentang Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 telah menetapkan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024.

Tabel 2.13.
Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah Tahun 2022-2024

NO	TAHUN	KABUPATEN/KOTA PRIORITAS	JUMLAH
1	2022	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sregen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes	19
2	2023-2024	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sregen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Temanggung, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Magelang dan Kota Salatiga	35

Sumber: BPS, 2022

2.3. Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian daerah Jawa Tengah dapat digambarkan dari beberapa indikator kinerja antara lain pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, inflasi, rasio Gini, indeks Williamson, dan indeks daya saing daerah (IDSD). Kinerja perekonomian daerah Jawa Tengah didukung dengan kinerja sektor-sektor unggulan daerah yaitu pertanian, koperasi dan UKM, perdagangan, industri pengolahan, dan pariwisata. Selain itu juga, perekonomian daerah Jawa Tengah didukung oleh iklim investasi yang baik, kondisi infrastruktur yang mantap dan transportasi yang menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, serta pembangunan perekonomian berbasis desa. Gambaran keseluruhan kondisi perekonomian daerah sebagaimana diuraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kemudian adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian.

Pembangunan ekonomi Jawa Tengah semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan mulai dari Tahun 2016-2019, dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Namun pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat dampak pandemi covid-19 yang juga dialami oleh semua daerah. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi jawa tengah turun sebesar minus 2,65 persen, penurunan juga terlihat pada PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Tahun 2021 dan Tahun 2022 perkembangan ekonomi sudah semakin membaik seiring menurunnya angka kasus covid-19 dan banyaknya masyarakat yang sudah vaksin, sehingga mobilitas masyarakat dapat terus meningkat. Capaian Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,31 persen, meningkat dari capaian Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,33 persen. Capaian ini sudah mendekati capaian sebelum pandemi yaitu sebesar 5,36 persen Tahun 2019.

Nilai PDRB ADHK pada tahun 2021 sebesar Rp997.345 miliar meningkat dari tahun 2020 yang sebesar Rp965.225 miliar. Dan pada tahun 2022 nilai PDRB ADHK kembali meningkat mencapai sebesar Rp1.050.322 miliar. Selanjutnya, nilai PDRB ADHB pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.419.986 miliar meningkat dari tahun 2020 yang sebesar Rp1.347.922 miliar. Dan pada tahun 2022 nilai PDRB ADHB mencapai sebesar Rp1.560.899 miliar.

Tabel 2.14.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2022

No	Tahun	PDRB ADHK Tahun 2010 (Miliar Rupiah)	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%) (*c-to-c*)	
				Jateng	Nasional
1	2016	849.099	1.087.316	5,25	5,03
2	2017	893.750	1.172.794	5,26	5,07
3	2018	941.091	1.268.261	5,30	5,17
4	2019	991.516	1.360.960	5,36	5,02
5	2020	965.225	1.347.922	-2,65	-2,07
6	2021	997.345	1.419.986	3,33	3,70
7	2022	1.050.322	1.560.899	5,31	5,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023

Selama kurun waktu tahun 2011-2022, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif stabil. Pada tahun 2011–2013 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada di bawah nasional. Kemudian pada tahun 2014–2019 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah meningkat dan lebih tinggi dari nasional. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami penurunan akibat terjadi pandemi Covid-19 mencapai minus 2,65 persen, dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar minus 2,07 persen. Tahun 2021 ekonomi mulai membaik serta mengalami perbaikan (recovery) dan tumbuh sebesar 3,33 persen (nasional 3,70 persen). Dan pada tahun 2022 kembali meningkat baik Jawa Tengah dan Nasional sama-sama tumbuh sebesar 5,31 persen.

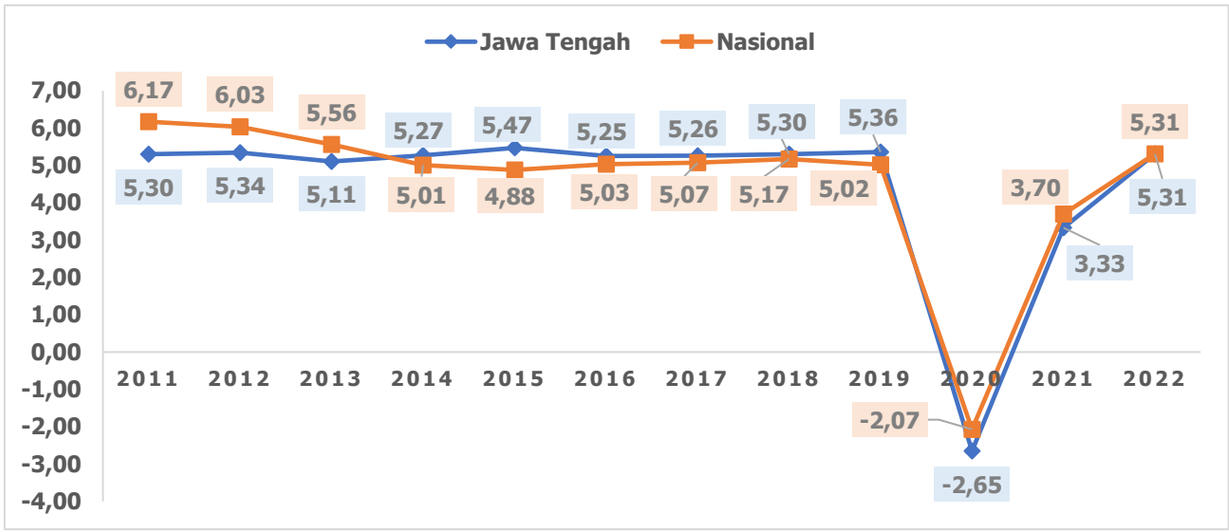

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.13.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional (c-to-c),
Tahun 2011 – 2022 (%)

Pertumbuhan ekonomi dilihat secara *year on year* (yoy) yang mana memperbandingkan pertumbuhan PDRB tahun sekarang (t) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (t-1) sering disebut dengan istilah laju pertumbuhan PDRB dalam setahun. Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan ke IV-2022 tumbuh sebesar 5,24 persen, menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,27 persen. Gambaran lebih detail terlihat bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sempat resesi dengan pertumbuhan negatif selama lebih dari dua triwulan berturut-turut yaitu pada triwulan II-2020 sampai dengan triwulan I-2021 karena pandemi Covid-19 dan kemudian mulai bangkit pada triwulan II-2021 sampai triwulan IV-2022. Bahkan capaian pertumbuhan ekonomi saat ini sudah menyamai capaian sebelum pandemi yaitu Tahun 2019. Capaian pada Triwulan IV 2022 ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5,01 persen (yoy). Pertumbuhan positif tersebut mengidentifikasikan pemulihan ekonomi Jawa Tengah masih terus berlanjut.

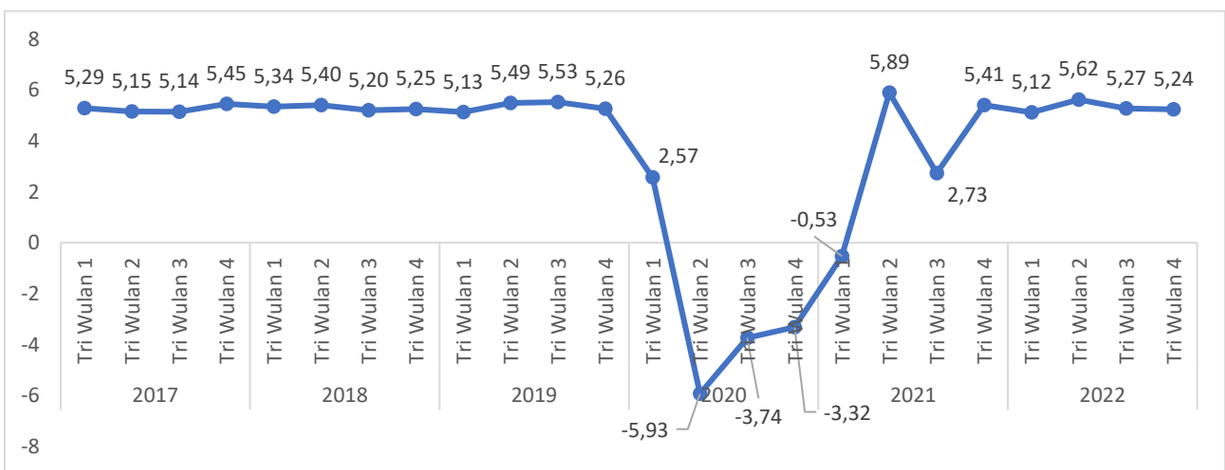

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.14.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (y-on-y) Per-Triwulan
Tahun 2017-2022 (Persen)

Adapun pertumbuhan ekonomi secara quarter-to-quarter (q-to-q) yang memperbandingkan pertumbuhan PDRB kuartal tahun sekarang (t) dibandingkan dengan kuartal tahun sebelumnya (t-1), dapat digambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama periode tahun 2017-2022 cukup fluktuatif. Dan pada triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 0,63 persen melambat jika dibandingkan triwulan III-2022 sebesar yang 1,34 persen.

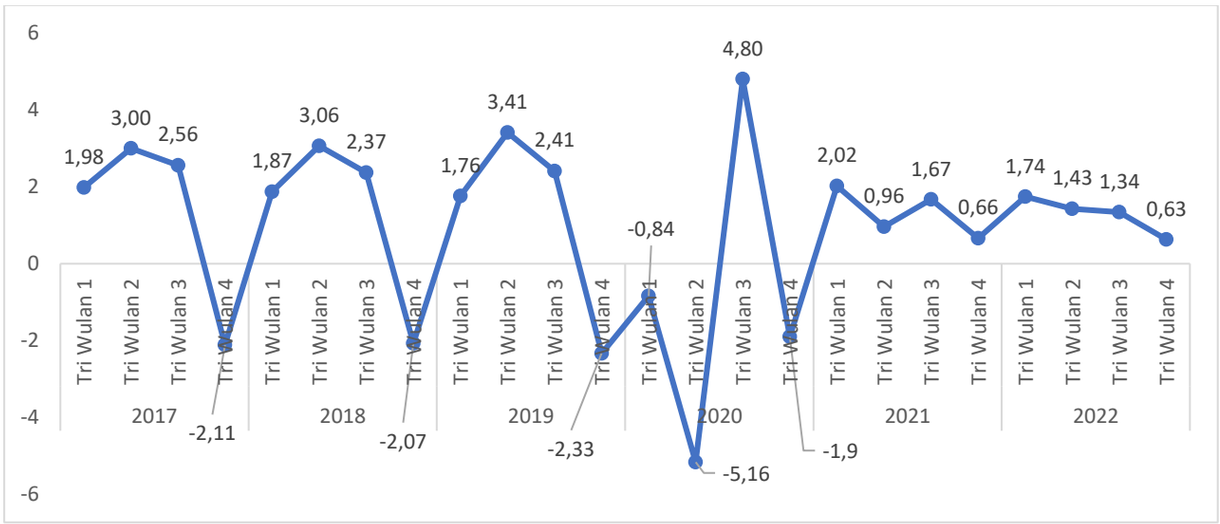

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.15.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah (q-to-q), Per-Triwulan Tahun 2017 -2022 (%)

Jika dibandingkan dengan provinsi lain se pulau jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (Triwulan IV 2022 secara yoy) rata-rata lebih tinggi daripada provinsi lain di Jawa, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jawa Tengah tumbuh 5,24 persen (yoy) dan DIY tumbuh 5,53 persen. Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,43 persen terhadap perekonomian Jawa. Jawa Tengah masih menjadi penyumbang keempat terbesar nasional maupu pulau jawa setelah provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.

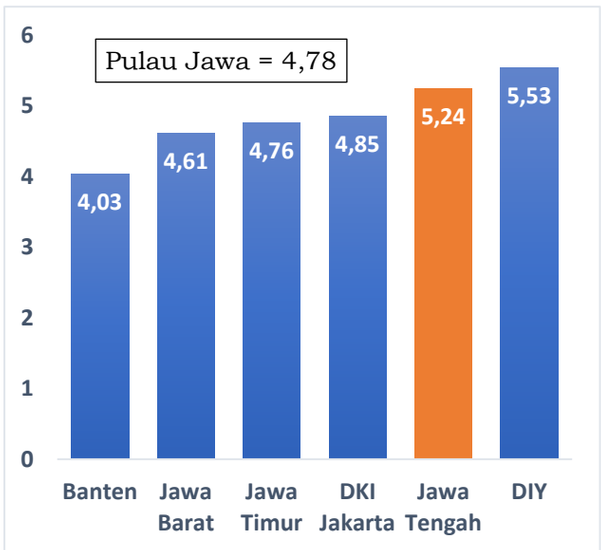

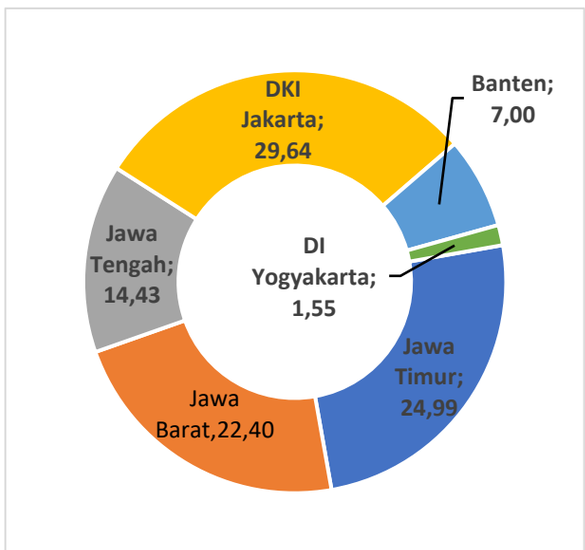

Sumber: BPS, diolah, 2023

Gambar 2.16.
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB Menurut Provinsi se-Pulau Jawa Pada Triwulan IV-2022 (%)

Jika dilihat dari pertumbuhan c-to-c se-Pulau Jawa pada Tahun 2022 tertinggi di capai oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 5,45 persen (c-to-c) dan paling rendah oleh Propinsi Banten sebesar 5,03 persen (c-to-c). Jika dibandingkan dengan capaian Nasional (5,31 persen) terdapat dua provinsi di pulau jawa yang diatas capaian nasional dan tiga provinsi di bawah capaian nasional. Sedangkan provinsi jawa tengah memiliki capaian yang sama dengan nasional.

Tabel 2.15.
Pertumbuhan Ekonomi (c-to-c) Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional
Tahun 2018 –2022 (%)

No	Provinsi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Banten	5,98	5,90	-3,38	4,44	5,03
2	Jawa Barat	5,64	5,07	-2,44	3,74	5,45
3	DKI Jakarta	6,17	5,96	-2,36	3,56	5,25
4	Jawa Tengah	5,30	5,40	-2,65	3,32	5,31
5	DIY	6,20	6,60	-2,69	5,53	5,15
6	Jawa Timur	5,65	5,54	-2,39	3,57	5,34
	Rata2 Jawa	**5,82**	**5,75**	**-2,65**	**4,03**	**5,26**
	Nasional	**5,17**	**5,02**	**-2,07**	**3,69**	**5,31**

Sumber: BPS, 2022

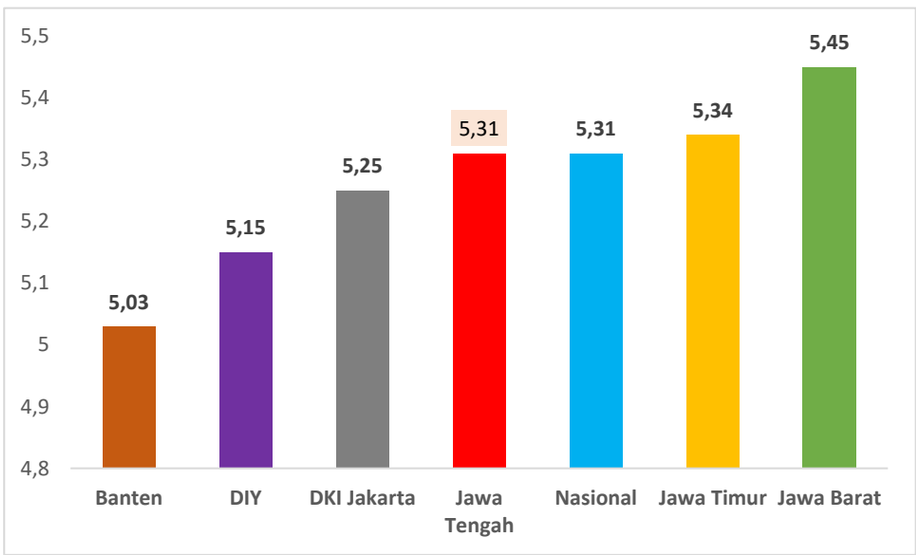

Sumber: BPS, diolah, 2022

Gambar 2.17.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Se Pulau Jawa dan Nasional Pada Tahun 2022 (c-to-c) (%)

Pertumbuhan ekonomi dapat tergambarkan melalui sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Perkembangan ekonomi Jawa Tengah dari sisi lapangan usaha pada tahun 2022 bersumber dari 3 (tiga) lapangan usaha (LU) yaitu transportasi dan pergudangan (73,03 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (16,99

persen), serta jasa lainnya (11,79 persen). Sementara, tiga LU utama lainnya seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan kontruksi tetap tumbuh meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.16.

Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	121.554,48	123.150,02	126.110,20	127.128,60	130.801,32
B. Pertambangan dan Penggalian	20.855,98	21.557,12	21.385,27	22.326,16	20.942,66
C. Industri Pengolahan	322.143,29	338.470,98	325.617,67	333.156,60	346.169,65
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.028,92	1.085,27	1.104,73	1.170,51	1.214,86
E. Pengadaan Air, Pengelo-laan Sampah, Limbah & Daur Ulang	658,88	687,51	703,22	744,50	752,41
F. Konstruksi	98.393,74	103.262,32	99.380,71	106.701,15	108.657,61
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	136.581,24	144.729,67	139.233,05	147.313,38	153.670,44
H. Transportasi dan Pergudangan	32.121,01	34.848,59	23.564,63	24.342,19	42.108,26
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30.660,79	33.442,26	30.773,74	32.595,12	38.132,45
J. Informasi dan Komunikasi	45.500,91	50.789,28	58.739,21	62.288,94	63.846,51
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	25.635,54	26.533,03	27.106,15	27.555,91	27.690,76
L. Real Estate	17.797,50	18.782,40	18.730,35	19.133,49	20.107,09
M,N. Jasa Perusahaan	3.609,30	3.989,82	3.702,92	3.816,62	4.051,19
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24.137,86	25.033,50	24.687,07	24.528,68	24.915,02
P. Jasa Pendidikan	36.286,32	39.040,75	38.948,07	38.974,99	39.589,05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.187,91	8.738,37	9.454,46	9.471,68	9.709,66
R,S,T,U. Jasa lainnya	15.937,47	17.375,66	15.984,26	16.068,57	17.963,16
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**941.091,14**	**991.516,54**	**965.225,71**	**997.317,10**	**1.050.322,13**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 2.17.

Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	178.352,88	184.130,94	192.610,19	196.876,47	211.244,85
B. Pertambangan dan Penggalian	32.321,26	33.727,39	33.082,14	36.660,13	37.723,92
C. Industri Pengolahan	436.424,70	468.374,05	464.609,13	487.445,10	529.612,56
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.225,34	1.294,44	1.309,17	1.377,81	1.438,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	743,87	790,46	855,45	915,06	938,29
F. Konstruksi	136.153,70	147.205,58	142.205,67	158.056,34	172.199,81
G. Perdagang-an Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	172.944,07	187.064,45	181.860,78	195.399,04	212.208,01
H. Trans-portasi dan Pergudangan	39.583,09	43.834,35	30.262,62	32.092,97	59.263,55
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39.498,49	43.634,69	40.359,71	43.513,47	52.883,12
J. Informasi dan Komunikasi	43.963,89	49.587,27	57.428,84	60.910,56	62.593,23
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	37.488,38	39.403,66	40.267,89	42.959,77	46.920,61
L. Real Estate	21.450,33	22.920,25	23.010,53	23.741,78	25.420,79
M,N. Jasa Perusahaan	5.021,62	5.712,08	5.417,73	5.650,01	6.259,70
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	34.653,13	36.431,29	36.457,41	35.853,14	37.421,33
P. Jasa Pendidikan	56.951,69	62.396,85	63.862,38	64.584,46	65.985,53
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.283,42	12.275,40	13.658,16	13.800,24	14.372,31
R,S,T,U. Jasa lainnya	20.201,31	22.176,97	20.664,88	20.963,55	24.413,40
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**1.268.261,17**	**1.360.960,13**	**1.347.922,69**	**1.420.799,91**	**1.560.899,02**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dari sisi lapangan usaha pada tahun 2022 bersumber dari tiga lapangan usaha yang tumbuh positif pada tahun 2022 yaitu transportasi dan pergudangan (73,03 persen), penyediaan akomodasi dan

makan minum (16,99 persen), serta jasa lainnya (11,79 persen). Sementara, tiga lapangan usaha utama lainnya seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan kontruksi tetap tumbuh meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, terdapat lapangan usaha yang tumbuh negatif yaitu pertambangan dan penggalian sebesar minus 6,20 persen.

Tabel 2.18.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (%)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,62	1,31	2,4	0,78	2,92
B	Pertambangan dan Penggalian	2,45	3,36	-0,8	4,4	-6,2
C	Industri Pengolahan	4,33	5,07	-3,8	2,34	3,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,36	5,48	1,79	5,95	3,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,88	4,34	2,29	5,92	1,01
F	Konstruksi	6,07	4,95	-3,76	7,37	1,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,77	5,97	-3,8	5,8	4,32
H	Transportasi dan Pergudangan	7,55	8,49	-32,38	3,28	73,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,15	9,07	-7,98	5,92	16,99
J	Informasi dan Komunikasi	12,39	11,62	15,65	6,04	2,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,58	3,5	2,16	1,62	0,53
L	Real Estate	5,58	5,53	-0,28	2,15	5,09
M,N	Jasa Perusahaan	9,48	10,54	-7,19	3,07	6,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,58	3,71	-1,38	-0,64	1,58
P	Jasa Pendidikan	7,76	7,59	-0,24	0,07	1,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,8	6,72	8,19	0,18	2,51
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,45	9,02	-8,01	0,53	11,79
	PDRB	**5,30**	**5,36**	**-2,65**	**3,33**	**5,31**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Secara struktur, perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2022 masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 33,93 persen; diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,60 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,53 persen; dan konstruksi sebesar 11,03 persen.

Tabel 2.19.

Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (%)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,06	13,53	14,30	13,86	13,53
B	Pertambangan dan Penggalian	2,55	2,48	2,45	2,58	2,42
C	Industri Pengolahan	34,41	34,44	34,52	34,31	33,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,1	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	10,73	10,81	10,55	11,12	11,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,64	13,74	13,49	13,75	13,60
H	Transportasi dan Pergudangan	3,12	3,22	2,21	2,26	3,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,11	3,20	2,99	3,06	3,39
J	Informasi dan Komunikasi	3,47	3,64	4,26	4,29	4,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,96	2,89	2,98	3,02	3,01
L	Real Estate	1,69	1,68	1,71	1,67	1,63
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,42	0,40	0,4	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,73	2,68	2,70	2,52	2,40
P	Jasa Pendidikan	4,49	4,58	4,74	4,55	4,23
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,89	0,90	1,01	0,97	0,92
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,59	1,63	1,53	1,48	1,56
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran pada, nilai PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 2.20.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	764.808,38	821.948,11	822.095,50	854.472,69	940.909,56
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	14.491,86	16.443,22	16.064,61	16.784,70	18.971,57
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	98.717,17	103.209,52	98.678,84	100.905,61	101.999,40
Pembentukan Modal Tetap Bruto	413.749,15	448.351.59	417.815,40	451.241,16	479.064,88
Perubahan Inventori	17.201,59	11.362,19	12.797,37	11.936,47	15.501,14

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor Luar Negeri	123.868,88	127.703,21	122.859,71	158.820,64	183.486,73
Impor Luar Negeri	235.222,13	203.947,07	149.426,64	200.678,36	240.550,14
Net Ekspor Antar Daerah	70.646,26	35.889,36	6.337,70	26.503,70	61.515,55
Total PDRB	**1.268.261,17**	**1.360.960,13**	**1.347.222,49**	**1.419.986,62**	**1.560.899,02**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pada tahun 2021 semua komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan tertinggi dicatat oleh komponen net ekspor antar daerah yaitu sebesar 52,70 persen, diikuti komponen impor luar negeri sebesar 35,69 persen, dan komponen ekspor luar negeri sebesar 21,85 persen. Begitu juga dengan tahun 2022 yang menunjukkan semua komponen tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen net ekspor antar daerah yaitu 31,66 persen, diikuti oleh impor luar negeri tumbuh 15,84 persen dan ekpor luar negeri yang tumbuh 10,67 persen.

Tabel 2.21.
Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,69	4,62	-1,42	1,82	5,52
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,62	10,90	-3,72	1,25	4,89
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,70	4,04	-4,14	0,55	0,12
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,68	4,85	-6,98	6,84	1,95
Ekspor Luar Negeri	11,79	5,10	-3,79	21,85	10,67
Impor Luar Negeri	36,36	-6,70	-20,49	35,69	15,84
Net Ekspor Antar Daerah	57,00	-7,10	-33,49	52,70	31,66
Total	**5,30**	**5,36**	**-2,65**	**3,33**	**5,31**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Selanjutnya, struktur PDRB Jawa Tengah dari sisi pengeluaran pada tahun 2021 juga tidak mengalami perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga (PK-RT) sebesar 60,17 persen, dan diikuti oleh komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 31,78 persen. Bahkan selama kurun waktu tahun 2018-2021 perekonomian Jawa Tengah menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi lebih dari separuh nilai PDRB Jawa Tengah. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Jawa Tengah adalah PMTB, serta impor dan ekspor barang dan jasa. Kondisi ini menggambarkan bahwa ekonomi Jawa Tengah sangat tergantung pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, meskipun tren kontribusinya fluktuatif

dalam lima tahun terakhir. Demikian juga kondisi pada tahun 2022 yang menunjukkan struktur yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pengeluaran konsumsi rumah tangga mendominasi dengan angka sebesar 60,28 persen, diikuti dengan komponen PMTB sebesar 30,69 persen.

Tabel 2.22.

Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%)

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,30	60,39	61,02	60,17	60,28
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,14	1,21	1,19	1,18	1,22
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,78	7,58	7,32	7,11	6,53
Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,62	32,94	31,01	31,78	30,69
Perubahan Inventori	1,36	0,83	0,95	0,84	0,99
Ekspor Luar Negeri	9,77	9,38	9,12	11,18	11,76
Impor Luar Negeri	18,55	14,99	11,09	14,13	15,41
Net Ekspor Antar Daerah	5,57	2,64	0,47	1,87	3,94
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang terus membaik pascapandemi Covid-19 tahun 2020 juga diikuti oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2021 tumbuh positif dibandingkan tahun 2020, kecuali Kabupaten Kudus yang mengalami kontraksi sebesar -1,54 persen yang diakibatkan karena industri tembakau di Kudus masih mengalami pertumbuhan negatif. Namun demikian, pada tahun 2022, semua kabupaten/kota telah tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Boyolali dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,33 persen, diikuti oleh Kota Surakarta sebesar 6,25 persen, dan Kabupaten Grobogan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,98 persen. Sedangkan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Kudus sebesar 2,23 persen, Kabupaten Blora 2,68 persen, dan Kabupaten Wonosobo 5,02 persen.

Tabel 2.23.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%)

No	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Cilacap	2.99	2.27	-10.28	2.15	5.13
2	Kabupaten Banyumas	6.45	6.32	-1.65	4	5.86
3	Kabupaten Purbalingga	5.42	5.64	-1.18	3.19	5.41
4	Kabupaten Banjarnegara	5.67	5.6	-1.32	3.26	5.29
5	Kabupaten Kebumen	5.53	5.52	-1.45	3.71	5.79
6	Kabupaten Purworejo	5.33	5.44	-1.61	3.31	5.36
7	Kabupaten Wonosobo	5.06	5.57	-1.64	3.68	5.02
8	Kabupaten Magelang	5.28	5.3	-1.67	3.48	5.46
9	Kabupaten Boyolali	5.72	5.96	-1.2	4.63	6.33

No	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	2018	2019	2020	2021	2022
10	Kabupaten Klaten	5.47	5.48	-1.17	3.82	5.9
11	Kabupaten Sukoharjo	5.79	5.92	-1.7	3.82	5.61
12	Kabupaten Wonogiri	5.41	5.14	-1.41	3.35	5.63
13	Kabupaten Karanganyar	5.98	5.76	-1.87	3.57	5.87
14	Kabupaten Sragen	5.75	5.9	-1.81	3.75	5.76
15	Kabupaten Grobogan	5.83	5.37	-1.57	3.78	5.98
16	Kabupaten Blora	4.38	4.05	-4.56	3.68	2.68
17	Kabupaten Rembang	5.89	5.2	-1.49	3.85	5.55
18	Kabupaten Pati	5.71	5.81	-1.16	3.38	5.56
19	Kabupaten Kudus	3.24	3.09	-3.11	-1.54	2.23
20	Kabupaten Jepara	5.85	6.02	-1.92	4.63	5.95
21	Kabupaten Demak	5.4	5.36	-0.23	2.62	5.25
22	Kabupaten Semarang	5.67	5.39	-2.67	3.63	5.31
23	Kabupaten Temanggung	5.13	5.05	-2.13	3.34	5.2
24	Kabupaten Kendal	5.77	5.71	-1.51	3.89	5.69
25	Kabupaten Batang	5.72	5.39	-1.29	4.88	5.97
26	Kabupaten Pekalongan	5.76	5.35	-1.89	3.54	5.11
27	Kabupaten Pemalang	5.69	5.8	-0.61	4.28	5.08
28	Kabupaten Tegal	5.51	5.56	-1.48	3.71	5.14
29	Kabupaten Brebes	5.26	5.76	-0.47	2.57	5.61
30	Kota Magelang	5.46	5.41	-2.45	3.2	5.77
31	Kota Surakarta	5.75	5.78	-1.76	4.01	6.25
32	Kota Salatiga	5.84	5.9	-1.68	3.35	5.53
33	Kota Semarang	6.48	6.81	-1.85	5.16	5.73
34	Kota Pekalongan	5.69	5.5	-1.87	3.59	5.76
35	Kota Tegal	5.87	5.77	-2.29	3.12	5.16
	Jawa Tengah	**5.30**	**5.40**	**-2.65**	**3.32**	**5.31**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dari 35 Kabupaten/Kota, sebanyak 23 Kabupaten/Kota yang capaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 melebihi capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional, serta terdapat 11 Kabupaten/Kota yang capaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 dibawah capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.

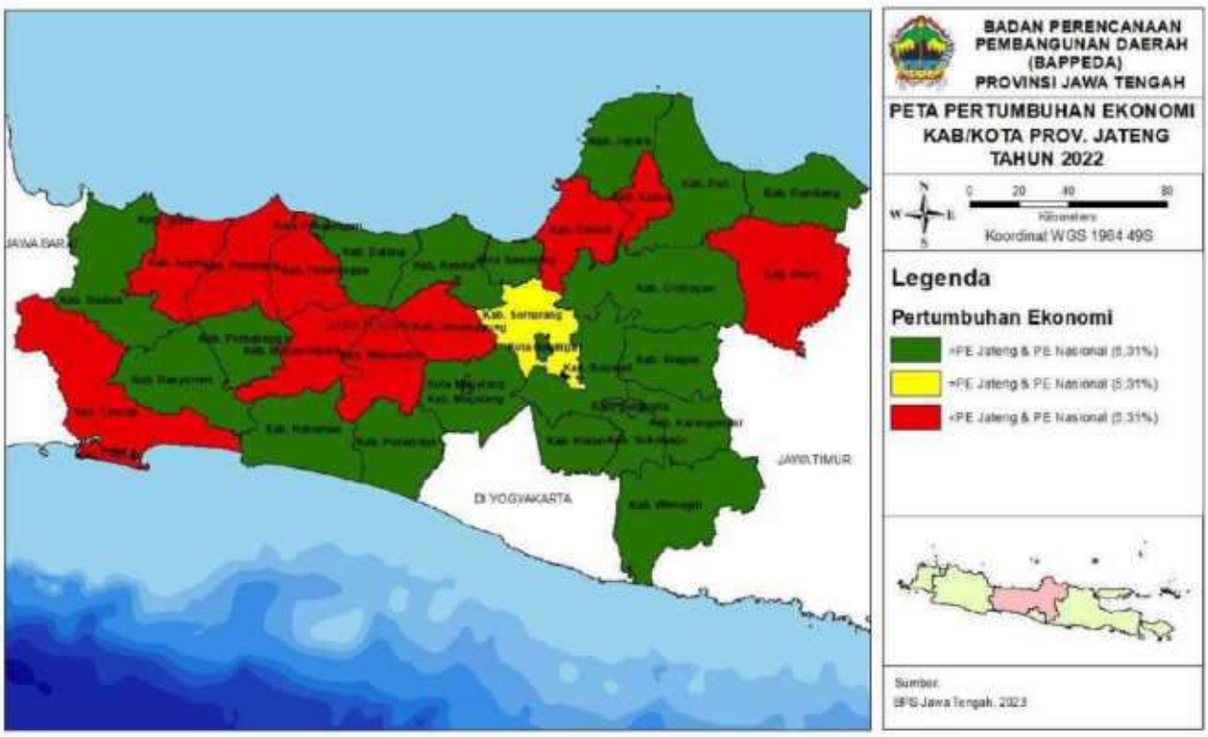

Sumber: BPS, 2023 (diolah).

Gambar 2.18.
Peta Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (c-to-c, persen)

2.3.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Selama kurun waktu tahun 2016-2019, PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun tahun 2020 mengalami penurunan sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19 menjadi sebesar Rp36,96 juta, turun sebesar 6,15 persen dari sebelum Pandemi yaitu Tahun 2019. Pada Tahun 2021 sudah mengalami kenaikkan seiring dengan membaiknya perekonomian dan mobilitas masyarakat sebesar 38,65 juta rupiah kemudian naik Kembali di Tahun 2022 sebesar Rp.42,15 juta.

Tabel 2.24.
PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

No	Komponen	2020	2021	2022
1	PDRB ADHB (Milyar Rp)	1.347.222,49	1.419.986,62	1.560.899,02
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	36.446.115	36.742.501	37.032.410
3	PDRB Per Kapita ADHB :			
	• Nilai (Juta Rp)	36,96	38,65	42,15
	• Perkembangan (%)	-6,15	4,55	9,06

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

PDRB per kapita Jawa Tengah jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Nasional dari Tahun 2010 – 2022 menunjukkan tren kenaikan, kecuali pada Tahun 2020 yang menurun saat terjadi Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 dan 2022 perekonomian Jawa Tengah dan Nasional sudah berangsur pulih seiiring terkendalinya pandemi Covid-19.

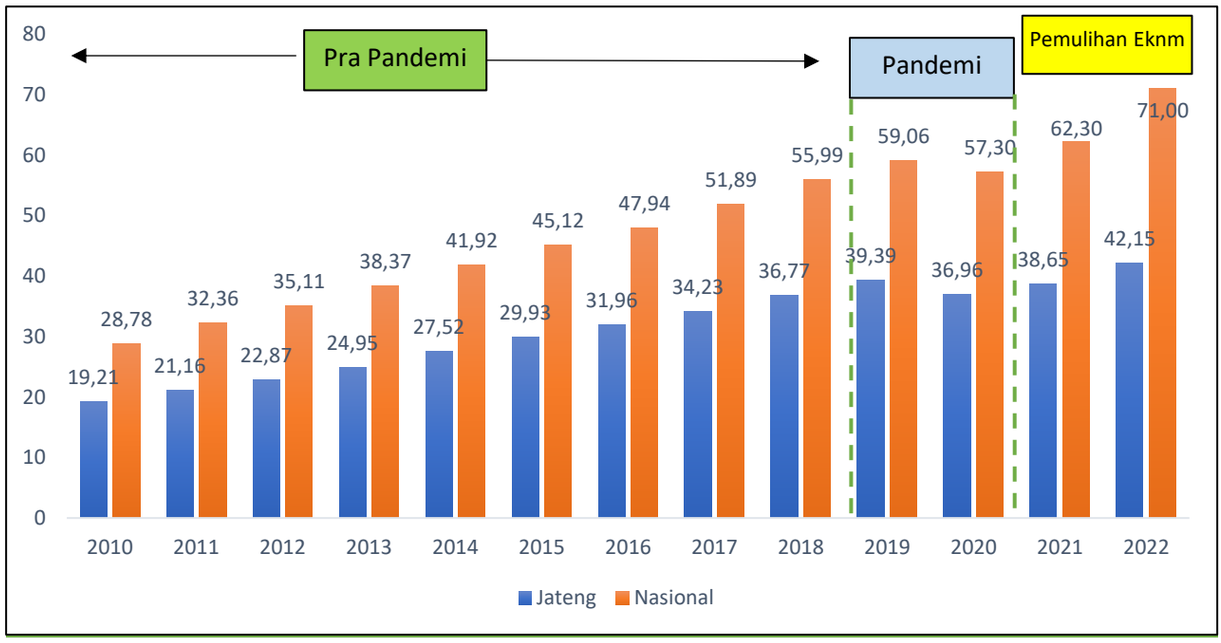

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.19.

PDRB Per Kapita Jawa Tengah Dibandingkan Nasional Tahun 2010 – 2022

Jika dibandingkan dengan provinsi se-Pulau Jawa, PDRB per kapita Jawa Tengah tahun 2022 yang sebesar Rp42,15 juta berada di urutan kelima di bawah Provinsi Jawa Barat yang sebesar Rp49,04 juta. Sedangkan PDRB per kapita tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp298,36 juta, diikuti Provinsi Jawa Timur (Rp66,36 juta) dan Provinsi Banten (Rp60,99 juta).

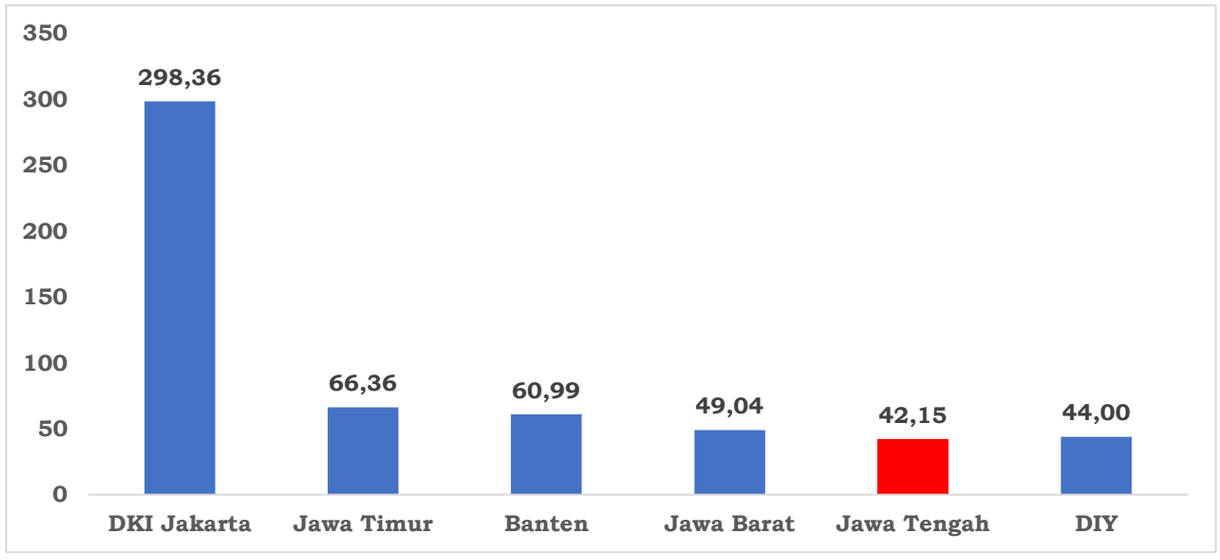

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.20.

PDRB Per Kapita Provinsi Se Pulau Jawa Tahun 2022

Dilihat dari sebaran PDRB per kapita tahun 2022 per kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Kota Semarang menjadi yang tertinggi capaiannya yaitu sebesar Rp137,12 juta, kemudian Kabupaten Kudus sebesar Rp133,88 juta, dan Kota Surakarta sebesar Rp107,01 juta.

Tabel 2.25.
PDRB Per Kapita Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Cilacap	63.8	66.39	53.92	55.84	60.82
2	Kabupaten Banyumas	29.72	32.02	30.28	31.81	34.8
3	Kabupaten Purbalingga	25.07	26.81	25.2	26.19	28.26
4	Kabupaten Banjarnegara	21.86	23.51	21.38	22.23	24.06
5	Kabupaten Kebumen	21.79	23.44	20.8	21.71	23.68
6	Kabupaten Purworejo	24.3	26.1	24.26	25.34	27.43
7	Kabupaten Wonosobo	22.22	23.91	21.49	22.4	24.09
8	Kabupaten Magelang	23.71	25.3	25.01	26.18	28.53
9	Kabupaten Boyolali	30.88	33.33	30.83	32.61	35.94
10	Kabupaten Klaten	31.58	34.01	31.74	33.36	36.54
11	Kabupaten Sukoharjo	38.65	41.63	40.7	42.77	46.71
12	Kabupaten Wonogiri	28.35	30.42	28.01	29.14	31.88
13	Kabupaten Karanganyar	39.05	41.94	39.82	41.71	45.5
14	Kabupaten Sragen	39.53	42.7	38.83	40.75	44.63
15	Kabupaten Grobogan	18.52	19.89	18.79	19.72	21.64
16	Kabupaten Blora	28.57	30.16	27.16	30.39	34.87
17	Kabupaten Rembang	27.92	29.82	29.39	30.99	33.97
18	Kabupaten Pati	31.84	34.34	32.74	34.23	37.41
19	Kabupaten Kudus	120.79	127.52	129.14	127.55	133.88
20	Kabupaten Jepara	22.57	24.14	25.49	26.96	29.34
21	Kabupaten Demak	21.21	22.62	22.1	22.81	24.73
22	Kabupaten Semarang	44.38	47.3	46.67	48.87	53
23	Kabupaten Temanggung	26.42	28.17	27.33	28.48	30.93
24	Kabupaten Kendal	41.02	44.03	41.9	44.06	48.1
25	Kabupaten Batang	26.47	28.22	27.02	28.66	31.32
26	Kabupaten Pekalongan	23.9	25.59	23.6	24.61	26.36
27	Kabupaten Pemalang	18.21	19.65	17.6	18.49	19.96
28	Kabupaten Tegal	22.8	24.57	22.15	23.21	25.12
29	Kabupaten Brebes	23.84	25.65	23.83	24.57	26.74
30	Kota Magelang	67.29	72.45	71.7	75.48	82.91
31	Kota Surakarta	85.79	92.83	91.17	96.36	107.01
32	Kota Salatiga	64.41	68.89	69.14	72.39	78.99
33	Kota Semarang	98.1	105.93	114.19	123.67	137.12
34	Kota Pekalongan	33.14	35.59	35.36	37.17	40.68
35	Kota Tegal	56.64	61.47	55.72	58.08	63.62
	Provinsi Jawa Tengah	36.77	39.39	36.96	38.65	42.15

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Tiga kabupaten/kota dengan PDRB per kapita tertinggi di Jawa Tengah sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah kabupaten/kota dengan PDRB per kapita lebih tinggi dari PDRB per kapita Jawa Tengah. Adapun sebanyak sembilan kabupaten/kota memiliki PDRB per kapita antara Rp100 juta dan di atas PDRB per kapita Jawa Tengah yang sebesar Rp42,15 juta. Sedangkan 23 kabupaten/kota lainnya memiliki PDRB per kapita di bawah PDRB per kapita Jawa Tengah (kurang dari Rp.42,15 juta).

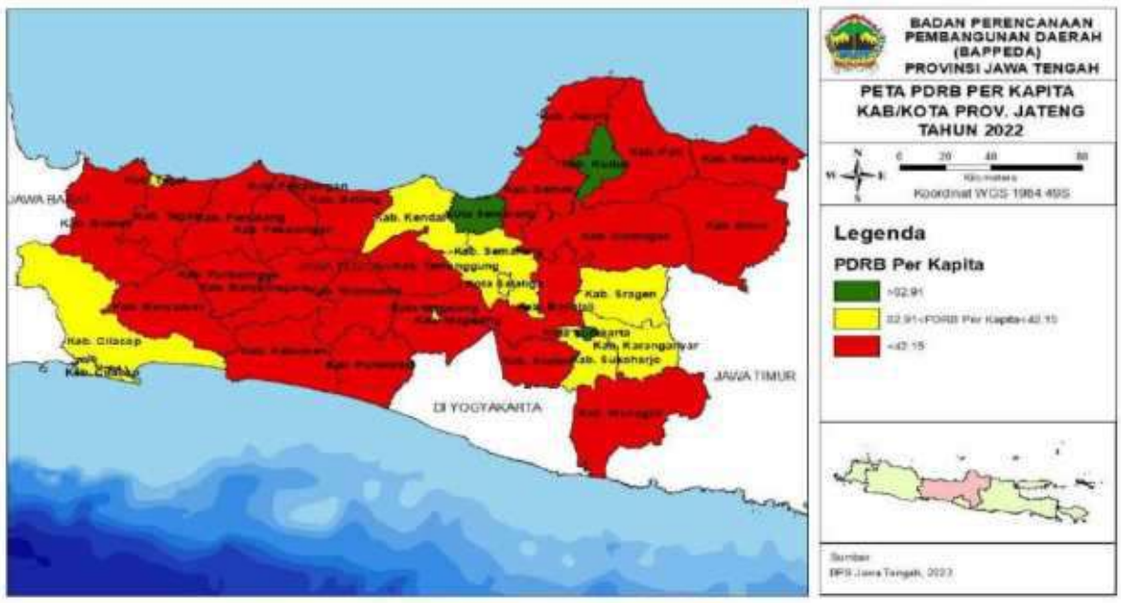

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023 diolah

Gambar 2.21.
PDRB Per Kapita Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah Tahun 2022

2.3.3 Inflasi

Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2021 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1-3 persen. Bahkan tingkat inflasi di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah.

Namun, pada tahun 2022 terjadi kenaikan laju inflasi di Jawa Tengah menjadi sebesar 5,63 persen. Kenaikan inflasi ini juga dialami secara nasional sebagai akibat adanya gejolak ekonomi global akibat konflik geopolitik dan perang Ukraina-Rusia. Kondisi global tersebut menyebabkan gangguan dari sisi *supply* yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan inflasi di banyak negara termasuk Indonesia. Jika tidak terkelola, risiko global ini akan menggiring kepada kondisi stagflasi yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada periode awal 1980-an dan 1990-an. Kondisi stagflasi akan memberikan imbas negatif luar biasa ke seluruh dunia terutama terhadap negara berkembang dan *emerging market*.

Naiknya laju inflasi Jawa Tengah pada tahun 2022 masih berlanjut hingga awal tahun 2023. Pada bulan Februari 2023 inflasi Jawa Tengah sebesar 5,81 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya semua indeks kelompok pengeluaran terutama komponen makanan dan minuman. Penyebab utama inflasi bulan Februari 2023 adalah kenaikan harga

beras, rokok kretek filter, bawang merah, bawang putih, dan tarif air minum PAM. Penyebab inflasi lain adalah adanya cuaca ekstrem yang menyebabkan beberapa komoditas gagal panen sehingga terjadi lonjakan harga.

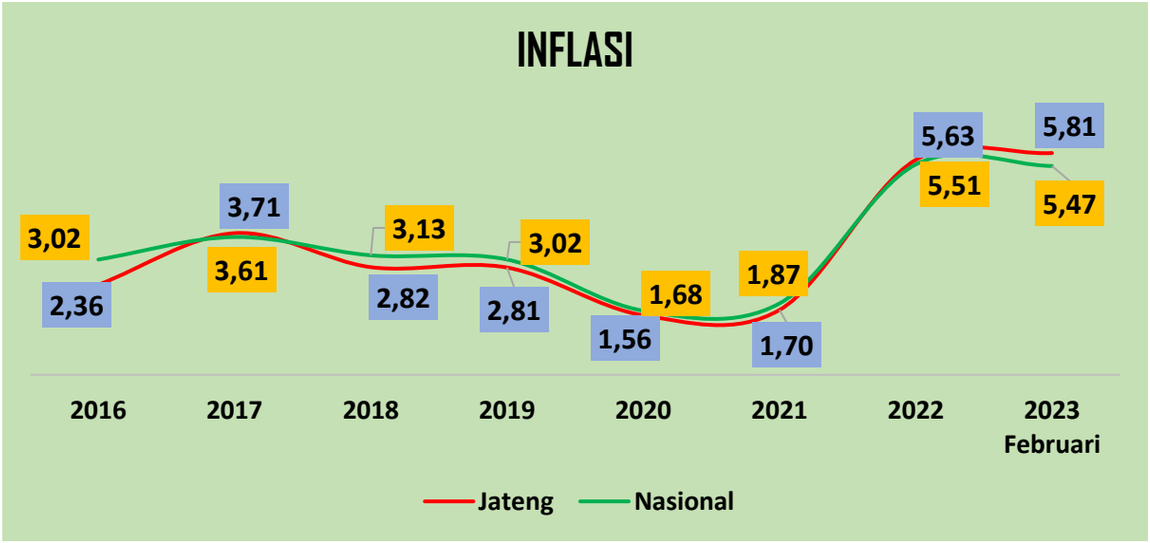

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.22.
Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 – Maret 2023 (%)

2.3.4 Rasio Gini dan Indeks Williamson

Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0-1, semakin tinggi nilai menunjukan ketimpangan yang semakin tinggi, sebaliknya jika nilainya mendekati satu maka angka ketimpangan berkurang (semakin baik). Selama kurun waktu tahun 2019 – 2022 perkembangan Rasio Gini di Jawa Tengah relative menurun. Pada September 2022, Rasio Gini Jawa Tengah tercatat sebesar 0,366, lebih tinggi dibandingkan September 2021 yang sebesar 0,368. Jika dibandingkan dengan nasional, Rasio Gini Jawa Tengah masih lebih rendah sebesar 0,381. Dengan demikian pemerataan pendapatan di Jawa Tengah relatif lebih baik dibandingkan dengan nasional.

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.23.
Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022

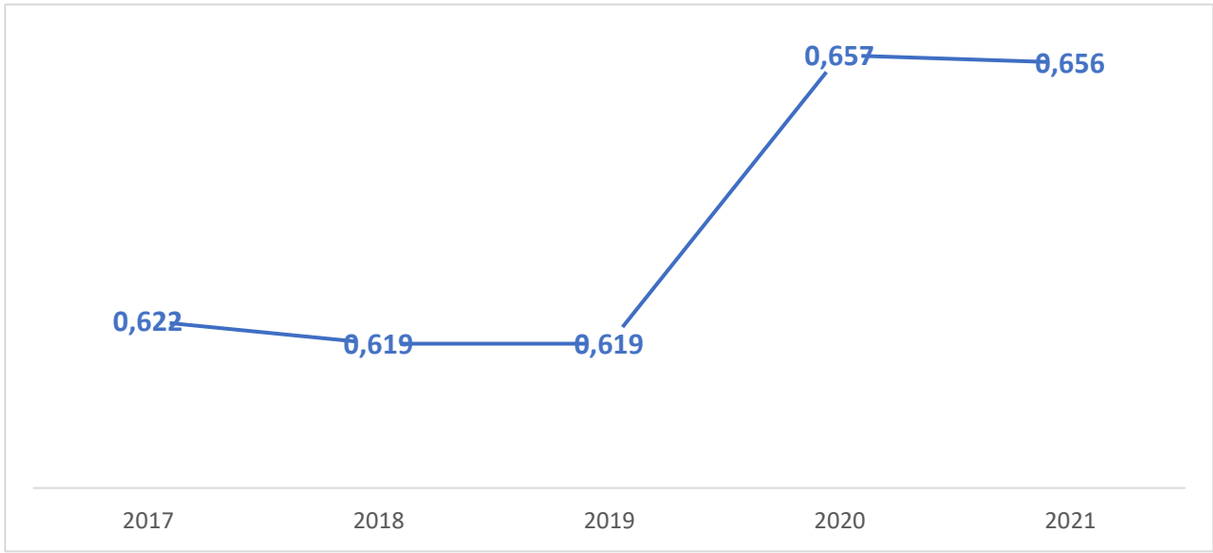

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.24.
Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2021

2.3.5 Indeks Daya Saing Daerah

Adapun tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk selama kurun waktu tahun 2019-2022 di kawasan perkotaan Jawa Tengah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan di kawasan perdesaan. Pada periode September 2022, rasio Gini di kawasan perkotaan perkotaan Jawa Tengah sebesar 0,392, sedangkan di kawasan perdesaan sebesar 0,326. Fenomena ketimpangan yang tinggi di kawasan perkotaan tersebut juga berlangsung di tingkat nasional, yang dapat mencerminkan bahwa golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan perkotaan lebih mudah terpapar dampak pelemahan ekonomi yang besar dibandingkan dengan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya kapasitas tabungan/dana darurat serta menurunnya penghasilan di tengah penurunan aktivitas produksi.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain se-Pulau Jawa, rasio Gini Jawa Tengah adalah yang terendah setelah Provinsi Jawa Timur dengan perbedaan 0,001. Sementara peningkatan ketimpangan terbesar selama kurun waktu September 2021 sampai dengan September 2022 terjadi di Provinsi DI Yogyakarta.

Selanjutnya dalam rangka melihat tingkat kesenjangan antarwilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah, digunakan indikator Indeks Williamson. Selama kurun waktu tahun 2017–2021, Indeks Williamson Jawa Tengah meningkat yaitu dari 0,622 menjadi 0,656 yang menunjukan ketimpangan antarwilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah semakin besar. Peningkatan ketimpangan antarwilayah di Jawa Tengah terjadi pada tahun 2020 yang merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19. Tahun 2020 Indeks Williamson Jawa Tengah meningkat signifikan menjadi 0,657 atau meningkat 0,038 poin dibandingkan tahun 2019. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi untuk memperbaiki perekonomian daerah memberikan dampak positif pada perbaikan perekonomian dan mengurangi ketimpangan antarwilayah pada tahun 2021 menjadi 0,656.

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) didasarkan pada empat aspek, yaitu aspek ekosistem inovasi, aspek pasar/market, aspek sumber daya manusia/human capital, dan aspek penguat/enabling environment. Secara

keseluruhan, ada 12 pilar, 23 dimensi, dan 97 indikator penilaian yang merepresentasikan keempat aspek tersebut. Berdasarkan nilai IDSD yang dikeluarkan oleh Kemenristek atau BRIN, Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 termasuk daerah pada kategori sangat inovatif dengan nilai 4,52. Namun pada tahun 2021 nilai tersebut turun menjadi 4,0, yang dipengaruhi oleh kondisi akibat terjadinya pandemi Covid-19 di Jawa Tengah.

Dari empat aspek IDSD hanya aspek ekosistem inovasi yang mengalami peningkatan, sedangkan tiga aspek yang lain mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi pada penilaian aspek pasar, di mana kontributor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah pada pilar dan dimensi ukuran pasar. Walaupun demikian, sebagian dimensi mengalami peningkatan, seperti pada regulasi, penelitian dan pengembangan, serta tata kelola pemerintahan.

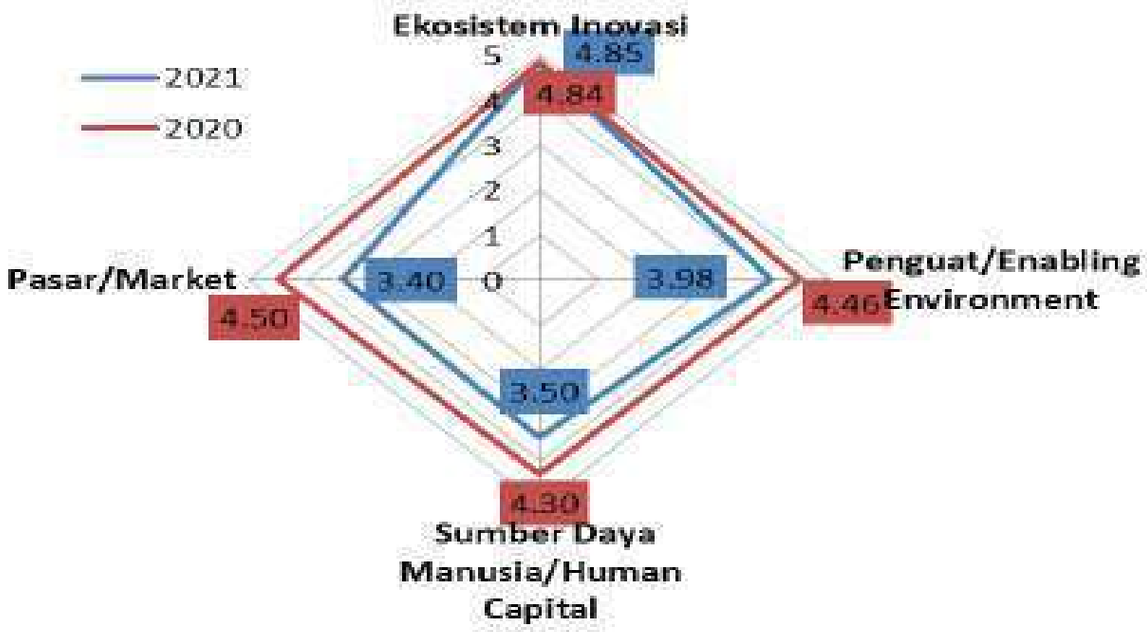

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.25.
Nilai IDSD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan 2021

2.3.6 Investasi

Peningkatan realisasi investasi di Jawa Tengah didukung dengan keberadaan kawasan industri yang ada, terutama penambahan *tenant* di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melaksanakan promosi investasi yang fokus pada sektor unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja dan negara tujuan prioritas dengan meningkatkan kerja sama antara stakeholder terkait dan terobosan inovasi digitalisasi promosi. Optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri yang ada di Jawa Tengah terus diupayakan melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur pendukung, air baku dan peningkatan pengelolaan Kawasan Industri yang lebih berkualitas.

Tabel 2.26.

Perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah Tahun 2022

No.	Nama Kawasan Industri	Pengelola	Total Luas	Lahan Digunakan	Lahan Tersedia	Jumlah Tenant
1.	Kawasan Industri Kendal (Kawasan Ekonomi Khusus)	PT. Kawasan Industri Kendal	1.000 Ha	460 Ha (tenant, Jalan, Sarana & Prasarana)	- 656,9 Ha (Telah Bersertifikat) - 35,9 Ha (Dalam Proses Sertifikat)	84
2.	Grand Batang City	PT. Kawasan Industri Terpadu Batang	4.300 Ha (Luas Klaster Industri 3.100 Ha)	182,2 Ha (dari luas total Fase I: 450 Ha)	- Fase I: 450 Ha - Fase II: 2.650 Ha (dalam proses penyiapan lahan)	13
3.	Batang Industrial Park	PT. Perkebunan dan Industri Segajung	287 Ha	60 Ha	227 Ha	3
4.	Jatengland Industrial Park Sayung	PT. Jawa Tengah Lahan Andalan	300 Ha	100,76 Ha	227 Ha	5
5.	Aviarna Industrial Estate	PT. Bumi Raya Perkasa Nusantara	462 Ha	+ 15 Ha	447 Ha	3
6.	Kawasan Industri Wijayakusuma	PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	250 Ha	144,9 Ha	± 9 Ha	117
7.	BSB Industrial Park	PT. Karyadeka Alam Lestari	112 Ha	80,75 Ha	4 Ha (tidak dalam 1 hamparan)	48
8.	Tanjungmas Export Processing Zone	PT. Lamicitra Nusantara	30 Ha	27 Ha	3 Ha	75

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah 2012-2025, untuk peluang investasi rentang tahun 2024-2026 mencakup pengembangan industri skala besar yang terintegrasi dan pengembangan investasi di sektor inovasi teknologi tinggi. Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang berkompeten, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Realisasi investasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp68,41 triliun yang terdiri atas realisasi investasi yang dilaporkan melalui sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar Rp58,89 triliun dan realisasi investasi non LKPM sebesar Rp9,52 triliun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menghitung angka realisasi investasi Usaha Mikro Kecil (UMK) diluar LKPM mulai

tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal Sektor Usaha Mikro Dan Kecil Di Provinsi Jawa Tengah. Realisasi investasi sektor UMK tahun 2020 sebesar Rp5,83 triliyun dan meningkat sebesar Rp7,08 triliyun pada tahun 2021. Pada akhir tahun 2022, realisasi sektor UMK meningkat cukup signifikan sebesar Rp9,52 triliyun karena gencarnya pendampingan legalitas perizinan berusaha kepada pelaku usaha sektor UMK.

Realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp58,89 triliun merupakan rekapitulasi realisasi investasi bernilai diatas Rp5 milliar yang wajib dilaporkan melalui LKPM dengan rincian realisasi PMA sebesar Rp33,9 triliun dan realisasi PMDN sebesar Rp24,99 triliun. Terdapat peningkatan realisasi PMA sebesar Rp12,5 triliun, sedangkan untuk realisasi PMDN mengalami penurunan sebesar Rp6,32 triliun. Realisasi investasi tahun 2022 meningkat lebih besar Rp6,18 triliun (11,72%) dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Jumlah proyek investasi di Jawa Tengah sebanyak 19.374 proyek yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 16.287 proyek dan PMA 3.087 proyek, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 215.775 orang. Sementara itu, realisasi investasi sektor UMK (non LKPM) juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi sektor ini sebesar Rp9,52 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp2,44 triliun (31,28%). Jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 1.181.350 orang (95,92%) dari jumlah tenaga kerja yang terserap tahun sebelumnya. Jumlah unit UMKM sebesar 227.483 unit dan tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Investasi PMDN, termasuk sektor UKM, menjadi kekuatan yang terus didorong dalam kerangka pemulihan ekonomi daerah. Selain itu, pemulihan ekonomi daerah juga harus didukung dengan program kebijakan prioritas pemerintah, pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha, peningkatan pelayanan perizinan berusaha, ketersediaan tenaga kerja yang berkompeten sesuai kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi yang berkualitas serta komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan iklim investasi yang kondusif.

Tabel 2.27.

Jumlah Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM Tahun 2016 – 2022

Tahun	Nilai Realisasi Investasi (Rp Triliun)				
	PMA	PMDN		Jumlah	Pertumbuhan (%)
		LKPM	Non-LKPM		
2016	14,113	24,070	-	38,183	46,63
2017	31,673	19,866	-	51,539	34,98
2018	31,794	27,474	-	59,269	15,00
2019	40,859	18,655	-	59,503	0,39
2020	19,63	30,61	5,83	50,24	-15,56
2021	21,4	31,31	7,08	52,71	4,91
2022	33,9	24,99	9,52	58,89	11,72

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berkaitan dengan kawasan industri di Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu sumber investasi, berikut peta persebarannya.

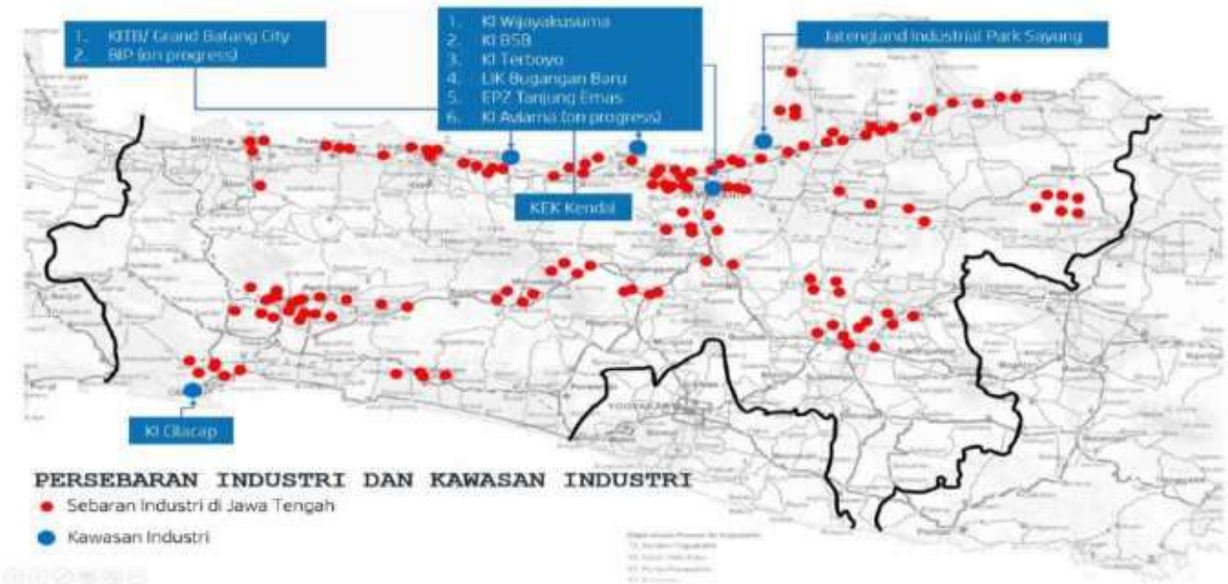

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.26.
Kawasan Industri Eksisting di Provinsi Jawa Tengah

Dari data di atas, nampak bahwa sampai dengan tahun 2022, persebaran kawasan industri paling banyak berada di wilayah utara Jawa Tengah dengan dominasi berada di Kota Semarang, dan pada saat ini bertambah dengan berdirinya Kawasan Industri di Kabupaten Kendal dan Demak. Sedangkan dari sisi kebijakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Tahun 2012 - 2025 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025. Hal ini dilakukan untuk mendorong kinerja di urusan penanaman modal.

Untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai macam inovasi melalui terobosan Layanan Konsultasi dan Pendampingan Terpadu Secara Elektronik (Lakon-e Pandu), Pekan Layanan Sistem Investasi Jos dan Handal (Pena Si Johan), layanan perizinan secara online menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng) yang telah dilengkapi dengan fitur *digital signature*, maupun digitalisasi promosi melalui aplikasi *Central Java Investment Platform (CJIP)*. Selain itu, dalam rangka mempermudah dan memperluas layanan perizinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memfasilitasi pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Sampai dengan awal tahun 2023, telah beroperasi 28 MPP di 28 Kabupaten/Kota.

2.3.7 Pertanian (dalam arti luas) dan Ketahanan Pangan

a. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani dan untuk membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP juga menunjukan daya tukar dari harga pokok produk pertanian dengan barang dan

jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relatif semakin tinggi tingkat kemampuan/daya beli petani.

Pada kurun waktu tahun 2018-2022 perhitungan dan rilis NTP dibandingkan dengan Tahun dasar 2018, NTP per Bulan Desember terendah pada Tahun 2020 yaitu sebesar 101,49, namun kembali meningkat pada Tahun 2021 sebesar 103,18 dan 2022 sebesar 107,27.

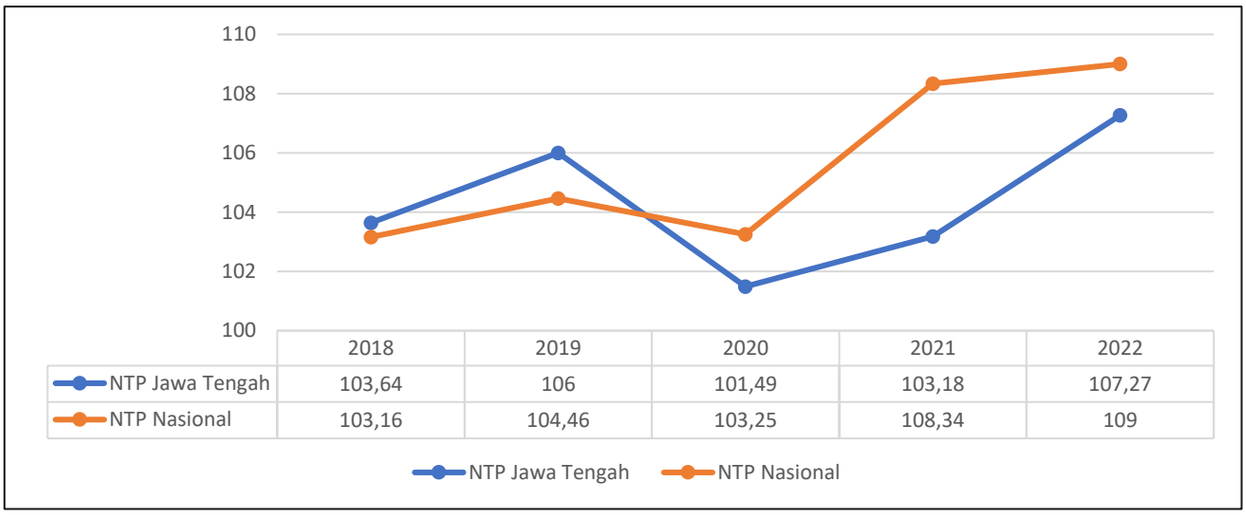

	2018	2019	2020	2021	2022
NTP Jawa Tengah	103,64	106	101,49	103,18	107,27
NTP Nasional	103,16	104,46	103,25	108,34	109

Sumber: BPS, 2022
Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun

Gambar 2.27.
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018 – 2022

Dilihat berdasarkan sub sektor, pada kurun waktu tahun 2018-2022, masing-masing sub sektor cenderung fluktuatif. Pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat dan perikanan cenderung mengalami tren yang meningkat, walaupun pada tahun 2020 beberapa sub sektor sempat mengalami penurunan. Tren yang meningkat menunjukkan bahwa sektor pertanian di Jawa Tengah memiliki tingkat kemampuan dan daya beli yang relatif stabil. Namun sebaliknya, sub sektor peternakan mengalami tren yang menurun hingga tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022.

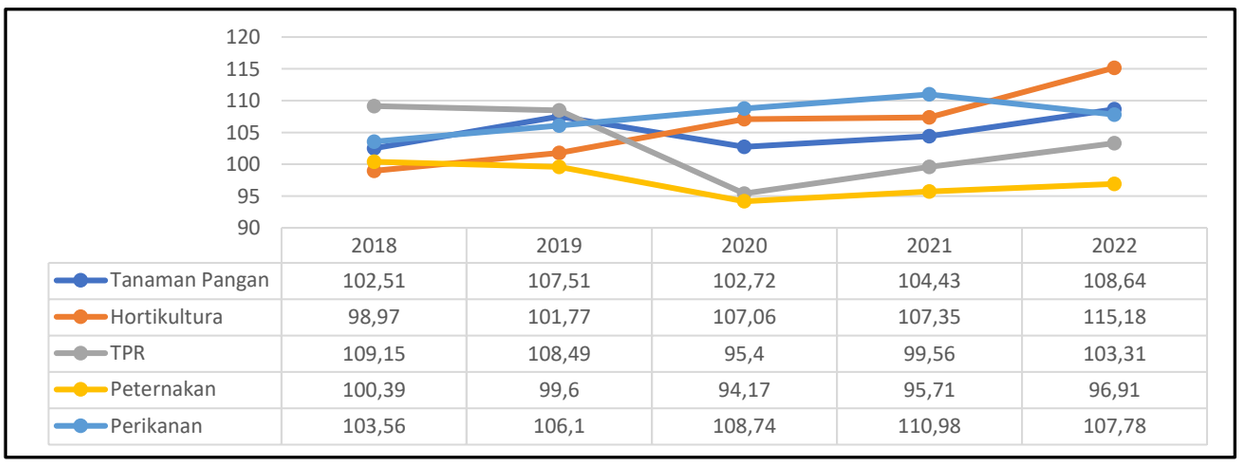

	2018	2019	2020	2021	2022
Tanaman Pangan	102,51	107,51	102,72	104,43	108,64
Hortikultura	98,97	101,77	107,06	107,35	115,18
TPR	109,15	108,49	95,4	99,56	103,31
Peternakan	100,39	99,6	94,17	95,71	96,91
Perikanan	103,56	106,1	108,74	110,98	107,78

Sumber: BPS, 2021
Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun

Gambar 2.28.
Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022

b. Produksi Pertanian

Potensi pertanian Jawa Tengah didukung melalui sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pada kurun waktu 2018-2022, jumlah produksi pada sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan relatif fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan perubahan iklim atau cuaca yang tidak dapat diprediksi yang sangat berpengaruh terhadap hasil panen petani di Jawa Tengah, selain hal tersebut, kualitas SDM petani juga masih membutuhkan intervensi untuk dapat memberikan dampak positif pada peningkatan jumlah produksi di sektor pertanian.

Pada kurun waktu 2018-2022, jumlah produksi pada sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sangat fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan perubahan iklim atau cuaca yang tidak dapat diprediksi yang sangat berpengaruh terhadap hasil panen petani di Jawa Tengah. Selain hal tersebut, kualitas SDM petani juga masih membutuhkan intervensi untuk dapat memberikan dampak positif pada peningkatan jumlah produksi di sektor pertanian.

Pada periode tahun 2018-2020 komoditas padi mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan perubahan standar pengukuran produksi pada komoditas padi menggunakan kerangka sampling area (KSA). Produksi pada komoditas jagung juga masih fluktuatif. Sedangkan pada komoditas kedelai, produksinya menurun dikarenakan menurunnya luas tanam kedelai yang semakin menurun dan minat petani untuk menanam kedelai berkurang dibandingkan komoditas lain.

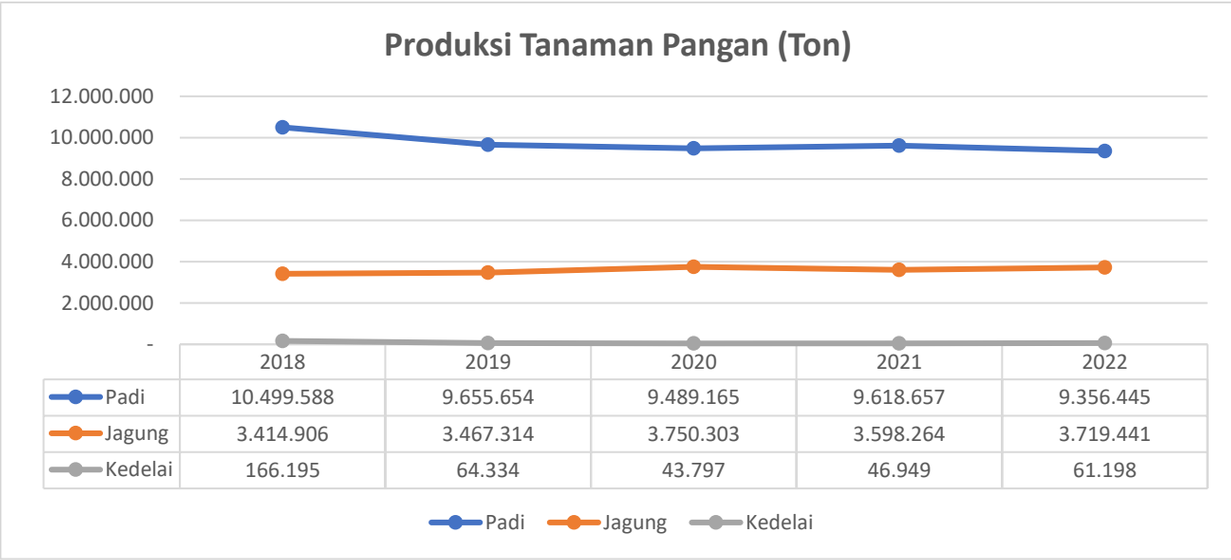

	2018	2019	2020	2021	2022
Padi	10.499.588	9.655.654	9.489.165	9.618.657	9.356.445
Jagung	3.414.906	3.467.314	3.750.303	3.598.264	3.719.441
Kedelai	166.195	64.334	43.797	46.949	61.198

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2022

Gambar 2.29.
Perkembangan Produksi Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2018-2022

Untuk sektor holtikultura, Komoditas utama di Jawa Tengah terdiri dari bawang merah dan cabai besar. Produksi bawang merah dan cabai besar pada kurun waktu Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, dengan produksi tertinggi bawang merah pada Tahun 2020 sebesar 611,165 Ton, sedangkan produksi tertinggi cabai besar pada Tahun 2022 sebesar 186,722 Ton. Pada komoditas bawang merah dan cabai besar masih diperlukan intervensi pada penyimpanan hasil panen dan fasilitasi distribusi untuk menjaga stabilitas stok dan harga mengingat komoditas ini menjadi pemicu inflasi di Jawa Tengah.

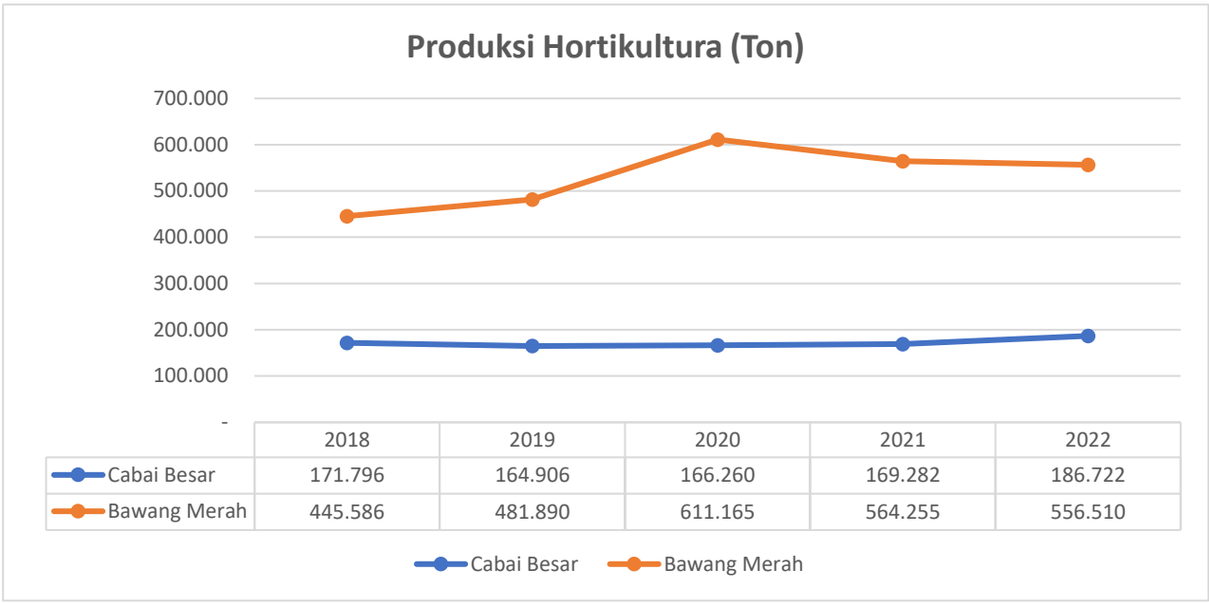

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2022

Gambar 2.30.
Perkembangan Produksi Bawang Merah, Cabai Besar
Tahun 2018-2022

Sementara itu, komoditas utama tanaman perkebunan di Jawa Tengah terdiri dari tebu, kopi, dan kelapa. Produksi komoditas tebu mengalami fluktuasi dengan produksi tertinggi pada 2019 sebesar 2.894.884 Ton, diperlukan upaya peningkatan produktivitas pada komoditas tebu antara lain melalui bongkar roton dan penggunaan bibit unggul. Demikian juga dengan produksi kopi dan kelapa juga mengalami fluktuasi dengan produksi kopi tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 26.549 Ton dan produksi kelapa tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 174.041 Ton.

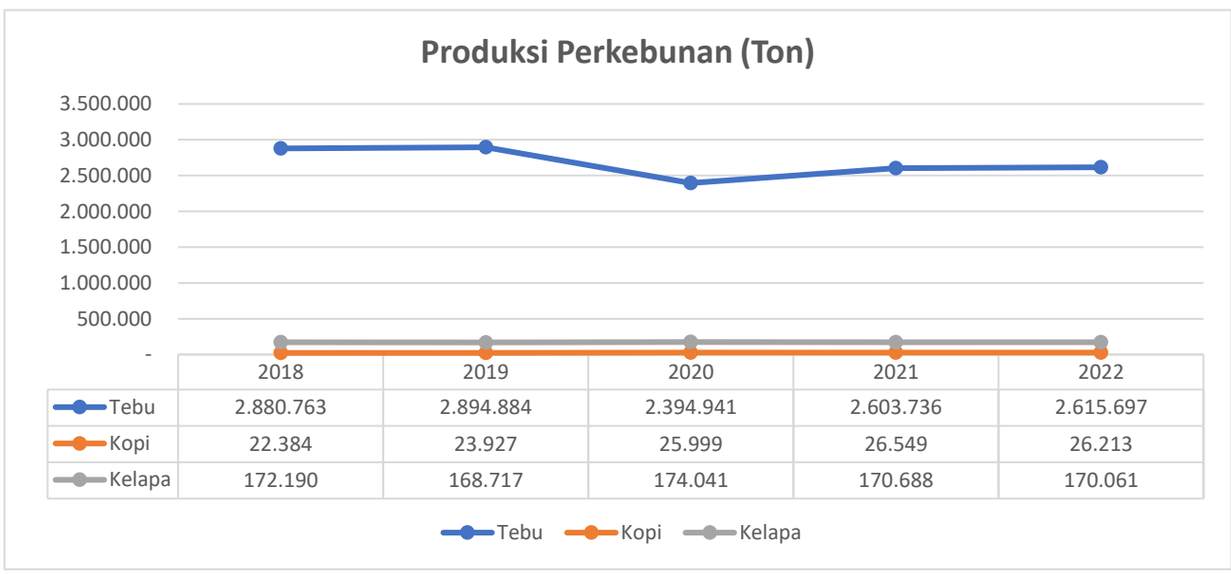

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2022

Gambar 2.31.
Perkembangan Produksi Tebu, Kopi, Kelapa Tahun 2018-2022

c. Produksi Peternakan

Produksi hasil peternakan di Jawa Tengah terutama ternak sapi potong dan kambing di Jawa Tengah mengalami tren yang fluktuatif pada kurun waktu Tahun 2018-2022. Pada komoditas sapi potong, jumlah populasi terus mengalami peningkatan hingga 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan

populasi tertinggi pada Tahun 2021 sebanyak 1.873.206 ekor. Pada komoditas kambing, perkembangan populasi memiliki tren fluktuatif dengan populasi tertinggi pada Tahun 2019 sebanyak 3.937.013 ekor. Penurunan jumlah populasi hewan ternak pada tahun 2022 disebabkan oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak ruminansia. Selain itu, usaha di sektor peternakan belum sepenuhnya pulih setelah mewabahnya PMK yang berimbas pada penurunan jumlah populasi ternak.

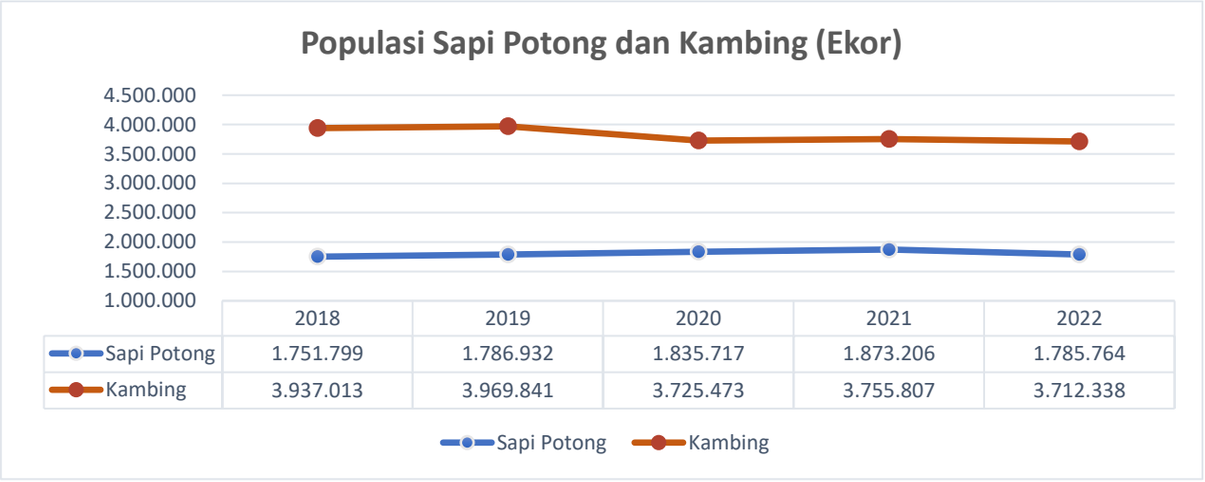

	2018	2019	2020	2021	2022
Sapi Potong	1.751.799	1.786.932	1.835.717	1.873.206	1.785.764
Kambing	3.937.013	3.969.841	3.725.473	3.755.807	3.712.338

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. 2022

Gambar 2.32.
Perkembangan Populasi Sapi Potong dan Kambing Tahun 2018-2022

Sehubungan dengan itu, Produksi hasil peternakan pada daging, susu, dan telur di Jawa Tengah relatif juga mengalami peningkatan. Produksi daging tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 457,456,564 Kg, produksi susu tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 105.613.011 Kg dan produksi telur mencapai titik tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 344,700,377 Kg.

Tantangan dalam peningkatan produksi susu adalah adanya penurunan populasi sapi perah dan penurunan kualiatas genetik sapi perah di Jawa Tengah. Banyak peternak sapi perah beralih ke usaha lain dianggap lebih menguntungkan. Faktor ketersediaan hijauan pakan dan masih ditemukan peredaran pakan konsentrat belum sesuai SNI yang mengakibatkan produksi tidak optimal. Selanjutnya tantangan peningkatan produksi telur yaitu antara lain harga pakan yang tinggi, ketersediaan pakan asal jagung yang belum berlanjut sementara ketergantungan terhadap jagung sangat tinggi produktivitas. Produksi daging, telur dan susu dapat dilihat pada gambar berikut.

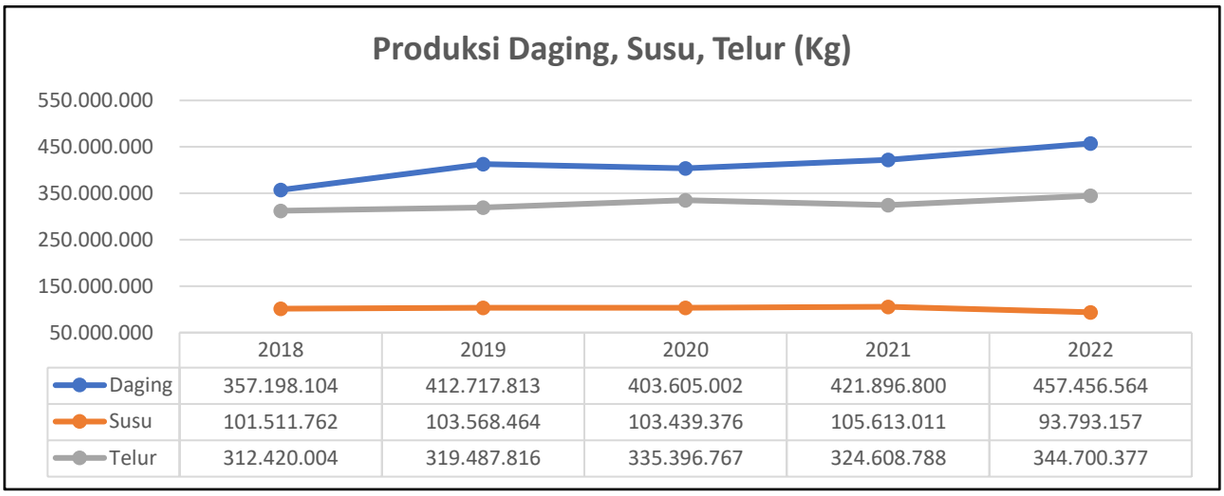

	2018	2019	2020	2021	2022
Daging	357.198.104	412.717.813	403.605.002	421.896.800	457.456.564
Susu	101.511.762	103.568.464	103.439.376	105.613.011	93.793.157
Telur	312.420.004	319.487.816	335.396.767	324.608.788	344.700.377

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. 2022

Gambar 2.33.
Perkembangan Produksi Daging, Susu, Telur
Tahun 2018-2022

d. Ketahanan Pangan

Kondisi ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Perwujudan ketahanan pangan dicapai melalui tiga pilar yaitu: (1) Ketersediaan pangan; (2) Cadangan pangan; serta (3) Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Capaian IKP Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2019–2022 dengan perkembangan semakin baik dan secara nasional IKP Jawa Tengah terbaik kedua. Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKP pada tahun 2022 sebesar 82,95 lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 82,73, tahun 2020 sebesar 82,31, dan tahun 2019 sebesar 78,85.

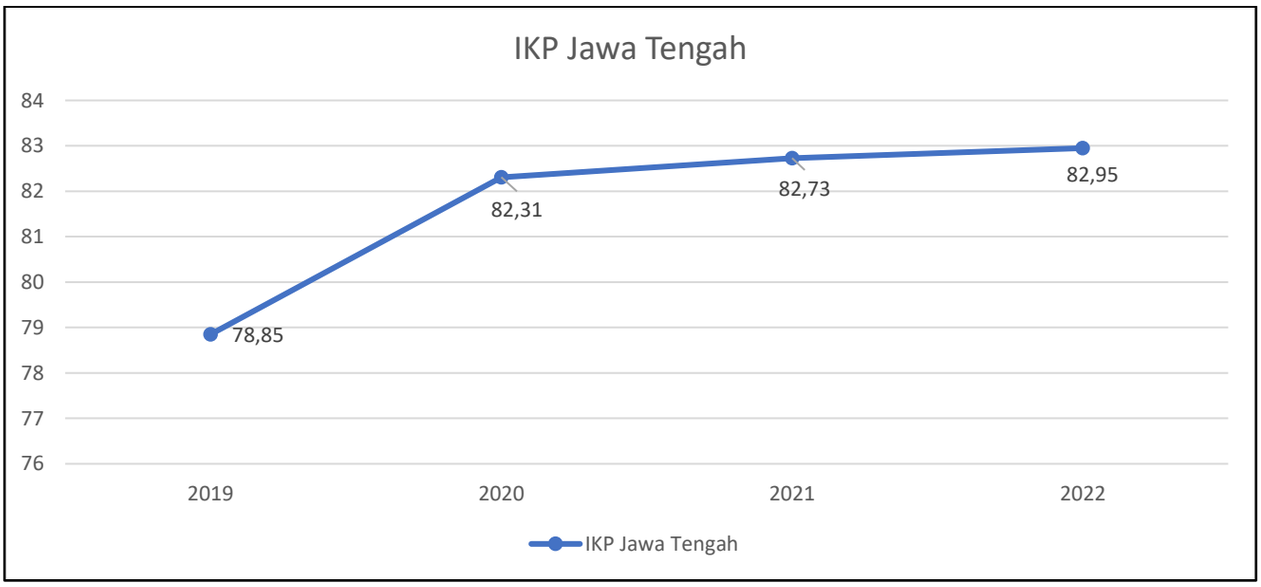

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022.

Gambar 2.34.
Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah
Tahun 2019 - 2022

Kemudian pada aspek ketersediaan pangan, dapat digambarkan melalui angka ketersediaan energi dan protein. Ketersediaan energi dan protein adalah ketersediaan zat gizi per kapita yang terkandung dalam makanan yang siap dikonsumsi setiap penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Pada

Tahun 2022 angka ketersediaan energi sebesar 3,797 Kkal/hari dengan ketersediaan protein 95,98 gram/hari dan lemak sebesar 57,99 gram/hari.

Tabel 2.28.
Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein Dan Lemak
Provinsi Jawa Tengah

Tahun Penyusunan	ATAP	Energi (Kkal/hari)			Protein (Gram/hari)			Lemak (Gram/hari)		
		Total	Nab	Hew	Total	Nab	Hew	Total	Nab	Hew
2016	2015	4,618	4,499	118	100.92	90.65	11.19	48.15	42.3	5.84
2017	2016	4,055	3,925	130	109.03	97.84	11.19	62	55.24	6.76
2018	2017	4,027	3,886	141	114.46	98.77	15.69	60.88	52.92	7.96
2019	2018	3,730	3,605	125	87.83	75.45	12.38	76.24	68.38	7.86
2020	2019	3,732	3,604	128	87.97	74.69	13.27	40.41	32.75	7.65
2021	2020	3,736	3,607	129	98.17	84.51	13.66	56.38	48.74	7.63
2022	2021	3,797	3,680	118	95.98	83.82	11.75	57.99	50.82	7.17

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Selanjutnya kondisi ketahanan dan kerentanan pangan ditunjukkan melalui peta *Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)*. Peta FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan dan disusun berdasarkan aspek ketersediaan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan. Kondisi ketahanan dan kerentanan pangan peta FSVA diukur pada prioritas 1 sampai 6. Pada tahun 2022, dari total 576 kecamatan terdapat 46 kecamatan dengan kategori agak rentan (prioritas 3), 27 kecamatan dengan kategori rentan (prioritas 2) dan 5 kecamatan dengan kategori sangat rentan (prioritas 1). Kecamatan dengan prioritas 1, 2 dan 3 merupakan prioritas lokasi penanganan kerentanan dan ketahanan pangan di Jawa Tengah. Kondisi dan peta FSVA Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.

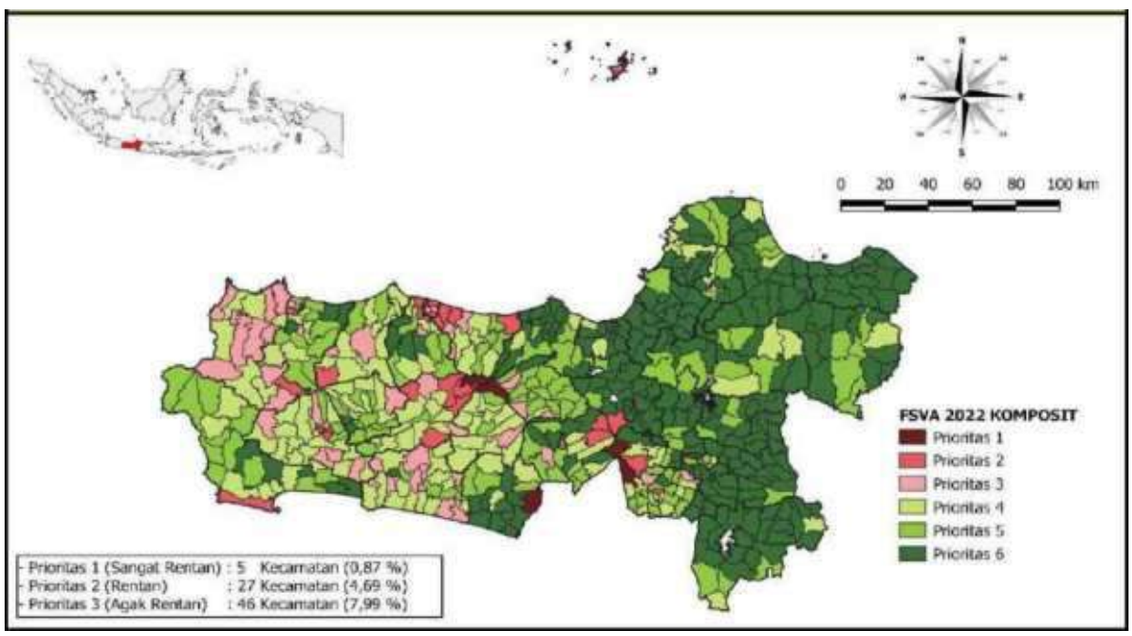

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.35.
Peta *Food Security And Vulnerability Atlas* (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Kemudian keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Berdasarkan skor PPH Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022 untuk kelompok pangan umbi-umbian dan pangan hewani masih dibawah standar sehingga perlu upaya untuk peningkatan konsumsi, sedangkan disisi lain masih banyak terjadi pemborosan pangan yang perlu segera ditangani. Secara rinci perkembangan skor PPH Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022 sebagai berikut.

Tabel 2.29.
Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

No	Kelompok Pangan	Standar	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi-padian	25,0	25,00	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	1,42	1,1	0,9	0,9	1,1
3	Pangan Hewani	24,0	17,09	20,0	20,4	21,0	22,9
4	Minyak & lemak	5,0	5,00	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,0	0,70	0,5	0,4	0,4	0,4
6	Kacang-kacangan	10,0	10,00	6,4	6,1	6,3	8,0
7	Gula	2,5	2,37	2,1	2,1	2,1	2,0
8	Sayur & buah	30,0	25,71	29,5	27,1	26,0	30,0
9	Lain-lain	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skor PPH Jateng		**100,0**	**91,80**	**86,41**	**89,6**	**87,1**	**94,4**
Skor PPH Nasional		**100,0**	**85,20**	**90,40**	**90,8**	**87.9**	**92,9**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, 2022

e. Produksi Perikanan dan Kelautan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung peningkatan konsumsi protein dan pangan hewani, sektor perikanan juga turut mengambil peran. Sektor perikanan terdiri dari perikanan tangkap dan budidaya, selain itu juga didukung dengan pengelolaan kawasan pesisir, termasuk di dalamnya pergaraman.

Produksi perikanan tangkap menunjukkan penurunan dari tahun 2018 – 2022, salah satu penyebabnya karena belum seluruhnya nelayan memiliki keterampilan. Berdasarkan data jumlah nelayan yang memiliki kompetensi sebanyak 3.444 (18%) dari jumlah total sebanyak 129.620 nelayan. Selain itu kapal yang menerapkan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) sangat sedikit yaitu sebanyak 204 kapal atau (0,74%) dari total kapal di Jawa Tengah sebanyak 27.488 unit. Perkembangan produksi perikanan tangkap ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

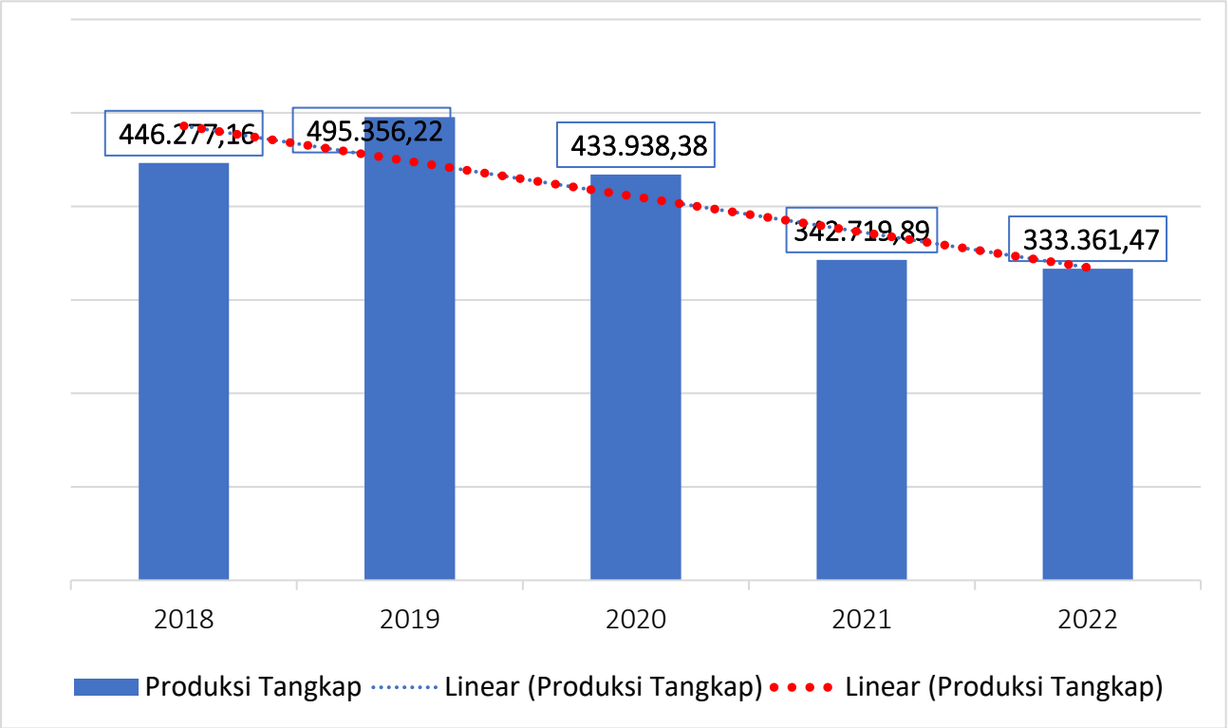

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.36.
Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

Dari sisi prasarana yang menunjang produksi perikanan tangkap, Provinsi Jawa Tengah memiliki 11 (sebelas) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Secara umum Pelabuhan Perikanan di Jawa Tengah telah memiliki kriteria yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kapasitas dermaga maupun kolam pelabuhan dan breakwater (penahan gelombang) mengingat semakin meningkatnya jumlah kapal.

Tabel 2.30.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Provinsi Jawa Tengah

KRITERIA TEKNIS :		**PPP Tegalsari**	**PPP Karimunjawa**	**PPP Tasikagung**	**PPP Bajomulyo**	**PPP Morodemak**	**PPP Tawang**	**PPP Klidanglor**	**PPP Wonokerto**	**PPP Asemdoyong**	**PPP Larangan**	**PPP Lohgending**
Fasilitas	*Standar*											
Tambat labuh Kapal	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT
Panjang Dermaga	≥ 100 m	694 m	160 m	2400 m	693 m	400 m	450 m	300 m	450 m	215 m	130 m	414 m
Kedalaman Kolam	Min >2 m	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	Sesuai	Sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	Sesuai
Daya tampung	30 Unit Kapal/Total 300 GT	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal
Lahan	5 Ha	16.3 Ha	16,4 Ha	9,659 Ha	6,36 Ha	3,9 Ha	0,7 Ha	50 Ha	0,8 Ha	2,2 Ha	5,1 Ha	18,7 Ha
PENUNJANG :												
Hasil Perikanan	rata-rata 5 Ton/Hari	169 Ton	5,2 Ton	19,2 Ton	87 Ton	13 Ton	1,5 Ton	51 Ton	0,5 Ton	29 Ton	2,8 Ton	0,9 Ton
Terdapat Industri Pengolahan Ikan	Perusahaan / UPI mikro	27	5	220	10	127	Ada	62	Ada	95	Ada	Ada
Industri Penunjang Lainnya	perusahaan	478	1	2	19	4	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
KETERANGAN :												
Jumlah Kapal		335	358	359	318	46	759	153	421	253	138	83
< 10 GT		1	351	0	0	0	700	0	332	227	109	83
10-30 GT		54	7	155	34	46	59	114	89	26	29	0

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Disisi lain, risiko kecelakaan yang dihadapi nelayan saat melaut cukup tinggi, maka perlu diberikan perlindungan kepada nelayan dalam bentuk asuransi nelayan. Melalui asuransi nelayan diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi individu nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan paruh waktu, nelayan buruh, wanita nelayan dan ABK kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT). Nelayan Jawa Tengah yang sudah memperoleh bantuan premi asuransi sebesar 40.000 nelayan dari total 129.620 nelayan. Tercatat pada tahun 2019 sebanyak 50 klaim dengan nilai Rp.1.216.262.959, pada tahun 2021 sebanyak 12 klaim dengan nilai Rp.201.846.000, dan pada tahun 2022 sebanyak 93 klaim dengan nilai Rp 1.536.491.607

Sedangkan pada produksi perikanan budidaya relatif mengalami peningkatan karena didukung dengan peningkatan luas lahan budidaya dan adanya pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan. Perkembangan produksi perikanan budidaya ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

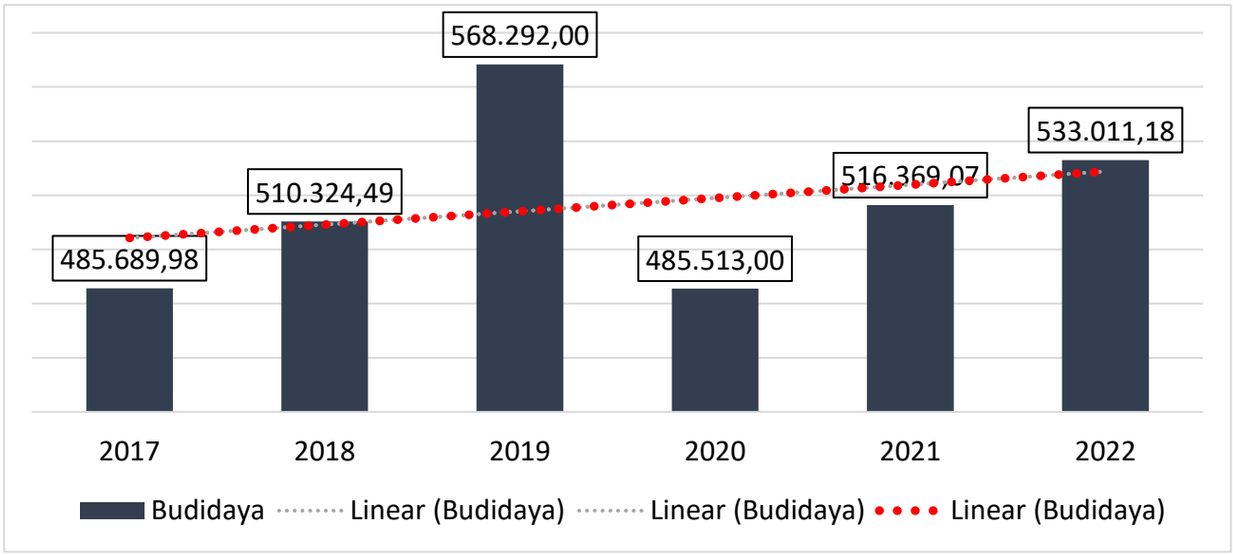

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.37.
Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2022

Peningkatan luas lahan terlihat dari saat ini total seluas 419.394.272 m² yang terdiri dari lahan budidaya intensif - semi intensif 59. 938.532 m² dan lahan tradisional 359.455.740 m², serta didukung dengan jumlah pembudidaya tradisional sebanyak 220.229 orang dan pembudidaya intensif-semi intensif sebanyak 4.948 orang. Adapun jumlah pembudidaya yang berkompeten/terampil 1.323 orang (0,60%) dari keseluruhan pembudidaya. Selain itu, terdapat sejumlah pembudidaya yang bersertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik sebanyak 231, Cara Pembenihan Ikan Yang Baik sebanyak 93, serta Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik sebanyak 9 unit.

Dari sisi prasarana yang menunjang produksi perikanan budidaya, Provinsi Jawa Tengah memiliki sepuluh loka perikanan budidaya berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Budidaya Air Tawar dan Payau Nomor B.22151/DJPB/X/2021, bahwa pemerintah provinsi berperan sebagai penyedia induk unggul dan benih bermutu di lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Dalam lima tahun

terakhir, produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan. Namun terdapat beberapa tantangan dalam mengelola perikanan budidaya antara lain kondisi prasarana dan sarana yang belum memadai, serta penurunan kualitas dan kuantitas induk nila, lele, dan gurame. Penurunan kualitas induk tersebut menyebabkan calon induk yang dihasilkan menurun performa dan jumlahnya. Penurunan performa terjadi pada induk kelas GGPS (great grand parent stock), kelas GPS (grand parent stock) maupun benih kelas sebar.

Selain itu, pada aspek kelestarian sumber daya ikan perlu dilakukan upaya pelestarian ikan jenis endemik lokal Jawa Tengah, misalnya jenis ikan beong, wader, nilem, tawes, derbang, gabus, dan dewa. Upaya pelestarian ini memberi manfaat untuk aspek konservasi maupun aspek ekonomi. Dalam aspek konservasi berfungsi untuk mempertahankan dari kepunahan plasma nutfah serta mempertahankan keanekaragaman jenis ikan lokal di perairan umum. Sedangkan secara ekonomi akan meningkatkan pendapatan nelayan perairan umum daratan karena ikan endemik memiliki rasa yang khas, unik serta bermanfaat bagi kesehatan sehingga harganya mahal. Namun masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu belum adanya prasarana dan sarana secara khusus untuk mengembangkan ikan endemik.

Sedangkan pada pergaraman, secara umum produksi garam mengalami penurunan, disebabkan karena musim kemarau basah cukup lama. Perkembangan produksi garam ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

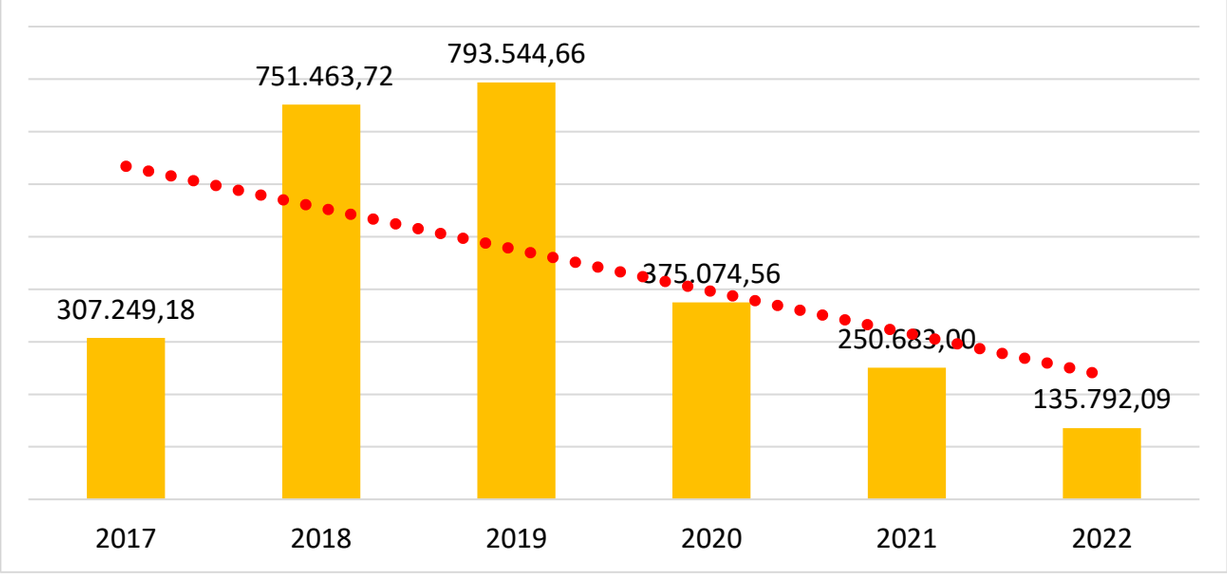

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.38.
Produksi Garam (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

Hal ini dapat diminimalisir dengan penerapan teknologi pergaraman berupa penggunaan geoisolator (geomembran), rumah tunnel, gudang garam yang standar serta peralatan pencucian garam. Eksisting luas tambak garam yang menerapkan teknologi seluas 3.316,2 hektar atau 51% dari luas total 6.419,7 hektar. Pada aspek pemberdayaan masyarakat, dilakukan sertifikasi kompetensi bagi petambak garam.

Di sisi lain, tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah pada periode 2018 – 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih berada di bawah angka

nasional. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

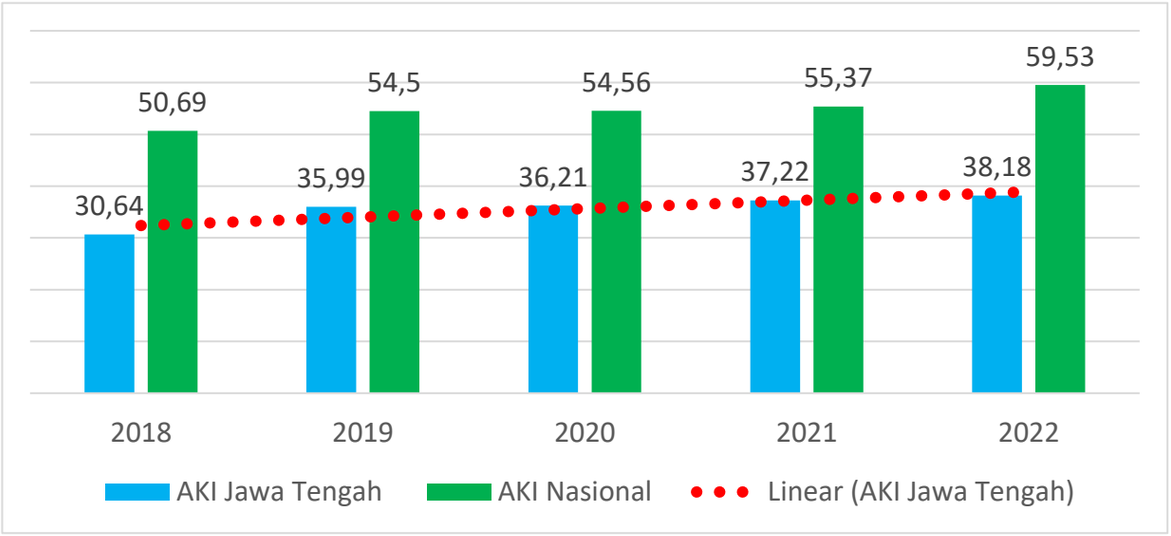

Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.39.
Angka Konsumsi Ikan di Nasional dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

Angka konsumsi ikan Jawa Tengah masih dibawah nasional disebabkan beberapa hal yaitu antara lain masih terdapat pemahaman yang salah di masyarakat bahwa ikan dapat memberikan dampak buruk berupa gatal, bau amis, dan alergi; harga produk ikan relatif lebih tinggi dibandingkan sumber protein lainnya; serta ragam pengolahan ikan yang belum bervariasi. Sedangkan pada aspek pengolahan masih didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil dengan segala keterbatasan terutama pada aspek pemenuhan standar kelayakan produksi.

2.3.8 Koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Jumlah koperasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018 – 2022 cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Apabila pada tahun 2019 jumlah koperasi sebanyak 22.274 unit dengan presentase koperasi aktif sebesar 84,22%, maka pada tahun 2020 sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian Jawa Tengah dan kinerja koperasi, maka jumlah koperasi meskipun mengalami kenaikan, tetapi dari tingkat keaktifan terus menunjukkan penurunan. Selain dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, meningkatnya jumlah koperasi tidak aktif juga disebabkan tingginya jumlah koperasi yang sedang menunggu pengesahan status pembubaran dan pencabutan badan hukumnya dari lembaran berita negara sebagai dampak dari kebijakan percepatan pembubaran koperasi oleh Kementerian Koperasi UKM RI dalam rangka mewujudkan koperasi modern. Sejak tahun 2017 terdapat 3.768 unit koperasi yang telah resmi dibubarkan, dan 115 koperasi yang masih dalam proses penelaahan di Kementerian Koperasi UKM RI untuk dilakukan pembubaran. Secara lengkap data koperasi se-Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31.

Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Koperasi Se-Jawa Tengah

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
1.	Jumlah Koperasi	26.458	22.274	19.447	20.777	21.018
2.	Jumlah Koperasi aktif	21.832	18.759	13.090	10.770	10.327
3.	Prosentase Kopereasi Aktif (%)	82,51	84,22	67,35	48,16	49,13

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2022.

**Data tahun 2022 merupakan data sementara pra rekonsiliasi dengan Kabupaten/kota*

Hasil pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi dapat dilihat dari capaian indikator persentase koperasi sehat. Persentase koperasi sehat di Jawa Tengah mengalami kenaikan dimana pada tahun 2018 sebesar 19,62 persen sedangkan pada tahun 2022 sebesar 23,73 persen, hal ini didukung adanya kolaborasi antar bidang dalam pembinaan koperasi melalui kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan sehingga koperasi mampu meningkatkan kualitas dan kinerja koperasi dalam kelembagaan dan usahanya. Untuk Perkembangan tingkat Kesehatan koperasi di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.32.

Jumlah KSP/USP Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Se-Jawa Tengah (KSP/USP)	16.344	13.101	12.774	12.903	13.166
2.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Provinsi (KSP/USP) yang dinilai kesehatannya	474	454	128	222	375
3.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi Sehat (unit)	93	115	30	29	89
4.	Prosentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi Sehat (%)	19,62	25,33	23,44	13,06	23,73

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2022.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara sinergi bersama dengan segenap pihak senantiasa melakukan pembinaan UMKM berkelanjutan. Jumlah UMKM yang telah dibina menunjukkan peningkatan dari sebanyak 143.738 unit pada tahun 2018 menjadi 180.579 unit pada tahun 2022. Penyerapan tenaga kerja dari UMKM juga meningkat dari sebesar 1.043.320 orang pada tahun 2018 menjadi sebanyak 1.330.343 orang pada tahun 2022. Aset UMKM juga meningkat dari sebesar Rp.29.824 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp 38.898 milyar pada tahun 2022. Demikian juga omset mengalami peningkatan dari sebesar Rp.55.691 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp 68.581 milyar pada tahun 20. Secara rinci data UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33.

Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah UMKM Binaan	UMKM	143,738	161,458	167,391	173,431	180,579
	– Produksi/Non Pertanian	UMKM	49,328	55,275	57,527	60,449	65,063
	– Pertanian	UMKM	23,956	26,833	27,653	28,284	28,400
	– Perdagangan	UMKM	53,063	59,836	62,083	63,965	65,979
	– Jasa	UMKM	17,391	19,514	20,128	20,733	21,137
2	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	1,043,320	1,312,400	1,298,007	1,311,015	1,330,343
3	Asset	Rp. Milyar	29,824	38,158	38,353	38,521	38,898
4	Omzet	Rp. Milyar	55,691	67,550	67,087	68,242	68,581

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2022.

Dukungan kredit perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank menjadi hal yang cukup penting dalam rangka pengembangan UMKM. Penyaluran kredit bagi UMKM dapat dilihat dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari tahun 2018-2022 per kabupaten/kota yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34.

Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari Tahun 2018-2022 per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Penyaluran Kur per wilayah	Tahun									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)
1	KAB. CILACAP	38	856,659,249,002	41,355	960,285,860,282	49,966	1,394,346,710,619	67,017	2,129,737,861,185	71,016	2,624,919,833,453
2	KAB. BANYUMAS	50,460	1,178,085,177,264	55,115	1,282,747,263,690	62,067	1,722,310,316,244	81,032	2,592,038,105,781	84,593	3,076,948,656,311
3	KAB. PURBALINGGA	22,649	501,592,223,432	25,654	602,714,584,855	27,689	803,732,756,908	40,839	1,299,152,047,779	40,276	1,442,972,839,914
4	KAB. BANJARNEGARA	26,102	523,179,431,304	29,766	632,705,263,546	36,186	899,705,181,588	42,432	1,251,222,195,514	44,733	1,521,610,585,804
5	KAB. KEBUMEN	24,158	538,823,990,024	25,513	573,708,207,067	34,149	952,579,273,357	42,936	1,388,686,443,433	41,576	1,645,011,183,407
6	KAB. PURWOREJO	20,917	376,431,320,603	21,332	408,576,873,790	28,451	698,850,237,182	35,719	1,027,427,376,945	36,796	1,332,611,684,888
7	KAB. WONOSOBO	25,026	461,715,984,838	23,057	515,131,370,783	29,502	786,462,223,780	32,089	1,087,479,988,575	34,258	1,335,876,474,453
8	KAB. MAGELANG	30,992	702,174,782,519	32,030	732,548,594,861	40,950	1,097,838,191,734	46,039	1,460,713,188,234	49,489	1,867,082,199,837
9	KAB. BOYOLALI	26,929	676,618,908,508	31,959	828,780,579,519	37,366	1,112,557,697,460	45,996	1,606,818,765,940	49,694	2,077,453,794,156
10	KAB. KLATEN	34,572	879,808,412,373	37,544	982,285,115,877	51,196	1,444,646,931,716	61,939	2,121,148,190,896	63,467	2,681,277,315,450
11	KAB. SUKOHARJO	24,163	615,378,379,858	25,087	706,836,957,302	34,744	1,081,776,881,390	42,854	1,582,353,275,797	41,976	1,920,002,945,800
12	KAB. WONOGIRI	23,421	574,459,496,201	25,496	685,671,001,093	35,877	1,087,998,374,407	46,919	1,590,755,342,861	49,380	2,044,594,999,547
13	KAB. KARANGANYAR	25,500	610,990,807,640	27,911	722,856,807,398	35,901	1,088,590,422,286	43,330	1,569,531,753,495	44,436	2,053,690,544,527
14	KAB. SRAGEN	30,639	761,472,883,668	34,534	899,981,114,268	40,635	1,300,547,042,229	52,677	2,013,289,872,710	54,400	2,541,688,588,633
15	KAB. GROBOGAN	44,130	802,071,291,527	49,175	979,056,006,113	67,026	1,542,288,553,779	82,266	2,405,075,535,917	89,416	3,173,851,980,803
16	KAB. BLORA	55,268	1,035,403,109,778	57,549	1,210,374,601,719	73,654	1,699,912,069,917	75,130	2,104,246,917,986	76,514	2,611,075,351,064
17	KAB. REMBANG	22,861	462,869,548,005	25,223	544,814,780,697	28,769	699,336,336,217	32,345	1,010,725,024,881	36,240	1,369,369,188,553
18	KAB. PATI	60,583	1,316,275,974,087	66,826	1,486,154,011,274	79,555	2,249,691,305,260	80,544	2,797,359,822,366	83,493	3,631,451,274,447
19	KAB. KUDUS	21,345	541,886,029,299	23,425	589,874,956,352	26,887	780,606,313,383	29,209	1,061,448,572,509	32,328	1,436,607,198,786
20	KAB. JEPARA	29,831	651,902,295,805	35,160	740,258,155,922	36,752	954,019,977,024	46,850	1,474,838,409,206	50,478	1,976,896,899,818
21	KAB. DEMAK	29,097	627,563,823,928	32,212	769,213,338,424	36,477	1,020,473,479,231	42,974	1,527,633,391,898	48,849	2,037,771,456,030
22	KAB. SEMARANG	27,386	672,318,320,669	30,419	765,945,740,676	41,340	1,098,366,277,769	44,383	1,651,074,085,410	46,723	2,095,318,514,959
23	KAB. TEMANGGUNG	22,851	463,444,943,399	23,732	522,430,931,880	32,682	812,940,656,417	37,125	1,149,057,568,683	40,697	1,449,775,849,161

No	Penyaluran Kur per wilayah	Tahun									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)
24	KAB. KENDAL	21,407	504,425,741,198	27,899	652,804,255,069	39,596	999,378,230,464	42,382	1,403,642,495,261	44,397	1,722,038,355,016
25	KAB. BATANG	17,048	365,752,159,664	21,407	443,649,337,912	24,481	661,257,570,763	32,120	1,066,373,925,602	37,065	1,353,706,515,946
26	KAB. PEKALONGAN	15,636	310,398,836,804	18,725	378,276,899,231	24,150	629,124,933,039	31,580	981,476,531,591	35,577	1,222,824,400,202
27	KAB. PEMALANG	30,058	569,317,904,509	36,203	739,922,402,326	48,814	1,164,357,376,954	62,162	1,773,175,921,199	65,552	2,157,929,858,009
28	KAB. TEGAL	43,492	867,744,725,423	47,475	1,021,705,034,995	56,474	1,432,849,120,987	73,900	2,057,898,435,824	77,384	2,450,206,822,298
29	KAB. BREBES	72,596	1,256,158,500,939	75,573	1,417,876,938,238	86,856	1,956,644,782,697	93,977	2,558,951,345,370	102,660	3,080,273,062,920
30	KOTA MAGELANG	3,118	84,218,967,491	3,417	79,949,600,586	4,993	130,892,399,071	4,793	159,603,112,815	4,827	216,101,106,000
31	KOTA SURAKARTA	12,767	354,224,755,149	13,086	391,251,167,491	19,305	593,619,780,111	30,071	1,047,482,051,404	27,952	1,290,010,839,228
32	KOTA SALATIGA	4,532	124,949,506,233	4,771	128,492,192,604	5,926	179,309,053,998	5,676	220,769,639,245	6,110	320,100,400,000
33	KOTA SEMARANG	18,922	626,331,699,058	21,371	695,195,395,549	31,861	1,070,732,933,645	37,328	1,702,978,989,436	42.230	2,430,847,721,262
34	KOTA PEKALONGAN	5,711	119,476,891,400	6,464	150,943,612,600	7,247	224,298,605,237	10,143	323,354,337,497	11,052	386,682,529,242
35	KOTA TEGAL	7,507	193,973,622,844	7,676	229,764,739,800	7,889	262,776,282,173	9,515	360,062,578,224	10,930	464,287,866,282

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2022.

2.3.9 Perdagangan

Sektor perdagangan semenjak dari tahun 2016 hingga tahun 2021 memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Jawa Tengah dan hingga saat ini merupakan tiga besar sektor dengan kontribusi terbesar setelah sektor industri pengolahan, dan pertanian. Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan tahun 2021 sebesar 195.399.044,07 juta rupiah, dan memberikan kontribusi terhadap total PDRB ADHB Jawa Tengah sebesar 13,75 persen. Nilai dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2016-2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35.
Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai total PDRB (Milyar Rp)	1.268.261,17	1.360.960,13	1.347.922,69	1.420.799,91	1.560.899,02
2	Nilai Sektor Perdagangan (Milyar Rp)	172.944,07	187.064,45	181.860,78	195.399,04	212.208,01
3	Kontribusi (%)	13,64	13,74	13,48	13,75	13,60

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Total ekspor Jawa Tengah selama tahun 2018-2022 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 yang menurun karena pengaruh dari pandemi Covid-19. Nilai ekspor tahun 2018 tercatat sebesar US$8.260,18 juta, menurun menjadi sebesar US$8.088,33 juta pada tahun 2020, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar US$11.777,91 juta. Ekspor Jawa Tengah terdiri dari ekspor migas dan nonmigas dengan proporsi lebih besar pada ekspor nonmigas, yang selama kurun waktu tahun 2018-2020 trennya sejalan dengan tren nila ekspor total di Jawa Tengah.

Nilai ekspor nonmigas Jawa Tengah pada tahun 2018 tercatat sebesar US$8.091,62 juta, menurun menjadi sebesar US$7.704,24 juta pada tahun 2020, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar US$11.210,92 juta. Namun, untuk nilai ekspor migas Jawa Tengah selama lima tahun terakhir tetap meningkat dan tidak mengalami penurunan pada tahun 2020. Nilai ekspor migas Jawa Tengah tahun 2018 tercatat sebesar US$168,55 juta, meningkat menjadi US$566,99 juta pada tahun 2022.

Komoditas utama golongan barang yang memiliki peran terbesar pada ekspor nonmigas Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah komoditas pakaian dan aksesorisnya (bukan rajutan) yang tercatat sebesar US$2.470,91 juta atau 22,04 persen dari nilai ekspor nonmigas Jawa Tengah. Komoditas berikutnya adalah pakaian dan aksesorisnya (rajutan) sebesar US$1.450,72 juta (12,94 persen), komoditas alas kaki sebesar US$1.283,83 juta (11,45 persen), dan komoditas kayu dan barang dari kayu sebesar US$1.130,20 juta (10,08 persen). Nilai komoditas tersebut meningkat dari nilai pada tahun 2021. Perkembangan ekspor Jawa Tengah baik migas dan nonmigas dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.36.
Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022 (Juta US$)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor	**8.260,18**	**8.516,70**	**8.088,30**	**10.733,44**	**11.777,91**
- Migas	168,55	303,86	384,06	438,99	566,99
- Non Migas	8.091,62	8.212,84	7.704,24	10.294,45	11.210,92

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Sementara itu, total nilai impor Jawa Tengah selama tahun 2018-2022 Cukup fluktuatif, di mana pada tahun 2018-2020 trennya menurun, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Nilai impor Jawa Tengah tahun 2018-2020 tercatat sebesar US$14.779,38 juta menurun menjadi US$8.719,80 juta, kemudian meningkat menjadi US$15.013,61 juta pada tahun 2022. Nilai impor migas Jawa Tengah pada tahun 2022 tercatat sebesar US$7.435,63 juta, meningkat cukup signifikan dari tahun 2021 yang sebesar US$4.440,52 juta.

Demikian juga untuk impor nonmigas Jawa Tengah yang pada tahun 2022 mencatatkan nilai sebesar US$7.577,98 juta, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar US$7.341,27 juta. Komoditas impor nonmigas terbesar adalah golongan mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya yang pada tahun 2022 tercatat sebesar US$810,13 juta atau sebesar 10,69 persen dari total nilai impor Jawa Tengah. Komoditas selanjutnya adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar US$699,49 juta (9,23 persen), serta plastik dan barang dari plastik sebesar US$657,03 juta (8,67 persen). Perkembangan nilai impor Jawa Tengah baik migas dan nonmigas dapat dilihat di tabel sebagai berikut

Tabel 2.37.
Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022 (Juta US$)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Impor	**14.779,38**	**12.567,62**	**8.719,80**	**11.781,79**	**15.013,61**
- Migas	5.635.27	3.906,03	2.154,76	4.440,52	7.435,63
- Non Migas	9.144,12	8.661,59	6.565,04	7.341,27	7.577,98

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Neraca perdagangan Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami defisit, di mana selama tahun 2018-2020 mengalami penurunan defisit, namun kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2018, neraca perdagangan Jawa Tengah mengalami defisit sebesar US$6.519,20 juta, menurun pada tahun 2020 sebesar US$631,5 juta. Pada tahun 2021 defisit kembali meningkat menjadi US$1.048,35 juta, dan semakin meningkat pada tahun 2022 menjadi US$3.235,70 juta. Defisit dalam neraca perdagangan Jawa Tengah pada tahun 2022 dipicu oleh defisit sektor migas sebesar US$6.868,64 juta. Sementara di sisi lain, sektor nonmigas mencatatkan surplus pada neraca perdagangan Jawa Tengah sebesar US$3.632,94 juta.

Perkembangan neraca perdagangan Jawa Tengah tahun 2018- 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38.
Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022 (Juta US$)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor	**8,260.18**	**8.516,70**	**8.088,30**	**10.733,44**	**11.777,91**
- Migas	168.55	303,86	384,06	438,99	566,99
- Non Migas	8,091.62	8.212,84	7.704,24	10.294,45	11.210,92
Impor	**14,779.38**	**12.567,62**	**8.719,80**	**11.781,79**	**15.013,61**
- Migas	5.635,27	3.906,03	2.154,76	4.440,56	7.435,63
- Non Migas	9.144,12	8.661,59	6.565,04	7.341,23	7.577,98
Surplus/Defisit	**(6.519,20)**	**(4.050,92)**	**(631,5)**	**(1.048,35)**	**(3.235,70)**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Guna mendukung peningkatan ekspor nonmigas Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memfasilitas penerbitan sertifikasi mutu barang. Untuk penerbitan sertifikasi mutu barang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2018 mencapai 260 sertifikat untuk lima jenis barang, meningkat menjadi 2.019 sertifikat untuk tujuh jenis barang pada tahun 2022.

Tabel 2.39.
Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Usaha Perdagangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah izin usaha perdagangan luar negeri (Angka Pengenal Impor - unit)	260	2.437	1.767	1.925	2.019
2	Jumlah jenis barang bersertifikat mutu (jenis)	5 jenis barang	5 jenis barang	7 jenis barang	6 jenis barang	7 jenis barang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam rangka pelaksanaan konsumen cerdas, yang diharapkan konsumen dapat untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan mutu dan kualitas maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan kabupaten/kota melakukan upaya perlindungan konsumen. Namun demikian apabila terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Jumlah LPKSM sampai dengan tahun 2021 sebanyak 3 unit yaitu di 3 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Tabel 2.40.
Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (kab/kota)	14	8	4	1	0
2	Jumlah kabupaten/kota memiliki Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM (kab/kota)	28 di 29 Kab/Kota	18 di 9 Kab/Kota	18 di 9 Kab/Kota	3 di 3 kab kota	5 di 4 Kab/Kota
3	Persentase penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK kabupaten/kota (%)	68 Kasus (100%)	111 kasus (100%)	27 kasus (100%)	6 kasus (100%)	0 kasus (-)
4	Jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) (jenis)	1.124	3.512	2.741	1.228	305

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Lebih lanjut dalam rangka lebih memperkuat daya tahan industri dan perdagangan di dalam negeri telah diinisiasi pula upaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; serta memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. Adapun sasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri meliputi peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian kementerian/lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta maupun masyarakat; peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN); peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN; serta peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri.

2.3.10 Perindustrian

Kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk sektor industri pada tahun 2021 sebesar 487.445.099,28 juta rupiah, dan memberikan kontribusi sebesar 34,31 persen terhadap total PDRB yang sebesar 1.420.799.908,38 juta rupiah. Nilai dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai total PDRB (Juta Rp)	1.268.454.783,96	1.362.457.380,57	1.347.922.689,03	1.420.799.908,38	1.157.316.832,47
2	Nilai Sektor Industri (Juta Rp)	436.477.149,74	468.992.159,77	464.609.134,06	487.445.099,28	392.749.654,42
3	Kontribusi (%)	34,41	34,41	34,47	34,31	33.94

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Capaian pertumbuhan industri besar di Jawa Tengah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Industri besar dari 972 unit usaha pada tahun 2016 menjadi 2.417 unit usaha pada tahun 2021. Untuk jumlah IKM di tahun 2021 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. IKM di tahun 2021 sebanyak 912.421 unit usaha meningkat dibanding tahun 2016 yang sebesar 449.090 unit usaha.

Tabel 2.42.
Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Industri	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Besar	1.228	1.584	1.591	2.417	2.982
2	Kecil dan Menengah	325.091	327.110	327.200	912.421	204.608

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dari sejumlah industri yang berkembang di Jawa Tengah, beberapa jenis industri menjadi industri unggulan daerah dan dijadikan sebagai kompetensi inti industri meliputi industri mebel, tekstil produk tekstil, makanan ringan, mesin dan perlogaman, komponen otomotif, dan kerajinan. Pola pengembangan industri tersebut diarahkan melalui pendekatan pembentukan klaster industri potensial untuk meningkatkan jejaring dan rantai nilai industri unggulan daerah yang melibatkan industri utama, industri pendukung dan usaha terkait. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk kelembagaan klaster industri sebanyak 19 klaster terdiri dari 6 klaster logam mesin dan tekstil, 7 klaster komponen otomotif, elektronika, aneka, serta 6 klaster agro, kimia dan hasil hutan.

Tabel 2.43.
Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022

No	Jenis industri	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	jumlah klaster logam, mesin, tekstil	6	6	6	6	6
2	jumlah klaster komponen otomotif, elektronika dan aneka	7	7	7	7	7

No	Jenis industri	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Jumlah klaster agro, kimia dan hasil hutan	6	6	6	6	7
	Jumlah klaster industri	**19**	**19**	**19**	**19**	**20**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Selain itu dalam pengembangan kelembagaan usaha sektor industri tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 3 (tiga) lembaga industri meliputi Pokja Industri pada Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), dan Mitra Praja Utama.

2.3.11 Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Dalam pelaksanaannya capaian indikator kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.44.
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Indikator	Capaian
1	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	9,63 %
2	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	3,39 %
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	16,99%
4	Rata-rata jumlah pengeluaran belanja wisatawan nusantara (Rp/Orang)	Rp. 4,184,389,00
5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	144.691 orang
6	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	46.465.437 orang
7	Rata-rata lama menginap Wisatawan Nusantara	1,36 hari
8	Rata-rata lama menginap Wisatawan Mancanegara	2,57 hari
9	Daya Tarik Wisata (DTW)	1235 (DTW Alam 607, DTW Budaya 456 dan DTW Buatan 172)
10	SDM Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	700 orang
11	SDM Pariwisata yang tersertifikasi	3,609 orang
12	Penetapan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTaKreatif) Indonesia	9 Kab/Kota Kreatif

Sumber: Dinporapar Provinsi Jawa Tengah, 2023

Jumlah kunjungan wisatawan 46.610.128 orang yang terdiri dari Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara sebesar 144.691 orang dan Wisatawan Nusantara 46.465.437 orang. Pengeluaran Wisatawan Nusantara sebesar 4.184.389 per orang dan Wisatawan mancanegara sebesar $ 670 per orang. Penetapan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTaKreatif) Indonesia 9 Kabupaten/Kota (Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Karanganyar dan Kab. Kebumen. Ini

menunjukan sektor pariwisata Jawa Tengah mengalami pertumbuhan di tahun 2022.

2.3.12 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Total panjang jalan di Jawa Tengah sebesar 31.165,85 km yang terbagi sesuai kewenangan sebagai berikut:

1. Kewenangan provinsi sebesar 7,73 persen;
2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 87,39 persen;
3. Kewenangan Nasional sebesar 4,88 persen.

Sedangkan jalan tol yang sudah fungsional sepanjang 330,71 km dalam kondisi baik dan Jalan Non Status (NS) sepanjang 109,82 km yang merupakan bagian dari Jalur JJLS Jawa Tengah. JJLS merupakan jaringan jalan strategis yang menghubungkan PKW Cilacap – Yogya, dan merupakan jaringan jalan pulau terluar negara yang berbatasan dengan Australia. JJLS di ruas Kebumen – Cilacap juga dapat berperan menjadi tanggul mitigasi penanggulangan bencana tsunami yang mengacam wilayah di sepanjang pantai selatan.

Kondisi jalan kewenangan provinsi tahun 2022 yang telah sesuai dengan standar yaitu lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton adalah sepanjang 1046,035 km atau 43,50 persen. Sedangkan berdasarkan kondisi perkerasan jalan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45.
Kondisi Permukaan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Kewenangan
Tahun 2022

Kewenangan	Kondisi Ruas Jalan								Total Panjang Jalan (Km)
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
	Km	%	km	%	km	%	Km	%	
Nasional	560,93	36,95	820,79	54,07	122,75	8,09	13,61	0,90	1518,09
Provinsi	2.010,27	83,60	213,89	8,89	68,33	2,84	112,25	4,67	2404,74
Kabupaten/ Kota	14.909,02	54,83	7.385,37	27,16	2.587,33	9,51	2.312,08	8,50	27.193,81
Jumlah Jateng	17.480,22	56,18	8.420,05	27,06	2.778,42	8,93	2.437,95	7,83	31.116,64
Jalan Non Status	15,74	242,99	52,62	199,35	13,30	66,30	25,45	91,37	109,82
Jalan Tol	330,71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,71

Sumber: SNVT P2JN Jawa Tengah, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

Perkembangan kondisi jalan kewenangan provinsi dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kondisi permukaan jalan baik sejak tahun 2019 mengalami penurunan hingga tahun 2021, namun pada tahun 2022 dapat diperbaiki dengan kondisi mantap 92,49% (terdiri dari kondisi baik 83,60 % dan kondisi sedang 8,89 %). Sedangkan Jalan Provinsi dalam kondisi rusak ringan sebesar 2,84 % dan kondisi rusak berat sebesar 4,67%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.46.
Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Tahun	Kondisi							
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
2018	2.154,65	89,60	196,145	8,16	53,95	2,24	0,000	0,00
2019	1.946,86	80,96	234,01	9,73	223,87	9,31	0,000	0,00
2020	1.869,69	77,75	312,13	12,98	222,93	9,27	0,000	0,00
2021	1.871,61	77,83	313,45	13,03	219,682	9,14	0,000	0,00
2022	2.010,27	83,60	213,89	8,89	68,33	2,84	112,25	4,67

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022

Adapun persebaran kondisi jalan kewenangan kabupaten/kota untuk tiap-tiap daerah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.47.
Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2022								Total Panjang (km)
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	
1	Banjarnegara	714,96	76,17	132,69	14,14	19,44	2,07	71,56	7,62	938,65
2	Banyumas	765,294	50,749	319,243	21,170	277,852	18,425	145,611	9,656	1.508,000
3	Batang	317,96	57,56	148,75	26,93	56,88	10,30	28,83	5,22	552,42
4	Blora	481,35	39,75	330,51	27,30	63,96	5,28	335,02	27,67	1.210,84
5	Boyolali	412,88	60,90	148,88	21,96	67,22	9,91	49,01	7,23	678,00
6	Brebes	199,25	31,10	242,13	37,79	98,86	15,43	100,49	15,68	640,73
7	Cilacap	864,28	68,10	137,70	10,85	124,28	9,79	142,94	11,26	1.269,20
8	Demak	175,43	20,55	589,92	69,12	75,71	8,87	12,46	1,46	853,52
9	Grobogan	571,700	60,660	231,723	24,590	62,049	6,580	76,917	8,160	942,389
10	Jepara	329,43	37,77	442,79	50,77	74,38	8,53	25,54	2,93	872,14
11	Karanganyar	437,54	41,81	420,58	40,19	145,71	13,92	42,69	4,08	1.046,52
12	Kebumen	292,18	30,42	416,84	43,40	162,03	16,87	89,31	9,30	960,36
13	Kendal	518,03	67,25	169,03	21,94	47,20	6,13	36,07	4,68	770,33
14	Klaten	437,44	61,10	214,36	29,94	55,98	7,82	8,11	1,13	715,89
15	Kudus	560,16	87,63	36,53	5,71	14,29	2,24	28,28	4,42	639,26
16	Magelang	680,20	67,96	206,28	20,61	79,30	7,92	35,05	3,50	1.000,83
17	Pati	412,20	56,23	92,10	12,56	121,40	16,56	107,42	14,65	733,115
18	Pekalongan	384,700	61,99	139,011	19,40	50,103	7,61	96,081	14,34	669,895
19	Pemalang	482,64	63,03	76,34	9,97	67,60	8,83	139,15	18,17	765,72
20	Purbalingga	566,68	63,81	191,73	21,59	64,70	7,29	64,98	7,32	888,09
21	Purworejo	214,09	27,83	414,78	53,92	97,74	12,71	42,65	5,54	769,26
22	Rembang	332,35	68,98	89,90	15,15	59,70	10,36	94,20	16,35	576,15
23	Semarang	485,79	66,22	191,39	26,09	29,73	4,05	26,73	3,64	733,62
24	Sragen	800,64	78,47	65,01	6,37	86,07	8,44	68,53	6,72	1.020,25
25	Sukoharjo	141,04	23,31	399,70	66,05	63,51	10,50	0,88	0,15	605,12
26	Tegal	577,01	76,78	95,48	10,97	73,34	5,17	101,44	11,97	847,27

No.	Kabupaten/ Kota	Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2022								Total Panjang (km)
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	
27	Temanggung	465,76	71,60	107,61	16,54	49,51	7,61	27,61	4,24	650,48
28	Wonogiri	1.110,63	77,08	158,64	11,01	133,46	9,26	38,20	2,65	1.440,93
29	Wonosobo	193,39	19,35	455,20	45,55	133,47	13,36	217,22	21,74	999,28
30	Kota Magelang	71,56	60,17	29,11	24,48	17,26	14,51	1,01	0,85	118,93
31	Kota Pekalongan	101,00	65,83	24,12	15,72	9,58	6,25	18,71	12,20	153,41
32	Kota Salatiga	235,40	69,75	87,41	25,90	11,25	3,33	3,41	1,01	337,47
33	Kota Semarang	381,72	45,45	377,70	44,97	52,14	6,21	28,34	3,37	839,90
34	Kota Surakarta	86,14	40,18	102,34	47,73	25,43	11,86	0,50	0,23	214,41
35	Kota Tegal	108,20	46,75	99,85	43,14	16,21	7,00	7,17	3,10	231,44
	JUMLAH	14.909,02	54,83	7.385,37	27,16	2.587,33	9,51	2.312,08	8,50	27.193,81

Sumber: DPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

Mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, mengamanatkan 10 tahun terhitung sejak diundangkan jalan provinsi harus sesuai dengan standar. Standar jalan provinsi dilihat dari aspek dimensi jalan (lebar perkerasan jalan minimal 7 m), aspek konstruksi perkerasan jalan (muatan sumbu terberat sebesar 8 ton) dan aspek ketersediaan bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan (saluran drainase dan dinding penahan tanah serta bahu jalan).

Sampai dengan tahun 2022, panjang Jalan Provinsi yang telah sesuai dengan standar (dari sisi lebar jalan ≥7 m dan konstruksi sesuai MST 8 ton) sepanjang 1.046,035 km. Sedangkan jalan provinsi yang telah sesuai dengan standar dengan kondisi permukaan mantap adalah sepanjang 2.224,15 km atau mencapai 92,49 persen. Penyesuaian standar jalan provinsi perlu dilakukan secara bertahap utamanya untuk penuntasan jalan yang mempunyai nilai strategis dengan tetap menjaga kondisi permukaan seluruh Jalan Provinsi.

Tabel 2.48.

Kondisi Permukaan Provinsi Jawa Tengah Menurut Lebar Jalan Tahun 2022

No.	Lebar Perkerasan Jalan	Panjang (km)	Persentase (%)	Kondisi							
				Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
				Panjang (km)	Persentase (%)	Panjang (km)	Persentase (%)	Panjang (km)	Persentase (%)	Panjang (km)	Persentase (%)
1	≥7 m	1.046,035	43,50	904,758	37,62%	88,586	3,68%	29,177	1,21%	23,514	0,98%
2	<7 m	1.358,706	56,50	1105,579	45,98%	125,229	5,21%	39,171	1,63%	88,727	3,69%
Total		**2.404,741**	**100**	**2010,337**	**83,60%**	**213,815**	**8,89%**	**68,348**	**2,84%**	**112,241**	**4,67%**

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023

b. Air Minum dan Sanitasi

Cakupan akses air minum layak pada tahun 2022 sebesar 88,27 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 86,87 persen, dan termasuk di dalamnya cakupan akses air minum aman pada tahun 2022 sebesar 36,93 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 34,06 persen. Sedangkan untuk cakupan akses air minum jaringan

perpipaan pada tahun 2022 sebesar 48,82 persen yang juga mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 44,37 persen.

Cakupan akses air limbah domestik layak pada tahun 2022 sebesar 90,38 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 88,67 persen, dan termasuk di dalamnya cakupan akses air limbah domestik aman pada tahun 2022 sebesar 9,94 persen menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 10,75 persen dikarenakan terjadi kerusakan pada prasarana yang sudah ada dan tidak ada pembangunan baru.

Guna mendukung percepatan pencapaian akses menyeluruh air minum di Jawa Tengah terdapat 5 (lima) SPAM Regional yang berperan sebagai penyedia air curah bagi PDAM kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2022 telah terbangun dan operasional SPAM Regional Bregas, Keburejo dan Petanglong, serta sedang dalam proses pembangunan yaitu SPAM Regional Wososukas, dan proses inisiasi yaitu SPAM Regional Dadimuria. Sedangkan dalam rangka percepatan pencapaian akses menyeluruh air limbah domestik, diinisiasi penyediaan sarana prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Jawa Tengah.

Tabel 2.49.
Capaian Akses Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022

No	Uraian	Tahun (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**Akses Air Minum**						
	Layak	-	79.35	81.77	85,11	86,87	88,27
	Aman	-	22,66	26,7	32,24	34,06	36,93
	Jaringan Perpipaan	-	36,8	39,08	43,74	44,37	48,82
2	**Akses Air Limbah Domestik**						
	Layak	80	82,04	89,57	90,72	88,67	90,38
	Aman	-	-	-	10,69	10,75	9,94

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam rangka pengelolaan air minum dan air limbah domestik yang berkelanjutan maka dilakukan pendampingan terhadap institusi dan kelompok masyarakat pengelola layanan air minum dan air limbah domestik di kabupaten/kota dengan kondisi pengelolaannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50.
Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Kab/Kota	Akses Air Minum (%)			Kondisi SPAM Perkotaan PDAM (Buku BPPW 2022)			Kondisi BP/KP-SPAMS			
		Layak	Aman	Jaringan Perpipaan	Kapasitas Produksi (Lps)	Idle Capacity (Lps)	Status Kinerja	Jumlah BP/KP SPAMS	Jumlah Fungsi Baik	Jumlah Fungsi Sebagian	Jumlah Tidak Fungsi
1	Cilacap	89,25	31,67	29,99	869,30	451,90	Sehat	165	149	16	0
2	Banyumas	76,99	20,74	31,67	974,67	159,32	Sehat	192	182	4	6
3	Purbalingga	94,61	46,43	46,43	544,42	204,08	Sehat	167	166	0	1
4	Banjarnegara	95,73	25,92	26,15	101,84	33,16	Kurang Sehat	194	190	2	2
5	Kebumen	92,42	12,06	19,17	300,00	139,00	Sehat	179	174	3	2
6	Purworejo	96,86	35,89	27,32	237,66	69,34	Sehat	222	216	2	4

No	Kab/Kota	Akses Air Minum (%)			Kondisi SPAM Perkotaan PDAM (Buku BPPW 2022)			Kondisi BP/KP-SPAMS			
		Layak	Aman	Jaringan Perpipaan	Kapasitas Produksi (Lps)	Idle Capacity (Lps)	Status Kinerja	Jumlah BP/KP SPAMS	Jumlah Fungsi Baik	Jumlah Fungsi Sebagian	Jumlah Tidak Fungsi
7	Wonosobo	93,77	49,95	86,02	1.067,67	349,33	Sehat	176	176	0	0
8	Magelang	91,24	85,88	41,98	849,09	193,51	Sehat	234	227	7	0
9	Boyolali	94,11	38,87	52,58	418,00	270,00	Sehat	187	187	0	0
10	Klaten	93,19	32,63	32,67	512,83	-	Sehat	155	147	1	7
11	Sukoharjo	93,18	14,90	28,87	326,78	66,22	Sehat	88	88	0	0
12	Wonogiri	89,82	27,91	42,00	440,13	76,13	Sehat	185	182	3	0
13	Karanganyar	98,00	30,71	75,50	659,00	12,00	Sehat	154	150	3	1
14	Sragen	87,08	20,11	42,00	765,89	163,90	Sehat	160	160	0	0
15	Grobogan	86,30	17,63	21,86	384,00	67,00	Sehat	186	176	0	10
16	Blora	93,00	9,50	25,00	192,00	76,80	Sehat	186	180	0	6
17	Rembang	90,72	39,87	28,81	212,57	37,36	Sehat	175	163	7	5
18	Pati	81,53	35,81	35,81	332,12	102,78	Sehat	204	191	6	7
19	Kudus	98,25	38,06	38,06	428,30	260,60	Sehat	87	83	0	4
20	Jepara	97,48	19,92	19,92	627,10	126,40	Kurang Sehat	88	88	0	0
21	Demak	83,65	41,47	79,95	483,91	276,81	Sehat	184	174	4	6
22	Semarang	98,80	37,34	40,52	386,00	80,00	Sehat	178	177	1	0
23	Temanggung	95,17	31,00	76,07	444,02	95,37	Sehat	199	199	0	0
24	Kendal	94,29	70,75	69,00	670,19	73,11	Sehat	154	154	0	0
25	Batang	90,00	47,00	47,00	469,28	127,00	Sehat	183	181	1	1
26	Pekalongan	87,62	87,62	58,00	203,75	-	Sehat	188	188	0	0
27	Pemalang	88,00	40,97	43,00	424,78	317,72	Sehat	180	168	7	5
28	Tegal	66,80	32,80	34,00	365,57	35,51	Sehat	171	163	3	5
29	Brebes	60,00	23,04	23,04	356,75	449,95	Sehat	158	152	0	6
30	Kota Magelang	98,05	85,88	91,02	775,16	-	Sehat	0	0	0	0
31	Kota Surakarta	95,84	58,00	61,30	858,98	113,81	Sehat	0	0	0	0
32	Kota Salatiga	75,32	74,12	75,32	327,78	190,76	Sehat	0	0	0	0
33	Kota Semarang	79,76	61,95	79,76	3.965,13	-	Sehat	88	85	0	3
34	Kota Pekalongan	86,00	52,00	86,00	356,00	291,00	Sehat	47	43	3	1
35	Kota Tegal	93,77	59,28	92,91	277,33	145,67	Sehat	0	0	0	0
	Jawa Tengah							**5114**	**4959**	**73**	**82**

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 2.51.
Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Kab/Kota	Akses Air Limbah Domestik (%)		Kondisi Layanan Air Limbah Domestik		
		Layak	Aman	Nama/Lokasi IPLT	Status Operasi	Jumlah KPP
1	Cilacap	90,37	0,19	IPLT Tritih Lor Desa Tritih Lor Kec. Jeruk Legi	Beroperasi	1
2	Banyumas	90	1,4	IPLT Gunung Tugel Desa Kedungrandu Kec. Patikraja	Beroperasi tidak sebagaimana mestinya	30

No	Kab/Kota	Akses Air Limbah Domestik (%)		Kondisi Layanan Air Limbah Domestik		
		Layak	Aman	Nama/Lokasi IPLT	Status Operasi	Jumlah KPP
3	Purbalingga	93,18	belum ada IPLT	-		2
4	Banjarnegara	71,99	belum ada IPLT	-		2
5	Kebumen	93	3,09	IPLT Kaligending Desa Kaligending Kec. Karang Sambung	Beroperasi	14
				IPLT Semali Desa Semali Kec. Sempor	Beroperasi	
6	Purworejo	89,43	20	IPLT Gunung Tumpeng Desa Jetis Kec. Loano	Tidak Dioperasikan	17
7	Wonosobo	71,61	0,35	IPLT Wonorejo Desa Wonorejo Kec. Selomerto	Beroperasi tidak sebagaimana mestinya	n/a
8	Magelang	91,11	belum ada IPLT	-		12
9	Boyolali	98,28	29,19	IPLT Winong Desa Jelok Kec. Boyolali	Tidak Dioperasikan	32
10	Klaten	100	1,32	IPLT Jomboran Desa Jomboran Kec. Klaten Tengah	Beroperasi	50
11	Sukoharjo	97,91	2,31	IPLT Mojorejo Desa Mojorejo Kec. Bendosari	Beroperasi	10
12	Wonogiri	99,86	IPLT belum beroperasi	IPLT Ngadirojo Desa Kerjo Lor Kec. Ngadirojo	Belum Beroperasi	33
13	Karanganyar	99,38	2,9	IPLT Mojogedang Desa Kaliboto Kec. Mojogedang	Beroperasi	30
14	Sragen	84	1,91	IPLT Tanggan Desa Tanggan Kec. Gesi		20
15	Grobogan	77,37	19,97	IPLT Ngembak Desa Ngembak Kec. Purwodadi	Beroperasi	n/a
16	Blora	95,6	1,4	IPLT Temurejo Desa Temurejo Kec. Blora	Beroperasi tidak sebagaimana mestinya	20
17	Rembang	96,56	n/a	IPLT Landoh Desa Landoh Kec. Sulang	Tidak beroperasi	21
18	Pati	100	15,45	IPLT Sukoharjo Desa Sukoharjo Kec. Margorejo	Beroperasi	22
19	Kudus	100	24	IPLT Tanjungrejo Desa Tanjungrejo Kec. Jekulo	Beroperasi	50
20	Jepara	74,45	3,15	IPLT Bandengan Desa Bandengan Kec. Jepara	Beroperasi	95
21	Demak	98,31	3,55	IPLT Kalikondang Desa Kalikondang Kec. Demak	Beroperasi	6
22	Semarang	94,7	0,42	-		39
23	Temanggung	85,76	2,5	IPLT Sanggrahan Desa Sanggrahan Kec. Kranggan	Beroperasi	n/a
24	Kendal	87,57	belum ada IPLT	-		13
25	Batang	81	5	IPLT Randu Kuning Desa Tegalsari Kec. Kandeman	Beroperasi	4

No	Kab/Kota	Akses Air Limbah Domestik (%)		Kondisi Layanan Air Limbah Domestik		
		Layak	Aman	Nama/Lokasi IPLT	Status Operasi	Jumlah KPP
26	Pekalongan	87	61,86	IPLT Kab. Pekalongan Desa Bener Kec. Wiradesa	Beroperasi	4
27	Pemalang	75,99	49,17	IPLT Pegongsoran Desa Pegongsoran Kec. Pemalang	Beroperasi	3
28	Tegal	95,34	n/a	IPLT Kedungjati Desa Dukuhjati Kidul Kec. Pangkah	Beroperasi	n/a
29	Brebes	78,87	1,25	-		1
30	Kota Magelang	98,68	13,24	IPLT Dumpoh Kel. Tegalrejo Kec. Magelang Utara	Beroperasi	21
31	Kota Surakarta	97,32	61	IPLT Putri Cempo Kel. Mojosongo Kec. Jebres	Beroperasi	50
32	Kota Salatiga	94,37	8,37	IPLT Ngronggo Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo	Beroperasi	n/a
33	Kota Semarang	92,63	2,87	IPLT Tambak Lorok Kel. Terboyo Kulon Kec. Genuk	Beroperasi	1
34	Kota Pekalongan	100	8,95	IPLT Degayu Kel. Degayu Kec. Pekalongan Utara	Beroperasi	50
35	Kota Tegal	75,77	3,21	IPLT Muarareja Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat	Beroperasi	8
	Jawa Tengah					

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022

c. Infrastruktur Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai (WS) yang pengelolaanya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah WS Pemali Comal (panjang 946,35 km/luas DAS 4.898,54 km2) dan WS Bodri Kuto (panjang 377,32 km/luas DAS 1.282,85 km2).

Kondisi baik sungai kewenangan provinsi pada tahun 2022 tercatat 52,32 persen (692,56 km dari 1.323,67 km), sedikit meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 52,29 persen. Hal ini merupakan hasil kegiatan normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai dan konservasi DAS.

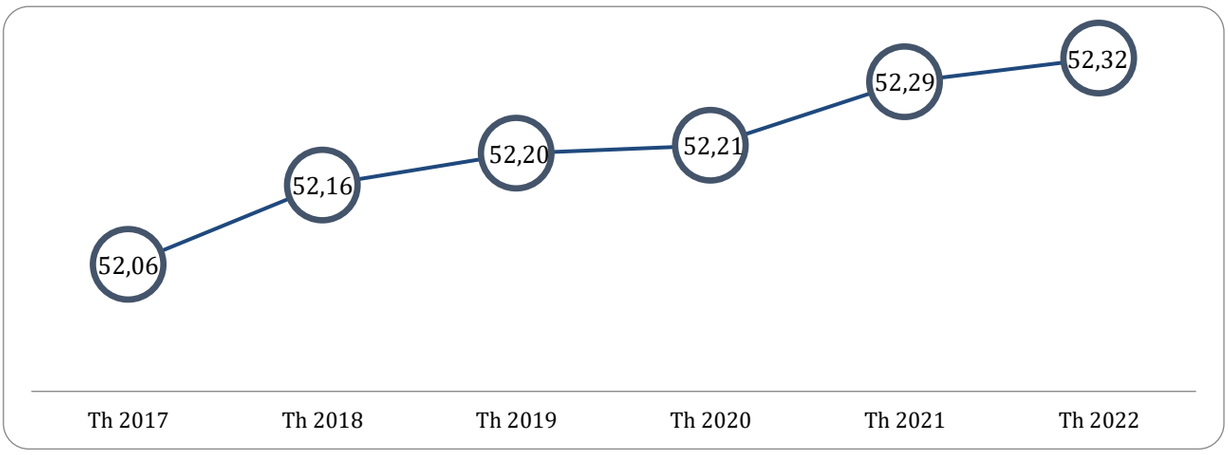

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.40.
Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2022 (%)

Kebutuhan air irigasi rata-rata pertahun sebesar 19.636.378.014m^3/tahun dengan asumsi memperhitungkan/mendasarkan pada rencana kebutuhan air MT 1 (musim tanam pertama) sampai dengan MT 3 (musim tanam ketiga).Dukungan terhadap ketahanan pangan ditempuh dengan pengelolaan irigasi serta pembangunan penampungan air seperti waduk dan embung. Di Jawa Tengah, total luas area Daerah Irigasi (DI) seluas 953.804 ha, yang terdiri dari 33 DI kewenangan pusat seluas 347.674 ha (36,45 persen), 108 DI kewenangan provinsi seluas 86.865 ha (9,11 persen) dan 11.401 DI kewenangan kabupaten/kota seluas 519.265 ha (54,44 persen).

Tabel 2.52.
Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kewenangan Daerah Irigasi	Luas Area (ha)	% Dari Total Luas	Jumlah Daerah Irigasi
1.	Pusat	347.674	36,45%	37
2.	Provinsi	86.865	9,11%	108
3.	Kab/Kota	519.265	54,44%	11.401
Total Jawa Tengah		953.804	100,00%	11.546

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan pengelolaan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Namun demikian, dalam kurun waktu tahun 2016-2022 masih terdapat jaringan irigasi dalam kondisi rusak sedang hingga rusak ringan yang jumlahnya cukup besar sehingga masih perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi.

Tabel 2.53.
Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2016 – 2022

Tahun	Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi								Total
	Baik		Ringan		Sedang		Berat		Luas
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	(Ha)
2016	1.730	6	67.754	73	17.044	19	337	2	86.865
2017	4.433	6	64.207	74	18.225	20	0	0	86.865
2018	4.941	7	63.349	75	18.575	18	0	0	86.865
2019	4.941	6	66.723	77	15.201	17	0	0	86.865

Tahun	Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi								Total
	Baik		Ringan		Sedang		Berat		Luas
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	(Ha)
2020	4.333	5	67.178	77	15.354	18	0	0	86.865
2021	4.333	5	67.513	78	15.019	17	0	0	86.865
2022	4.333	5	67.595	78	14.937	17	0	0	86.865

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan sebaran kondisi daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota, persentase kondisi baik irigasi tercatat ada 11 kabupaten dibawah 50 persen, 11 kabupaten antara 50 – 70 persen, serta 10 kabupaten antara 70– 95 persen. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membantu rehabilitasi daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan.

Tabel 2.54.
Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kabupaten/Kota
di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah DI	Luas DI (ha)	Kondisi Fisik Irigasi %			
				Baik	Rusak Ringan (RR)	Rusak Sedang (RS)	Rusak Berat (RB)
1	Cilacap	702	21,745	42.69	2.25	0.15	54.90
2	Banyumas	573	23,716	80.35	12.62	2.66	4.37
3	Purbalingga	255	19,159	48.00	-	31.00	21.00
4	Banjarnegara	322	16,483	70.30	10.87	8.02	10.92
5	Kebumen	283	12,260	75.17	1.23	1.55	22.04
6	Purworejo	250	9,470	21.48	25.40	28.20	24.92
7	Wonosobo	705	21,050	67.54	7.42	9.29	15.75
8	Magelang	993	35,662	52.16	18.72	14.57	14.54
9	Boyolali	255	9,821	60.77	8.46	24.23	6.54
10	Klaten	478	29,713	40.89	-	41.99	17.12
11	Sukoharjo	70	4,353	19.29	24.70	50.04	5.97
12	Wonogiri	403	28,784	72.67	6.34	6.80	14.18
13	Karanganyar	351	18,867	35.06	10.20	16.52	38.54
14	Sragen	118	12,323	78.68	-	10.30	11.02
15	Grobogan	268	20,194	24.54	18.76	41.82	14.88
16	Blora	183	13,351	51.03	14.55	12.73	21.68
17	Rembang	318	21,193	65.11	6.16	18.90	9.80
18	Pati	327	20,965	83.26	3.34	3.40	10.00
19	Kudus	231	10,295	87.90	7.12	4.98	0.00
20	Jepara	834	28,247	28.00	9.00	20.50	42.50
21	Demak	4	1,627	94.90	-	-	5.10
22	Semarang	666	32,687	60.01	13.11	10.59	16.29
23	Temanggung	577	17,709	45.32	-	25.58	29.09
24	Kendal	686	10,427	63.94	-	-	36.06
25	Batang	573	18,231	34.43	23.84	15.75	25.98
26	Pekalongan	339	13,818	49.19	4.00	7.34	39.47
27	Pemalang	91	7,343	70.26	9.15	11.26	9.32
28	Tegal	208	9,281	60.27	20.27	15.77	3.69
29	Brebes	449	25,731	65.08	2.97	8.49	23.46
30	Kota Salatiga	12	373	84.00	0.00	16.00	0.00
31	Kota Semarang	41	2,339	78.70	6.79	8.42	6.07
32	Kota Tegal	6	489	59.50	16.85	10.91	12.74

Sumber: Bappeda Kabupaten/Kota Tahun 2022

Kebutuhan akan penyediaan air yang mencakup kapasitas daya dukung serta tingkat perkembangan kebutuhan air semakin dirasakan meningkat, salah satunya penyediaan air untuk air baku. Pemenuhan air baku penting bahkan utama karena digunakan utamanya untuk pemenuhan kebutuhan air minum. Selain air minum, air baku juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata).

Ketersediaan air khususnya untuk air baku dipengaruhi oleh jumlah bangunan bendungan/waduk. Sampai saat ini terdapat 41 bangunan bendungan/waduk (9 waduk besar dan 32 waduk kecil). Kebutuhan air baku khususnya air minum sejalan dengan besaran tingkat pertumbuhan jumlah penduduk. Oleh karena itu diharapkan meningkatnya pertumbuhan penduduk dapat diimbangi secara positif dengan ketersediaan air baku.

Ketersediaan air baku di Jawa Tengah (pemenuhan kebutuhan air minum) mengalami peningkatan dari tahun 2016 dari 56,49 persen menjadi menjadi 62 persen di tahun 2022.

Tabel 2.55.
Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2022

Uraian	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kebutuhan Air Baku (juta m^3/tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	739,65	745,02	750,25	755,35	760,33	760,33	770,08
Ketersediaan Air Baku (juta m^3/tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	417,83	435,84	456,83	466,78	466,78	467,62	477,45
Ketersediaan Air Baku (%)	56,49	58,5	60,89	61,8	61,39	61,50	62

Sumber : Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023

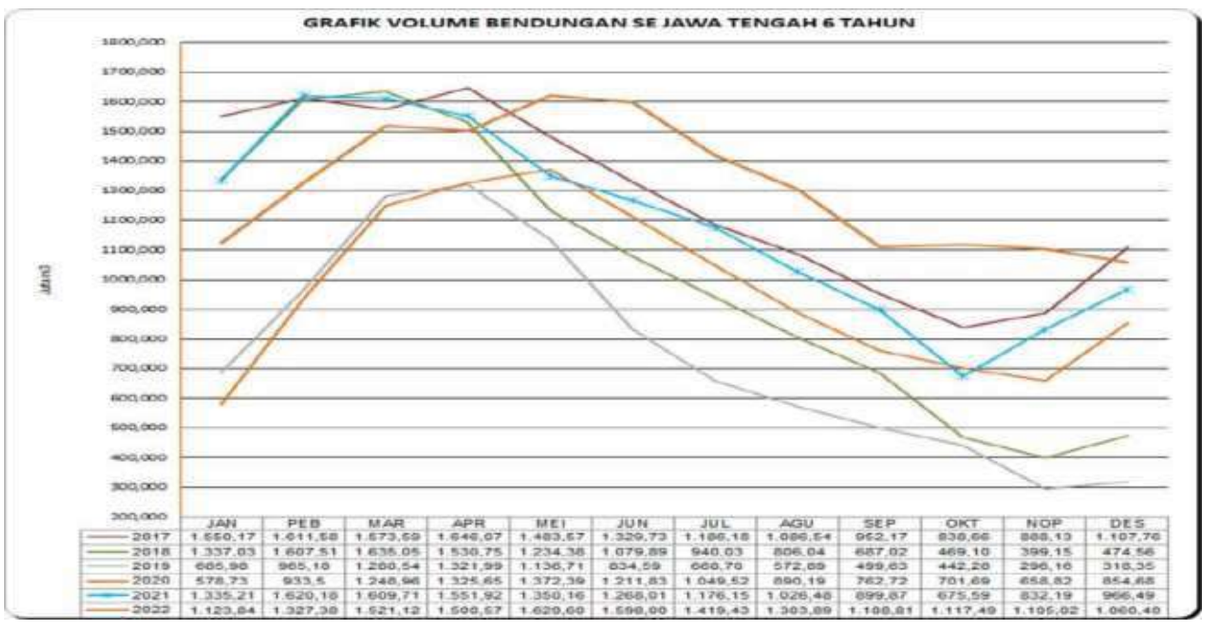

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.41.
Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m^3)
Tahun 2017 - 2022

Gambar diatas menunjukan bahwa ketersediaan air waduk dari tahun ke tahun memiliki pola yang hampir sama yaitu debit tertinggi

berkisar antara bulan Maret sampai dengan bulan April dan debit terendah pada bulan Oktober sampai dengan bulan November, artinya bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan upaya agar pada saat ketersediaan air waduk mengalami penurunan kebutuhan air tetap bisa terpenuhi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan air mendukung ketahanan pangan yaitu melalui Program 1000 Embung yang sebagian besar menggunakan prinsip memanen hujan. Program 1000 embung ini diinisiasi pada tahun 2016 dan pada tahun 2022 sudah melebihi target. Tercatat sudah ada 1.156 embung yang dibangun untuk mencukupi kebutuhan air baku masyarakat. se-Jawa Tengah.

Tabel 2.56.
Jumlah embung di Jawa Tengah berdasarkan sumbernya

No	Instansi/Lembaga	Sumber Pendanaan	Embung (Lokasi)	*Long Storage (Lokasi)*	Jumlah (Lokasi)
1.	Pemerintah Pusat (BB WS)	APBN	141	3	144
2.	Dinas PUSDATARU	APBD	75	17	92
3.	Distanbun	APBD	4	-	4
		APBN	512	-	512
4.	DLHK	DAK	390	-	390
5.	Pemkab (Bankeu)	APBD	11	-	11
6.	CSR/TJSLP	Hibah	3	-	3
TOTAL			**1.136**	**20**	**1.156**

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023

d. Jasa Konstruksi

Sertifikasi Hasil Uji pada tahun 2021 mencapai 2.312 SHU mengalami peningkatan kondisi jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 1.138 SHU. Sedangkan pelaku jasa konstruksi yang difasilitasi di tahun 2021 sejumlah 1.000 orang berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 3.288 orang.

Tabel 2.57.
Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sertifikasi Hasil Uji (SHU)	1.853	1.080	750	1.138	2.312	2.702
2	Informasi Jasa Kontruksi pelaksanaan event / pameran}	4	4	4	0	1	4
3	Pelaku Jasa Kontruksi (orang) sosialisasi, bintek terkait jakon (peraturan jasa konstruksi, HSD, HSPK, dsb),	1.228	2.038	2.798	3.288	1.000	1260

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2021

e. Bangunan Gedung Milik Daerah

Hingga tahun 2022, Bangunan Gedung Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1,030 komplek, Pendataan teknis Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah sudah dilakukan terhadap sejumlah 189 komplek, Bantuan Teknis untuk pengelolaan Bangunan Gedung Milik Daerah telah diberikan kepada 147 komplek bangunan Gedung,

Tabel 2.58.
Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis

Lokasi Pendataan Teknis BGMD	TA	JUMLAH
BGMD Kab, Rembang + Kab, Blora	2019	51
BGMD Kota + Kab Pekalongan	2021	36
BGMD Kab, Pemalang	2021	27
BGMD Kab, Brebes	2022	32
BGMD Kota + Kab Tegal	2022	43
TOTAL		189

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dari jumlah tersebut sejak tahun 2019 telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung dan telah terdata untuk 8 wilayah kabupaten/kota, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.59.
Hasil Pendataan Kondisi Bangunan Gedung
Provinsi Jawa Tengah

No	Lokasi	Jumlah BGMD		Telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung					
		Komplek	Unit	Kondisi Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Kondisi Khusus	Renovasi
1	DKI Jakarta	1							
2	Kab. Banjarnegara	24							
3	Kab. Banyumas	45							
4	Kab. Batang	19							
5	Kab. Blora	23	353	27	313	13	0	0	0
6	Kab. Boyolali	36							
7	Kab. Brebes	32	405	0	365	26	9	0	5
8	Kab. Cilacap	37							
9	Kab. Demak	21							
10	Kab. Grobogan	20							
11	Kab. Jepara	29							
12	Kab. Karanganyar	26							
13	Kab. Kebumen	32							
14	Kab. Kendal	29							
15	Kab. Klaten	34							
16	Kota Magelang	14							
17	Kota Pekalongan	16	166	0	156	8	2	0	0
18	Kota Salatiga	15							
19	Kota Semarang	110							
20	Kota Surakarta	37							
21	Kota Tegal	15	118	21	95	2	0	0	0
22	Kab. Kudus	18							
23	Kab. Magelang	21							
24	Kab. Pati	27							
25	Kab. Pekalongan	20	325	0	319	1	5	0	0
26	Kab. Pemalang	27	361	1	349	7	4	1	0
27	Kab. Purbalingga	25							
28	Kab. Purworejo	34							

29	Kab. Rembang	28	407	26	378	3	0	0	0
30	Kab. Semarang	42							
31	Kab. Sragen	31							
32	Kab. Sukoharjo	29							
33	Kab. Tegal	28	369	43	308	10	5	3	0
34	Kab. Temanggung	24							
35	Kab. Wonogiri	37							
36	Kab. Wonosobo	24							
	Jumlah	**1.030**	**2.504**	**118**	**2.283**	**70**	**25**	**4**	**5**

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023

2.3.13 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

a. Perkembangan Jumlah dan Kebutuhan Rumah

Peningkatan infrastuktur perumahan merupakan salah satu kebijakan pemenuhan pelayanan dasar dalam rangka penurunan wilayah kantong kemiskinan yang menjadi salah satu strategi di dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, dimana hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan Jawa Tengah tahun 2024-2026 yaitu Mewujudkan Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari yang salah satu tolak ukurnya yaitu berkaitan dengan angka kemiskinan.

Berdasarkan data Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III pada akhir tahun 2022 asumsi jumlah rumah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8.731.768 unit rumah dengan jumlah rumah layak huninya sebesar 66,47 % atau sebanyak 5.804.006 unit rumah.

Tabel 2.60.
Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Asumsi Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni
Provinsi Jawa Tengah		**8,731,768**	**5,804,006**
1	Cilacap	455,869	248,859
2	Banyumas	441,410	272,306
3	Purbalingga	229,802	126,598
4	Banjarnegara	234,361	67,519
5	Kebumen	306,407	205,722
6	Purworejo	189,603	120,625
7	Wonosobo	212,495	91,904
8	Magelang	339,627	220,011
9	Boyolali	269,043	189,514
10	Klaten	306,594	268,086
11	Sukoharjo	217,000	184,212
12	Wonogiri	255,108	221,715
13	Karanganyar	220,546	195,580
14	Sragen	242,574	168,201
15	Grobogan	386,693	170,880
16	Blora	235,302	122,239
17	Rembang	171,604	115,987
18	Pati	359,459	283,541
19	Kudus	212,789	188,957
20	Jepara	313,884	152,736

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Asumsi Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni
21	Demak	303,265	230,178
22	Semarang	279,683	210,546
23	Temanggung	199,797	102,296
24	Kendal	251,502	166,495
25	Batang	186,489	105,124
26	Pekalongan	194,914	133,809
27	Pemalang	289,862	186,208
28	Tegal	290,648	218,190
29	Brebes	435,007	289,410
30	Kota Magelang	25,208	19,609
31	Kota Surakarta	113,983	88,610
32	Kota Salatiga	51,113	44,535
33	Kota Semarang	409,676	276,326
34	Kota Pekalongan	56,033	49,505
35	Kota Tegal	48,905	41,730

Sumber : Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, 2022

Terdapat sekitar 33,53% rumah yang belum layak huni yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi rumah tidak layak huni. Sebagaimana data pada tabel diatas, terlihat bahwa sebagian besar Kabupaten dengan status merah/miskin memiliki rumah layak huni rata-rata ≤ 50%.

Terpenuhinya kebutuhan rumah/tempat tinggal sangat bergantung pada sisi kebutuhan (demand) dan sisi penyediaan (supply). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat tinggal. Sedangkan sisi penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga untuk membangun rumah. Adanya gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah ini yang sering kita sebut dengan backlog rumah. Pengertian backlog berdasarkan laman Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR (https://ppdpp.id/konsep-backlog) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu backlog kepemilikan dan backlog kepenghunian. Backlog kepenghunian merupakan perspektif untuk konsep 1 (satu) keluarga menghuni 1 (satu) rumah, sehingga menghitung backlog kepenghunian menggunakan rumus jumlah keluarga dikurangi dengan data jumlah rumah yang tersedia. Konsep menghuni yang dimaksud adalah keluarga atau rumah tangga yang tidak memiliki rumah tetapi menghuni rumah yang layak baik sewa/ kontrak, beli/ menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga. Sedangkan untuk backlog kepemilikan adalah berdasarkan pada presentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, sehingga backlog kepemilikan adalah rumah tangga yang tidak memiliki rumah milik sendiri seperti sewa/ kontrak, beli/ menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/ keluarga.

Tabel 2.61.
***Backlog* Kepenghunian dan Kepemilikan Di Provinsi Jawa Tengah**
Tahun 2018–2022

No	Kabupaten/Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
		Backlog Milik	*Backlog* Huni	*Backlog* Milik	*Backlog* Huni	*Backlog* Milik	*Backlog* Huni	*Backlog* Milik	*Backlog* Huni	*Backlog* Milik	*Backlog* Huni
1	Kab.Cilacap	33.567	27.166	34.111	23.125	22.526	17.075	29.037	73.366	16.154	12.923
2	Kab.Banyumas	35.597	20.585	33.423	24.345	44.736	30.901	47.953	33.166	35.908	24.419
3	Kab.Purbalingga	17.222	12.611	11.125	8.786	7.922	4.699	201.781	263.865	10.132	7.593
4	Kab.Banjarnegara	15.998	13.472	12.192	10.331	18.299	14.116	17.261	44.477	11.919	8.878
5	Kab.Kebumen	32.727	28.145	28.297	24.976	28.397	22.483	17.808	13.461	17.789	15.602
6	Kab.Purworejo	42.034	35.907	32.790	25.503	32.200	25.976	26.772	21.180	22.658	19.198
7	Kab.Wonosobo	17.374	13.274	16.849	12.882	16.047	11.028	16.047	11.028	4.686	3.433
8	Kab.Magelang	26.327	20.343	31.944	24.903	33.259	22.981	55.735	17.205	21.877	14.372
9	Kab.Boyolali	18.443	12.296	16.071	9.757	19.935	16.073	19.075	15.843	13.377	9.066
10	Kab.Klaten	46.233	37.381	43.185	39.418	38.820	32.972	51.993	45.235	39.450	33.198
11	Kab.Sukoharjo	45.826	28.524	44.202	28.604	45.798	23.418	21.852	17.398	45.957	32.155
12	Kab.Wonogiri	13.596	10.417	11.662	9.692	7.094	6.044	69.931	68.606	10.874	9.472
13	Kab.Karanganyar	15.296	11.247	32.653	24.576	24.198	16.944	19.662	17.632	22.701	18.075
14	Kab.Sragen	24.891	22.439	17.038	14.313	18.156	16.427	43.997	18.782	16.620	14.308
15	Kab.Grobogan	24.885	19.207	20.734	20.339	16.211	14.602	15.187	13.828	15.473	14.150
16	Kab.Blora	17.298	14.118	23.472	20.845	18.263	15.633	17.010	14.530	14.447	12.933
17	Kab.Rembang	9.345	7.824	7.411	5.804	9.748	8.749	43.152	43.152	9.945	5.362
18	Kab.Pati	23.240	20.447	15.515	13.516	16.547	14.479	20.426	16.820	12.591	9.785
19	Kab.Kudus	15.271	11.077	23.326	14.470	18.549	12.982	19.313	14.014	15.613	9.306
20	Kab.Jepara	31.954	26.733	20.669	18.628	27.554	24.872	29.352	26.514	31.038	26.925
21	Kab.Demak	15.832	12.934	14.634	12.565	17.955	14.195	15.795	12.717	13.650	11.260
22	Kab.Semarang	20.992	10.294	25.991	15.958	25.107	16.006	39.813	37.301	32.713	12.658
23	Kab.Temanggung	11.566	8.316	10.154	6.231	11.927	8.831	54.193	49.095	7.674	5.397
24	Kab.Kendal	27.457	22.103	24.458	20.025	20.982	17.093	26.958	23.800	21.542	16.437
25	Kab.Batang	13.732	11.734	11.414	9.762	10.986	9.387	8.698	7.601	12.040	11.210
26	Kab.Pekalongan	32.780	29.183	13.480	8.593	23.825	18.516	103.300	103.300	18.767	16.903
27	Kab.Pemalang	44.367	35.865	44.389	40.135	48.802	42.771	45.335	41.240	38.182	33.413
28	Kab.Tegal	72.469	70.231	78.245	68.920	64.604	56.942	161.943	150.751	84.584	77.132
29	Kab.Brebes	71.536	66.400	79.803	71.429	43.631	39.929	43.765	39.133	44.139	38.084
30	Kota Magelang	12.775	7.236	12.572	6.617	11.443	5.388	12.376	6.188	12.694	7.878
31	Kota Surakarta	60.653	33.446	57.627	29.602	65.282	32.914	63.665	34.427	56.254	34.717
32	Kota Salatiga	19.772	6.732	18.215	5.182	15.574	4.918	11.259	9.441	14.961	4.645

No	Kabupaten/Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
		Backlog Milik	*Backlog* Huni	*Backlog* Milik	*Backlog* Huni	*Backlog* Milik	*Backlog* Huni	*Backlog* Milik	*Backlog* Huni	*Backlog* Milik	*Backlog* Huni
33	Kota Semarang	163.643	94.962	164.448	100.313	154.725	80.195	83.532	100.905	152.361	88.306
34	Kota Pekalongan	21.994	17.208	23.484	20.049	21.473	17.426	19.542	14.512	23.578	21.854
35	Kota Tegal	30.142	24.290	23.796	19.213	22.431	19.195	22.292	19.959	22.797	18.833
	Jumlah Total	1.126.837	844.148	1.079.379	809.410	1.023.008	736.159	1.495.810	1.440.472	950.089	703.141

Sumber : Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, 2022

Dari data tersebut terlihat bahwa kebutuhan kepenghunian Rumah (backlog kepenghunian) cukup besar di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjom Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kota Semarang.

Salah satu bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan rumah yang layak huni adalah dengan menyediakan bantuan stimulan bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan backlog kepemilikan di Provinsi Jawa Tengah yaitu melalui Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat. Program Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Provinsi Jawa Tegah baru dimulai tahun 2020. Berikut ini adalah capaian pembangunan baru rumah di Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai sumber pembiayaan dari tahun 2019-2022.

Tabel 2.62.
Pembangunan Baru Rumah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Tahun	Sumber Pembiayaan					Jumlah
	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota	Asosiasi Perumahan	CSR & Swadaya	
2019	1.279	-	-	11.483	-	12.762
2020	25	205	-	30.193	-	30.423
2021	220	186	-	30.595	5.799	36.800
2022	2.201	326	143	24.709	183	27.603
Total	**3.725**	717	143	**96.980**	5.982	107.547

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2022

b. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Intervensi program penanganan RTLH telah dilakukan dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta didukung oleh Corporate Social Responsibility (CSR) dari swasta. Penanganan RTLH ini dilakukan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin di Jawa Tengah. Adapun perkembangan penanganan RTLH dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.63.
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2022

Tahun	Sumber Pembiayaan				Verivali lapangan	JUMLAH TOTAL
	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota	CSR & Swadaya		
2019	36.725	23.208	26.651	15.986		102.570
2020	48.809	10.298	12.855	3.268		75.230

Tahun	Sumber Pembiayaan				Verivali lapangan	JUMLAH TOTAL
	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota	CSR & Swadaya		
2021	32.623	11.293	11.370	1.593	397.572	454.451
2022	35.771	11.487	12.714	2.659	231.279	293.910
Total	**153.928**	**56.286**	**63.590**	**23.524**	**628.851**	**926.161**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2022

Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, terdapat 1.582.024 unit RTLH yang menjadi baseline data RPJMD By Name By Address (BNBA) calon penerima bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diintervensi mulai tahun 2019. Peningkatan kualitas RTLH dari sumber pembiayaan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Corporate Social Responsibility (CSR) dan lain-lain dari tahun 2019-2022 sebanyak 297.310 unit, sedangkan 628.851unit merupakan hasil verifikasi dan validasi data lapangan tahun 2019 sampai dengan 2022. Sehingga secara keseluruhan baik melalui intervensi sumber pembiayaan dan verivali lapangan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, RTLH sudah tertangani sebanyak 926.161 unit.

Sampai dengan akhir tahun 2022, dari baseline data RPJMD masih terdapat sisa RTLH yang harus ditangani sebanyak 755.143 unit rumah, namun tidak dapat dipungkiri terdapat pertumbuhan data jumlah RTLH pada kurun tahun waktu tahun 2018-2022 berdasarkan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM) tahun 2018 dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2018-2022 yaitu sebanyak 635.682 unit RTLH telah ditangani baik melalui intervensi fisik dari berbagai sumber pendanaan maupun proses verifikasi dan validasi data jumlah RTLH. Sehingga sesuai baseline data dari PBDT tahun 2015 dan pembaharuan tahun 2018-2022 dari DTPFMOTM dan DTKS maka pada akhir tahun 2022 jumlah RTLH yang masih harus ditangani sebanyak 1.390.825 unit dengan sebaran sebagai berikut :

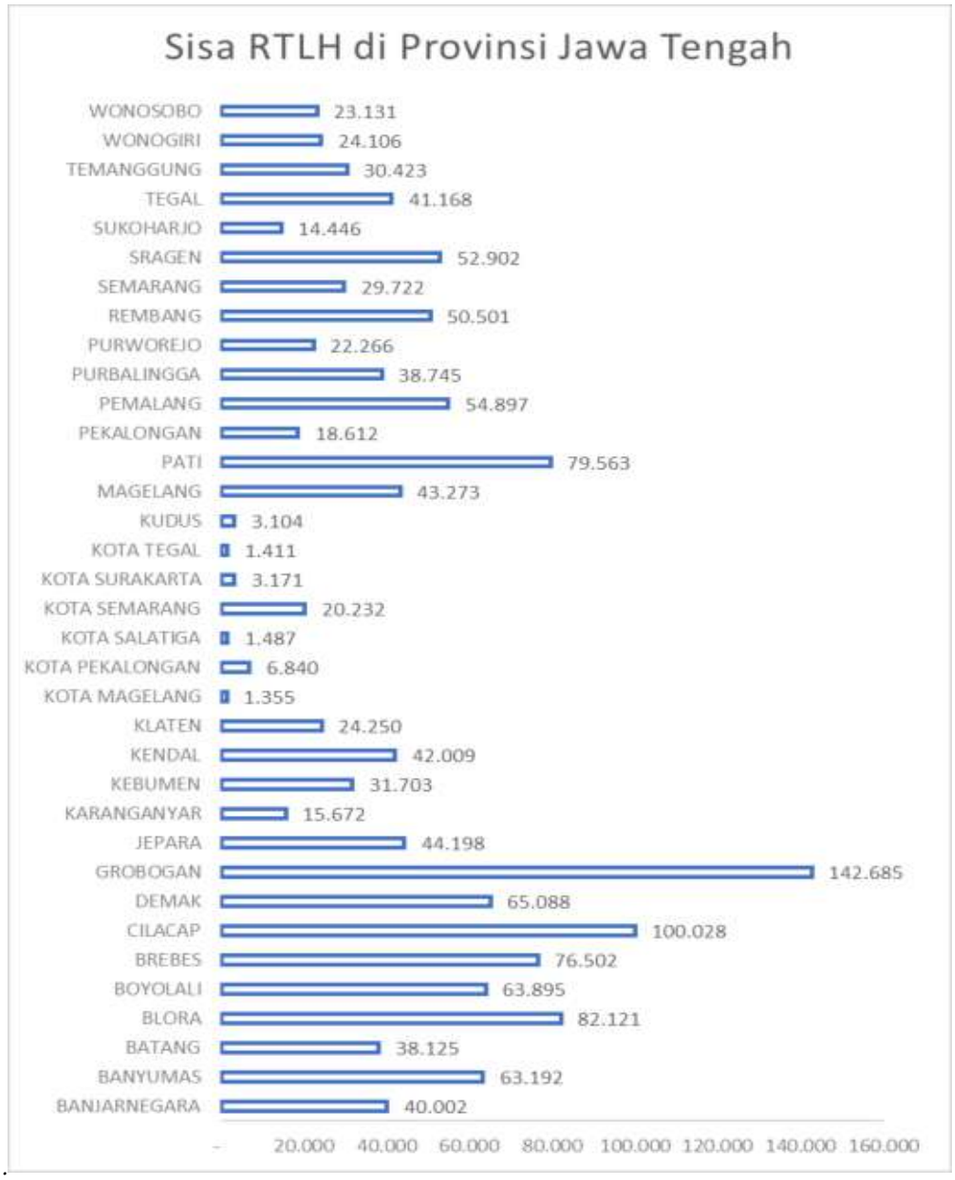

Sumber : Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos

Gambar 2.42.
Persebaran Jumlah Sisa RTLH di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

c. Upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan

Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdapat 2 jenis layanan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 kawasan rawan bencana. Selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan intervensi terhadap pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana Provinsi. Melalui bantuan sosial pembangunan baru rumah dan peningkatan kualitas rumah terdampak bencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan.

Adapun rekap penanganan rumah korban bencana pemerintah Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.64.
Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2022 melalui APBD Prov

No	JENIS PENANGANAN	2019	2020	2021	2022
1	**PK Bencana**	150	105	118	51
2	**PB Bencana**	0	11	23	19
	Jumlah	**150**	**116**	**141**	**70**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2022

d. Penanganan Kawasan Kumuh

Rendahnya tingkat kesejahteraan, rendahnya perilaku hidup sehat, ketaatan dan kesadaran hukum terhadap kelestarian lingkungan menjadi salah satu faktor tumbuhnya kawasan permukiman kumuh. Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yang disertai dengan peningkatan pemanfaatan lahan permukiman secara swadaya masyarakat khususnya kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seringkali tidak difasilitasi dengan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang memadai, seperti tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik, mengakibatkan penurunan kualitas kawasan permukiman yang dibangun pengembang dan munculnya kawasan permukiman kumuh baru yang dibangun MBR.

Penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh melalui SK Walikota/Bupati. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan luasan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 kewenangan yaitu luasan kumuh dibawah 10 ha menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, luasan kumuh 10-15 ha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, serta luasan kumuh di atas 15 ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2018 pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan identifikasi dan menetapkan kawasan permukiman kumuh seluas 3.004,59 Ha dengan kumuh 10-15 Ha seluas 474,66 Ha. Penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati/ Walikota sampai dengan Tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah menyisakan luasan kawasan kumuh sebesar 571,10 Ha sedangkan untuk sisa luasan kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi (10 – 15 Ha) adalah sebesar 152,85 Ha. Namun, terjadi penambahan kawasan permukiman kumuh sampai dengan Tahun 2022 menjadi 10.671,84 Ha. Beberapa penanganan telah dilakukan untuk menangani kawasan permukiman kumuh, hingga pada akhir Tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah sisa kawasan permukiman kumuh total di Provinsi Jawa Tengah sebesar 6.094,91 Ha, dan untuk sisa luasan kawasan kumuh kewenangan Provinsi (10 – 15 Ha) adalah sebesar 1.101,02 Ha.

Secara detail sebaran penanganan Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan SK Kumuh Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65.
Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan
SK Kumuh Sampai Dengan Tahun 2022 Di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Sisa Luasan Tahun 2022			Total Sisa Kumuh
		<10	10-15	>15	
1	Kab. Cilacap	0,00	0,00	63,74	63,74
2	Kab. Banyumas	30,77	14,44	43,37	88,568
3	Kab. Purbalingga	72,64	48,91	184,39	305,94
4	Kab. Banjarnegara	83,51	87,98	290,64	462,13
5	Kab. Kebumen	153,09	122,05	36,71	311,86
6	Kab. Purworejo	4,27	5,60	0,00	9,865
7	Kab. Wonosobo	0,00	0,00	149,53	149,53
8	Kab. Magelang	116,86	74,66	53,26	244,78
9	Kab. Boyolali	0,00	5,59	58,63	64,22
10	Kab. Klaten	0,00	0,00	1,45	1,45
11	Kab. Sukoharjo	0,99	26,69	19,69	47,36
12	Kab. Wonogiri	8,80	11,15	51,54	71,49
13	Kab. Karanganyar	75,15	10,38	17,34	102,87
14	Kab. Sragen	12,48	3,94	39,39	55,81
15	Kab. Grobogan	32,65	0,00	70,64	103,29
16	Kab. Blora	20,71	44,40	309,20	374,31
17	Kab. Rembang	71,15	81,04	107,03	259,22
18	Kab. Pati	46,77	91,73	35,67	174,17
19	Kab. Kudus	5,95	0,00	0,00	5,95
20	Kab. Jepara	11,16	6,79	36,89	54,84
21	Kab. Demak	4,08	59,73	100,27	164,08
22	Kab. Semarang	34,20	10,28	269,27	313,75
23	Kab. Temanggung	3,87	23,91	93,60	121,38
24	Kab. Kendal	33,51	12,24	31,20	76,95
25	Kab. Batang	16,88	2,98	52,45	72,31
26	Kab. Pekalongan	28,16	36,29	224,67	289,12
27	Kab. Pemalang	0,00	0,00	235,91	235,91
28	Kab. Tegal	31,34	28,82	177,78	237,94
29	Kab. Brebes	22,91	178,34	584,21	785,46
30	Kota Magelang	6,41	12,80	0,00	19,21
31	Kota Surakarta	13,23	0,00	74,05	87,27
32	Kota Salatiga	13,91	8,85	1,10	23,86
33	Kota Semarang	103,37	77,09	150,19	330,65
34	Kota Pekalongan	21,97	14,35	243,76	280,08
35	Kota Tegal	6,41	0,00	99,13	105,54
Jumlah		**1087,19**	**1101,02**	**3906,69**	**6094,91**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng (Status : Akhir Desember 2022)

2.3.14 Perhubungan.

Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah yang berdaya saing diperlukan peningkatan kualitas pelayanan transportasi, utamanya : konektivitas jaringan, keselamatan perjalanan dan kualitas layanan angkutan umum.

1. Konektivitas Jaringan Transportasi

Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar 0,30 yang lebih rendah dibandingkan dengan target Rasio Konektivitas Transportasi Nasional di Tahun 2022 sebesar 0,695.

Untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pencapaian Sasaran Utama Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 diperlukan upaya peningkatan komponen penyusun Rasio Konektivitas Provinsi yang terdiri dari : Angkutan darat; Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP); Angkutan Laut dan Angkutan Perkotaan.

a) Terminal Penumpang

Terminal penumpang di Jawa Tengah pada tahun 2022 sejumlah 221 terminal yang terdiri dari 19 terminal tipe A (kewenangan pusat), 24 terminal tipe B (kewenangan provinsi) dan 178 terminal tipe C (kewenangan kabupaten/kota). Untuk terminal tipe B, pada Terminal Nampurejo di Kabupaten Purworejo dalam proses penghapusan (Revisi SK Gub Nomor 551.22/31 Tahun 2019).

Tabel 2.66.
Perkembangan Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah terminal tipe A	17	17	19	19	19
2.	Jumlah terminal tipe B	24	24	24	24	24
3.	Jumlah terminal tipe C	151	178	178	178	178
Total Terminal di Jawa Tengah		**120**	**118**	**219**	**221**	**221**

Keterangan:
- *Sumber Terminal Tipe A = Kementerian Perhubungan,*
- *Sumber Terminal Tipe B = Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,*
- *Sumber Terminal Tipe C = BAPPEDA Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.*

Jumlah dan persebaran terminal tipe A dan tipe B, jika dibandingkan dengan kebutuhan terminal mendasarkan Dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah masih belum dapat memenuhi kebutuhan. Sampai dengan tahun 2022 masih terdapat kebutuhan pembangunan terminal tipe A di 8 kabupaten/kota dan tipe B di 11 kabupaten/kota.

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.43.
Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.67.
Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe A		Terminal Tipe B	
		Eksisting	Revisi RTRW Provinsi	Eksisting	Revisi RTRW Provinsi
	Kedungsepur				
1	Kab. Kendal				Ada
2	Kab. Demak	Demak*	Ada	Bintoro	Ada
3	Kab. Semarang	Bawen	Ada		
4	Kota Semarang	Mangkang	Ada	Penggaron	Ada
5	Kota Salatiga	Tingkir	Ada		
6	Kab. Grobogan		Ada	Purwodadi	Ada
	Jekutibanglor				
7	Kab. Jepara		Ada		Ada
8	Kab. Kudus	Jati	Ada		
9	Kab. Pati		Ada		Ada
10	Kab. Rembang		Ada		Ada
11	Kab. Blora	Cepu	Ada	Gagak Rimang	Ada
	Subosukowonosraten				
12	Kab. Sukoharjo			Kartosuro, Sukoharjo	Ada
13	Kab. Boyolali		Ada	Penggung	Ada
14	Kota Surakarta	Tirtonadi	Ada		
15	Kab. Karanganyar			Tegalgede, Tawangmangu	Ada
16	Kab. Wonogiri	Giri Adipura	Ada	Jatisrono, Pracimantoro, Purwantoro, dan Baturetno	Ada
17	Kab. Sragen		Ada	Pilangsari	Ada
18	Kab. Klaten	Ir. Soekarno	Ada		
	Bregasmalang				
19	Kab. Brebes			Bumiayu dan Tanjung	Ada
20	Kab. Tegal				Ada
21	Kota Tegal	Tegal	Ada		Ada
22	Kab. Pemalang	Induk Pemalang	Ada		Ada
	Petanglong				
23	Kab. Pekalongan			Kajen	Ada
24	Kab. Batang			Banyuputih	Ada
25	Kota Pekalongan	Pekalongan	Ada		
	Barlinmascakeb				
26	Kab. Banjarnegara		Ada	Banjarnegara	Ada
27	Kab. Purbalingga	Bobotsari	Ada	Purbalingga	Ada
28	Kab. Banyumas	Purwokerto	Ada		Ada
29	Kab. Cilacap	Bangga Bangun Desa	Ada		Ada
30	Kab. Kebumen	Kebumen	Ada		Ada
	Purwomanggung				
31	Kab. Purworejo	Purworejo	Ada	Kutoarjo* dan Nampurejo**	Ada
32	Kab. Wonosobo	Mendolo	Ada		
33	Kab. Magelang			Drs. Prayitno	Ada
34	Kota Magelang	Tidar	Ada		
35	Kab. Temanggung			Madureso	Ada
J U M L A H		19 Terminal	26 Terminal	24 Terminal	27 Terminal

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, dan Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2022
*Catatan : * Terminal Kutoarjo proses pembangunan dan ** Terminal Nampurejo proses penghapusan aset.*

Terminal Kutoarjo mulai dibangun pada tahun 2021, dilanjutkan pada tahun 2022-2023 dan masih direncanakan lanjutan pembangunannya di tahun 2024-2026. Adapun Terminal Nampurejo dalam proses penghapusan karena sudah ada pembangunan terminal baru di Kutoarjo. Pada tahun 2022, terdapat 178 buah terminal Tipe C yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hanya Kota Pekalongan dan Kota Tegal yang tidak mempunyai Terminal Tipe C.

Tabel 2.68.

Persebaran Terminal Tipe C di Jawa Tengah Tahun 2022

No.	Perwilayahan/ kabupaten/kota	Terminal Tipe C Eksisting	
		Data Sumber Bappeda Kab./Kota Tahun 2022	
	KEDUNGSEPUR		
1.	Kab. Kendal	4	Sukorejo, Boja*, Weleri dan Kendal* (* : SK Bupati Kendal No. 231/211/2008)
2.	Kab. Demak	2	Karangawen dan Pucanggading (Mranggen)
3.	Kab. Semarang	9	Sisemut Ungaran, Ambarawa, Sumowono, Sruwen Tengaran, Suruh, Pos Terminal Bringin, Pos Terminal Kopeng Getasan, Palbapang dan Bandungan
4.	Kota Semarang	2	Cangkiran dan Gunungpati (SK Walikota Semarang No. 551.22/1169 Tahun 2016)
5.	Kota Salatiga	1	Tamansari
6.	Kab. Grobogan	5	Sulursari, Wirosari, Angkotdes Purwodadi, Godong dan Gubug
	JEKUTIBANGLOR		
7.	Kab. Jepara	5	Welahan, Pecangaan, Jepara, Bangsri dan Kelet (SK Bupati Jepara No. 551.22/172 Tahun 2016)
8.	Kab. Kudus	4	Jetak, Kalirejo, Getas, Singocandi
9.	Kab. Pati	3	Kembang Joyo*, Juwana dan Tayu (* : SK Bupati Pati No. 551.22/2174 2016, Juwana dan Tayu belum ada SK)
10.	Kab. Rembang	7	Rembang, Lasem, Pamotan, Sarang, Sulang, Sumber dan Gunem (SK Bupati Rembang No. 551.4/0984/2016)
11.	Kab. Blora	4	Todanan, Kunduran, Ngawen, dan Wulung
	SUBOSUKO WONOSRATEN		
12.	Kab. Sukoharjo	4	Sukoharjo, Bekonang, Watukelir dan Tawangsari
13.	Kab. Boyolali	13	Karanggede, Guwo, Klewor, Nogosari, Simo, Cepogo, Ampel, Sunggingan, Randuasri, Tambak, Tamansari, Bangak dan Selo
14.	Kota Surakarta	2	Kadipiro dan Semanggi
15.	Kab. Karanganyar	10	Matesih, Palur, Gondangrejo, Jongke, Jambangan, Jenawi, Ngargoyoso, Karangpandan, Jumapolo dan Jatipuro
16.	Kab. Wonogiri	18	Wonogiri, Ngadirojo, Baturetno, Batuwarno, Tirtomoyo, Pracimantoro, Wuryantoro, Eromoko, Giri Belah, Manyaran, Slogohimo, Purwantoro, Bulukerto, Puhpelem, Jatisrono, Jatiroto, Sidoharjo dan Girimarto
17.	Kab. Sragen	7	Kragilan, Batujamus, Gondang, Tangen, Pasar Bunder, Sumberlawang dan Gemolong
18.	Kab. Klaten	7	Penggung, Cawas, Teloyo, Pasar Klaten, Bendogantungan, Tulung, dan Delanggu
	BREGASMALANG		
19.	Kab. Brebes	7	Ketanggungan, Brebes, Bumiayu, Jatibarang, Banjarharjo, Larangan dan Losari
20.	Kab. Tegal	3	Dukuhsalam, Adiwerna dan Trayeman (SK Bupati Tegal No. 769 Tahun 2017)
21.	Kota Tegal	0	Belum ada Terminal Tipe C
22.	Kab. Pemalang	8	Belik, Moga, Comal, Randudongkal, Grosir Comal, Angkutan Kota Pemalang, Petarukan dan Warungpring
	PETANGLONG		
23.	Kab. Pekalongan	5	Wiradesa, Kedungwuni, Doro, Kesesi dan Sragi
24.	Kab. Batang	5	Bandar, Bawang, Reban, Limpung, dan Blado
25.	Kota Pekalongan	0	Belum ada Terminal Tipe C
	BARLINGMASCAKEB		
26.	Kab. Banjarnegara	4	Mandiraja, Karangkobar, Kalibening & Banjarnegara (Angkudes)
27.	Kab. Purbalingga	4	Bukateja, Kejobong, Jompo, dan Penaruban

No.	Perwilayahan/ kabupaten/kota	Terminal Tipe C Eksisting	
		Data Sumber Bappeda Kab./Kota Tahun 2022	
28.	Kab. Banyumas	3	Wangon*, Ajibarang* dan Baturaden** (*sesuai SK Bupati Banyumas No. 480/324 Tahun 2016), ** : Terminal Baturaden dikelola oleh pariwisata)
29.	Kab. Cilacap	8	Karangpucung, Sidareja, Majenang, Kawunganten, Adipala, Sampang, Wanareja dan Kroya (SK Bupati Cilacap No. 551.2/591/17/2015)
30.	Kab. Kebumen	3	Kebumen, Gombong (bus dan non bus) dan Karanggayam (Perdesaan)
	PURWOMANGGUNG		
31.	Kab. Purworejo	3	Kutoarjo, Kongsi dan Terminal non bus Pasar Kutoarjo
32.	Kab. Wonosobo	4	Sawangan, Terminal Keselamatan Jalan Reco, Mendolo dan Stasiun (meliputi Pasar Induk/TPR Bhayangkara/Jl. Resimen (SK Bupati Wonosobo No. 551.21/630/2019)
33.	Kab. Magelang	6	Borobudur, Salaman, Secang, Grabag, Tegalrejo dan Bandongan
34.	Kota Magelang	1	Magersari
35.	Kab. Temanggung	7	Maron, Kerkop, Ngadirejo, Candiroto, Kranggan, Pingit dan Plaza
	Jumlah se-JATENG	**178**	

Sumber: Bappeda Kabupaten/Kota se - Jawa Tengah, 2022

Kondisi terminal Tipe B di Jawa Tengah pada tahun 2022 sebagian besar masih layak operasi. Untuk Terminal Nampurejo Purworejo dalam proses penghapusan dengan mulai beroperasinya Terminal Kutoarjo.

Tabel 2.69.

Kondisi dan Status Aset Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	Nama Terminal	Kondisi	Status Aset
1.	Kota Semarang	1. Penggaron	Layak Operasi	Milik Pemprov
2.	Kab. Grobogan	2. Purwodadi	Layak Operasi	Milik Pemprov
3.	Kab. Blora	3. Gagak Rimang	Layak Operasi	Milik Pemprov
4.	Kab. Demak	4. Bintoro	Tidak dapat dikembangkan	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT. KAI
5.	Kab. Batang	5. Banyu Putih	Layak Operasi	Milik Pemprov
6.	Kab. Pekalongan	6. Kajen	Layak Operasi	Milik Pemprov
7.	Kab. Temanggung	7. Madureso	Layak Operasi	Milik Pemprov
8.	Kab. Magelang	8. Drs. Prayitno	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT. KAI
9.	Kab. Boyolali	9. Penggung	Layak Operasi	Milik Pemprov (2019)
10.	Kab. Sragen	10. Pilangsari	Layak Operasi	Milik Pemprov
11.	Kab. Karanganyar	11. Tegalgede	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab
		12. Tawangmangu	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab
12.	Kab. Wonogiri	13. Jatisrono	Layak Operasi	Milik Pemprov
		14. Baturetno	Layak Operasi	Milik Pemprov
		15. Pracimantoro	Layak Operasi	Milik Pemprov
		16. Purwantoro	Layak Operasi	Milik Pemprov

No	Kabupaten / Kota	Nama Terminal	Kondisi	Status Aset
13.	Kab. Purworejo	17. Kutoarjo	Proses Pembangunan	Milik Pemprov (2020)
		18. Nampurejo	Tidak Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso, Proses Penghapusan
14.	Kab. Sukoharjo	19. Kartosuro	Tidak Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso
		20. Sukoharjo	Layak Operasi	Milik Pemprov
15.	Kab. Banjar	21. Banjarnegara	Layak Operasi	Milik Pemprov
16.	Kab. Purbalingga	22. Purbalingga	Layak Operasi	Milik Pemprov
17.	Kab. Brebes	23. Bumiayu	Layak Operasi	Milik Pemprov
		24. Tanjung	Layak Operasi	Milik Pemprov

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Sesuai dengan Sasaran Strategis (Utama) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terminal Penumpang Tipe B tahun 2022 dengan rata-rata nilai 78,25.

Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2022 sebanyak 452.746 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan bus besar dengan jumlah 271.242 kendaraan. Terminal dengan jumlah kendaraan masuk terbanyak ada di terminal Tipe B Purbalingga sebanyak 51.309 kendaraan.

Tabel 2.70.

Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2022

No.	Nama Terminal	Kabupaten / Kota	Kendaraan Masuk				
			Bis Besar	Bis Sedang	Bis Kecil	Mobil Penumpang Umum	Jumlah
1	Penggaron	Kota Semarang	11.449	1.079	605	1.343	14.476
2	Purwodadi	Grobogan	15.166	20.423	-	-	35.589
3	Bintoro	Kab. Demak	5.194	2.609	3.100	-	10.903
4	Gagak Rimang	Kab. Blora	23.376	-	-	-	23.376
5	Penggung	Kab. Boyolali	40.981	330	-	-	41.311
6	Pilangsari	Kab. Sragen	18.918	118	2.057	-	21.093
7	Kartosuro	Sukoharjo	17.442	6.178	-	-	23.620
8	Sukoharjo	Sukoharjo	22.631	5.227	-	2.229	30.087
9	Tegalgede	Karanganyar	3.672	2.251	440	3.829	10.192
10	Tawangmangu	Karanganyar	8.914	4.163	2.370	-	15.447
11	Baturetno	Kab. Wonogiri	7.990	-	-	-	7.990
12	Jatisrono	Kab. Wonogiri	11.969	-	-	-	11.969
13	Pracimantoro	Kab. Wonogiri	11.533	687	-	-	12.220
14	Purwantoro	Kab. Wonogiri	16.499	-	-	-	16.499
15	Madureso	Temanggung	12.466	10.848	1.555	-	24.869
16	Dr. Prayitno Muntilan	Kab. Magelang	-	-	6.801	-	6.801
17	Kutoarjo	Purworejo	-	-	-	-	-
18	Nampurejo	Purworejo	-	-	-	-	-
19	Banjarnegara	Banjarnegara	17.717	7.805	15.655	1.589	42.766

No.	Nama Terminal	Kabupaten / Kota	Kendaraan Masuk				
			Bis Besar	Bis Sedang	Bis Kecil	Mobil Penumpang Umum	Jumlah
20	Purbalingga	Purbalingga	3.843	5.973	5.229	36.264	51.309
21	Banyuputih	Batang	4.777	6.611	10.327	-	21.715
22	Kajen	Kab. Pekalongan	9.161	1.335	4.271	-	14.767
23	Tanjung	Brebes	7.379	-	6.427	-	13.806
24	Bumiayu	Brebes	165	1.712	64	-	1.941
	JUMLAH		271.242	77.349	58.901	45.254	452.746

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

b) Trayek Angkutan Umum

Pelayanan angkutan umum di Jawa Tengah, utamanya angkutan pariwisata pada tahun 2022 sejumlah 2.754 kendaraan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sejumlah 3.093 kendaraan, selain merupakan lanjutan dampak dari pandemi Covid-19 juga masyarakat lebih berminat menggunakan moda angkutan pribadi.

Tabel 2.71.
Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/AKAP (trayek)	902	902	902	902	902
2.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/AKDP (trayek)	269	269	272	272	272
3.	Angkutan wisata (kendaraan)	4.666	4.666	4.666	3.093	2.754
4.	Jumlah bus (unit)	12.737	12.737	12.737	12.737	10.825
5.	Mobil Penumpang Umum (unit)	397.667	397.667	397.667	397.667	397.667

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Untuk pelayanan angkutan pemadu moda telah ditetapkan jaringan trayek sebagai berikut:

1. Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Kudus PP
2. Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Salatiga PP
3. Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Pekalongan PP
4. Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Wonogiri PP
5. Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Sragen PP
6. Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Terminal Tirtonadi PP

Dari jaringan trayek pemadu moda di atas sampai dengan saat ini baru terlayani 2 (dua) trayek, yaitu Bandara Adi Sumarmo – Terminal Tirtonadi PP dan Bandara Adi Sumarmo - Sragen oleh DAMRI namun saat ini pelayanannya dihentikan sementara.

c) Halte Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan

Untuk mendukung konektivitas jaringan transportasi aglomerasi perkotaan diperlukan peningkatan cakupan wilayah yang telah terlayani koridor Trans Jateng. Fasilitas yang mempengaruhi cakupan wilayah adalah pemenuhan jumlah halte yang representatif untuk memudahkan penumpang naik dan turun bus Trans

Jateng. Antara Tahun 2018 – 2022 telah terbangun 280 halte di 6 koridor Trans Jateng. Pada Bulan Agustus 2023 direncanakan mulai beroperasional koridor ke-7 Trans Jateng pada koridor Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri, dengan kebutuhan halte sejumlah 122 unit, dimana sejumlah 32 unit sudah tersedia / terbangun karena berhimpitan dan merrupakan fasilitas integrasi dengan layanan angkutan umum perkotaan eksisting di beberapa koridor Batik Solo Trans /BST.

Tabel 2.72.
Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng Tahun 2018 – 2022

Koridor Trans Jateng	Inventarisasi Halte			
	Kebutuhan	Terbangun		Belum Terbangun*
		Aset Pemprov	Aset Kab/Kota/Swasta	
Kota Semarang – Kabupaten Banyumas (Bawen)	94	40	52	2
Kabupaten Banyumas (Purwokerto) - Purbalingga	62	60	2	0
Kota Semarang – Kendal (Weleri)	53	40	13	0
Kabupaten Magelang – Purworejo (Kutoarjo)	49	36	0	13
Surakarta – Sragen (Sumberlawang)	85	17	0	68
Kota Semarang – Grobogan (Gubug – Godong)	69	20	0	49
Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri (Rencana Operasional Agustus 2023)	122	Rencana dibangun mulai 2023	32	90
Total	**534**	**213**	**99**	**222**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022
Catatan : * Halte yang belum terbangun di beberapa tempat sudah dilengkapi rambu bus stop/MMT

d) Perhubungan Laut

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017, terdapat 14 Pelabuhan di Jawa Tengah yang terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 2 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap, dan Tegal), 8 Pelabuhan Pengumpan Regional (Batang, Kendal, Jepara, Legok Bajak, Karimunjawa, Juwana, Tasik Agung dan Sluke), dan 3 Pelabuhan Lokal (Brebes, Pekalongan dan Pemalang). Secara umum, kondisi Pelabuhan Pengumpul Regional sebagai berikut : Pelabuhan Juwana berada pada alur sungai, Pelabuhan Tasik Agung tidak ada aktivitas karena di dasar kolam terdapat karang hidup. Pelabuhan Batang dan Kendal kedalaman kolam dan alur pelayarannya tidak ideal karena sedimentasi. Pelabuhan Kendal terdapat usulan untuk menjadi satu kesatuan dengan Pelabuhan Tanjung Emas. Untuk Pelabuhan Jepara, Legonbajak, Karimunjawa dan Sluke secara fisik masih dalam kondisi yang cukup baik.

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, sampai dengan akhir tahun 2022 proses penlimpahan aset dari Pemerintah Pusat ke Provinsi belum diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan.

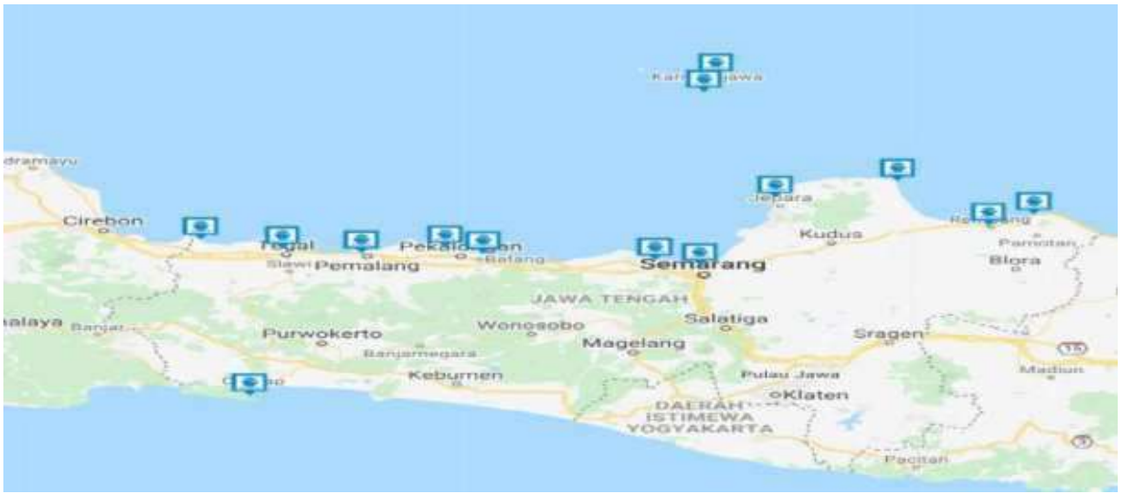

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.44.
Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah

Tabel 2.73.
Hierarki Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah

No.	Pelabuhan	Hierarki dalam RIPN	Keterangan
1.	Tanjung Emas Semarang	Utama	RTRWN : Pemantapan Pel. Utama
2.	Tanjung Intan Cilacap	Pengumpul	RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl
3.	Tegal	Pengumpul	
4.	Batang	Pengumpan Regional	RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl RIPN : Pel. Pengumpul (2027)
5.	Sluke Rembang	Pengumpan Regional	RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl RIPN : Pel. Pengumpul (2027)
6.	Tasik Agung Rembang	Pengumpan Regional	
7.	Juwana Pati	Pengumpan Regional	RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl
8.	Jepara	Pengumpan Regional	
9.	Karimunjawa Jepara	Pengumpan Regional	
10.	Legon Bajak Jepara	Pengumpan Regional	
11.	Kendal	Pengumpan Regional	RTRWN : Pel. Angk. Penyeberangn Saat ini = Wil. Ker. Tanjung Emas
12.	Brebes	Pelabuhan Lokal	RIPN : Pel. Pengumpan Reg. (2027)
13.	Pekalongan	Pelabuhan Lokal	RIPN : Pel. Pengumpan Reg. (2027)
14.	Pemalang	Pelabuhan Lokal	RIPN : Pel. Pengumpan Reg. (2027)

Sumber : PP 13/2017 tentang Perub. PP 26/2008 tentang RTRWN & SK Menhub. KP.432/2017 tentang RIPN

Kondisi pelabuhan pengumpan regional di Jawa Tengah secara umum, laju sedimentasi pada kolam labuh dan alur pelayaran sangat tinggi yang memerlukan upaya penanganan berupa normalisasi secara berkala dengan periode 3 – 4 tahun sekali. Jumlah kunjungan kapal tahun 2022 di Pelabuhan Tanjung Emas mencapai 3.537 *call*. Mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021 yang mencapai 3.634 *call*, hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi ekspor-impor.

Tabel 2.74.
Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pelabuhan	14	14	14	14	14
2	Pelabuhan Tanjung Emas					
	a. Kunjungan kapal (*call*)	3.410*)	3.804	2.663	3.634	3.537
	b. GRT (GT)	24.902.093*)	30.236.211	22.999.480	21.505.841	28.396.326
	c. Kargo (ton)	13.919.940*)	14.682.120	14.185.650	4.292.136	6.342.781
	d. Kontainer (*Teus*)	539.158*)	658.303	355.774	797.020	810.544
	e. Penumpang (orang)	280.142*)	390.693	134.997	182.342	341.244
	f. *Dweelling Time* TPKS Impor	4,5	4,91	3,84	3,93	3,65
	g. *Dweelling Time* TPKS Expor	3,4	2,48	2,78	3,52	3,05
3	Pelabuhan Tanjung Intan					
	a. Kunjungan kapal (*call*)	354*)	1.240	1.441	1.030	150 *)
	b. GRT (GT)	1.971.910**)	23.713.251	28.826.775	18.658.236	2.355.920
	c. Kargo (ton)	6.276.236*)	16.586.884	8.524.893	7.525.056	3.530.857

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Selama tahun 2022 *dwelling time* Pelabuhan Tanjung Emas (sebagai Pelabuhan utama di Jawa Tengah) mencapai 3,65 hari (impor) yang mengalami peningkatan kinerja jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,93 hari. Sedangkan untuk ekspor juga mengalami penurunan kinerja dari 3,52 hari di tahun 2021 menjadi 3,05 hari di tahun 2022.

e) Aktivitas Penyeberangan

Pelabuhan penyeberangan yang ada di Jawa Tengah melayani lintas Jepara – Karimunjawa dan Semarang – Karimunjawa. Jumlah penumpang KM. Siginjai pengganti KM. Muria yang melayani lintas Jepara – Karimunjawa pp pada tahun 2022 melayani penumpang sejumlah 98.293 orang yang meningkat dibandingkan tahun 2021 sejumlah 98.173 orang. Sedangkan penumpang KM Bahari Ekspres 1 yang melayani Jepara-Karimunjawa, di tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah penumpang menjadi 118.599 orang dibandingkan tahun 2021 sejumlah 112.378 orang.

Tabel 2.75.
Perkembangan Pelayanan ASDP di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penumpang KM. Muria (orang)/KMC. Siginjai*)	75.525	75.679	72.962	98.173	98.293
2.	Penumpang KMC. Kartini I (orang)	1.796	2.725	0	0	0
3.	Penumpang KMC. Bahari Ekspress 1 (Jepara –Karimunjawa) (orang)	103.617	102.684	98.998	112.378	118.599
4.	Jumlah penumpang KMC. Bahari Ekspress 2 (Kendal –Karimunjawa) (orang)	off	off	off	off	off

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

f) Perhubungan Udara

Terdapat 3 bandara komersial yang sudah beroperasi yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang, Adi Sumarmo Boyolali dan JB. Soedirman Purbalingga, serta 3 bandara perintis yang sudah beroperasi yaitu Bandara Dewadaru Karimunjawa Jepara, Tunggul Wulung Cilacap dan Ngloram Blora.

Untuk Bandara Adi Sumarmo Surakarta pada tahun 2020 telah terdapat intermoda transportasi dengan adanya kereta api bandara yang menghubungkan Bandara Adi Sumarmo dengan Stasiun Solo Balapan. Dari Stasiun Solo Balapan sudah terintegrasi langsung dengan *sky bridge* ke Terminal Tipe A Tirtonadi.

Jumlah penumpang di Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo baik domestik dan internasional tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah barang baik domestik maupun internasional di Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2021.

Tabel 2.76.
Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah bandara	4	6	6	6	6
2	Bandara Ahmad Yani					
	- Penumpang domestik (orang)	4.943.701	3.678.104	1.342.341	884.970	1.618.109
	- Penumpang internasional (orang)	216.548	228.700	35.728	9	77
	- Barang domestik (kg)	29.485.686	15.788.447	9.157.070	6.763.331	6.222.664
	- Barang internasional (kg)	2.226.842	2.086.421	239.699	1.212.031	3.578.079
3	Bandara Adi Soemarmo					
	- Penumpang domestik (orang)	1.303.570	1.565.093	516.780	427.536	839.773
	- Penumpang internasional (orang)	60.032	155.400	17.198	15	33.739
	- Barang domestik (kg)	7.808.387	7.074.726	1.596.685	1.856.723	1.760.287
	- Barang internasional (kg)	968.226	2.982.541	-	15.158	0

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Sebagai dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Karimunjawa, telah dikembangkan Bandara Dewandaru pada tahun 2019 melalui perpanjangan *runway* dari 1.200 meter menjadi 1.400 meter dan pada Tahun 2022 terdapat perluasan gedung terminal penumpang dengan luas bangunan lantai 1 seluas 980 m^2 dan lantai 2 seluas 880 m^2 untuk memenuhi kebutuhan jasa angkutan udara terkait dengan kepariwisataan.

Sumber: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Dewadaru, 2022

Gambar 2.45.

Apron, Terminal dan *Runway* Bandara Dewadaru Karimunjawa

Bandara Tunggul Wulung Cilacap dominan digunakan sebagai sarana pendidikan sekolah penerbangan. *Runway* sepanjang 1.400 meter dengan lebar 30 meter dapat dilandasi oleh pesawat sejenis ATR 72 atau CN 235 (kapasitas 60 – 70 penumpang) atau yang lebih kecil. Kondisi saat ini terutama untuk landas pacu Bandara Tunggul Wulung tidak memungkinkan untuk diperpanjang karena terdapat kendala dilapangan (*obstacle*).

Untuk mendukung pengembangan Jawa Tengah khususnya untuk wilayah timur sedang dilakukan Pengembangan Bandara Ngloram Kabupaten Blora, sampai dengan tahun 2021 sudah terbangun *runway* sepanjang 1.500 meter, landas parkir dan landas hubung, gedung terminal, jalan akses dan fasilitas penunjang lainnya serta mulai operasional pada November 2021. Pada Tahun 2022 Bandara Ngloram kembali diperluas melalui pengadaan lahan yang direncanakan untuk fasilitas keselamatan penerbangan.

Sumber: Satuan Pelayanan Bandara Ngloram, 2022.

Gambar 2.46.

Apron dan Terminal Bandara Ngloram Kabupaten Blora

Untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah masih diperlukan persebaran bandara untuk pemerataan pembangunan. Untuk wilayah tengah dan selatan, karena Bandara Tunggul Wulung Cilacap sulit untuk dikembangkan, maka dilakukan pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman (Wirasaba) di Kabupaten Purbalingga. Di Bandara Jenderal Besar Soedirman Kabupaten Purbalingga telah terbangun *runway* sepanjang 1.600 meter, *apron, taxiway* dan jalan akses.

Sumber: PT. Angkasa Pura II, 2022

Gambar 2.47.
Apron dan *Runway* Bandara J.B. Soedirman Purbalingga

g) Perkeretaapian

Total panjang jalur kereta api di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2022, sepanjang 1.680,26 km/sp, terdiri dari 929,50 km/sp jalur rel aktif/operasional (55,32 persen dari total panjang rel), dan 750,757 km jalur rel non aktif/belum operasional (44,68 persen dari total panjang rel). Posisi Jawa Tengah yang sangat strategis karena berada diantara 2 kota besar (Kota Jakarta dan Kota Surabaya), jalur rel di Jawa Tengah sangat padat, sehingga pembangunan rel ganda kereta api (*double track*) pada Lintas Utara dan Lintas Selatan masih diperlukan lanjutan penanganan sampai dengan semua jaringan rel tuntas dengan rel ganda. Dari 929,50 km/sp rel aktif terdiri dari 292,44 km/sp jalur tunggal dan 637,06 km/sp jalur ganda.

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.48.
Peta Jaringan *Loop* Rel Kereta Api di Jawa Tengah

Tabel 2.77.
Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penumpang (orang)	25.624.133	24.638.063	8.318.591	4.982.954	6.434.642
2.	Barang terangkut (ton)	1.939.940	2.056.546	1.902.245	2.661.209	2.053.983
3.	Stasiun Kereta (buah)	140	106	106	115	115
4.	Perlintasan KA (unit)	1.369	1.168	1.369	1369	1369

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Jawa Tengah telah dikembangkan sistem angkutan rel di wilayah perkotaan Solo Raya yaitu pengembangan Kereta Bandara Internasional Adi Soemarmo (KA BIAS) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (mulai operasional Desember 2019). Jaringan KA BIAS menghubungkan Stasiun Bandara Adi Soemarmo dengan Stasiun Solo Balapan (sepanjang 12,77 km) yang direncanakan diperpanjang sampai dengan Stasiun Klaten sepanjang 43,77 km.

Tabel 2.78.
Progres Revitalisasi Jalur Kereta Api Non Aktif di Jawa Tengah

No.	Reaktivasi Jalur KA Lintas	Panjang ± (km)	Keterangan
1.	Kedungjati – Tuntang	32	FS 2009, MoU & PKS 2013, DED 2014, AMDAL 2015, Tanah 2016, Proses Review DED
2.	Stasiun Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas	2,9	FS 2012, MoU 2014, PKS 2015, DED 2015, UKL-UPL 2015, Ijin Lingkungan 2016, Pembebasan lahan sudah selesai dan dalam tahap konstruksi, namun terdapat 8 bidang yang masih perlu ditertibkan untuk aspek keselamatan dan pintu perlintasan
3.	Purwokerto - Wonosobo	94	FS 2009, Study Trase 2015, Rekom Gub kesesuaian RTRW 2016, Penetapan Trase 2016, Rencana : 2018 - 2023
4.	Semarang – Demak – Kudus	52	Studi KA Regional Semarang – Demak – Rembang 2006, FS Semarang – Rembang – Bojnegoro 2015, Studi SID APBN 2020 terkena Refocussing dan diusulkan Kembali Tahun 2021. Studi SID APBN 2021. Rencana 2021 – 2030
5.	Kudus – Pati – Rembang	60	Studi KA Regional Semarang – Demak – Rembang 2006, FS Semarang – Rembang – Bojonegoro 2015, Rencana 2021 – 2030
6.	Bedono – (Secang – Parakan) – Magelang – Yogyakarta : - Magelang – Yogyakarta - Magelang – Secang –Parakan	 46 37	FS 2013, Kajian Trase Bedono – Secang – Magelang 2014, Rekom Gubernur 2019, Studi Kelayakan Survei Investigasi dan Rancangan Dasar akses jalur kereta 2018, Studi DED APND 2020 terkena Refocussing dan diusulkan Kembali 2022. Rencana 2018 – 2024
7.	Cepu – Rembang	72	Masuk RIPNAS (Belum Ada Persiapan Dokumen) : Rencana 2025 – 2030
8.	Purwosari – Wonogiri - Baturetno	82	Masuk RIPNAS (Belum Ada Persiapan Dokumen) : Rencana 2025 – 2030
9.	Wonosobo – Magelang	29,6	Belum Ada Persiapan Dokumen
Total Panjang		507,5	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

2. Keselamatan Perjalanan Transportasi

Keselamatan perjalanan transportasi diukur dengan Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi (dalam 1 Juta Keberangkatan), dimana capaian Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar 16,91 yang lebih baik jika dibandingkan dengan target ditingkat Nasional pada Tahun 2022 sebesar 28,85.

Untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pencapaian Sasaran Utama Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 diperlukan upaya peningkatan kinerja komponen yang mempengaruhi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi yang diantaranya meliputi : Pemasangan fasilitas keselamatan jalan, Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); Pelaksanaan *ramp check*; Peningkatan jumlah kendaraan laik jalan; Penanganan perlintasan sebidang dan Pemenuhan fasilitas penyeberangan sungai.

a) Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2018-2022, rata-rata korban jiwa setiap tahunnya sebesar ±4.000 jiwa dimana rata-rata per hari terdapat 11 orang yang meninggal dunia di jalan. Indeks Fatalitas Kecelakaan Per 100.000 Penduduk pada Tahun 2022 sebesar 11,91, yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Mempertimbangkan hal tersebut peningkatan keselamatan dijalan harus dijadikan sebagai salah satu prioritas penanganan yang dilakukan secara komprehensif. Adapun selengkapnya data terkait tingkat fatalitas kecelakaan di Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.79.
Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kematian (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk
2018	4.116	34.490.835	11,93
2019	4.215	34.718.204	12,14
2020	3.508	36.516.035	9,61
2021	3.750	36.742.501	10,21
2022	4.409	37.032.410	11,91

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Data kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah pada tahun 2022 terdapat 30.730 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban 4.409 jiwa meninggal dunia, 77 orang luka berat, 35.869 orang luka ringan dan jumlah kerugian materiil Rp. 24.819.905.000,-.

Tabel 2.80.
Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Satuan	Jumlah				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Laka	Kejadian	19.016	25.962	21.396	22.521	30.730
2.	Jumlah Korban MD	Jiwa	4.116	4.141	3.508	3.750	4.409
3.	Korban Luka Berat	Orang	97	96	48	77	77
4.	Korban Luka Ringan	Orang	21.679	30.555	24.495	25.847	35.869
5.	Kerugian Materiil	Rupiah (Rp.000)	14.138.632	17.858.087	14.746.525	16.836.435	24.819.905.000

Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, 2022

Pada tahun 2022, dari 52.817 kendaraan yang terlibat kecelakaan sebesar 0,55 persen atau 290 kendaraan merupakan mobil bus (AKAP, AKDP, Angkutan Kota/Pedesaan, Pariwisata).

b) Perlengkapan Jalan (Fasilitas Keselamatan) di Ruas Kewenangan Provinsi

Tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan kewenangan provinsi pada tahun 2022 mencapai 30,03 persen, selalu terdapat peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang kereta api pada tahun 2022 sebesar 17,88 persen yang juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.81.
Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang dan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang di Perlintasan Sebidang KA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, RPPJ, Marka, Guard-rail, LPJU, APILL, WL, Deliniator, Cermin Tikung, dan ATCS) terpasang (%)	7,74	12,18	16,93	25,06	30,03
2.	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (%)	3,85	4,55	4,55	9,09	17,88

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 2.82.
Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rambu Jalan	Buah	375	600	-	478	245
2.	RPPJ	Buah	50	60	-	46	-
3.	APILL	Unit	8	6	-	2	-
4.	*Guardrail*	Beam	448	290	30	176	31
5.	Marka Jalan	m’	12.001	102.000	-	52.444	73.976
6.	LPJU	Unit	263	513	150	174	355

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

c) Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)

Di ruas jalan kewenangan provinsi, pada Tahun 2022 masih terdapat 86 titik ruas jalan yang termasuk kategori Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang masih belum tertangani.

Tabel 2.83.
Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di Ruas Jalan Provinsi yang Belum Tertangani Tahun 2022

No.	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan (BPSPP)	DRK (Lokasi)	%
1.	BPSPP Wilayah I Kelas A (Wilayah Semarang)	18	20,93
2.	BPSPP Wilayah II Kelas B (Wilayah Pati)	16	18,60
3.	BPSPP Wilayah III Kelas A (Wilayah Surakarta)	9	10,47
4.	BPSPP Wilayah IV Kelas A (Wilayah Magelang)	14	16,28
5.	BPSPP Wilayah V Kelas B (Wilayah Banyumas)	4	4,65
6.	BPSPP Wilayah VI Kelas A (Wilayah Pekalongan)	25	29,07
Jumlah		**86**	**100%**

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

d) Kendaraan Laik Jalan

Untuk meningkatkan keselamatan transportasi diperlukan peningkatan jumlah kendaraan yang laik jalan. Uji laik jalan merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Adapun kewenangan Pemerintah Provinsi pada pelaksanaan pembinaan kepada Kabupaten/Kota. Semakin banyak Kendaraan

Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji sebagai salah satu indikator penting terwujudnya keselamatan di jalan.

Tabel 2.84.
Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2022

No.	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	KBWU Yang Diuji	KBWU Yang Lulus Uji	KBWU Yang Tidak Lulus Uji
1.	Kota Semarang	65.138	65.138	0
2.	Kab. Semarang	16.360	16.101	269
3.	Kota Salatiga	5.649	4.929	720
4.	Kab. Demak	11.403	10.861	544
5.	Kab. Grobogan	10.082	10.082	0
6.	Kab. Kendal	8.133	8.038	95
7.	Kab. Batang	7.520	7.474	45
8.	Kab. Pekalongan	6.106	6.048	75
9.	Kota Pekalongan	7.019	6.963	53
10.	Kota Tegal	6.421	6.421	87
11.	Kab. Tegal	18.131	17.876	255
12.	Kab. Pemalang	11.889	11.554	0
13.	Kab. Brebes (Pagojengan)	4.002	3.996	6
14.	Kab. Brebes (Kluwut)	12.736	12.732	4
15.	kab. Boyolali	7.514	7.223	291
16.	Kota Surakarta	23.549	23.534	15
17.	Kab. Sukoharjo	12.864	12.549	315
18.	Kab. Wonogiri	12.082	12.014	68
19.	Kab. Klaten	15.015	14.209	811
20.	Kab. Sragen	12.136	12.122	14
21.	Kab. Karanganyar	13.785	13.738	44
22.	Kab. Kudus	9.730	9.715	15
23.	Kab. Pati	9.599	9.555	44
24.	Kab. Rembang	8.663	8.494	169
25.	Kab. Blora	3.392	3.392	0
26.	Kab. Jepara	16.111	15.528	583
27.	Kota Magelang	7.244	6.449	795
28.	Kab. Magelang	19.156	19.156	0
29.	Kab. Kebumen	8.060	8.060	0
30.	Kab. Purworejo	5.554	5.267	287
31.	Kab. Temanggung	8.266	8.085	181
32.	Kab. Wonosobo	11.098	10.286	812
33.	Kab. Banyumas	13.886	11.606	2.267
34.	Kab. Cilacap (Majenang)	1.045	1.045	0
35.	Kab. Cilacap	11.951	11.776	175
36.	Kab. Purbalingga	12.455	11.933	522
37.	Kab. Banjarnegara	12.914	12.914	0
Jumlah		**446.658**	**436.863**	**9.561**

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

e) Ramp Check di Terminal Tipe B Jawa Tengah

Ramp check bertujuan untuk meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan. Sesuai dengan kewenangannya pelaksanaan *ramp check* dilakukan pada 23 Terminal Tipe B. Selama tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan pada 37.564 kendaraan dengan hasil 28.559 kendaraan tidak

terdapat pelanggaran dan 9.005 kendaraan melakukan pelanggaran yang didominasi pelanggaran administrasi.

Tabel 2.85.

Pelaksanaan *Ramp Check* di Terminal Tipe B Jawa Tengah Tahun 2022

Uraian	Jumlah Kendaraan			Pelanggaran		
	Diperiksa	Tidak Melanggar	Melanggar	Adminis-trasi	Opera-sional	Teknis
Ramp Check di Terminal Tipe B	37.564	28.559	9.005	8.353	0	2.000

Sumber: Dinas Perhubungan Jawa Tengah, 2022

f) Perlintasan Jalur Kereta Api dengan Jalan

Di Jawa Tengah terdapat 1.369 titik perlintasan jalur kereta api dengan jalan, sebagian besar terdapat di jalan kewenangan kabupaten/kota sebesar 1.303 titik atau 95,18 persen dari total perlintasan. Kondisi perlintasan terdiri dari 109 perlintasan tidak sebidang (terdiri dari 24 *fly over* dan 85 *underpass*) dan 1.261 sebidang (326 berpalang pintu/dijaga dan 887 belum dilengkapi dengan palang pintu). Perlintasan sebidang yang terletak di perkotaan yang lalu lintasnya cukup tinggi berpotensi berkontribusi menyebabkan kemacetan. Perlintasan yang belum dilengkapi dengan palang pintu berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu-lintas.

Tabel 2.86.

Perlintasan Rel Kereta Api di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Status Jalan	Jumlah Perlintasan Dengan Rel Kereta Api		Perlintasan Tidak Sebidang				Perlintasan Sebidang			
				Fly Over		*Underpass*		Berpalang Pintu & Dijaga		Tidak Ada Palang Pintu	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1.	Nasional	39	2,85	10	41,67	6	7,06	22	5,91	1	0,11
2.	Provinsi	27	1,97	1	4,17	1	1,18	24	6,45	1	0,11
3.	Kab/Kota	1.303	95,18	13	54,16	78	91,76	326	87,63	887	99,78
Jumlah		**1.369**	**100**	**24**	**100**	**85**	**100**	**372**	**100**	**889**	**100**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Khusus untuk jalan yang merupakan kewenangan provinsi, terdapat 27 titik perlintasan dengan jalur rel kereta api yang terdiri dari 25 titik perlintasan sebidang dan 2 titik tidak sebidang yang tersebar di 13 kabupaten/kota yang meliputi 4 Daerah Operasi (DAOP) PT. KAI. Beberapa titik sudah mendesak memerlukan penanganan dengan perlintasan tidak sebidang karena telah menyebabkan kemacetan utamanya pada Kabupaten Grobogan dan Cilacap.

Tabel 2.87.

Perlintasan Rel Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi Tahun 2022

No	Jalan / Daerah	JPL	KM	Kab / Kota	Kelengkapan
	Perlintasan Sebidang				
	DAOP 3 Cirebon				
1.	Ketanggungan - Kersana - Bantarsari	263	264+138	Kab. Brebes	Berpalang Pintu
	DAOP 4 Semarang				
2.	Wiradesa - Kajen	115	94+425	Kab. Pekalongan	Berpalang Pintu
3.	Tegowanu - Tanggung - Kapung	33	23+025	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
4.	Gubug - Kapung - Kedungjati / Bts Kab. Semarang	39	30+840	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu

No	Jalan / Daerah	JPL	KM	Kab / Kota	Kelengkapan
5.	Gubug - Kapung - Kedungjati / Bts Kab. Semarang	27	33+832	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
6.	Purwodadi - Geyer / Bts Kab. Semarang	81	58+880	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
7.	Purwodadi - Geyer / Bts Kab. Semarang	6	006+833	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
8.	Singget / Bts Kab. Grobogan - Doplang - Cepu	99	65+202	Kab. Blora	Berpalang Pintu
9.	Wirosari - Sulursari - Singget / Bts Kab.Blora	72	42+634	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
10.	Kuwu - Galeh / Bts Kab. Sragen	54	32+897	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
	DAOP 5 Purwokerto				
11.	Buntu - Kroya - Slarang	409	402+292	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu
12.	Menganti - Kesugihan	2	387+325	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu
13.	Menganti - Kesugihan	464	387+966	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu
14.	Sidareja - Cukangleuleus	441	339+819	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu
15.	Sidareja - Cukangleuleus	446	346+950	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu
16.	Sidareja - Cukangleuleus	446 H	353+612	Kab. Cilacap	Tidak Ada Pintu
17.	Kutoarjo - Ketawang	610	479+174	Kab. Purworejo	Berpalang Pintu
	DAOP 6 Yogyakarta				
18.	Gemolong / Bts Kab. Grobogan	123	80+144	Kab. Sragen	Berpalang Pintu
19.	Gemolong / Bts Kab. Grobogan	138	84+703	Kab. Sragen	Berpalang Pintu
20.	Gemolong - Andong / Bts Kab. Boyolali	146	89+038	Kab. Sragen	Berpalang Pintu
21.	Sragen - Batujamus/ Bts. Karanganyar	72	233+038	Kab. Sragen	Berpalang Pintu
22.	Karangwuni / Bts.Prov. Diy	251	130+530	Kab. Klaten	Berpalang Pintu
23.	Lingkar Timur Sukoharjo	19	14+990	Kab. Sukoharjo	Berpalang Pintu
24.	Lingkar Timur Sukoharjo	9	10+185	Kab. Sukoharjo	Berpalang Pintu
25.	Palur - Karanganyar	108	256+761	Kab.Karanganyar	Berpalang Pintu
	Perlintasan Tidak Sebidang				
1.	Jl. A. Yani (Surakarta)	-	-	Kota Surakarta	*Underpass*
2.	Semarang – Godong	15&17	13+257	Kab. Demak	*Fly Over*

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

g) Fasilitas Penyeberangan Sungai

Sebagai dukungan pencapaian terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diperlukan peningkatan kondisi dan kinerja angkutan penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi (yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi). Pada tahun 2020 telah dilakukan identifikasi aktivitas penyeberangan sungai di Jawa Tengah, dimana setidaknya terdapat 5 aktivitas penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota. Sehingga setidaknya diperlukan 10 sisi dermaga (plengsengan) untuk meningkatkan keselamatan aktivitas penyeberangan sungai di Jawa Tengah. Pada tahun 2021 sudah ditetapkan trayek lintas penyeberangan dan fasilitasi proses perijinannya.

Sesuai dengan Sasaran Strategis (Utama) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Terwujudnya Konektivitas Nasional dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Rasio Konektivitas Transportasi Nasional, kondisi Rasio Konektivitas Transportasi Laut (Penyeberangan Sungai) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dengan nilai 0,24.

Tabel 2.88.
Aktivitas dan Kondisi Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Aktivitas Lintas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Sisi Dermaga	Fasilitas Penyeberangan	
			Dermaga	Lampu Penerangan
1.	Sungai Kalikutho	Desa Lutungmati (Batang)	Non Permanen	Ada (2019)
	Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Tegalsari (Kendal)	Non Permanen	Ada (2018)
2.	Sungai Kalkutho	Desa Yosorejo (Batang)	Non Permanen	Ada (2021)
	Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Jatipurwo (Kendal)	Non Permanen	Ada (2021)
3.	Sungai Pemali	Desa Tegalwangi (Brebes)	Non Permanen	Ada (2022)
	Kab. Brebes – Kab. Tegal	Desa Bojong (Kab. Tegal)	Non Permanen	Ada (2022)
4.	Sungai Kaligangsa	Desa Randusangawetan (Brebes)	Non Permanen	Ada (2019)
	Kab. Brebes – Kota Tegal	Desa Kajongan (Kota Tegal)	Non Permanen	Sudah Ada
5.	Sungai Bengawan Solo	Desa Sangkrah (Kota Surakarta)	Non Permanen	Belum Ada
	Surakarta – Sukoharjo	Desa Gading (Sukoharjo)	Non Permanen	Belum Ada

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

3. Pelayanan Angkutan Umum

Kualitas pelayanan angkutan umum diukur melalui *On Time Performance* (OTP) dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Angkutan Umum. OTP Jawa Tengah (yang diukur pada angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan / Trans Jateng) Tahun 2022 sebesar 82,21, lebih tinggi dibandingkan dengan target OTP Nasional di Tahun 2022 sebesar 78,44. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Angkutan Umum Aglomerasi Perkotaan (Trans Jateng) mendasarkan survei Tahun 2022 mencapai 83,21, lebih rendah jika dibandingkan dengan target Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Angkutan Umum di tingkat Nasional Tahun 2022 sebesar 85,00.

Untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pencapaian Sasaran Utama Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 diperlukan upaya peningkatan kinerja komponen yang mempengaruhi OTP, diantaranya : peningkatan kualitas layanan angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) dan fasilitasi penyediaan angkutan umum pada saat lebaran, natal dan tahun baru.

a) Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan

Besaran bangkitan tarikan perjalanan yang membebani jalan di Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk mengetahui pergerakan perjalanan, dimana pergerakan internal didominasi ke pusat – pusat kegiatan seperti Kota Semarang dan Kota Surakarta. Pusat – pusat kegiatan tersebut belum dilayani angkutan umum yang menghubungkan antar wilayah perkotaan. Sehingga kebutuhan untuk pelayanan angkutan umum yang melayani antar wilayah perkotaan sudah menjadi suatu kebutuhan untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan raya.

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.49.
Distribusi Perjalanan Antar Wilayah Perkotaan Di Jawa Tengah

Untuk membantu mengatasi kemacetan pada ruas jalan utamanya pada wilayah perkotaan, diperlukan upaya untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Untuk itu, peningkatan layanan angkutan umum penumpang di perkotaan perlu ditingkatkan kenyamanan, kehandalan serta keamanannya. Salah satu upaya yang ditempuh dengan pengembangan transportasi perkotaan pada wilayah aglomerasi.

Angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan di Jawa Tengah dilayani oleh Trans Jateng. Kondisi sampai dengan tahun 2022 telah terdapat pelayanan di 6 (enam) koridor, yaitu Terminal Bawen Kabupaten Semarang – Stasiun Tawang Kota Semarang, Terminal Bulupitu Purwokerto – Terminal Bukateja Purbalingga, Terminal Mangkang Kota Semarang – RTH Weleri Kabupaten Kendal, Terminal Tirtonadi Surakarta – Sumber Lawang Kabupaten Sragen via Sangiran, Stasiun Kutoarjo Purworejo – Terminal Borobudur Kabupaten Magelang dan Terminal Penggaron Kota Semarang - Terminal Gubug Kabupaten Grobogan Via Godong. Pada 22 Agustus 2022 telah diresmikan perpanjangan Trans Jateng Koridor Kota Semarang - Kendal dari semula Terminal Mangkang hanya sampai Terminal Bahurekso diperpanjang sampai RTH Weleri. Hal ini mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kendal. Sehingga dari kebutuhan jumah koridor angkutan aglomerasi sejumlah 14 koridor, pada tahun 2022 masih terdapat kekurangan 8 (delapan) koridor.

Tabel 2.89.
Kebutuhan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan di Jawa Tengah

No.	Wilayah Aglomerasi	Jaringan Trayek
1	KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga, Grobogan)	1. Semarang – Bawen (Op. 7 Juli 2017)
		2. Semarang – Kendal (Op. 28 Oktober 2019)
		3. Semarang – Demak
		4. Semarang – Purwodadi (Op.13 Oktober 2021)
2	SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo,	5. Boyolali – Surakarta
		6. Surakarta – Sragen (Op. 3 September 2020)

No.	Wilayah Aglomerasi	Jaringan Trayek
	Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten)	7. Surakarta – Karanganyar
		8. Surakarta – Wonogiri
		9. Sukoharjo – Klaten
3	BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen)	10. Purwokerto – Purbalingga (Op. 13 Agus. 2018)
		11. Purwokerto – Wangon
4	PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung	12. Terminal Secang – Muntilan (via Borobudur)
		13. Terminal Secang – Terminal Parakan
		14. St. Kutoarjo – Borobudur (Op. 1 Sep. 2020)

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Adanya angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan yang dilayani Trans Jateng memiliki kontribusi riil terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mendukung peningkatan pengguna moda transportasi umum di perkotaan (target tahun 2030 mencapai 32 persen). Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 Trans Jateng telah melayani total 18.768.235 orang, dengan jumlah penumpang setiap tahun terus mengalami kenaikan dari 724.320 orang di tahun 2017 menjadi 6.506.462 orang di tahun 2022.

Tabel 2.90.
Perkembangan Jumlah Penumpang Moda Transportasi Umum di Perkotaan yang Dilayani Trans Jateng Tahun 2018 – 2022

No	Wilayah Pengembangan / Koridor Trans Jateng	Jumlah Penumpang yang Dilayani (Orang)					
		2018	2019	2020	2021	2022	Total 2018-2022
	Kedungsepur						
1.	Terminal Bawen – Stas. Tawang (Juli 2017)	1.886.694	2.117.390	1.051.768	1.136.921	1.686.921	7.882.017
2.	Terminal Mangkang – T. Bahurekso (Nov. 2019). Diperpanjang ke RTH Weleri (Agustus 2022)	-	178.943	592.411	682.477	1.235.294	2.689.125
3.	Terminal Penggaron - T. Gubug Via Godong (Okt.2021)	-	-	-	133.380	774.188	907.568
	Barlingmascakeb						
4.	Purwokerto – Purbalingga (Agustus 2018)	351.896	1.141.126	613.804	673.120	1.261.351	4.041.297
	Subosukowonosraten						
5.	Tirtonadi – Sumberlawang via Sangiran (Sept. 2020)	-	-	55.442	327.786	676.153	1.059.381
	Purwomanggung						
6.	Kutoarjo – Borobudur (September 2020)	-	-	106.124	485.848	872.555	1.464.527
	Total 6 Koridor	**2.238.590**	**3.437.459**	**2.421.872**	**3.439.532**	**6.506.462**	**18.043.915**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pada tahun 2021, mulai dilakukan survey perhitungan jumlah perpindahan kendaraan pribadi ke moda angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) untuk mengetahui kontribusi Trans Jateng dalam meningatkan jumlah pengguna angkutan umum perkotaan. Hal ini untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi Jateng dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) pada indikator pengguna moda transportasi umum di perkotaan.

Selain itu angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan Trans Jateng memiliki kontribusi untuk mendorong perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Sebagaimana hasil survey Kepuasan Masyarakat terdapat perpindahan moda sebesar 46,39% pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar 48,16%.

Tabel 2.91.
Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Pelayanan Trans Jateng Tahun 2021 – 2022

No.	Koridor	Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng (%)	
		2021	2022
1.	Semarang-Bawen	43,79	46,06
2.	Purwokerto-Purbalingga	59,05	52,81
3.	Semarang-Kendal	36,94	41,21
4.	Kutoarjo-Borobudur	43,22	47,84
5.	Solo-Sangiran Via Sumberlawang	49,28	48,16
6.	Semarang-Gubug Via Godong	-	56,15
Persentase Total Perpindahan Kendaraan Pribadi ke Trans Jateng		**46,39**	**48,16**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat (Perpres No. 79 Tahun 2019 dan Perpres No. 109 Tahun 2020) terkait pembangunan kawasan industri di Brebes dan Batang diperlukan kajian kelayakan kebutuhan angkutan umum untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas kawasan industri.

Layanan Trans Jateng berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. PAD yang dihasilkan dari tiket yang dibayarkan oleh penumpang Trans Jateng dan iklan mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun (diluar masa pandemi 2020 – 2021) seiring dengan peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan Trans Jateng. Data secara lengkap sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.92.
Rekapitualasi Perbandingan Pendapatan dan Biaya Operasional Layanan Trans Jateng Tahun 2017-2022

Tahun	Total Operasional (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Proporsi Pendapatan dan Biaya Operasional (%)	Jumlah Penumpang Terlayani (orang)	Proporsi Biaya Operasional Per Penumpang Terlayani (Rp/penumpang)
1	2	3	4 = (3 : 2) x 100 %	5	6 = 3 : 5
2017	9.448.667.000	1.958.450.000	20,727	724.320	13.045
2018	28.000.000.000	6.621.215.000	23,647	2.238.590	12.508
2019	45.904.608.000	11.668.972.500	25,420	3.437.459	13.354
2020	64.111.322.000	8.722.194.000	13,605	2.419.549	26.497
2021	90.982.851.000	12.549.852.000	13,794	3.439.532	26.452
2022	93.761.160.000	22.405.562.336	23,685	6.506.462	14.410
Total	332.208.608.000	63.926.245.836	19,183	18.765.912	17.703

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Proporsi biaya operasional penumpang terlayani menunjukkan tingkat efektifitas anggaran, semakin kecil proporsi semakin tinggi efektifitas anggaran yang dikeluarkan. Mendasarkan tabel diatas kinerja pelayanan Trans Jateng sudah hampir kembali ke tahun sebelum adanya pandemi (capaian 2022 lebih tinggi dibandingkan capaian 2019).

Manfaat layanan Trans Jateng yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah berkurangnya biaya transportasi, berdasarkan beberapa kajian yang dilaksanakan pada tahun 2022 rata-rata penghematan biaya perjalanan untuk masyarakat katagori umum dan non umum total sebesar Rp. 36.763.473.450,- Penghematan sebesar dimaksud digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain sehingga dapat mendukung peningkatan kesejaterahan.

Bagi pemerintah terdapat penghematan anggaran yang dikeluarkan pada pembelian bahan bakar yang bersubsidi berdasarkan kajian yang dimaksud pada tahun 2022 sebesar Rp.12.825.370.659,-. Penghematan konsumsi bahan bakar selain bermanfaat untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang lain.

Dengan beralihnya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum *(mode shifting)* dapat mengatasi kemacetan lalu lintas, meningkatkan keselamatan dan menghemat biaya peningkatan kapasitas infrastruktur jalan. Mendasarkan kajian tahun 2022 rata-rata *mode shifting* sebesar 46,85% atau sejumlah 3.025.427 penumpang yang berpindah moda.

Adapun selengkapnya rekapitulasi hasil kajian pengukuran kemanfaatan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaaan (Trans Jateng) di 6 koridor, sebagai berikut :

Tabel 2.93.
Rekapitualasi Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022

No.	Koridor	Moda Shifting (%)	Penghematan Biaya Perjalanan (Rp/Tahun)	Penghematan Subsidi BBM (Rp/Tahun)
1.	Semarang-Bawen **	Spd Motor : 46,67 % (787.286 Pnp)	9.777.310.419	3.409.932.620
2.	Purwokerto-Purbalingga ***	Spd Motor : 53 % (668.516 Pnp)	6.917.730.328	2.702.476.051
3.	Semarang-Kendal *	Spd Motor : 34 % (420.000 Pnp)	6.889.393.581	1.564.447.351
4.	Kutoarjo-Borobudur ***	Spd Motor : 53 % (462.454 Pnp)	5.023.324.483	2.225.560.597
5.	Solo-Sangiran Via Sumberlawang **	Spd Motor : 46,67 % (315.561 Pnp)	3.747.843.949	1.063.044.788
6.	Semarang-Gubug Via Godong *	Spd Motor : 48 % (371.610 Pnp)	4.407.870.689	1.859.909.251
Total Jawa Tengah		**3.025.427 pnp**	36.763.473.450	12.825.370.659

Sumber:
** : Laporan Riset Unggulan Daerah (RUD) Jawa Tengah : Analisa Biaya Perjalanan Penggunan Bus Trans Jateng dalam Mengurangi Biaya Pengeluaran Pengguna, Bappeda Provinis Jawa Tengah 2022*
*** : Laporan Akhir Penelitian Efektifitas dan Kontribusi Layanan Transportasi Trans Jateng Terhadap Tingkat Kemacetan dan Lingkungan Hidup di Jawa Tengah, 2022*
**** : Studi tingkat kemanfaatan layanan Trans Jateng Dishub Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Adapun manfaat layanan Trans Jateng yang dapat dikapitasikan dibandingkan dengan biaya atau anggaran yang dikeluarkan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 2.94.
Rekapitualasi Perbandingan Anggaran Operasional dan Perhitungan Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022

Total Biaya Operasional Trans Jateng (Rp.)	Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022				Proporsi Anggaran dan Manfaat (%)
	Pendapatan Asli Daerah/PAD (Rp.)	Penghematan Biaya Perjalanan (Rp.)	Penghematan Subsidi BBM (Rp.)	Total Nilai Manfaat (Rp)	
93.761.160.000	22.405.562.336	36.763.473.450	12.825.370.659	71.994.406.445	76,78

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Beberapa nilai manfaat layanan angkutan agloerasi perkotaan (Trans Jateng) yang lain diantaranya : penurunan kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas, peningkatan kualitas udara, peningkatan keselamatan lalu lintas dan pengendalian inflasi.

b) Angkutan pada Masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Angkutan pada masa lebaran, natal dan tahun baru merupakan penyelenggaraan / pengelolaan angkutan (disemua moda transportasi) pada masa lalu lintas tinggi pada waktu tertentu (*peak season*). Penyelenggaran ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang bertujuan untuk menciptakan kelancaran lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, dan terkendali. Pada Tahun 2022 pengguna angkutan umum sebanyak 15.477.634 orang pada masa lebaran dan 9.986.033 orang pada masa nataru. Hal ini mengalami lonjakan pada tahun sebelumnya dikarenkan sudah tidak diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Tabel 2.95.
Jumlah Penumpang (Orang) Pada Masa Angkutan Lebaran dan Nataru

No	Jumlah Penumpang	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Lebaran**	**15.551.741**	**16.329.328**	**NA**	**7.851.683**	**24.343.824**
a.	Angkutan Umum	7.790.299	8.179.814	NA	5.295.715	15.477.634
b.	Pribadi	7.761.442	8.149.514	NA	2.555.968	8.866.190
2.	**Nataru**	**10.936.166**	**11.482.975**	**NA**	**15.653.528**	**16.978.216**
a.	Angkutan Umum	3.486.134	3.660.441	NA	11.446.488	9.986.033
b.	Pribadi	7.450.032	7.822.534	NA	4.207.039	6.992.183
Total		**26.487.907**	**27.812.303**	**NA**	**23.505.211**	**41.322.039**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan dimasa lebaran, natal dan tahun baru lebih banyak yang menggunakan angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Namun, hal ini masih tetap diperlukan peningkatan layanan angkutan umum untuk mengatasi permasalahan yang terkait kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Untuk tahun 2020 tidak ada pendataan pergerakan penumpang pada masa angkutan lebaran, natal dan tahun baru dikarenakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pelaksanaan Posko Angkutan dilakukan untuk penyekatan/pembatasan pergerakan).

c) Angkutan Umum *Online*

Mendasarkan Permen Perhubungan No. PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen Perhubungan No. PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi, mengatur penerbitan ijin operasi angkutan sewa khusus/daring (*online*). Pada Tahun 2022 telah diterbitkan 30 Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO).

Tabel 2.96.
Penerbitan Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO) Untuk Angkutan Sewa Khusus/Daring (*Online*) Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kedungsepur	77	1.196	405	2	16
2.	Bregasmalang	-	47	28	-	-
3.	Barlingmascakeb	12	180	219	-	-
4.	Subosukowonosraten	-	721	115	2	8
5.	Purwomanggung	-	76	235	-	-
6.	Petanglong	-	17	26	-	6
7.	Banglor	-	-	-	-	-
8.	Wanarakuti	-	23	2	-	-
JUMLAH		**89**	**2.237**	**1.030**	**4**	**30**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

2.3.15 Pertambangan

Potensi mineral dan batuan di Jawa Tengah tersebar di 35 kabupaten/kota yang menjadi komoditas utama sebagai bahan konstruksi pembangunan, baik untuk proyek infrastruktur Jawa Tengah maupun Proyek Strategis Nasional yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Perkiraan kebutuhan material untuk Proyek PSN di Jawa Tengah adalah sebesar ± 113 Juta m^3. Akan tetapi Jawa Tengah hanya mampu memenuhi ± 31 Juta m3. Potensi mineral dan batuan harus dipetakan dengan detail berdasarkan depositnya sehingga diharapkan penambangan yang dilakukan tidak berdampak besar pada kerusakan lingkungan hidup.

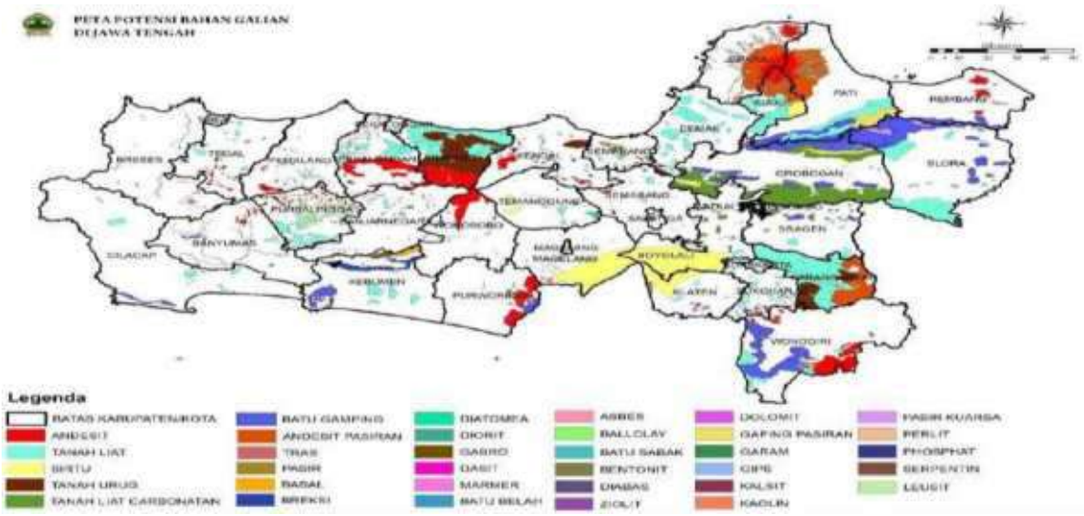

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.50.
Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah

Tantangan yang di hadapi Provinsi Jawa Tengah terkait urusan pertambangan adalah pertambangan ilegal yang keberadaanya hilang dan timbul. Hilang setelah dilakukan penertiban tetapi muncul lagi di kemudian hari. Aktivitas illegal mining di Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan perkembangan yang fluktuatif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan melalui penegakan hukum agar fungsi dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Berikut kondisi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018-2022.

Tabel 2.97.
Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas PETI (ha)	489.55	133	128	85,98	278,97
Sidak PETI (obyek)	169	114	107	89	160
Proses Hukum (kasus)	11	9	8	23	23
Lokasi di Kab/Kota	29	28	26	24	24

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2022

Karakter pertambangan tanpa izin bersifat sporadik sehingga luas areanya tidak bisa ditetapkan secara pasti. Pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar peraturan sektor mineral dan batubara. tetapi dapat diduga melanggar sektor lain seperti lingkungan dan tata ruang sehingga penertiban dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang di sektor tersebut, baik instansi provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim Satgas Puser Bumi yang terdiri dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangani penambangan liar. Penertiban pertambangan tanpa izin selain dengan cara penegakan hukum tetapi juga diarahkan pada pemenuhan aspek legalitas sehingga dapat dilakukan penindakan dan pengendalian yang didukung dengan Sistem Pelaporan Usaha Pertambangan (SILUP).

Aktivitas pertambangan sering bersinggungan dengan masalah lingkungan, sehingga perlu dorongan untuk melaksanakan kaidah penambangan yang baik. Kaidah penambangan yang baik artinya penambangan yang menaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai dengan berlandaskan pada efektifitas dan efesiensi, melaksanakan konservasi, memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta ikut serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kaidah penambangan yang baik dapat diukur melalui persentasi Good Mining Practice. Di Jawa Tengah selama kurun waktu 2018 hingga 2022 persentase *Good Mining Practice* mengalami peningkatan dari 54,82 persen tahun 2018 menjadi 89,00 persen tahun 2022. Provinsi Jawa Tengah telah meningkatkan kualitas pengelolaan pertambangan yang berdampak terhadap pengelolaan lingkungan hidup sekitar yang lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.98.
Perkembangan *Good Mining Practice* (GMP) di Jawa Tengah
Tahun 2016 - 2021

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Total Pemegang IUP	425	360	355	355	309
Jumlah Pemegang IUP yang melaksanakan GMP	233	306	302	306	275
Persentase *Good Mining Practice* (%)	54,82	85,00	85,07	86,20	89,00

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021

Kedepan penilaian *Good Mining Practice* periode 2024 sampai dengan 2026 menggunakan penilaian baru yang lebih detail, yaitu terkait 5 aspek kewajiban diantaranya:

- Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan (K3 Pertambangan)
- Keselamatan Operasi Pertambangan (KO Pertambangan)
- Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pasca tambang
- Upaya konservasi sumberdaya mineral dan batubara
- Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan baik cair, padat, gas, sampai memenuhi baku mutu lingkungan

5 aspek kwajiban kemudian dijabarkan menjadi 15 poin kriteria sebagai berikut :

- Kepala Teknik Tambang
- Tanda Batas WIUP
- Statistik kecelakaan tambang
- Laporan Kegiatan
- Kelengkapan sarana pendukung
- Tenaga teknis
- Pembayaran pajak mineral

- Teknik pertambangan
- Pengolahan lanjutan
- Konservasi bahan tambang
- Keselamatan operasional pertambangan
- Keselamatan dan kesehatan kerja
- Pengelolaan lingkungan hidup
- Program pemberdayaan masyarakat/CSR
- Reklamasi dan pascatambang

2.3.16 Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Desa

Pembangunan di desa dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, dan PDTT dengan gambaran sebagai berikut.

dari data tersebut, pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi status desa sangat tertinggal. Desa dengan status tertinggal berkurang dari 266 pada tahun 2020 menjadi 147 di tahun 2021. Di Tahun 2021 status desa mandiri mengalami peningkatan dari 140 di tahun 2020 menjadi 199 pada tahun 2021. Selanjutnya salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Tengah adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa meliputi BUMDes, Pasar Desa, UP2K-PKK dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.

Tabel 2.99.
Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah lanjut usia terlantar Tahun 2018-2022

No	Jenis Lembaga Ekonomi Desa	Jumlah (unit) s.d. Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BUMDesa	2.511	4.215	5.539	6.776	n/a
2	Pasar desa	1.369	1.349	1.671	1.671	n/a
3	UED-SP	1.029	1.029	1.029	1.029	n/a
3	UP2K-PKK	22.326	22.326	22.326	22.326	n/a

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2017-2021 perkembangan lembaga ekonomi masyarakat khususnya BUMDesa meningkat signifikan dari 2.230 unit di tahun 2017 menjadi 6.776 unit di tahun 2021. Untuk melihat perkembangan BUMDes berdasarkan Klasifikasi pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100.
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah
Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2021

NO	KABUPATEN	JML DS	PENILAIAN BUMDES 2021					KETERANGAN		
			DASAR	TUMBUH	BERKEMBANG	MAJU	JUMLAH	*2021 BARU*	*% progress input*	*pertumbuhan BUMDES 2020-2021*
1	Banjarnegara	266	103	67	1	-	171	-	100	0,00%
2	Banyumas	301	120	153	23	3	299	30	100	10,03%
3	Batang	239	132	68	7	1	208	86	100	41,35%
4	Blora	271	131	101	10	3	245	40	100	16,33%
5	Boyolali	261	84	96	16	4	200	66	100	33,00%
6	Brebes	292	116	161	14	1	292	10	100	3,42%
7	Cilacap	269	59	179	27	4	269	18	100	6,69%
8	Demak	243	111	67	7	-	185	69	100	37,30%
9	Grobogan	273	163	99	7	4	273	11	100	4,03%
10	Jepara	184	81	93	10	-	184	-	100	0,00%
11	Karanganyar	162	80	65	8	1	154	37	100	24,03%
12	Kebumen	449	78	275	44	5	402	13	100	3,23%
13	Kendal	266	124	91	6	1	222	75	100	33,78%
14	Klaten	391	157	177	34	12	380	49	100	12,89%
15	Kudus	123	41	3	1	-	45	13	100	28,89%
16	Magelang	367	137	167	23	6	333	144	100	43,24%
17	Pati	401	222	172	5	2	401	-	100	0,00%
18	Pekalongan	272	91	85	8	7	191	56	100	29,32%
19	Pemalang	211	106	93	9	3	211	-	100	0,00%
20	Purbalingga	224	98	75	25	4	202	49	100	24,26%
21	Purworejo	469	152	240	20	5	417	43	100	10,31%
22	Rembang	287	144	69	8	5	226	90	100	39,82%
23	Semarang	208	51	107	15	1	174	44	100	25,29%
24	Sragen	196	110	80	1	1	192	4	100	2,08%
25	Sukoharjo	150	45	77	3	-	125	55	100	44,00%
26	Tegal	281	63	97	18	4	182	83	100	45,60%
27	Temanggung	266	43	150	11	1	205	-	100	0,00%
28	Wonogiri	251	97	122	6	-	225	80	100	35,56%
29	Wonosobo	236	114	44	3	2	163	72	100	44,17%
	JUMLAH	**7.809**	3.053	3.273	370	80	**6.776**	**1.237**	100	**0,18355608**

Berdasarkan data Penilaian Klasifikasi BUMDesa, dari 7.809 Desa di Jawa Tengah di tahun 2021 BUMDesa dengan kategori Maju sejumlah 80 unit (1,02 persen) dan kategori berkembang 370 unit (4,73 persen), sedangkan BUMDesa dengan kategori Tumbuh sejumlah 3.273 unit (41,91 persen) dan kategori dasar sejumlah 3.053 unit (39,09 persen). Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum

melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang.

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan Berdasarkan data Penilaian Klasifikasi BUMDesa, dari 7.809 Desa di Jawa Tengah di tahun 2021 BUMDesa dengan kategori Maju sejumlah 80 unit (1,02 persen) dan kategori berkembang 370 unit (4,73 persen), sedangkan BUMDesa dengan kategori Tumbuh sejumlah 3.273 unit (41,91 persen) dan kategori dasar sejumlah 3.053 unit (39,09 persen). Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang.

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan

Gambar 2.51.
Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Walaupun dari sisi kuantitas meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain 1) Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi pembangunan kawasan perdesaan; 2) Belum sinerginya pembangunan kawasan perdesaan baik di Provinsi maupun di Kabupaten; serta 3) Masih lemahnya komitmen pelaku dalam pembangunan.

2.4. Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia di Jawa Tengah dilakukan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Gambaran kinerja hasil pembangunan sumber daya manusia Jawa Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga), dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing didukung kinerja berbagai sektor antara lain pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Gambaran keseluruhan kondisi sumber daya manusia sebagaimana diuraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), direpresentasikan dalam 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kehidupan layak. Ketiga dimfensi tersebut diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai dimensi pendidikan, Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai dimensi kesehatan serta Pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai dimensi kehidupan layak. Perhitungan IPM menggunakan metode rata-rata geometric, artinya capaian satu komponen IPM tidak dapat digantikan oleh capaian komponen lainnya, sehingga ketiga dimensi IPM yang terdiri dari 4 komponen tersebut memiliki kepentingan yang setara. Capaian IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan selama kurun waktu 2018 hingga 2022, namun masih berada di bawah nasional.

Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.52.
IPM Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022

Perkembangan kinerja IPM sempat melambat di tahun 2020 disebabkan pandemi covid-19. Namun secara perlahan mulai bangkit di tahun 2021, bahkan tahun 2022 laju pertumbuhan semakin cepat sebesar 0,87 menyamai dengan saat sebelum terjadi pandemic covid-19. Faktor yang sangat mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan IPM di tahun 2020 adalah komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.53.
Pengeluaran/kapita/thn disesuaikan Jateng dan Nasional
Tahun 2018-2022

Namun, pada tahun 2022 percepatan pertumbuhan IPM bukan hanya dipengaruhi oleh komponen pengeluaran per kapita tetapi juga komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat partisipasi pendidikan di suatu wilayah, termasuk untuk mengetahui pemenuhan terhadap Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun. RLS Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 7,93, maknanya rata-rata penduduk Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal selama 7,93 tahun atau setara kelas VIII (SMP Kelas 2). Upaya untuk meningkatkan RLS, salah satunya dengan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Kinerja RLS Jawa Tengah masih di bawah nasional, namun laju pertumbuhan lebih baik dibandingkan nasional bahkan meningkat signifikan dari 0,78 pada tahun 2021 menjadi 2,32 pada tahun 2022. Peningkatan laju pertumbuhan tersebut mengindikasikan bahwa program-program penanganan ATS yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terutama intervensi melalui pendidikan non formal dan kesetaraan mulai menunjukkan hasil.

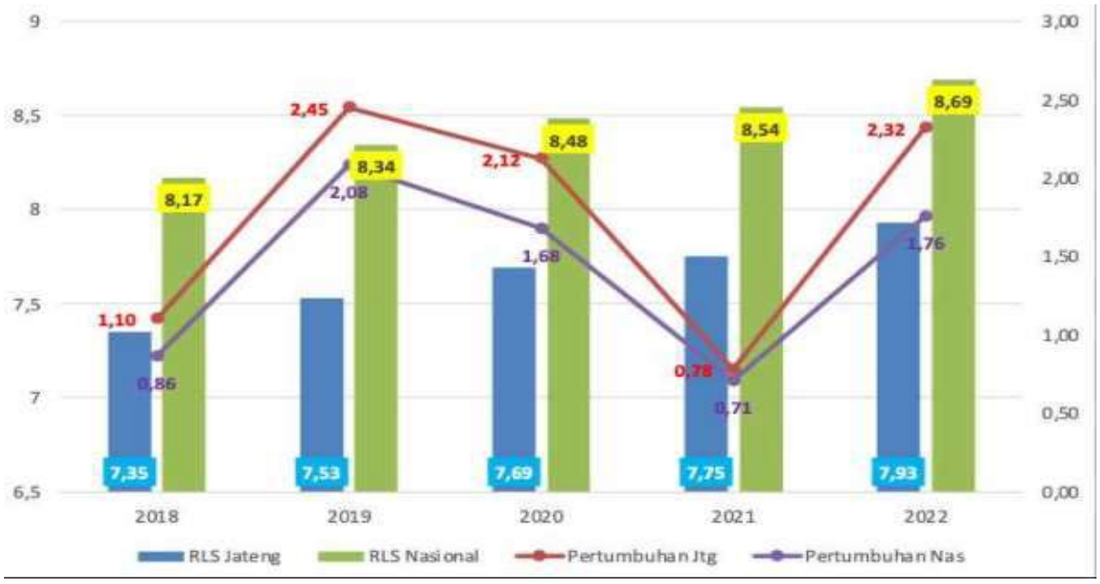

Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.54.
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022

Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan formal di berbagai jenjang antara lain direpresentasikan dalam penyediaan akses pemerataan dan mutu layanan pendidikan. HLS Jawa Tengah sebesar 12,81 pada tahun 2022 artinya bahwa peluang bagi penduduk usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal selama 12,81 tahun atau setara Diploma 1 (D1). Capaian HLS Jawa Tengah masih berada di bawah nasional, dan laju pertumbuhan cenderung melambat dari 0,55 menjadi 0,31 di tahun 2022. Pelambatan ini terjadi antara lain disebabkan peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan non formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), ditunjukkan dari jumlah peserta PKBM yang terus meningkat dari 93.408 siswa di tahun 2019 menjadi 124.646 siswa tahun 2021. Ke depan, nampaknya jalur pendidikan formal bukan satu-satunya pilihan untuk memperoleh akses layanan pendidikan tetapi terdapat juga jalur pendidikan non formal umum maupun keagamaan seperti PKBM dan pondok pesantren. Sehingga pendidikan non formal baik umum maupun keagamaan perlu ditingkatkan kualitasnya, meskipun secara kewenangan berada pada pemerintah kabupaten/kota dan pusat.

Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.55.
Harapan Lama Sekolah (HLS) Jateng dan Nasional Tahun 2018 - 2022

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Capaian UHH Jawa Tengah melampaui nasional, namun laju pertumbuhan Jateng melambat di tahun 2022 sebesar 0,13 dibandingkan nasional yang melesat menjadi 0,39 di tahun 2022.

Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.56.
Usia Harapan Hidup (UHH) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

2.4.2 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

Pembangunan keluarga sebagai unit terkecil dan pintu masuk bagi pembangunan SDM menghadapi kondisi yang perlu untuk terus mendapat perhatian. Berdasarkan capaian indek pembangunan keluarga (ibangga) tahun 2021 tercatat Jawa Tengah sebesar 56,1 menurun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 58. Jika dibangikan dengan provinsi tentangg ibangga Jawa Tengah berada diurutan kedua setelah DIY (57,41) dan lebih baik dari Jawa Timur, Banten dan Jabar.

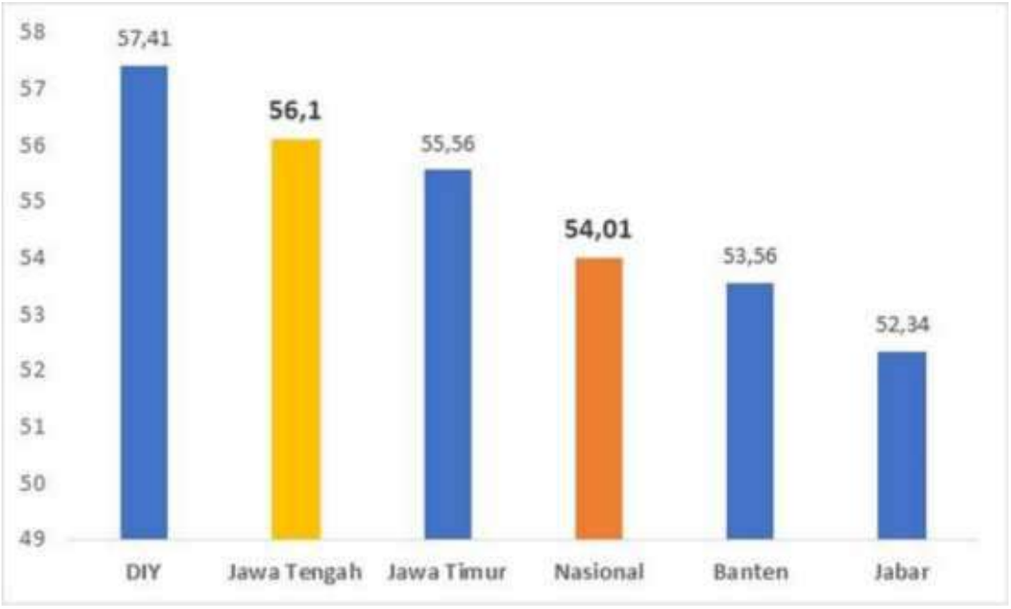

Sumber: BKKBN

Gambar 2.57.
Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Tetangga dan Nasional Tahun 2021

2.4.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Ketimpangan gender diukur dari indeks komposit bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

IPG Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2018-2022 berada di atas nasional dan menunjukkan tren kecenderungan yang terus meningkat. Tercatat hanya di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,06 poin dibanding tahun 2018, sementara periode 2020 hingga 2022 terus mengalami peningkatan yaitu dari 92,18 menjadi 92,83. Capaian ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan gender yang terus dilakukan di Jawa Tengah kian berdampak positif.

Tabel 2.101.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

No	Tahun	IPG Prov Jateng	IPG Nasional
1	2018	91,95	90,99
2	2019	91,89	91,07
3	2020	92,18	91,06
4	2021	92,48	91,27
5	2022	92,83	91,63

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan komponen pembentuk IPG tahun 2022, diketahui bahwa komponen Usia Harapan Hidup (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki. Sedangkan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, perempuan selalu tertinggal dibandingkan laki-laki. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian kedepan antara lain masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pengeluaran per kapita yang disesuaikan, kurangnya peran serta perempuan khususnya di bidang politik, serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 2022 UHH perempuan di Jawa Tengah telah mencapai 76,53 tahun, sementara laki-laki mencapai 72,71 tahun. Nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti, indikasi tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan. Di sisi yang lain, selisih UHH antara perempuan dan laki-laki di Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa kedepannya, fenomena female advantages tidak terjadi di Jawa Tengah. Sementara itu pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2022, HLS perempuan adalah 12,99 tahun dan laki-laki sebesar 12,72 tahun. Dengan nilai pencapaian yang relatif hampir sama, mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan dapat diwujudkan secara merata dalam waktu yang tidak lama.

Rata-rata lama sekolah Jawa Tengah tahun 2022 untuk laki-laki sekitar 1 tahun lebih lama dibandingkan perempuan yaitu laki laki adalah sekitar 8,31 tahun, sedangkan perempuan 7,35 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di atas 25 tahun bersekolah hanya sampai tingkat SMP kelas 1. Sedangkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar 10,098 juta rupiah per kapita per tahun, jauh di bawah laki-laki sebesar 15,606 juta rupiah per kapita per tahun. Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibanding lapangan usaha lainnya. Selain itu juga karena perempuan lebih banyak berada pada sektor usaha informal atau nonformal yang terkadang tidak tercatat resmi.

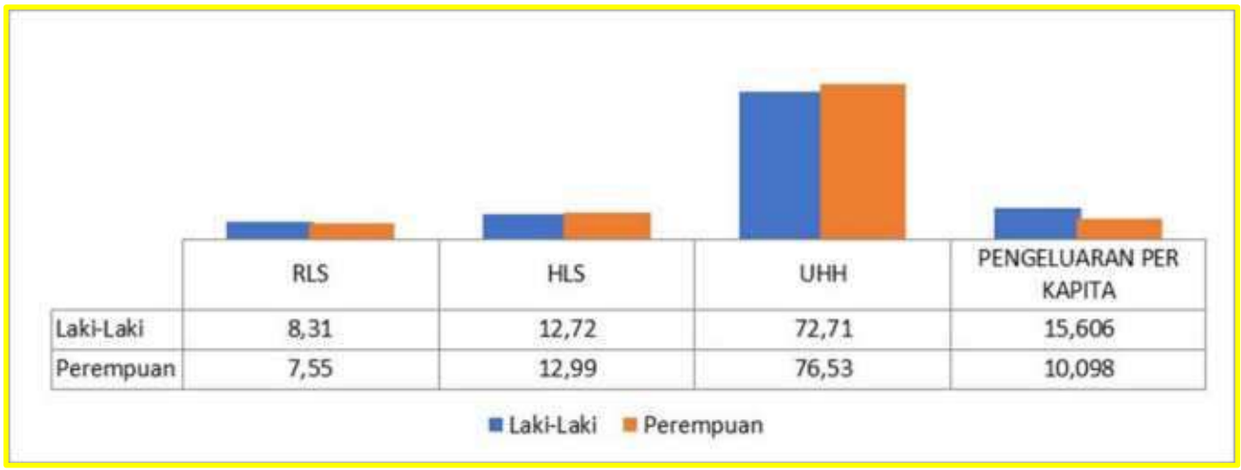

Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.58.
IPG Provinsi Jawa Tengah Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2022

Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Perkembangan IDG Jawa Tengah tahun 2018-2022 cenderung menurun dari 74,03 menjadi 73,78. Tahun 2021, IDG Jawa Tengah mengalami kondisi skor terendah selama periode 2018-2022. Tahun 2022, mengalami perbaikan menjadi sebesar 73,78 atau meningkat sebesar 2,14 point dibanding tahun 2021. Namun, capaian IDG tahun 2022 tersebut masih dibawah nasional yang sebesar 76,59. Kenaikan IDG Jawa Tengah tahun 2022 terutama terjadi karena kenaikan komponen persentase keterlibatan perempuan di parlemen dan persentase perempuan sebagai tenaga profesional.

Tabel 2.102.
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

No	Tahun	IDG Prov Jateng	IDG Nasional
1	2018	74,03	72,1
2	2019	72,18	75,24
3	2020	71,73	75,57
4	2021	71,64	76,26
5	2022	73,78	76,59

Sumber: BPS, 2023

Persentase keterlibatan perempuan di parlemen meningkat sebesar 1,67 persen dibanding tahun 2021 (18,33 persen) menjadi 20,00 persen di tahun 2022. Kenaikan ini lebih baik dari nasional yang justru mengalami penurunan dari 21,89 di tahun 2021 menjadi 21,74 di tahun 2022. Kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan global membutuhkan aksi nyata dalam upaya meraihnya. Perempuan selama ini memiliki capaian lebih rendah dibanding laki-laki serta mengalami berbagai diskriminasi sebagai dampak budaya patriarki. Isu kesetaraan dan keadilan gender diharapkan dapat digaungkan lebih tegas ketika perempuan mampu berpartisipasi dan menduduki jabatan yang strategis dalam parlemen.

Keterlibatan perempuan di lembaga eksekutif diharapkan mampu membawa peluang perubahan bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia. Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apakah keterwakilan perempuan di parlemen berpengaruh signifikan terhadap disahkannya peraturan-peraturan yang memperjuangkan kesetaraan gender, baik dilevel nasional maupun daerah.

Tabel 2.103.

Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022 (%)

No	Tahun	Prov Jateng	Nasional
1	2018	22	17,32
2	2019	19,17	20,52
3	2020	18,80	21,09
4	2021	18,33	21,89
5	2022	20,00	21,74

Sumber: BPS, 2023

Dilihat dari indikator komposit perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, dan teknisi di Provinsi Jawa Tengah, terjadi pergerakan yang terus meningkat dari 47,57 pada tahun 2018 sampai 50,72 pada tahun 2022. Kondisi tersebut berbeda dengan nasional yang justru mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 1,34% setelah konsisten mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2021.

Tabel 2.104.

Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi di Provinsi Jawa Tengah 2018-2022 (%)

No	Tahun	Prov Jateng	Nasional
1	2018	47,57	47,02
2	2019	49,36	47,46
3	2020	50,20	48,76
4	2021	50,67	49,99
5	2022	n/a	n/a

Sumber: BPS, 2022

Lonjakan atas indikator ini dipengaruhi oleh kualitas pendidikan perempuan. Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 48,83 persen perempuan di perkotaan telah mencapai pendidikan SMA ke atas, sementara di pedesaan baru mencapai 23,93 persen. Capaian ini telah merubah posisi perempuan penganggur menjadi bekerja, karyawan menjadi pekerja profesional. Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi merupakan indikator untuk menghitung kemampuan dalam pengambilan keputusan. Beberapa hal dapat memperkuat peningkatan indikator ini adalah meningkatnya jumlah PNS perempuan serta jumlah PNS yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Terdapat 31,13 persen perempuan yang telah mampu berada di eselon tiga dan dua.

Kesenjangan capaian antara laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja merupakan fenomena yang umum terjadi terutama di negara-negara berkembang. Perbedaan upah yang diterima menjadi salah satu hal yang paling sering terjadi.

Kesenjangan upah di beberapa sektor di negara-negara Asia bahkan mencapai 40 persen. Kesenjangan dalam upah pada akhirnya berimbas pada munculnya kesenjangan dalam sumbangan pendapatan.

Kesenjangan pendapatan yang diterima tidak terlepas dari perbedaan kualitas pendidikan. Tingkat pendidikan adalah karakteristik terpenting dalam menjelaskan fenomena ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan. Penurunan kesenjangan upah dalam beberapa dekade terakhir terjadi karena peningkatan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja perempuan.

Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan juga dipengaruhi oleh sektor pekerjaan. Menurut data KPPPA di sektor formal, laki-laki menempati porsi sebesar 65,78 persen dan perempuan 34,22 persen. Pada sektor informal laki-laki sebanyak 57,96 persen dan perempuan 42,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pekerja perempuan di sektor informal lebih banyak dibanding di sektor formal. Pekerja informal perempuan lebih banyak ditemukan dalam pekerjaan yang cukup riskan, seperti pekerja domestik serta pekerja rumahan atau pekerja keluarga.

Pekerja perempuan di sektor informal juga berpenghasilan lebih rendah. Banyak risiko yang terjadi dari kecenderungan perempuan untuk bekerja di sektor informal seperti bekerja tanpa proteksi sosial dan hukum, tidak mendapat dana pensiun, tidak mendapatkan cuti, dan tidak mendapatkan asuransi kesehatan. Perempuan yang bekerja di sektor informal juga mendapatkan upah yang relatif rendah serta rentan terhadap keadaan yang tidak aman seperti pelecehan seksual. Meskipun jumlah perempuan bekerja di sektor informal lebih tinggi di bandingkan sektor formal, namun hal lain yang menghambat adalah penghasilan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jenis usaha yang digeluti juga lebih ke arah pekerjaan domestik.

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Provinsi Jawa Tengah selama kuran waktu 2018-2022 mengalami fluktuatif pada kisaran angka 34 persen. Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 34,29 persen setelah tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen. Tahun 2021 sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja di Jawa Tengah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 34,60 persen dan tahun 2022 turun menjadi 34,59. Kondisi tersebut berbeda dengan nasional dimana dua tahun berturut turut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 turun 0,04 persen dan tahun 2022 turun 0,05 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.105.
Kondisi Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Nasional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (%)

No	Tahun	Prov Jateng	Nasional
1	2018	34,28	36,70
2	2019	34,31	37,10
3	2020	34,29	37,26
4	2021	34,60	37,22

Sumber: BPS, 2023

2.4.4 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kontribusi kebudayaan dalam pembangunan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Namun demikian, pembangunan kebudayaan di Jawa tengah menghadapi tantangan tersendiri, yaitu menurunnya nilai pembangunan kebudayaan yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dalam kurun waktu 2020-2021 sebagai dampak dari pandemi Cov-19. IPK dibentuk melalui 7 dimensi yang memiliki ruang lingkup cukup luas dan bersifat lintas sektor, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.106.
Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018 – 2022

Dimensi IPK	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi Budaya	37,67	44,45	37,17	25,96	44,00
Pendidikan	69,71	71,46	72,64	71,21	73,56
Ketahanan Sosial Budaya	79,57	80,30	80,97	72,37	74,02
Warisan Budaya	55,16	51,95	45,58	50,12	52,31
Ekspresi Budaya	44,70	45,45	43,69	34,79	41,59
Budaya Literasi	51,64	56,67	59,90	50,00	53,36
Gender	60,05	58,95	58,57	58,28	58,88
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah	**60,05**	**60,94**	**59,12**	**55,24**	**59,43**
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional	**53,74**	**55,91**	**54,65**	**51,9**	**55,13**

Sumber: Kemendikbud, 2022

Capaian IPK Jawa Tengah selama lima tahun terakhir konsisten lebih tinggi dari angka Nasional. Penurunan angka IPK Jawa Tengah selama 2020-2021 didorong oleh penurunan pada 3 dimensi pembentuknya, yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi ekspresi budaya dan dimensi gender.

Kecenderungan penurunan dimensi ekonomi budaya mengindikasikan bahwa minat masyarakat yang menurun untuk menjadikan aktivitas seni budaya sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan ekonomi mereka. Hal tersebut bisa saja terjadi karena “pasar budaya lokal” di Jawa Tengah belum memberikan reward yang menjanjikan untuk para pelaku seni budaya lokal. Selain itu, pengukuran ekonomi kreatif/industri ekonomi kreatif juga belum terukur dalam dimensi ini.

Penurunan dimensi ekspresi budaya menunjukkan indikasi bahwa ada kecenderungan peralihan cara masyarakat untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yaitu melalui media digital. Sementara itu, pengukuran dimensi ekspresi budaya (indikator) masih terbatas pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat, kegiatan organisasi, penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni, dan rumah tangga yang menyelenggarakan/menghadiri acara adat. Pada dimensi ekspresi budaya, penurunan angka didorong oleh menurunnya indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dan persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni.

Hal yang sama juga berlaku bagi dimensi gender. Menurunnya angka dimensi gender didorong oleh penurunan indikator rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki pada dua tahun terakhir (2020-2021). Kinerja dimensi gender selama 2021-2022 konsisten berada di bawah angka

Nasional. Salah satu indikator pembentuk dimensi gender yaitu rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki di Jawa Tengah pada tahun 2022 masih menunjukkan kecenderungan menurun.

Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan sebagai penggerak roda pembangunan berkelanjutan bukan merupakan hal yang baru. Unsur kebudayaan menjadi hal penting yang patut diperhatikan, saat arah pembangunan berkelanjutan saat ini tidak hanya bertumpu pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan semata.

Dengan segala karakteristik penduduknya, keanekaragaman budaya di Jawa Tengah merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, rancangan kebijakan yang berfokus kepada pengembangan dan pelestarian budaya, sekaligus sebagai *booster* untuk mendorong laju pembangunan perlu dilakukan. Isu-isu sosial budaya yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan mutlak diperlukan untuk peningkatan kualitas hidup manusia sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga perwujudan agenda SDGs (Goals 11.4 Mempromosikan dan Menjaga Warisan Budaya Dunia dan Warisan Alam Dunia) dapat dipetakan dengan baik.

Pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017). Upaya tersebut dilakukan untuk memajukan objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Data perkembangan OPK yang tersedia di Jawa Tengah dijelaskan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.107.
Perkembangan Warisan Budaya Benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022*
Warisan Budaya Benda (WBB)					
Museum	54	62	62	n/a	n/a
Cagar Budaya (CB)	397	527	273	n/a	n/a
Pengelolaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya**					
CB dikelola	93	93	93	65	65
CB dimanfaatkan	11	28	33	29	36
Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)					
Penetapan WBTB	9	9	14	n/a	n/a

Sumber: Statistik Kebudayaan Kemdikbud, Laporan Kinerja BPCB Jateng, 2019-2021
) data belum tersedia/ belum rilis* *) Publikasi Laporan Kinerja BPCB Jateng 2021*

Olahraga

Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Olahraga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya berbagai

penyakit. Ada tiga faktor yang berdampak pada partisipasi olahraga, yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor sosial budaya. Peran olahraga mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik yang baik. Selain bermanfaat untuk jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga memberikan kontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat.

Sport Development Index (SDI) merupakan metode pengukuran keberhasilan pembangunan olahraga di Indonesia. Terdapat 9 dimensi dalam SDI, yaitu ketersediaan SDM olahraga, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran jasmani, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, performa, dan ekonomi.

Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada indeks pembangunan olahraga/*Sport Development Index* (SDI).

Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan fluktuatif, sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.108.

Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022

Tahun	Angka *Sport Development Index* (SDI) Jawa Tengah
2019	0,55
2020	0,60
2021	0,34
2022	0,37

Sumber: Laporan Nasional Sport Development Index (SDI) Kemenpora Tahun 2022

2.4.5 Pendidikan

Keberhasilan pencapaian Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun salah satunya ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan. Partisipasi pendidikan digambarkan sebagai jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan merupakan salah satu indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan kecenderungan partisipasi pendidikan semakin turun, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.107.

Tabel 2.109.

Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Jawa Tengah (Persen) Tahun 2016 - 2022

Tahun	PENDUDUK KELOMPOK UMUR								
	7-12			13-15			16-18		
	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tdk Sekolah Lagi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tdk Sekolah Lagi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tdk Sekolah Lagi
2016	0,39	99,58	0,03	0,32	95,41	4,27	0,33	67,95	31,72
2017	0,38	99,62	0	0,42	95,48	4,1	0,48	68,48	31,04
2018	0,15	99,76	0	0,35	95,79	3,86	0,35	69,02	30,63
2019	0,05	99,77	0,18	0,11	96,11	3,78	0,49	69,65	29,86
2020	0,22	99,73	0,05	0,24	96,37	3,39	0,28	70,14	29,58
2021	0,32	99,66	0,02	0,32	96,84	2,84	0,28	70,80	28,92
2022	0,31	99,58	0,11	0,27	96,77	2,97	0,29	70,82	28,89

Sumber: Susenas, BPS (2021)

Data Susenas BPS memperlihatkan bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi, yang kemudian dikategorikan sebagai kelompok Anak Tidak Sekolah (ATS). Hasil olahan terhadap data Susenas mencatat bahwa tahun 2022 jumlah ATS Usia 7-18 tahun di Jawa Tengah sebesar 556.205 jiwa.

Tabel 2.110.
Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

TAHUN	Usia 7-12 th		Usia 13-15 th		Usia 16-18 th		Jumlah ATS Usia 7-18 th
	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk Sekolah Lagi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk Sekolah Lagi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk Sekolah Lagi	
2017	12.824	-	7.080	69.116	8.501	549.718	647.239
2018	5.031	-	5.814	64.117	6.204	542.899	624.065
2019	1.688	6.075	1.821	62.577	8.253	502.951	583.365
2020	7.909	1.798	4.046	57.157	4.816	508.724	584.449
2021	10.494	656	5.340	47.390	4.715	486.980	555.575
2022	10.128	3.594	4.481	49.292	4.857	483.853	556.205

Sumber: Susenas, BPS, diolah (2021)

Kondisi ini memperlihatkan perlunya penanganan secara serius terhadap ATS di Jawa Tengah, mengingat penanganan ATS juga merupakan bagian dari upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pendidikan sepanjang hayat untuk semua. Hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya partisipasi pendidikan khusus untuk penduduk disabilitas usia 4-18 tahun yang merupakan indikator SPM yaitu sebesar 23,21% pada tahun 2022 (Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud 2023).

Selain partisipasi pendidikan, akses pemerataan layanan pendidikan juga perlu untuk diperhatikan. Akses pemerataan layanan pendidikan yang direpresentasikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional, meskipun di tahun 2021 mengalami penurunan.

Penyebab penurunan tersebut diindikasikan karena terdapatnya perubahan metode pembelajaran pasca covid-19 yaitu mengoptimalkan pemanfaatan IT untuk pembelajaran *hybrid* (kombinasi daring dan luring).

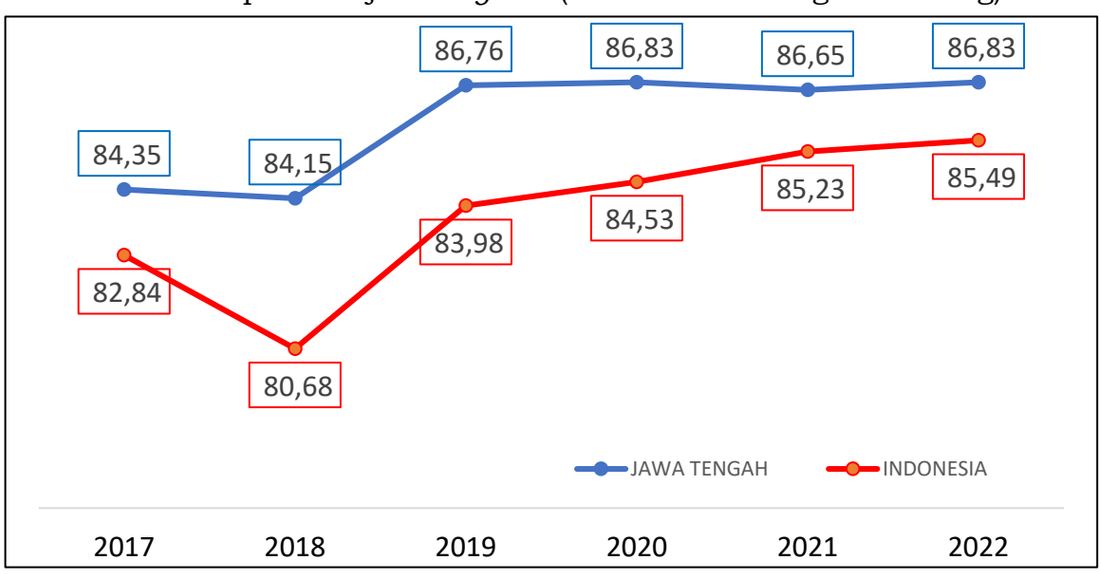

Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.59.
APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022

Meskipun secara nasional capaian APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah lebih baik, namun distribusi akses layanan pendidikan di 35 kab/kota belum merata. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.109, dimana APK SMA/SMK/Sederajat di 35 kabupaten/kota sangat bervariasi dari kisaran 50% hingga di atas 100%. Kondisi ini menunjukkan adanya gap atau kesenjangan yang cukup tinggi antar kabupaten dan kota. Persoalan kesenjangan dan distribusi pemerataan akses layanan pendidikan telah diupayakan untuk diatasi oleh pemerintah, salah satunya melalui zonasi pendidikan. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan, tidak hanya secara distribusi akses namun juga kualitas layanan pendidikan. Zonasi juga dianggap efektif, hal ini terlihat pada tahun 2017 APK SMA/SMK/Sederajat di atas 100% didominasi wilayah kota, namun rentang 2018 hingga 2021 terjadi pergeseran khususnya untuk Kota Magelang dan Kota Surakarta. Melalui zonasi ini diharapkan wilayah kota bukan satu-satunya tempat dan tujuan favorit untuk menempuh pendidikan.

Tabel 2.111.

Sebaran APK SMA/SMK/Sederajat di Jawa Tengah Tahun 2017-2021

KABUPATEN/KOTA	APK SMA/SMK/Sederajat				
	2017	2018	2019	2020	2021
PROVINSI JAWA TENGAH	**84,35**	**84,15**	**86,76**	**86,83**	**86,65**
Kabupaten Cilacap	87,28	95,83	91,42	91,73	91,5
Kabupaten Banyumas	85,43	89,77	101,68	100,42	108,66
Kabupaten Purbalingga	72,83	68,08	71,56	71,28	69,89
Kabupaten Banjarnegara	66,77	74,98	71,9	71,37	70,02
Kabupaten Kebumen	104,89	95,1	104,39	103,71	102,46
Kabupaten Purworejo	102,81	95,04	92,67	93,63	95,57
Kabupaten Wonosobo	52,98	54,8	55,2	56,29	57,43
Kabupaten Magelang	75,56	69,59	70,56	70,13	67,7
Kabupaten Boyolali	77,45	78,46	81,37	80,4	79,36
Kabupaten Klaten	100,58	104,48	109,2	108,59	106,85
Kabupaten Sukoharjo	96,11	92,74	81,17	83,41	84,16
Kabupaten Wonogiri	86,58	83,48	90,45	92,36	90,3
Kabupaten Karanganyar	83,11	75,74	77,28	78,2	75,34
Kabupaten Sragen	106,49	100,86	114,62	110,98	108,05
Kabupaten Grobogan	81,28	85,26	93,21	93,6	92,47
Kabupaten Blora	84,82	94,12	86,39	87,3	85,16
Kabupaten Rembang	72,05	71,12	72,99	74,53	71,94
Kabupaten Pati	91,14	89,84	101,67	101,34	102,6
Kabupaten Kudus	93,35	91,66	91,45	90,1	92,16
Kabupaten Jepara	87,05	85,55	87,65	88	90,31
Kabupaten Demak	91,7	110,29	106,41	102,7	100,07
Kabupaten Semarang	78,21	66,93	78,44	78,77	80,91
Kabupaten Temanggung	70,09	71,31	77,34	77,59	75,27
Kabupaten Kendal	87,1	106,43	105,77	103,73	106,32
Kabupaten Batang	73,93	62,13	67,57	69,78	72,27
Kabupaten Pekalongan	55,13	60,36	61,24	64,22	62,3
Kabupaten Pemalang	71,38	69,9	75,14	74,18	72,03
Kabupaten Tegal	75,44	81,13	81	80,26	78,78
Kabupaten Brebes	76,51	69,29	68,96	70,34	73,73
Kota Magelang	107,24	91,97	89,74	90,07	88,16
Kota Surakarta	103,55	80,85	77,92	81,43	79,62
Kota Salatiga	109,61	120,18	121,91	119,1	118,12
Kota Semarang	107,82	103,54	106,63	104,6	105,01
Kota Pekalongan	92,04	74,41	74,92	78,66	76,12
Kota Tegal	87,08	79,7	83,2	82,32	84,39

Sumber:BPS,2022

Selain akses pemerataan layanan pendidikan, mutu pendidikan juga masih menjadi persoalan di Jawa Tengah. Mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri. Relevansi pendidikan, kualitas guru, kondisi sarana prasarana pendidikan serta kemampuan literasi dan numerasi siswa dapat menggambarkan bagaimana kondisi mutu pendidikan di Jawa Tengah. Relevansi pendidikan ditunjukkan melalui kualitas lulusan pendidikan terutama pada kesesuaian lulusan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja. Data memperlihatkan bahwa serapan tamatan SMK belum optimal, ditandai dengan penurunan jumlah lulusan SMK yang bekerja, sebaliknya jumlah lulusan SMK yang berwirausaha justru mengalami peningkatan. Namun demikian, dari hasil penilaian Rapor Pendidikan Kemendikbud menunjukkan hasil yang cukup baik untuk tingkat penyerapan lulusan SMK di Jateng sudah mencapai 92,53% pada tahun 2022. Kondisi ini menggambarkan adanya kecenderungan serapan lulusan SMK lebih banyak ke arah berwirausaha daripada bekerja di dunia usaha maupun industri.

Tabel 2.112.
Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
• Jumlah siswa kelas III/IV	195.354	164.231	167.751	248.065	208.194
• Jumlah lulusan	194.768	164.231	167.751	248.065	208.194
• Bekerja	100.500	111.096	99.278	73.778	65.241
• Wirausaha	1.266	13.159	35.517	1.012	14.480
• Melanjutkan	55.762	22.568	1.720	31.727	18.155
• Belum bekerja	37.240	17.048	21.081	141.548	75.269

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan peningkatan keterserapan lulusan SMK pada DUDI salah satunya melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa SMK yang sesuai kebutuhan DUDI serta mengoptimalkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat untuk SMK melalui program *Center of Excellent* (CoE) dan DAK Fisik Sarpras Pendidikan SMK.

Kualitas guru salah satunya dapat dinilai melalui kompetensi yang dimiliki. Sampai dengan tahun 2021 persentase guru dengan sertifikat kompetensi cenderung tidak mengalami peningkatan signifkan, berada pada rentang cakupan 40 hingga 65 persen. Beberapa kendala dijumpai dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi mulai dari belum memiliki ijazah D4/S1, sudah memiliki ijazah D4/S1 namun tidak linier dengan bidang yang diajar hingga keterbatasan jumlah kuota sertifikasi kompetensi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Tabel 2.113.
Sertifikat Kompetensi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2018-2021

Uraian		2018		2019		2020		2021	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
Sertifikat Kompetensi	SMA	65	35	66,7	33,3	65,1	34,9	57,1	42,9
	SMK	41	59	43,6	56,4	44,2	55,8	44,2	55,8
	SLB	50,8	49,2	52,2	47,8	46,1	53,9	40,3	59,7

Sumber Kemendikbud, 2022

Kualifikasi guru minimal D4/S1 dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Kondisi tersebut diperkuat dengan data sebagaimana table 2.112, memperlihatkan bahwa di Jawa Tengah masih terdapat Guru belum memiliki kualifikasi minimal D4/S1 dan paling banyak dijumpai pada jenjang pendidikan khusus.

Tabel 2.114.
Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2021

Uraian		2018		2019		2020		2021	
		Sudah D4/S1	Belum D4/S1	Sudah D4/S1	Belum D4/S1	Sudah D4/S1	Belum D4/S1	Sudah D4/S1	Belum D4/S1
Kualifikasi Guru	SMA	98,1	1,9	98,2	1,8	89	11	98,8	1,2
	SMK	95,5	4,5	96,2	3,8	88,5	11,5	97,3	2,7
	SLB	92,3	7,7	92	8	92,7	7,3	96,3	3,7

Sumber Kemendikbud, 2022

Mutu pendidikan lainnya tergambarkan melalui kondisi sapras pendidikan di Jawa Tengah. Jawa Tengah masih memiliki ruang kelas kondisi rusak berat, sedang maupun ringan. Terhadap kondisi tersebut, maka pemerintah berupaya melakukan peningkatan sarpras pendidikan melalui rehabilitasi sarpras pendidikan baik dengan optimalisasi APBN (DAK Fisik Sarpras Pendidikan) maupun APBD.

Tabel 2.115.
Kondisi Sarpras Pendidikan Tahun 2018-2021

Uraian	2018			2019			2020			2021		
	Rusak berat	Rusak sedang	Baik+ Rusak ringan	Rusak berat	Rusak sedang	Baik+ Rusak ringan	Rusak berat	Rusak sedang	Baik+ Rusak ringan	Rusak sedang +berat	Rusak ringan	Baik
SMA	278	434	12.927	296	456	12.861	215	688	13.269	3	6.349	8.502
SMK	296	452	23.373	295	431	23.434	204	698	25.105	-	13.070	14.797
SLB	-	-	-	106	104	1.825	82	249	2.514	25	1.656	1.517

Sumber Kemendikbud, 2022

Kemampuan literasi dan numerasi juga gambaran mutu pendidikan dari segi proses. Literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa serta mampu menganalisa dan memahamai konsep, sedangkan numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai literasi secara umum mengalami penurunan pada tahun 2023, sementara nilai numerasi mengalami peningkatan pada tahun yang sama, terkecuali jenjang SMPLB.

Tabel 2.116.
Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2022-2023

Tahun	Jenjang Pendidikan	Literasi	Numerasi	Karakter
2022	SMA	80,02	56,03	57,99
	SMK	65,00	56,04	57,44
	SDLB	79,10	75,40	55,89
	SMPLB	65,38	64,50	56,58
	SMALB	50,00	41,95	57,25
2023	SMA	79,51	67,80	59,02
	SMK	62,48	70,01	58,81
	SDLB	75,98	76,19	58,28
	SMPLB	51,20	48,29	58,21
	SMALB	38,37	45,31	56,39

Sumber: Rapor Pendidikan Jawa Tengah, 2023

Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi siswa, namun juga nilai karakter siswa. Rapor Pendidikan juga telah memuat pengukuran nilai karakter siswa yang mengukur kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai - nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong – royong, kreativitas, nalar kritis kebinekaan global, serta kemandirian. Penerimaan terhadap siswa dari kelompok

rentan seperti kurang mampu secara ekonomi dan disabilitas merupakan bagian dari perwujudan nilai karakter siswa. Nilai karakter tertinggi berada pada jenjang SMA dan terendah pada jenjang SD, namun terjadi penurunan nilai karakter pada jenjang SMALB di Tahun 2023.

Transformasi digital menuntut pemahaman dan skill/keterampilan terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Data memperlihatkan bahwa proporsi penduduk usia 15-24 tahun dengan keterampilan TIK jauh lebih baik dibandingkan penduduk usia 15-59 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penguasaan TIK masih didominasi oleh kelompok usia muda produktif.

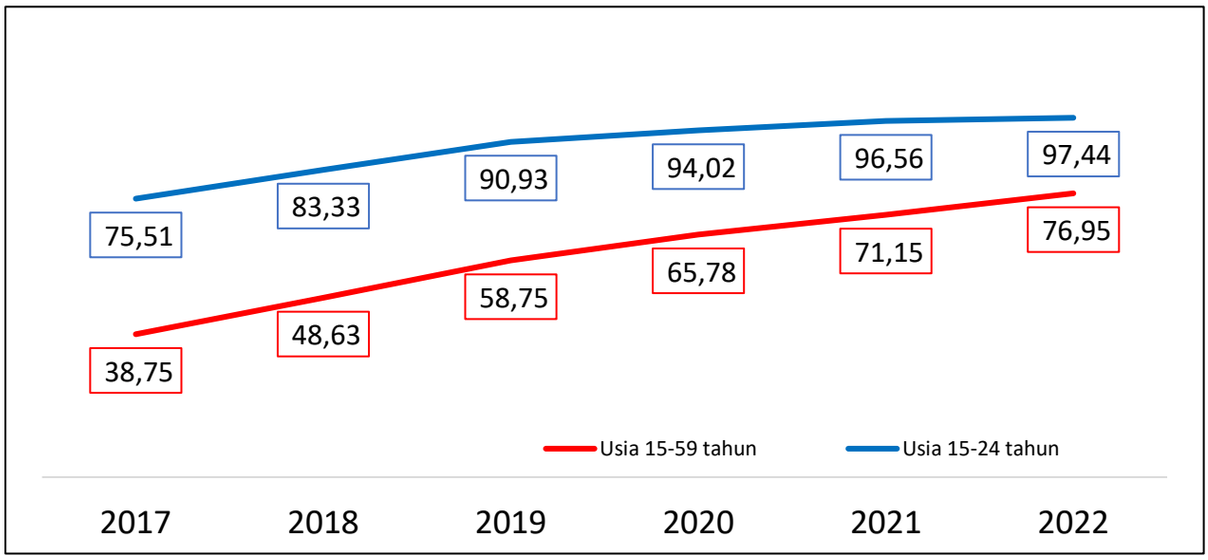

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 2022

Gambar 2.60.
Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dan Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan TIK di Jawa Tengah Tahun 2017-2022 (%)

2.4.6 Kesehatan

a. Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2018 – 2019 menunjukkan tren yang semakin baik dari 78,60 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada 2019 menjadi 76,93 per 100.000 KH. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 menimbulkan perburukan kasus kematian ibu secara signifikan pada 2020 dan 2021 menjadi 98,60 pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan menjadi 199 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2021. Keterbatasan layanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil selama pandemi, potensi keterpaparan virus, dan komplikasi kehamilan (perdarahan, hipertensi kehamilan, jantung, diabetes) menjadi faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi naiknya angka kematian ibu. Jika dilihat dari data tahun 2022 menunjukkan bahwa Angka kematian ibu di Jawa Tengah sebanyak 485 Kasus. Tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 50 Kasus dan terendah di Kota Magelang 1 kasus. Angka di tahun 2022 tersebut menurun dibanding Angka kematian Ibu tahun 2021 yang sebanyak 1.011 kasus.

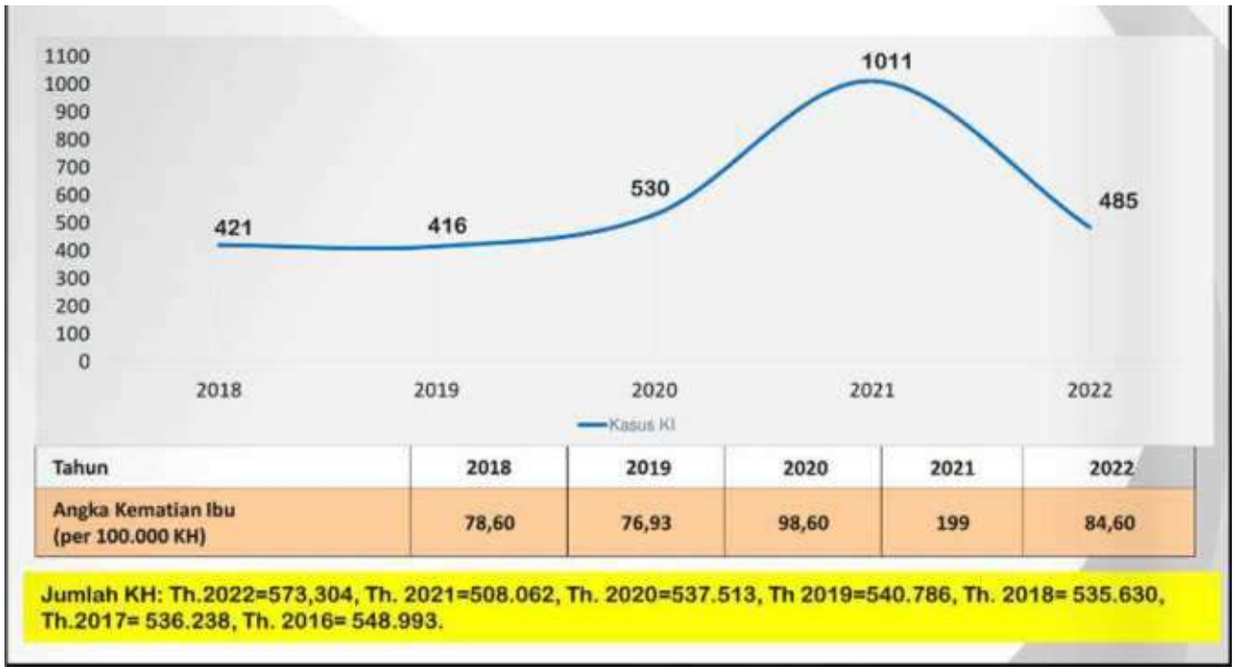

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	78,60	76,93	98,60	199	84,60

Jumlah KH: Th.2022=573,304, Th. 2021=508.062, Th. 2020=537.513, Th 2019=540.786, Th. 2018= 535.630, Th.2017= 536.238, Th. 2016= 548.993.

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.61.
Tren Kasus Kematian Ibu Tahun 2018-2022

Angka Kematian Bayi (AKB) periode tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan tren membaik yaitu sebesar 8,37 per 1.000 KH pada tahun 2018 menjadi sebesar 7,87 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2021. Meskipun AKB telah menunjukkan kinerja membaik, namun secara absolut jumlah kasus kematian bayi masih tinggi. Faktor penyebab kematian bayi antara lain kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan komplikasi kehamilan serta keterbatasan layanan kesehatan ibu dan anak pada masa pandemi Covid-19. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa Kasus kematian bayi di Jawa Tengah sebanyak 4.024 Kasus. Tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 259 Kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 11 kasus.

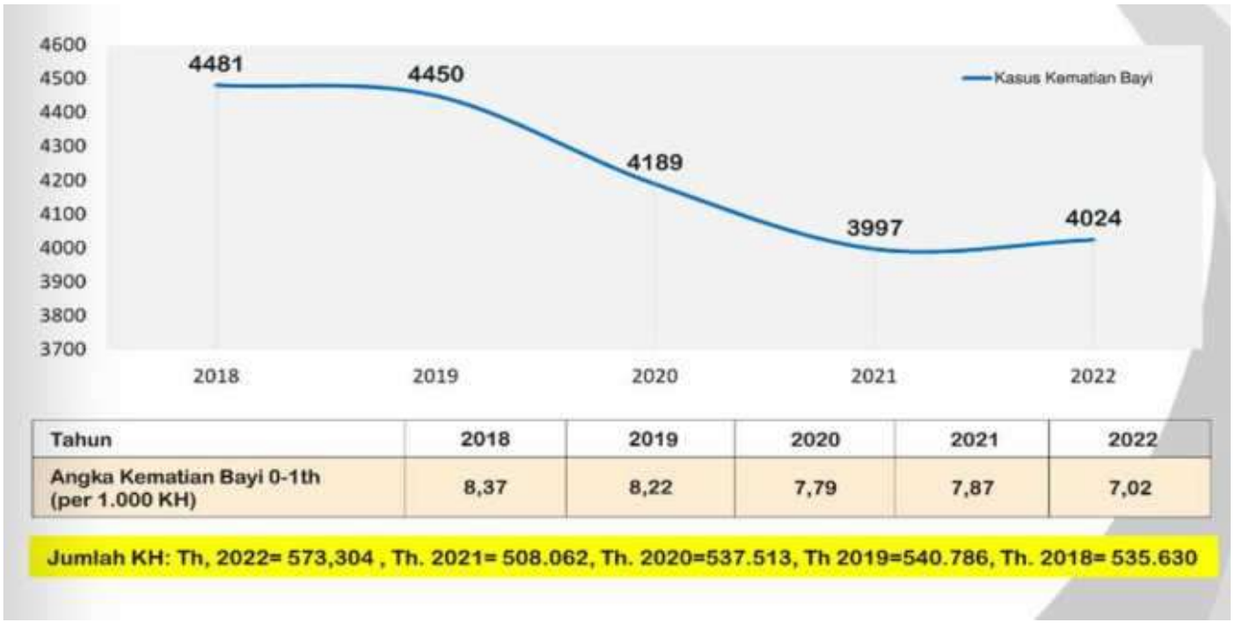

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Bayi 0-1th (per 1.000 KH)	8,37	8,22	7,79	7,87	7,02

Jumlah KH: Th, 2022= 573,304 , Th. 2021= 508.062, Th. 2020=537.513, Th 2019=540.786, Th. 2018= 535.630

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.62.

Tren Kasus Kematian Bayi Tahun 2018-2022

Angka Kematian Balita (AKABA) di Jawa Tengah pada 2018 sampai dengan 2021 menunjukkan tren membaik dari 9,48 per 1.000 KH pada 2018 menjadi 8,95 per 1.000 KH pada 2021. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa kasus kematian balita di Jawa Tengah sebanyak 4.699 Kasus. Tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 310 Kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 11 kasus. Beberapa penyebab kematian balita antara lain pneumonia, penyakit bawaan, diare, cedera, campak dan malaria di daerah endemis. Selain infeksi penyakit, faktor pola asuh juga menjadi faktor penyumbang kasus kematian balita. Masih perlu upaya edukasi dan peningkatan pemahaman orang tua dan pengasuh untuk menerapkan pola asuh secara benar kepada balita.

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Balita 0-5 th (per 1.000 KH)	9,48	9,63	8,99	8,95	8,20

Jumlah KH: Th, 2022= 573,304, Th. 2021= 508.062, Th. 2020=537.513, Th 2019=540.786, Th. 2018= 535.630

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.63.

Tren Kasus Kematian Balita Tahun 2018-2022

b. Kasus gizi buruk

Kasus gizi buruk di Jawa Tengah mengindikasikan peningkatan pula dari 961 pada tahun 2018 menjadi 2.999 pada tahun 2022 seperti yang ditunjukan pada gambar 2.4. Hal ini terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi gizi buruk yaitu :ekonomi, sanitasi, pendidikan orangtua, dan perilaku orangtua. Kemiskinan salah satu determinan social-ekonomi, merupakan akar dari ketiadaan pangan, tempat mukim yang berjejalan, dan tidak sehat serta ketidak mampuan mengakses fasilitas kesehatan. Malnutrisi masih saja melatar belakangi penyakit dan kematian anak. Kurang kalori protein sesungguhnya berpeluang menyerap siapa saja, terutama bayidan anak yang tengah tumbuh-kembang. Gizi buruk cenderung menyerang setelah merekaberusia 18 bulan. Penilaian status gizi masyarakat memerlukan kebijakan yang menjaminsetiap anggota masyarakat mendapatkan makanan yang cukup jumlah dan mutunya. Gizi yang diperoleh seorang anak melalui konsumsi makanan setiap hari. Kecukupan zat gizi berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan anak. Kasus gizi buruk bukanlah jenis penyakit yang datang tiba-tiba begitu saja. Tetapi karena proses yang menahun terus bertumpuk dan menjadi kronik saat mencapai puncaknya. Masalah defisiensi gizi khususnyamenjadiperhatian karena berbagai penelitian menunjukan adanya efek jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan otak manusia.

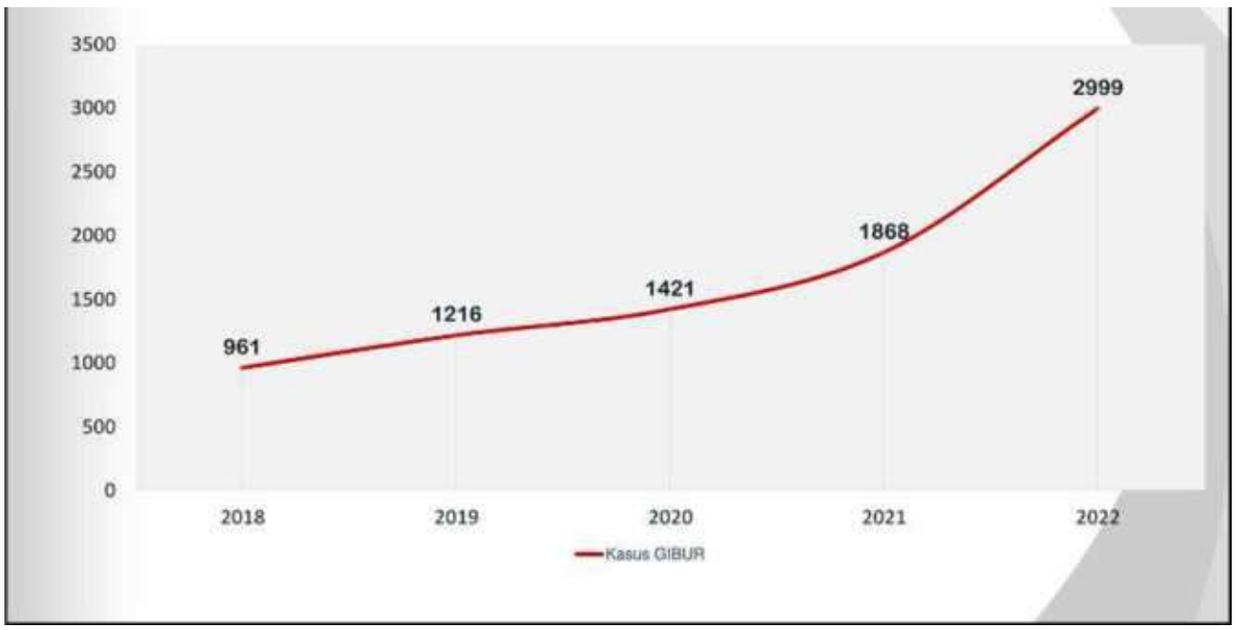

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.64.

Tren Kasus Balita Gizi Buruk Tahun (BB/TB) 2018-2022

Permasalahan gizi yang terjadi di Jawa Tengah secara umum disebabkan oleh masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Kekurangan gizi dalam waktu lama maupun infeksi berulang yang mengganggu intake zat gizi menyebabkan masalah gizi kronis sehingga mengakibatkan anak menjadi pendek (stunting). Kekurangan gizi dalam waktu singkat, misalnya karena wabah penyakit dan kelaparan menyebabkan masalah gizi akut sehingga mengakibatkan anak menjadi kurus (underweight dan wasted). Selain permasalahan kekurangan gizi, kelebihan gizi juga menimbulkan masalah karena menyebabkan anak menjadi obesitas. Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa tren permasalahan gizi di Jawa Tengah menunjukkan angka yang semakin membaik. Prevalensi balita

underweight dan wasted sebesar 17,1 persen dan 7,7 persen pada 2022. Prevalensi balita stunted turun dari 20,9 persen pada 2021 menjadi 20,8 persen pada 2022. Berdasarkan standar WHO, suatu wilayah dikatakan baik jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prvalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prevalensi balita kurus >5 persen. Suatu wilayah dikalakan mengalami masalah gizi kronis apabila prevalensi balita pendek >20 persen dan prevalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan memiliki permasalahan gizi kronis dan akut apabila prevalensi balita pendek >20 persen dan prevalensi balita kurus >5 persen. Berdasarkan standar tersebut, Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah dengan permasalahan gizi kronis dan akut.

Penanganan permasalahan gizi yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu menurunkan angka prevalensi stunting pada balita menjadi 14 persen dan angka prevalensi wasting pada balita menjadi 7 persen sampai dengan tahun 2024. Angka prevalensi stunting di Jawa Tengah terus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu. Jika mengacu pada target nasional maka perlu upaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Jawa Tengah pada tahun 2023 menjadi di bawah 16 persen dan menjaga angka prevalensi wasting tidak lebih dari 7 persen

Tabel 2.117.

Prevalensi *Stunting* Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Tahun	*Stunting*	Sumber
2018	31,2%	Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
2019	27,68%	Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI telah terintegrasi dengan riskesdas)
2020	-	Tidak dilakukan pengukuran karena pandemi
2021	20,9%	Survey Status Gizi Indonesia
2022	21,6%	Survey Status Gizi Indonesia

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.65.

Angka Prevalensi *Stunting* Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Provinsi Lainnya Tahun 2022

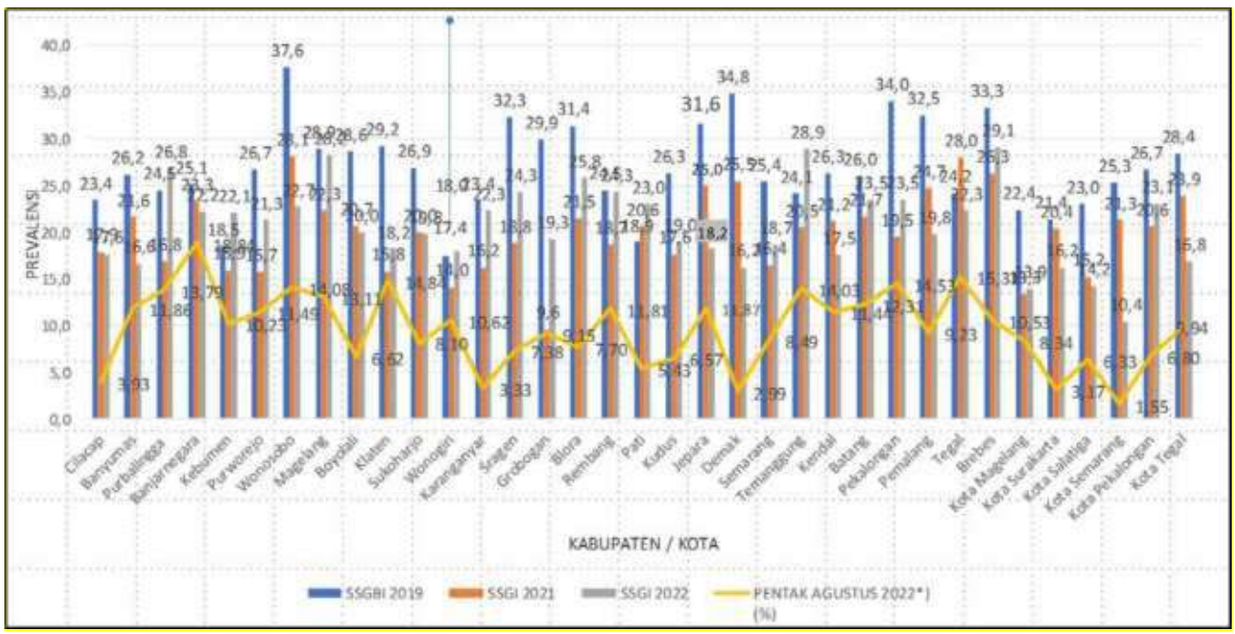

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.66.

Angka Prevalensi *Stunting* Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan SSGBI 2019 dan SSGI 2021

Terjadinya kondisi stunting secara umum dipengaruhi oleh asupan gizi dan status kesehatan. Asupan gizi berkaitan dengan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi. Status kesehatan berkaitan dengan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, lingkungan permukiman, serta lingkungan sosial (noram dan pola asuh, pendidikan, lingkungan kerja).

c. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Beban ganda penyakit saat ini menjadi tantangan kesehatan Jawa Tengah, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi antara lain oleh perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, teknologi, ekonomi dan sosial budaya. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Pengendalian penyakit menular dilakukan terhadap penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber binatang, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan pengendalian penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

Kondisi Penyakit Menular

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Provinsi Jawa Tengah adalah TB, HIV/AIDS, Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Angka kesakitan DBD (Incidence Rate/IR DBD) di Jawa Tengah mengalami peningkatan yang cukup siginifkan di tahun 2022 dibanding tahun 2021 yaitu menjadi 33,80 per 100.000 penduduk setelah tahun sebelumnya di angka 12,80 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kesakitan DBD (CFR DBD) mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yaitu dari 2,71 persen pada tahun 2021 menjadi 2,08 persen pada tahun 2022. Angka ini perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut

angka kematian yang disebabkan oleh DBD, dimana angka kesakitan menurun, namun angka kematian meningkat.

Angka Kesakitan Malaria (API) berdasarkan data tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,028 dibandingkan Tahun 2021 sebesar 0,024. Saat ini dari 35 Kabupaten/Kota yang mempunyai kasus Malaria tertinggi sebesar 514 kasus hanya di Kabupaten Purworejo. Hal ini dipengaruhi adanya Migrasi Kasus dari Pendatang.

Sementara itu penemuan kasus TB yang ternotifikasi (CNR TB) mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 116,2 persen menjadi 179 persen di tahun 2022, namun harapan penanganan TB mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu ditandai dengan naiknya angka keberhasilan pengobatan TB (SRTB) dari tahun 2021 sebesar 83,5 persen menjadi sebesar 84,5 persen di tahun 2022. Penemuan kasus TB semakin membaik seiring dengan dilakanakannya deteksi dini oleh petugas Puskesmas yang langsung turun ke masyarakat serta peran Balai Kesehatan Masyarakat milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Pada penyakit HIV/AIDS perlu diwaspadai secara serius, mengingat terjadi lonjakan angka yang cukup besar pada tahun 2022, tercatat kasus HIV meningkat dari 2.708 kasus di tahun 2021 menjadi 3.120 kasus di tahun 2022. Kasus AIDS juga meningkat dari 835 kasus di tahun 2021 menjadi 1.309 kasus di tahun 2022. Kasus HIV dan AIDS perlu menjadi perhatian bersama dikarenakan masih rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang. Meskipun kinerja pelayanan HIV/AIDS semakin baik, hal ini dipengaruhi karena semakin efektifnya pemanafaatan Voluntary Conselling Test (VCT) di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Tabel 2.118.
Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	API Malaria (%)	CNR TB (%)	SR TB (%)	HIV / AIDS	
						Kasus HIV	Kasus AIDS
2018	8,68	1,25	0,02	143	77,13	2.654	1.879
2019	26,21	1,4	0,012	210,8	83,93	2.704	2.316
2020	16,30	1,9	0,009	118	84,5	2.749	1.549
2021	12,80	2,71	0,024	116,2	83,5	2.708	835
2022	33,69	2,08	0.028	179	84,5	3.120	1.309

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tantangan besar yang saat ini dihadapi bersama adalah ditemukannya jenis corona virus baru yang menjadi wabah pandemi hampir diseluruh dunia. Corona virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Corona virus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit Covid-19 yaitu Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penularan Covid-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dan tidak langsung yakni percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi

Covid-19 batuk, bersin atau berbicara. Penularan kontak tidak langsung dapat terjadi melalui benda dan permukaan benda yang terkontaminasi percikan orang yang terinfeksi seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan.

Untuk mengurangi penyebaran kasus yang semakin banyak dan mengurangi kasus kematian akibat Covid-19, berbagai upaya promotif dan preventif terus dilakukan antara lain edukasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat dengan menjaga jarak minimal satu meter, memakai masker, mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih. Disamping itu, penanganan kuratif dan rehabilitatif terus dilakukan dengan melakukan tes Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19 (treatment) di tempat karantina terpusat dan fasilitas kesehatan rujukan Covid-19. Beberapa upaya tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, stakeholder dan masyarakat.

Vaksin diakui dan terbukti dapat mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kontribusi vaksin pada turunnya angka penularan penyakit tertentu sangat besar. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd imunity), dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Ketersediaan vaksin Covid-19, akan membantu proses penanganan pandemi Covid-19 lebih cepat.

Kondisi Penyakit Tidak Menular (PTM)

Peningkatan beban akibat penyakit tidak menular sejalan dengan meningkatnya faktor risiko yang meliputi meningkatnya tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh atau obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas sik, dan merokok serta alkohol. Peningkatan PTM dapat mengakibatkan penurunan produktivas penduduk karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker. Data menunjukkan bahwa hipertensi menjadi penyakit tidak menular yang perlu diwaspadai, dimana jumlah penderita hipertensi mengalami lonjakan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3.329.052 kasus pada tahun 2021 menjadi 4.695.927 kasus pada tahun 2022. Selain Hipertensi diabetes melitus mengalami tren kenaikan dari 467.365 kasus pada tahun 2021 menjadi 613.524 kasus di tahun 2022. Penyakit kanker juga perlu diwaspadai, dimana jumlah penderita kanker mengalami peningkatan dari 12.886 kasus di tahun 2021 menjadi 17.292 kasus di tahun 2022.

Tabel 2.119.
Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022

Tahun	Jenis PTM		
	Diabetes Milletus	Hipertensi	Kanker
2018	508.881	1.393.751	21.298
2019	490.444	2.073.852	13.256
2020	582.559	2.543.732	12.702
2021	467.365	3.329.052	12.886
2022	613.524	4.695.927	17.292

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

d. Kesehatan Lingkungan

Perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak mulai usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat adalah melalui program Open Defacation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga.

Pada Tahun 2022 masih terdapat 5 kabupaten/kota yang belum ODF yakni Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Batang, Magelang dan Pekalongan. Akan dilakukan percepatan pencapaian target seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah Bebas Buang Air Besar Sembarangan Pada Tahun 2023.

Perkembangan desa/kelurahan ODF di Jawa Tengah dari tahun 2018 hingga 2022 terus meningkat yaitu sebanyak 3.668 desa/kelurahan ODF di tahun 2018 menjadi 7.710 desa/kelurahan ODF di tahun 2022.

Tabel 2.120.

Perkembangan Desa/Kelurahan ODF Di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Kelurahan/Desa ODF
1	2018	3.668
2	2019	5.863
3	2020	6.818
4	2021	7.162
5	2022*	7.710

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

e. Kesehatan Usia Lanjut

Dalam rangka antisipasi pasca bonus demografi dimasa mendatang, penduduk usia lanjut (penduduk usia 60 tahun keatas) perlu mendapat perhatian dalam pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan agar lansia dapat tetap menjalani aktivitas fisik, menjaga kesehatan, tidak menggantungkan kepada orang lain dalam kehidupan bahkan masih bisa produktif. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di Jawa Tengah, data yang tersaji adalah periode 2018 sampai 2022. Tahun 2018 cakupan pelayanan kesehatan lansia sebesar 65,00 persen yang kemudian meningkat menjadi 85,00 persen di tahun 2022.Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan promosi kesehatan, meningkatkan akses pelayanan kesehatan lanjut usia, Kerjasama dengan universitas dan Lembaga penelitian untuk pengembangan program, pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan mandiri di usia lanjut, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam upaya kesehatan lanjut usia.

Tabel 2.121.

Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%)

No	Tahun	Cakupan Layanan Kesehatan Lansia
1	2018	65,00
2	2019	74,90
3	2020	65,90
4	2021	70,90

No	Tahun	Cakupan Layanan Kesehatan Lansia
5	2022	85,00

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

2.4.7 Kesejahteraan Sosial

a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kondisi kesejahteraan sosial di Jawa Tengah selain masih dihadapkan pada tingginya angka kemiskinan juga masih tingginya penduduk yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS). Berdasarkan perkembangan data PPKS lima tahun terakhir, PPKS di Jawa Tengah relatif mengalami perkembangan yang fluktuatif yang mengarah pada peningkatan jika mendasarkan base line pada tahun 2018. Tahun 2019 PPKS mengalami penurunan menjadi 3.042.030 jiwa, namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 4.056.054 jiwa dan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 4.654.151 jiwa dan tahun 2022 sedikit turun menjadi 4.579.790 jiwa. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum sebanding dengan penambahan PPKS baru, baik yang disebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat maupun dampak pandemi covid-19 di tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam penanganan PPKS baik melalui layanan panti maupun bantuan sosial yang hanya sebesar 0,47% atau hanya 19.214 penerima manfaat. Diperlukan kolaborasi semua pihak baik Pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota, swasta maupun masyarakat sesuai kewenangannya untuk terus bersama-sama memberikan layanan kepada PPKS.

Tabel 2.122.
Populasi dan Penanganan PPKS di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Populasi PPKS (Orang)	Jumlah Penanganan (Orang)	Persentase
1	2018	4.045.143	60.381	1,49
2	2019	3.042.030	19.214	0,47
3	2020	4.056.054	19.214	0,47
4	2021	4.654.151	19.214	0,47
5	2022	4.579.790	19.214	0,47

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Sementara itu, peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diharapkan dapat menjadi faktor dominan dalam penyelenggaraan sosial termasuk membantu para PPKS untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya belum dapat diharapkan sepenuhnya. Beberapa hal yang masih menjadi tantangan pada PSKS dalam menjalankan perannya yaitu terbatasnya kapasitas dan kuantitas SDM PSKS, termasuk tingkat kesejahteraan SDM PSKS yang masih rendah sehingga berpengaruh pada komitmen dalam penyelenggaraan sosial maupun pengkaderisasian SDM PSKS. Data perkembangan jumlah PSKS menunjukkan bahwa jumlah PSKS makin menurun sejak tahun 2019 sebesar 32.874 PSKS menjadi 30.632 PSKS pada tahun 2022.

Tabel 2.123.
Kondisi PSKS Tahun 2018-2022

No	Jenis	Jumlah				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Karang Taruna (KT)	8.578	8.578	8.562	8.562	8.562
2	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	920	902	866	866	866
3	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	13.794	16.260	12.540	11.440	11.440
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	573	576	576	576	576
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	35	39	38	38	37
6	Dunia Usaha	58	63	63	63	56
7	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	934	1.090	1.123	1.123	1.019
8	Family Care Unit (FCU)	0	2	2	2	1
9	Sakti Peksos	0	63	63	63	69
10	Pekerja Sosial Profesional (PSP)/Fungsional	399	120	117	117	123
11	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	20	38	38	38	38
12	Penyuluh Sosial Fungsional	0	0	25	25	46
13	Penyuluh Sosial Masyarakat	710	710	77	77	77
14	PPNS	0	3	3	3	3
15	Pelopor Perdamaian	0	0	230	230	245
16	SDM PKH	0	2.348	5.495	5.495	5026
17	SLRT	0	11	21	21	21
18	Puskesos	0	52	306	385	405
	Total	**28.039**	**32.874**	**32.165**	**31.145**	**30.632**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

c. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan SPM Sosial mendasarkan pada capaian tahun 2022 menunjukkan bahwa layanan terhadap rehabilitasi sosial dalam panti untuk anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta dan layanan penanganan saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana telah mencapai 100 persen. Namun demikian, capaian 100 persen belum menunjukkan coverage seluruh kebutuhan penanganan di Jawa Tengah dan masih sebatas sasaran yang ditangani saja. Kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya kapasitas sarpras, pendanaan dan SDM panti. Berikut tabel capaian pelaksanaan SPM Sosial Tahun 2022.

Tabel 2.124.

Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah TAhun 2022

No	Jenis Pelayanan	Penerima layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD (Rp000)	Realisasi (Rp000)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	3.762 Orang	3.762 Orang	100	20.248.253	19.714.490	97.36
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di dalam panti	2.795 Orang	2.795 Orang	100	14.894.872	14.270.684	95,81
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia Terlantar di dalam panti	1.685 Orang	1.685 Orang	100	13.273.822	12.921.217	97,34
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan &pengemis di Dalam panti	810 Orang	810 Orang	100	5.346.951	5.180.769	96,89
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat & Setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	145.407 Orang	145.407 Orang	100	1.050.000	1.049.980	100,00
	Jumlah	154.459 Orang	154.459 Orang	100	54.813.898	53.137.142	96,94

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

d. Penanganan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Urusan sosial mempunyai peranan besar dalam memberikan pelayanan umum khususnya terkait dengan layanan pemenuhan kesejahteraan sosial. Beberapa layanan yang tersedia dan menjadi kewenangan provinsi antara lain layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS terlantar di dalam panti, layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI), dan layanan SLRT/Puskessos.

(1) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Panti

Layanan PPKS dalam Panti menghadapi beberapa tantangan antara lain kondisi sarpras panti, kapasitas dan kuantitas SDM panti serta pemenuhan layanan panti yang terbatas. Kondisi sarpras panti mengalami perkembangan yang terus memburuk secara fisik jika dilihat dari kondisi bangunan. Tercatat tahun 2022 kondisi bangunan baik sebanyak 548 unit menurun sejak tahun 2018 (578). Hal ini dikarenakan tidak adanya peningkatan/pemeliharaan sarpras secara masif tiap tahunnya. Sementara total kapasitas daya tampung panti tercatat 4.602 orang. Daya tampung ini masih jauh dari harapan jika dibanding jumlah PPKS yang mencapai 4,5 juta orang lebih.

Tabel 2.125.

Jumlah dan Kondisi Bangunan Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah 2022

No	Tahun	Panti/Rumpel	Jumlah Unit Bangunan	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
1	2018	54	767	578	93	70	26
2	2019	54	770	572	95	71	32
3	2020	54	789	570	105	70	44
4	2021	54	789	548	110	73	58
5	2022	54	790	548	111	73	58

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dari sisi SDM Panti, beberapa kebutuhan tenaga layanan yang ada saat ini masih jauh dari kebutuhan untuk memberikan layanan di 56 panti/rumah pelayanan sosial. Beberapa pos SDM yang dibutuhkan antara lain pekerja sosial terampil dari kebutuhan 57 orang baru tersedia 35 orang, pekerja sosial ahli dari kebutuhan 426 orang baru tersedia 65, penyuluh sosial ahli dari 104 kebutuhan baru tersedia 40 orang, perawat dari 68 orang hanya tersedia 1 orang dan dokter belum ada.

Tabel 2.126.

Kondisi dan Kebutuhan SDM Panti Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

PEKSOS TERAMPIL		PEKSOS AHLI		PENYSOS AHLI		PERAWAT		DOKTER	
Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan
35	57	65	426	40	104	1	68	0	0

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

Kondisi terbatasnya panti milik provinsi baik menyangkut kapasitas maupun SDM sehingga dalam penanganan PPKS kurang optimal, maka penting untuk mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan PPKS. Sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan rumah singgah yang berfungsi untuk melakukan penanganann PPKS yang sifatnya sementara dan melakukan assesment terhadap PPKS hasil penjaringan. Sampai dengan tahun 2022 tercatat baru 27 kabupaten/kota yang telah memiliki rumah singgah baik dibiayai APBD masing-masing maupun bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah. Tersisa delapan kabupaten/kota yang belum memiliki rumah singgah yaitu Cilacap, Banjarneqara, Pemalang, Wonosobo, Sukoharjo. Kab. Semarang, Kudus, dan Kota Magelang.

(2) Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI)

Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) adalah upaya yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi dan melindungi hak anak. Pelaksanaan PKSAI memberikan dampak signifikan terhadap jumlah kasus yang direspon. Rujukan dan layanan yang disediakan dalam model PKSAI bertujuan untuk menghubungkan layanan perlindungan anak (seperti bantuan psikososial, pengasuhan alternatif dan bantuan hukum serta pendampingan bagi anak berkonflik dengan hukum), layanan penguatan keluarga (seperti konseling keluarga), dengan layanan

perlindungan sosial dan kebutuhan dasar. Layanan PSKAI menghadapi tantangan antara lain makin terbatasnya SDM yang peduli dan memiliki pemahaman mengenai perlindungan anak, ketersediaan sarana prasarana belum layak, intervensi layanan cenderung masih bersifat sectoral/belum terintegrasi dengan layanan anak lainnya dan data kerentanan belum diintervensi secara holistik integrative. Sampai dengan tahun 2022, jumlah PKSAI yang terbentuk baru di 10 kab/kota, oleh sebab itu masih perlu didorong kepada kab/kota di Jawa Tengah untuk membentuk PKSAI sebagai bentuk penyelenggaraan layanan perlindungan dan kesejahteraan anak di daerah.

(3) Layanan Puskessos-SLRT

Puskessos-SLRT sebagai lembaga dan sistem layanan untuk membantu dalam program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (berupa mengidentifikasi kebutuhan, menangani aduan dan sebagai rujukan masyarakat miskin/rentan miskin) masih dihadapkan pada tantangan pada konsistensi/keaktifan layanan dikarenakan terbatasnya kapasitas SDM pengelola dan kurangnya kemitraan dengan pemangku kepentingan termasuk dunia usaha. Selain itu juga masih terbatasnya Puskessos-SLRT yang belum merata terbentuk di semua desa/kelurahan. Kondisi sampai dengan tahun 2021, Puskessos –SLRT tingkat kabupaten/kota telah terbentuk 100%, sedangkan Puskessos-SLRT tingkat desa/kelurahan baru mencapai 405 Puskessos-SLRT.

Tabel 2.127.
Pembentukan SLRT Desa/Kelurahan s/d TAhun 2021

Sumber Dana	Pembentukan Puskessos-SLRT Desa/Kelurahan
APBN	64
APBD Prov	127
APBD Kab/Kota	214
Total	405

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

e. Pemberian Bantuan Sosial dan Ekonomi

Dalam hal pemberian bantuan sosial (bansos) dalam upaya penanganan PPKS di Jawa Tengah, dihadapkan pada kondisi data penerima bansos by name by address yang belum valid dan akurat sehingga terjadi exclusion error dan inclusion error. Masalah lain terkait data adalah adanya jarak waktu antara data penetapan sasaran dengan pelaksanaan bansos sehingga sering terjadi keterserapan/realisasi pelaksanaan bansos tidak mencapai 100 persen yang disebabkan karena perubahan secara alami penduduk seperti meninggal dunia, pindah alamat, menjadi mampu atau telah mendapat bantuan lain. Beberapa jenis bansos yang diberikan antara lain Kartu Jateng Sejahtera (KJS), program keluarga harapan (PKH), serta bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari DBHCHT dan DID. Pada tahun 2022, KJS menjadi program dengan tingkat keterserapan terendah dibanding dengan program bansos lainnya, dimana pada tahap II dan III serapannya hanya sekitar 75 persen dari total sasaran yang RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 / Bab II - 136 seharusnya disalurkan.Sementara PKH, BLT DBHCHT, BLT DID sudah cukup baik mendekati angka 100%.

Tabel 2.128.
Keterserapan Bansos Tahun 2022

Tahap	PKH			DBHCHT (BLT Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok) 2022			BLT DID 2022			KIS 2022		
	Quota KPM	Realisasi	%	Quota KPM	Realisasi	%	Quota KPM	Realisasi	%	Quota KPM	Realisasi	%
Tahap I	1.707.511	1.688.044	98,86	71.000	69.090	97,31	71.745	70.557	98,34	12.764	10.252	80,32
Tahap II	1.622.754	1.592.052	98,11	71.000	70.445	99,22	-	-		12.764	9.804	76,81
Tahap III	1.603.536	1.591.558	99,25	-	-	-	-	-		12.764	9.525	74,62
Tahap IV	1.681.053	1.593.651	94,80	-	-	-	-	-		12.764	11.539	90,40

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Upaya lain dalam penanganan PPKS adalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin melalui pemberian modal usaha sebagai dukungan dalam mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP), namun sampai dengan tahun 2022 karena berbagai permasalahan diantaranya belum maksimalnya sinergi dan kolaborasi program dan kegiatan antar OPD sehingga program ini belum optimal. Total saat ini terdapat 2.839 KUBE di Jawa Tengah dan sebanyak 1.745 KUBE telah mendapatkan bantuan baik melalui APBN, APBD, maupun donor asing, sisanya sebanyak 1.094 KUBE belum mendapatkan bantuan.

Tabel 2.129.
Data KUBE Di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
A.	**Total KUBE di Jawa Tengah**	**2.839**
1	Akumulasi KUBE yang sudah mendapat bantuan APBN / APBD/Donasi	**1.745**
	a. KUBE yang sudah mendapat bantuan APBN / APBD	1.196
	b. KUBE yang mendapat bantuan APBD TA 2022	30
	c. Bantuan kepada KUBE dari Pemerintah Australia (Queensland) 2022	528
2	KUBE belum mendapatkan bantuan	**1.094**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

2.4.8 Tenaga kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Agustus 2021 sebesar 5,95 persen turun sebesar 0,53 poin dari kondisi TPT pada Agustus 2020 yang sebesar 6,48 persen. Bulan Agustus 2022 TPT di Jawa Tengah sebesar 5,57 persen, turun sebesar 0,38 point dibandingkan Bulan Agustus 2021. Di tingkat nasional TPT Januari 2022 lebih besar dari Jawa Tengah yaitu sebesar 5,86 persen turun sebesar 0,63 point dibandingkan edngan TPT Nasional bulan Agustus 2021.

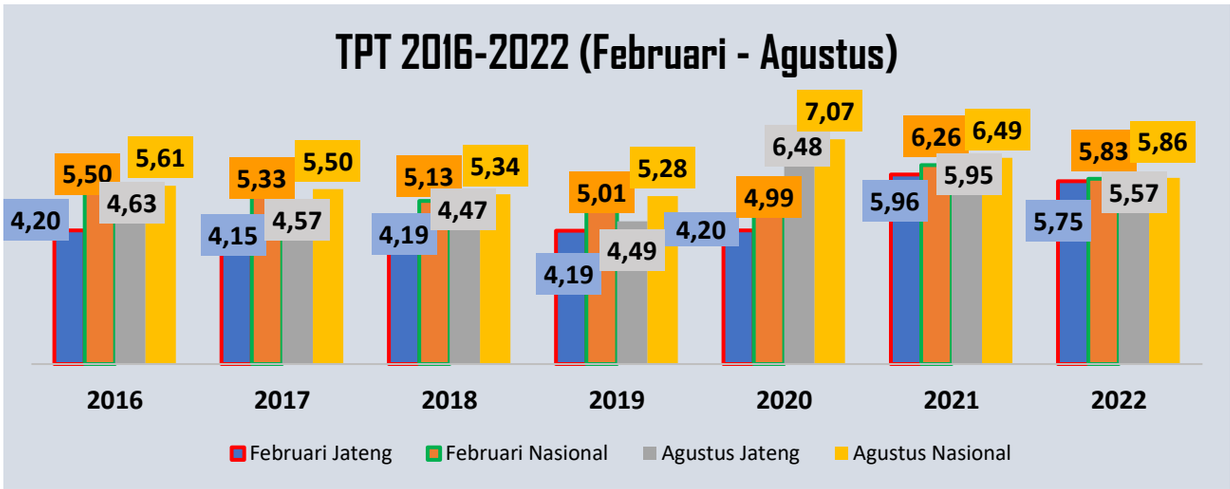

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.67.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – Agustus 2022 (%)

Salah satu imbas dari persoalan kependudukan dan dihadapi hampir di semua wilayah adalah pengangguran. Bahkan di negara maju pun pengangguran masih menjadi masalah serius. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut rendah. Tingkat tenaga kerja yang tinggi tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai menambah beban persoalan yang ada. Struktur ketenagakerjaan di Jawa Tengah tahun 2022 menurut BPS, diperlihatkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.68.
Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2022

Dari 36,74 juta jiwa penduduk Jawa tengah, 27,49 juta jiwa merupakan penduduk usia kerja dengan jumlah Angkatan Kerja (AK) sebesar 19,47 juta orang. Dimana sebanyak 18,39 juta orang bekerja dan 1,08 juta orang pengangguran. Meskipun jumlah bekerja lebih banyak dibandingkan pengangguran, namun secara kualitas perlu mendapatkan perhatian khusus. Mengingat karakteristik penduduk bekerja di Jawa Tengah mendasarkan tingkat pendidikan sebagaimana gambar berikut:

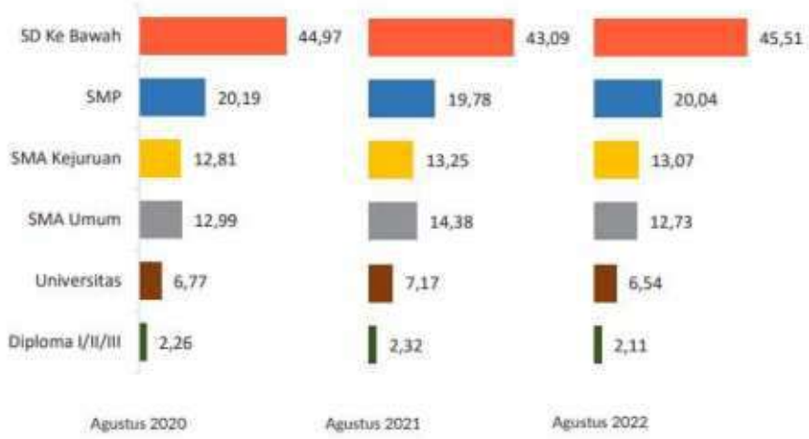

Sumber:

Gambar 2.69.
Karakteristik Penduduk bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agustus 2022

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2022 TPT tertinggi berasal dari lulusan SMK sebesar 8,42 persen, meskipun menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 10,00 persen. TPT untuk lulusan SD ke bawah justru mengalami kenaikan dari sebelumnya 3,70 persen di tahun 2021 menjadi 4,59 persen di tahun 2022. TPT terendah berasal dari lulusan Diploma yang sebesar 2,95 persen.

Tabel 2.130.
TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%)

No.	Tahun	Tingkat Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SMK	Diploma	Univ
1.	2018	2,14	4,62	6,50	10,60	3,64	5,47
2.	2019	2,09	4,64	6,26	9,92	3,59	5,44
3.	2020	3,70	6,40	8,41	13,20	6,46	7,01
4.	2021	3,70	6,87	7,32	10,00	5,66	5,62
5.	2022	4,59	5,55	7,21	8,42	2,95	4,02

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

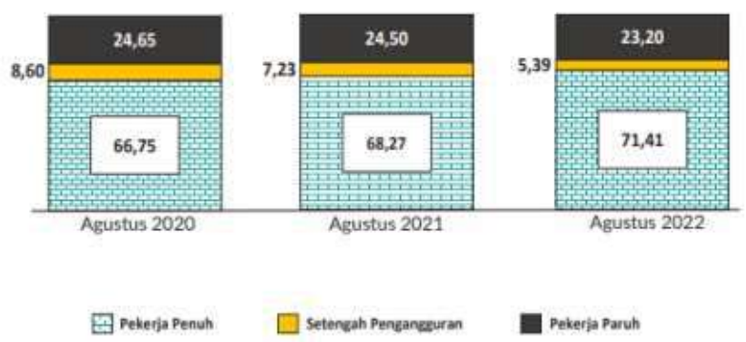

Gambar 2.70.
Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022 (%)

Pada tahun 2022 71,41 persen penduduk bekerja Jawa Tengah merupakan pekerja penuh waktu, 23,20 persen merupakan pekerja paruh waktu dan 5,39 persen merupakan setengah pengangguran. Dibandingkan dengan tahun 2021, pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan sebesar 1,84 persen poin dan 1,30 persen poin. Setengah pengangguran dan pekerja tidak penuh waktu merupakan pekerja yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dan masih mencari atau menerima pekerjaan lain. Hal ini perlu menjadi perhatian karena menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah yang masih rendah.

Tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 57,11 juta rupiah, tertinggi dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 54,6 juta rupiah. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain di pulau Jawa, tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, namun masih diatas provinsi DI Yogyakarta.

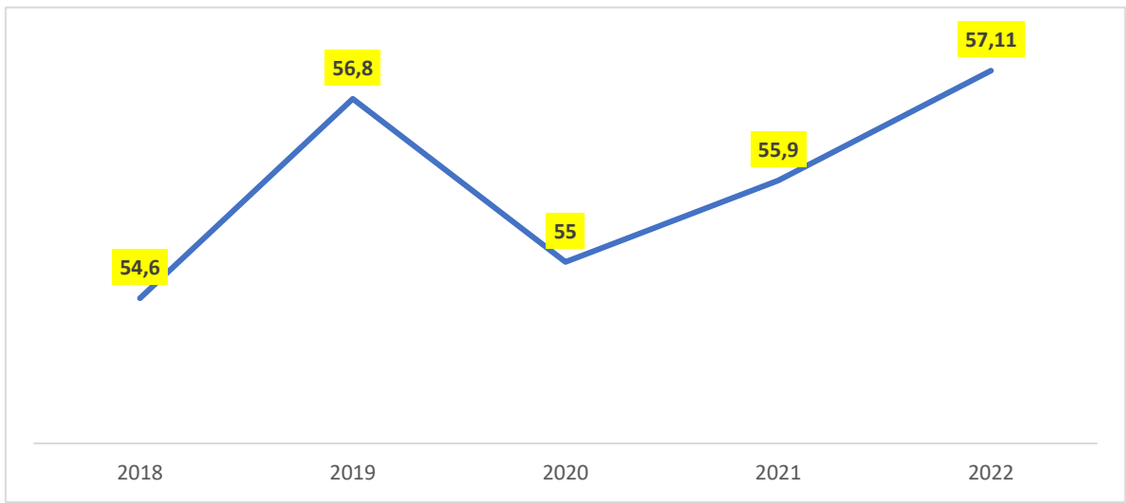

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023.

Gambar 2.71.
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah
Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

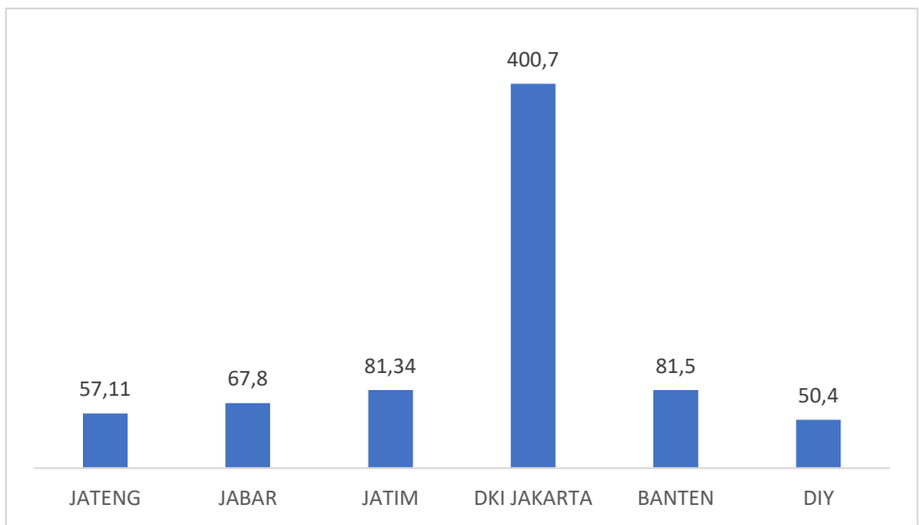

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023.

Gambar 2.72.
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2022 (Juta Rupiah)

Tingkat pendidikan penduduk bekerja di Jawa Tengah pada tahun 2022 masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah sebanyak 45,51%, hanya 8,65% merupakan penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke atas). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut pendidikan (BPS, Agustus 2022) ternyata paling tinggi berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 8,42%. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengingat filosofi adanya SMK agar para lulusan kejuruan sudah siap kerja atau bahkan sudah direkrut oleh dunia usaha atau industri sebelum lulus. Sehingga perlu dicari apa penyebab mendasar dari kondisi itu. Apakah karena ketidakseimbangan antara demand dan supply atau terjadinya asimetri antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.

Rasio kesempatan kerja pada tahun 2022 sebesar 66,90% naik 1,45 persen poin dibanding dengan tahun 2021 dan 1,97 persen poin dibanding dengan tahun 2020. Rasio kesempatan kerja yang naik ini menandakan bahwa peluang penduduk usia kerja yang bekerja semakin meningkat, dan menandakan juga semakin baiknya kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Adanya peningkatan kesempatan kerja merupakan suatu indikator yang penting karena hal itu dapat diartikan bahwa permintaan terhadap tenaga kerja pada pasar kerja dapat dipenuhi.

Tabel 2.131.
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1.	2018	17 245 548	26.340.000	69,21
2.	2019	17.440.000	26.610.000	69,22
3.	2020	17.540.000	27.010.000	64,93
4.	2021	17.835.770	27.253.914	65,45
5.	2022	18.390.459	27.490.000	66,90

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang selalu naik. Pada tahun 2022 TPAK sebsar 70,84% naik sebanyak 1,26 persen poin dibanding dengan TPAK tahun 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang selalu naik menandakan bahwa pasokan tenaga kerja (labour supply) di Jawa Tengah yang tersedia semakin tinggi dan mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi semakin naik. TPAK yang tinggi ini harus diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang luas juga agar tidak berdampak negatif terhadap peningkatan angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah.

Tabel 2.132.
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Penduduk Usia Kerja (orang)	Angkatan Kerja*)	TPAK (%)
1.	2018	26.340.000	18.228.952	68,81
2.	2019	26.610.000	18.421.193	68,85

No	Tahun	Penduduk Usia Kerja (orang)	Angkatan Kerja*)	TPAK (%)
3.	2020	27.010.000	18.751.277	69,43
4.	2021	27.250.000	18.963.993	69,58
5.	2022	27.490.000	19.474.934	70,84

Sumber: BPS 2022 diolah dari Sakernas
*Keterangan : *) data per Agustus tahun bersangkutan*

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2017-2019 cenderung meningkat. Namun di tahun 2020 kondisinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana di tahun 2019 sebesar 70,27 persen menjadi 37,07 persen di tahun 2020. Kondisi ini merupakan salah satu dampak terjadinya pandemi Covid-19 dimana perekonomian terpuruk akibat pandemi. Namun di tahun 2021 mulai kembali meningkat sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah. Untuk itu ke depan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja.

Tabel 2.133.
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%)

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2018	240.246	167.247	69,61
2019	300.098	210.889	70,27
2020	220.763	81.835	37,07
2021	269.810	136.611	50,63
2022	322.041	227.088	70,52

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

Tabel 2.134.
Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Perusahaan (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Peserta Program Jamsostek
1	2018	56.574	1.698.265
2	2019	69.866	1.781.754
3	2020	76.196	1.908.465
4	2021	83.511	2.003.518
5	2022	89.016	3.196.431

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Kepesertaan pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) mengikuti program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) berfluktuasi selama tahun 2018-2022. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dan kemudian mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2022, hal ini dikarenakan pertambahan dari sektor informal seperti

pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan), Perum Perhutani (LMDH Kehutanan), Perangkat Desa (ASN/Non ASN), dan sebagainya. Selanjutnya mengalami penurunan sangat signifikan pada tahun 2021 menjadi 310.785 orang disebabkan dampak pandemi Covid-1.

Tabel 2.135.
Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang) Peserta Program Jamsostek
1	2018	1.465.847
2	2019	1.378.435
3	2020	892.866
4	2021	310.785
5	2022	1.192.763

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Jumlah kasus Hubungan Industrial (HI) selama tahun 2017-2021 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017, jumlah kasus hubungan industrial sebanyak 1.927 kasus yang 100 persen terselesaikan. Tahun-tahun berikutnya jumlah kasus terus menurun sejalan dengan meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Sehingga di tahun 2021, jumlah kasus yang terjadi sebanyak 35 kasus yang 100 persen dapat terselesaikan.

Tabel 2.136.
Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status
1	2018	265	100% terselesaikan
2	2019	124	100% terselesaikan
3	2020	96	100% terselesaikan
4	2021	35	100% terselesaikan
5	2022	66	100% terselesaikan

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Not in Employment, Education or Training (NEET) adalah penduduk usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan (sekolah), dan tidak dalam pelatihan. Jumlah NEET di Jawa Tengah relatif meningkat sejak tahun 2017 dari 1.044.465 orang menjadi 1.205.564 orang pada tahun 2019, demikian pula pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.298.297 orang. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.097.209 orang. Hal tersebut menandakan bahwa dalam masyarakat masih terdapat sekelompok orang yang mempunyai ketergantungan secara permanen pada orang tua dan dapat menjadi beban ekonomi keluarga.

Tabel 2.137.
Jumlah *Not in Employment, Education or Training (NEET)* di Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah *NEET* (orang)	Penduduk Usia Kerja Muda	Persentase
1	2018	1.171.567	5.521.380 orang	21,21
2	2019	1.205.564	5.524.810 orang	21,82
3	2020	1.298.297	5.407.899 orang	24,00
4	2021	1.097.209	5.388.228 orang	20,36
5	2022	562.474	2.751.828 orang	20,44

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun oleh perusahaan selama periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Tabel 2.138.
Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Tahun 2018 - 2022

No	Tahun	Jumlah *Peraturan Perusahaan (PP)*	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
1	2018	4.857	830
2	2019	3.967	579
3	2020	4.230	614
4	2021	4.540	661
5	2022	4.641	661

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 menunjukkan perbaikan. Terdapat 19 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di bawah capaian provinsi dan nasional (peta warna hijau), terdapat 3 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di antara capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah (peta warna kuning), dan terdapat 13 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di atas capaian nasional (peta warna merah)

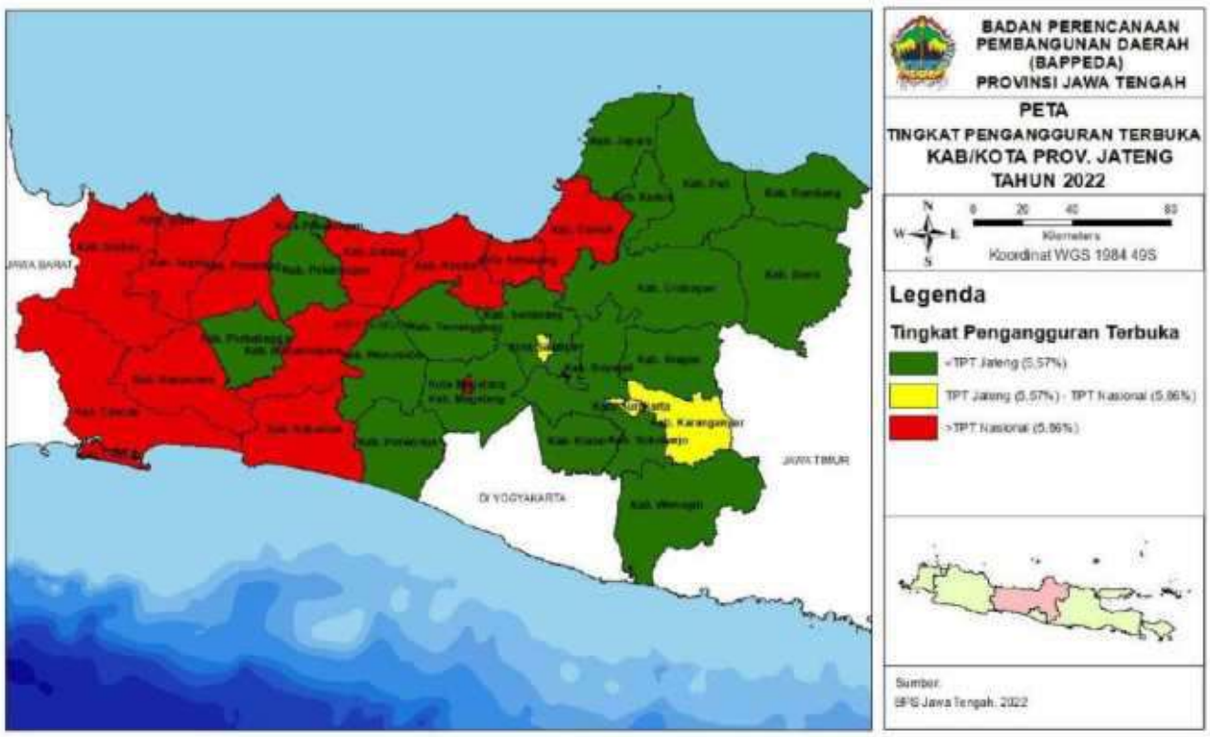

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023. Diolah.

Gambar 2.73.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

2.4.9 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es dimana kejadian yang tampak dipermukaan (terlapor) tidak sebanding dengan kejadian sesungguhnya yang diperkirakan jauh lebih tinggi. Adanya budaya malu dan takut melapor karena bisa dianggap aib menjadi kendala di masyarakat sehingga ini perlu terus didorong untuk memberikan penyadaran dan keberanian kepada masyarakat utamanya kaum perempuan dan anak. Upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan baik berupa advokasi, sosialisasi maupun pelatihan kepada SDM yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan. Upaya ini telah memberikan dampak positif pada penurunan rasio kasus maupun rasio korban kekerasan. Periode 2018-2022, tercatat rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 7,47 di tahun 2022, menurun dibanding tahun 2018 yang sebesar 8,2. Demikian juga dengan rasio korban kekerasan yang turun dari 8,44 di tahun 2018 menjadi 8,10 di tahun 2022. Sementara itu, Rasio korban kekerasan terhadap peremuan juga mengalami penurunan dari 5,93 di tahun 2018 menjadi 4,38 di tahun 2022, sedangkan rasio korban kekerasan terhadap anak turun dari 12,76 di tahun 2018 menjadi 10,33 di tahun 2022. Angka tersebut meskipun telah mengalami perkembangan yang positif tetap perlu mendapat perhatian serius dimasa mendatang mengingat angkanya yang masih cukup tinggi.

Tabel 2.139.

Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Tahun	Rasio Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk)	Rasio Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk)	Rasio Korban Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk)	Rasio Korban kekerasan terhadap anak (per 100.000 penduduk)
2018	8,2	8,44	5,93	12,76
2019	7,78	8,25	5,89	12,44
2020	8,49	8,99	5,75	12,15
2021	8,35	8,97	5,11	11,02
2022	7,47	8,10	4,38	10,33

Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id | AplikasiSimfoni-PPA 2022

Sementara itu, upaya pemenuhan hak anak secara umum telah mencapai tahap yang cukup menggembirakan jika dilihat dari capaian program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), meskipun berbagai persoalan pemenuhan hak dan perlindungan anak masih menjadi tantangan untuk dipecahkan. Sampai dengan tahun 2022 secara bervariasi sesuai tingkatkan penghargaan tercatat sudah 100 persen kabupaten/kota memperoleh penghargaan KLA (kategori pratama, madya, nindya dan utama). Sehingga diharapkan ke depan progam KLA tidak hanya sebatas kegiatan memperoleh penghargaan semata tetapi secara riil dapat berdampak pada pemenuhan hak anak. Kota Surakarta merupakan satu-satunya Kota di Jawa Tengah yang telah memperoleh penghargaan tertinggi kategori Utama.

Tabel 2.140.

Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Di Jawa Tengah Tahun 2022

Pratama	Madya	Nindya	Utama
Pati, Banyumas, Purworejo, Blora, Kudus, Purbalingga, Banjarnegara, Semarang, Jepara dan Kendal	Temanggung, Tegal, Boyolali, Demak, Pemalang, Wonogiri, Wonosobo, Kota Magelang, Kebumen, Batang, Sukoharjo, Karanganyar, Kota Pekalongan, Grobogan, Klaten, Kota Salatiga, Pekalongan	Rembang, Kota Semarang, Cilacap, Brebes, Sragen, Kota Tegal, Magelang	Kota Surakarta

Dari sisi jenis kekerasan yang dialami perempuan dan anak, paling banyak yang dialami oleh perempuan dewasa adalah kekerasan fisik, psikis dan seksual. Sementara pada anak tertinggi adalah kekerasan seksual disusul psikis dan fisik. Jenis kekerasan yang dialami perempuan yang perlu mendapat perhatian dimana angkanya terus meningkat yaitu kekerasan seksual, eksploitasi dan lainnya, Sedangkan pada anak yang perlu mendapat perhatian antara lain psikis, seksual dan eksploitasi.

Tabel 2.141.
Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan dan Anak 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jenis kekerasan yang dialami korban perempauan dewasa:					
Fisik	565	604	484	539	495
psikis	409	438	297	372	405
seksual	122	146	126	145	186
penelantaran	201	203	119	135	117
trafficking	38	1	5	10	2
eksploitasi	8	2	0	7	9
lainnya	43	44	26	47	60
Total	**1.386**	**1.438**	**1.057**	**1.255**	**1.274**
Jenis kekerasan yang dialami korban anak:					
Fisik	324	293	205	204	193
psikis	306	312	296	327	361
seksual	734	700	789	807	748
penelantaran	91	85	58	66	84
trafficking	48	8	8	16	7
eksploitasi	5	9	15	9	30
lainnya	85	51	56	72	72
Total	**1.593**	**1.458**	**1.427**	**1.501**	**1.495**

Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id | AplikasiSimfoni-PPA 2022

Isu lain terkait anak adalah mengenai perkawinan anak, data I tahun 2022 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Jawa Tengah sebanyak 11.366 kasus, tertinggi berada di Kabupaten Grobogan (808 kasus) dan terendah di Kota Salatiga (21 kasus). Data tersebut menurun dibanding tahun 2021 yang sebesar 13.595 kasus. Perkawinan anak dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental, khususnya pada anak perempuan jika segera diikuti dengan kehamilan. Selain melahirkan, norma yang masih banyak berlaku di masyarakat memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada istri untuk mengasuh anak dan mengelola rumah tangga. Di sisi lain, norma sosial mengenai peran laki-laki dalam keluarga dapat menyebabkan suami yang masih berusia muda rentan mengalami tekanan mental jika tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya. Tekanan ini dapat memicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga dan perceraian.

Tabel 2.142.
Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2018	1.942	1.264	3.206
2019	1.513	3.726	5.239
2020	1.671	11.301	12.972
2021	1.909	11.686	13.595
2022	1.850	9.516	11.366

Sumber: DP3AP2KB dan Kemenag, 2022

2.4.10 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pembangunan kependudukan ke depan dihadapkan pada tantangan mengimplementasikan sinergitas pembangunan kependudukan lima pilar yaitu pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, serta penataan data dan informasi kependudukan termasuk administrasi kependudukan. Implementasi ini kian sulit terwujud manakala capaian kab/kota yang seharusnya telah menyusun Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) masih belum 100% di Jawa Tengah. Rakapitulasi data Kab/Kota di Jawa Tengah yang telah menyusun GDPK sampai dengan tahun 2022 baru tercatat 14 Kab/kota yaitu Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Blora, Kabupaten Brebes.

Sementara itu, upaya menggalakkan kembali program keluarga berencana perlu untuk terus dilakukan mengingat beberapa indicator terkait KB masih perlu ditingkatkan kinerjanya. Hal ini terindikasi dari capaian indikator Contraceptive Prevalence Rate (CPR) yang mengalami tren penurunan, tercatat tahun 2018 sebesar 74,69% menjadi 70,53% di tahun 2022. Tahun 2022, CPR membaik dibanding tahun 2021 tercatat naik sebesar 0,18 point. Meski demikian, angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) justru mengalami tren yang sama yaitu turun dari 2,4 menjadi 2,15. TFR tahun 2022 perlu diwaspadai karena adanya kenaikan sebesar 0,06 point yang menandakan bahwa angka kelahiran tetap mengalami peningkatan meskipun unmetneed telah turun menjadi 11,60 di tahun 2022 atau turun 2,69 point dibanding dengan tahun 2021. Tingginya kelahiran yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan akan berisiko pada rendahnya kualitas SDM dimasa mendatang.

Tabel 2.143.
Perkembangan CPR, TFR dan *Unmetneed* 2018-2022

Tahun	CPR	TFR	*Unmet Need*
2018	74,69	2,4	13,59
2019	73,48	2,23	13,03
2020	73,26	2,27	12,90
2021	70,35	2,09	14,29
2022	70,53	2,15	11,60

Sumber: BKKBN dan DP3AP2KB Prov.Jateng, 2022

Tri bina memiliki peranan penting dalam pembangunan keluarga. Melalui tri bina (Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR dan Bina Keluarga Lansia/BKL) diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orang tua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita, remaja dan mempersiapkan kelak di masa lansia agar tetap memiliki produktifitas. Data perkembangan BKB, BKR dan BKL menunjukkan tren yang menurun baik jumlahnya maupun keaktifannya, ini menjadi tantangan ke depan untuk bagaimana meningatkan Tri Bina ini lebih berkembang dan berkualitas.

Tabel 2.144.
Perkembangan Tri Bina 2018-2022

Tahun	BKB			BKR			BKL Jateng		
	Jumlah	Aktif	%	Jumlah	Aktif	%	Jumlah	Aktif	%
2018	12.717	12.204	95,97	6.418	6.236	97,16	8.673	8.273	95,39
2019	19.465	11.473	58,94	10.268	6.145	59,85	13.496	7.948	58,89
2020	11.071	10.533	95,14	5.947	5.921	99,56	7.763	7.696	99,14
2021	10.473	10.338	98,71	5.860	5.794	98,87	7.804	7.724	98,97
2022	9.184	9.049	98,53	5.490	5.311	96,74	7.180	7.010	97,63

Sumber: BKKBN dan DP3AP2KB Prov.Jateng, 2022

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena data penduduk wajib KTP yang sangat dinamis, setiap harinya terdapat penambahan penduduk wajib KTP. Peningkatan layanan kependudukan melalui perekaman, penerbitan KTP dan mendekatkan layanan terus didorong dalam rangka mewujudkan target semua penduduk wajib KTP memiliki identitas resmi penduduk. Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran Kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2019 meningkat dari 87,42 persen menjadi 96,09 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 83,16 persen. Tingkat kepemilikan akte kelahiran kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 99,01 persen. Peningkatan yang signifikan tersebut disebabkan karena pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik serta adanya inovasi yang dilakukan di kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan 1 (satu) hari jadi, pelayanan 3 in 1 (three in one), bayi lahir pulang dari rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, sms gateway, dan layanan online. Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari jumlah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tahun 2021, sebanyak 24 antara lain, Dinas Sosial, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pandapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, RS Karyadi, RSJD Surakarta, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balkesmas Provinsi, Balkesmas Pati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPR BKK Jawa Tengah, RS Panti Wiloso,

RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.4.11 Kepemudaan dan olahraga

Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai kekuatan utama berupa daya piker revolusioner, kreatif, agresif, inovatif, dan produktif sehingga mampu memunculkan ide-ide konstruktif dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa. Pemuda merupakan kekuatan moral, control social, dana gen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dimaksud dengan pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 16-30 Tahun. Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2022, jumlah pemuda di Jawa Tengah mencapai 7,97 juta jiwa.

Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Jawa Tengah. Permasalahan terkait pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan di Jawa Tengah yang perlu mendapat perhatian serius. Pengangguran dapat menjadi sumber utama kemiskinan, mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Jawa Tengah merupakan persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan dan tidak sedang mempunyai pekerjaan. TPT Pemuda Jawa Tengah tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif. TPT pemuda Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar 11,87%, terus mengalami penuruan dari Tahun 2020.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari banyaknya jumlah pemuda yang bekerja. Salah satu indikator kemandirian pemuda dapat dilihat dari persentase Pemuda yang berusaha sendiri/berwirausaha. Dengan adanya kewirausahaan pemuda diharapkan mampu menciptakan lapangan usaha sendiri, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesempatan bekerja. Tingginya jumlah pemuda yang berstatus sebagai buruh/karyawan menggambarkan masih rendahnya kewirausahaan di kalangan Pemuda Jawa Tengah. Persentase pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020. Di sisi lain persetase pemuda yang berusaha sendiri mengalami peningkatan dari Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pemuda yang berusaha sendiri/berwirausaha, dan masih tingginya pemuda yang bekerja sebagai buruh/karyawan. Perkembangan Kepemudaan di Jawa Tengah tergambarkan pada tabel di bawah ini

Tabel 2.145.
Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Jumlah Pemuda di Jawa Tengah (Juta Jiwa)	7,84	7,79	7,75	7,77	7,97
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda	12,33	11,87	14,83	13,23	11,87
Persentase pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan	55,36	60,91	54,18	58,21	Na

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Persentase pemuda yang berusaha sendiri	12,05	12,31	11,83	12,05	Na
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53,50	54,50	53,67	50,67	Na

Sumber: 1. BPS 2023

2. BPS Provinsi Jawa Tengah 2023)

Keterangan : Sebagian data Tahun 2022 belum dirilis (Statistik Pemuda Jawa Tengah)

Olahraga merupakan jati diri bangsa dan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Peran olahraga di antaranya bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Perkembangan prestasi olahraga di Jawa Tengah salah satunya dapat diukur dari peringkat pada kejuaraan tingkat nasional melalui Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) bagi atlet penyandang disabilitas. Pelaksanaan kejuaraan PON dan PEPARNAS dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali. Perkembangan prestasi atlet Jawa Tengah pada perhelatan PON mengalami fluktuatif dari Tahun 2012-2021 yaitu menduduki peringkat 4 pada Tahun 2012, meningkat keperingkat 2 pada Tahun 2016, namun mengalami penurunan cukup siknifikan pada Tahun 2021 pada peringkat 6 nasional. Sedangkan prestasi olahraga Jawa Tengah pada kejuaraan PEPARNAS terus mengalami penurunan dari Tahun 2021-2021. Perkembangan prestasi olahraga Provinsi Jawa Tengah pada kejuaraan tingkat Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.146.
Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah
pada Kejuaraan Tingkat Nasional

Kejuaraan	Peringkat		
	Tahun 2012	Tahun 2016	Tahun 2021
Pekan Olahraga Nasional (PON)	4	2	6
Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS)	1	2	3

Sumber: DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Olahraga menjadi bagian penting dari kebijakan publik perlu mendapatkan pengaturan, termasuk dalam menentukan ukuran keberhasilannya. Dalam UU No. 3 Tahun 2005 yang kemudian diganti menjadi UU No. 11 Tahun 2022, tujuan olahraga bersifat majemuk yang mencakup kesehatan fisik dan psikis, karakter etos dan moral, ekonomi, sosial, budaya, dan martabat bangsa. Tujuan tersebut perlu diukur guna memastikan sudah sampai di mana upaya kita mewujudkan tujuan tersebut. *Sport Development Index* (SDI) merupakan instrumen untuk mengukur sekaligus instrumen kebijakan untuk mendinamisasi dan mengoptimalisasi pembangunan olahraga. Pada tahun 2021 dimensi SDI terdiri dari SDM, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi, dan performa.

Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan fluktuatif, dari Tahun 2019-2022 sebagaimana pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.147.

Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022

Tahun	Angka *Sport Development Index* (SDI) Jawa Tengah
2019	0,55
2020	0,60
2021	0,34
2022	0,37

Sumber: Laporan Nasional Sport Development Index (SDI) Kemenpora Tahun 2022

2.4.12 Perpustakaan

Literasi merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. Literasi melibatkan rangkaian pembelajaran yang memungkinkan individu untuk dapat mencapai tujuan mereka, mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, serta berpartisipasi penuh dalam masyarakat luas. Peradaban yang berliterasi selalu ditandai dengan kepedulian yang tinggi terhadap perpustakaan. Perpustakaan 8selalu menjadi transportasi literasi ketika suatu peradaban mencapai puncak keemasan. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang peradaban manusia tidak dapat lepas dari perpustakaan. Oleh karenanya, perpustakaan memegang peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan perpustakaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berikut merupakan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah.

Tabel 2.148.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022

Unsur Pembentuk Literasi Masyarakat (UPLM)	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1)	0,00140	0,00080	0,00066	0,0033
Ketercukupan Koleksi (UPLM 2)	0,05210	0,06760	0,04780	1,5831
Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3)	0,00000	0,00000	0,00003	0,0045
Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari (UPLM 4)	0,00020	0,00050	0,00057	0,3342
Perpustakaan ber-SNP (UPLM 5)	0,00000	0,00000	0,00006	2,3270
Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM 6)	0,03270	0,03380	0,03249	0,2727
Anggota Perpustakaan (UPLM 7)	0,03040	0,03260	0,03160	0,6471

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	**11,68**	**13,54**	**11,33**	**15,62**

Sumber: Perpusnas 2019 - 2022

Sumber: Perpusnas, 2020

Gambar 2.74.
Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 13,54 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 11,33. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena literasi masyarakat merupakan salah satu pembentuk karakter sumber daya manusia.

Tabel 2.149.
Koleksi Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Koleksi	2018		2019		2020		2021		2022	
		Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks
1	Koleksi Perpustakaan Provinsi dan Keliling	1.028.856	1.805.519	1.053.825	1.906.840	1.061.697	1.920.846	1.111.585	1.914.474	1.190.688	2.092.799
2	Koleksi e-book	20.672	12.6913	50.085	235.236	75.998	452.112	68.802	516.436	79.949	527.485
3	Koleksi Khusus untuk pemustaka berkebutuhan khusus	3.545	6.697	8.462	16.096	9.165	17.618	10.756	19.665	4.480	6.525
	TOTAL	**1.053.073**	**1.939.129**	**1.112.372**	**2.158.172**	**1.146.860**	**2.390.576**	**1.184.867**	**2.437.435**	**1.275.117**	**2.626.809**

Sumber: Dinas Kersipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Koleksi pada 36 Perpustakaan Umum Daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan perpustakaan keliling (perpusling) pada tahun 2018 sebanyak 1.028.856 judul, kemudian perlahan meningkat menjadi 1.190.688 tahun 2022. Sedangkan untuk koleksi e-book pada tahun 2018 semula sejumlah 20.672 judul menjadi 79.949 judul pada tahun 2022.

Sedangkan untuk pengunjung pada 36 Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2020-2021 mengalami tren penurunan. Kondisi

ini antara lain disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 dimana diterapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga kunjungan perpustakaan mulai 2020 jumlahnya menurun.

Tabel 2.150.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Orang)

NO	Tahun	Pengunjung
1	2018	5.611.358
2	2019	5.871.814
3	2020	3.160.335
4	2021	3.131.755
5	2022	4.891.435

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Menurut survei yang dilakukan oleh Perpusnas pada tahun 2021 meningkatnya koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ternyata belum berbanding lurus dengan persentase koleksi yang dipinjam per tahun yang hanya berada di kisaran 13,5 persen, hal ini menunjukkan bahwa koleksi bahan Pustaka baik fisik maupun digital yang ada belum secara optimal dimanfaatkan oleh pemustaka. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penilaian kegemaran membaca masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 61.88 atau termasuk kategori sedang. Menunjukkan bahwa minat membaca masyarakat Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan.

Sumber: Perpusnas, 2020

Gambar 2.75.
Capaian Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat (NTGM) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020

2.4.13 Transmigrasi

Upaya sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi dilakukan melalui kerjasama dengan daerah transmigrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi lahan transmigrasi yang ideal yaitu 2C (*clean and clear*) dan 4L (Layak huni, Layak berkembang, Layak usaha, dan Layak lingkungan) bagi calon transmigran. Upaya kerjasama yang telah dilakukan adalah kerjasama den

gan 22 provinsi lokasi transmigrasi diluar Jawa yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan Utara, Aceh, dan Bangka Belitung. Kerjasama tersebut direalisasikan dengan penyusunan *MoU* antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 22 Provinsi tersebut.

Selama tahun 2016 – 2021, persentase penempatan transmigran Jawa Tengah cenderung meningkat. Tahun 2016 sebesar 13,26 persen menurun menjadi 10,23 persen di tahun 2019, dan sempat terjadi kekosongan penempatan transmigran di tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 dan di tahun 2021 menjadi sebesar 0,79 persen. Apabila dilihat dari animo masyarakat terhadap transmigrasi cukup baik namun terkendala kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga realisasi penempatannya tidak cukup besar setiap tahunnya.

Tabel 2.151.
Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Animo (KK)	Kuota Pusat (KK)	Jumlah Penempatan (KK)	Persentase
1	2018	2.246	170	169	7,52
2	2019	2.160	257	221	10,23
3	2020	1.263	0	0	0
4	2021	1.263	10	10	0,79
5	2022	Na	Na	Na	Na

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan transmigran sebagai bekal di daerah tujuan telah dilaksanakan pelatihan dan pembekalan pengetahuan mengenai kondisi tempat tujuan, budaya dan tradisi masyarakat setempat kepada calon transmigran yang dilakukan oleh Balai Latihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat (Balatranspenca) Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 pelatihan dasar umum calon transmigran dialihkan ke Balai Latihan Pertanian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Klampok, Banjarnegara. Di tahun 2021, Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Banjarnegara tidak lagi melatih calon transmigran. Namun demikian para calon transmigran dari Provinsi Jawa Tengah tetap mengikuti pelatihan di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPLM) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.5. Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan

Kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kebencanaan di Provinsi Jawa Tengah ditunjukan dari gambaran daya dukung dan daya tampung lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan perubahan iklim. Gambaran lainnya yang dapat menunjukan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup antara lain terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, kualitas lahan, rehabilitasi pesisir, pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan, kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB, pengelolaan sumberdaya energi dan mineral, dan penganggulangan bencana. ambaran kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kebencanaan diuraikan sebagai berikut.

2.5.1.Daya Dukung dan Daya Tampung

Keberadaan sumberdaya alam di bumi tidak tersebar merata sehingga daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh karena itu,

pemanfaatannya harus dijaga agar terus berkesinambungan dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus memperhatikan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, Indeks Jasa Penyedia Air, Jasa Penyedia Pangan, Jasa Pengaturan Air, Jasa Pengaturan Iklim, Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Perlindungan Bencana masih dalam rentang sedang, status D3T air terlampaui, dan D3T pangan belum terlampaui.

Pada Keputusan Menteri LHK No. SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional ditetapkan bahwa kondisi daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Jawa Tengah telah terlampaui yang mana ketersediaan air sebesar 31.032.527.608,75 m3/tahun dan kebutuhan atau pemanfaatan air sebesar 32.719.164.930,76 m3/tahun. Jika dilihat dari distribusi wilayah dengan status D3T air sudah terlampaui mencapai 47,55% dan yang belum terlampaui sebesar 52,45% dari total wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian dari hasil perhitungan secara nasional maka kondisi ketersediaan di Jawa Tengah mengalami defisit sebesar 1.686.637.322,01 m3/tahun. Berdasarkan pemetaan D3T air Jawa Tengah, maka terdapat 20 Kabupaten/Kota dengan status agregrat daya dukung dan daya tampung air terlampaui. Berikut distribusi daya dukung dan daya tampung air setiap kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

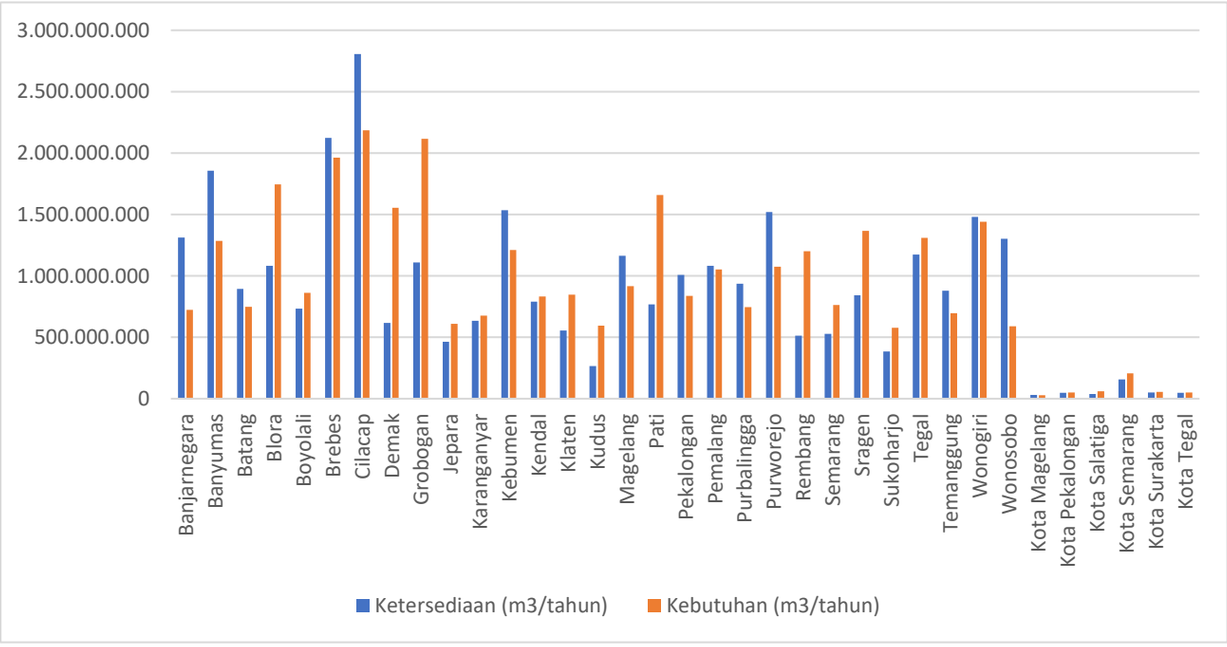

Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023

Gambar 2.76.
Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Air Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023

Gambar 2.77.
Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan grafik diatas wilayah Kota di Jawa Tengah cenderung melampaui ambang batas penduduk yang dapat didukung, hal ini disebabkan kondisi wilayah terkait jasa lingkungan hidup penyedia air tidak terlalu baik, tetapi disisi lain wilayah tersebut memiliki jumlah populasi yang banyak. Provinsi Jawa Tengah mengalami peninggkatan ketersediaan dan kebutuhan air. Hal ini disebabkan perubahan penutupan lahan di Jawa Tengah di ikuti dengan peningkatan jumlah populasi.

Selanjutnya Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan total ketersediaan 5.508.531,0 ton beras dan kebutuhan mencapai 2.792.243,71 ton beras sehingga kondisinya masih surplus sebesar 2.716.287,29 ton beras. Jika dilihat berdasarkan wilayahnya maka masih terdapat sekitar 11,38% yang daya dukung pangannya sudah terlampaui. Kondisi daya dukung pangan di setiap kabupaten/kota berbeda sesuai kondisi wilayah tersebut terutama penggunaan lahan dan jumlah penduduk. Jika dilihat di masing-masing kabupaten/kota maka seluruh kota daya dukung pangannya terlampaui. Berikut ditampilkan status daya dukung dan daya tampung pangan untuk setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah.

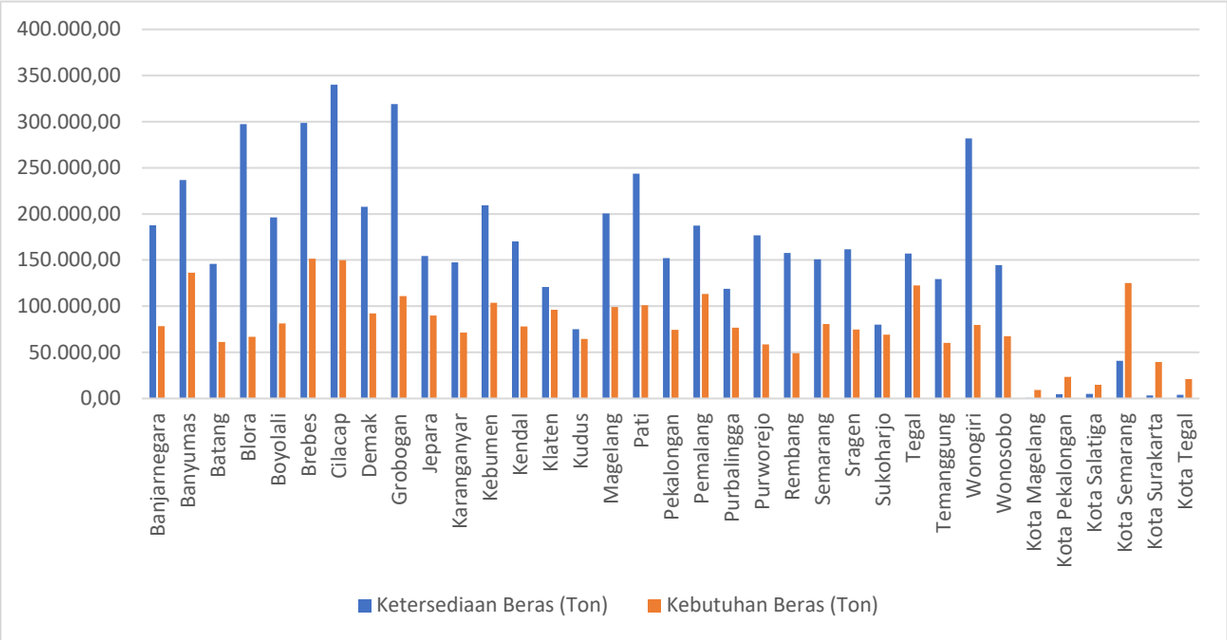

Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023

Gambar 2.78.

Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Pangan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023

Gambar 2.79.

Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah

2.5.2.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah secara umum menunjukkan peningkatan. Upaya perbaikan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan yang telah mengalami perbaikan.

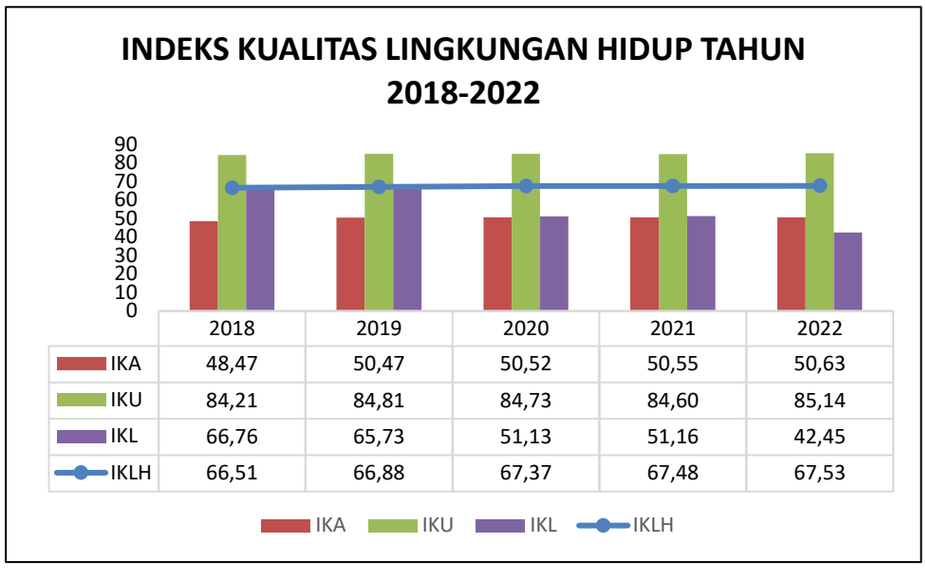

	2018	2019	2020	2021	2022
IKA	48,47	50,47	50,52	50,55	50,63
IKU	84,21	84,81	84,73	84,60	85,14
IKL	66,76	65,73	51,13	51,16	42,45
IKLH	66,51	66,88	67,37	67,48	67,53

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,2023

Gambar 2.80.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018–2022

Perkembangan capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 menunjukkan hasil cukup baik, dengan nilai capaian IKLH tahun 2018 sebesar 66,51 dan tahun 2022 sebesar 67,53 atau terjadi peningkatan sebesar 1,02 poin atau 1,53%. Hal ini mengindikasikan perbaikan kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah merupakan salah satu prioritas utama pembangunan.

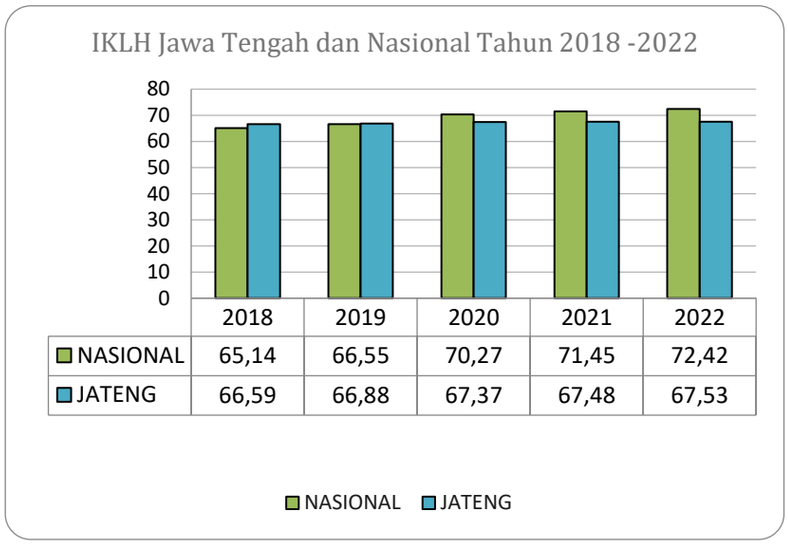

	2018	2019	2020	2021	2022
NASIONAL	65,14	66,55	70,27	71,45	72,42
JATENG	66,59	66,88	67,37	67,48	67,53

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Gambar 2.81.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018 - 2022

Nilai IKLH Nasional untuk tahun 2022 adalah 72,42 lebih tinggi dari nilai IKLH Jawa Tengah sebesar 67,53. Meningkatnya IKLH Nasional 2021 sebanyak 1,18 poin disebabkan adanya perbaikan IKU dan IKA Nasional. Nilai IKLH Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022. Jika dihadapkan dengan capaian IKLH Nasional, capaian IKLH Jawa Tengah pada Tahun 2018-2019 berada di atas capaian IKLH Nasional. Sedangkan tahun 2020-2021 capaian Jateng berada di bawah nasional.

Nilai IKLH dipengaruhi oleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diketahui bahwa perhitungan nilai

IKLH Provinsi mengalami perubahan nilai pembobotan dan penambahan indikator Indeks kualitas air laut (IKAL) dengan rumus sebagai berikut:

IKLH Provinsi = (0,34 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL)+ (0,099 x IKAL)

Perubahan metode perhitungan nilai IKLH berimplikasi terhadap perubahan nilai IKLH secara total, namun demikian tidak menurunkan target capaian akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah (2018-2023). Dalam rangka mendorong dan memperkuat pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon terutama aspek IKLH, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan target IKLH 2024 sebesar 67,55 (Kategori Sedang) dengan perincian nilai IKU = 85,01; Nilai IKA = 50,66; dan nilai IKL = 42,45, dengan menggunakan baseline data tahun 2022 didasarkan pada :

Perhitungan IKU menggunakan hasil pemantauan dari 2 stasiun AQMS Kota Surakarta dan Kota Semarang (semula hanya menggunakan hasil pemantauan 1 stasiun AQMS di Kota Semarang), sehingga ada penyesuaian terhadap baseline nilai IKU di tahun 2022 sebesar 84,96 dan indeks SO2 dan NO2 sebesar 0,3707.

Penambahan data titik sampel pemantauan kualitas air dari Kabupaten/ Kota sehingga menyebabkan penyesuaian terhadap baseline nilai indeks pencemar air di tahun 2022 sebesar 3,38. Namun perubahan angka tersebut tidak menyebabkan perubahan terhadap nilai IKA karena di dalam metode perhitungan IKA, nilai indeks pencemar air tersebut masih berada pada status mutu yang sama yaitu cemar ringan, sehingga dalam pembobotan nilai indeks dengan persentase status mutu masih sama.

Penetapan target IKLH Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024-2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan:

1) Peningkatan jumlah kejadian bencana akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan;
2) Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3) Berdasarkan SK Menlhk 297/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung air Nasional, terindikasi bahwa sejak tahun 2019 Jawa Tengah daya dukung air telah terlampaui sehingga perlu lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya air.
4) Kebijakan Nasional dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan iklim investasi di Jawa Tengah.

2.5.3.Perubahan Iklim

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perubahan iklim secara global. Perubahan iklim berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, seperti adanya bencana hidrometeorologi, perubahan musim dan kenaikan muka air laut. Penanganan dampak dari perubahan iklim dapat dilakukan melalui aksi mitigasi maupun aksi adaptasi guna meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah (dalam skala kecamatan) menunjukan hasil bahwa mayoritas kecamatan di Provinsi Jawa Tengah berada di kelas kerentanan sedang yaitu sebanyak 442

kecamatan atau 77%. Kecamatan dengan kerentanan kelas sangat rendah sebanyak 68 kecamatan atau 12%, sedangkan kecamatan dengan kelas kerentanan tinggi sebanyak 24 kecamatan atau 4%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Tengah saat ini cukup rentan terhadap perubahan iklim yang dikategorikan dari banyaknya kecamatan yang berada di kerentanan kelas sedang. Apabila dilihat dari kondisi geografis maka ancaman wilayah pesisir utara berupa kenaikan muka air laut dan peningkatan banjir dan rob. Kawasan dataran rendah berpotensi terjadi peningkatan banjir, dan dataran tinggi terutama yang memiliki lereng curam dan jenis tanah yang mudah longsor rentan terhadap bencana longsor. Sedangkan untuk pesisir selatan peningkatan cuaca ekstrem pada perairan laut akan meningkatkan ancaman terjangan gelombang laut terhadap aktivitas nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir.

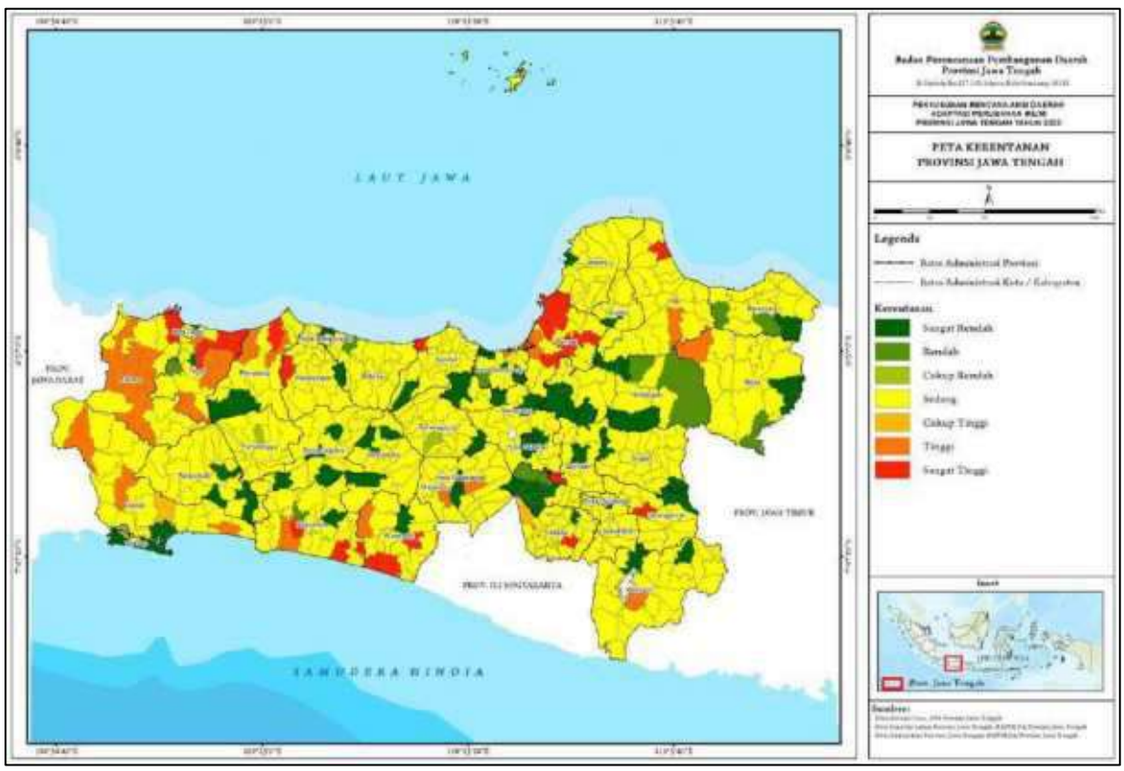

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.82.
Peta Kerentanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah sebesar 145.232,59 $GgCO_2eq$ dengan kontributor utama penyumbang emisi GRK Provinsi Jawa Tengah adalah sektor energi mencapai 73.018,72 $GgCO_2eq$ (50,28 persen), disusul oleh sektor limbah sebesar 47.859,49 $GgCO_2eq$ (32,95 persen). Selain menghasilkan emisi GRK, Provinsi Jawa Tengah mempunyai potensi dalam menyimpan cadangan karbon terutama berasal dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang mampu menyerap emisi sebesar 1.538,22 $GgCO_2eq$ (1,06 persen).

Tabel 2.152.
Besaran Emisi GRK Untuk Setiap Sektor Pada Tahun 2022

No	Sektor	Emisi ($GgCO_2eq$)	Persentase (%)
1	Energi	73.018,72	50,28
2	Pertanian	21.227,59	14,62

No	Sektor	Emisi ($GgCO_2eq$)	Persentase (%)
3	Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	4.665,01	3,21
4	Limbah	47.859,49	32,95
5	Kehutanan dan Penggunaan Lahan	-1.538,22	-1,06
	Total Emisi GRK	**145.232,59**	**100,00**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2023
**Keterangan: Perhitungan besaran emisi GRK tahun 2022, merupakan data tahun 2021 yang dihitung tahun 2022.*

Apabila dilihat dari tren pertumbuhan emisi GRK Provinsi Jawa Tengah terjadi peningkatan emisi dari tahun ke tahun, terutama dari sektor energi. Hal ini dikarenakan Jawa Tengah menjadi lokasi beberapa sumber pembangkit untuk wilayah Jawa dan Bali. Untuk itu kebijakan terkait pembangunan rendah karbon perlu menjadi prioritas di Jawa Tengah. Lonjakan kenaikan juga terdapat pada sektor limbah pada tahun 2020 karena adanya rekalkulasi akibat adanya data baru atau update data dari instansi atau OPD terkait.

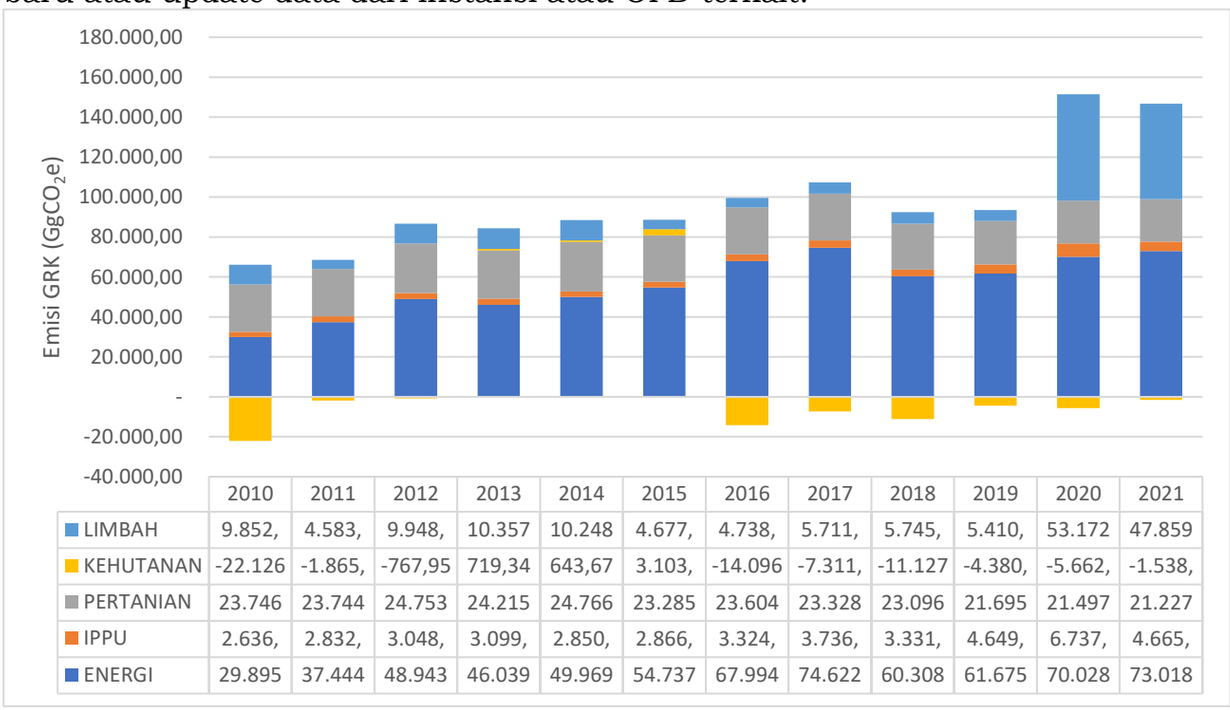

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
LIMBAH	9.852,	4.583,	9.948,	10.357	10.248	4.677,	4.738,	5.711,	5.745,	5.410,	53.172	47.859
KEHUTANAN	-22.126	-1.865,	-767,95	719,34	643,67	3.103,	-14.096	-7.311,	-11.127	-4.380,	-5.662,	-1.538,
PERTANIAN	23.746	23.744	24.753	24.215	24.766	23.285	23.604	23.328	23.096	21.695	21.497	21.227
IPPU	2.636,	2.832,	3.048,	3.099,	2.850,	2.866,	3.324,	3.736,	3.331,	4.649,	6.737,	4.665,
ENERGI	29.895	37.444	48.943	46.039	49.969	54.737	67.994	74.622	60.308	61.675	70.028	73.018

Sumber: SIGNSMART KLHK, 2023

Gambar 2.83.
Tren Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2021

Salah satu upaya dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim adalah Pembangunan Rendah Karbon. Pembangunan Rendah Karbon merupakan platform pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalisasi eksploitasi sumber daya alam. Strategi dan kebijakan di dalam Pembangunan Rendah Karbon merupakan aksi mitigasi yang melibatkan multi sektor dan multi pihak. Aksi-aksi mitigasi Pembangunan Rendah Karbon yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota dilaporkan ke dalam aplikasi AKSARA Bappenas.

Berdasarkan pelaporan yang dilakukan pada aplikasi AKSARA BAPPENAS, potensi penurunan emisi GRK Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2010-2022 adalah sebesar 39.530,34 $GgCO_2eq$. Sedangkan potensi penurunan emisi untuk tahun 2022 saja adalah sebesar 1.200,71 $GgCO_2eq$ dengan kontributor utama potensi penurunan emisi GRK dari sektor energi yang mencapai 603,17 $GgCO_2eq$.

Peningkatan aksi-aksi mitigasi pada sektor energi berasal dari sektor transportasi yang merupakan dukungan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sedikitnya angka penurunan emisi di Jawa Tengah pada 2022 ini adalah karena belum optimalnya pelaporan aksi mitigasi pada aplikasi AKSARA, sehingga data yang masuk lebih sedikit dibandingkan aksi mitigasi yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selain itu industri-industri yang ada di Jawa Tengah juga belum melakukan pelaporan dalam AKSARA sehingga penurunan emisi di sektor IPPU masih kosong (belum ada datanya). Rincian penurunan emisi GRK di Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.153.
Aksi Penurunan Emisi GRK untuk Setiap Sektor pada Tahun 2022

No	Sektor	Emisi ($GgCO_2eq$)
1	Energi	603,17
2	Kawasan Pesisir dan Kelautan (*Blue Carbon*)	22,16
3	Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	-
4	Pengelolaan Limbah	553,90
5	Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU)	21,49
	Total Emisi GRK	**1.200,71**

Sumber: Aplikasi AKSARA BAPPENAS, (https://pprk.bappenas.go.id/aksara/), 2023 (data masuk sampai dengan 23 Oktober 2023 pkl 10.32 WIB)

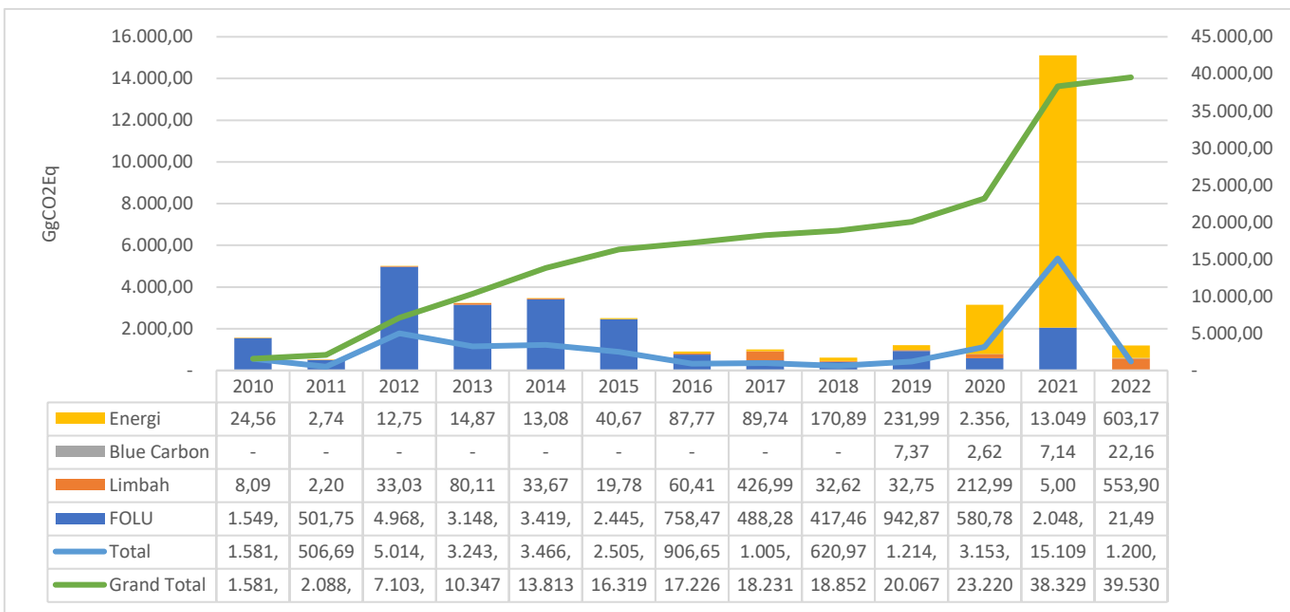

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Energi	24,56	2,74	12,75	14,87	13,08	40,67	87,77	89,74	170,89	231,99	2.356,	13.049	603,17
Blue Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,37	2,62	7,14	22,16
Limbah	8,09	2,20	33,03	80,11	33,67	19,78	60,41	426,99	32,62	32,75	212,99	5,00	553,90
FOLU	1.549,	501,75	4.968,	3.148,	3.419,	2.445,	758,47	488,28	417,46	942,87	580,78	2.048,	21,49
Total	1.581,	506,69	5.014,	3.243,	3.466,	2.505,	906,65	1.005,	620,97	1.214,	3.153,	15.109	1.200,
Grand Total	1.581,	2.088,	7.103,	10.347	13.813	16.319	17.226	18.231	18.852	20.067	23.220	38.329	39.530

Sumber: Aplikasi AKSARA BAPPENAS, (https://pprk.bappenas.go.id/aksara/), 2023 (data masuk sampai dengan 23 Oktober 2023 pkl 10.32 WIB)

Gambar 2.84.
Aksi Penurunan Emisi GRK Setiap Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2022

Pada dasarnya terdapat perbedaan sektor antara KLHK dan BAPPENAS. Sehingga data potensi penurunan emisi pada aplikasi AKSARA BAPPENAS tidak bisa disandingkan dengan data tren emisi GRK dari aplikasi SIGNSMART KLHK. Perbedaan tersebut terdapat pada sektor pertanian (dalam aplikasi AKSARA BAPPENAS pertanian masuk dalam sektor lahan, bukan sektor tersendiri) dan sektor kawasan pesisir dan kelautan (*blue carbon*).

Jawa Tengah tercatat memiliki 4.179 aksi penurunan emisi GRK (total kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang telah dilaksanakan dari tahun

2010-2022). Penurunan emisi GRK ini merupakan data agregasi kabupaten/kota dan PD provinsi menurut aplikasi AKSARA BAPPENAS. Data rincian kontribusi kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.154.
Besaran Penurunan Emisi GRK Tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Tahun 2019–2022

No	Kabupaten/ Kota	Potensi penurunan Emisi (Ton CO_2Eq)					Keterangan
		2019	2020	2021	2022	Grand Total	
1	Cilacap	-	253,35	253,35	412.997,35	413.504,06	
2	Banyumas	7,43	7.411,82	7.411,82	7.411,82	22.242,89	
3	Purbalingga	8.841,22	12.461,22	12.518,25	12.518,25	46.338,94	
4	Banjarnegara	454,03	454,03	454,03	454,03	1.816,12	
5	Kebumen	-	18,76	154,39	154,39	327,55	
6	Purworejo	36,79	36,79	36,79	36,79	147,17	
7	Wonosobo	17,99	6.624,36	6.624,36	6.624,36	19.891,07	
8	Magelang	111,05	111,91	111,91	111,91	446,78	
9	Boyolali	-	85,59	85,59	85,59	256,76	
10	Klaten	5.656,48	11.309,79	16.564,90	16.564,90	50.096,07	
11	Sukoharjo	25,53	89,34	89,34	89,34	293,53	
12	Wonogiri	894,55	2.532,67	5.389,64	6.351,53	15.168,39	
13	Karanganyar	1.190,59	1.575,90	962.725,90	962.725,90	1.928.218,29	
14	Sragen	115,93	1.459,31	2.642,07	4.242,34	8.459,66	
15	Grobogan	33,48	325,98	325,98	336,04	1.021,48	
16	Blora	-	2,93	2,93	2,93	8,80	
17	Rembang	-	-	-	-	-	Hanya berupa aksi pendukung
18	Pati	194,67	5.798,74	5.798,74	5.798,74	17.590,89	
19	Kudus	7.599,64	93.942,84	9.395,42	9.395,42	120.333,31	
20	Jepara	32.861,45	36.256,28	38.086,95	39.298,11	146.502,77	
21	Demak	-	18,40	20,81	21,63	60,83	
22	Semarang	12.949,29	54.321,20	54.412,13	176.414,13	298.096,76	
23	Temanggung	-	6.028,02	6.028,02	6.028,02	18.084,06	
24	Kendal	246,65	264,33	264,33	11.285,33	12.060,64	
25	Batang	-	-	-	-	-	Hanya berupa aksi pendukung
26	Pekalongan	-	-	-	-	-	Belum melakukan pelaporan aksi
27	Pemalang	-	1,85	1,85	1,85	5,55	
28	Tegal	-	0,15	17,74	17,74	35,62	
29	Brebes	15.564,00	20.657,54	22.203,71	32.060,67	90.485,92	

No	Kabupaten/ Kota	Potensi penurunan Emisi (Ton CO_2Eq)					Keterangan
		2019	2020	2021	2022	Grand Total	
30	Kota Magelang	111,05	111,91	111,91	111,91	446,79	
31	Kota Surakarta	809,81	2.135,32	2.135,32	2.290,36	7.370,81	
32	Kota Salatiga	87,57	97,00	204,73	204,73	594,03	
33	Kota Semarang	12.949,90	54.321,20	54.412,13	176.414,13	298.097,36	
34	Kota Pekalongan	-	-	-	-	-	Belum melakukan pelaporan aksi
35	Kota Tegal	-	0,16	17,74	17,74	35,64	
TOTAL		**55.507,82**	**100.759,10**	**318.708,69**	**1.208.502,77**	**1.890.067,98**	

Sumber: Aplikasi AKSARA BAPPENAS, (https://pprk.bappenas.go.id/aksara/), 2023 (data masuk sampai dengan 23 Oktober 2023 pkl 10.32 WIB)

Selain aksi-aksi mitigasi pembangunan rendah karbon, upaya lain dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim adalah melalui aksi adaptasi perubahan iklim. Aksi adaptasi ini dibagi menjadi empat sektor yaitu sektor air, pesisir dan kelautan, pertanian, dan kesehatan. Peningkatan ketahanan iklim ditujukan melalui kegiatan-kegiatan untuk menurunkan tingkat kerentanan dan meningkatkan kapasitas ketahanan iklim, sehingga mampu bertahan terhadap dampak dari perubahan iklim, yang dilaksanakan pada lokasi intervensi aksi ketahanan iklim. Lokasi intervensi aksi ketahanan iklim adalah lokasi terdampak perubahan iklim yang dikategorikan dalam 3 tingkatan prioritas yaitu super prioritas, top prioritas, dan prioritas berdasarkan tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko bencana yang berpotensi terjadi.

Pada sektor air aksi adaptasi aksi berupa pembangunan infrastruktur untuk penyediaan sumber air dan pengendalian banjir seperti pembangunan embung, pembangunan pelindung tepian atau tebing sungai (dari beton maupun vegetasi), dan pengerukan waduk, danau, sungai, dan saluran air. Untuk sektor kelautan dan pesisir aksi adaptasi berupa penyediaan bangunan/vegetasi pelindung pantai, pengembangan sentra pengelolaan produksi perikanan tangkap laut, dan penguatan regulasi pengelolaan ruang laut. Sementara itu aksi adaptasi pada sektor pertanian berupa rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, peningkatan kapasitas masyarakat terkait climate smart agriculture, dan pengembangan varietas tanaman unggul yang tahan cekaman iklim dan organisme pengganggu tanaman (OPT). Dan pada sektor kesehatan, upaya adaptasi yang dilakukan berupa penambahan fasilitas kesehatan dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait pencegahan KLB penyakit.

Berdasarkan hasil kajian dari Bappenas dalam buku PBI (Pembangunan Berketahanan Iklim) disebutkan bahwa lokasi prioritas ketahanan iklim untuk empat sektor yang berada di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 2.155.
Lokasi Prioritas Ketahanan Iklim di Provinsi Jawa Tengah

Sektor	Super Prioritas	Top Prioritas	Prioritas	Keterangan
Kelautan dan Pesisir				
Sub Sektor Kelautan	Batang Pati Pemalang	Brebes Jepara Pekalongan	Cilacap Demak Kebumen	-

Sektor	Super Prioritas	Top Prioritas	Prioritas	Keterangan
	Rembang	Purworejo Tegal Wonogiri Kota Pekalongan	Kendal Kota Semarang Kota Tegal	
Sub Sektor Pesisir		Batang Brebes Jepara Pekalongan Pemalang Purworejo Tegal Kota Pekalongan	Cilacap Demak Kebumen Kendal Kota Semarang Kota Tegal	Dari hasil analisis, didapatkan hasil bahwa sebagian besar kawasan pesisir di provinsi Jawa Tengah didominasi pada tingkat kerentanan tinggi. Untuk provinsi Jawa Tengah, tingkat kerentanan tinggi didominasi oleh faktor erosi pantai, Significant Wave Height, geomorfologi, kemiringan, dan Sea Level Rise (SLR).
Air	Banjarnegara Boyolali Grobogan Pati Purbalingga Purworejo Wonogiri Kota Pekalongan	Banyumas Batang Blora Brebes Demak Jepara Karanganyar Kebumen Kendal Klaten Kudus Magelang Pekalongan Pemalang Rembang Semarang Sragen Sukoharjo Tegal Kota Magelang Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal	Cilacap Temanggung Wonosobo	Secara umum, kondisi ketersediaan air di Provinsi Jawa Tengah cenderung berada pada kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara supply dengan demand air di wilayah Jawa Tengah. Dari hasil analisis diperoleh bahwa hampir seluruh WS di provinsi Jawa Tengah berada pada tingkat kekritisan langka absolut kecuali WS Bodri-Kuto (diproyeksikan sampai dengan tahun 2045). Tentunya, hal ini menjadi catatan tersendiri untuk stakeholder terkait untuk merumuskan langkah mitigasi guna menghadapi kelangkaan air.
Pertanian	Blora Boyolali Brebes Grobogan Pati Pekalongan Pemalang Purworejo Rembang Tegal Wonogiri	Banjarnegara Banyumas Batang Cilacap Demak Jepara Karanganyar Kebumen Klaten Kudus Magelang Purbalingga Sragen Sukoharjo Temanggung	Kendal Semarang Wonosobo Kota Semarang	
Kesehatan (DBD)	-	-	Semarang	Berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah saat ini trend penyakit DBD terjadi hampir di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah, bukan lagi hanya Kabupaten Semarang yang kasusnya tinggi.

Sektor	Super Prioritas	Top Prioritas	Prioritas	Keterangan
Kesehatan (Pnaumonia)	-	Banjarnegara Wonogiri	Semarang Klaten Kudus Magelang Semarang Sukoharjo Temanggung	

Sumber: Buku Pembangunan Berketahanan Iklim Bappenas, 2021

2.5.4.Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Kualitas air sungai dilihat dari hasil perhitungan dan pengujian status mutu kualitas air sungai tahun 2022 menunjukkan bahwa sungai-sungai dalam kondisi cemar ringan sebanyak 24 sungai dan 1 danau, serta cemar sedang sebanyak 1 sungai yaitu sungai Babon.

Tabel 2.156.
Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Nama Sungai	2018		2019		2020		2021		2022	
		Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu
1	Baki	3,84	Cemar Ringan	3,66	Cemar Ringan	5,2	Cemar Sedang	4.72	Cemar Ringan	4,09	Cemar Ringan
2	Premulung	4,46	Cemar Ringan	4,06	Cemar Ringan	3,5	Cemar Ringan	4.57	Cemar Ringan	3,41	Cemar Ringan
3	Mungkung	4,22	Cemar Ringan	3,01	Cemar Ringan	2,85	Cemar Ringan	3.55	Cemar Ringan	3,39	Cemar Ringan
4	Grompol	4,67	Cemar Ringan	4,03	Cemar Ringan	5,33	Cemar Sedang	3.84	Cemar Ringan	3,33	Cemar Ringan
5	Samin	3,76	Cemar Ringan	2,61	Cemar Ringan	5,18	Cemar Sedang	4.35	Cemar Ringan	3,69	Cemar Ringan
6	Jlantah	2,82	Cemar Ringan	3,36	Cemar Ringan	3,02	Cemar Ringan	3.16	Cemar Ringan	4,32	Cemar Ringan
7	Palur	4,57	Cemar Ringan	4,06	Cemar Ringan	6,12	Cemar Sedang	5.08	Cemar Sedang	4,92	Cemar Ringan
8	Pepe	4,37	Cemar Ringan	4,35	Cemar Ringan	3,42	Cemar Ringan	3.12	Cemar Ringan	3,69	Cemar Ringan
9	Babon	2,8	Cemar Ringan	3,97	Cemar Ringan	6,62	Cemar Sedang	4.03	Cemar Ringan	5,04	Cemar Sedang
10	Bogowonto	2,09	Cemar Ringan	3,51	Cemar Ringan	4,02	Cemar Ringan	3.22	Cemar Ringan	2,91	Cemar Ringan
11	Garang	5,58	Cemar Sedang	6,53	Cemar Sedang	3,4	Cemar Ringan	2.88	Cemar Ringan	3,40	Cemar Ringan
12	Gung	2,93	Cemar Ringan	3,51	Cemar Ringan	2,9	Cemar Ringan	3.78	Cemar Ringan	3,33	Cemar Ringan
13	Kupang	2,36	Cemar Ringan	3,15	Cemar Ringan	3,86	Cemar Ringan	3.30	Cemar Ringan	3,53	Cemar Ringan
14	Luk Ulo	1,31	Cemar Ringan	2,94	Cemar Ringan	0,91	Kondisi baik	3.30	Cemar Ringan	2,74	Cemar Ringan
15	Lusi	2,15	Cemar Ringan	3,35	Cemar Ringan	3,75	Cemar Ringan	2.95	Cemar Ringan	1,56	Cemar Ringan
16	Pemali	1,85	Cemar Ringan	4,66	Cemar Ringan	0,77	Kondisi baik	3.89	Cemar Ringan	3,90	Cemar Ringan
17	Sambong	2,66	Cemar Ringan	3,74	Cemar Ringan	3,41	Cemar Ringan	3.04	Cemar Ringan	2,73	Cemar Ringan
18	Serang	2,19	Cemar Ringan	4,66	Cemar Ringan	2,29	Cemar Ringan	2.32	Cemar Ringan	2,14	Cemar Ringan
19	Serayu	1,57	Cemar Ringan	3,7	Cemar Ringan	2,24	Cemar Ringan	2.89	Cemar Ringan	2,78	Cemar Ringan
20	Tuntang	2,68	Cemar Ringan	3,19	Cemar Ringan	3,59	Cemar Ringan	3.09	Cemar Ringan	2,84	Cemar Ringan
21	Wulan	1,77	Cemar Ringan	2,13	Cemar Ringan	4	Cemar Ringan	4.89	Cemar Ringan	3,94	Cemar Ringan
22	Bengawan Solo	3,91	Cemar Ringan	3,85	Cemar Ringan	2,68	Cemar Ringan	1.98	Cemar Ringan	2,46	Cemar Ringan
23	Progo	1,25	Cemar Ringan	4,03	Cemar Ringan	2,03	Cemar Ringan	1.94	Cemar Ringan	1,95	Cemar Ringan

No	Nama Sungai	2018		2019		2020		2021		2022	
		Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu
24	Citanduy	1,97	Cemar Ringan	4,62	Cemar Ringan	1,97	Cemar Ringan	2.14	Cemar Ringan	2,62	Cemar Ringan
25	Cisangga-rung	2,83	Cemar Ringan	5,28	Cemar Sedang	1,94	Cemar Ringan	2.75	Cemar Ringan	0,61	Baik
26	Danau Rawapening	2,43	Cemar Ringan	2,32	Cemar Ringan	2	Cemar Ringan	2,27	Cemar Ringan	3,02	Cemar Ringan
Nilai IP Jawa Tengah		2,98	Cemar Ringan	3,84	Cemar Ringan	3,4	Cemar Ringan	3.39	Cemar Ringan	3,17	Cemar Ringan

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023

Permasalahan utama pencemaran air sungai di Provinsi Jawa Tengah berasal dari pembuangan air limbah domestik, sampah rumah tangga, limbah industri maupun UMKM, serta limbah pertanian dan peternakan. Sektor pertanian dalam arti luas juga termasuk salah satu penyumbang pencemar, terutama terkait penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan. Kondisi pencemaran terbanyak terdapat pada DAS Bengawan Solo dan sungai-sungai di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Pada lokasi tersebut terdapat industri tekstil dan industri rayon yang membuang air limbahnya langsung ke sungai. Beberapa penanganan pencemaran sungai dapat dilakukan melalui (1) pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan besar yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap pengolahan air limbah; (2) mengevaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha/kegiatan skala besar melalui program Propernas; (3) pemantauan dan uji laboratorium kualitas air sungai dan anak–anak sungainya dan evaluasi terhadap kondisi kualitas air sungai atas dasar laporan hasil pengujian kualitas air sungai dari para pihak terkait; serta (4) pembangunan dan revitalisasi IPAL komunal yang telah terbangun untuk meningkatkan kinerja IPAL.

Tabel 2.157.
Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Timbunan Sampah (Ton/tahun)	5.418.184	5.604.080,65	6.055.617,05	6.152.654,76	6.363.805,99
2	Jumlah Sampah Yang Dapat Dikurangi (ton/tahun)	725.047,58	1.069.308,62	1.175.675,24	1.128.400,92	1.320.900,64
3	Jumlah sampah yang tertangani (Ton/tahun)	1.992.430,5	2.774.189,20	2.626.441,58	2.408.372,35	2.590.829,95
4	Total Pengelolaan Sampah	2.717.478,1	3.843.497,82	3.802.116,82	3.536.773	3.911.730,59
Persentase Pengelolaan Sampah (%)		50,15	68,58	62,79	57,48	61,47

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Jumlah timbulan sampah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 2018 sejumlah 5.418.184 ton/tahun menjadi 6.363.805,99 ton/tahun pada tahun 2022. Jumlah timbulan sampah sebesar 6.363.805,99 ton/tahun dengan jumlah sampah yang dapat dikurangi sebesar 1.320.900,64 ton/tahun. Sedangkan sampah yang tertangani baru mencakup 2.590.829,95 ton/tahun dengan total pengelolaan sampah sebanyak 3.911.730,59 ton/tahun atau sebesar 61,47 persen. Berikut merupakan data TPA di Jawa Tengah.

Tabel 2.158.
Data TPA di Jawa Tengah per Tahun 2023

No	TPA	Kabupaten/ Kota	Usia Pakai s.d Tahun	Ketinggian Sampah (Meter)	Keberadaan Lapisan Geomembran	Keberadaan IPAL	Keberfungsian IPAL
1	TPST Tritih Lor	Cilacap	2019	15	Ada	Ada	Berfungsi
2	TPA Malabar	Cilacap	2025	12	Ada	Ada	Tidak fungsi
3	TPA Kunci	Cilacap	2025	7	Ada	Ada	Tidak fungsi
4	TPST BLE	Banyumas	selamanya	Residu habis diolah secara termal	Tidak gunakan landfill	Ada	Berfungsi
5	TPA Kalipancur	Purbalingga	2024	6	Ada	Ada	Berfungsi
6	TPA Winong	Banjarnegara	2030	10	Tidak ada	Tidak ada	Tidak fungsi
7	TPA Kaligending	Kebumen	2030	20	Ada	Ada	Berfungsi
8	TPA Semali	Kebumen	2030	20	Ada	Ada	Berfungsi
9	TPA Jetis	Purworejo	2022	12	Ada	Ada	Berfungsi
10	TPA Wonorejo	Wonosobo	2024	50	Tidak ada	Ada	Tidak fungsi
11	TPA Pasuruhan	Kab. Magelang	2017	25	Ada	Ada	Berfungsi
12	TPA Klegen	Kab. Magelang	2028	5	Ada	Tidak ada	Tidak fungsi
13	TPA Winong	Boyolali	2024	8	Ada	Ada	Berfungsi
14	TPA Troketon	Klaten	2026	10	Ada	Ada	Berfungsi
15	TPA Mojorejo	Sukoharjo	2025	20	Tidak ada	Ada	Berfungsi
16	TPA Ngadirojo	Wonogiri	2026	5	Ada	Ada	Berfungsi
17	TPA Baturetno	Wonogiri	2023	7	Tidak ada	Tidak ada	Tidak fungsi
18	TPA Purwantoro	Wonogiri	2024	3	Tidak ada	Tidak ada	Tidak fungsi
19	TPA Slogohimo	Wonogiri	2026	6	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak fungsi
20	TPA Sukosari Jumantono	Karanganyar	2023	10	Ada	Ada	Tidak fungsi
21	TPA Tanggan	Sragen	2028	25	Ada	Ada	Berfungsi
22	TPA Ngembak	Grobogan	2030	14,79	Ada	Ada	Berfungsi
23	TPA Temurejo	Blora	2031	4	Ada	Ada	Berfungsi
24	TPA Jambe	Blora	2030	**5**	Tidak ada	Tidak ada	Tidak fungsi
25	TPA Landoh	Rembang	2017	30	Ada	Ada	Tidak fungsi
26	TPA Sukoharjo	Pati	2027	20	Ada	Ada	Berfungsi
27	TPA Tanjungrejo	Kudus	2025	10	Tidak ada	Ada	Berfungsi
28	TPA Bandengan	Jepara	2024	10	Ada	Ada	Berfungsi
29	TPA Krasak	Jepara	2022	4	Tidak ada	Tidak ada	Tidak fungsi
30	TPA Karimunjawa	Jepara	2024	1,5	Ada	Ada	Berfungsi
31	TPA Berahan Kulon	Demak	2040	7	Ada	Ada	Berfungsi
32	TPA Blondo	Kab. Semarang	2019	40	Ada	Ada	Berfungsi
33	TPA Sanggrahan	Temanggung	2021	25	Ada	Ada	Berfungsi

No	TPA	Kabupaten/ Kota	Usia Pakai s.d Tahun	Ketinggian Sampah (Meter)	Keberadaan Lapisan Geomembran	Keberadaan IPAL	Keberfungsian IPAL
34	TPA Darupono Baru	Kendal	2027	12	Ada	Ada	Berfungsi
35	TPA Randukuning	Batang	2015	15	Tidak ada	Ada	Berfungsi
36	TPA Degayu	Kota Pekalongan	2015	20	Ada	Ada	Berfungsi
37	TPA Bojonglarang	Kab. Pekalongan	2010	17	Tidak ada	Ada	Tidak fungsi
38	TPA Pegongsoran	Pemalang	2025	10	Ada	Ada	Berfungsi
39	TPA Penujah	Kab. Tegal	2017	4	Tidak ada	Ada	Tidak fungsi
40	TPA Kaliwlingi	Brebes	2050	10	Tidak ada	Ada	Tidak fungsi
41	TPA Kalijurang	Brebes	2050	50	Tidak ada	Tidak ada	Tidak fungsi
42	TPA Banyu Urip	Kota Magelang	2025	15	Ada	Ada	Berfungsi
43	TPA Putri Cempo	Kota Surakarta	2025	20	Tidak ada	Tidak ada	Tidak fungsi
44	TPA Ngronggo	Kota Salatiga	2026	12	Ada	Ada	Berfungsi
45	TPA Jatibarang	Kota Semarang	2021	15	Ada	Ada	Berfungsi
46	TPA Muarareja	Kota Tegal	2025	5	Tidak ada	Tidak ada	Tidak fungsi

Sumber: Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah cut off Tw. II 2023

Data di atas menunjukkan bahwa dari 46 TPA, secara teknis terdapat 12 TPA yang telah melebihi usia pakai dan 2 TPA yang usia pakainya habis tahun 2023. Hal ini berarti ada sekitar 30,34% TPA yang usia pakainya habis tahun 2023. Berdasarkan data yang ada 9 dari 46 TPA tidak memiliki IPAL, sedangkan 9 dari 37 IPAL yang ada di TPA tidak berfungsi. Hal ini menyebabkan pengelolaan air lindi tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan pencemaran terhadap air yang ada di sekitar TPA. Permasalahan pengelolaan sampah di Jawa Tengah ini menjadi sorotan tersendiri. Selain karena jumlah timbulan yang semakin meningkat, jumlah TPA yang semakin sedikit, juga dikarenakan oleh banyaknya sarana prasarana pengolahan sampah yang kondisinya sudah rusak, sehingga kinerja pengelolaan sampah menjadi tidak optimal. Secara teknis, kondisi TPA di Jawa Tengah ini masih banyak yang menggunakan sistem *open dumping*. Biaya untuk beralih ke sistem *sanitary landfill* dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (teknologi RDF maupun *Wasate to Energy*) masih cukup tinggi, sehingga alternatif paling mudah adalah pengelolaan sampah dengan sistem *open dumping* dan masih banyak ditemui masyarakat membakar maupun membuang sampah ke sungai.

Dalam rangka peningkatan pemenuhan dasar untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kawasan (Perpres Nomor 79/2019) yang mendukung KSPN Borobudur, maka diperlukan sistem persampahan terpadu yakni Pembangunan TPST Regional di Kabupaten Magelang. Adapun perkembangan pelaksanaan pembangunan TPST Regional Magelang adalah penyusunan *Feasibility Study* (DLHK, 2019), penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL (DLHK, 2020), penyusunan DED (DLHK, 2021) dan Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan Hutan, *Feasibility Study* jalan masuk, serta proses persiapan pengadaan tanah (DLHK, 2022), tahun 2023 proses pelaksanaan pengadaan tanah

oleh Tim BPN serta proses pelepasan kawasan hutan (DLHK, Maret 2023), dan progress untuk 2024 adalah akses jalan masuk ke TPST (BMCK, 2024), pembentukan kelembagaan dan penyusunan DED *landfill* (DLHK, 2024), serta penyusunan kajian dampak negatif (DLH Kab. Magelang, 2024).

Selain timbulan sampah, peningkatan aktivitas seperti industri, pelayanan (rumah sakit, hotel dan lain sebagainya) juga akan menambah sumber pencemar dan volume limbah yang dihasilkan. Sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa disebut limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) umumnya dihasilkan dari sektor industri. Total Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 1.589.621,42 ton/tahun. Produksi limbah B3 paling besar berasal dari Kabupaten Cilacap karena adanya industri semen, beton dan PLTU Batubara yang berasal dari FABA (*Fly Ash and Bottom Ash*). Berikut merupakan tabel jumlah timbulan limbah B3 per kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2022.

Sumber : DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.85.
Jumlah Limbah B3 Per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2022

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup, Pemerintah melaksanakan kegiatan pengawasan penaatan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". Pengawasan lingkungan yang diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) identik dengan kegiatan pengawasan yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang

pengelolaan lingkungan hidup, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Perkembangan pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha dan/atau kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.159.
Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	Izin	46	62	69	83	89
2	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Usaha dan / atau kegiatan	25	35	57	38	63
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Usaha dan / atau kegiatan	-	27	49	19	47
4	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Orang	-	-	-	6	7

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023

Selain itu DLHK Provisni Jawa Tengah melakukan pendampingan kepada perusahaa-perusahaan dalam program propernas (proper nasional). Proper adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 1995, untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungannya. Dari penilaian proper, perusahaan akan memperoleh citra/reputasi sesuai bagaimana pengelolaan lingkungannya. Citra tersebut dinilai dengan warna emas, hijau, biru, merah dan hitam. Proper emas merupakan proper yg terbaik, artinya perusahaan tersebut sudah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan kontinu. Jika sebuah perusahaan mendapat 2x warna hitam secara berturut-turut, perusahaan tersebut bisa dituntut dan usaha akan dihentikan. Dari 220 perusahaan yang dibina, terdapat 147 perusahaan atau 66,82% dalam kategori taat (Warna Emas, Hijau, Biru, Biru-P). Berikut merupakan data perusahaan yang dibina oleh DLHK Provisni Jawa Tengah dalam program propernas (proper nasional).

Tabel 2.160.
Rekapitulasi Jumlah Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah yang Mengikuti Proper Nasional Tahun 2021-2022

Kategori	Jumlah Perusahaan
EMAS	9
HIJAU	11
BIRU	123
BIRU-P	4
MERAH	73
HITAM	0
JUMLAH	**220**
TINGKAT KETAATAN	**66,82%**

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023

2.5.5.Kualitas Lahan di Provinsi Jawa Tengah

Kualitas lahan dinilai dari kondisi tutupan lahan terhadap fungsi lahan. Kondisi ini juga berkaitan dengan semakin meningkatnya luas lahan kritis di Jawa Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional, luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah, sebesar 375.733 ha (11,45 persen dari luas daratan Provinsi Jawa Tengah).

Pada tahun 2022, hutan negara/kawasan hutan di Jawa Tengah seluas 766.390 ha dan hutan rakyat seluas 682.425,61 ha, sehingga total luas hutan di Jawa Tengah seluas 1.448.815,61 ha. Berdasarkan status lahan, lahan kritis tersebut 86 persen tersebar di lahan masyarakat/tanah hak, sedangkan sisanya 14 persen tersebar di kawasan hutan (hutan negara). Penanganan lahan kategori kritis di Jawa Tengah dilakukan melalui kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendekatan pembangunan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan pada lahan-lahan yang dibebani hak/lahan masyarakat.

Sedangkan pada lahan kritis yang tersebar di kawasan hutan/hutan negara dilakukan melalui reboisasi hutan baik pada hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Pemulihan lahan kritis di kawasan hutan negara, khususnya yang berkaitan erat dengan permasalahan sosial seperti konflik tenurial, terbatasnya akses kelola hutan dan lain sebagainya dilakukan melalui program perhutanan sosial dengan 5 skema yaitu : (1) Hutan Desa (HD); (2) Hutan Kemasyarakatan (HKm); (3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR); (4) Hutan Adat (HA); (5) Kemitraan Kehutanan (KK) dalam bentuk KULIN KK atau Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan IPHPS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial. Untuk menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial dalam implementasi penanganan lahan kritis diterapkan melalui agroforestry. Perkembangan upaya penanganan lahan kritis tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.161.
Luas Lahan Kritis Dan Penanganannya di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018–2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Hutan dalam dan luar kawasan (ha)	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13
Luas Kritis (ha)*	375.733*)	375.733*)	375.733*)	375.733*)	375.733
Luas lahan yang direhabilitasi per tahun (ha)	23.361	23.431	32.389	23.477	21.371
Perbandingan luas yang direhabilitasi per tahun (%)	6,22	6,24	8,62	6,24	5,69

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022
** Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional*

Penanganan lahan kritis di Jawa Tengah tahun 2018-2022 secara konsisten dilakukan pada lahan seluas 124.029 Ha (33%) terhadap luas lahan

kritis sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

Keberadaan lahan kritis ini telah berkontribusi terhadap penurunan daya dukung DAS, sehingga rehabilitasi lahan kritis difokuskan pada 19 DAS prioritas yang perlu dipulihkan daya dukungnya dan 12 DAS prioritas yang perlu dipertahankan daya dukungnya di di Jawa Tengah.

Tabel 2.162.

Daerah Aliran Sungai Prioritas di Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama DAS	Keterangan	No.	Nama DAS	Keterangan
1	DAS Progo	Dipulihkan	1	DAS Rambut	Dipertahankan
2	DAS Serayu	Dipulihkan	2	DAS Lampir	Dipertahankan
3	DAS Bogowonto	Dipulihkan	3	DAS Banger	Dipertahankan
4	DAS LukUlo	Dipulihkan	4	DAS Babon	Dipertahankan
5	DAS Tuntang,	Dipulihkan	5	DAS Blorong	Dipertahankan
6	DAS Pemali,	Dipulihkan	6	DAS Jragung	Dipertahankan
7	DAS Solo,	Dipulihkan	7	DAS Kaliombo	Dipertahankan
8	DAS Citandui.	Dipulihkan	8	DAS Gede	Dipertahankan
9	DAS Bodri,	Dipulihkan	9	DAS Randugunting	Dipertahankan
10	DAS Garang,	Dipulihkan	10	DAS Jalicokroyasan	Dipertahankan
11	DAS Serang,	Dipulihkan	11	DAS Ijo	Dipertahankan
12	DAS Cacaban,	Dipulihkan	12	DAS Tipar	Dipertahankan
13	DAS Juwana,	Dipulihkan	-	-	-
14	DAS Comal,	Dipulihkan	-	-	-
15	DAS WawarMedono	Dipulihkan	-	-	-
16	DAS Babakan	Dipulihkan	-	-	-
17	DAS Gangsa	Dipulihkan	-	-	-
18	DAS Kupang	Dipulihkan	-	-	-
19	DAS Lasem	Dipulihkan	-	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Selain rehabilitasi lahan kritis/ pemulihan DAS, dilakukan juga upaya mempertahankan tutupan lahan melalui inisiatif - inisiatif konservasi kawasan melalui pembentukan KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) dan Cagar Biosfer. Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) merupakan kawasan bernilai ekosistem penting yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. KEE menjadi upaya daerah untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang, dan dinamis dalam perkembangannya. KEE juga dapat menjadi fungsi pemanfaatan

yang memperhatikan keberlanjutan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat ekologinya (lestari). Saat ini di Jawa Tengah sudah ditetapkan 3 (tiga) KEE yang merupakan kawasan ekosistem lahan basah mangrove, sedangkan KEE pada ekosistem terestrial dalam tahap inisiasi untuk penetapan.

Cagar Biosfer merupakan kawasan/ situs yang ditetapkan oleh UNESCO untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan atas upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang terpercaya. Usulan penetapan Cagar Biosfer diajukan oleh pemerintah pusat, setiap calon cagar harus memenuhi kriteria tertentu dan sesuai dengan persyaratan minimum sebelum dimasukkan ke dalam jaringan Cagar Biosfer dunia. Cagar Biosfer merupakan kawasan yang ideal untuk menguji dan mendemonstrasikan pendekatan-pendekatan yang mengarah kepada pembangunan berkelanjutan pada tingkat regional. Pengelolaan Cagar Biosfer dibagi menjadi 3 zona yang saling berhubungan, yaitu area inti (Core Area), zona penyangga (Buffer zone), dan area transisi (Transition zone). Hingga tahun 2022, UNESCO telah menetapkan 2 (dua) Cagar Biosfer di Jawa Tengah yaitu Cagar Biosfer Karimun Jawa–Jepara–Muria seluas 1.236.083,97 Ha dan Cagar Biosfer Merapi–Merbabu–Menoreh seluas 254.876,75 Ha

Kondisi tutupan lahan dan hutan bersifat dinamis, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan, pencurian kayu dan kebakaran hutan. Kerusakan kawasan hutan mengalami penurunan, dari tahun sebelumnya, yaitu untuk luas pencurian pohon dari 17,41 Ha berhasil diturunkan menjadi 14,6 Ha, serta luas kebakaran hutan dari 281,50 Ha berhasil diturunkan menjadi 99,97 Ha. Gambaran mengenai kerusakan kawasan hutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.163.

Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Luas pencurian pohon	29,00	22,88	17,41	14,6	91
2.	Luas Kebakaran hutan	4.215,64	3.628,84	281,50	99,97	10,79
	Total Luas Kerusakan hutan	4.244,64	3.651,72	298,91	114,57	101,79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Penanganan lahan juga dilaksanakan di daerah lahan basah/ pesisir melalui konservasi dan rehabilitasi mangrove. Konservasi ekosistem mangrove salah satunya melalui inisiatif pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Sampai dengan tahun 2022 telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi 2 (dua) KEE Lahan Basah Mangrove yaitu KEE Segara Anakan dan KEE Kaliwlingi.

Tabel 2.164.

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove di Jawa Tengah

No	Nama KEE	Wilayah Administrasi	Status
1	KEE Mojo	Kab.Pemalang	Penetapan (SK Bupati Pemalang nomor 188.4/564/tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017)

No	Nama KEE	Wilayah Administrasi	Status
2	KEE Muara Kali Ijo	Kab.Kebumen	Penetapan (Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 552.52/31 tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020)
3	KEE Pasar Bangi	Kab.Rembang	Penetapan (Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 552.52/31 tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Rehabilitasi lahan basah mangrove dilakukan melalui penanaman mangrove yang dimaksudkan untuk melindungi pantai dari arus dan hempasan ombak, sebagai tempat memijah, membesar dan mencari makan berbagai biota. Perkembangan rehabilitasi lahan basah mangrove sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.165.

Rehabilitasi Mangrove Tahun 2018-2022 Di Jawa Tengah

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Keterangan
1.	Luas rehabilitasi mangrove (Ha)	30,20	58	19,4	174,12	27	DLHK
2.	Luas Penanaman Mangrove (Ha)	10,20	19.6	6.4	9	8,89	DKP

Sumber: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2023
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

2.5.6.Pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Sedangkan pengolahan hasil hutan berkelanjutan ditentukan sejauh mana pengguna kawasan hutan (yang bersifat perorangan, kelompok masyarakat maupun badan hukum swasta) memenuhi kewajiban terhadap izin/kerjasama yang telah ditetapkan dan industri pengolahan hasil hutan tertib dalam penatausahaan hasil hutan Berikut gambaran perkembangan produksi kayu di Jawa Tengah.

Tabel 2.166.

Produksi Kayu Dari Hutan Rakyat dan Hutan Negara Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Kayu Asal Hutan Rakyat (m^3)	2.597.954,53	2.632.756,10	2.682.476,19	1.821.315,97	2,149,541.51
2	Produksi Kayu Asal Hutan Negara (m^3)	254.657	278.118,06	361.641,11	249.517.67	328,451.67
	Total Produksi Kayu (m^3)	2.852.611,53	2.910.874,16	3.044.117,30	1.821.315,97	2,477,993.17

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Produksi kayu dari hutan rakyat dan hutan negara pada periode 2018 – 2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan kenaikan kecuali untuk tahun 2021 yang mengalami penurunan produksi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 terutama karena adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), yang secara total mengalami penurunan sebesar 40.17 persen dibandingkan tahun 2020. Sedangkan untuk produksi tahun 2022 mengalami

peningkatan sebesar 36.06 persen dibandingkan tahun 2021 walaupun masih tetap lebih rendah dibandingkan periode 2018 – 2020.

Salah satu instrumen untuk mencapai pengelolaan hutan lestari adalah Kepatuhan industri pengolahan hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan melalui Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Industri pengolahan hasil hutan yang memiliki sertifikasi SVLK akan memiliki keunggulan kompetitif terutama di pasar internasional karena memenuhi kriteria produk ramah lingkungan (ecolabel) sehingga akan mendorong implementasi pengelolaan hutan lestari. Berikut gambaran perkembangan pengguna kawasan, industri pengolahan hasil hutan dan di Jawa Tengah.

Tabel 2.167.

Jumlah Pengguna Kawasan, Industri Pengolahan Hasil Hutan dan SVLK di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengguna kawasan hutan	Unit	179	193	201	203	207
2	Industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 m3 berizin	Unit	938	967	999	1.007	1.026
3	Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu	Unit	636	736	838	894	905

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pengguna kawasan hutan setiap tahun bertambah, dengan jumlah pengguna kawasan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 207 unit. Selain itu jumlah industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 m3 berizin setiap tahun terus bertambah, dengan jumlah sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1.026 unit. Jumlah Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu pada industri hasil hutan meningkat setiap tahun dimana sampai dengan tahun 2022 berjumlah 905 unit. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja ekspor produk hasil hutan.

Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan akses kelola serta pemanfaatan hutan oleh masyarakat, memberi kesempatan masyarakat mengelola hutan secara legal dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan yang tinggal di kawasan hutan. Berikut gambaran perkembangan perhutanan sosial di Jawa Tengah tahun 2018-2022.

Tabel 2.168.

Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah Tahun 2018–2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pemberian Akses kelola kawasan hutan untuk masyarakat (ha)	28.300,87	35.173,63	35.828,84	79.461,49	79.461,49
2	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang didampingi (kelompok)	54	79	81	90	90

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dalam kurun waktu 2018 - 2022, telah diterbitkan SK Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 90 SK untuk 90 Kelompok Perhutanan Sosial di Jawa Tengah dengan luas total sebesar 79.461,49 Ha. Sebagai salah satu upaya memulihkan dampak pandemi Covid-19 dilakukan penguatan perhutanan sosial yang diarahkan pada penataan kelembagaan, pengembangan usaha kelompok dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok serta pengelolaan kawasan berdasar perencanaan teknis

2.5.7. Penataan Ruang

Menindaklajuti terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 melakukan revisi Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dilakukan revisi seuai amanah Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan antara matra darat dengan matra laut.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 sebagai dokumen rencana tata ruang matra laut, pada tahun 2022 dilakukan reviu untuk diintegrasikan pada revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah dan pada tahun 2023 dokumen materi teknis yang disusun/direviu telah mendapatkan persetujuan teknis dari Kementrian Kelautan Perikan, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Sesuai dengan Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban dalam menyusun Rencana Tata Ruang. Kebutuhan dokumen Rencana Tata Ruang bagi Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, acuan pemanfaatan ruang dalam pembangunan sectoral dan penerbitan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut serta pemberian ha katas tanah dan hak pengelolaan. Perkembangan status penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.169.

UPDATE STATUS RTRW KAB/KOTA DI JATENG

per24 Oktober 2023

Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan revisi RTRW sebanyak 30 ,sedangkan 5 RTRW Kabupaten/Kota sedang berproses

NO	KABUPATEN	Revisi &PK	TahapandiProv		*Proses*	*Proses Evaluasi Gub (Sudah TerbitPersubATR)*	Perda Baru
			RekomGub (SebelumUUCK)	BATKPRD Prov(PascaUUCK)	*Persub ATR(Sudah TerbitRekomGub/ BATKPRDProv)*		
1	Kabupaten Cilacap						Perda1Tahun2021tentangPerubahan atas Perda 9/2011 tentang RTRW Kab Cilacap

							2011-2031(1April2021)
2	Kabupaten Banyumas						BATKPRDtanggal17Juni2021
3	Kabupaten Purbalingga						Perda 10 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Perda 5/2011 tentang RTRW KabPurbalingga2011-2031(28Agustus2020)
4	Kabupaten Banjarnegara						Sudah keluar SK Gub
5	Kabupaten Kebumen						Linsek pada tanggal 17 Juli 2023
6	Kabupaten Purworejo						PerdaNo.10Tahun2021tentangRTRWKabPurworejo2021-2041(30Juli2021)
7	Kabupaten Wonosobo						Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 - 2043 (10 Juli 2023)
8	Kabupaten Magelang						BATKPRDtanggal15Agustus2019
9	Kabupaten Boyolali						Perda8Th2019tentangperubahanatasPerda9Th2011tentangRTRWBoyolali 2011–2031.(17Juli2019)
10	Kabupaten Klaten						Perda Kab. Klaten No. 10 tahun 2021tentangRTRWKab.KlatenTahun 2021-2041 (24November2021)
11	Kabupaten Sukoharjo						Perda 1 Th 2018 tentang perubahan atasPerda14Th2011tentangRTRWSukoharjo 2011–2031.(9maret2018)
12	Kabupaten Wonogiri						PerdaNo.2Tahun2020tentangRTRW Kab Wonogiri2020-2040
13	Kabupaten Karanganyar						Perda 19 Th 2019 tentang perubahan atasPerda1Th2013tentangRTRWKaranganyar2013–2032.(27Agust2019)
14	Kabupaten Sragen						Perda1Tahun2020tentangperubahanatasPerda 11 Tahun 2011 tentangRTRW KabSragentahun2011–2031tanggal5Mei 2020
15	Kabupaten Grobogan						Perda Kab. Grobogan No.12 Tahun 2021 ttg RTRW Kab Grobogan Tahun 2021-2041

							Ditetapkan 17Des2021
16	Kabupaten Blora						Perda5Tahun2021tentangRTRWKab Blora2021-2041tanggal1April2021
17	Kabupaten Rembang						Perda RTRW Kabupaten Rembang No. 2 tahun 2023 per tgl 10 oktober 2023
18	Kabupaten Pati						Perda 2/2021 tentang Perubahan AtasPerda5/2011tentangRTRWKabPati2010-2030tgl1April2021
19	Kabupaten Kudus						Perda 1/2022 tentang RTRW KabupatenKudusTahun2022-2042tgl30Maret2022
20	Kabupaten Jepara						Perda No. 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043 (7 September 2023)
21	Kabupaten Demak						Perda No.1 Tahun 2020 tentang PerubahanAtasPerda6Tahun2011tentangRTRWKab Demak Tahun 2011 - 2031 tanggal 28 Feb 2020
22	Kabupaten Semarang						Perda No. 6 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Semarang
23	Kabupaten Temanggung						Linsek pada tanggal 17 Juli 2023
24	Kabupaten Kendal						Perda1Tahun2020tentangperubahanatasPerda20Tahun2011tentangRTRWKab Kendaltahun2011–2031tanggal22Mei 2020
25	Kabupaten Batang						Perda13Tahun2019tentangRTRWKab Batang2019–2039.(26Des2019)
26	Kabupaten Pekalongan						Perda 3 Tahun 2020 tentang RTRW KabPekalongan2020-2040(5Agustus2020)
27	Kabupaten Pemalang						Perda1Tahun2018tentangRTRW Pemalang2018–2038(8Feb2018)
28	Kabupaten Tegal						BA FPR tanggal 22 Mei 2022
29	Kabupaten Brebes						Perda13Tahun2019tentangRTRWKab Brebes2019–2039.(23Des2019)
30	Kota Magelang						Perda 2 Tahun 2020 tentang PerubahanAtasPerdaKotaMagelangNo.4Tahun2012tentangRTRWKotaMagelang2011-2031 (17Juli2020)

31	Kota Surakarta						PerdaNo.4Tahun2021tentangRTRW KotaSurakarta2021-2041tanggal9Juli2021
32	Kota Salatiga						Perda Nomor 3 Th 2023 tentang RTRW Kota Salatiga tahun 2023-2043 tgl 12 Juni 2023
33	Kota Semarang						Perda No. 5 Th 2021 tentang PerubahanAtas Perda Kota Semarang No.14 Th 2011tentangRTRWKotaSemarang2011-2031
34	Kota Pekalongan						Perda 9 Tahun 2020 tentang PerubahanAtas Perda Kota Pekalongan No.30 Th 2011tentangRTRWKotaPekalongan2009-2029
35	Kota Tegal						Perda Kota Tegal No.1 Tahun 2021 tentangperubahan atas Perda Kota Tegal No.4Tahun2012tentangRTRWKotaTegal2011 –2031tanggal24Feb2021
	JUMLAH	**35**	**28**	**7**	**35**	**31**	**30**
	%	**100**	**80,00**	**20,00**	**100,00**	**88,57**	**85,71**

30 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah pada tabel diatas juga diinformasikan terdapat Rencana Tata Ruang yang masih berproses untuk menjadi Peraturan Daerah. Perlu adanya upaya percepatan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melegalkan dokumen Rencana Tata Ruang untuk mempermudah investasi dan juga sebagai acuan pembangunan di daerah.

Tabel 2.170.

PROGRESS LEGISLASI RDTR KAB/KOTA DIJATENG

Per 24 Oktober 2023

Terdapat 3 Perda RDTR dan 22 Perkada RDTR

NO	KABUPATEN	PENYUSUNAN	*PROSES PERSUB ATR*	*PROSES Fasilitasi*	PERDA/ PERKADA BARU	KETERANGAN
	KAB BANYUMAS					
1	RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto					Perda Kab Banyumas No.6 Tahun 2019 tentang RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto Th. 2019 - 2039
2	RDTR Kawasan Perkotaan Banyumas					Perbup No. 9 Tahun 2023 tentang RDTR KP Banyumas Tahun 2023-2043
3	RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja					Perbup No. 4 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja
	KAB BREBES					

NO	KABUPATEN	PENYUS UNAN	*PROSES PERSUB ATR*	*PROSES Fasilitasi*	PERDA/ PERKADA BARU	KETERANGAN
1	RDTR Kecamatan Losari					Perbup No. 14 Tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Losari (26 Mei 2023)
2	RDTR Kecamatan Tanjung					Perbup No. 19 Tahun 2023 tentang RDTR Kec. Tanjung
3	RDTR WP Kecamatan Bulakamba					Sedang Proses Fasilitasi dengan Biro hukum (23 Mei 2023)
4	RDTR Perkotaan Ketanggungan-Kersana					
	KOTA SALATIGA					
1	RDTR Kota Salatiga					Perda Kota Salatiga No.9 Tahun 2018 tentang RDTR BWP PK I, II, III, IV Kota Salatiga 2017 - 2030
	KAB SUKOHARJO					
1	RDTR Kec Sukoharjo					Perbup 91/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Sukoharjo Tahun 2020 - 2039
2	RDTR Kec Kartasura					Perbup 93/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Kartasura Tahun 2020 - 2039
3	RDTR Kec Grogol					Perbup 92/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Grogol Tahun 2020 - 2039
4	RDTR Kecamatan Nguter					
5	RDTR Kecamatan Bendosari					
	KAB BOYOLALI					
1	RDTR Kec Sawit					Perbup 77/2021 tentang RDTR Kec. Sawit Tahun 2021-2041 (12 November 2021)
2	RDTR Wilayah Perencanaan Mojosongo					Perbup RDTR Mojosongo No. 68 Tahun 2022 (4 Juli 2022)
3	RDTR Kecamatan Banyudono					Perbup RDTR Kecamatan Banyudono No. 106 Tahun 2022 tgl 1 Desember 2022
4	RDTR Cepogo					Proses fasilitasi
	KAB SRAGEN					
1	RDTR Perkotaan Sragen					Perbup 69 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sragen (22 Desember 2021)
2	RDTR Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan					Perbup No. 15 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan Tahun 2023-2043 (31 Maret 2023)
3	RDTR Gemolong					Perbup No. 34 Tahun 2023 tentang RDTR Gemolong (21 Agustus 2023)
	KAB PEMALANG					
1	RDTR Kaw Perkotaan Pemalang					
	KAB BATANG					
1	RDTR Kec Limpung					Perbup No. 13 Tahun 2023 tentang RDTR WP Limpung
2	RDTR Kec Tulis					Perda Kab Batang No.6 Tahun 2020 tentang RDTR BWP Tulis Th. 2020 - 2040
3	RDTR Gringsing					Perbup No. 12 Tahun 2023 tentang RDTR WP Gringsing
	KAB. SEMARANG					
1	RDTR Perkotaan Kecamatan Tengaran					

NO	KABUPATEN	PENYUSUNAN	*PROSES PERSUB ATR*	*PROSES Fasilitasi*	PERDA/ PERKADA BARU	KETERANGAN
2	RDTR Kecamatan Bergas					
3	RDTR Perkotaan Ungaran					
4	RDTR Perkotaan Kecamatan Ambarawa					
	KAB. BLORA					
1	RDTR Kec. Randublatung					
2	RDTR Kec. Jepon					
3	RDTR Kec. Kunduran					
4	RDTR Kecamatan Blora					
5	RDTR Kecamatan Cepu					
	KOTA SEMARANG					
1	RDTR Kec Tugu					Proses Fasilitasi
2	RDTR BWK V Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan					
	KAB PEKALONGAN					
1	RDTR Kec Kedungwuni					Perbup Pekalongan 21/2021 tentang RDTR BWP Kecamatan Kedungwuni 2021 - 2041 (9 Juni 2021)
2	RDTR Kec. Siwalan					
	KAB PURBALINGGA					
1	RDTR Kaw Perkotaan Purbalingga					Perbup Purbalingga 46/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga Tahun 2021 - 2041 (10 Juni 2021)
2	RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari					Proses Fasilitasi
	KAB JEPARA					
1	RDTR Kec Jepara					Perbup Jepara No 55 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Jepara Tahun 2021 - 2041 (26 Oktober 2021)
2	RDTR Mayong					
3	RDTR Kawasan Perkotaan Kalinyamatan					
	Kab PURWOREJO					
1	RDTR Perkotaan Purworejo Kutoarjo					Perbup No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo Tahun 2022-2041
2	RDTR Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Yogyakarta International Airport					Linsek 20 Juli 2023
	KAB KUDUS					
1	RDTR Kawasan Perkotaan Jekulo					
2	RDTR Kec. Undaan					
	KAB KLATEN					
1	RDTR Kecamatan Karangdowo					
2	RDTR Kecamatan Gantiwarno					
3	RDTR Kecamatan Trucuk					
4	RDTR Kecamatan Bayat					
5	RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan					Linsek 19 September 2023
6	RDTR Kecamatan Wedi					
	KAB. TEMANGGUNG					
1	RDTR Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh					

NO	KABUPATEN	PENYUSUNAN	*PROSES PERSUB ATR*	*PROSES Fasilitasi*	PERDA/ PERKADA BARU	KETERANGAN
	KAB. DEMAK					
1	RDTR Perkotaan Demak					
2	RDTR Perkotaan Mranggen					
	KAB CILACAP					
1	RDTR Kaw Perkotaan Cilacap					Perbup Cilacap 75/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021 - 2041 (9 Juni 2021)
2	RDTR Kawasan Perkotaan Kroya					
3	RDTR Kawasan Perkotaan Maos					
4	RDTR Kawasan Perkotaan Majenang					
5	RDTR Kawasan Perkotaan Dayeuhluhur					
6	RDTR Kawasan Perkotaan Sidareja					Perbup No. 6 Tahun 2023 tentang RDTR Sidareja (4 April 2023)
	KAB KENDAL					
1	RDTR Kecamatan Kaliwungu					proses fasilitasi
2	RDTR Kecamatan Brangsong					proses fassilitasi
3	RDTR Kecamatan Boja					
4	RDTR Kecamatan Patebon					
5	RDTR Kecamatan Kendal					
6	RDTR Kecamatan Kaliwungu Selatan					
7	RDTR Kecamatan Kangkung					
8	RDTR Kecamatan Ngampel					
9	RDTR Ringinarum					
10	RDTR Gemuh					
11	RDTR Rowosari					
12	RDTR Weleri					
13	RDTR Kecamatan Pegandon					
14	RDTR Sukorejo					
	KOTA SURAKARTA					
1	RDTR Perkotaan Surakarta					Linsek 19 September 2023
	KAB. KARANGANYAR					
1	RDTR KP Karanganyar					
	KAB. GROBOGAN					
1	RDTR Kawasan Perkotaan Purwodadi					
2	RDTR Gubug					
3	RDTR Klambu					
	KAB. REMBANG					
1	RDTR Perkotaan Rembang					
2	RDTR Kecamatan Lasem					
3	RDTR Kawasan Koridor Jalan Pantura Kragan-Sluke					
	KOTA TEGAL					
1	RDTR Kota Tegal					Hasil fasilitasi keluar tanggal 11 Mei
	KAB. PATI					
1	RDTR Kecamatan Juwana					
2	RDTR Kecamatan Batangan					
3	RDTR Kecamatan Tayu					
	KAB. TEGAL					
1	RDTR Slawi-Adiwerna					
2	RDTR Talang-Dukuhturi					

NO	KABUPATEN	PENYUS UNAN	*PROSES PERSUB ATR*	*PROSES Fasilitasi*	PERDA/ PERKADA BARU	KETERANGAN
	KAB. BANJARNEGARA					
1	RDTR Perkotaan Banjarnegara					
	KAB. WONOSOBO					
1	RDTR Kertek					
2	RDTR Perkotaan Wonosobo					
	KAB KEBUMEN					
1	RDTR Perkotaan Kebumen					
2	RDTR Prembun					
	KOTA MAGELANG					
1	RDTR Kota Magelang					
	KAB WONOGIRI					
1	RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Wonogiri					Peraturan Bupati Wonogiri No. 63 Tahun 2022 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Wonogiri Tahun 2022-2042
2	RDTR Geopark Nasional Gunungsewu					
3	RDTR Kecamatan Pracimantoro					
4	RDTR Kecamatan Ngadirojo					
	33 Kab/Kota	**98**	**34**	**31**	**25**	**25**

Sumber : Dinas PUSDATARU Prov. Jateng, (27Maret 2023)

Dalam rangka pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan sebesar 20 persen, pemerintah provinsi perlu melakukan upaya pendorongan untuk mewujudkan hal tersebut. Rata-rata luasan RTH publik di Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah sebesar 7,86 persen dari luas perkotaan di Jawa Tengah. Proporsi ini tentunya masih jauh dari angka sebagaimana yang diamanatkan.

Tabel 2.171.

Rata – Rata Luasan RTH Di Kawasan Perkotaan Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kota Semarang	2.700,68	2.700,68	2.700,68	6,99%	6,99%	6,99%
2	Kab. Semarang	756,48	756,48	382,87	6,73%	6,73%	6,31%
3	Kota Salatiga	482,16	482,16	482,16	8,33%	8,33%	8,33%
4	Kab. Kendal	477,62	477,62	393,82	5,43%	5,43%	4,48%
5	Kab. Demak	392,02	392,02	311,56	5,49%	5,49%	4,37%
6	Kab. Grobogan	869,91	869,91	869,91	11,70 %	11,70 %	11,70 %
7	Kab. Pati	615,39	615,39	352,47	5,66%	5,66%	3,88%
8	Kab. Kudus	1.036,77	1.036,77	1.036,77	9,92%	9,92%	9,92%
9	Kab. Jepara	449,05	468,35	468,35	4,72%	4,88%	4,88%
10	Kab. Blora	547,84	547,84	547,84	12,34 %	12,34 %	12,34 %
11	Kab. Rembang	448,48	448,48	448,48	16,33 %	16,33 %	16,33 %
12	Kab. Klaten	611,43	611,43	547,82	6,17%	6,17%	5,58%
13	Kab. Boyolali	114,44	195,68	195,68	3,20%	4,96%	4,96%
14	Kab. Wonogiri	357,85	357,85	316,59	5,80%	5,80%	7,24%
15	Kab. Sukoharjo	998,32	998,32	177,40	6,15%	6,15%	2,59%
16	Kab. Sragen	208,64	242	242	2,78%	5,57%	5,57%

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2020	2021	2022
17	Kota Surakarta	583,78	583,78	583,78	12,35 %	12,35 %	12,35 %
18	Kab. Karanganyar	252,65	252,65	252,65	7,40%	7,40%	7,40%
19	Kab. Purworejo	524,41	524,41	524,41	7,30%	7,30%	7,30%
20	Kab. Temanggung	245,45	245,45	245,45	7,56%	7,56%	7,56%
21	Kab. Wonosobo	504,13	504,13	504,13	14,41 %	14,41 %	14,41 %
22	Kab. Kebumen	1.434,68	1.434,68	1.434,68	11,00 %	11,00 %	11,00 %
23	Kab. Magelang	543,62	1.055,54	1.055,54	3,47%	9,30%	9,30%
24	Kota Magelang	449,15	449,15	449,15	24,22 %	24,22 %	24,22 %
25	Kab. Banjarnegara	403,23	403,23	403,23	10,03 %	10,03 %	10,03 %
26	Kab. Banyumas	1.178,83	1.178,83	1.178,83	5,79%	5,79%	5,79%
27	Kab. Batang	345,47	345,47	345,47	7,51%	7,51%	7,51%
28	Kab. Brebes	1.185,43	1.185,43	1.185,43	9,62%	9,62%	9,62%
29	Kab. Cilacap	1.677,33	1.677,33	1.677,33	6,48%	6,48%	6,48%
30	Kota Pekalongan	294,91	294,91	294,91	6,35%	6,35%	6,35%
31	Kota Tegal	592,9	592,9	592,9	15,12 %	15,12 %	15,12 %
32	Kab Pekalongan	196,09	120,17	120,17	3,89%	4,53%	4,53%
33	Kab. Pemalang	1.267,67	1.267,67	1.267,67	16,72 %	16,72 %	16,72 %
34	Kab. Purbalingga	164,49	164,49	164,49	5,89%	5,89%	5,89%
35	Kab. Tegal	377,46	377,46	203,53	5,70%	5,70%	6,97%
36	Jumlah Provinsi Jawa Tengah	23.288,76	23.858,66	21.958,15	7,49%	7,91%	7,86%

Sumber: Dinas PUSDATARU Prov. Jateng, 2022

Selain itu upaya pengendalian pemanfaatan ruang juga dilakukan dengan pengawasan terhadap kinerja Penataan Ruang baik di Provinsi maupun di kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui sistem pengawasn teknis (SIWASTEK). Pengawasan penataan ruang merupakan upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 212 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengawasan penataan ruang dilaksanakan terhadap kinerja pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan pelaksanaan penataan ruang; kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang; serta kinerja pemenuhan standar teknis penataan ruang kawasan. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 216 PP No. 21/2021 diamanatkan bahwa Gubernur melakukan pengawasan penataan ruang terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Untuk itu, Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 telah melaksanakan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Kementerian ATR/BPN melalui sistem SIWASTEK. Selain itu juga sebagai bentuk provinsi melaksanakan tugas pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Provinsi Jawa Tengah juga telah membentuk Tim Pengawas Provinsi sebagai pelaksana kegiatan pengawasan kinerja penyelenggaraan penatan ruang pada tahun 2022.

Tujuan dari Pengawasan Kinerja TURBINLAK Penataan Ruang dan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai indikator kemajuan Penataan Ruang suatu daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Hasil Siwastek kabupaten kota pada tahun 2022 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.172.

Tabel Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang

Kab/Kota	Nilai Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kategori
Jepara	86	baik
Cilacap	83	baik
Purbalingga	79	sedang
Klaten	79	sedang
Batang	77	sedang
Blora	77	sedang
Pati	75	sedang
Kota Pekalongan	75	sedang
Boyolali	74	sedang
Kota Seamrang	73	sedang
Kota Magelang	73	sedang
Kota Tegal	73	sedang
Brebes	71	sedang
Temanggung	70	sedang
Purworejo	69	sedang
Grobogan	68	sedang
Pekalongan	68	sedang
Sukoharjo	67	sedang
Rembang	66	sedang
Sragen	66	sedang
Kudus	66	sedang
Banyumas	63	sedang
Wonogiri	63	sedang
Surakarta	61	sedang
Pemalang	60	sedang
Kendal	60	sedang
Magelang	60	sedang
Semarang	60	sedang
Salatiga	60	sedang
Demak	58	sedang
Banjarnegara	58	sedang
Kebumen	56	sedang
Karanganyar	56	sedang
Wonosobo	50	sedang
Tegal	46	buruk

Sumber: Dinas PUSDATARU Prov. Jateng, 2022

2.5.8.Energi dan Sumber Daya Mineral

Sistem ketenagalistrikan Jawa Tengah ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi antar Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Dengan demikian dalam pemenuhan kebutuhan listrik, Jawa Tengah tidak hanya ditopang oleh pembangkit yang ada di Jawa Tengah namun juga Jawa Barat, Jawa Timur, Madura dan Bali. Sistem ketenagalistrikan di Jawa Tengah merupakan bagian dari satu kesatuan sistem di Pulau Jawa, Pulau Madura dan Pulau Bali yang terhubung secara interkoneksi dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV. kecuali wilayah di Kepulauan Karimunjawa. Wilayah Kepulauan Karimunjawa merupakan wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang tidak terhubung dengan sistem JAMALI karena merupakan pulau berlistrik mandiri (Isolated). Pasokan energi di Karimunjawa disuplai oleh PLTD Legon Bajak dengan kapasitas sebesar 2 x 2,2 MW sehingga pada tahun 2016 penduduk di Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan sudah dapat menikmati listrik 24 jam. Selain itu berdasarakan nota kesepahaman antara PLN dan Pemkab Jepara tentang pengalihan pengelolaan kelistrikan di Pulau Karimunjawa pada tanggal 21 Juli 2022, pengelolaan kelistrikan di Pulau Parang, Genting, dan Nyamuk, Kecamatan Karimunjawa telah di ambil alih PLN. Pulau Parang disupply oleh PLTS eksisting sebesar 135,8 KWp dan diesel 350 KVA, melayani pelanggan sebanyak 342KK. Pulau Nyamuk dengan kapasitas PLTS 111KWp dan diesel 100KVA melistriki 177KK serta Pulau Genting disupply oleh PLTS sebesar 36 KWp dan diesel 30KVA melistriki 86 KK. Rencana pada tahun 2023 PLN melalui program dedieselisasi, untuk ketiga pulau tersebut akan dilakukan penambahan kapasitas PLTS dengan rincian Pulau Parang sebesar 645KWp, Pulau Nyamuk sebesar 345KWp dan Pulau Genting sebesar 155KWp. Diharapkan setelah dilakukan penambahan kapasitas PLN, maka diesel sudah tidak digunakan lagi dan 3 pulau tersebut menggunakan *green energy*. Karimunjawa diharapkan menuju *Green Tourism* di Jawa Tengah.

Sumber: PLN , 2022

Gambar 2.86.
Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah dan DIY

Kelistrikan Jawa Tengah dan DIY disuplai dari 6 subsistem (SS), antara lain : Subsistem Ungaran 1-2, Subsistem Pedan 1-2, Subsistem Pedan 3-4, SubsistemTanjung Jati, Subsistem Kesugihan, dan Subsistem Pemalang. Beban Puncak Sistem Jateng dan DIY sebesar 4851 MW dengan reserve power sebesar 2621 MW.

Selain itu terdapat beberapa pembangkit tenaga listrik yang telah selesai dibangun di Jawa Tengah dalam rangka mendukung Program Listrik 35.000 MW secara nasional. Progress pembangunan pembangkit interkoneksi di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2022, yaitu:

1) PLTU Jawa Tengah/ PLTU Batang (2x1000 MW): *overall progress* 100 persen (per Desember 2022); telah COD Unit 1 pada 15 Agustus 2022 dan Unit 2 pada 31 Agustus 2022;
2) PLTU Jawa 4/ PLTU Tj. Jati B Unit 5 dan 6 (2x1.000 MW): *overall progress* 100 persen (per Desember 2022); telah COD Unit 5 pada 17 Maret 2022 dan Unit 6 pada 30 September 2022;
3) PLTGU Jawa-Bali 1/ Tambaklorok (779 MW): *overall progress* 93,73 persen (per September 2023); Rencana COD pada 26 November 2023 (*estimated*).

Seiring dengan peningkatan kapasitas daya listrik terpasang berbanding lurus dengan konsumsi energi listrik di Jawa Tengah. Selama kurun waktu 2015 hingga 2021 menunjukkan peningkatan konsumsi energi listrik dari 20.418 GWh pada tahun 2015 menjadi 27.365 GWh pada tahun 2020, yang kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 26.661 GWh. Meskipun demikian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 27.564 GWh.

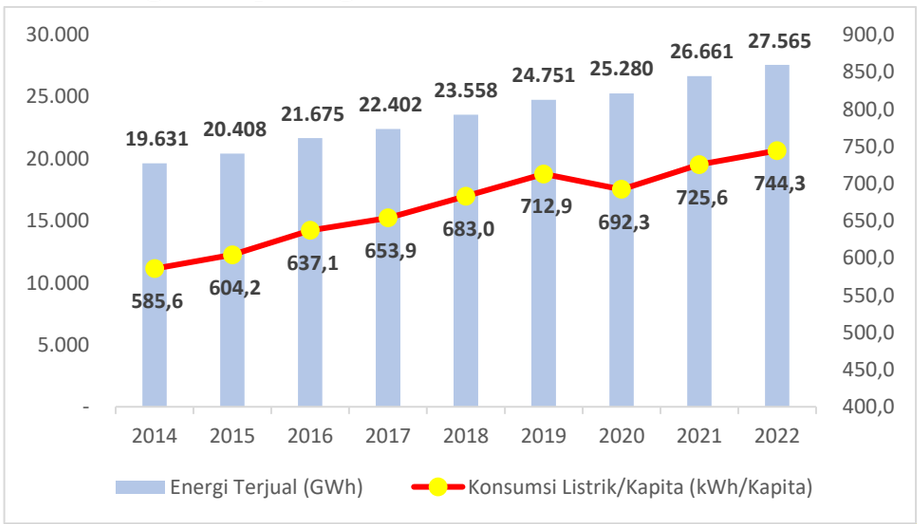

Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.87.
Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 - 2022 (GWh)

Selain itu peningkatan kebutuhan energi listrik juga terlihat dari Konsumsi listrik per kapita. Selama kurun waktu 2014 hingga tahun 2022 mengalami trend peningkatan dari 585,6 menjadi 744,3 kWh per Kapita. Konsumsi listrik perkapita erat kaitanya dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi konsumsi listrik perkapita disuatu daerah maka semakin tinggi juga potensi kesejahteraan di daerah tersebut. Konsumsi Listrik di Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah tetangga di Pulau Jawa. Menurut data dari PLN UID Jateng DIY, konsumsi litrik Jawa Timur sudah mencapai 907 kWh/kapita, Jawa Barat sebesar 1.012 kWh/kapita, dan DKI Jakarta telah mencapai 3.248 kWh/kapita. Dengan demikian, potensi konsumsi listrik Jawa Tengah masih harus terus didorong dan ditingkatkan. Tidak hanya mendorong pemanfaatan untuk kegiatan konsumtif tetapi utamanya juga mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif.

Rasio Elektrifikasi (RE) Jawa Tengah sejak tahun 2019 telah mencapai 99,91% dengan Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) di Jawa Tengah telah mencapai 100%. Berdasarkan data RE masih terdapat 0,12 persen KK belum memiliki listrik secara mandiri. KK belum berlistrik tersebut sebagian besar merupakan rumah tangga miskin. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan akses listrik mandiri bagi rumah tangga tidak mampu melalui program listrik gratis. Program listrik gratis telah dimulai sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2022 dengan total akumulasi sudah 78.955 unit rumah tersambung listrik. Perkembangan rasio elektrifikasi dan akumulasi sambungan listrik gratis selama tahun 2018-2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.173.
Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Elektrifikasi (%)	98,52	99,91	99,99	99,99	99,99
2.	Sambungan Listrik Gratis	13.092	27.225	40.173	55.280	78.955

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022

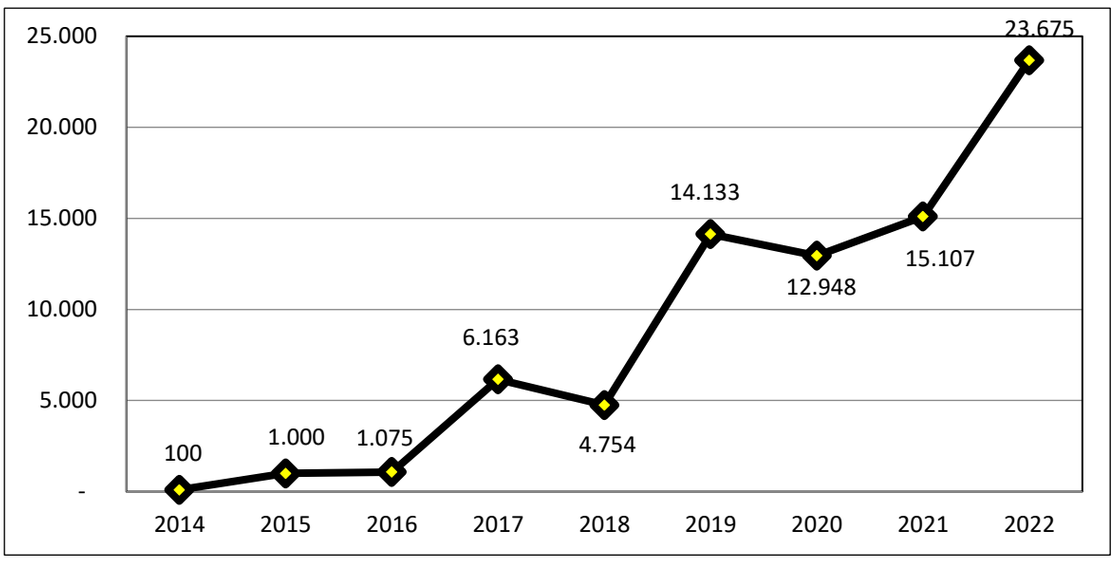

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.88.
Program Listrik Gratis di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2022 (Unit)

Kecukupan pemenuhan listrik di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Rasio Ketersediaan Daya Listrik yang merupakan perbandingan daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan. Idealnya Rasio Ketersediaan Daya Listrik menunjukkan angka 1 atau 100 persen yaitu menunjukkan bahwa antara daya terpasang sesuai dengan jumlah kebutuhan listrik.

Tabel 2.174.
Rasio Ketersediaan Daya Listrik Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Daya Listrik Terpasang (MW)	6.325,24	6.365	7.203	7.203	9.200

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	Kebutuhan Listrik (MW)	5.635	5.480	5.588	5.720	6.306
3	Rasio Ketersediaan Daya Listrik (angka)	1,12	1,16	1,29	1,26	1,46

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat bahwa pasokan listrik di Jawa Tengah sangat memadai bahkan memiliki reserve margin/cadangan sebesar 46 %. Reserve margin yang terjadi diharapkan dapat menjadi sentimen positif dalam menarik tumbuhnya industri di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah siap untuk menerima investasi baru khususnya di Kawasan Industri yang telah tersedia di Jawa Tengah diantaranya Batang Industrial Park (KI Segayung), Grand Batang City (KIT Batang), KI Kendal (KEK Kendal), KI Wijayakusuma, Tanjung Emas Export Processing Zone (Lamicitra Nusantara), KI Terboyo, LIK Bugangan Baru Semarang, Jatengland Industrial park Sayung, KI Candi, Taman Industri BSB, dan KI Cilacap. Tantangan Ketenagalistrikan bukan lagi tentang ketersediaan tetapi terkait keandalan mutu layanan untuk mengurangi keluhan dari sisi ditribusinya dan keberlanjutan dari sisi produksi energi listriknya.

Jawa Tengah masih memiliki ketergantungan pada energi fosil. Hal tersebut terlihat dari jumlah persentase penggunaan energi fosil sebesar 84,24 persen pada tahun 2022 yang berdampak pada tingginya emisi gas rumah kaca di Jawa Tengah. Peta jalan Provinsi Jawa Tengah terkait transisi energi menuju energi baru terbarukan ada dalam Perda RUED Provinsi Jateng No 12 Tahun 2018. Dalam perda tersebut Pemerintah Jawa Tengah telah mentargetkan persentase EBT dalam bauran energi sebesar 21,32% tahun 2025 dan 28,82% di tahun 2050. Kolaborasi multi-pihak, yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/provinsi menjadi kebutuhan bersama dan masing-masing pihak punya *resources* dan *capacity* yang bisa dikontribusikan untuk menyiapkan fasilitas energi terbarukan. Dalam hal ini semua pihak memberikan kontribusi sesuai kewenangan.

Walaupun penggunaan energi fosil masih relatif tinggi tetapi penggunaan EBT menunjukkan trend positif setiap tahunnya. Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi, hingga akhir Tahun 2022 telah mencapai 15,76% dari kondisi awal pada tahun 2014 sebesar 7,01%. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus tetap mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan yaitu EBT, mengingat potensi EBT di Jawa Tengah cukup banyak, antara lain energi surya, air, biogas, waste to energy (biomassa), gas rawa, dan panas bumi. Peta Potensi EBT di Jateng dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, dan IESR 2022

Gambar 2.89.

Potensi Teknis PLTS Terapung di Jawa Tengah

Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya terapung di Jawa Tengah mencapai 723,07 MWp. Dua Bendungan dengan potensi terbesar adalah Kedung Ombo dan Gajahmungkur. Kedua bendungan tersebut telah masuk dalam RUPTL PLN 2021-2030 sebagai pembangkit yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem.

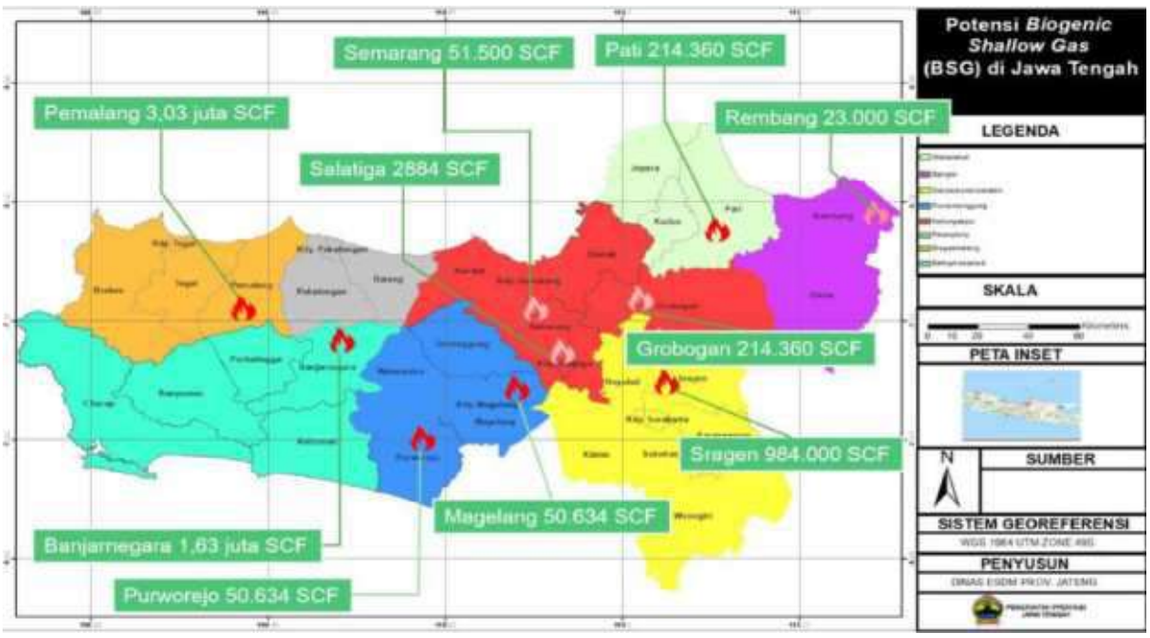

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.90.

Potensi Biogenic Shallow Gas (Gas Rawa) di Jawa Tengah

Total potensi BSG yang diketahui di Jawa Tengah adalah sekitar 14,47 juta SCF (Standart Cubic Feet). Potensi terbesar terpetakan di Kabupaten Pemalang dengan 3,03 juta SCF dan terendah dideteksi di Kota Salatiga sebesar 2.884 SCF. Potensi lainnya tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan variasi besaran potensi cadangan gas rawa (lihat gambar Peta Potensi BSG). Potensi yang besar dapat menjadikan pergeseran gas rawa sebagai sumber energi primer yang dapat secara langsung digunakan dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat sehari-hari. Bentuk optimalisasi sumber daya gas rawa ini, terlihat

pada kegiatan pembangunan infrastruktur instalasi gas rawa (biogenic shallow gas) di Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini telah tersebar pada 6 titik lokasi di 4 kabupaten dengan jumlah jangkauan sambungan sebanyak 340 sambungan rumah.

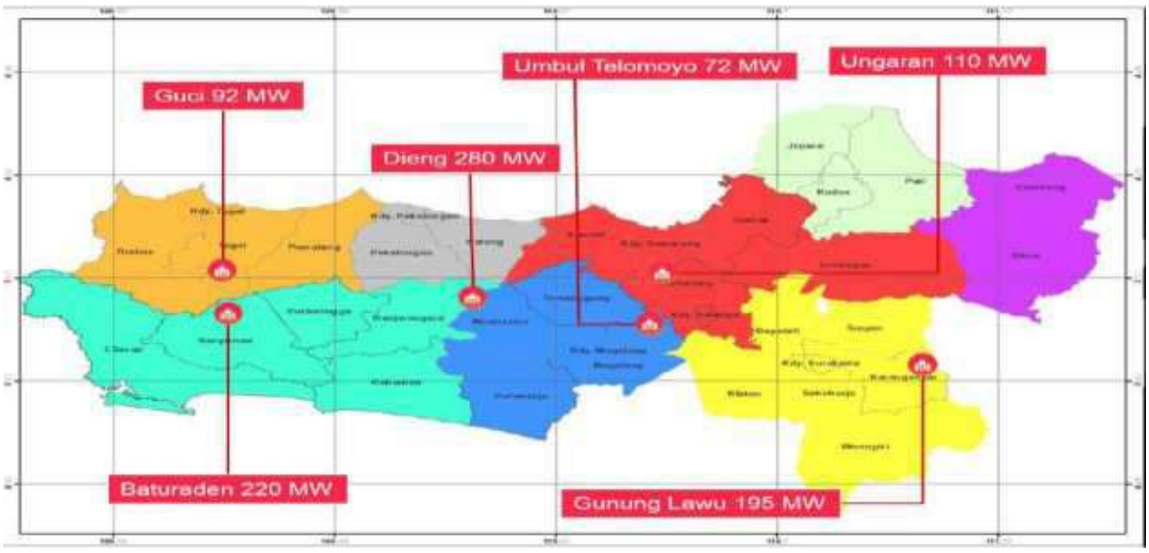

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.91.
Potensi Panas Bumi di Jawa Tengah

Jawa Tengah juga memilki potensi panas bumi cukup besar. Potensi panas bumi yang diperkirakan dapat dikembangkan di Jawa Tengah mencapai 1.981 MW. Potensi panas bumi yang sudah dimanfaatkan di Jawa Tengah sebagai pembangkit adalah di PLTPanas Bumi Dieng dengan kapasitas 70 MW. Baru 3,53 % yang telah termanfaatakan dari total potensi. Pengembangan potensi panas bumi menjadi prioritas karena diharapkan akan menambah pasokan energi listrik berbasis EBT di Jawa Tengah. Melalui pengembangan dan pemanfaatan EBT ini, maka diharapkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terutama dari sektor energi dapat ditekan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menurunkan emisi GRK sektor energi dari 24.512 tCO2e pada tahun 2019 menjadi 123.401 tCO2e tahun 2023 adalah melalui pembangunan infrastruktur EBT. Perkembangan persentase EBT dalam bauran energi selama tahun 2014-2022 sebagai berikut:

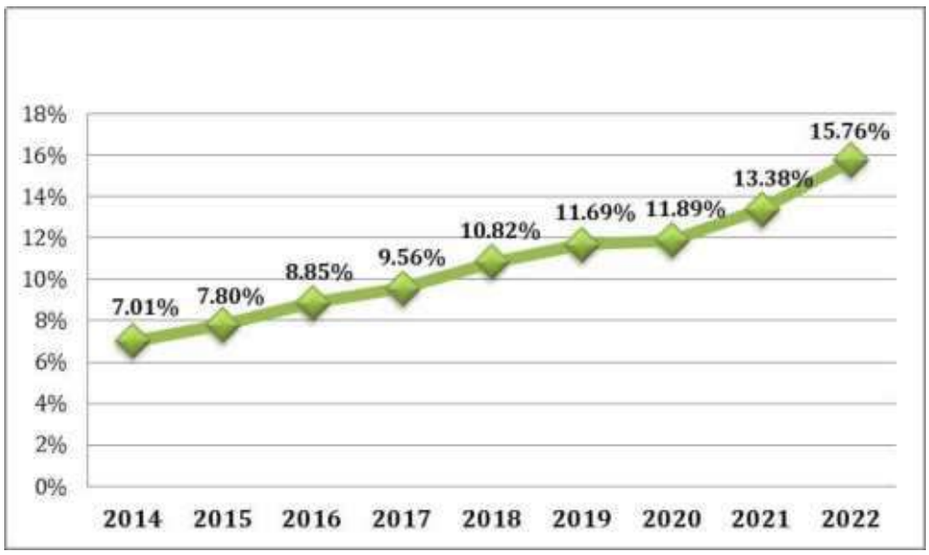

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.92.
Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2022

Selain kegiatan pembangunan infrastruktur EBT, upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca, antara lain melalui pelaksanaan penghargaan Desa Mandiri Energi, Hemat Energi dan Air, dan Audit Energi. Penghargaan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pemerintah Desa dan masyarakat secara luas dalam melaksanakan diversifikasi energi dan pengembangan teknologi baru berbasis energi baru terbarukan menuju kemandirian energi di Jawa Tengah. Adapun upaya konservasi energi diwujudkan salah satunya dengan pelaksanaan penghargaan Gerakan Hemat Energi dan Air serta audit energi. Gerakan Hemat Energi dan Air menjadi sebuah tindakan promotif untuk mendorong peran serta pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor Industri dalam menggerakkan perilaku budaya hemat energi dan air di masa yang akan datang serta mendorong upaya konservasi energi untuk menjaga ketahanan energi. Sedangkan kegiatan Audit Energi dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik gedung, baik instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung pelaksanaan konservasi energi.

Sebagai motor penggerak peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan diperlukan langkah strategis untuk mengajak peran serta seluruh masyarakat dalam mewujudkan kemandirian energi daerah, melalui program penyuluh energi. Program penyuluh energi bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memilih, memakai, mengembangkan energi baru terbarukan yang tersedia dan berpotensi di sekitarnya, sehingga akan ada perubahan perilaku masyarakat dari penggunaan energi konvensional (energi fosil) sebagai sumber energi utama menjadi pemanfaatan energi baru terbarukan serta memberikan fasilitasi dalam pembinaan kelembagaan pengelolaan energi di daerah. Adanya program penyuluh energi dapat menjadi katalis terwujudnya desa mandiri energi di Jawa Tengah. Capaian Desa Mandiri Energi (DME) sampai dengan tahun 2022 sejumlah 2.353 desa, yang kemudian berdasarkan tingkat pemanfaatan energi baru terbarukan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yakni DME Inisiatif dengan kondisi eksisting 2.167 desa, DME Berkembang dengan kondisi eksisting 160 desa, dan DME Mapan dengan kondisi eksisting 26 desa. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Energi maupun Hemat Energi dan Air perlu dilakukan

monitoring dan evaluasi terkait dengan pengembangan pemanfaatan EBT di desa tersebut.

Pengembangan suatu wilayah dan pembangunan di berbagai sektor akan mempengaruhi keberadaan air tanah dan siklus air tanah. Penggunaan air yang tidak sesuai kebutuhan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan mengakibatkan potensi air tanah semakin berkurang. Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Indeks Ketersediaan Air Tanah Jawa Tengah cenderung menurun secara fluktuatif selama kurun waktu 2016 hingga 2020, sedangkan pada tahun 2022 meningkat.

Tabel 2.175.
Indeks Ketersediaan Air Tanah di Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah potensi aman pengambilan air tanah	820.185.750	820.185.750	820.185.750	820.185.750	820.185.750
Jumlah pengambilan air tanah	267.633.695	263.724.945	269.109.632	228.463.997	223.483.855
Indeks Ketersediaan Air Tanah	3,06	3,08	3,05	3,59	3,67

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021

Berdasarkan tabel di atas kecenderungan ketersediaan air tanah meningkat, yang menandakan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku yang bersumber dari air permukaan bisa dikatakan juga meningkat. Potensi Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah cukup memadai, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.37. Jawa Tengah memiliki 31 Cekungan Air Tanah (CAT), yang terdiri dari 6 CAT merupakan lintas provinsi, 19 CAT lintas kabupaten/kota (merupakan kewenangan provinsi), dan 6 CAT dalam wilayah satu kabupaten/kota. Potensi air tanah pada 31 CAT di Jawa Tengah selengkapnya ditunjukkan tabel di bawah.

Tabel 2.176.
Potensi Air Tanah pada 31 CAT di Jawa Tengah

Jumlah CAT	Potensi Air Tanah (Juta m^3/tahun)	
	Bebas	Tertekan
19 CAT lintas kab/kota	6.575,64	140,70
6 CAT lokal (kabupaten)	355,20	5,80
6 CAT lintas provinsi	411,15	11,30
Jumlah Total	7.341,99	157,80

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2019

Pada 25 Cekungan Air Tanah di Jawa Tengah yang berada di CAT dalam Provinsi, 21 CAT telah disusun zona pemanfaatan dan konservasi, yang berdasarkan Permen ESDM No. 31 Tahun 2018 tentang Penyusunan Zona Konservasi Air Tanah. Zona Konservasi Air Tanah dibagi menjadi 4 kategori, yaitu zona imbuhan air tanah, zona aman, zona rawan, zona kritis, zona rusak. Dari 21 CAT yang telah disusun zona pemanfaatan dan konservasi air tanah, terdapat 3 CAT yang masuk zona kritis serta 2 CAT yang masuk zona rusak. 3 CAT yang

terdapat Zona Kritis adalah pada CAT Semarang-Demak, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Karanganyar-Boyolali. Sedangkan 2 CAT yang terdapat zona rusak adalah CAT Semarang-Demak dan CAT Pekalongan-Pemalang. Kondisi CAT Semarang-Demak, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Karanganyar-Boyolali yang terdapat zona kritis dan rusak disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

a. Kondisi kualitas air tanah yang memiliki nilai daya hantar listrik (DHL) tinggi, >1000 µs/cm, serta nilai zat terlarut (TDS) >1500 ppm;
b. Kondisi muka air tanah mengalami penurunan kedudukan >40% dari kedudukan awal.

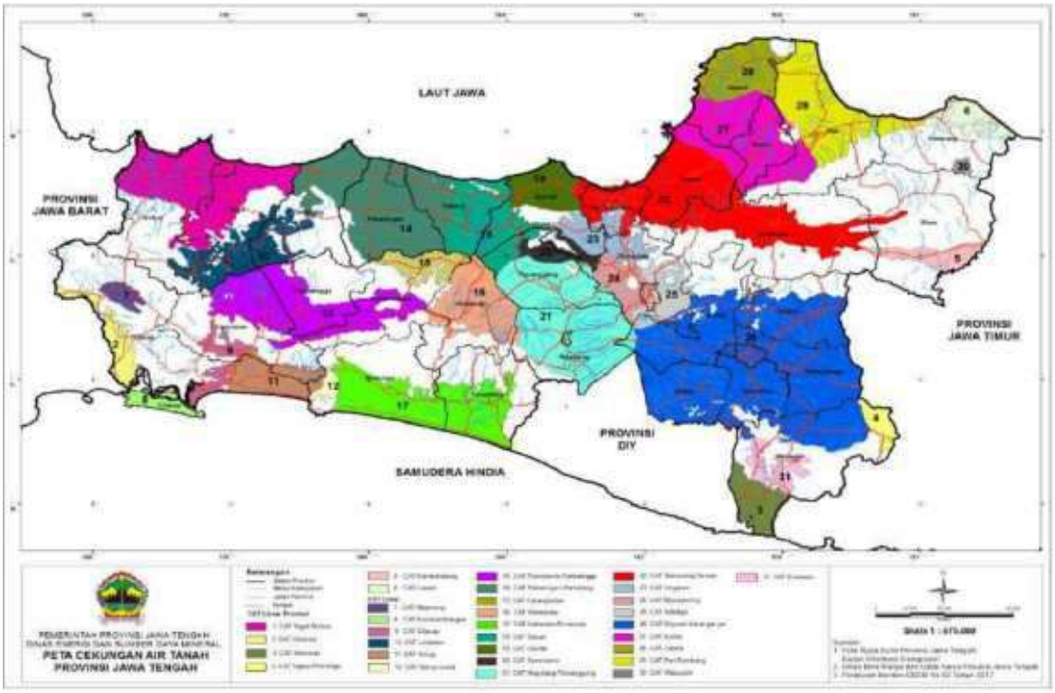

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2021

Gambar 2.93.
Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Tengah

Dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas air tanah maka diperlukan konservasi air tanah berupa pengendalian pengambilan air tanah dan perbaikan degradasi air tanah. Pentingnya konservasi air tanah belum banyak disosialisasikan dalam bentuk visualisasi meskipun upaya tersebut telah dilakukan kepada masyarakat khususnya generasi muda, melalui penghargaan Hemat Energi dan Air di sekolah-sekolah, sebagai upaya membudayakan hemat pemakaian air.

Kedepan penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah periode 2024 sampai dengan 2026 menggunakan penilaian baru yang lebih detail, yaitu terkait dengan faktor pengambilan air tanah. Pada periode 2018 sampai dengan 2023, penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah untuk faktor pengambilan hanya menggunakan parameter jumlah pengambilan air tanah dari yang berizin saja. Pada periode 2024 sampai dengan 2026 untuk penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah, faktor pengambilan akan menggunakan parameter sebagai berikut :

- Jumlah pengambilan air tanah dari yang berizin;
- Jumlah pengambilan air tanah dari yang tidak berizin;
- Jumlah pengambilan air tanah dari penduduk non PDAM.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk menjaga ketersediaan air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah. Pemanfaatan air tanah dapat dilakukan antara lain melalui pembangunan sumur bor/eksplorasi, sumur resapan/dangkal, dan sumur pantau. Sumur bor/eksplorasi bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sehingga prioritas sasaran pada daerah rawan kekeringan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan dari 8.569 desa/kelurahan di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 7 Desa/Kelurahan termasuk dalam Kelas Bahaya Tinggi kekeringan dan 2.809 Desa/Kelurahan masuk pada Kelas Bahaya Sedang kekeringan.

Tabel 2.177.

Potensi Ancaman Kekeringan Desa/Kelurahan di Jawa Tengah

PROVINSI JAWA TENGAH JUMLAH DESA/KELURAHAN : 8.569	
KELAS BAHAYA TINGGI	7 DESA/KELURAHAN
KELAS BAHAYA SEDANG	2.809 DESA/KELURAHAN

Sumber : Katalog Desa/Kelurahan Rawan Kekeringan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2019

Selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2020, Dinas ESDM Provinsi telah membangun sebanyak 92 unit sumur di 27 kabupaten/kota, 69 kecamatan, dan 85 desa/kelurahan, sehingga meningkatkan akses air tanah untuk masyarakat di daerah rawan kekeringan. Peta sebaran lokasi bantuan sumur bor untuk daerah rawan kekeringan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

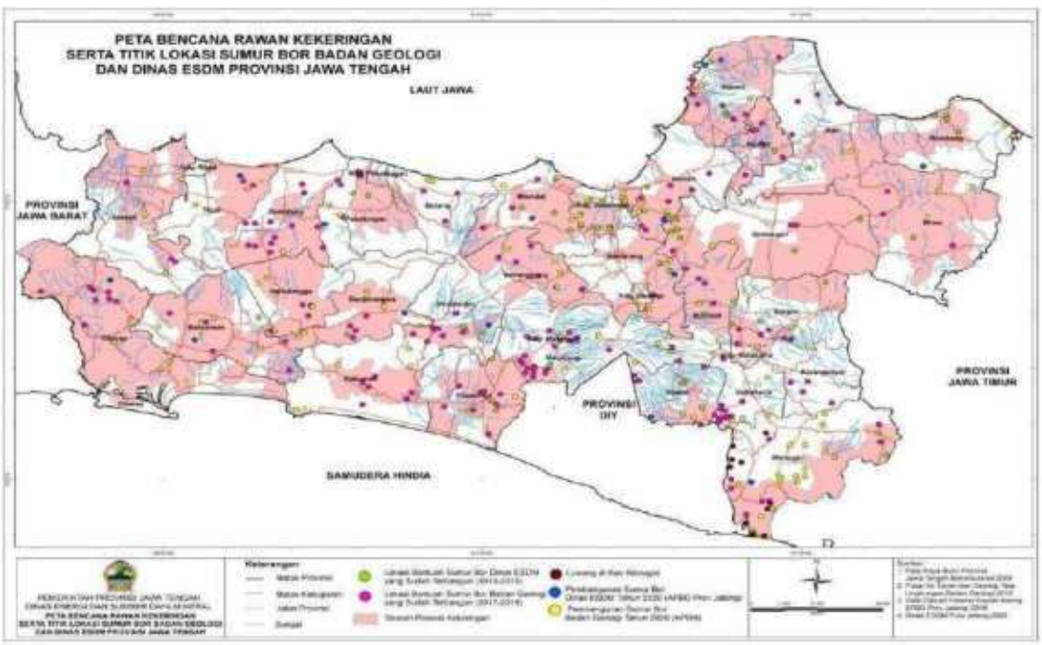

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2021

Gambar 2.94.

Peta Titik Lokasi Sumur Bor Badan Geologi dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah overlay dengan Peta Bencana Rawan Kekeringan

2.5.9.Penanggulangan Bencana

1) Wilayah Rawan Bencana

a) Kawasan Potensi Bahaya Banjir, Banjir didefinisikan sebagai kenaikan drastis dari aliran sungai, kolam, danau, dan lainnya,dengan kelebihan aliran tersebut menggenangi keluar dari tubuh air (Smith & Ward 1998). Apabila suatu peristiwa terendamnya air di suatu wilayah yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis maka banjir tersebut dapat disebut Bencana Banjir. Berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, ukuran bahaya (*hazard*) dari banjir adalah ketinggian genangan. Total luas bahaya banjir di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 935.504 Ha dan berada pada kelasTinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu kelas bahaya dengan kelas rendah seluas 19.340 Ha, kelas sedang seluas 469.909 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi seluas 446.255 Ha.

Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 2.384 Ha. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya banjir adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 47.626 Ha. Sedangkan pada kelas tinggi adalah Kabupaten Demak dengan luas 53.960 Ha.

Kabupaten/kota dengan potensi bahaya banjir tinggi meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

b) Kawasan Potensi Bahaya Banjir Bandang, Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba, karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Ukuran bahaya banjir bandang mengacu pada Pedoman Pembuatan Peta Rawan Longsor dan Banjir Bandang akibat runtuhnya bendungan alam yang dibuat oleh Kementerian PU (2012) yaitu asumsi ketinggian genangan banjir bandang setinggi 5 meter.

   Potensi luas bahaya banjir bandang dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir bandang. Total luas bahaya ProvinsiJawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruhkabupaten/kota terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kotayangterdampak bahaya banjir bandang.

   Potensi luas bahaya banjir bandang berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah seluas 104.332 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir bandangtersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 12.678 Ha, kelas sedang seluas32.757Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas 58.897 Ha.

Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir bandang pada kelas rendah, sedang dan tinggi adalah Kab upaten Brebes dengan luas 1.465 Ha, 4.746 Ha dan 9.574 Ha.

c) Kawasan Potensi Bahaya Cuaca ekstrim, Cuaca ekstrim merupakan fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Contoh cuaca ekstrim antara lain hujan lebat, hujan es, angin kencang, dan badai taifun. Pada kajian ini pembahasan cuaca ekstrim lebih dititikberatkan kepada angin kencang. Angin kencangmerupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (BNPB). Terjadinya angin kencang diawali dengan terbentuknya siklon yang dapat terjadi ketika wilayah bertekanan udara rendah dikelilingi oleh wilayah bertekanan udara tinggi. Pada umumnya kasus angin kencangdi Indonesia ditandai dengan terbentuknya awan kumulonimbus yang menjulang ke atas. Selanjutnya terjadi hujan lebat dengan hembusan angin kuat dalam waktu relatif singkat. Kejadian tersebut dapat memicu terjadinya angin kencang.

   Potensi bahaya cuaca ekstrim pada tabel tersebut di atas memaparkan jumlah luas kabupaten/kotayang memiliki kondisi rentan terhadap bencana cuaca ekstrim di ProvinsiJawa Tengahberdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di ProvinsiJawa Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum wilayah Provinsi Jawa Tengah terdampak cuaca ekstrim. Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di ProvinsiJawa Tengahsecara keseluruhan adalahseluas2.832.304 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas 997.704 Ha, pada kelas sedang seluas 324.567 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas
   1.510.033 Ha.

   Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim padakelas rendah dengan luas 84.966 Ha adalah Kabupaten Blora.Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelassedang dengan luas 37.207 Ha adalah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 104.032 Ha adalah Kabupaten Grobogan.

d) Kawasan Potensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya

keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai metode yang ada di dalam Perka No. 2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya gelombang ekstrim dan abrasi terdiri dari parameter tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai.

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah ProvinsiJawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum darikabupaten/kotayang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di ProvinsiJawa Tengah adalah 15.705 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Potensi luas bahaya tersebut meliputiluas bahaya dengan kelas rendah seluas 8.891 Ha, pada kelas sedang seluas 2.282 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 4.532 Ha. Sebaran luas bahaya di Provinsi Jawa Tengah untuk untuk kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi, dimana Kabupaten Cilacap memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas rendah, yaitu seluas 1.632 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas sedang adalah KabupatenJeparadengan luas 1.684 Ha, Sedangkan kabupaten/kotayang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas tinggi adalah Kabupaten Cilacap, yaitu 1.027 Ha.

e) Kawasan Potensi Bahaya Gempa Bumi, Gempabumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi, atau runtuhan batuan (BNPB). Metode kajian untuk gempabumi pada dokumen ini menggunakan data guncangan di batuan dasar yang dikonversi menjadi data guncangan di permukaan. Konversi ini dilakukan karena gempa dengan magnitudo yang tinggi di lokasi yang dalam belum tentu menghasilkan guncangan permukaan yang lebih besar dibandingkan gempa dengan magnitudo yang lebih rendah di lokasi yang lebih dangkal. potensi luas bahaya gempabumi kabupaten/kotadi ProvinsiJawa Tengahterpapar bencana gempabumi. Potensi bahaya gempabumi tersebut merupakan luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gempabumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya ProvinsiJawa Tengahditentukan berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota. Sedangkan kelas bahaya gempabumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdampak bahaya gempabumi. Potensi luas bahaya gempabumi di Provinsi Jawa Tengahsecara keseluruhan adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya gempabumi tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 2.793.772 Ha, kelas sedang seluas 451.437 Ha, dan

daerah yang terdampak bahaya gempa bumi pada kelas tinggi seluas 31.898 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempabumi pada kelas rendah adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 201.103 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempabumi pada kelas sedang dengan luas 68.662 Ha adalah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempabumi pada kelas tinggi seluas 17.341 Ha adalah Kabupaten Klaten.

f) Kawasan Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan, Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Peraturan Menteri Kehutanan No P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada wilayah yang vegetasinya rawan untuk terbakar misalnya pada wilayah gambut. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan pembukaan lahan oleh manusia. Analisis bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkembang adalah analisis multi-kriteria yang menggabungkan beberapa parameter yang memiliki hubungan sebagai faktor penyebab terjadinya ancaman karhutla.

   Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak, sedangkan kelas bahaya di Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di ProvinsiJawa Tengahsecara keseluruhan adalah 963.331Hadan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 304.437 Ha, kelas sedang seluas 548.759 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas tinggi seluas 110.135 Ha.

g) Kawasan Potensi Bahaya Kekeringan, Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.1 Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan yang dikaji dalam dokumen ini adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi awal terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun metode analisis indeks kekeringan yang dilakukan adalah

Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) yang dikembangkan oleh Vicente-Serrano dkk pada tahun 2010. Penentuan kekeringan dengan SPEI membutuhkan data curah hujan dan suhu udara bulanan dengan periode waktu yang cukup panjang. Perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode Thornthwaite, maka data suhu yang digunakan adalah hanya suhu bulanan rata-rata. Potensi bahaya kekeringan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kekeringan. Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak, sedangkan kelas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak bencana kekeringan. Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di ProvinsiJawa Tengahsecara keseluruhan adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas Tinggi.Luas bahaya kekeringan tersebut dirinci menjadi kelas sedang seluas2.336.056 Ha dan kelas tinggi seluas 941.051 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas sedang dengan luas 196.387 Ha adalah Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kendal adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas tinggi seluas 107.775 Ha.

h) Kawasan Potensi Bahaya Tanah Longsor, Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah (Dinas PU, 2012). Peta zona gerakan tanah dari PVMBG disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah potensi longsor. Kondisi lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai. Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor. Potensi luas bahaya tanah longsor di ProvinsiJawa Tengahsecara keseluruhan adalah1.020.772Hadan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 78.622 Ha, kelas sedang seluas 207.456 Ha dan kelas tinggi seluas 734.693 Ha. Kabupaten yang memiliki luastertinggi bahaya tanah longsor pada kelas rendah adalah KabupatenSemarang dengan luas 5.959 Ha. Kabupatenyang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas sedang adalah Kabupaten Wonosobo dengan luas 24.364 Ha. Pada kelas tinggi, kabupatenyang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor adalah Kabupaten Wonogiri dengan luas 62.658 Ha.

i) Kawasan Potensi Bahaya Tsunami, Tsunami adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivasi tektonik di dasar laut yang mengakibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi. Ukuran bahaya tsunami yang dikaji adalah pada seberapa besar potensi inundasi (genangan) di daratan berdasarkan potensi ketinggian gelombang maksimum yang tiba di garis pantai. Penentuan tingkat bahaya tsunami diperoleh dari hasil perhitungan matematis yang dikembangkan oleh Berryman (2006) berdasarkan perhitungan kehilangan ketinggian tsunami per 1 meter jarak inundasi (ketinggian genangan), nilai jarak terhadap lereng dan kekasaran permukaan. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tsunami pada kelas rendah seluas 3.447 Ha, pada kelas sedang seluas 2.827 Ha, dan pada kelas tinggi dengan luas 19.372 Ha.

j) Kawasan Potensi Bahaya Epidemi, Epidemi adalah suatu keadaanyang menunjukkan kejadian penyakit meningkat dalam waktu singkat dan penyebarannya telah mencakup wilayah yang luas. Wabah adalah kejadian suatu penyakit menular yang meningkat secara nyata melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Jadi secara harfiah dalam konteks potensi bencana, Epidemi dan Wabah Penyakit (EWP) merupakan potensi ancaman bencana non-alam yang diakibatkan oleh kejadian suatu penyakit menular pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat menimbulkan dampak (risiko) kematian dan gangguan aktivitas masyarakat. Metode yang digunakan dalam penyusunan peta bahaya EWP adalah metode skoring dan pembobotan terhadap parameter berbasis wilayah administrasi kecamatan. Parameter yang digunakan untuk penyusunan peta bahaya EWP adalah terjadinya kepadatan atau prevalensi dari bahaya EWP (berdasarkan data yang tersedia secara nasional), yaitu: Malaria, Demam Berdarah, Campak, Difteri, dan Hepatitis. sebaran luas bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Jawa Tengah untuk kabupaten/kota terdampak bencana epidemi dan wabah penyakit. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya epidemi dan wabah penyakit pada kelas rendah adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 201.386 Ha.

k) Kawasan Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi, Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Bencana ini dapat menimbulkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Pengkajian untuk bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolok ukur penghitungan adalah jenis industri dan kapasitas industri. Berdasarkan parameter-parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya kegagalan teknologi yang meliputi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas rendah adalah Kabupaten Boyolali seluas 3.607 Ha dan Kabupaten Cilacap adalah

wilayah yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas sedang dengan luas 375 Ha.

l) Kawasan Potensi Bahaya Covid-19, Penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease2019 (Covid-19) merupakan pandemi global dan telah dinyatakan oleh WHO, sehingga merupakan suatu isyarat bahwa dalam menghadapi pandemi ini segala focus kebijakan dan rekomendasi pencegahan harus diprioritaskan. Apalagi wabah penyakit Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara berdasarkan bukti ilmiah (Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020). Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan penilaian risiko meliputi analisis bahaya, paparan/kerentanan dan kapasitas untuk melakukan karakteristik risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Hasil dari penilaian risiko ini diharapkan dapat digunakan untuk menentukan rekomendasi penanggulangan kasus Covid-19. Potensi luas bahaya Covid-19 adalah3.277.108Hadan berada pada kelas Tinggi. Luasbahaya Covid-19 tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 2.346.083 Ha, kelas sedang seluas 605.417 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya Covid-19 pada kelas tinggi seluas 325.608 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Covid-19 pada kelas rendah adalah Kabupaten Cilacap dengan luas190.358 Ha. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Covid-19 pada kelas sedang seluas 50.337 Ha dan pada kelas tinggi seluas 33.967 Ha adalah Kabupaten Wonogiri.

m) Kawasan Potensi Bahaya Likuefaksi, Likuefaksi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah jenuh air akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Akibat dari hilangnya kekuatan tanah ini dapat berupa longsor, perubahan tekstur tanah menjadi lumpur, atau penurunan atau pergerakan tanah secara tiba-tiba menyebabkan daya dukung pondasi menurun dan terjadi kerusakan bangunan/infrastruktur yang lebih besar. Potensi luas bahaya likuefaksi dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di ProvinsiJawa Tengahyang memiliki kondisi rentan terhadap bencana likuefaksiberdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak likuefaksi, sedangkan kelas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah kabupaten/kota terdampak. Total luas bahaya likuefaksi di Provinsi Jawa Tengahsecara keseluruhan adalah 729.062Hadan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya likuefaksi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 49.145 Ha, kelas sedang seluas 641.289Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya likuefaksi pada kelas tinggi adalah seluas 38.627 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya likuefaksi pada kelas rendah dengan luas15.054 Ha dan pada kelas tinggi dengan luas16.881Haadalah Kabupaten Cilacap. Sedangkan pada kelas sedang, kabupaten yang

memiliki luas tertinggi bahaya likuefaksi adalah Kabupaten Brebes dengan luas 65.705 Ha.

n) Kawasan Potensi Bahaya Gunungapi, Gunungapi dibedakan menjadi bahaya primer (langsung) dan bahaya sekunder (tidak langsung). Bahaya primer merupakan bahaya yang diakibatkan secara langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu: aliran lava, awan panas, jatuhan piroklastik (lontaran batu pijar dan hujan abu), gas beracun, dan lahar erupsi. Sedangkan, bahaya sekunder merupakan bahaya yang diakibatkan secara tidak langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu: lahar dan longsoran gunungapi.

(1) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Dieng di ProvinsiJawa Tengah secara keseluruhan adalah3.816Ha dan berada pada kelas Tinggi.Luas bahayaLetusan Gunungapi Diengtersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas1.168 Ha, kelas sedang seluas 2.054 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunung api Dieng pada kelas tinggi seluas 594 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya letusan gunungapi pada kelas rendahseluas 1.059 Ha, kelas sedang seluas 1.304 Ha dan kelas tinggi seluas 568 Ha adalah Kabupaten Banjarnegara.

(2) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Lawu di ProvinsiJawa Tengah secara keseluruhan adalah10.116Hadan berada pada kelas Sedang. Luas bahaya Letusan Gunungapi Lawu tersebut dirinci menjadi2 (dua) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 5.546 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Lawu pada kelassedang seluas 4.570 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Lawupada kelas rendah seluas 4.652 Ha, dan kelas sedang seluas 4.570 Ha adalah Kabupaten Karanganyar.

(3) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengahsecara keseluruhan adalah 28.239 Ha dan berada pada kelas Tinggi.Luas bahayaLetusan Gunungapi Merapi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 12.441 Ha, kelas sedang seluas 8.182 Ha, dan kelas tinggi seluas 7.616 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahayaLetusan Gunungapi Merapi pada kelas rendah seluas 7.957 Haadalah Kabupaten Boyolali. Sedangkan Kabupaten Magelang adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merapi pada kelas sedang dengan luas 3.930 Ha dan kelas tinggi seluas 5.275 Ha.

(4) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Merbabudi ProvinsiJawa Tengahsecara keseluruhan adalah19.819Hadan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Letusan Gunungapi Merbabu tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendahseluas11.474Ha, kelas sedang seluas5.820 Ha,dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Merbabu pada kelas tinggi seluas 2.526 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merbabu pada kelas rendah seluas 4.790Ha,

kelas sedangseluas 3.163 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 1.358 Ha adalah Kabupaten Boyolali.

(5) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengahsecara keseluruhan adalah22.740 Ha dan berada pada kelas Tinggi.Luas bahayaLetusan Gunungapi Slamet tersebut dirinci menjadi 3(tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 14.631 Ha, kelas sedang seluas 6.288 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas tinggi seluas 1.820 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahayaLetusan Gunungapi Slamet pada kelas rendah seluas 3.905Hadan kelas sedang seluas 2.533Ha adalah Kabupaten Banyumas. Sedangkankabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas tinggi seluas 723 Ha adalah Kabupaten Pemalang.

(6) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Sumbingdi Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 25.650 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Letusan Gunungapi Sumbing tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas16.553 Ha, kelas sedang seluas7.876 Ha,dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Sumbing pada kelas tinggi seluas 1.221 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sumbing pada kelas rendah seluas6.681 Ha, pada kelas sedang seluas 4.443 Ha dan kelas tinggi seluas 563 Ha adalah Kabupaten Temanggung.

(7) Potensi luas bahayaLetusan Gunungapi Sundorodi Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 23.580 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Letusan Gunungapi Sundoro tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 13.468 Ha, kelas sedang seluas 8.372 Ha, dan kelas tinggi seluas 1.739 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sundoro pada kelas rendah dengan luas 8.236 Ha dan kelas tinggi seluas 981 Ha adalah Kabupaten Wonosobo. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sundoro pada kelassedang adalah Kabupaten Temanggung dengan luas 4.474 Ha.

(8) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Ungarandi ProvinsiJawa Tengahsecara keseluruhanseluas15.404Hadan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Letusan Gunungapi Ungaran tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 13.787 Ha, kelas sedang seluas 526 Ha dan kelas tinggi seluas 1.091 Ha. Kabupaten Semarang merupakan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Ungaran pada kelas rendah seluas 9.254 Ha, sedang seluas 312 Ha dan pada kelas tinggi seluas 617 Ha.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 kawasan rawan bencana. Adapun data rumah korban

terdampak bencana di Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.178.
Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Jumlah
1	Banjarnegara	272	20	58	185	263
2	Banyumas	189	32	88	113	233
3	Batang	34	8	5	50	63
4	Blora	25	9	12	43	64
5	Boyolali	23	0	5	50	55
6	Brebes	79	56	25	286	367
7	Cilacap	215	40	44	444	528
8	Demak	23	8	34	322	364
9	Grobogan	82	47	24	133	204
10	Jepara	98	16	25	430	471
11	Karanganyar	30	13	21	102	136
12	Kebumen	75	7	7	197	211
13	Kendal	41	7	15	117	139
14	Klaten	45	2	11	36	49
15	Kota Magelang	17	1	1	21	23
16	Kota Pekalongan	8	0	0	0	0
17	Kota Salatiga	10	1	1	4	6
18	Kota Semarang	206	26	40	99	165
19	Kota Surakarta	18	1	4	2	7
20	Kota Tegal	21	3	0	0	3
21	Kudus	90	4	9	117	130
22	Magelang	259	10	32	316	358
23	Pati	54	27	11	640	678
24	Pekalongan	19	3	2	10	15
25	Pemalang	40	31	43	115	189
26	Purbalingga	22	4	10	140	154
27	Purworejo	15	1	1	15	17
28	Rembang	32	18	37	99	154
29	Semarang	39	12	9	34	55
30	Sragen	37	10	1	50	61
31	Sukoharjo	9	0	3	0	3

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Jumlah
32	Tegal	45	162	181	236	579
33	Temanggung	134	9	72	126	207
34	Wonogiri	19	1	4	24	29
35	Wonosobo	115	22	34	60	116
	TOTAL	2.440	611	869	4.616	6.096

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2022

Kejadian bencana di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 1.753 kejadian di tahun 2021 menjadi 2.396 kejadian di tahun 2022. Selama periode tersebut, kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi yang meliputi tanah longsor, angin topan, banjir dan kebakaran. Dari total desa/kelurahan di Jawa Tengah teridentifikasi sejumlah 1.674 desa/kelurahan (19,5 persen) dari total 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah merupakan daerah rawan banjir dan 2.136 desa/kelurahan (24,9 persen) rawan tanah longsor.

Tabel 2.179.
Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018– 2022

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angin topan	407	706	629	439	671
2	Banjir	171	171	459	242	374
3	Gas beracun	0	0	2	0	0
4	Gempa bumi	3	5	2	5	4
5	Kebakaran	589	718	356	229	312
6	Kekeringan	0	30	0	0	0
7	Letusan gn.Api	5	2	12	5	1
8	Tanah longsor	5	18	387	0	1.010
9	Tsunami	0	0	0	0	0
10	Gelombang pasang	4	6	3	6	24
Jumlah		**1.734**	**1.356**	**2.870**	**1.753**	**2.396**

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data TW II Tahun 2022

Selama kurun waktu 2018-2022, kejadian bencana telah menimbulkan korban jiwa paling banyak diakibatkan oleh bencana tanah longsor, pada tahun 2022 saja terdapat 22 orang meninggal dunia, 27 luka berat dan 100 luka ringan.

Tabel 2.180.
Jumlah Korban Akibat Bencana di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana	Jumlah Korban (Orang)			
		Meninggal Dunia	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan
2018	1.734	39	4	17	124
2019	2.356	39	4	24	175
2020	2.909	32	3	15	91

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana	Jumlah Korban (Orang)			
		Meninggal Dunia	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan
2021	1.753	34	5	14	73
2022	2.440	22	2	27	100
Jumlah		**166**	**18**	**97**	**563**

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah,

Taksiran kerugian pada tahun 2018 hingga 2022 jumlah tingkat kerugian fluktuatif dan taksiran kerugian tertinggi terjadi akibat bencana Tanah longsor dengan kerugian Rp 7.052.281.000,- dan kerugian keseluruhan termasuk kebakaran pemukiman ditaksir sebesar Rp 234.248.846.000,-.

Tabel 2.181.
Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Bencana	2018		2019		2020		2021		2022	
		Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)
1	Angin Topan	407	5.445.666	706	15.367.598	NA	5.469.095	437	4.288.779	671	6.267.966
2	Banjir	171	2.924.463	171	2.777.845		32.798.305	242	44.106.000	374	2.367.000
3	Tanah Longsor	555	5.111.856	718	9.354.277		16.806.207	740	7.098.159	1.010	7.052.281
4	Kekeringan	-	-	30	0		0	0	0	0	0
5	Kebakaran	589	33.866.505	718	55.387.150		18.779.138	229	52.965.785	312	217.955.599
6	Gempa Bumi	3	65.000	5	65.000		0	5	0	4	0
7	Letusan Gunung Api	5	-	2	0		0	5	0	1	0
8	Ombak Besar	4	57.000	6	0		0	6	45.000	24	25.000
9	Lainnya	-	-	-	-		0	46	131.687,50	44	581.000
	Jumlah	**1.734**	**47.470.620**	**2.356**	**82.951.870**	**2.870**	**73.582.747**	**1.753**	**108.823.410,5**	**2.440**	**234.248.846**

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data per tanggal 24 Desember 2022

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data per tanggal 24 Desember 2022 dan BNPB, IRBI 2022

Gambar 2.95.
Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah mendasarkan indeks rawan dan risiko bencana yang diterbitkan BNPB termasuk provinsi dengan indeks bencana sedang. Indeks risiko bencana 2022 Provinsi Jawa Tengah pada urutan 10 dengan nilai skor 115,38 dengan kategori sedang.

Tabel 2.182.

Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah

No.	Tahun	Skor	Kategori
1	2018	146,43	Tinggi
2	2019	144,91	Tinggi
3	2020	132,99	Sedang
4	2021	125,73	Sedang
5	2022	115,38	Sedang

Sumber: BNPB, IRBI 2022

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Kabupaten Brebes mendapat urutan tertinggi untuk indeks risiko bencana dengan urutan 1 Provinsi Jawa Tengah dengan nilai skor 171,01 dan urutan 68 Nasional.

Tabel 2.183.

Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	KELAS RISIKO 2022
1	BREBES	211.20	211.20	211.20	211.20	211.20	189.94	189.94	171.01	TINGGI
2	PEKALONGAN	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	172.56	160.19	168.52	TINGGI
3	PATI	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	171.10	171.10	165.53	TINGGI
4	BATANG	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	161.93	154.49	TINGGI
5	PURWOREJO	215.20	215.20	215.20	215.20	215.20	190.01	163.63	144.57	TINGGI
6	TEGAL	212.80	212.80	212.80	212.80	212.80	181.08	158.93	141.32	SEDANG
7	BANYUMAS	207.20	207.20	207.20	207.20	207.20	193.71	164.25	140.18	SEDANG
8	PURBALINGGA	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	148.12	139.78	SEDANG
9	KOTA PEKALONGAN	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	138.13	138.13	138.13	SEDANG
10	BOYOLALI	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	130.32	130.32	130.32	SEDANG
11	PEMALANG	206.00	206.00	206.00	185.70	185.70	165.97	146.38	128.55	SEDANG
12	SRAGEN	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	133.75	126.18	SEDANG
13	JEPARA	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	148.77	135.11	122.27	SEDANG
14	REMBANG	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	151.12	131.73	117.89	SEDANG
15	BLORA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	135.33	123.19	113.90	SEDANG
16	GROBOGAN	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	154.66	131.66	111.59	SEDANG
17	TEMANGGUNG	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	134.51	121.33	110.38	SEDANG
18	WONOGIRI	145.60	145.60	145.60	145.60	145.60	124.77	124.77	108.91	SEDANG
19	KOTA MAGELANG	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	SEDANG
20	BANJARNEGARA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	127.36	127.36	107.61	SEDANG
21	KOTA TEGAL	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	105.36	SEDANG
22	DEMAK	183.60	138.20	127.42	118.21	118.21	105.77	105.21	103.88	SEDANG
23	CILACAP	215.20	172.90	157.92	138.61	124.20	112.75	112.75	103.72	SEDANG
24	KOTA SEMARANG	183.60	124.72	124.72	120.75	113.83	115.52	108.63	103.49	SEDANG
25	KUDUS	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	130.59	119.71	102.40	SEDANG
26	KEBUMEN	203.20	165.76	151.08	140.31	131.45	114.67	114.67	102.05	SEDANG
27	SEMARANG	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	118.89	118.89	101.79	SEDANG
28	KENDAL	167.20	156.80	142.49	124.57	111.20	98.97	100.40	97.90	SEDANG
29	KARANGANYAR	130.40	130.40	130.40	130.40	130.40	108.03	108.03	91.51	SEDANG
30	KOTA SALATIGA	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	90.89	SEDANG
31	WONOSOBO	135.20	135.20	135.20	122.94	122.94	122.94	102.83	87.55	SEDANG
32	KLATEN	123.20	123.20	123.20	123.20	123.20	99.24	99.24	82.18	SEDANG
33	SUKOHARJO	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	81.29	SEDANG
34	MAGELANG	143.20	96.86	90.82	90.82	81.07	71.16	71.16	77.90	SEDANG
35	KOTA SURAKARTA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	67.96	67.96	57.17	SEDANG

Sumber: BNPB, IRBI 2022

Untuk menurunkan nilai indeks risiko bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya mitigasi struktural maupun non-struktural. Upaya mitigasi struktural dilakukan antara lain melalui pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) berbasis masyarakat dan penempatan rambu-rambu jalur evakuasi di lokasi rawan bencana. Sampai dengan tahun 2022, telah terpasang sebanyak 89 unit peralatan EWS dan 377 unit rambu jalur evakuasi.

Tabel 2.184.
Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Tahun 2018 – 2022

Tahun	EWS			Rambu Jalur Evakuasi
	BPBD	ESDM	Total EWS Terpasang (Akumulatif)	
2018	9	-	60	150
2019	15	-	75	230
2020	1	-	76	-
2021	10	-	86	347
2022	3	-	89	377

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2022

Implementasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) yang dilakukan oleh Jawa Tengah antara lain melalui pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana. Desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Dengan adanya Desa/kelurahan tangguh bencana, warga desa akan mampu mengenali karakter wilayah, potensi kebencanaan, dan cara penanganannya. Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 132 desa, dari total seluruh desa/kelurahan sebanyak 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah.

Tabel 2.185.
Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2016 – 2022

Tahun	Desa Tangguh Bencana yang dibentuk per Tahun	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Terbentuk
2018	8	74 desa
2019	18	92 desa
2020	3	95 desa
2021	30	125 Desa
2022	7	132 Desa

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2022

Untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir dan berperan serta dalam pemulihan pasca bencana melalui pemberian bantuan akibat bencana di Provinsi Jawa Tengah yang diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2014. Dari 2018 hingga 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangannya membantu korban bencana meliputi rumah atau tempat

usaha, rumah ibadah dan sarana prasarana yang musnah/terbakar habis atau roboh yang datanya dapat kita lihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.186.

Data Bantuan Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Kejadian	Roboh	Rusak Berat	Nominal
1	2019	9	277	34	4.495.000.000
2	2020	7	60	18	1.080.000.000
3	2021	7	206	122	4.310.000.000
4	2022	4	9	120	1.335.000.000
	Total	**27**	**552**	**294**	**11.220.000.000**

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2022

2.6. Tata Kelola Pemerintahan

Kinerja tata kelola pemerintahan diukur dengan salah satunya adalah indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Implementasi tata kelola pemerintahan daerah diwujudkan dengan pelayanan publik yang baik didukung dengan manajemen organisasi dan sumberdaya aparatur, serta dukungan fungsi-fungsi pendukung pemerintahan. Gambaran kondisi tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut.

2.6.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian pada tahun 2022 mencapai angka 80,31, meningkat 1,34 dari tahun 2021 yang sebesar 78,97. Jika dilihat secara 5 tahun, kinerja Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah juga terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan baik sesuai dengan *roadmap* nasional.

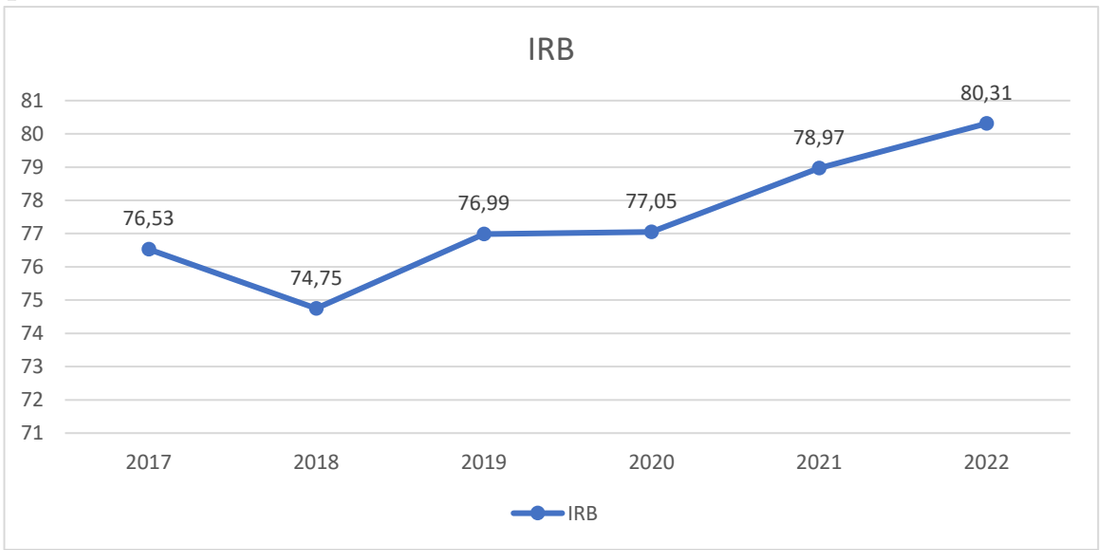

Sumber: Kemenpan RB, 2023

Gambar 2.96.

Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah

Salah satu komponen yang mendukung capaian reformasi birokrasi adalah hasil antara. Terdapat beberapa hasil antara yang memerlukan perhatian karena tidak mengalami peningkatan pada tahun 2022, yaitu kualitas kebijakan dan kualitas pengelolaan pengadaan barang jasa. Hal tersebut mengindikasikan adanya pekerjaan rumah dalam tata kelola sektor tersebut, baik dalam hal kinerja atau tertib administrasinya.

Tabel 2.187.
Catatan Hasil Evaluasi dari Kemenpan RB Tahun 2021 - 2022

No	Hasil Antara	2021	2022
1	Kualitas Kebijakan	37,97	35,65
2	ASN Profesional	51,85	54,56
3	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,74	3,34
4	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	78,88	65,70
5	Kualitas Pelayanan Publik	4,48	4,54
6	Kapabilitas APIP	3	3
7	Maturitas SPIP	2	3
8	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	73,49	93,14
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	91,31	93,45
10	Reformasi Hukum	-	76,25

Sumber: Kemenpan RB, 2023

Adapun menurut catatan hasil evaluasi dari Kemenpan RB, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Provinsi Jawa Tengah yaitu :

a. Memperkuat kualitas pelaksaanan reformasi birokrasi dengan mengawal capaian makro dan menciptakan reformasi birokrasi yang berdampak
b. Mengoptimalikan digitalisasi reformasi birokrasi dan budaya berAkhlak
c. Menetapkan arah pembangunan reformasi birokrasi ke depa nsesuai dengan isu prioritas yang akan diselesaikan
d. Memperkuat komponen hasil antara yang kurang baik
e. Memperkuat performance based budgeting melalui formalisasi dan pengacuan kebijakan TPP
f. Optimalisasi peran Pemerintah Provinsi sebagai pendamping Pemerintah Kabupaten/Kota terkait implemetnasi reformasi birokrasi berdampak.

Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan e Government memang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam penggunaan e-Government/SPBE sebagai pendukung utama pembangunan. Media sosial, audio-visual dan aplikasi digunakan untuk menyapa masyarakat, membangun kesamaan persepsi pembangunan dengan perangkat daerah dan mengkomunikasikan pembangunan dengan masyarakat, memahami permasalahan pembangunan langsung dari masyarakat dan sekaligus eksekusinya, serta pemecahan aduan masalah pembangunan. Diskominfo, menjadi perangkat daerah yang dipercaya Kepala Daerah dalam mewujudkan

pemenuhan persyaratan-persyaratan indikasi SPBE yang baik untuk menunjang kinerjanya. Selama periode 2018-2023, anggaran Diskominfo terkait substansi tugas dan fungsi telah ditingkatkan secara signifikan.

2.6.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, berkualitas, terjangkau, dan teratur sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam kurun waktu 2017-2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan standar manajemen mutu melalui fasilitasi dan pendampingan sertifikasi ISO, serta pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pada tahun 2017 hingga tahun 2021 jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM terus meningkat, dari tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan jumlah UPP yang dilakukan pengukuran disebabkan adanya berbagai permasalahan dalam melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terutama di Satuan Pendidikan (SMA/SMK). Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya sarana dan prasarana yang belum memadai, pergantian petugas pelaksana, pelaksanaan SKM yang lebih dari 1 tim dalam 1 OPD dan tidak saling bersinergi, serta petugas pelaksana tidak melaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.97.
Jumlah UPP Bersertifikasi ISO dan UPP Yang Melakukan Pengukuran IKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (Unit)

Hasil dari pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks ini merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selama kurun waktu tahun 2017 – 2021 IKM terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2021 IKM Jawa Tengah sebesar 84,58, meningkat 0,64 poin dari tahun 2020 yang sebesar 83,94. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkat dan semakin diterima oleh masyarakat.

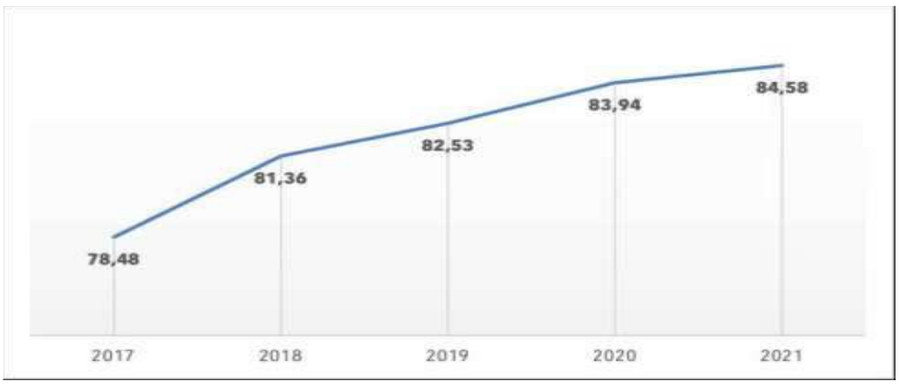

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.98.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2021

2.6.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan e Government memang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam penggunaan *e-Government*/SPBE sebagai pendukung utama pembangunan.

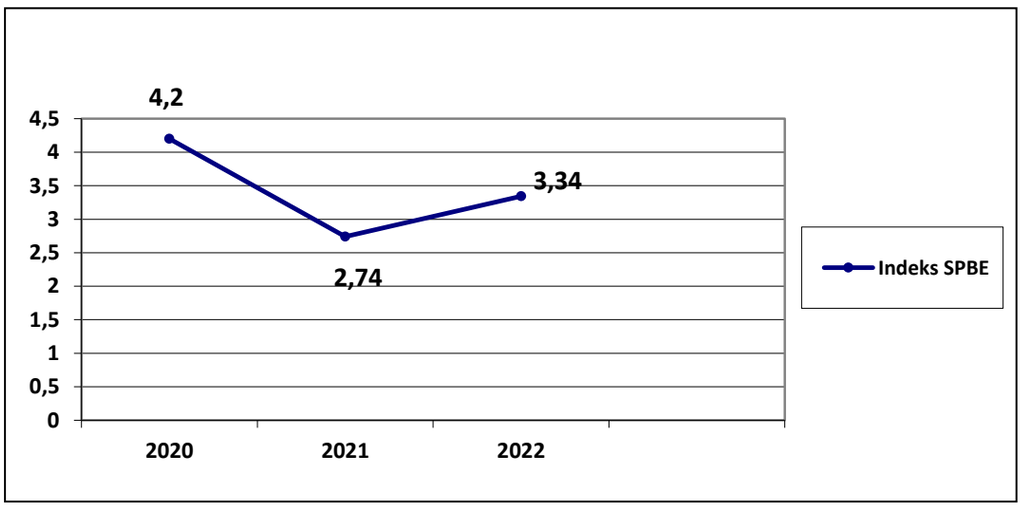

Sumber : Kemenpan RB, 2022

Gambar 2.99.
Indeks SPBE Provinsi

Hasil evaluasi Kemenpan RB tahun 2022 pada grafik di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih angka indeks SPBE sebesar 3,34 dengan predikat "Baik". Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 2,74, mengalami peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan, yaitu sebesar 0,6 poin. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SPBE dari Kemenpan RB pada 4 domain penilaian yaitu Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE (Domain Manajemen SPBE merupakan domain baru yang ditetapkan dalam Permen PAN RB no. 59 Tahun 2020 dimana penilaian menggunakan regulasi yang baru mulai diterapkan pada tahun 2021.), dan Layanan SPBE.

Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan e Government memang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam penggunaan e-Government/SPBE sebagai pendukung utama pembangunan.

Media sosial, audio-visual dan aplikasi digunakan untuk menyapa masyarakat, membangun kesamaan persepsi pembangunan dengan perangkat daerah dan mengkomunikasikan pembangunan dengan masyarakat, memahami permasalahan pembangunan langsung dari masyarakat dan sekaligus eksekusinya, serta pemecahan aduan masalah pembangunan. Diskominfo, menjadi perangkat daerah yang dipercaya Kepala Daerah dalam mewujudkan pemenuhan persyaratan-persyaratan indikasi SPBE yang baik untuk menunjang kinerjanya. Selama periode 2018-2023, anggaran Diskominfo terkait substansi tugas dan fungsi telah ditingkatkan secara signifikan.

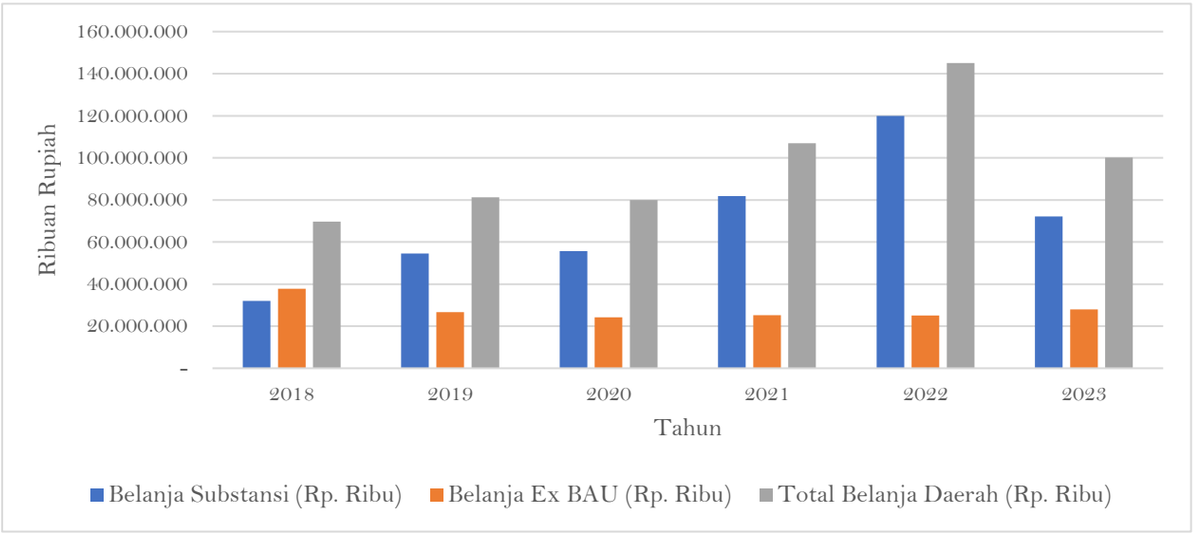

Sumber: Diskominfo

Gambar 2.100.
Perkembangan Anggaran Diskominfo Tahun 2018-2023

Gambar 2.98 di atas menunjukkan bahwa anggaran substansi selalu meningkat signifikan sepanjang Tahun, bahkan pernah sampai 4 kali lipat pada Tahun 2022 dari Tahun Anggaran 2018. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan infrastruktur TIK seperti pembangunan jaringan Fiber Optic, pengadaan server dan storage; pengadaan sarana dan prasarana studio visual - ruang Multi Media Center (MMC), pembangunan pusat data, sewa internet dan sewa aplikasi analisis media serta, sarpras layanan keamanan informasi. Anggaran juga digunakan untuk bisaya operasional komunikasi dan koordinasi pemecahan masalah-masalah pembangunan (video conference, iklan layanan dan, layanan aduan) dan penyediaan portal data.

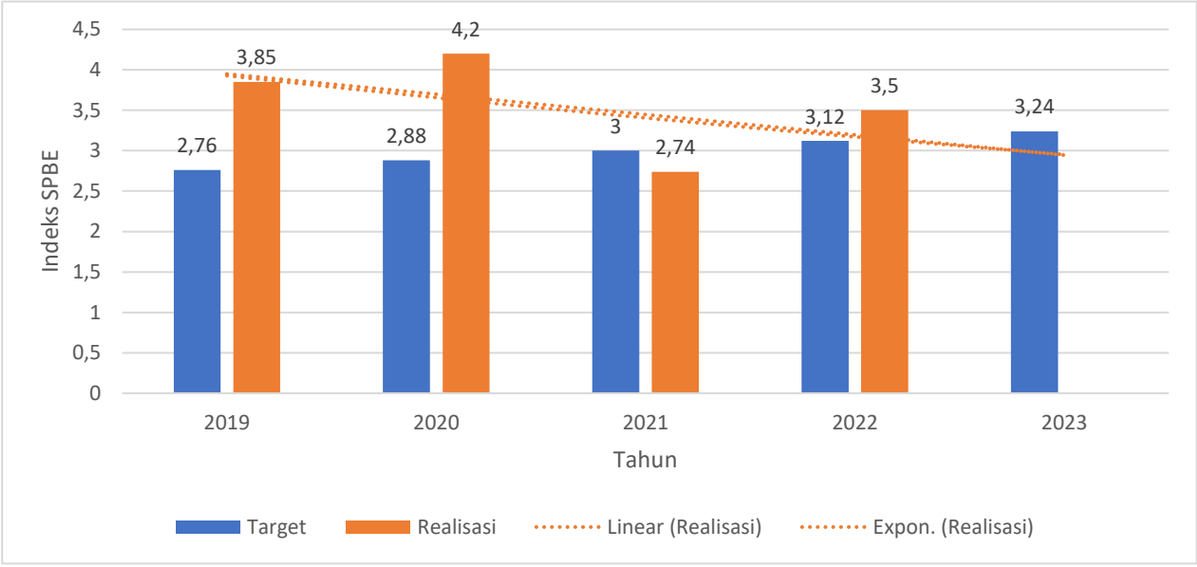

Sumber: Diskominfo

Gambar 2.101.
Target dan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2019-2023

Upaya pemenuhan persyaratan implementasi e Government / SPBE yang baik ternyata berpengaruh pada capaian Indeks SPBE-nya. Gambar 2.98 diatas menunjukkan bahwa, sepanjang 2019-2020 target akhir SPBE sudah terlampaui sejak awal penetapan target RPJMD Tahun 2018-2023. Meskipun pada Tahun 2021 sempat mengalami penurunan drastis karena perubahan metode perhitungan dari PermenPan RB No. 5 Tahun 2018 ke PermenPan RB No. 59 Tahun 2020, pada Tahun 2022 dengan perbaikan persyaratan sebagaimana PermenPan RB yang baru dapat naik lagi dan diperkirakan target akhir Indeks SPBE Tahun 2023 tetap terlampaui.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan SPBE telah dilakukan berbagai kegiatan urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian.

1. Komunikasi dan Informatika

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika telah dilakukan melalui 3 (tiga) layanan yaitu Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra dan Layanan Data Terbuka. Ketiga layanan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Layanan Pusat Data (*Data Center*)

Pada akhir Tahun 2022, dalam upaya meningkatkan layanan SPBE telah diselesaikan pembangunan data center. Pembangunan data center telah memperbaiki kondisi data center seperti lokasi data center dapat dipindah ke lokasi yang aman (seperti rawan banjir, pernah mengalami konsleting listrik dan terganggu/terdapat kegiatan lain dalam satu gedung). Kapasitas juga telah ditingkatkan.

.

Sumber: Diskominfo, 2022

Gambar 2.102.
Gambar Rencana Bangunan Data Center Provinsi Jawa Tengah

Meskipun demikian kondisi pusat data saat ini masih perlu ditingkatkan, karena berada dalam tingkatan standard 1 / rated 1, dimana fasilitas pusat data masih belum memiliki *redundancy* seperti belum memiliki *redundancy* jalur power atau kelistrikan, *redundancy genset, redundancy* panel listrik, *redundancy* UPS dan belum memiliki tangki penyimpanan BBM harian, mingguan maupun bulanan

b. Layanan Jaringan Intra

Layanan jaringan intra merupakan bagian dari layanan data center sebagaimana diterangkan diatas. Jaringan intra pemerintah merupakan jaringan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam instansi pemerintah daerah (Gambar 2.). Pengembangan jaringan intra dilakukan seperti dengan pemasangan jaringan *Fiber Optic* untuk menghubungkan antar perangkat daerah dengan data center, pemenuhan kapasitas *bandwidth* internet yang lebih cepat dan aman pada semua OPD.

Sumber: Diskominfo

Gambar 2.103.
Topologi Jaringan Perangkat Daerah

Selanjutnya setelah infrastruktur jaringan intra pemerintah terimplementasi dapat digunakan untuk sarana atau media pengembangan teknologi informasi seperti aplikasi berbagi pakai, integrasi aplikasi layanan pemerintah, media *video conference*, media *blow up* berita melalui televisi digital (IPTV), media komunikasi jarak jauh dengan internet (VOIP).

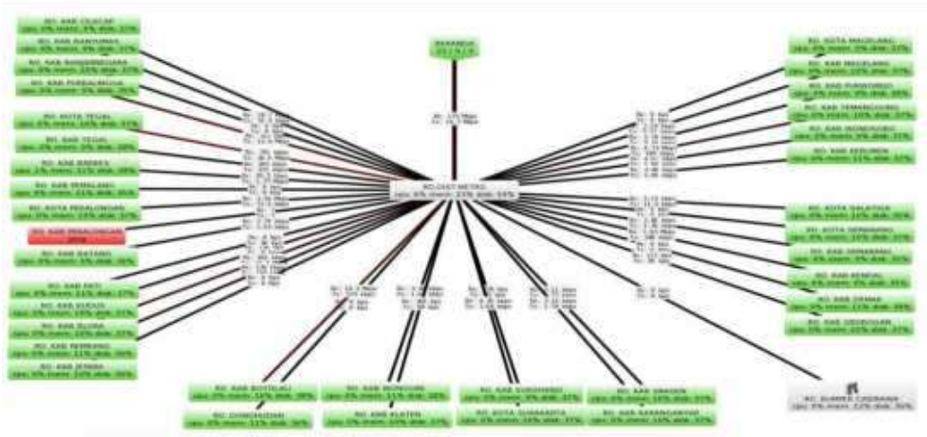

Sumber: Diskominfo

Gambar 2.104.
Topologi Jaringan Metro Kab/Kota

Sampai dengan saat ini, Diskominfo telah menghubungkan jaringan Fiber Optic mandiri antar OPD se Provinsi Jawa Tengah, memiliki jaringan Metro yang menghubungkan 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan tentunya jaringan tersebut terintegrasi dengan data center, yang juga memiliki DRC (*Disaster Recovery Center*) dengan kapasitas bandwidth sebesar 11.800 Mbps.

Sumber: Diskominfo

Gambar 2.105.
Kegiatan Live Streaming dan Video Conference

Diskominfo juga telah menyediakan 33 rak server, 7 server storage termasuk 62 collocation server berupa sewa aplikasi media masa, media sosial dan layanan keamanan informasi berupa Assesment Aplikasi, layanan Email Sanapati, Video Live Streaming dan Video Conference; dan pengembangan 15 unit aplikasi terintegrasi berbagi pakai (Gambar 4). Diskominfo juga sampai dengan saat ini telah memberikan rekomendasi bagi 7 Sistem aplikasi perangkat daerah.

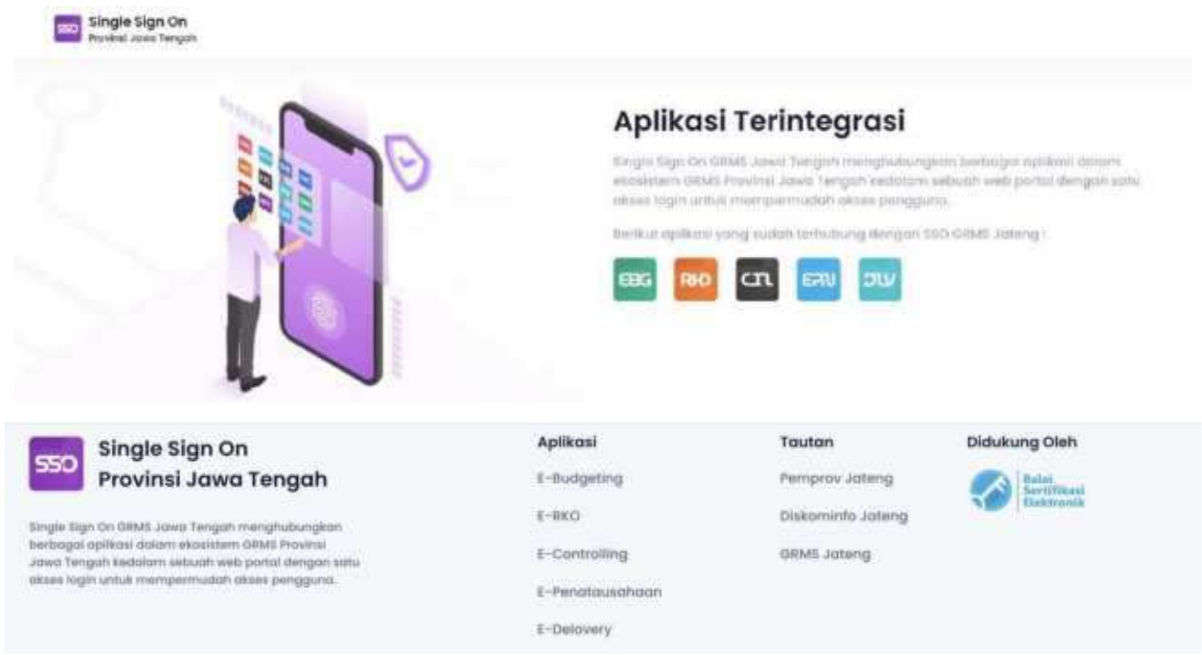

Sumber: Diskominfo

Gambar 2.106.
Aplikasi Terintegrasi

Upaya pemenuhan fasilitas sarpras jaringan intra tersebut sesuai dengan Pergub no. 15 Tahun 2013. Pergub mengharapkan agar Diskominfo mampu memfasilitasi keterpaduan jaringan komputer intranet. Fasilitasi penyusunan aplikasi juga sesuai atas perubahan pergub diatas dengan Pergub No. 45 Tahun 2013 yang memberikan kewenangan Diskominfo untuk melakukan audit terkait usulan sistem informasi / aplikasi / website yang diajukan oleh perangkat daerah. Upaya pengembangan layanan jaringan intra diduga telah berpengaruh pada tingkat kematangan layanannya. Tingkat kematangan level sudah masuk tahap terakhir, yaitu dengan nilai 5. Artinya, pada kematangan kapabilitas layanannya masuk dalam level optimalisasi. Optimalisasi berarti bahwa layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Adapun pada kapabilitas prosesnya masuk pada tahap optimum. Optimum berarti pengaturannya telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.

Meskipun demikian, masih dijumpai adanya sejumlah permasalahan dalam layanan jaringan intra pemerintah. Permasalahan yang sangat besar dampaknya terhadap pelayanan yaitu Fiber Cut atau putusnya jalur fiber optic. Putusnya jalur fiber optic bisa disebabkan karena pekerjaan bangunan/galian oleh pihak exsternal di titik yang dilewati jalur kabel fiber. Permasalahan juga muncul dari jaringan local masing masing perangkat daerah, karena peralatan jaringan seperti router, switch, kabel utp, accespoint belum memenuhi standar yang sesuai, sehingga distribusi bandwidth internet tidak terdistribusi dengan maksimal. Belum lagi realitas perangkat daerah masih melakukan belanja internet / sewa internet mandiri karena alasan untuk mempunyai backup internet. Sebenarnya bukan hanya sewa internet yang diambil alih pengelolaannya oleh Diskominfo, pengadaan server juga seharusnya dikoordinasikan dengan Diskominfo. Pengkoordinasikan tersebut penting mengingat, agar server dapat didata,

terstandarisasi, menjadi satu wadah dan, disinergiskan terlebih, saat ini Diskominfo sudah selesai membangun Data Center dan diresmikan pada awal tahun 2023 dimana data center sudah dirancang dan memiliki kapasitas yang besar dalam mengelola file data dan aplikasi Perangkat Daerah. Server dan storage sebaiknya menyatu dalam data center. Dalam upaya men-standar-kan, mensinergiskan dan efisensi anggaran diskominfo perlu mengidentifikasikan kebutuhan/distribusi jaringan FO dan bandwidth bagi masing-masing Perangkat Daerah.

Hasil pemantauan dinamika aplikasi Perangkat Daerah juga menunjukkan bahwa, aplikasi di Provinsi Jawa Tengah semakin meningkat diberbagai Perangkat Daerah seperti tingkat keaktifannya, perkembangannya, dan ragam layanannya. Meskipun demikian, dari total 881 aplikasi yang terdaftar yang ada di Perangkat Daerah, 113 aplikasi (13,93 %) posisinya tidak aktif. Kondisi ini menggambarkan bahwa aplikasi online sudah biasa digunakan Perangkat Daerah tetapi belum semuanya dapat diakses oleh publik. Adapun perkembangannya dari 881 aplikasi sebanyak 380 aplikasi (46,86%) berstatus transaksional, 319 aplikasi (39,33 %) masih bersifat informatif dan sisanya sudah tidak aktif. Secara umum aplikasi yang ada digunakan untuk memperlancar tugas kedinasan. Gambaran diatas menunjukkan bahwa belum semua aplikasi berjalan aktif, belum bersifat transaksional serta belum sinergis dan terintegrasi satu dengan lainnya. Kebanyakan baru untuk layanan kedinasan saja, masih dibutuhkan perbaikan-perbaikan.

c. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

Layanan pengaduan pelayanan publik menggunakan media online seperti website, whatsapp, android, instagram, SMS, facebook, twitter, layanan hotline, aduan langsung, youtube dan aplikasi Laporgub sendiri. Total pengaduan pada Tahun 2022 adalah 22.980 aduan. Pengaduan umumnya menyangkut permohonan perbaikan jalan, permohonan Bansos Covid, permohonan informasi vaksinasi Covid, aduan bantuan tidak tepat sasaran dan, permohonan penanggulangan banjir. Adapun aduan masyarakat yang sudah selesai ditindaklanjuti sebesar 65,20% (14.983 aduan), yang berada dalam tahap verifikasi sebesar 21,44% (4.927 aduan), yang masih dalam tahap progress sebesar 8,25% (1.895 aduan) dan yang bukan wewenang sebesar 2,68% (615 aduan).

Masyarakat dapat melihat aduan pada laman LaporGub! dan dapat juga mengunggah bukti aduannya ke dalam sistem seperti yang dapat dilihat pada bukti dukung LaporGub! Setiap aduan yang masuk ke dalam LaporGub!, otomatis akan disampaikan kepada instansi terkait. Setiap progres aduan akan terlihat oleh admin LaporGub!, apakah aduan tersebut sudah diverifikasi, proses maupun selesai seperti yang disertakan pada data dukung Indikator Progres Aduan LaporGub! dan Indikator. Progres Aduan LaporGub!. Admin juga dapat mendownload aduan untuk bahan laporan kepada atasan dengan bukti dukung: - Indikator Download Laporan LaporGub! - Indikator Tampilan Review Laporan – Indikator REKAP LaporGub!. Kemudian sistem LaporGub! sudah melakukan Konsolidasi data dengan SP4N LAPOR! Kemenpan-RB, Sehingga aduan LaporGub! dapat juga dilihat di aplikasi SP4N LAPOR! milik Kemenpan-RB dengan proses. Aduan memang tidak semua dijawab, terdapat 42 aduan dikembalikan dan 615 aduan di luar wewenang Pemerintah Daerah. Dari laporan implementasi

LaporGub!, baru terinformasikan secara global bahwa aduan sudah terjawab tetapi tingkat solutifnya belum terinformasikan dalam rekapitulasi aduan LaporGub!.

Meskipun demikian tidak semua layanan mendapatkan jawaban yang solutif atau tidak dapat dijawab. Kondisi ini disebabkan karena level kematangan layanannya belum maksimal. Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik baru mencapai level 3. Artinya, layanan pengaduan publik melalui LaporGub! Secara kapabilitas layanan SPBE masuk dalam kriteria Transaksi, yaitu dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan. Secara kapabilitas proses masuk dalam kriteria terstandarisasi, yaitu pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah. Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya terstandarisasi. Pada level 3 ini dalam SPBE sudah masuk predikat Baik (2,6-<3,5). Kenaikan level kematangan misalkan sampai level 4 memungkinkan secara kapabilitas layanannya sudah terkolaborasi sehingga bukan hanya terjadi pertukaran informasi tetapi terjadi integrasi layanan dengan SPBE lainnya sehingga, sesuatu yang dianggap bukan tugas dan fungsinya dapat dikoordinasikan segera.

2. Statistik.

Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pengelolaan data statistik sektoral dan geospasial, baik berupa hardware maupun software Pengembangan Single Data System (SDS) dalam rangka merealisasikan arsitektur Big Data Jawa Tengah Berdasarkan Roadmap yang telah ditetapkan serta pengembangan Geospasial dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah Satu Peta. Mewujudkan Smart Government dengan penerapan penuh layanan digital publik dan administrasi pemerintahan nasional; dan pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Artifisial (Data Driven Government); Dampak SDI Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Perencanaan Pembangunan, konkritnya berupa data prioritas yang akan digunakan sebagai perencanaan pembangunan bukan hanya katalog data; Data terkini atau ter update akan meningkatkan kualitas program secara tepat sasaran. Dengan program yang tepat sasaran tersebut otomatis akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

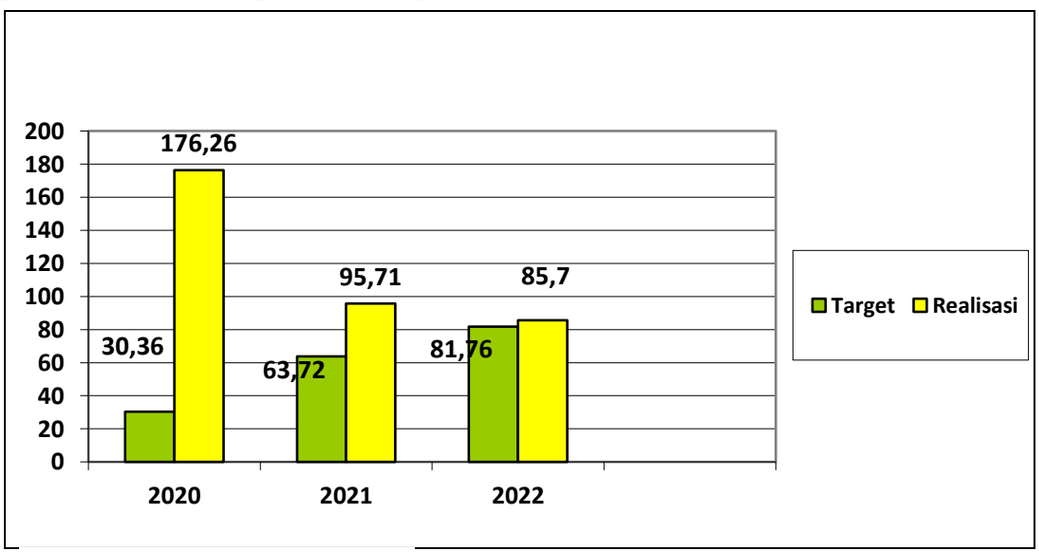

Sumber : LKPJ, 2022

Gambar 2.107.
Capaian Kinerja Laju Pemanfaatan Data Sektoral

Dalam pelaksanaan Tahun 2021, capaian laju pemanfaatan data sektoral sebesar 95,71%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 (63,72%) mengalami peningkatan sebesar 31,99%. Sedangkan pada tahun 2022 laju pemanfaatan data sektoral mencapai 85,70% yang berarti terdapat kenaikan sebesar 3,94% dibandingkan dengan target pada tahun 2022 di triwulan IV yaitu sebesar 81,76%. Capaian pada tahun 2021 dan 2022 tersebut melampaui target karena respon positif OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota yang antusias dalam memanfaatkan aplikasi *Single Data System* (SDS) dalam pengiriman data sektoral, sehingga data sektoral yang masuk melebihi target awal.

Hingga saat ini, Diskominfo telah melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral lingkup Provinsi (SDS). Kegiatan ini berupa Pengumpulan, Pemeriksaan dan Publikasi Data Statistik Sektoral di Lingkup Provinsi Jawa Tengah dan Melaksanakan Forum Data Satu Data Jawa Tengah sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar penyelenggara Satu Data Jawa Tengah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk Menyediakan data dan informasi hasil pembangunan lebih cepat dan akurat untuk perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah melalui Single Data System serta mendukung Pengambilan Kebijakan Pimpinan.

Selanjutnya, dalam menjamin keterbukaan informasi publik telah dilakukan difasilitasi melalui aplikasi portal data. Dalam aplikasi portal data, masyarakat umum dapat mengakses data dan informasi Perangkat Daerah dan mendapatkan informasi publik yang diperlukan. Portal data diharapkan menjadi sarana OPD dalam mempublikasikan data dan informasi yang perlu diketahui publik atas sektor pembangunan yang ditangani. Jadi, aplikasi portal data adalah mendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / PPID Utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi sektor-sektor publik. Aplikasi portal data diharapkan akan menjadi sarana untuk mewujudkan Satu Data Indonesia di Provinsi Jawa Tengah, karena data dari berbagai OPD yang masuk harus melalui tahap pemeriksaan prinsip SDI sebelum dipublikasikan dalam portal data.

Sumber: Diskominfo, 2022

Gambar 2.108.
Grafik Kunjungan Portal Data Tahun 2018-2022

Trend data yang masuk dalam portal data sepanjang 2018-2022 menunjukan kenaikan yaitu Tahun 2018 sebanyak 13.000 data; Tahun 2019 sebanyak 19.756 data; Tahun 2020 sebanyak 25.439 data; Tahun 2021 sebanyak 30.349 data; Tahun 2022 sebanyak 33.664 data. Meskipun demikian, memperhatikan Gambar 7. Menunjukkan bahwa trend jumlah kunjungan portal dari Tahun 2018-2022 menunjukkan tendensi penurunan. Penurunan terekam dari bulan ke bulan dan dari Tahun ke tahun. Penurunan minat kunjungan diduga faktor internal berupa aplikasi portal data memiliki kelemahan-kelemahan seperti tampilan aplikasi kurang menarik, data kurang menarik, data tidak ter update rutin/kosong dan kurang jelas kemanfaatannya. Adapun faktor eksternal adalah tersedianya penyedia data saingan yang lebih dapat dipercaya/sesuai kebutuhan (Misalkan BPS, data hasil penelitian akademis, dan data Perangkat Daerah). Penurunan trend kunjungan tersebut harus dievaluasi untuk perbaikan. Hasil pencermatan terhadap aplikasi juga, belum diketahui siapa saja yang memanfaatkan portal data tersebut. Pemahaman pengunjung diperlukan untuk mengetahui apakah data dimanfaatkan atau sekedar dilihat sekilas.

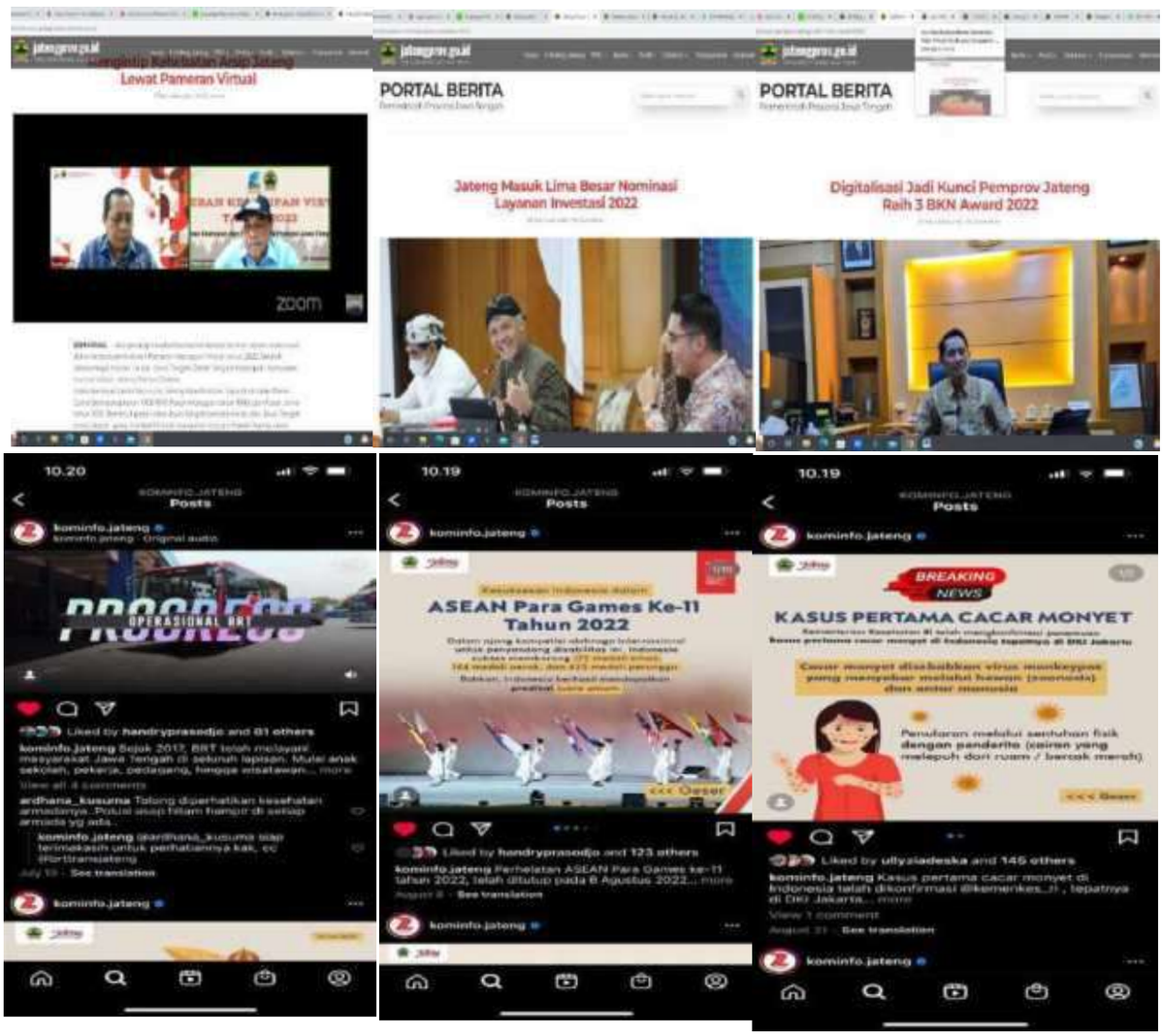

Sumber:Diskominfo,2022

Gambar 2.109.
Tampilan Aplikasi Portal Data Jawa Tengah

Selain disampaikan fasilitasi publikasi hasil pembangunan satu arah dalam bentuk tayangan berita dalam PPID, urusan statistik juga memfasilitasi dukungan

website untuk komunikasi dua arah seperti melalui portal berita pada website jatengprov.go.id. Diskominfo juga mengaktifkan website kominfo jateng untuk komunikasi yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi dengan Diskominfo terkait suatu topik pembangunan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.106. Terhadap layanan komunikasi dua arah tersebut terdapat hambatan dalam merespon pihak-pihak yang berkomunikasi, tentu membutuhkan spesialisasi siapa pihak yang menangani, kualitas pemahaman substansi topik yang dibahas dan, jaringan komunikasi antar pihak yang memadai.

3. Persandian.

Persandian memiliki peran yang sangat vital dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu untuk mengamankan informasi dengan kriteria CIA (*confidentiality, integrity, availability*) Ketiga aspek tersebut merupakan aspek yang paling penting dalam menciptakan sebuah keamanan informasi yang kuat dan efektif. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 (ayat 2) bahwa Persandian sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kondisi Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini, berdasarkan hasil pelaksanaan dan rekomendasi IT Assessment yang dilakukan oleh BSSN serta kegiatan Penetration Test (Pentes) mandiri dengan memanfaatkan beberapa tools pengamanan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2022 terhadap aplikasi yang telah dibangun/dikembangkan oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diperoleh hasil dalam kondisi yang cukup baik meskipun ada beberapa aplikasi yang masih diperlukan penguatan keamanan, layanan seperti SSL, *firewall* dan anti virus juga diharapkan dapat memperkuat keamanan sistem atau aplikasi dari sisi lalu lintas data dan keamanan *workstation* pengguna.

Tabel 2.188.
Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Dalam Kurun Waktu 2020 s.d 2022

NO	AREA EVALUASI	TAHUN	
		2021	2022
1	Tata Kelola	118	123
2	Pengelolaan Risiko	50	67
3	Kerangka Kerja	156	159
4	Pengelolaan Aset	147	167
5	Teknologi dan Keamanan Informasi	87	118
Tingkat Kematangan		III	III+
Predikat		CUKUP BAIK (558)	BAIK (634)

Sumber : BSSN RI, 2022

Berdasarkan tabel diatas, capaian tingkat kematangan Keamanan Informasi dalam kurun waktu 2020 s.d 2022 menunjukkan kondisi yang semakin baik, dimana terjadi peningkatan skor tingkat kematangan yang semula 558 pada tingkat III (predikat “Cukup Baik”) di tahun 2021, dan mengalami peningkatan

sebesar 76 poin sehingga capaian menjadi 634 pada tingkat III+ (predikat “Baik”) di tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa keamanan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah terkelola dengan baik pada aspek tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, dan respon. Namun untuk indeks KAMI masih terdapat aspek yang perlu optimalisasi pada aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga, Pengamanan Layanan Infrastruktur dan Perlindungan Data Pribadi (PDP). Meningkatnya Keamanan Informasi Dan Pemanfaatan Persandian Daerah yang diukur melalui Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI), yang dinilai menggunakan instrumen dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta dilakukan visitasi dan evaluasi langsung dari BSSN, dengan hasil Indeks KAMI di level III+ mencapai target, penilaian terdiri dari 8 unsur penilaian yaitu Tata Kelola, Pengelolaan resiko; Kerangka Kerja Keamanan Informasi; Pengelolaan Aset; Teknologi dan Keamanan Informasi; Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga; Pengamanan layanan Infrastruktur; dan Perlindungan data Pribadi.

Hingga saat ini, pada urusan persandian, telah dilakukan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan upaya pengamanan informasi. Upaya pengamanan informasi dilakukan melalui assessment aplikasi; layanan *e mail* sanapati, 49 SSL, 520 antivirus bagi 50 OPD, *live streaming* dan, *conference*. Kegiatan-kegiatan ini untuk menjamin keamanan informasi perangkat daerah. Terdapat 45 OPD yang aplikasinya sudah di pentest dan melakukan tindaklanjut atas hasil pentest nya. Sampai saat ini juga secara aktif terus dilakukan peningkatan kualitas keamanan informasi. Upaya peningkatan keamanan informasi seperti sedang dalam tahap pembuatan Pergub SMKI, *Risk Manajemen*, Arsitektur Keamanan dan SOP.

Upaya pengamanan informasi lebih detil sebagai berikut: dilakukan Digital Forensik dilaksanakan pada alat komunikasi milik Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; Pada layanan pengelolaan Tanda Tangan Elektronik (TTE), Bidang Persandian dan KI menyediakan aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik (MSE) sebagai aplikasi untuk membantu pendaftaran dan pengelolaan Sertifikat elektronik / Tanda Tangan Elektronik untuk seluruh Pejabat / Fungsional hingga staf pelaksana di seluruh OPD Pemprov Jateng dengan basis website dan Aplikasi Mobile. Selain itu Bidang Persandian dan KI juga menyediakan Chatbot “SORE MASE” sebagai layanan helpdesk bagi pemilik TTE yang dapat digunakan bagi pemilik TTE untuk mengecek data yang berkaitan dengan TTE secara realtime dan 24 jam. Hingga saat ini sudah terbit sejumlah 297 TTE; Pengamanan distribusi/pengiriman data atau surat sudah menggunakan email terenkripsi Sanapati baik dari pusat ke provinsi hingga ke kab/kota; Fasilitasi layanan *Video Conference* untuk komunikasi pejabat VVIP seperti Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; Layanan publikasi kegiatan yang ada di Pemprov Jateng melalui *Video Live Streaming* pada kanal medsos *(Youtube, Facebook, Twitter, Tiktok dan Instagram)*.

Dalam menjamin keamanan informasi, Provinsi juga sudah membentuk Tim CSIRT atau *Computer Security Incident Response Team* pada Tahun 2020. Tugas Tim CSIRT adalah menerima, meninjau, dan merespon laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Provinsi juga melakukan fasilitasi pembentukan Tim CSIRT di Kabupaten / Kota. Sampai saat ini sudah 11 Kab/Kota telah memiliki Tim CSIRT.

Tim CSIRT Provinsi Jawa Tengah selalu secara rutin melakukan layanan penetration testing, sertifikasi elektronik, kontra penginderaan dan *jamming*. *Pentest / Penetration Testing* dan *IT Security Assement* Mandiri adalah kegiatan pengujian kerentanan aplikasi yang digunakan di lingkup Pemprov Jateng oleh tenaga ahli pada bidang Persandian dan Keamanan Informasi baik pada saat aplikasi belum dirilis maupun pada saat aplikasi sudah dirilis atau sudah berjalan. Hingga saat ini sudah ada 47 OPD dari total 49 OPD aplikasinya telah di pentest dengan status akhir kerentanan LOW; SSL (*security Socket Layer*) adalah sebagai pengaman pertukaran data yang terjadi melalui jaringan internet, SSL sudah diterapkan pada semua sub domain yang digunakan pada aplikasi yang ada di Pemprov Jateng; Anti virus yang bertujuan untuk mengamankan data yang ada pada computer/desktop dari serangan virus atau malware, sebanyak 31 OPD sudah menerapkan anti virus pada desktop atau perangkat komputer yang digunakan; Pengamanan signal atau (Jamming) dilakukan untuk kegiatan yang menghadirkan pejabat VVIP atau Presiden dan Wakil Presiden serta pada kegiatan tes atau ujian kompetensi; Kontra penginderaan merupakan kegiatan untuk melakukan pencegahan terhadap pengawasan pihak lain, termasuk metode-metode yang melibatkan peralatan elektronik dan mendeteksi adanya peralatan surveilance (alat sadap), hal ini dilakukan pada kediaman, ruang kerja dan kendaraan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Upaya peningkatan keamanan informasi juga dilakukan melalui jalur regulasi, agar langkah-langkahnya lebih tertata dan didukung semua perangkat daerah. Regulasi tersebut adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang digunakan sebagai acuan atau dasar pelaksanaan Persandian dan Keamanan Informasi di Provinsi Jawa Tengah. Atas capaian pengamanan informasi, Provinsi Jawa Tengah sudah mendapatkan pengakuan ISO 27001 pada Tahun 2022 tentang Keamanan Informasi dan *Data Center*.

2.6.4 Penelitian dan Pengembangan

Sesuai dengan Perpres 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka dalam rangka optimalisasi urusan penelitian dan pengembangan serta terciptanya integrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Provinsi Jawa Tengah maka telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu keluaran yang dihasilkan oleh fungsi penelitian dan pengembangan adalah dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi penelitian yang dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Selama kurun waktu tahun 2018-2022 dokumen dan rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.189.
Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/Implementasi Penelitian

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dokumen Penelitian	6	9	4	2	n/a
2.	Rekomendasi/Implementasi Penelitian	6	9	4	2	n/a

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022

Selama kurun waktu 2017 – 2021 dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi hasil penelitian fluktuatif dan cenderung menurun. Hal ini disebabkan setelah pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan litbang daerah sejak 2017, kegiatan penelitian dalam bentuk Riset Unggulan Daerah (RUD) dan penelitian mandiri sudah tidak difasilitasi lagi. Pada tahun 2021 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya volume kegiatan penelitian karena pemerintah memfokuskan pada kegiatan dalam upaya penanggulangan dampak pandemi. Upaya untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan hasil litbang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM Peneliti melalui pendidikan dan pelatihan, membangun komunikasi melalui Jaringan Penelitian dan Inovasi, kerjasama dengan pemerintah pusat (Ristek dan LIPI), serta koordinasi dan membangun jejaring antara penelitian dan perencanaan.

Guna mendukung fungsi kelitbangan maka dibentuk beberapa lembaga pendukung kelitbangan di Jawa Tengah antara lain berbentuk *technopark, agro technopark, marine science technopark,* digitalisasi *technopark* dan taman teknologi pertanian. Bentuk kelembagaan *technopark* di Jawa Tengah di Kabupaten/Kota dikelola oleh PD teknis dan mendapatkan pendanaan dari anggaran daerah. *Technopark* dengan bidang fokus dibidang pertanian dan pangan terdapat di Ganesha Sragen dikelola oleh UPT Dinas Tenaga Kerja, *technopark* Lebaksiu yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tegal, *Agrotechnopak* Klaten yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, *Technopark* Pangan Kabupaten Grobogan yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan dan *technopark* perikanan di Kota Pekalongan dikelola oleh UPT Dinas kelautan Perikanan, serta *technopark* dengan bidang fokus otomotif di Kota Surakarta (Solo *Technopark*).

Kelembagaan lain yang memiliki peran untuk menghilirkan inovasi agar dapat menjadi produk yang bisa dijual dan mampu menghasilkan *start up* inovasi adalah Inkubator Bisnis dan Teknologi yang melakukan kegiatan proses pra inkubasi dan inkubasi. Pada proses Pra inkubasi dilakukan dengan meningkatkan sumberdaya manusia untuk mengubah pola pikir dan membentuk calon *start up* menjadi *start up*. Sedangkan proses inkubasi dilakukan dengan melakukan pendampingan, mentoring, pelayanan, fasilitasi, promosi untuk meningkatkan kapasitas produk. Di Jawa Tengah setidaknya terdapat 22 inkubator yang berfungsi aktif dalam memberikan layanan inkubasi.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki Inkubator Wirausaha Inovasi Jawa Tengah (Inwinov Jateng) yang berada di bawah naungan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Alokasi sumber pendanaan berasal dari APBD dan APBN (melalui Kementerian Ristekdikti, BRIN dan Kemenkop UKM). Selama lima tahun terakhir, Inwinov Jateng telah melakukan pembinaan terhadap tenant yang dikelola masyarakat melalui fasilitasi program penguatan inkubator/tenant yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.190.
Jumlah Tenant Binaan Inwinov Jateng yang difasilitasi Program Penguatan Inkubator/Tenant

No	Tahun	Total Tenant	Program	Sumber Pendanaan
1	2018	3 Tenant	Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Kemenristekdikti
2	2019	6 Tenant	Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Kemenristekdikti
3	2020	1 Tenant	Startup Inovasi Indonesia (SSI)	BRIN
4	2021	40 Tenant	Fasilitasi Lembaga Inkubator	Kemenkop UKM

Sumber: Bappeda Prov. Jateng, 2022

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Jawa Tengah yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (SIDa) Provinsi Jawa Tengah adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Pengembangan SIDa di Jawa Tengah ada 4 pilar tematik yaitu 1) Provinsi Inovatif; 2) Kabupaten Kota Inovatif; 3) Desa Inovatif; dan 4) UMKM Inovatif. Semenjak digulirkan tahun 2013, telah difasilitasi pengembangan system inovasi di 35 Kabupaten/Kota, pengembangan inovasi di 90 desa, serta pada 43 UMKM di Jawa Tengah.

Kegiatan lainnya adalah memfasilitasi inovasi masyarakat melalui Krenova atau Kreativitas dan Inovasi Masyarakat, Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk lomba krenova dan penjaringan inovasi. Kegiatan krenova dilakukan dengan 2 jalur dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki inovasi untuk bisa terlibat dalam kegiatan lomba krenova dan seleksi inovasi dengan jalur penjaringan inovasi. Kegiatan ini diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang telah menghasilkan karya inovasi sehingga mampu untuk mengatasi kebutuhan teknologi di sekitarnya atau dapat direplikasi di daerah lain, sehingga memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat Jawa Tengah.

Partisipasi masyarakat Jawa Tengah mengikuti kegiatan KRENOVA Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai tahun 2022 terjadi fluktuasi, pada tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan sedangkan tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan dikarenakan ada 2 kabupaten yang tidak mengikuti lomba krenova dan pembatasan jumlah peserta dari masing-masing Kabupaten/Kota maksimal 5 inovasi. Tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan disebabkan karena dilakukannya 2 mekanisme proses krenova melalui lomba krenova dan penjaringan inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak

masyarakat yang memiliki inovasi, perlu diberikan kesempatan dan wadah agar inovasi tersebut tersalurkan.

Tabel 2.191.
Jumlah Inovasi Hasil Krenova di Jawa Tengah Tahun 2017-2022

No	Tahun	Jumlah Inovasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi	Keterangan
1	2017	167	35 Kabupaten/Kota	• Mulai tahun 2019 Lomba Krenova dibatasi maksimal 5 inovasi per kabupaten/kota; • Lomba krenova belum semua Kabupaten/Kota mengirimkan; • Penjaringan Inovasi Masyarakat baru dimulai tahun 2021.
2	2018	201	35 Kabupaten/Kota	
3	2019	169	35 Kabupaten/Kota	
4	2020	167	34 Kabupaten/Kota	
5	2021	230	35 Kabupaten/Kota	
6	2022	276	34 Kabupaten/Kota	

Sumber: Bappeda Prov. Jateng, 2022

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi daerah serta untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perhitungan Indeks Inovasi Daerah didasarkan pada 16 indikator satuan pemda dan 20 indikator satuan inovasi. Predikat penilaian IID terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut: 0 (tidak dapat dinilai); 0,01-29,99 (Kurang Inovatif); 30,00-59,99 (Inovatif) dan 60,00-100,00 (Sangat Inovatif).

Tabel 2.192.
Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID)	Predikat	Keterangan
1	2018	720	Inovatif	Perubahan Penilaian IID mulai tahun 2021 dengan menggunakan skala perhitungan 0 - 100
2	2019	22.560	Sangat Inovatif	
3	2020	36.357	Sangat Inovatif	
4	2021	62.57	Sangat Inovatif	
5	2022	Dalam tahap penilaian		

Sumber: Bappeda Prov. Jateng, 2022

2.6.5 Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain masih perlunya pengolahan kearsipan sesuai ketentuan, serta belum optimalnya digitalisasi arsip.

Tabel 2.193.
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2018-2022

NO	Tahun	Nilai	Kategori
1	2018	92,20	Sangat Baik
2	2019	79,33	Sangat Baik
3	2020	92,08	Sangat Memuaskan
4	2021	91,314	Sangat Memuaskan
5	2022	93,45	Sangat Memuaskan

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2021

Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Penyediaan dan pengelolaan arsip untuk akses dan informasi masyarakat masih perlu dioptimalkan. Berikut data jumlah kunjungan pengguna arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.194.
Jumlah Pengunjung Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Layanan	Tahun (orang)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penelitian atau Mencari Arsip	721	757	780	209	346	496
2	Kunjungan atau Wisata Arsip	2.852	1.890	2.036	15.001	112	3.206
3	Magang atau PKL	238	219	151	103	67	97
4	Konsultasi Kearsipan atau Perpustakaan	1.033	669	485	206	127	288
5	Umum atau lain-lain	-	3535	594	33	81	338
6	Layanan SIKS, Website	-				11.289	41.718
	Jumlah	4.844	7.070	4.046	15.552	12.022	46.413

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2023

2.6.6 Akuntabilitas Kinerja

Salah satu aspek penilaian kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN-RB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berturut-turut pada tahun 2018-2022 mendapatkan predikat A. Nilai dan predikat ini meningkat dari tahun 2016-2017 sebelumnya yang hanya mendapatkan predikat BB.

Dari 5 komponen SAKIP yang dievaluasi di tahun 2022, komponen Perencanaan Kinerja mengalami penurunan dari 26,66 menjadi 25,53 atau turun 1,13 poin. Akan tetapi 3 komponen lainnya mengalami peningkatan dan satu komponen caitu Capaian Kinerja tidak dilakukan penilaian di tahun 2022. Meski ada komponen yang mengalami penurunan dan peningkatan, capaian 2022 sebenarnya tidak dapat begitu saja diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena berdasarkan PermenpanRB no 86 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriterita penilainnya. Akan tetapi nilai pada

tahun 2022 menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja mengalami perbaikan.

Terdapat beberapa catatan berdasarkan hasil evaluasi dari KemenpanRB terkait akuntabilitas kinerja :

a. Melakukan reviu dan penyempurnaan penjenjangan kinerja;
b. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment dan meningkatkan keselarasan kinerja individu dengan organisasinya;
c. Meningkatkan kualitas laporan kinerja.

Tabel 2.195.
Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,38	26,77	26,64	26,66	25,53
2.	Pengukuran Kinerja	25	19,87	20,50	20,23	20,23	23,63
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,68	11,99	12,08	12,27	12,84
4.	Evaluasi Internal	10	8,26	8,26	7,02	7,21	19,13
5.	Capaian Kinerja	20	13,99	14,04	14,28	14,35	n/a
	Hasil Nilai SAKIP	**100**	**80,18**	**81,56**	**80,25**	**80,72**	**81,13**
	Predikat		**A**	**A**	**A**	**A**	**A**

Sumber: Kemenpan RB, Maret 2022

2.6.7 Manajemen ASN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen ASN, Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Penilaian dengan sistem merit ini meliputi 8 aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Pengembangan Karier; Promosi dan Mutasi; Manajemen Kinerja; Penggajian, Penghargaan dan Disiplin; Perlindungan dan Pelayanan; serta Sistem Informasi.

Pada tahun 2021, nilai penerapan sistem merit di Provinsi Jawa Tengah sebesar 335,5. Nilai tersebut terus meningkat dari nilai penerapan sistem merit pada tahun 2020 yaitu sebesar 289 yang berarti penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Provinsi Jawa Tengah dalam Kategori Sangat Baik.

Tabel 2.196.
Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022

NO	Aspek	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Perencanaan Kebutuhan	60	10	37,5	40	40
2	Pengadaan	18	30	38	40	40
3	Pengembangan Karier	62,5	72,5	55	75	76
4	Promosi dan Mutasi	31	30	20	35	35
5	Manajemen Kinerja	42,5	50	67,5	70	70
6	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	22,5	30	35	37,5	37,5
7	Perlindungan dan Pelayanan	8	10	16	14	16
8	Sistem Informasi	23	20	20	24	24
Skor Nilai		**267,5**	**280**	**289**	**335,5**	**337,5**

NO	Aspek	2018	2019	2020	2021	2022*
Indeks Sistem Merit		**0,66**	**0,70**	**0,70**	**0,81**	**0,82**

Sumber: KASN, 2021

Capaian Nilai Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah dari aspek Perlindungan dan Pelayanan tahun 2021 sebesar 14 mengalami penurunan nilai sebesar 2 poin dibandingkan 2020 sebesar 16, dikarenakan proses penyesuaian dasar hukum terkait perlindungan hukum kepada pegawai yang terkena kasus hukum dan perlindungan pegawai belum selesai ketika proses penilaian sistem merit tahun 2021 berakhir.

Sedangkan pada capaian Indeks Sistem Merit pada tahun 2022 tidak dirilis oleh Komisi Aparatur Sipil Negara selaku lembaga yang berwenang. Hal ini disebabkan mendasarkan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara No 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah pasal 19 menjelaskan bahwa Instansi Pemerintah dengan kategori sangat baik akan dievaluasi oleh KASN setiap 2 (dua) tahun sekali. Namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan Penilaian Mandiri dengan capaian 337,5

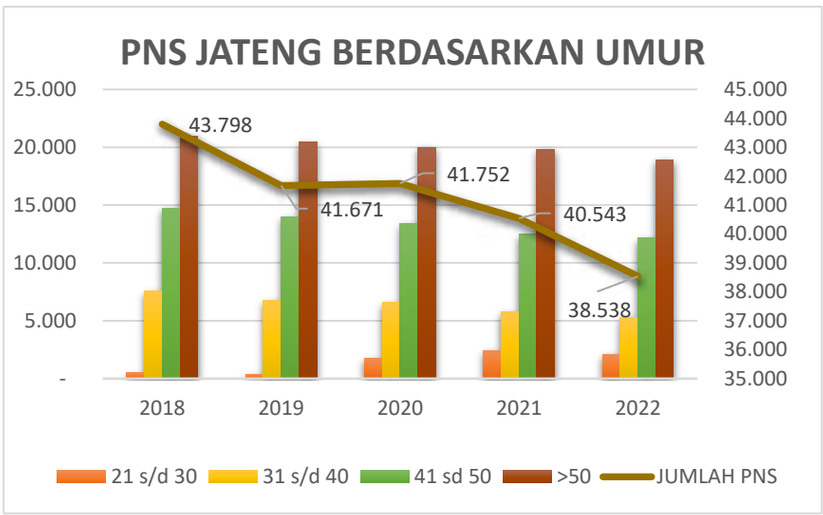

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 2.110.
Perkembangan Jumlah PNS Provinsi Jawa Tengah Kurun Waktu Tahun 2018-2022

Dalam perkembangannya, jumlah PNS Provinsi Jawa Tengah kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami penurunan sebesar 5.260 orang. Hal ini selaras dengan kebijakan *zero-growht* yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Namun, jumlah PNS Jawa Tengah sekarang masih didominasi oleh usia lebih dari 50 tahun dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan PNS usia 20-30 tahun. Sehingga menguatkan dugaan produktivitas PNS menurun, sehingga perlu adanya modernisasi birokrasi dengan penerapan teknologi informasi. Perlu pemetaan kebutuhan pegawai untuk mengetahui posisi esensial serta pelaksanaan manajemen talenta untuk menyiapkan kader suksesi yang lebih siap, produktif dan berkinerja untuk mengisi jabatan PNS dan mendukung kinerja organisasi.

Tabel 2.197.

PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Mengajukan Tugas Belajar

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN					JUMLAH
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	S1/DIV/PROFESI	7	13	0	0	10	30
2	S2	37	15	22	16	26	116
3	PPDS	11	5	5	2	6	29
4	S3	6	3	1	3	11	24
5	SUB SPESIALIS	0	2	2	1	2	7
	JUMLAH	61	38	30	22	55	206

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah, 2022

Salah satu upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi ASN yaitu melalui jalur pendidikan lanjutan dalam bentuk Tugas Belajar. Kurun waktu tahun 2018-2022 Provinsi Jawa Tengah sudah memfasilitasi tugas belajar sebanyak 206 orang. 30 orang untuk jenjang S1/DIV/Profesi, 116 orang untuk jenjang S2, 29 orang untuk jenjang PPDS, 24 orang untuk jenjang S3, dan 7 orang untuk jenjang Sub Spesialis. Pemberian fasilitasi tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan.

Selain melalui jalur pendidikan lanjutan, peningkatan kompetensi ASN juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Selama tahun 2018-2022 kapasitas peneyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terus meningkat secara kuantitas. Hal ini menunjukkan kemampuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat mencakup kalangan ASN secara luas yang tidak terbatas pada ASN Provinsi Jawa Tengah tetapi juga seluruh ASN di Jawa Tengah. Selain pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh BPSDMD, pengembangan kompetensi ASN juga dilakukan melalui sertifikasi. Pada tahun 2022 dari jumlah 50.115 peserta terdapat 46.012 sertifikat terkirim atau sebesar 91,8% peserta tersertifikasi. Hal ini menunjukkan potensi kompetensi SDM ASN yang cukup mumpuni tetapi juga menjadi pekerjaan rumah untuk menuntaskan 9,2% potensi yang tidak tersertifikasi. Hal itu bisa jadi disebabkan karena peserta tidak lulus sertifikasi atau tidak melaporkan kepada BPSDMD selaku leading sector pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.198.

Peningkatan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2018-2022

Tahun	Target Peserta (orang)	Realisasi Peserta (orang)
2018	104	100
2019	10.110	9.820
2020	2.789	2.763
2021	6.935	6.956
2022	18.932	19.838

Sumber : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 2022

Meski telah menglami peningkatan kuantitas pendidikan dan pelatihan yang signifikan, pendidikan dan pelatihan ASN di Jawa Tengah belum terstruktur untuk perbaikan kompetensi dan kinerja ASN. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya Road Map pengembangan kompetensi berbasis analisi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN yang menjadi acuan untuk pengembangan kompetensi dan karir ASN. Kondisi tersebut menyebabkan gap kompetensi dan kinerja ASN belum terpetakan dengan baik, pengembangan kompetensi belum

sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan kinerja, serta penilaian kinerja ASN belum akurat dalam suatu sistem yang terintegrasi.

2.6.8 Administrasi Kependudukan

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2022 menunjukkan tren peningkatan meskipun realisasinya terbilang flutuatif. Hal tersebut disebabkan karena data penduduk wajib KTP yang sangat dinamis, yaitu terdapat perubahan penduduk wajib KTP setiap harinya. Sampai dengan Tahun 2022, realisasi presentasi kepemilikan KTP adalah 98,16 persen. Realisasi tersebut masih perlu ditingkatkan agar pencapaian target presentase penduduk yang memiliki KTP dapat mencapai 100 persen penduduk wajib KTP memiliki identitas resmi penduduk., sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Dalam rangka meningkatkan kinerja tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah peningkatan layanan kependudukan melalui perekaman, penerbitan KTP, dan mendekatkan layanan agar seluruh penduduk wajib KTP memiliki identitas resmi penduduk. Kepemilikan KTP menjadi hal penting dalam administrasi kependudukan karena data tersebut akan digunakan sebagai basis data dalam berbagai intervensi program pemerintah, termasuk salah satunya dalam rangka menentukan sasaran penerima manfaat penanggulangan kemiskinan.

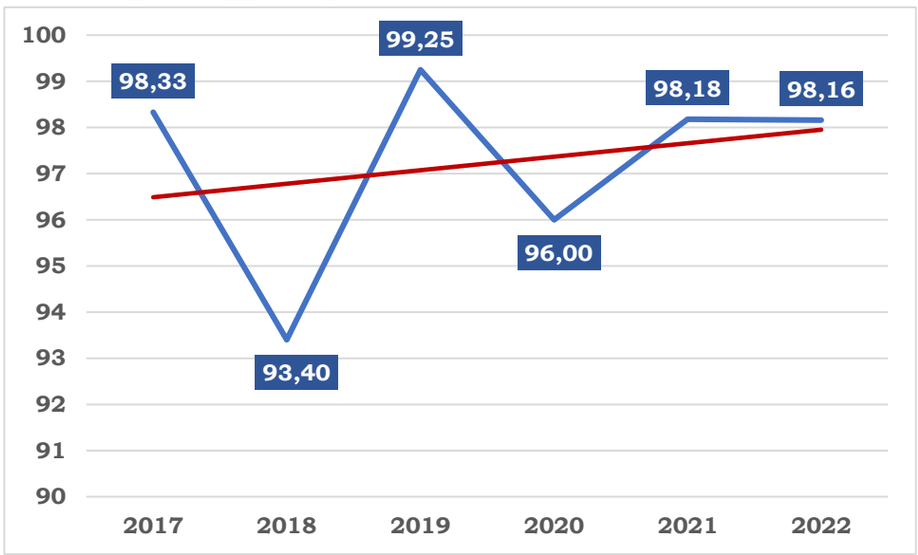

Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.111.
Persentase Kepemilikan KTP (KTP-el) di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2021

Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran

Ditinjau dari tingkat partisipasi 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran dalam kurun waktu tahun 2017-2022, realisasinya meningkat dari 87,42 persen menjadi 96,09 persen. Sementara itu pada tahun 2020, reliasasinya menurun sebesar 4,09 persen menjadi 92 persen. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 3,15 persen menjadi 95.15 dan mengalami kenaikan Kembali menjadi 99,97 di tahun 2022 sehingga tren yang terbentuk dari 2017-2022 menunjukkan capaian tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran cenderung meningkat.

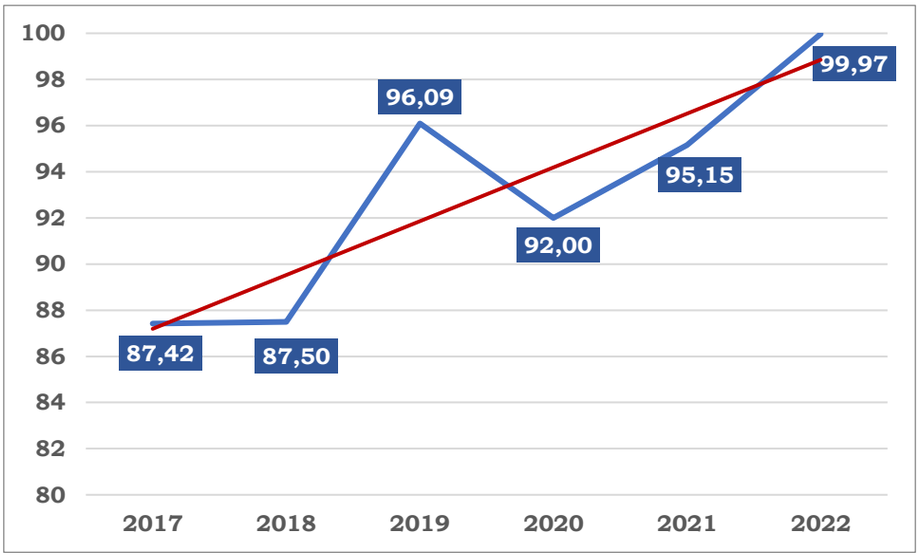

Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.112.
Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (%)

Tren peningkatan tersebut disebebkan oleh pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik serta adanya inovasi yang dilakukan di kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan 1 (satu) hari jadi, pelayanan 3 in 1 (*three in one*), bayi lahir pulang dari rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, *sms gateway*, dan layanan *online.*

Cakupan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan

Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari jumlah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tahun 2021, sebanyak 24 antara lain, Dinas Sosial, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pandapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, RS Karyadi, RSJD Surakarta, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balkesmas Provinsi, Balkesmas Pati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPR BKK Jawa Tengah, RS Panti Wiloso, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan di desa dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa lembaga

kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, dan PDTT dengan gambaran sebagai berikut.

Tabel 2.199.
Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2017-2022

Status Desa	Jumlah (desa) s.d. Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sangat tertinggal	52	6	2	-	-
Tertinggal	1.444	528	262	147	66
Berkembang	5.203	5.582	5.565	5.168	4331
Maju	1.038	1.576	1.841	2.295	3006
Mandiri	72	117	140	199	406
Total Desa Terverifikasi	**7.809**	**7.809**	**7.809**	**7.809**	**7.809**

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dari data tersebut, pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi status desa sangat tertinggal. Pada tahun 2022, desa dengan status "tertinggal" dan "berkembang" berkurang menjadi 66 desa dan 4331 desa, sementara itu, desa dengan status "maju" dan "mandiri" mengalami peningkatan sejumlah 3006 desa dan 406 desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan desa mengalami peningatan ditandai dengan peningkatan jumlah desa "maju" dan "mandiri". Verifikasi terhadap status kemandirian desa mencakup beberapa indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan lingkungan (ekologi).

Selanjutnya salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Tengah adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa meliputi BUMDes, Pasar Desa, UP2K-PKK dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Perkembangan lembaga ekonomi desa di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.200.
Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah
Tahun 2017-2022

No	Jenis Lembaga Ekonomi Desa	Jumlah (unit) s.d. Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BUMDesa	2.511	4.750	5.539	6.776	7.189
2	Pasar desa	1.369	1.349	1.671	1.671	1.671
3	UED-SP	1.029	1.029	1.029	1.029	n/a
3	UP2K-PKK	22.326	22.326	22.326	22.326	n/a

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022 perkembangan lembaga ekonomi masyarakat khususnya BUMDesa meningkat signifikan dari 2.511 unit di tahun 2018 menjadi 7.189 unit di tahun 2022. Untuk melihat perkembangan BUMDes berdasarkan Klasifikasi pada tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.201.
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah
Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2022

NO	KABUPATEN	JML DS	PENILAIAN BUMDES 2022					KETERANGAN		
			DASAR	TUMBUH	BERKEMBANG	MAJU	JUMLAH	*2022 BARU*	*PERTUMBUHAN (%)*	*BUMDES BERBADAN*
1	Banjarnegara	266	138	114	5	0	257	86	33,46	86
2	Banyumas	301	91	171	26	11	299	0	0,00	63
3	Batang	239	132	67	8	1	208	0	0,00	11
4	Blora	271	147	107	8	1	263	18	6,84	10
5	Boyolali	261	66	112	21	7	206	6	2,91	11
6	Brebes	292	115	161	15	1	292	0	0,00	20
7	Cilacap	269	59	179	27	4	269	0	0,00	140
8	Demak	243	99	94	9	2	204	19	9,31	35
9	Grobogan	273	97	156	16	4	273	0	0,00	69
10	Jepara	184	69	96	17	2	184	0	0,00	18
11	Karanganyar	162	83	70	6	1	160	6	3,75	46
12	Kebumen	449	78	275	44	5	402	0	0,00	56
13	Kendal	266	131	105	5	1	242	20	8,26	14
14	Klaten	391	142	201	31	17	391	11	2,81	15
15	Kudus	123	29	24	3	2	58	13	22,41	29
16	Magelang	367	121	189	26	10	346	13	3,76	26
17	Pati	401	215	180	4	2	401	0	0,00	28
18	Pekalongan	272	122	90	7	4	223	32	14,35	8
19	Pemalang	211	86	103	18	4	211	0	0,00	10
20	Purbalingga	224	67	109	35	7	218	16	7,34	42
21	Purworejo	469	118	304	29	6	457	40	8,75	73
22	Rembang	287	119	106	19	4	248	22	8,87	8
23	Semarang	208	59	97	28	9	193	19	9,84	34
24	Sragen	196	100	88	6	0	194	2	1,03	51
25	Sukoharjo	150	39	82	5	5	131	6	4,58	45
26	Tegal	281	63	97	18	4	182	0	0,00	125
27	Temanggung	266	61	156	37	3	257	52	20,23	38
28	Wonogiri	251	97	122	6	0	225	0	0,00	118
29	Wonosobo	236	85	95	11	4	195	32	16,41	13
	JUMLAH	**7.809**	**2.828**	**3.750**	**490**	**121**	**7.189**	**413**	**5,74**	**1.242**

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, April 2022

Berdasarkan data Penilaian Klasifikasi BUMDesa, dari 7.809 Desa di Jawa Tengah di tahun 2022 BUMDesa dengan kategori Maju sejumlah 121 unit (1,55 persen) dan kategori berkembang 490 unit (4,73 persen), sedangkan BUMDesa dengan kategori Tumbuh sejumlah 3.750 unit (48,02 persen) dan kategori dasar sejumlah 2.828 unit (36,21 persen). Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses

identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang.

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan perdesaan, yang merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayananan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang sampai dengan tahun 2022 telah terbentuk 120 kawasan perdesaan. 120 kawasan perdesaan tersebut dikembangkan melalui potensi tematik masing-masing kawasan yang berbeda-beda. Tema pengembangannya diantaranya adalah pertanian, wisata, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industri kecil.

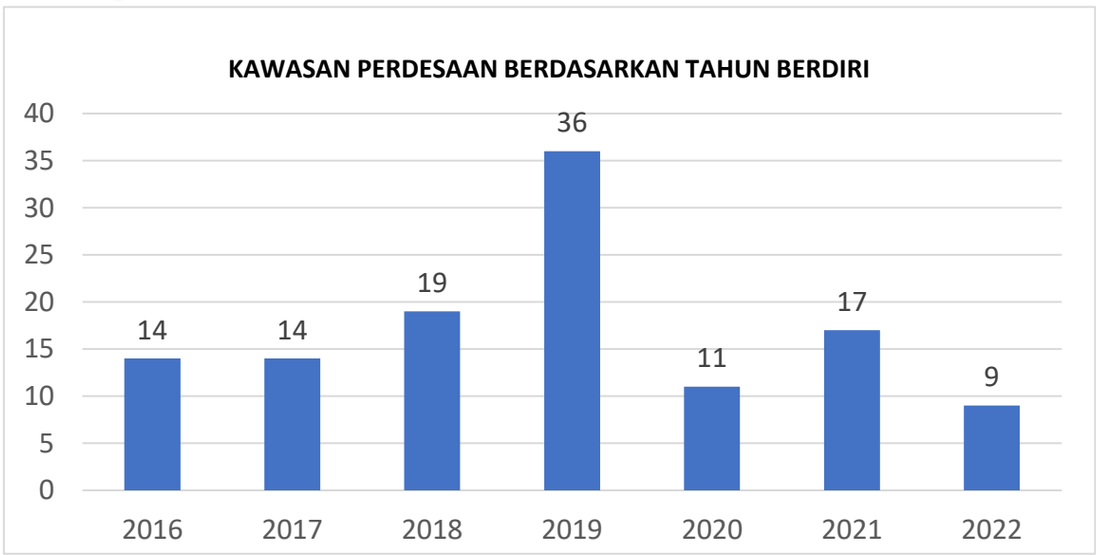

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, April 2022

Gambar 2.113.
Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2022

120 kawasan perdesaan tersebut tersebar di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Meski begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk kawasan perdesaan yang menjadi priotitas provinsi agar selanjutnya dapat menjadi fokus lokasi intervensi pengembangan desa oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan dengan adanya prioritas tersebut, maka dapat meningkatkan kualitas kawasan perdesaan melalui intervensi yang diberikan dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan berdampak pada pengurangan kemiskinan di perdesaan.

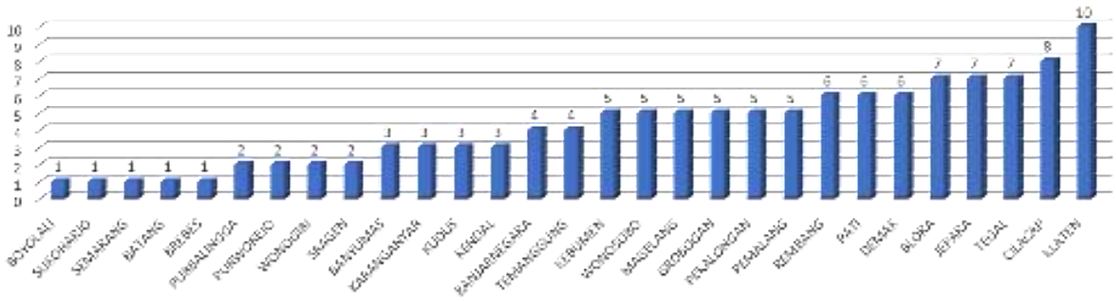

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, April 2022

Gambar 2.114.
Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Walaupun dari sisi kuantitas meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain 1) Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi pembangunan kawasan perdesaan; 2) Belum sinerginya pembangunan kawasan perdesaan baik di Provinsi maupun di Kabupaten; serta 3) Masih lemahnya komitmen pelaku dalam pembangunan.

.

2.6.9 Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Kinerja penyelenggaran urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 bidang program dan 7 indikator kinerja. Pada Tahun 2020 realisasi capaian kinerja perencanaan persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) pada lingkup bidang perekonomian, bidang pemerintahan dan sosial budaya, infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada masing – masing bidang mencapai target 90 persen dan untuk Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan pada Tahun 2020 juga sebesar 90 persen. Sehingga indikator urusan Perencanaan sebanyak 7 indikator dengan keseluruhan indikator berstatus telah tercapai.

2.6.10 Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada tercapainya terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan terwujudnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (*quick response*). Mendasarkan hasil evaluasi paruh waktu RPJMD dan Renstra PD, kinerja bidang pengawasan Provinsi Jawa Tengah

selama kurun waktu tahun 2018-2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.202.
Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

No.	Kinerja Pengawasan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai 3,023	Nilai 2,85	n/a	3,115	3,267
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, 2022

Hasil penilaian maturitas SPIP yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang disebabkan perubahan metodologi penilaian. Sedangkan tahun 2020, tidak dilakukan *quality assurance* oleh BPKP serta terdapat perubahan pedoman aplikasi SPIP online, sehingga berakibat tidak ada penilaian maturitas SPIP tahun 2020 yang telah berjalan dan akan dilanjutkan pada tahun 2021. Sedangkan nilai maturitas SPIP pada tahun 2021 sebesar 3,115 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,043. Hal ini disebabkan karena belum menerapkan manajemen resiko sebagai indikator unit kerja. Namun pada Tahun 2022 nilai maturitas SPIP kembali mengalami peninkatan dari 2021 sebesar 3,115 menjadi 3,267. Namun apabila dilihat trend lima tahun, kinerja pengawasan cenderung meningkat yang artinya kebijakan pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik.

Sesuai dengan hasil reviu atas *quality assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai dengan 2021 Kapabilitas APIP sudah mencapai Level 3 penuh. Ini artinya telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu terwujudnya peran APIP yang efektif baik dari sisi *quality assurance* maupun *consulting partner*.

2.6.11 Pertanahan

Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), lingkup bidang pertanahan merupakan pendukung kegiatan pembangunan fisik dalam hal mengkoordinasikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan keluaran yaitu ijin penetapan lokasi (penlok) yang bertujuan agar tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat dipermainkan makelar tanah dan mendapat ganti untung yang layak dari pemerintah. Pada Tahun 2022 terdapat, penetapan lokasi aktif sebanyak 14 ijin yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.203.
Penetapan lokasi aktif Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah Tahun 2022

NO	PENLOK	JUMLAH BIDANG	LUAS TANAH (m^2)	No. / TANGGAL TERBIT
1.	Penetapan Lokasi Pengadaaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen Di Kab. Temanggung dan Kota Magelang	147	175.800	590/12 14 April 2022
2.	Penetapan Lokasi Pengadaaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen Di Kab. Magelang	6.849	5.792.300	590/13 20 April 2022
3.	Penetapan Lokasi Pengadaaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen Di Kab. Semarang	2.307	3.428.900	590/14 21 April 2022
4.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Bagi Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi 2 di Kabupaten Demak	411	900	590/20 12 Juli 2022
5.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Industri Cilacap di Kabupaten Cilacap	493	821.700	590/25 5 Agustus 2022
6.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 Section 2 (Ampel – Pedan) di Provinsi Jawa Tengah	271	95.400	590/33 7 September 2022
7.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri	850	379.300	590/43 20 Oktober 2022
8.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar	531	1.269.700	590/44 20 Oktober 2022
9.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Magelang	183	125.900	590/45 20 Oktober 2022
10.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Tingal di Kabupaten Temanggung	385	131.500	590/55 15 Desember 2022
11.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Randugunting di Kabupaten Blora	6	14.600	590/52 28 November 2022
	TOTAL	**± 12.433**	**± 12.236.000**	

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.204.

Capaian Penerbitan Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pemantauan Penetapan Lokasi	-	-	-	400	526	2.217	898
2	Penetapan Lokasi	-	-	7.414	2.237	5928	2.811	12.433

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.205.

Capaian Kinerja urusan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2019-2022

NO	URAIAN	REALISASI				TOTAL (S.D AKHIR TAHUN 2022)
		2019	2020	2021	2022	
1.	Penetapan Lokasi	2.237 Bidang (242,9 Ha)	5.928 Bidang (493,4437 Ha)	2.811 Bidang (± 858,8916 Ha)	+ 12.433 Bidang (1.223,60 Ha)	23.409 Bidang (2.818,835 Ha)
2.	Reforma Agraria					
	a). Sertifikasi LP2B	100 Bidang	200 Bidang	350 Bidang	150 Bidang	800 Bidang
	b). Sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD)	15 Bidang	15 Bidang	0	63 Bidang	93 Bidang
	c). Inventarisasi Tanah HP dan HGU	20 Bidang	20 Bidang	10 Bidang	30 Bidang	80 Bidang
	d). Pelatihan untuk Akses Reforma Agraria	107 Orang	100 Orang	260 Orang	350 Orang	817 Orang

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam rangka mempertahankan lahan dikawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan insentif berupa sertipikasi gratis tanah yang yang masuk dalam kawasan LP2B. Melalui program ini diharapkan masyarakat berkomitmen menjaga fungsi lahan serta status lahan yang memiliki kepastian hukum (bersertipikat). Namun hal ini masih perlu dukungan program lainnya yang dapat memberikan insentif dan disinsentif untuk lebih meningkatkan keuntungan bagi masyarakat petani yang memiliki lahan dikawasan LP2B. Capaian stimulasi pembuatan sertipikat lahan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.206.

Capaian Sertifikasi Lahan LP2B Di Jawa TengahTahun 2022

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Sertifikat	Jumlah Bidang
1	Cilacap	Sampang	Paberasan	150	50
2	Blora	Kunduran	Botoreco		50
3	Semarang	Bringin	Gogodalem		50
Total				**150**	

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2022

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Reforma Agraria, bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mendapatkan mandat sebagai sekretariat GTRA Provinsi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria tingkat provinsi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah menginventarisasi potensi penataan aset dan mengkoordinasi serta melakukan fasilitasi penataan akses bagi penerima program Reforma Agraria. Penataan akses yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kebutuhan subyek program reforma agraria antara lain seperti pelatihan kepada kelompok tani dikawasan LP2B dan pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi pupuk organik. Capaian pelaksanaan program Reforma Agraria yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 2.206.

Tabel 2.207.

Capaian Reforma Agraria Di Jawa Tengah Tahun 2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN AKSES	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP
1	Kabupaten Tegal	Kecamatan Balapulang	Desa Balapulang Kulon	Sebagian besar masyarakat Desa Balapulang Kulon dengan pekerjaan pokok adalah petani, namun belum didukung dengan irigasi teknis dan merupakan sawah tadah hujan dengan irigasi non teknis, sehingga yang diperlukan adalah pembangunan jaringan irigasi, dan pembangunan embung desa	50 KK	Pelatihan “Pengelolaan Lahan Pertanian Tadah Hujan” dan “Penanggulangan Hama Wereng”

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN AKSES	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP
				(namun sulit terealisir karena jauh dari sumber mata air) atau pun dengan pembuatan sumur bor. Dalam rangka mengatasi atau memperbaiki jaringan irigasi sawah tersebut Pemerintah Desa Balapulang Kulon telah menginisiasi kerjasama dengan Desa sekitar dan Instansi terkait bail Kabupaten maupun Provinsi, namun sampai saat ini belum terealisir, hal ini menyebabkan 50% nya lahan sawah gagal terutama yang letaknya jauh dari sumber air. Selain itu menurut warga penggarap hama yang serig menyerang lahan pertanian adalahan hama wereng.		

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN AKSES	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP
2	Kabupaten Sragen	Kecamatan Sambirejo	Desa Jetis	Permasalahan yang dihadapi di Desa Jetis yaitu terkait masalah pupuk dikarenakan pembelian pupuk sekarang di batasi sehingga tiddak bias mencakupi luas lahan para petani yang mengaki batkan hasil pertanian yang kurang optimal, sebagian kecil warga masyarakat Desa Jetis berinisiatif untuk membuat pengolahan pupuk kandang organik namun harapannya sebagian besar masyarakat desa dapat menerapkan pembuatan pupuk organik untuk membantu memenuhi kebutuhan pupuk warga sendiri. Selain itu, Pemdes Jetis juga mendapatkan keluhan dari petani terkait penyakit tanaman yang menyerang tanaman mereka seperti busuk leher/jamur pada tanaman	50 KK	Pelatihan Penanganan Busuk Leher Pada Tanaman Padi dan Pembuatan Pupuk Organik

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN AKSES	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP
				dan rata – rata pada tanaman padi		
3	Kabupaten Grobogan	Kecamatan Tegowanu	Desa Tegowanu Wetan	Permasalahan yang sering di hadapi oleh petani di antaranya kurangnya pasokan pupuk bagi petani meskipun sudah ada beberapa kelompok tani yang sekarang sudah mengembangkan pupuk organik dari sampah daun – daun kering akan tetapi kelompok tani yang sudah berinisiatif membuat pupuk organik namun masih sebagian kecil. Pemerintah Desa Tegowanu Wetan mempunyai rencana kedepannya desa mereka akan di jadikan obyek wisata terkait tanaman organik. Pemerintah Desa Tegowanu Wetan juga	50 KK	Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Guna Mendukung Pertanian Organik

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN AKSES	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP
				mengharapkan selain pengolahan sampak organik menjadi pupuk di harpakan juga warga masyarakat bias mengolah sampah rumah tangga guna di jadikan obat, pupuk maupun hal hal lainnya, selain itu karena konsep kedepannya akan dijadikan wisata organik pemerintah desa tegowanu wetan masih terkendala terkait serifikasi organiknya		
4	Kabupaten Pati	Kecamatan Gabus	Desa Wuwur	Hasil utama pertanian di Desa Wuwur yaitu padi. Terkait permasalahan yang terdapat di Desa Wuwur yaitu hama tikus serta hama burung. Sementara ini penanganan masih menggunakan setrum/listrik untuk hama tikus serta hama burung hanya secara manual para petani yaitu di usir oleh tangan saja. Dalam hal ini, masyarakat Desa Wuwur	50 KK	Kegiatan Akses Reform Pelatihan Pemanfatan Burung Hantu (Tyto Alba) sebagai Pengendali Hama Tikus dengan pokok bahsan tata cara pemeliharaan dan pemanfatan burung hantu untuk penanggulangan hama tikus serta penanganan hama tikus untuk meningkatkan perekonomian desa

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN AKSES	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP
				membutuhkan penanganan yang efektif terkait permasalahan hama tikus dan hama burung tersebut.		
5	Kabupaten Wonosobo	Kecamatan Kejajar	Desa Sigedang	Potensi yang berada di Desa Sigedang merupakan tanaman kentang, namun selama ini para warga menanam kentang dengan bibt yang di ekspor dari wilayah lain (Jawa Barat). Sejauh ini di Desa Sigedang yaitu belum terlalu banyak warga masyarakat maupun kelompok tani yang berminat untuk melakukan pembuatan bibit kentang sehingga produksi pembibitan kentang masih rendah, padahal telah dilakukan sertifikasi pembibitan kentang. Sehingga secara legalitas bibit kentang sudah dapat di komersilkan maupun di pakai sendiri.	50 KK	Peningkatan Budidaya Bibit Kentang dan Pengembalian Fungsi Lahan Secara Organik

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN AKSES	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP
6	Kabupaten Sragen	Kecamatan Sambungmacan	Desa Sambung Macan	Desa Sambungmacan memiliki danau kecil yang ditengahnya terdapat pulau kecil, yang merupakan potensi untuk menjadi wisata desa. Dan harapan kedepannya di tengah pulau kecil di danau tersebut akan dikembangkan untuk wisata pertanian organik di Desa Sambungmacan	50 KK	Pelatihan Pertanian Organik untuk Mendukung Wisata Desa
7	Kabupaten Cilacap	Kecamatan Maos	Desa Mernek	Mernek telah memiliki 4 pilar MERNEK JENEK yaitu lingkungan lestari, pertanian, perikanan, & pertenakan melimpah, kemandirian ekonomi serta desa aman dan kondusif. Potensi Desa Mernek yang salah satunya yaitu Gapoktan yang aktif memiliki kegiatan rutin dan menjadi salah satu factor untuk mengembangkan wisata Desa organik di Desa Mernek	50 KK	Pelatihan Pengelolaan Lahan Organik Menuju Wisata Desa

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah , 2022

2.7 Kondusivitas Daerah

Salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari apakah daerah tersebut kondusif, sehingga peran pemerintah untuk dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat menjadi mutlak. Mewujudkan kemanan perlu juga menciptakan kondisi yang teratur, tertib sesuai norma yang berlaku dan juga yang ada di masyarakat. Dengan perwujudan tersebut, maka potensi konflik akan secara simultan dapat ditekan dan stabilitas daerah terjaga. Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2020 saat adanya pandemi *Covid-19* tercatat 113 kasus kejadian konflik. Dilihat dari jumlah kasus yang terjadi hingga tahun 2022, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir konflik masih memerlukan upaya yang cukup keras, karena di tahun 2018 dapat diminimalisir hingga hanya terjadi 18 kasus saja.

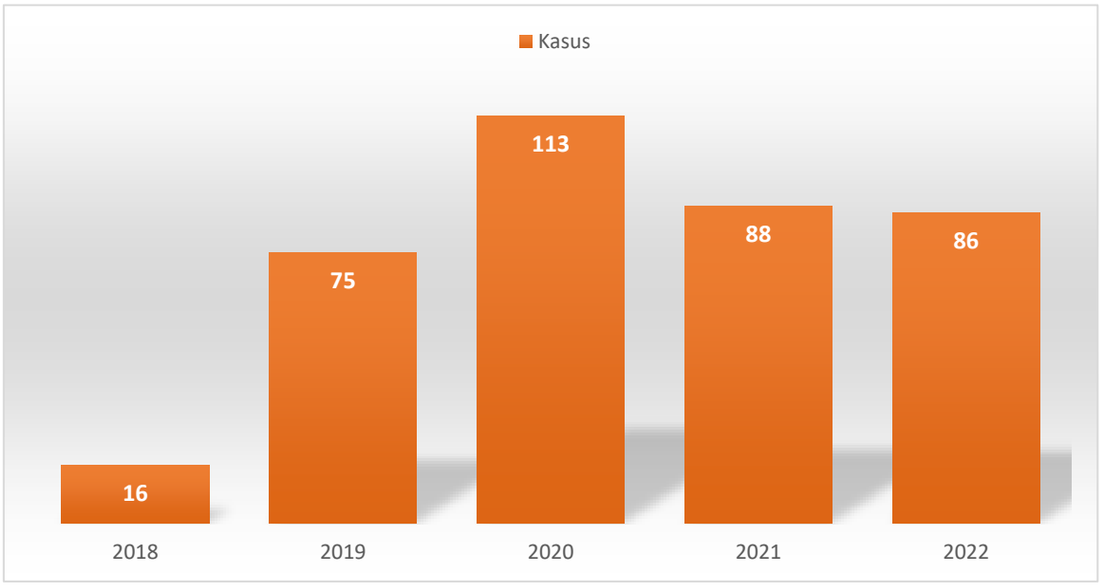

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.115.
Rekap Kejadian Konflik di Provinsi Jawa Tengah

Potensi radikalisme di Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menunjukkan nilai 6,8% atau masih diatas rata-rata nasional. Potensi radikalisme lebih tinggi pada perempuan, generasi muda, dan mereka yang aktif diinternet. Masih menjadi satu kesatuan riset yang dilakukan oleh BNPT, Indeks kebhinekaan masyarkat di Jawa Tengah adalah 89,6% dengan dimensi sikap masih tergolong rendah jika dibanding dengan dimensi pemahaman, hal ini dikarenakan kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses internet dan sosial media, termasuk pada kalangan rural. Melihat pentingnya akses internet dalam meningkatkan internalisasi kebhinekaan, perlu juga disiapkan tentang literasi digital yang ada di masyarakat Jawa Tengah. Hal tersebut karena pada mereka yang aktif diinternet memiliki potensi radikalisme yang lebih tinggi.

Hal lain yang dapat merepresentasikan kondisi umum dalam menjaga kondusivitas wilayah adalah dengan melihat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB. Provinsi Jawa Tengah pada IKUB mengalami penurunan dimana skors tahun 2021 sebesar 75,12, sedangkan di tahun 2022 sebesar 74,28. Selain itu pada penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dengan pengukuran terbaru memperoleh nilai 81,15. Aspek kesetaraan pada penilaian IDI Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sedang, dimana pada aspek tersebut memperlihatkan kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dalam

mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, serta anti monopoli sumber daya ekonomi.

Data unjuk rasa pasca terjadinya pandemi *covid*-19 memperlihatkan adanya penurunan, namun terkait dengan unjuk rasa berdasarkan tuntutan yang dibawa, dimana tuntutkan yang ada dalam kategori sosbud masih tergolong tinggi.

Tabel 2.208.
Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

No	Tuntutan	Tahun					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Ideologi	0	0	0	0	n/a	
2	Politik	7	25	9	15	n/a	
3	Ekonomi	65	56	87	52	n/a	
4	Sosbud	200	181	234	109	n/a	
5	Kamtibmas	9	17	13	13	n/a	
6	Pendidikan	5	4	7	2	n/a	
7	Kesehatan	1	5	7	8	n/a	
	Jumlah	287	288	357	199	n/a	

Sumber : Polda Jawa Tengah, 2022

Melihat kondisi existing Provinsi Jawa Tengah terkait dengan kondusivitas wilayah, cipta kondisi secara optimal terus ditingkatkan guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menegakan norma yang berlaku, tidak terkecuali norma hukum. Penegakan norma hukum adalah ditujukan untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan kepada seluruh masayarakat melalui penyelesaian pelanggar produk hukum daerah.

Tabel 2.209.
Penyelesaian Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Pelanggar	Jumlah Pelanggar yang dibina	Persentase
1	2018	1.000	1.000	100
2	2019	1095	1095	100
3	2020	293	293	100
4	2021	435	435	100
5	2022	250	250	100

Sumber; Satpol PP Provinsi Jawa Tengah

Melihat data yang ada terlihat adanya penurunan intensitas karena adanya pandemi covid-19 yang terjadi di tahun 2020. Namun jika dilihat berdasarkan tabel tersebut kinerja penyelesaian pelanggaran Produk hukum daerah tahun 2017-2021 sudah sangat baik dengan persentase 100 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap pelanggaran produk hukum daerah yang terdata dapat diselesaikan melalui cara persuasif dan represif. Namun apabila terindikasi adanya sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana, maka dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Hingga saat ini tercatat 147 Perda yang masih aktif, dengan Perda yang memiliki sanksi hukum (sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana)

sebanyak 65 Perda. Beberapa Perda tidak dapat ditegakkan karena Instansi Teknis sebagai pengampu Perda tidak dapat menjalankan fungsinya dalam sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian karena keterbatasan sumber daya. Disamping itu, informan yang ada tidak dapat mencakup keseluruhan luas wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu adanya alternatif lain untuk memiliki informan di beberapa titik yang terindikasi rawan terjadinya pelanggaran yang menganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Salah satu alternatif yang ada adalah melakukan mobilisasi linmas yang ada di daerah. Persoalan yang perlu menjadi perhatian khusus terkait dengan alternatif tersebut adalah menurunnya rasio linmas yang ada.

Tabel 2.210.
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio
1	2018	311.746	34.257.865	90,99
2	2019	230.782	34.490.835	66,91
3	2020	239.430	36.516.035	66,57
4	2021	240.958	36.516.035	65,98
5	2022	n/a	n/a	n/a

Sumber : Sat. Polisi Pamong Praja Prov. Jateng dan BPS Jateng, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, rasio jumlah linmas terhadap jumlah penduduk Jawa Tengah semakin menurun karena rendahnya minat masyarakat menjadi anggota linmas, banyak anggota linmas yang meninggal dunia, dan adanya perpindahan anggota linmas keluar provinsi.

2.8 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2022

Kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2021 dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2021 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Permend Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar agri Nomor 86 Tahun 2017.

Evaluasi mendasarkan pada realisasi kinerja RPJMD di tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 dapat digambarkan dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKPPD) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.211.
Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023

Indikator	Jumlah Indika-tor	Tercapai ≥ 100% Target Akhir RPJMD		Akan Tercapai 99% ≤ 60% Target Akhir RPJMD		Perlu Upaya Keras < 60% Target Akhir RPJMD		NA	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
I K U	13	4	30,77	8	61,54	1	7,69	0	0
I K P P D	194	91	46,91	85	43,81	18	9,28	0	0

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022 (hasil analisis)

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, untuk Indikator Kinerja Utama dari 13 target indikator kinerja utama daerah terdapat 4 indikator tercapai, 8 indikator akan tercapai, 1 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu pertumbuhan ekonomi. dampak akibat pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi 2 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah namun pada triwulan III 2021 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara kumulatif membaik dan tumbuh dibandingkan dengan kumulatif sampai dengan triwulan III 2021 dimana semua lapangan usaha selama tiga triwulan mencatat pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 194 target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibagi dalam 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing terdapat 91 indikator tercapai, 85 indikator akan tercapai, 18 indikator perlu upaya keras.

2.9. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan meliputi permasalahan pembangunan daerah makro yang akan diintervensi melalui cross cutting strategy dengan mendasarkan pada hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing, serta permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan Jawa Tengah dengan mendasarkan gambaran aspek pelayanan umum. Berdasarkan data yang ditampilkan dan hasil Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 maka permasalahan yang perlu untuk diselesaikan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.9.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah ini sifatnya permasalahan makro, dan merupakan permasalahan lintas sektor serta berkaitan dengan isu strategis daerah yang juga perlu menjadi perhatian perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah untuk diselesaikan pada Tahun 2024. Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah mendasarkan pada hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing untuk Tahun 2024 sebagai berikut.

1. **Masih cukup tingginya angka kemiskinan.**

   Masih cukup tingginya kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2022 sebesar 10,98 persen, naik 0,05 persen dari bulan Maret 2022, namun apabila dibandingan

dengan periode September 2021 yang sebesar 11,25 persen menurun 0,27 persen. Namun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang sebesar 9,57 persen. Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Jawa Tengah, juga termasuk ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin.

Karakteristik penduduk miskin di Jawa Tengah sebagian besar antara lain merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan sampai dengan SD/SLTP, penduduk yang tidak bekerja atau bekerja di sektor informal, pengeluaran penduduk lebih banyak untuk makanan, dan penghasilan utamanya bersumber dari sektor pertanian.

Selain melihat karakteristik umum, kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti kurangnya akses pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesbilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah akan memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, pengguaan lahan hingga tingkat kerawanan terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

2. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka.

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Di sisi lain tantangan bonus demografi dan perubahan industri di era digital atau revolusi industri 4.0 menuntut perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah. Hingga saat ini kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah dinilai belum memadai yang ditunjukkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah nasional meskipun termasuk dalam kategori tinggi.

Kualitas sumber daya manusia juga terkait dengan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan ukuran usia harapan hidup. Kualitas usia harapan hidup berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penguatan sistem kesehatan. Selain derajat kesehatan, kebugaran menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia.

Peran perempuan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah juga memegang peranan penting terutama sebagai pendidik awal bagi anak dalam proses pembentukan manusia untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak sejak dini. Meskipun demikian pemberdayaan perempuan Jawa Tengah masih perlu perhatian yang ditunjukkan dari beberapa variabel indeks pemberdayaan gender Jawa Tengah yang masih rendah. Tantangan dalam pembangunan perempuan Jawa Tengah yaitu berupa kemauan atau

motivasi, pandangan atau budaya patriarki di masyarakat terhadap perempuan.

Satu hal yang juga menjadi penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah adalah bagaimana membentuk karakter sumber daya manusia yang tercermin dari internalisasi nilai budaya, agama, dan sikap mental masyarakat Jawa Tengah. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa kontribusi budaya dalam pembangunan di Jawa Tengah menurun yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan Jawa Tengah tahun 2021 yang semakin menurun dari tahun 2018.

Selain itu kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah juga dilihat dari aspek tenaga kerja dimana daya saing tenaga kerja Jawa Tengah belum optimal. Permasalahan ini dapat dilihat dari karakteristik penduduk bekerja di Jawa Tengah yang didominasi oleh lulusan SD sebanyak 43,09 persen di tahun 2021. Sementara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang sebesar 5,95 persen justru didominasi oleh penduduk usia kerja lulusan SMK, dan terendah adalah lulusan SD. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian, karena persaingan tenaga kerja di era globalisasi yang semakin kompetitif dan menuntut kompetensi tenaga kerja yang semakin tinggi agar kesejahteraan penduduk Jawa Tengah semakin meningkat.

3. **Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur.**

   Perekonomian Jawa Tengah masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 sampai dengan triwulan III meningkat positif jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021, yaitu sebesar 5,36 persen (*c to c*) dimana tahun 2021 sebesar 2,63 persen (*c to c*). Perekonomian Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan sektor-sektor unggulan Jawa Tengah (pertanian, industri pengolahan, perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pariwisata), kemudahan investasi, pengendalian inflasi, serta infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa. Tantangan kedepan adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan antar wilayah yang ditunjukan dari Rasio Gini Jawa Tengah. Tahun 2022, Rasio Gini Jawa Tengah sebesar 0,366 menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,368.

4. **Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana.**

   Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Namun disisi lain ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Tengah semakin menurun. Tekanan lingkungan hidup di Jawa Tengah ditunjukkan dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang di tahun 2021 sebesar 67,48 masuk dalam kategori sedang. Selain itu dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Jawa Tengah terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara, dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksikan.

Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada terjadinya bencana yang juga tidak dapat diprediksikan apalagi Jawa Tengah sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Risiko Bencana Jawa Tengah yang sebesar 125,73 di tahun 2021.

5. **Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi.**

   Dalam rangka menjawab tantangan global, perlu dioptimalkan implementasi reformasi birokrasi antara lain percepatan pelayanan publik yang tepat sasaran, penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kapasitas kelembagaan yang sesuai proses bisnis, kapasitas dan pola pikir sumber daya aparatur yang semakin adaptif dan terbuka, serta birokrasi yang kolaboratif, yang kesemuanya didukung dengan digitalisasi pemerintahan. Reformasi birokrasi ditunjukkan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dimana IRB Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 78,79 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 77,05. Meskipun kinerjanya semakin baik dari tahun ke tahun, namun yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi tidak hanya tentang administrasi namun lebih mendorong agar dapat menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan daerah Jawa Tengah.

6. **Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah.**

   Kondusivitas daerah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing sebuah daerah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang dinilai cukup kondusif yang ditunjukkan dari semakin menurunnya kejadian konflik sosial, kejadian unjuk rasa, dan lainnya yang menggambarkan kondusivitas daerah Jawa Tengah. Meskipun demikian, di tengah berbagai ancaman global, nasional, dan regional terkait dengan semakin terbukanya informasi tanpa batas (*borderless*), ancaman kemanan dan ketertiban masyarakat, dan ancaman gangguan keamanan lainnya, upaya mitigasi terhadap risiko terancamnya kondusivitas daerah Jawa Tengah ke depan.

2.9.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan dari hasil analisis gambaran aspek pelayanan umum yang meliputi seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk Tahun 2024 sebagai berikut.

A. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

   Permasalahan pokok urusan pendidikan yang masih perlu dioptimalkan ke depan adalah kualitas penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan merata di Jawa Tengah yang ditandai dengan permasalahan antara lain:

   a. Masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan;
   b. Akses pemerataan layanan pendidikan belum memadai;

c. Masih kurangnya mutu pendidikan.

2. Kesehatan

Permasalahan urusan kesehatan berkaitan dengan masih perlunya mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan permasalahan antara lain:

a. Masih tingginya penemuan penyakit menular dan tidak menular serta Kesehatan jiwa;
b. Masih ditemukannya kasus kematian ibu;
c. Masih rendahnya aksesibilitasi pelayanan Kesehatan lansia;
d. Masih tingginya angka stunting dan gizi buruk;
e. Masih belum semua fasilitas pelayanan Kesehatan primer dan rujukan melayani 9 prioritas layanan unggulan;
f. Keterbatasan sarana dan prasarana.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih perlu ditangani kedepan terutama terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas dan pengembangan wilayah serta pelayanan dasar bagi masyarakat meliputi:

a. Masih adanya Jalan Provinsi di Jawa Tengah yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak ringan. Selain itu terdapat titik rawan longsor pada ruas-ruas Jalan Provinsi yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat terjadi bencana;
b. Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi layak termasuk di dalamnya aman;
c. Belum semua bangunan gedung milik daerah dalam kondisi baik;
d. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air yang meliputi permasalahan:
    1) pemanfaatan sumber daya air antara lain masih kurangnya sarana prasarana tampungan air baku, dan banyak sarana prasarana irigasi yang rusak;
    2) pengendalian daya rusak air terutama ditunjukkan dengan adanya kerusakan sarpras sungai dan pengendali banjir;
e. Belum optimalnya ketersediaan rencana tata ruang, implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terutama terkait dengan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat, yang meliputi:

a. Masih adanya kebutuhan rumah layak huni;
b. Masih terdapat kawasan kumuh;
c. Kurang optimalnya penyelanggaraan pelayanan dan ketersediaan PSU Permukiman;
d. Belum optimlanya penyelenggaran pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

   Permasalahan pada urusan ini terkait dengan masih belum optimalnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum terutama terkait dengan permasalahan:

   a. Belum optimalnya penegakan perda serta pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
   b. Masih belum semua kabupaten/kota memiliki dokumen perencanaan kebencanaan;
   c. Masih terbatasnya jumlah pemasangan sistem peringatan dini (*Early Warning System*/EWS) di wilayah rawan bencana;
   d. Masih kurangnya edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan bencana;
   e. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana;
   f. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam perhitungan kebutuhan pasca bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi.

6. Sosial

   Penyelenggaraan urusan sosial berkaitan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang harus ditangani, yang hingga saat ini penanganannya belum optimal, ditunjukkan dari masih cukup tingginya PPKS. Permasalahan ini didukung dengan permasalahan antara lain:

   a. Rendahnya penanganan PPKS;
   b. Masih adanya KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang belum mendapatkan bantuan modal dan pendampingan;
   c. Masih adanya panti yang kondisinya rusak.

B. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

   Permasalahan utama penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Jawa Tengah berkaitan dengan masih cukup tingginya pengangguran, dan belum optimalnya daya saing tenaga kerja, dengan beberapa permasalahan lainnya meliputi:

   a. Masih tingginya penduduk usia kerja yang tidak bekerja (*Not in Employment, Education or Training*);
   b. Sarana dan Prasarana pada Balai Latihan Kerja yang jauh tertinggal dibandingkan dengan kebutuhan industri saat ini;
   c. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja;
   d. Belum optimalnya kesejahteraan tenaga kerja;
   e. Belum optimalnya hubungan industrial.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

   Permasalahan utama urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkaitan dengan belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan pembangunan keluarga yang ditunjukkan dari permasalahan:

   a. Masih adanya ketimpangan gender dalam pembangunan;
   b. Masih tingginya perkawinan usia anak;
   c. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Pangan

Ketahanan pangan dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pada aspek ketersediaan, masih terdapat beberapa komoditas pangan utama yang belum mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Adapun pada aspek keterjangkauan, beberapa komoditas bahan pangan masih mengalami fluktuasi harga. Selain itu masih terdapat kecamatan dan desa di Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori rentan pangan. Selanjutnya pada aspek pemanfaatan pangan, konsumsi pangan masyarakat belum seimbang antar kelompok pangan. Lebih lanjut kondisi dan permasalahan ketahanan pangan sebagai berikut:

a. Ketersediaan Pangan
   Secara umum komoditas pangan utama yaitu beras, jagung, dan kedelai telah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, namun masih terdapat beberapa komoditas pangan yang perlu didorong.
b. Keterjangkauan
   Kondisi keterjangkauan pangan dicerminkan berdasarkan peta kerawanan pangan, secara umum masih terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan pangan.
c. Pemanfaatan
   Berdasarkan tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat, masih diperlukan dorongan pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan.

4. Pertanahan

Permasalahan utama urusan pertanahan adalah belum optimalnya tata kelola administrasi dan pemanfaatan pertanahan, yang diindikasikan dari beberapa permasalahan antara lain:

a. Masih terdapat konflik atau sengketa permasalahan pertanahan di Jawa Tengah;
b. Masih terdapatnya keterbatasan data yuridis dan data fisik dalam penyelesaian sengketa tanah garapan;
c. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan asset dan akses reforma agraria;
d. Masih tingginya intensitas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Tengah melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum .
e. Belum optimalnya penyelenggaraan Zonasi Nilai Tanah.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan utama urusan lingkungan hidup adalah degradasi kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh permasalahan antara lain:

a. Masih tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditandai dengan penurunan kualitas air, udara maupun lahan. Permasalahan tersebut dikarenakan masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan limbah, masih rendahnya pangawasan dan pemantauan terhadap industri penghasil limbah, serta masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah;

b. Meningkatnya emisi GRK akibat aktivitas ekonomi dan penduduk belum diimbangi dengan capaian penurunan emisi GRK masih rendah.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pokok urusan tersebut adalah belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang ditunjukkan dengan belum optimalnya fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi kabupaten/kota, serta rendahnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kondisi yang masih perlu diupayakan untuk lebih baik dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah bagaimana mewujudkan kemandirian desa di mana hingga saat ini desa yang belum masuk dalam ketegori mandiri di Jawa Tengah masih cukup tinggi, masih perlunya inisiasi pengembangan kawasan perdesaan regional berbasis kewilayahan, serta peningkatan kelembagaan ekonomi desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tantangan utama dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah bagaimana meningkatkan keluarga yang berkualitas karena hingga saat ini kondisinya belum optimal. Permasalahan yang mempengaruhi kualitas keluarga antara lain meliputi:

a. Belum optimalnya pengendalian penduduk;
b. Masih rendahnya kepesertaan KB.

9. Perhubungan

Permasalahan utama pada urusan perhubungan adalah masih diperlukannya upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi. Permasalahan tersebut dipengaruhi beberapa hal antara lain:

a. Masih diperlukannya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
b. Masih diperlukannya peningkatan keselamatan perjalanan transportasi utamanya peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan provinsi dalam mendukung pengurangan tingkat kecelakaan;
c. Masih diperlukannya peningkatan kualitas layanan angkutan umum utamanya peningkatan layanan angkutan umum dikawasan aglomerasi perkotaan dan peningkatan pelayanan disimpul transportasi serta integrasi antar moda yang secara bertahap harus dipenuhi.

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pokok untuk urusan komunikasi dan informatika yang perlu perhatian penanganan ke depan adalah belum optimalnya digitalisasi tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah, yang meliputi permasalahan antara lain:

a. Belum optimalnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
b. Belum optimalnya implementasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tantangan dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah berkaitan dengan upaya meningkatnya perekonomian daerah.

Permasalahan utamanya adalah belum optimalnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap PDRB, yang didukung dengan permasalahan antara lain:

a. Belum optimalnya omset koperasi dan UMKM;
b. Belum optimalnya tingkat kesehatan koperasi.

12. Penanaman Modal

Permasalahan utama pada urusan penanaman modal adalah masih perlunya mendorong peningkatan realisasi penanaman modal di Jawa Tengah. Permasalahan yang masih berpengaruh terhadap permasalahan utama tersebut antara lain:

a. Dinamika regulasi investasi yang terus berubah dan tidak sinkronnya regulasi di pusat dan daerah;
b. Belum sempurnanya pelayanan perijinan melalui aplikasi *One Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA);
c. Ketersediaan lahan yang sesuai dengan tata ruang masih bermasalah di sebagian wilayah;
d. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan DIDU;
e. Ketersediaan infrastruktur pendukung penanaman modal yang belum sepenuhnya mendukung investasi;
f. Belum samanya persepsi antara masyarakat, pemerintah dan investor terhadap penanaman modal yang berakibat masih kurangnya partisipasi terhadap kehadiran penanaman modal;
g. Pertumbuhan dan persebaran penanaman modal yang belum merata di Jawa Tengah;
h. Belum optimalnya keberadaan Kawasan Industri yang masih memiliki berbagai permasalahan seperti harga sewa tanah yang mahal, kurangnya ketersediaan air baku dan energi, kurangnya komitmen pengelola KI, tidak cocoknya kondisi kawasan dengan usaha calon investor.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama urusan kepemudaan dan olahraga berkaitan dengan belum optimalnya pembangunan pemuda dan kebugaran masyarakat, dengan permasalahan antara lain meliputi:

a. Daya saing pemuda masih rendah;
b. Prestasi olahraga belum memadai;
c. Tingkat partisipasi olahraga masih kurang.

14. Statistik

Permasalahan utama urusan statistik adalah belum optimalnya pengelolaan data baik data sektoral maupun geospasial dan perwujudan Satu Data Pemerintahan.

15. Persandian

Permasalahan yang masih dijumpai pada urusan persandian di Jawa Tengah adalah belum optimalnya keamanan data dan informasi pemerintahan.

16. Kebudayaan

Permasalahan utama yang masih dihadapi urusan kebudayaan di Jawa Tengah ke depan adalah masih rendahnya internalisasi kebudayaan

dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan tersebut ditandai dengan beberapa permasalahan antara lain:

a. Masih rendahnya partisipasi seni dan budaya masyarakat;
b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.

17. Perpustakaan

Permasalahan utama urusan perpustakaan adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat yang ditandai dengan masih rendahnya minat baca masyarakat.

18. Kearsipan

Permasalahan utama urusan kearsipan adalah masih belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kearsipan di Jawa Tengah yang ditandai dengan penyediaan dan pengelolaan arsip untuk akses dan informasi masyarakat belum optimal.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama urusan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah adalah belum optimalnya produksi perikanan secara berkelanjutan, kesejahteraan pelaku usaha perikanan, dan tingginya kerusakan ekosistem perikanan. Lebih lanjut permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya produksi perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap, budidaya, dan garam. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dikarenakan sarana prasarana penangkapan yang belum memadai dan kondisi pelabuhan perikanan yang perlu pengembangan baik dari sisi fasilitas maupun tata kelolanya, sedangkan dari sisi perikanan budidaya, selain dikarenakan kondisi sarana dan prasarana, juga disebabkan oleh penurunan kualitas dan kuantitas induk. Sementara pada produksi garam, juga masih terdapat luasan tambak garam yang belum menerapkan teknologi, sehingga proses produksi garam masih tergantung cuaca. Selain itu, pada ketiganya, baik perikanan tangkap, budidaya, dan garam, masih dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM untuk mendukung produksi perikanan.

b. Rendahnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan berkaitan erat dengan produk perikanan yang mudah busuk (*perishable*) sehingga membutuhkan penanganan yang sesuai standar dari hulu ke hilir, sementara saat ini usaha yang ada masih didominasi usaha skala kecil dan belum sepenuhnya sesuai standar, ditambah jangkauan pemasaran yang masih terbatas. Hal yang lain adalah rendahnya tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah sehingga membutuhkan dorongan lebih kuat untuk meningkatkan preferensi masyarakat terhadap ikan sebagai sumber protein hewani. Secara simultan dibutuhkan juga upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM para pelaku usaha perikanan, serta secara khusus pada perikanan tangkap, risiko terjadinya kecelakaan kerja masih cukup tinggi sehingga membutuhkan perlindungan.

c. Tingginya kerusakan ekosistem perikanan

Kerusakan ekosistem perikanan khususnya di wilayah pesisir disebabkan abrasi dan akresi yang cukup tinggi yang imbasnya dapat menyebabkan terjadinya banjir rob. Di sisi lain, masih dibutuhkan edukasi terhadap semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan khususnya lingkungan perairan. Sedangkan pada perikanan budidaya diperlukan upaya untuk mempertahankan ikan jenis endemik lokal yang mulai menurun populasinya.

2. Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pariwisata di Jawa Tengah masih menjumpai permasalahan pokok terkait seberapa besar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berkontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh:

a. Kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara belum optimal;
b. Masih rendahnya pengeluaran wisatawan;
c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Kondisi pertanian ditopang oleh sektor pertanian dan peternakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh produksi serta tingkat kesejahteraan petani dan peternak. Lebih lanjut kondisi dan permasalahan sektor pertanian dan peternakan sebagai berikut:

a. Produksi sektor pertanian

Secara umum produksi pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan mencapai target. Namun produksi kedelai masih perlu didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Kesejahteraan petani dan peternak

Berdasarkan tingkat kesejahteraan pelaku usaha, masih diperlukan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.

4. Kehutanan

Permasalahan utama penyelenggaraan urusan kehutanan adalah masih rendahnya luasan tutupan lahan di Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh:

a. Masih adanya lahan kritis dan lahan mangrove yang perlu direhabilitasi;
b. Masih rendahnya penambahan industri pengolah hasil hutan yang memperoleh sertifikasi verifikasi legalitas kayu.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Tantangan yang dihadapi penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral berkaitan dengan ketahanan energi, pengelolaan air tanah, pemanfaatan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut disertai dengan permasalahan antara lain:

a. Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi

Persentase pemanfaatan EBT tahun 2022 sebesar 15,76 persen dari total bauran energi di Jawa Tengah. Sampai dengan saat ini, penggunaan energi fosil mendominasi sebesar 84,24 persen. Efek buruk dari ketergantungan terhadap sumber energi fosil sebagai sumber energi

utama adalah sifatnya yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui, sehingga berpotensi dapat menyebabkan krisis energi.

b. Masih rendahnya konsumsi listrik per kapita

Permasalahan konsumsi listrik erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan. Jika masyarakat pendapatanya bertambah maka pola konsumsi listriknya berpotensi bertambah. Pada sisi *demand,* konsumsi listrik di Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah tetangga di Pulau Jawa. Konsumsi listrik di Jawa Tengah sebesar 879,90 kWh/kapita pada 2022, Jawa Timur sebesar 907 kWh/kapita, Jawa Barat sudah mencapai 1.012 kWh/kapita, dan DKI Jakarta telah mencapai 3.248 kWh/kapita. Dengan demikian, potensi konsumsi listrik Jawa Tengah masih harus terus didorong dan ditingkatkan, utamanya juga mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif. Tingkat *availability* listrik di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Rasio Ketersediaan Daya Listrik yang pada tahun 2022 sebesar 1,46. Hal tersebut menunjukan bahwa Jawa Tengah memiliki *reserve margin* (cadangan daya) sebesar 46 persen, yang telah terintegrtasi dalam sistem transmisi Jawa Madura Bali. *Reserve margin* yang terjadi diharapkan dapat menjadi sentimen positif dalam menarik tumbuhnya industri di wilayah Jawa Tengah.

c. Belum optimalnya produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan

Potensi pertambangan di Jawa Tengah memiliki sebaran komoditas yang beragam dan cukup melimpah. Masih terdapat komoditas unggulan yang belum mendapatkan perhatian dari masyarakat di daerah sekitar, sehingga pemanfaatan dari potensi tersebut belum optimal. Rangkaian aktivitas pertambangan sering bersinggungan dengan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan antara lain berkurangnya vegetasi hutan, tumbuhan, dan lapisan tanah. Sehingga perlu dorongan untuk melaksanakan pertambangan dengan baik *(Good Mining Practice)* agar dapat mewujudkan keseimbangan antara nilai ekonomis dan nilai lingkungan. Di Jawa Tengah sendiri terdapat 355 pemegang Ijin Usaha Pertambangan, dan dari jumlah tersebut yang telah melaksanakan pertambangan yang baik sebesar 89 persen pada tahun 2022.

d. Meningkatnya pemanfaatan air tanah

Jumlah pengambilan air tanah di Jawa Tengah cenderung naik secara fluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Akan tetapi, pada tahun 2021 hingga tahun 2022 jumlah pengambilan air tanah menunjukan penurunan. Walaupun demikian, pengendalian dan pengawasan harus tetap dilaksanakan untuk semakin menurunkan laju pengambilan air tanah utamanya pada wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) kritis.

6. Perdagangan

Penyelenggaraan urusan perdagangan di Jawa Tengah sebagai salah satu sektor unggulan perekonomian Jawa Tengah masih ditemukan permasalahan utama yaitu masih belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan antara lain belum

optimalnya ekspor dan impor Jawa Tengah, belum optimalnya nilai tambah produksi perdagangan, dan fluktuatifnya harga kelompok kebutuhan masyarakat yang juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

7. Perindustrian

   Permasalahan utama di urusan perindustrian yang juga menjadi salah satu sektor unggulan perekonomian Jawa Tengah yaitu masih belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan. Beberapa permasalahan yang mempengaruhinya antara lain belum optimalnya produksi industri terutama industri kecil menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri terutama industri kecil dan menengah.

8. Transmigrasi

   Permasalahan yang dijumpai pada urusan transmigrasi adalah terbatasnya kuota transmigrasi yang tidak sebanding dengan minat transmigrasi masyarakat Jawa Tengah. Hal tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah terkait dengan transmigrasi.

D. Unsur Pendukung Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

   Permasalahan utama unsur sekretariat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyedia kebijakan pembangunan daerah adalah belum optimalnya kualitas kebijakan daerah yang dihasilkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan antara lain masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam melakukan proses analisis kebijakan daerah.

2. Sekretariat DPRD

   Permasalahan utama dalam penyelenggaraan unsur sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan untuk anggota DPRD. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya kapasitas aparatur dalam pelayanan, serta belum optimalnya sarana prasarana pelayanan bagi anggota DPRD.

E. Unsur Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

   Permasalahan utama dari unsur perencanaan adalah masih perlunya mendorong kinerja perencanaan pembangunan daerah agar lebih berkualitas. Hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan, serta keselarasan perencanaan daerah dengan perencanaan di tingkat pusat maupun perencanaan sektoral lainnya. Di sisi lain, dinamika kebijakan pemerintah pusat juga mempengaruhi kualitas perencanaan dari aspek keselarasan antar perencanaan di tingkat pusat maupun daerah.

2. Keuangan

   Permasalahan utama unsur keuangan adalah belum optimalnya pendapatan daerah dan tata kelola keuangan daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa permasalahan antara lain;

   a. Belum optimalnya penanganan piutang pajak kendaraan bermotor;
   b. Hilangnya beberapa penerimaan objek retribusi karena pemberlakuan regulasi baru (Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah/HKPD);

c. Masih rendahnya kontribusi pemanfaatan asset daerah terhadap penerimaan PAD;
d. Masih terbatasnya skema pendanaan di luar APBD.

3. Kepegawaian

   Permasalahan utama yang masih dijumpai dalam unsur kepegawaian adalah belum optimalnya meritokrasi dalam manajemen ASN dalam hal distribusi ASN sesuai kebutuhan dan kompetensi, serta layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

   Permasalahan utama dalam unsur pendidikan dan pelatihan adalah belum optimalnya kompetensi ASN Jawa Tengah ditandai dengan belum terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN dan belum terpenuhinya ASN yang berpredikat kompeten.

5. Penelitian dan Pengembangan

   Permasalahan utama dari unsur penelitian dan pengembangan adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang dipengaruhi oleh permasalahan antara lain belum optimalnya kompetensi ASN dalam hal riset dan pengembangan inovasi, serta masih terbatasnya sarana prasarana riset dan inovasi.

F. Unsur Pengawasan Pemerintahan

Permasalahan utama dari penyelenggaraan unsur pengawasan pemerintahan adalah masih belum optimalnya pengawasan, pembinaan dan pendampingan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

G. Unsur Pemerintahan Umum

Permasalahan utama dari unsur pemerintahan umum di Jawa Tengah adalah belum optimalnya kesatuan bangsa dan politik yang digambarkan dengan stabilitas politik dan ketahanan bangsa yang perlu terus dijaga.

2.9.3 Isu Strategis Daerah

Isu Strategis di Jawa Tengah mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah) dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Perumusan isu strategis dilakukan dengan berbagai metodologi antara lain analisis isu dari berbagai kebijakan yang ada, focus group discussion bersama stakeholder pentahelix, dan analisis pembobotan. Berbagai isu yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis daerah baik isu secara global, nasional, maupun daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.212.
Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN)	Isu Daerah (RPJPD)	Isu Daerah (RPD)
1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air bersih dan sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan Kota dan Permukiman 11. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 12. Perubahan iklim 13. Sumberdaya kelautan 14. Ekosistem daratan 15. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 16. Kemitraan global	1. Stabilitas politik dan keamanan 2. Tata kelola birokrasi efektif dan efisien 3. Pemberantasan korupsi 4. Pertumbuhan ekonomi 5. Percepatan pemerataan dan keadilan 6. Keberlanjutan pembangunan 7. Peningkatan kualitas SDM 8. Kesenjangan antar wilayah 9. Percepatan pembangunan kelautan	1. Sosial budaya dan kehidupan beragama 2. Ekonomi 3. Iptek 4. Sarpras 5. Politik dan Tata Pemerintahan 6. Keamanan dan Ketertiban 7. Hukum dan Aparatur 8. Wilayah dan Tata Ruang 9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Isu Utama: Kesejahteraan Masyarakat (Kemiskinan, Pendapatan Perkapita, Ketimpangan) Isu 1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan 2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif 3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, dan perubahan kebijakan nasional maka isu strategis Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 yang masih menjadi perhatian utama adalah berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu salah satunya adalah isu kemiskinan. Pada periode Bulan September tahun 2022, angka kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 10,98 persen, naik 0,05 persen dari bulan Maret 2022, namun apabila dibandingan dengan periode September 2021 yang sebesar 11,25 persen menurun 0,27 persen. Namun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang sebesar 9,57 persen. Isu lainnya adalah masih rendahnya pendapatan per kapita yang di tahun 2021 sebesar 38,67 juta rupiah, meningkat dari tahun 2020 (38,60 juta rupiah), namun masih lebih rendah dibandingkan nasional (61,96 juta rupiah). Selain itu, ketimpangan pendapatan juga masih menjadi isu yang ditunjukkan dari Rasio Gini yang di tahun 2022 periode bulan September sebesar 0,366, yang meskipun menurun jika dibandingkan periode September 2021 yang sebesar 0,368, namun masih termasuk kategori ketimpangan tinggi. Isu tersebut berkaitan dengan isu strategis lainnya yang masih menjadi perhatian dalam pembangunan daerah Jawa Tengah di tahun 2024 sebagai berikut.

1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Secara kumulatif, ekonomi Jawa Tengah sampai dengan triwulan III tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,36 persen (*c to c*), lebih baik dibandingkan triwulan III tahun 2021 yang sebesar 2,63 persen (*c to c*). Namun tantangan ekonomi ke depan masih dihadapkan pada dampak perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan krisis pangan dan energi, serta meningkatnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat TheFed dikarenakan inflasi yang tinggi. Hal ini berdampak pada perekonomian Indonesia maupun Jawa Tengah yaitu potensi menurunnya ekspor karena melemahnya permintaan global, serta turunnya

nilai tukar rupiah yang berakibat pada meningkatnya harga impor bahan baku industri.

Perekonomian di Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian dalam arti luas, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan pariwisata. Dilihat dari lapangan usaha penyumbang terbesar PDRB secara berurutan pada triwulan III tahun 2022 adalah Industri Pengolahan sebesar 33,40 persen, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,77 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,58 persen. Selain didukung sektor unggulan, perekonomian Jawa Tengah juga didukung dengan investasi, konsumsi masyarakat, ekspor dan pengelolaan keuangan daerah.

Kondisi perekonomian daerah berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah yang ditunjukkan dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2022 sebesar 5,57 persen menurun 0,38 persen poin dibandingkan periode Agustus 2021 yang sebesar 5,95 persen. Pengaruh lainnya adalah pada Nilai Tukar Petani/NTP Jawa Tengah yang di bulan Desember 2022 sebesar 107,27 naik 1,91 persen dibandingkan NTP bulan November sebesar 105,26.

Tantangan yang dihadapi selanjutnya adalah pembangunan ekonomi yang semakin inklusif dengan memperhatikan laju pertumbuhan sekaligus menjaga keberlanjutannya untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu tuntutan akan pembangunan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup (ekonomi hijau).

Infrastruktur sebagai akses distribusi barang dan jasa, penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan yang dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting untuk mendukung perekonomian yang inklusif dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah sesuai dengan arah kebijakan 8 (delapan) wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan RTRW.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif.

Pembangunan SDM dihadapkan pada tantangan seperti megatrend global, era disrupsi, dan globalisasi, serta upaya pemulihan dalam tatanan baru (new normal). Pembangunan SDM Jawa Tengah kedepan dihadapkan pada tantangan daya saing yang semakin meningkat, yang digambarkan dari kondisi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah di tahun 2022 sebesar 72,79 dan masih berada di bawah IPM Nasional. Hal itu dikarenakan jumlah penduduk Jawa Tengah yang semakin meningkat sebanyak empat juta jiwa dalam satu dekade, berpotensi memunculkan berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, ketersediaan pangan, dan degradasi lingkungan.

Pembangunan SDM berkualitas berkaitan erat dengan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular yang diperkuat dengan pembudayaan gerakan masyarakat untuk hidup sehat dan bugar, mobilisasi pembiayaan sektor non-pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan, dan beban ganda permasalahan gizi (kelebihan dan kekurangan

gizi), serta akses, mutu, relevansi serta partisipasi pendidikan masih menjadi persoalan penting dalam bidang pendidikan. Transisi demografi dari struktur penduduk usia produktif menuju penduduk usia tua juga memerlukan penyediaan layanan dan perlindungan bagi penduduk lanjut usia untuk menjaga kualitas hidup penduduk lanjut usia.

Selain itu tantangan dalam pembangunan SDM adalah menciptakan SDM berkarakter. Kecenderungan menurunnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ditandai dengan menurunnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dari 59,12 di tahun 2020 menjadi 55,24 di tahun 2021. Tantangan era disrupsi, globalisasi, dan transformasi digital yang terjadi saat ini menuntut SDM Jawa Tengah agar lebih adaptif tanpa meninggalkan jatidiri sebagai masyarakat Jawa Tengah yang berbudaya berbasis kearifan lokal. Salah satu pendekatan penting dalam pembentukan SDM berkarakter adalah pendekatan keluarga. Kinerja pembangunan keluarga di Jawa tengah ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang menunjukan kecenderungan turun dari 58,00 pada 2020 menjadi 56,10 pada 2021. Adapun Indeks Pembangunan Gender Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari 91,94 pada 2017 menjadi 92,48 pada 2021, tetapi masih terjadi ketimpangan pada komponen harapan lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup laki-laki, serta pengeluaran per kapita perempuan. Selain itu, rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari 8,51 pada 2017 menjadi 8,97 pada 2021, serta angka pernikahan usia anak masih tinggi yaitu 13.595 perkawinan.

3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk lebih mensejahterakan hidupnya. Sumber daya alam sebagai salah satu modal dasar pembangunan, maka dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Jawa Tengah, harus memperhatikan unsur-unsur lingkungan, tata ruang, serta masyarakat disekitarnya. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat, namun disisi lain sumber daya alam yang dimiliki jumlahnya semakin terbatas dan daya tampung lingkungan hidup juga semakin menurun. Disisi lain, potensi terjadinya bencana akibat pemanfaatan sumber daya alam juga perlu menjadi perhatian.

Untuk menjaga keberlangsungan pemenuhan sumber daya alam masyarakat di Jawa Tengah, mengurangi resiko bencana alam dan mendukung kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Jawa Tengah. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi resiko bencana.

Daya Dukung Lingkungan Hidup yang merupakan kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya akan berhasil apabila ketersediaan sumber daya alam dan jumlah penduduk di Jawa Tengah berimbang, oleh karena itu tata kelola, konservasi, kesadaran masyarakat, regulasi pemerintah serta aksesibiltas di Jawa Tengah harus terjaga dengan baik. Selain itu daya

tampung lingkungan hidup juga diperlukan karena untuk mengetahui kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukan ke dalamnya. Untuk meningkatkan daya tampung lingkungan hidup maka pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran dapat menjadi strategi di masa yang akan datang.

Provinsi Jawa Tengah selain memiliki potensi sumber daya alam, juga memiliki ancaman bencana. Pengurangan kerentanan bencana di Jawa tengah difokuskan pada pengembangan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan, kesesusaian tata ruang dalam setiap aktivitas pembangunan, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

Kinerja tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah digambarkan dengan membaiknya Indeks Reformasi Birokrasi, yang pada tahun 2021 sebesar 78,79 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 77,05. Namun demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi dapat menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya fokus pada persoalan administrasi, namun harus dapat berorientasi pada hasil atau dampak pembangunan daerah terutama penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kualitas lingkungan hidup yang memadai.

Perubahan paradigma reformasi birokrasi tersebut menuntut adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan pola pikir sumber daya aparatur, yang secara simultan menuntut adanya proses adaptasi pada sistem dan pola kerja terutama pada proses bisnis pemerintahan meliputi perbaikan manajamen organisasi berbasis risiko, riset, dan inovasi (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan), digitalisasi pemerintahan, dan penguatan pelayanan publik. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin kolaboratif dengan memperluas jejaring dan sinergi kerjasama baik antar pemerintah maupun antara pemerintah dan lembaga non pemerintah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global serta telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

3.1.1. Dinamika Perekonomian Global

Tantangan dan risiko baru telah muncul dari faktor global baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) Bulan Januari 2023, lembaga keuangan dunia yaitu *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan melambatnya pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 sebesar 3,4 persen, sedangkan tahun 2023 IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh 2,9 persen dan tahun 2024 tumbuh 3,1 persen. World Bank (WB) memproyeksikan lebih rendah lagi untuk pertumbuhan ekonomi global, tahun 2022 tumbuh 2,9 persen, tahun 2023 tumbuh 1,7 persen dan tahun 2024 tumbuh sebesar 2,7 persen. Sedangkan OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) tahun 2023 ekonomi global tumbuh 2,2 persen dan Tahun 2024 tumbuh 2,7 persen.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju juga diperkirakan akan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan turun oleh WEO IMF menjadi sebesar 1,6 persen di tahun 2022 dan 1,0 persen di tahun 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok adalah 3,2 persen di tahun 2022, dan 4,4 persen di tahun 2023; Jepang diproyeksikan tumbuh 1,7 persen di tahun 2022, dan 1,6 persen di tahun 2023; dan negara Zona Eropa diproyeksikan tumbuh sebesar 3,1 persen di tahun 2022 dan 0,5 persen di tahun 2023. Sedangkan untuk negara-negara berkembang seperti India diproyeksikan tumbuh tinggi sebesar 6,8 persen di tahun 2022 dan 6,1 persen di tahun 2023, termasuk juga pertumbuhan ekonomi di Kawasan ASEAN-5 diperkirakan berada dalam tren meningkat.

Penyebab perlambatan ini terutama adalah menguatnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, periode pengetatan kembali kebijakan moneter di AS pasca Global Financial Crisis (GFC) – yang kita kenal sebagai taper tantrum, pandemi Covid-19, perang di Ukraina yang menyebabkan kenaikkan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global, serta dampak perubahan iklim yang semakin sering terjadi.

Meskipun terdapat perlambatan ekonomi global, masih terdapat harapan terjadinya perbaikan ekonomi global di tahun 2024. Tanda-tanda membaik (upside risks) dapat dilihat dari: (1) Moderasi harga komoditas, meskipun masih volatile; (2) Inflasi telah mencapai puncaknya (dalam tren melandai); (3) Laju pengetatan moneter sudah mulai melambat; (4) Relaksasi restriksi Covid-19 di Tiongkok; (5) Penguatan pemulihan ekonomi Asia (i.e. India dan ASEAN-5); (5) Potensi *new growth driver* (*digital, green economy*). Disisi lain terdapat beberapa resiko (*downside risk*) antara lain: (1) Ketidakpastian tensi geopolitik (perang di Ukraina, konflik Semenanjung Korea, tensi AS-Tiongkok-Taiwan, Kompetisi kebijakan

penanganan perubahan iklim); (2) Tingkat suku bunga masih relatif tinggi; (3) Tekanan sektor properti di Tiongkok; (4) *Policy space* (fiskal) relatif sempit; (5) Potensi dampak rambatan isu stabilitas perbankan AS; (6) Potensi dampak rambatan *climate change* (cuaca ekstrim).

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Ditengah gejolak perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Pemulihan ekonomi nasional menunjukkan tren membaik seperti pada saat sebelum Covid-19. Setelah mampu menjaga pertumbuhan positif sebesar 3,69 persen (c-to-c) di tahun 2021 meski dihantam gelombang Covid-19 varian Delta, pemulihan ekonomi berlanjut sampai tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,31 persen (c-to-c). Perbaikan ekonomi nasional dapat dilihat dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus menunjukkan tren peningkatan, disertai pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi dan konstruksi selain dua sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan. Indikator *Prompt Manufacturing Index* (PMI) atau Indeks Manufaktur Indonesia pada Bulan Desember 2022 masih terus ekspansif, pada level 50,9. Sementara itu, kenaikan harga komoditas global mampu mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan Indonesia. Secara kumulatif pada Desember 2022, neraca perdagangan tercatat surplus USD 3,89 miliar. Surplus neraca perdagangan berasal dari tingginya surplus non-migas dipengaruhi oleh meningkatnya ekspor komoditas khususnya batu bara dan CPO. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif serta perbaikan iklim investasi dan bisnis yang terus dilakukan, Pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun mendekati level pra-pandemi, menjadi 5,86 persen pada Agustus 2022 dari 6,49 persen pada Agustus 2021. Sementara, angka kemiskinan nasional juga konsisten menurun, dari sebelumnya 9,71 persen pada September 2021, turun menjadi sebesar 9,57 persen pada September 2022. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik signifikan, dari sebelumnya 0,414 menjadi 0,380. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2023 mencapai 5,0 persen (yoy). Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 4,33 persen (yoy) pada Bulan April 2023. Sementara itu *Purchasing Managers Index* nasional bulan April 2023 mencapai 52,7 (berada pada zona ekspansif). Mempertimbangkan berbagai resiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, tema kebijakan fiskal nasional (RKP 2024) Tahun 2024 adalah **Mempercepat Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**, dengan target indikator makro tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi : 5,1 – 5,7 persen;
2. Inflasi : 1,5 – 3,5 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,0 – 5,7 persen;

4. Angka Kemiskinan : 6,5 – 7,5 persen;
5. Rasio Gini : 0,374 – 0,377;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 73,99 – 74,02;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) : 105 – 108;
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) : 107 – 110.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan tren penguatan. Pada tahun 2021 mampu menjaga pertumbuhan yang positif sebesar 3,32 persen (c-to-c). Ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh pada Tahun 2022 sebesar 5,31 persen (c-to-c). Pada triwulan I-2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,04 persen (yoy), yang lebih tinggi dari nasional sebesar 5,03 persen (yoy) dan merupakan capaian pertumbuhan ekonomi diatas lima persen berturut-turut.

Pasar domestik dan internasional masih tumbuh meskipun tidak sepesat triwulan sebelumnya. Struktur Perekonomian Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata. Sementara itu, dari sisi komponen pengeluaran Perekonomian di Jawa Tengah didukung oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi yang menjadi motor penggerak perekonomian.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Jawa Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun mendekati level pra-pandemi, menjadi 5,57 persen pada Tahun 2022 dari 5,95 persen pada Tahun 2021. Sementara, Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 11,25 persen di Tahun 2021, turun menjadi 10,98 persen di Tahun 2022. Sedangkan Inflasi di Jawa Tengah pada bulan Desember 2022 sebesar 5,63 persen (*y-o-y*), naik dibandingkan pada bulan November 2022 sebesar 5,16 persen (*y-o-y*). Pada April 2023 inflasi Jateng Kembali turun sebesar 4,40 persen (yoy). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik signifikan, dari sebelumnya 0,404 (Maret 2022) menjadi 0,392 (September 2022). Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah Tahun 2024 diproyeksikan pada kisaran angka 4,70-5,50 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 3,0±1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2024, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,76-8,96 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,44 – 4,94 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 45,82 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,364 di Tahun 2024.

Tabel 3.1.
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70 - 5,50
2	PDRB per kapita	Juta Rp	45,82
3	Inflasi	%	3,0 ± 1
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,44 – 4,94
5	Angka Kemiskinan	%	9,76-8,96
6	Rasio Gini	Angka	0,364

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2023

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada "**Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas**". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:

1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs* dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020-2022 cenderung meningkat, namun demikian mengalami penurunan di Tahun 2020 sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional, dan daerah. Pada Tahun 2021 realisasi pendapatan kembali meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pajak Daerah masih menjadi penopang utama sektor pendapatan daerah. Pada tahun anggaran 2022, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 5,432 triliun rupiah meningkat sebesar 673,68 miliar rupiah (14,16 persen) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2022 sebesar 2,886 triliun rupiah meningkat 110,12 miliar rupiah (3,97 persen) dibandingkan penerimaan Tahun 2021 yang sebesar 2,775 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 2,248 triliun rupiah juga mengalami peningkatan 422,07 miliar rupiah (23,11 persen) dibanding penerimaan Tahun 2021 sebesar 1,826 triliun rupiah.

Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) pada Tahun 2022 sebesar 18,802 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 1,55 miliar rupiah (9,05 persen) dibanding penerimaan Tahun 2021 sebesar 17,24 miliar rupiah. Sementara itu penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 559,02 miliar rupiah dari realisasi tahun 2021 sebesar 2,339 triliun rupiah menjadi 2,898 triliun rupiah.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan ditiadakannya Pembatasan aktivitas selama PPKM berdampak langsung terhadap meningkatnya intensitas dan volume pemberian jasa dan layanan retribusi yang meliputi jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Realisasi penerimaan retribusi pada Tahun 2022 sebesar 115 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 23,52 miliar rupiah dibandingkan penerimaan Tahun 2021 sebesar 91,63 miliar rupiah.

Selain retribusi, pos penerimaan lainnya yakni Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang tumbuh negatif pada Tahun 2021 dengan nilai sebesar 508,26 miliar rupiah atau tumbuh negatif 4,12 persen dibandingkan realisasi penerimaan Tahun 2020 yang disebabkan adanya koreksi perhitungan piutang Tahun sebelumnya pada Laporan Keuangan PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) sehingga mempengaruhi penerimaan deviden yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2021. Penerimaan ini kemudian tumbuh 7,57 persen di Tahun 2022 dengan nilai realisasi 546,71 miliar rupiah.

2. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Realisasi pendapatan transfer mengalami peningkatan dari 11,70 triliun rupiah pada Tahun 2020 menjadi 11,87 triliun rupiah pada Tahun 2021. Sedangkan pada Tahun 2022 pendapatan transfer adalah sebesar 7,81 triliun rupiah.

3. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 – 2022 terutama bersumber pada pendapatan hibah dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 65,728 miliar rupiah mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 23,352 miliar rupiah. Adapun realisasi pada tahun 2022 sebesar 92,434 miliar rupiah.

Tabel 3.2.
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH	**25.393.735.934.148**	**26.633.000.085.963**	**24.167.935.634.127**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**13.668.282.278.855**	**14.695.474.898.162**	**16.264.618.853.852**
Pajak Daerah	11.139.173.309.780	11.718.378.320.505	13.484.851.151.740
Retribusi Daerah	93.279.991.699	91.634.269.205	115.158.014.199
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	530.091.029.137	508.263.876.971	546.717.104.899

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.905.738.818.239	2.377.197.927.406	2.117.892.583.014
PENDAPATAN TRANSFER	**11.702.101.655.293**	**11.871.796.336.054**	**7.810.882.578.787**
Dana Bagi Hasil Pajak	843.392.119.954	1.023.258.872.325	909.711.090.450
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	16.888.016.587	12.586.758.109	18.989.623.430
Dana Alokasi Umum	3.438.709.973.000	3.432.978.859.000	3.435.718.090.405
Dana Alokasi Khusus (fisik)	350.564.240.958	401.885.567.398	371.734.785.185
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	6.983.232.690.794	6.932.375.674.222	3.013.376.489.317
Dana Insentif Daerah	-	68.710.605.000	61.352.500.000
Dana Penyesuaian	68.212.455.000	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.102.159.000	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**23.352.000.000**	**65.728.851.747**	**92.434.201.488**
Pendapatan Hibah	23.352.000.000	64.882.003.502	92.161.740.403
Lain lain pendapatan	-	846.848.245	272.461.085

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2020-2021, 2022 audited.

Selama kurun waktu tahun 2020-2022, PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2022 kontribusi rata-rata PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 67,30 persen, pendapatan transfer sebesar 32,32 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,38 persen, Sumber pendapatan utama PAD berasal dari komponen pajak daerah dengan kontribusi terhadap PAD pada tahun 2022 mencapai 82,91 persen.

Tabel 3.3.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2022 (%)

Uraian	2020	2021	2022	Rata–Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDAPATAN DAERAH	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**53,83%**	**55,18%**	**67,30%**	**58,77%**
Pajak Daerah	43,87%	44,00%	55,80%	47,89%
Retribusi Daerah	0,37%	0,34%	0,48%	0,40%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,09%	1,91%	2,26%	2,09%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7,50%	8,93%	8,76%	8,40%
PENDAPATAN TRANSFER	**46,08%**	**44,58%**	**32,32%**	**40,99%**
Dana Bagi Hasil Pajak	3,32%	2,89%	3,76%	3,32%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,07%	1,00%	0,08%	0,38%
Dana Alokasi Umum	13,54%	12,89%	14,22%	13,55%
Dana Alokasi Khusus (fisik)	1,38%	1,51%	1,54%	1,48%
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	27,50%	26,03%	12,47%	22,00%
Dana Insentif Daerah	0,00%	0,26%	0,25%	0,17%
Dana Penyesuaian	0,27%	0,00%	0,00%	0,09%
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	2020	2021	2022	Rata–Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,09%**	**0,25%**	**0,38%**	**0,24%**
Pendapatan Hibah	0,09%	0,24%	0,38%	0,24%
Lain-Lain Pendapatan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2020-2022, 2022 audited

Mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,70-5,50 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2020-2022, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 27,114 triliun rupiah. Proyeksi tersebut telah mempertimbangkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga pada Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan struktur pendapatan daerah antara lain dihapusnya beberapa jenis retribusi daerah dan jenis retribusi baru serta perubahan rekening pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ke rekening pendapatan Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 18,500 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 8,591 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 22,75 miliar rupiah. Pendapatan transfer tahun 2024 diproyeksikan meningkat 390,414 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 8,201 triliun rupiah. Hal tersebut dengan mempertimbangkan kebijakan bahwa pendapatan transfer akan dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Tabel 3.4.
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	URAIAN	TAHUN 2024
1.	**PAD**	**18.500.149.320.000**
1.1.	Pajak Daerah	15.754.387.924.000
1.2.	Retribusi Daerah	1.728.627.388.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	687.553.929.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	329.580.079.000
2.	**Pendapatan Transfer**	**8.591.957.067.000**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.591.957.067.000
2.2	Transfer antar daerah	0
3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**22.750.000.000**
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	**27.114.856.387.000**

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2023.

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2024, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan

masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
b. Penambahan titik layanan dengan bekerjasama dengan BUMDes, BPR BKK, Mall Pelayanan Publik, dan Badan Usaha lainnya;
c. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota, desa, Kepolisian, dan dunia usaha lainnya;
d. Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak bekerjasama dengan Babinkamtibmas, Ormas, BUMDes;
e. Menyelenggarakan *Auto Show* serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International *Auto Show* (GIIAS) 2024;
f. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di perusahaan besar;
g. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
h. Pemutakhiran data objek retribusi;
i. Pengembangan sistem informasi retribusi;
j. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;
k. Sosialisasi peraturan dan/atau penyuluhan terkait retribusi dan pendapatan lain;
l. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
m. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha; dan
n. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada tahun anggaran 2022 terserap secara optimal dengan realisasi serapan sebesar 95,24 persen. SILPA sebesar 1,236 triliun rupiah berada pada Kas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar 412 miliar rupiah dan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar 800 miliar rupiah. Kas pada RKUD digunakan sebagai manajemen kas untuk pembayaran Belanja Gaji bulan Januari Tahun 2023 dimana pada saat itu PAD belum sepenuhnya terealisasi. Pendapatan BLUD pada tahun 2021 sebesar 900 miliar rupiah dialokasikan pada APBD Perubahan 2022, karena pada saat tersebut APBD Murni 2022 sudah ditetapkan. Oleh karena itu, realisasi serapan belanja BLUD hanya sebesar 100 miliar rupiah, sehingga sisa kas BLUD pada tahun 2022 sebesar 800 miliar rupiah. Meskipun sudah dirasa cukup optimal dalam penyerapan APBD Tahun 2022, masih terdapat beberapa kendala di pelaksanaan APBD sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan.

Beberapa realisasi belanja mengalami kenaikan, diantaranya Belanja Pegawai karena mulai dibayarkannya Gaji P3K (Pendidikan dan Kesehatan), Belanja Barang dan Jasa karena adanya pelonggaran kegiatan masyarakat, dan Belanja Subsidi yang digunakan dalam rangka penanganan inflasi. Sedangkan realisasi belanja yang mengalami penurunan diantaranya Belanja Modal karena

adanya pengadaan lahan yang belum jadi dilaksanakan karena persyaratan yang belum lengkap dan Belanja Tidak Terduga yang sebagian digunakan untuk penanganan dampak inflasi ternyata tidak dapat dicairkan.

Tabel 3.5.
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH	**25.651.740.349.991**	**25.842.363.948.300**	**23.926.642.335.690**
BELANJA OPERASI	**16.223.988.285.131**	**16.825.242.533.039**	**13.456.887.671.949**
Belanja Pegawai	6.483.761.623.794	5.685.925.255.020	5.902.903.886.767
Belanja Barang dan Jasa	4.104.637.788.228	5.344.064.156.345	5.377.369.153.896
Belanja Subsidi	0	90.482.166	4.958.884.836
Belanja Hibah	5.593.181.623.109	5.728.982.384.318	2.092.761.564.803
Belanja Bantuan Sosial	42.407.250.000	66.180.255.190	78.894.181.648
BELANJA MODAL	**996.994.505.160**	**1.447.519.464.142**	**1.713.641.630.081**
BELANJA TAK TERDUGA	**1.783.884.978.571**	**72.303.305.000**	**16.545.479.100**
BELANJA TRANSFER	**6.646.872.581.129**	**7.497.298.646.119**	**8.763.165.716.275**
Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kab/Kota	4.633.245.749.888	5.735.553.033.353	6.085.808.822.482
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	845.543.195.241	493.309.827.766	804.934.393.793
Bantuan Keuangan kepada Desa	1.168.083.636.000	1.268.435.785.000	1.872.422.500.000

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2020-2021, 2022 audited.

Komposisi belanja daerah tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah tahun 2024 diproyeksikan meningkat 6,59 persen dari tahun 2023 menjadi sebesar 28,526 triliun rupiah yang diarahkan pada tema **"Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas"** dengan fokus utama pada:

1. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yaitu:
   a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas;
   b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
   c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
   d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
2. Dukungan implementasi kebijakan nasional terutama pada:
   a. penurunan *stunting* menjadi 14 persen;
   b. penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen;
   c. pengendalian inflasi daerah;
   d. implementasi Satu Data Indonesia (SDI);

e. implementasi Desa Anti Korupsi.

3. Dukungan 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan; sedangkan *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
5. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
8. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa; serta
9. Dukungan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2023 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja PD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2024 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS;
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol kesehatan; Belanja barang dan jasa di antaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan Pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
   c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan

tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan dukungan pelaksanaan pilkada serentak, menjaga kondusifitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;

d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset; Belanja Modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
      1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
      2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
      3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
      4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa); Belanja transfer tahun 2024 terdiri atas:
   a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
   b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Tabel 3.6.
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		**16.340.057.242.000**
1	Belanja Pegawai	7.582.510.238.000
2	Belanja Barang dan Jasa	6.015.482.875.000
3	Belanja Subsidi	1.000.000.000
4	Belanja Hibah	2.723.004.129.000
5	Belanja Bantuan Sosial	18.060.000.000
BELANJA MODAL		**2.056.751.662.000**
BELANJA TAK TERDUGA		**25.000.000.000**
BELANJA TRANSFER		**10.104.884.699.000**
1	Belanja Bagi Hasil	7.105.634.568.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	2.999.250.131.000
JUMLAH BELANJA		**28.526.693.603.000**

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu tahun 2020-2022 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

Tabel 3.7.
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
PEMBIAYAAN	**1.119.348.228.370**	**646.485.090.816**	**1.018.773.865.813**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**1.119.348.228.370**	**861.485.090.816**	**1.909.773.865.813**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.119.095.687.470	861.368.883.047	1.435.692.146.361
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	252.540.900	116.207.769	474.081.719.452
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**	**215.000.000.000**	**891.000.000.000**

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembentukan dana cadangan	-	200.000.000.000	400.000.000.000
Penyertaan modal	-	15.000.000.000	491.000.000.000

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah 2020-2022 audited.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penyelenggaraan Pilkada. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.8.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.481.837.216.000**
	SiLPA	581.837.216.000
	Pencairan Dana Cadangan	900.000.000.000
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**70.000.000.000**
	Pembentukan Dana Cadangan	-
	Penyertaan Modal	70.000.000.000
3	**Pembiayaan Netto Daerah**	**1.411.837.216.000**

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Dari uraian tersebut diatas maka kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9.
Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH		**18.500.149.320.000**
1	Pajak Daerah	15.754.387.924.000
2	Retribusi Daerah	1.728.627.388.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	687.553.929.000
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	329.580.079.000
PENDAPATAN TRANSFER		**8.591.957.067.000**
1	Transfer Pemerintah Pusat	8.591.957.067.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		**22.750.000.000**
JUMLAH PENDAPATAN		**27.114.856.387.000**
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		**16.340.057.242.000**
1	Belanja Pegawai	7.582.510.238.000
2	Belanja Barang dan Jasa	6.015.482.875.000
3	Belanja Subsidi	1.000.000.000

4	Belanja Hibah	2.723.004.129.000
5	Belanja Bantuan Sosial	18.060.000.000
BELANJA MODAL		**2.056.751.662.000**
BELANJA TAK TERDUGA		**25.000.000.000**
BELANJA TRANSFER		**10.104.884.699.000**
1	Belanja Bagi Hasil	7.105.634.568.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	2.999.250.131.000
JUMLAH BELANJA		**28.526.693.603.000**
SURPLUS/DEFISIT		**(1.411.837.216.000)**
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**1.481.837.216.000**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	581.837.216.000
2	Pencairan dana cadangan	900.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**70.000.000.000**
1	Penyertaan modal	70.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO		**1.411.837.216.000**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		**0**

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2023.

3.2.4. Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tabel 3.10.
Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

NO	NAMA SKPD	PAGU SKPD	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
DEKONSENTRASI		**162.206.869.000**	**149.431.454.723**	**92,12**	**99,68**
1	INSPEKTORAT	495.119.000	493.980.226	99,77	100
2	BAPPEDA	1.602.865.000	1.486.497.001	92,74	100
3	DINAS ARPUS	733.838.000	724.811.793	98,77	100
4	DINAS LUTKAN	2.663.834.000	2.178.483.445	81,78	99,37
5	DINAS PORAPAR	7.799.120.000	7.664.975.136	98,28	100
6	DINAS KESEHATAN	25.858.048.000	20.358.041.190	78,73	100
7	DINAS KOPERASI UMKM	47.275.800.000	42.321.296.160	89,52	100
8	DINAS PM PTSP	811.948.000	793.516.780	97,73	100
9	DINAS PERINDAG	2.171.996.000	2.026.906.667	93,32	100
10	DINAS TANBUN	64.394.745.000	63.531.855.417	98,66	100
11	DINAS NAKERTRANS	6.612.381.000	6.157.449.187	93,12	100
12	BIRO PEMOTDAKER	1.787.175.000	1.384.524.472	77,47	100
TUGAS PEMBANTUAN		**423.218.551.000**	**401.803.692.319**	**94,94**	**98,04**

NO	NAMA SKPD	PAGU SKPD	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	DINAS LUTKAN	3.083.862.000	2.950.330.775	95,67	99,61
2	DINAS PU SDA TARU	94.648.310.000	91.364.013.643	96,53	100
3	DINAS TANBUN	174.194.816.000	167.836.705.216	96,35	100
4	DINAS NAKESWAN	137.475.121.000	125.679.755.618	91,42	97,32
5	DINAS PU BMCK	13.815.764.000	13.763.264.097	99,62	100

Sumber: Biro Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah 2023.

Tabel 3.11.
Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

NO	NAMA SATKER	NAMA KEWENANGAN	DIPA (Rp)	BLOKIR (Rp)
1	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	Dekonsentrasi	1.640.922.000	0
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH	Dekonsentrasi	551.296.000	551.296.000
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Dekonsentrasi dan TP	7.780.242.000	7.780.242.000
4	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH	Dekonsentrasi dan TP	6.046.000.000	4.416.000.000
5	DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TENGAH	Dekonsentrasi	22.344.574.000	5.299.094.000
6	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH	Dekonsentrasi	1.407.136.000	0
7	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH	Tugas Pembantuan	91.995.217.000	0
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	Dekonsentrasi	544.785.000	279.504.000
9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH	Dekonsentrasi	2.225.025.000	1.356.179.000
10	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	Dekonsentrasi dan TP	286.653.724.000	58.693.347.000
11	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH	Tugas Pembantuan	130.435.252.000	14.727.020.000
12	DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH	Tugas Pembantuan	20.053.508.000	0
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH	Dekonsentrasi dan TP	6.271.301.000	6.343.488.000
14	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	Dekonsentrasi	302.450.000	0
15	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	Dekonsentrasi	2.352.390.000	134.412.000
	Jumlah		**580.603.822.000**	**99.580.582.000**

Sumber: Biro Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah 2023

Melaksanakan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017, Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi sumber pembiayaan diluar APBD, utamanya dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini tercermin dari realisasi anggaran sebesar 113.561.417.851 rupiah pada tahun anggaran 2022 dan pada tahun 2023 sementara direncanakan sebesar 3.363.774.100 rupiah.

Adapun realisasi kegiatan pada tahun 2022 tertinggi pada Bidang Usaha Ekonomi Rakyat sebesar 45.604.346.549 rupiah dan terendah pada Bidang Energi Baru Terbarukan sebesar 833.245.000 rupiah. Perusahaan dengan alokasi program dan anggaran terbanyak adalah PT Telkom Regional IV Jateng & DIY sebanyak 362 program dengan anggaran sebesar 23.601.008.400 rupiah. Sedangkan realisasi pelaksanaan TJSLP hingga Triwulan II Tahun 2023 telah mencapai 17.123.181.888 rupiah.

Tabel 3.12.
Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Perusahaan	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	PT Telkom Regional IV Jateng & DIY	362	23,601,008,400
2	PT. Pertamina Patra Niaga	67	17,541,722,600
3	PT Semen Gresik Tbk	78	11.416.858.052
4	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Semarang	45	7,530,600,595
5	Bank Jateng	34	6,904,480,000
6	PT Bhimasena Power Indonesia	172	5,280,642,057
7	PT Kilang Pertamina International Refinery Unit IV Cilacap	175	3,836,688,850
8	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	5	3,366,094,598
9	PT Phapros Tbk	78	3.141.113.930
10	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	78	2,930,114,999
11	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	53	2,917,350,000
12	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelabuhan Tanjung Intan	38	2,497,445,893
13	PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul.Tbk	28	2,291,630,000
14	PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng	34	1.498.445.150
15	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	17	1,272,210,000
16	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap	171	1,203,620,022
17	PT Indonesia Power Semarang PGU	80	1,192,738,250
18	PT Sumber Segara Primadaya	18	1,188,218,087
19	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	35	1,129,295,600

No	Perusahaan	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
20	PT. Dan Liris	66	986,355,600
21	PT Sinar Tambang Arthalestari	74	948,380,000
22	PT Jateng Petro Energi	37	895,030,990
23	PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	122	892.674.789
24	PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda)	128	857.200.599
25	PT Indonesia Power Mrica Power Generation Unit	11	829,932,547
26	PT. Sri Rejeki Isman Tbk	36	811,547,500
27	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	60	783.062.300
28	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	52	690,356,583
29	PT Kayu Lapis Indonesia	90	456,973,770
30	BPR BKK Demak	57	350,072,500
31	PT Jamkrida Jateng	45	342,177,000
32	PT BPR Surya Yudhakencana	36	327,193,400
33	Angkasa Pura Airports	6	281,248,650
34	PT. Dua Kelinci	76	272.488.000
35	PT Nojorono Tobacco International	12	244,116,401
36	BPR BKK Blora	49	211.224.500
37	BPR BKK Pati	46	178.584.800
38	BPR BKK Jepara	30	170,094,000
39	PD Citra Mandiri Jawa Tengah	17	163.850.000
40	BPR BKK Temanggung	27	113,862,000
41	BPR BKK Tasikmadu	50	111,619,204
42	PT Trans Marga Jateng	6	96,267,450
43	PT BPR BKK KOTA Semarang	20	91,546,035
44	BPR BKK Purwodadi	14	87,876,750
45	PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory	19	87,008,450
46	BPR BKK Boyolali	6	85,000,000
47	BPR BKK Banjarharjo	12	84,521,000
48	BPR BKK Batang	15	42,362,000
49	PT. SAS Kreasindo Utama	11	35,554,200
50	PT. Intiniaga Tunassejahtera (Wings Group)	25	32,800,000
51	PT Pusat Rekeasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah	5	25,500,000
52	BPR BKK Kota Tegal	9	23,376,500

No	Perusahaan	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
53	PT BPR BKK Kota Magelang (Perseroda)	10	11,155,000
54	Grand Dian Hotel Slawi	3	9,690,000
55	BPR BKK Karangmalang	2	5,966,000
56	PT Kenlee Indonesia	3	1,700,000
57	PT Pringsewu Cemerlang	5	1,600,000
TOTAL		**2,717**	**113.561.417.851**

Sumber: Forum TJSLP Provinsi Jawa Tengah, Per 31 Januari 2023.

Tabel 3.13.
Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2022

No	Bidang Pokja	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Bidang Olahraga, Seni, Budaya dan Pariwisata	309	45,558,933,049
2	Bidang Kesejahteraan Sosial	555	18,584,058,013
3	Bidang Usaha Ekonomi Rakyat	520	10,131,548,144
4	Bidang Pendidikan	274	8,449,474,728
5	Bidang Kedaruratan	72	5,968,952,935
6	Bidang Keagamaan	318	5,651,984,696
7	Bidang Pendampingan Umum	83	4,732,777,605
8	Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	120	3,831,427,928
9	Bidang Kesehatan	206	2,246,965,731
10	Bidang Infrastruktur	225	2,094,287,075
11	Bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan	26	1,852,377,725
12	Bidang Energi Baru Terbarukan	9	833,245,000
TOTAL		**2,717**	**109,936,032,629**

Sumber: Forum TJSLP Provinsi Jawa Tengah, per 13 Januari 2022.

Tabel 3.14.
Realisasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2022
dan TW.II Tahun 2023

No	Bidang Pokja	2022		TW.II Tahun 2023	
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Bidang Olahraga, Seni, Budaya dan Pariwisata	377	4.264.840.226	34	533.771.968
2	Bidang Kesejahteraan Sosial	590	19.178.982.253	100	3.466.735.065
3	Bidang Usaha Ekonomi Rakyat	531	45.604.346.549	53	3.909.809.767

No	Bidang Pokja	2022		TW.II Tahun 2023	
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
4	Bidang Pendidikan	287	8.626.191.714	75	1.422.144.000
5	Bidang Kedaruratan	80	2.192.882.845	27	66.5247.985
6	Bidang Keagamaan	355	5.750.422.195	72	1.020.982.700
7	Bidang Pendampingan Umum	104	2.362.040.286	26	1.612.181.470
8	Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	134	4.991.587.605	29	498.770.500
9	Bidang Kesehatan	215	6.037.234.363	59	543.434.833
10	Bidang Infrastruktur	243	11.854.467.090	38	2.812.022.000
11	Bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan	28	1.865.177.725	9	638.081.600
12	Bidang Energi Baru Terbarukan	9	833,245,000	0	0
TOTAL		**2953**	**113.561.417.851**	**522**	**17.123.181.888**

Sumber: Forum TJSLP Provinsi Jawa Tengah, per 31 Januari 2023.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2024 adalah tahun transisi pertama di mana RPJMD Tahun 2018-2023 telah berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, kebijakan yang menjadi pedoman adalah RPD Tahun 2024-2026. Pembangunan Jawa Tengah dalam RPD Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mencapai tujuan Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari, diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, rasio gini, dan angka kemiskinan.

Mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera adalah keberlanjutan dari tujuan pembangunan Jawa Tengah pada periode RPJMD sebelumnya dan merupakan mandat dari tujuan pembangunan jangka panjang Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata dan semua masyarakat memiliki hak yang sama atas pemenuhan kebutuhan dasarnya (*no one left behind*) agar masyarakat Jawa Tengah dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

Tujuan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera juga dibarengi dengan lestari yang dimaknai sebagai pembangunan masyarakat Jawa Tengah yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keberhasilan pencapaian tujuan daerah selama tahun 2024-2026 ditunjukkan dengan indikator menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita masyarakat Jawa Tengah dari tahun ke tahun, dan menurunnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat.

Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari didukung dengan empat sasaran pembangunan daerah, meliputi:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1	2	3	4	5
Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari				
		PDRB per Kapita	Juta Rupiah	45,82
		Angka Kemiskinan	%	9,76-8,96
		Rasio Gini	Angka	0,364
	Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan			
		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70 - 5,50
		Inflasi	%	3,0 ± 1
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,44 - 4,94
		Nilai Tukar Petani	Angka	107,45
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif			
		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,43
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	60,27
		Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,03
		Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	58,20
	Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup			
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,55
		Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	4,00
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis			
		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,50

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

4.2.1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran disampaikan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2024 yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan terutama terkait dengan kelengkapan data, permasalahan beberapa sektor yang belum terakomodir, dan arah kebijakan keuangan daerah. Telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD lebih lanjut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.2.
Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah
Pada Musrenbang Provinsi Tahun 2024

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN	TELAAH
	Data tidak lengkap:	
1	Pada Tabel 2.96. untuk Tahun 2022 masih belum ada data Jumlah Bumdes, Pasar desa, UED-SP dan Up2K-PKK. (Bab II hal. 109)	Substasi pokok-pokok pikiran terkait kelengkapan data baik terkait data maupun penyajian dalam tabel atau grafik akan ditindaklanjuti pada Bab II RKPD Tahun 2024 sebagai bahan masukan penyempurnaan dokumen Rancangan RKPD menjadi dokumen RKPD Tahun 2024
2	Pada Tabel 2.105 dan 2.106 untuk Tahun 2022 masih belum dilengkapi dengan data keterlibatan perempuan di parlemen serta perempuan sebagai manajer, professional, administasi dan teknis. (Bab II hal.122)	
3	Pada pembahasan olahraga, tidak dilengkapi dengan Tabel atau grafik yang menunjukkan perkembangan sport development indeks (SDI). (Bab II hal.126)	
4	Pada Tabel 2.121 untuk Tahun 2022 masih belum dilengkapi data kondisi penyakit tidak menular. (Bab II hal.139)	
5	Pada Tabel 2.147 untuk Tahun 2022 masih belum dilengkapi data pengiriman transmigran. (Bab II Hal.159)	
6	Pada Tabel 2.184 untuk Tahun 2022 masih belum dilengkapi data jumlah dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi penelitian. (Bab II hal.224)	
7	Pada Tabel 2.160 luas pencurian pohon terdata Tahun 2021 seluas 14,6 ha dan Tahun 2022 seluas 91 ha; luas kebakaran hutan Tahun 2021 seluas 99,97 ha dan 2022 seluas 10,79. Data Tahun 2022 berubah signifikan dibanding 2021. Selain itu, pada narasi di atasnya tidak konsisten dengan data pada Tabel, dimana hanya disampaikan analisa kerusakan kawasan hutan sebagai contoh kerusakan hutan dari pencurian pohon dari Tahun 2020 ke 2021 sementara data yang disajikan dalam Tabel sampai dengan Tahun 2022. (Bab II hal.178)	Analisis dan penjelasan terkait data pada tabel yang tidak konsisten, akan diperbaiki dan memastikan kembali semua data dan penjelasannya konsisten, dan dituangkan pada Bab II RKPD Tahun 2024
8	Evaluasi terkait Pemberdayaan masyarakat dan desa sudah diusampaikan pada halaman II-109 (ada double pembahasan). (Bab II halaman 232)	Data yang disajikan berulang akan dicermati kembali secara substansi untuk memastikan bahwa data tersebut lebih tepat menjadi data dukung kondisi gambaran umum yang mana dan akan ditindaklanjuti pada Bab II RKPD Tahun 2024
9	Dalam uraian yang menjelaskan data pada Tabel 2.205, untuk pertumbuhan ekonomi masih Triwulan III Tahun 2021 (belum diupdate dengan publikasi BPS terbaru yaitu Tahun 2022). (Bab II hal.243)	Semua data yang belum diupdate sampai akhir tahun 2022 akan dicermati kembali dan akan diperbarui pada Bab II RKPD Tahun 2024
	Permasalahan:	
10	a. Permasalahan pendidikan untuk dikaitkan dengan masih tingginya anak tidak sekolah (ATS).	Permasalahan pendidikan akan dicermati kembali secara substansi berdasarkan analisis data dan informasi yang disajikan, dan akan dirumuskan lebih mendalam lagi

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN	TELAAH
	b. Selain itu disampaikan salah satu permasalahan pendidikan adalah masih kurangnya mutu pendidikan. Kondisi mutu pendidikan secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: 1) Kualitas lulusan SMK yang dari hasil penilaian Kemendikbud, tingkat penyerapan lulusan SMK di Jateng sudah mencapai 92,53% pada Tahun 2022.; 2) Kualitas guru dimana kurang lebih 97% telah berkualifikasi D4/S1; 3) Kondisi sarpras yang sesuai data di Rancangan RKPD 2024 hanya terdapat 3 unit sapras SMA rusak sedang/derat dan 25 unit sarpras SLB rusak sedang/berat; 4) Biaya dengan adanya fasilitasi bantuan operasional sekolah/siswa baik negeri maupun swasta. Terkait ini seharusnya mutu pendidikan di Jawa Tengah sudah cukup baik. Untuk itu, dalam perumusan permasalahanya perlu dijabarkan hal-hal startegis yang perlu diintervensi di 2024 untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan (Bab II hal.246)	terutama pada hal-hal strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam RKPD Tahun 2024, dan akan dituangkan pada Bab II RKPD Tahun 2024
11	Permasalahan pangan masih belum diuraikan secara spesifik sebagai contoh untuk ketersediaan pangan disampaikan “namun masih terdapat beberapa komoditas pangan yang perlu didorong” dimana belum menggambarkan permasalahan sesungguh-nya yang perlu diintervensi di Tahun 2024 (Bab II hal. 248)	Permasalahan terkait pangan pada Bab II akan dirumuskan lebih lanjut agar lebih spesifik untuk dapat diintervensi melalui program kegiatan pada tahun 2024, dan akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2024
12	Permasalahan Lingkungan Hidup belum menguraikan berkaitan dengan masalah sampah dimana sampah merupakan permasalahan selama manusia masih ada. Tetapi belum terlihat yang membahas permasalahan persampahan. Permasalahan sampah jangan digabung dalam permasalahan limbah, harus ada pemilahan antara limbah industri dan sampah utamanya rumah tangga (Bab II hal. 248)	Perumusan permasalahan pengelolaan sampah pada urusan lingkungan hidup akan dijabarkan lebih lanjut, dan dipilah antara permasalahan pengelolaan sampah dan limbah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2024
13	Permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa belum secara spesifik menggambarkan permasalahan yang terjadi dan perlu mendapatkan penanganan di 2024 (Bab II hal.249)	Permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa akan dirumuskan kembali lebih detail terutama pada permasalahan yang menjadi prioritas untuk dilakukan penanganan pada tahun 2024, dan akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2024
14	Permasalahan urusan pertanian masih belum spesifik seperti terkait kesejahteraan petani dan peternak yang menyampaikan “masih diperlukan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak”, namun belum menjelaskan faktor yang mempengaruhi dan memerlukan penanganan di Tahun 2024. (Bab II hal. 252)	Perumusan permasalahan urusan pertanian akan lebih dijelaskan kembali terutama terkait dengan kesejahteraan petani dan peternak, yang akan dilakukan intervensi pada tahun 2024 dan akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2024

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN	TELAAH
15	Konsisten dalam penyusunan target antar bab yang berhubungan. Seperti antara Bab III dan VII. Dimana pajak daerah pada Bab III ditargetkan naik Rp190 M atau tumbuh 1,25%, sedangkan pada Bab VII ditargetkan tumbuh 13,09%. (Bab VII hal.6)	Penyusunan target akan dicermati kembali agar lebih konsisten antar bab, terutama pada target keuangan daerah, dan akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2024
16	Tahun 2024 Indeks SO2 dan NO2 ditargetkan 0,37 atau stagnan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar 0,3707 (Bab VII hal.4)	Indikator indeks SO2 dan NO2 merupakan jenis indikator progres negatif, dimana target semakin kecil semakin baik. Indeks ini menggambarkan tingkat pencemaran dimana semakin sedikit nilainya berarti semakin baik tingkat pencemarannya
17	Tahun 2024 Indeks ketersediaan air tanah ditargetkan 3,60 menurun dari tahun 2022 yang sebesar 3,67 (Bab VII Hal.5)	Perhitungan indeks ketersediaan air tanah tahun 2024 menggunakan metode perhitungan dan variabel yang lebih lengkap dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga berpengaruh terhadap penetapan target mulai tahun 2024
	Keuangan Daerah:	
18	Ada perbedaan perhitungan proporsi rincian pendapatan hibah terhadap total pendapatan daerah di Tabel 3.3 antara Tahun 2020 dan 2021 dengan Tahun 2022. Proporsi pendapatan hibah terhadap total pendapatan daerah Tahun 2020 tertulis 100%. Jika melihat pendapatan hibah Tahun 2020 sebesar Rp23,35M dan total pendapatan daerah adalah Rp25,39T seharusnya proprosinya adalah 0,09%. Demikian pula dengan Tahun 2021 dimana pendapatan hibah sebesar Rp64,88M dan total pendapatan daerah Rp26,63T sehingga proporsi terhadap total pendapatan daerah adalah 0,24%. (Bab III hal.8)	Perhitungan proporsi rincian pendapatan hibah pada Bab III akan dicermati kembali, untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat, dan akan ditindaklanjuti dengan menuangkannya pada Bab III
19	1) Ketidaksinkronan target Bab III dan Bab VIII. Mendasarkan hasil perhitungan target PAD pada RKPD 2024 Bab VII, dimana pajak daerah ditargetkan tumbuh 13,09% serta retribusi dan pendapatan lain-lain ditargetkan tumbuh minus 1,2%. Proyeksi PAD Tahun 2024 mendasarkan Target Pertumbuhan Pajak, Retribusi dan pendapatan lain-lain dalam RKPD 2024: a. Pertumbuhan pajak daerah Tahun 2024 pada RKPD Bab VII ditargetkan 13,09% atau sebesar Rp17,264 b. Pertumbuhan retribusi dan pendapatan lain-lain Tahun 2024 Bab VII ditargetkan minus 1,12%. Sehingga sesuai target RKPD, pendapatan retibusi Rp136,35M dan pendapatan lain-lain Rp1,85T. Sehingga total PAD Tahun 2024 sesuai target RKPD 2024 Rp19,898T 2) Pesimis dalam menentukan PAD Bab III jika	Perhitungan pendapatan daerah akan dicermati kembali, dan akan disesuaikan jika sudah sesuai antara persentase proporsinya sehingga mendapatkan angka pendapatan absolut yang lebih tepat, dengan peningkatan yang lebih sesuai dengan kemampuan potensi yang ada. Hasil perhitungan akan dituangkan dalam Bab III, Bab VI, dan Bab VIII RKPD Tahun 2024

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN	TELAAH
	kita bandingkan APBD untuk PAD Tahun 2023 dengan proyeksi RKPD Tahun 2024, untuk PAD hanya mengalami peningkatan 1,39% atau Rp. 249 Milyar.Kenapa hal tersebut dikatakan pesimis karena: a. Melihat trend pertumbuhan PAD Tahun 2021 – 2023 berkisar 10%. b. Mendasarkan Pendekatan Elastisitas (persentase peningkatan PAD untuk setiap 1 % pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan), yaitu: (1) Nilai elastisitas sebesar 1,85 dihitung dari rata-rata elastisitas dari Tahun 2018- 2023 (2) Pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah target Tahun 2024 sebesar 4,7- 5,5% (3) Hasil: a) PAD Tahun 2024 dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi 4,7%, maka diperoleh pertumbuhan PAD Tahun 2024 di angka 8,70% dan PAD Rp21,162T b) PAD Tahun 2024 dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi 5,5%, maka diperoleh pertumbuhan PAD Tahun 2024 di angka 10,18% dan PAD Rp21,742T 3) Mendasarkan dari hasil analisa perhitungan target PAD sesuai target pajak, reribusi dan pendapatan lain-lain dalam RKPD serta pendekatan elastisitas pertumbuhan ekonomi, maka proyeksi PAD Tahun 2024 berada pada kisaran Rp19,898T (terendah) sampai dengan Rp21,742T (tertinggi). (Bab III-9 dan VII-6)	
20	Dalam halaman III-9 RKPD 2024, upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah utamanya untuk retribusi adalah Penghitungan ulang terhadap struktur dan besaran tarif retribusi; Peningkatan kompetensi petugas pelayanan retribusi; Pengembangan aplikasi untuk pelayanan pembayaran retribusi; Peningkatan sarana prasarana pendukung objek retribusi. Tetapi jika membandingkan pendapatan retribusi APBD Tahun 2023 Rp137,9 Milyar dan Tahun 2024 yang sebesar Rp136,3 Milyar justru mengalami penurunan. (Bab III hal. 9)	Akan dilakukan perhitungan kembali terhadap nilai retribusi daerah dengan mempertimbangkan potensi retribusi daerah termasuk yang berasal dari komponen lain-lain PAD yang sah. Hasil perhitungan akan dituangkan kembali pada Bab III dan Bab VI RKPD Tahun 2024
21	Belanja Hibah Tahun 2024 yang sebesar Rp1,41T ini menurun dari Tahun 2023 yang sebesar Rp2,23T. Perlu diingat bahwa hibah Tahun 2024 mengakomodir kebutuhan pendanaan Pilkada Serentak yang dari	Belanja hibah pada dokumen Rancangan RKPD belum mengakomodir belanja hibah untuk pilkada serentak tahun 2024. Nilai hibah akan dihitung kembali, dan akan dituangkan dalam Bab III RKPD Tahun 2024

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN	TELAAH
	pencairan dana cadangan ada dana Rp900M termasuk kebutuhan untuk fasilitasi bantuan pendidikan SMA/SMK swasta/MA dan insentif guru ngaji. (Bab III hal.13)	
22	Pada saat Musrenbangwil di disampaikan dibutuhkan dukungan DPRD untuk penanganan jalan dan sumberdaya air, yaitu kebutuhan anggaran jalan untuk managemen ruas tuntas Tahun 2024 sebesar Rp3,2 T, dari total kebutuhan Rp15 T. Sedangkan untuk kebutuhan infrastruktur sumberdaya air secara total membutuhkan Rp5,7 T. Tetapi jika melihat dari Bab III justru di belanja modal hanya Rp2 T. Untuk itu, sebenarnya bagaimana rencana dari penanganan infrastruktur untuk Tahun 2024. (Bab III hal.13)	Prioritas belanja pada tahun 2024 sebagaimana tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dan mandatori kebijakan dari pemerintah pusat, diarahkan untuk fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan penyelenggaraan pilkada serentak. Sehingga berdasarkan perhitungan, untuk belanja modal di tahun 2024 cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu dari Rp1,9 triliun menjadi Rp1,7 triliun.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

4.2.2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024

Tahun 2024 adalah tahun terakhir untuk pemenuhan target sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2024 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 diarahkan pada tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema tersebut dipandang sebagai upaya untuk memenuhi target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode tahun 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan penurunan emisi gas rumah kaca, dengan target pada tahun 2024 sebagai berikut:
   a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,7 persen;
   b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0-5,7 persen;
   c. Rasio Gini sebesar 0,374-0,477;
   d. Penurunan emisi GRK sebesar 27,27 persen;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan, dengan target pada tahun 2024 sebagai berikut:
   a. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99-74,02;
   b. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,5 persen.

Selain itu aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, dengan target pada tahun 2024 sebagai berikut:

a. Nilai Tukar Petani sebesar 105-108;
b. Nilai Tukar Nelayan sebesar 107-110.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 yaitu 1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, 2) peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, 3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, 4) penguatan daya saing usaha, 5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, 6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, 7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta 8) pelaksanaan Pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh PN RKP Tahun 2024 meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim,
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung perwujudan tema dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024, dalam RKP Tahun 2024 ditetapkan strategi pengembangan wilayah. Strategi pengembangan wilayah tahun 2024 ditujukan untuk mempercepat transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masing-masing wilayah, meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah, meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, serta mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali.

Strategi pengembangan wilayah untuk Wilayah Jawa-Bali terutama untuk didorong dilaksanakan di wilayah Jawa Tengah tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi wilayah
   a. Mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya KI Terpadu Batang dan KEK Kendal melalui optimalisasi paket-paket fiskal dan nonfiskal yang disesuaikan dengan potensi/tema pembangunan kawasan;
   b. Mempercepat pengembangan kawasan-kawasan pariwisata unggulan berdasarkan keuntungan kompetitifnya di Kawasan Borobudur dan sekitarnya;
   c. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung pengembangan kawasan melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, perbaikan kesesuaian kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan

pendidikan tinggi vokasi sesuai kebutuhan lapangan kerja, serta pengembangan BLK;

d. Meningkatkan kelayakhunian dan peran WM Semarang sebagai pusat layanan pendukung sektor industri dan ekonomi kreatif;
e. Meningkatkan konektivitas kawasan untuk memperluas jangkauan layanan dan distribusi melalui penyediaan konektivitas inter dan intrawilayah, penyediaan transportasi massal perkotaan sesuai dengan kebutuhan distribusi layanan serta pengembangan sistem transportasi multimoda;
f. Meningkatkan kepastian hukum terkait hak atas tanah, pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Jawa-Bali dalam peningkatan daya saing daerah, pengembangan sumber pembiayaan alternatif dan investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wialyah Jawa Bali;
g. Mengedepankan pembangunan rendah karbon melalui peningkatan efektivitas pengendalian alih fungsi lahan dan pengelolaan limbah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
h. Mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah;

2. Strategi pemerataan intrawilayah Jawa-Bali
   a. Meningkatkan hubungan desa-kota di Jawa bagian selatan dan Bali bagian utara dengan mengembangkan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Magelang, dan Kendal, yang bertumpu pada hilirisasi pertanian dan pariwisata inklusif;
   b. Mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas antara Jawa bagian utara dengan Jawa bagian selatan sebagai akselerator pemerataan ekonomi;
   c. Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM di daerah;
   d. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Jawa-Bali;
   e. Peningkatan pendapatan dan kualitas belanja daerah yang tepat sasaran, dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, produktif, dan akuntabel;
   f. Mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah;
   g. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan (difokuskan pada pendidikan menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi vokasi), serta layanan kesehatan (difokuskan pada puskesmas dan klinik menjangkau langsung masyarakat);
   h. Meningkatkan efektivitas pengendalian alih fungsi lahan dan pengelolaan limbah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
3. Strategi penguatan ketahanan bencana
   a. Pada wilayah ujung barat dan pesisir selatan Pulau Jawa upaya difokuskan untuk mengantisipasi ancaman bencana gempa tektonik, tsunami, dan tanah longsor;

b. Penguatan mitigasi bencana di kawasan perkotaan dan pesisir pantai utara difokuskan untuk mengantisipasi potensi banjir, abrasi garis pantai, dan penurunan muka tanah;
c. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana deteksi dini kebencanaan, serta pengembangan data kebencanaan;
d. Revitalisasi mekanisme kerjasama lintas daerah dan multipihak, khususnya dalam hal sinergi pembiayaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2024, Wilayah Jawa-Bali memiliki sasaran utama dengan target yang harus dicapai meliputi:

a. meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan indikator kinerja dan targetnya yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0-5,4 persen;
b. menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan, dengan indikator kinerja dan targetnya yaitu Tingkat Kemiskinan sebesar 9,50-10,00 persen;
c. meningkatnya kesempatan kerja khususnya di perkotaan, dengan indikator kinerja dan targetnya sebesar 4,26-4,96 persen.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2024 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada tema pembangunan daerah yaitu **Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas**. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah (PD) dan fokusnya sebagai berikut:

1. **PD 1: Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas**, dengan fokus pada:
   a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
      1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
      2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
      3) Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan *(food loss and waste);*
      4) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
      5) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak

yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;

6) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
7) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah;
8) Penerapan pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang diawali dengan penyusunan dokumen pembangunan hijau di Provinsi Jawa Tengah dan ekonomi sirkular (*circular economy*) secara bertahap sebagai *tools* untuk mencapai pembangunan rendah karbon.

b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:
   1) Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
   2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
   3) Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas puskesos;
   4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah dan kewilayahan;
c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya

saing dan berkelanjutan, dengan indikator kinerjanya yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi, 2) inflasi, 3) tingkat pengangguran terbuka, dan 4) nilai tukar petani. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
3) Program Penyelenggaraan Jalan;
4) Program Pengembangan Perumahan;
5) Program Kawasan Permukiman;
6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
7) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
9) Program Pemberdayaan Sosial;
10) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
11) Program Rehabilitasi Sosial;
12) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
13) Program Penanganan Bencana;
14) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
15) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
16) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
17) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
18) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
19) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
20) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat;
21) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
22) Program Pengelolaan Pelayaran;
23) Program Pengelolaan Perkeretaapian;
24) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
25) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
26) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
27) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
28) Program Pengembangan UMKM;
29) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
30) Program Promosi Penanaman Modal;
31) Program Pelayanan Penanaman Modal;
32) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
33) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
34) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
35) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
36) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
37) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
38) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
39) Program Pemasaran Pariwisata;

40) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
41) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
42) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
43) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
44) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat;
45) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
46) Program Penyuluhan Pertanian;
47) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
48) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
49) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
50) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
51) Program Pengembangan Ekspor;
52) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
53) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
54) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
55) Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
56) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
57) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
58) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
59) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
60) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
61) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
62) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
63) Program Penempatan Tenaga Kerja;
64) Program Hubungan Industrial;
65) Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
66) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

2. PD 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada upaya:

a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, anak tidak sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan digitalisasi pendidikan; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas *stakeholder*, serta optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS;
b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana dan sarana, pemenuhan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan *baseline* data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM

kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan *stroke*, masalah kesehatan jiwa serta kejadian luar biasa (KLB)/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;

c. Meningkatkan penyadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet;
d. Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid, serta penyediaan bahan literasi;
e. Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat;
g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelengaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, dengan indikator kinerjanya yaitu: 1) indeks pembangunan manusia, 2) indeks pembangunan kebudayaan, 3) indeks pembangunan gender, dan 4) indeks pembangunan keluarga. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Pendidikan;
2) Program Pengembangan Kurikulum;
3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;

5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
7) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
8) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
9) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
10) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
11) Program Pengembangan Kebudayaan;
12) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
13) Program Pembinaan Sejarah;
14) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
15) Program Pengelolaan Permuseuman;
16) Program Pembinaan Perpustakaan;
17) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
18) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
19) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
20) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
21) Program Perlindungan Perempuan;
22) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
23) Progam Perlindungan Khusus Anak;
24) Program Pengendalian Penduduk;
25) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
26) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

3. **PD 3: Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung**, dengan fokus pada upaya:
   a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara *ambien*, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
   b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
   c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan,

peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;

d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*early warning system* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator kinerjanya yaitu: 1) indeks kualitas lingkungan hidup, dan 2) persentase penurunan indeks risiko bencana. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
4) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
5) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
6) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
7) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
8) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
9) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
10) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
11) Program Pengelolaan Persampahan;
12) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
14) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
15) Program Pengelolaan Hutan;
16) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
17) Program Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;

18) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
19) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
20) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
21) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
22) Program Penanggulangan Bencana.

4. **PD 4: Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif**, dengan fokus pada upaya:
   a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
   b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerja sama antarpemerintah, dan pemerintah dengan lembaga nonpemerintah.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, dengan indikator kinerjanya yaitu indeks reformasi birokrasi. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2) Program Penataan Bangunan;
3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
4) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
6) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
7) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
8) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
9) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
10) Program Pendaftaran Penduduk;
11) Program Pencatatan Sipil;
12) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
13) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
14) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
15) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
16) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
17) Program Pengelolaan Arsip;
18) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
19) Program Penataan Organisasi;
20) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
21) Program Kesejahteraan Rakyat;
22) Program Failitasi dan Koordinasi Hukum;

23) Program Perekonomian dan Pembangunan;
24) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
25) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan;
26) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
27) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
28) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
29) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
31) Program Kepegawaian Daerah;
32) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
33) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
34) Program Pelayanan Penghubung;
35) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
36) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
37) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
38) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
39) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
40) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
41) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2024 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. PDRB per Kapita sebesar 45,82 juta rupiah;
2. Angka kemiskinan sebesar 9,76-8,96 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,364;
4. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,70-5,50 persen;
5. Inflasi sebesar 3,0 ± 1 persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44-4,94 persen;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,45 persen;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 60,27;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,03;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,55;
13. Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 81,50.

Upaya perwujudan tema pembangunan, prioritas daerah, dan pencapaian target IKU Daerah tahun 2024 tersebut didukung dengan **10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Daerah** sebagai program unggulan daerah tahun 2024. Kesepuluh program prioritas tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil**

Pesta demokrasi di Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan digelarnya Pemilu serentak tahun 2024 yang akan memilih presiden dan wakil presiden, legislatif, serta gubernur dan wakil gubernur. Seluruh lapisan masyarakat yang telah memiliki hak pilih wajib untuk mengikuti pemilu serentak tahun 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa kegiatan sejak tahun 2023, dan akan dilanjutkan pada tahun 2024 sampai dengan pemilu berakhir. Beberapa kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan antara lain dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Masyarakat diajak untuk secara bijaksana menyampaikan hak pilihnya serta ikut berperan serta dalam menjaga kelancaran, keamanan, dan ketertiban selama proses penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak antara lain Forkompimda dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk bersama-sama mempersiapkan pengamanan selama proses pemilu. Selain itu juga dilakukan latihan pengamanan bersama dalam rangka memastikan kesigapan pengamanan selama proses pemilu berlangsung hingga langkah-langkah dalam menghadapi situasi aksi kegaduhan dan unjuk rasa, termasuk dengan situasi kamtibmas lainnya.

2. **Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyakarat**

Kondusivitas daerah merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung perekonomian daerah yang stabil yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang harus dilakukan guna mewujudkan kondusivitas daerah adalah dengan menjaga stabilitas politik, sosial, ekonomi, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan upaya tersebut sebagai salah satu program prioritas yang harus dilakukan, termasuk utamanya pada saat-saat menjelang pemilu serentak pada tahun 2024.

Berbagai strategi telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat di antaranya pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini dan cegah dini; mobilisasi satlinmas untuk membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban, penanggulangan dan pencegahan bencana; penegakan perda provinsi atau peraturan gubernur; pembinaan trantibum terdiri dari pembinaan pengamanan obyek vital (pam obvit) serta pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali). Selain itu juga dilaksanakan patroli pengendalian trantibum; penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; pengamanan strategis dan tingkat provinsi termasuk pemilu serentak 2024; serta operasi penertiban trantibum (pekat dan cipta kondisi).

Edukasi kepada masyarakat tentang penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, serta pentingnya menjaga stabilitas politik, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat juga strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi agar masyarakat paham tentang arti penting kondusivitas

daerah. Selain itu, dilakukan juga pembinaan kepada partai politik, pemberdayaan dan pengawasan ormas, serta koordinasi dan fasilitasi kepada berbagai pihak dalam rangka pencegahan terjadinya konflik yang dapat mengganggu kondisivitas daerah.

3. Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan

Peningkatan inflasi yang terjadi dalam satu tahun terakhir memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian masyarakat dimana terjadi peningkatan harga sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Melihat kondisi tersebut, pemerintah pusat menetapkan kebijakan prioritas pengendalian inflasi dan mendorong seluruh pemerintah daerah untuk juga kebijakan pengendalian inflasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui perangkat daerah juga telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk mengendalikan inflasi Jawa Tengah dan pada tahun 2024 juga masih menjadi salah satu prioritas untuk dilaksanakan. Kebijakan yang dilakukan antara lain melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas.

Upaya meningkatkan keterjangkauan akses pangan juga sebagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan akses pangan masyarakat di antaranya subsidi harga pangan strategis produsen dan konsumen, gelar pangan murah, fasilitasi distribusi komoditas pangan strategis, cadangan pangan pemerintah (beras, kedelai, jagung dan pangan lokal), bantuan lumbung pangan masyarakat, promosi pangan lokal, fasilitasi desa B2SA (Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), serta fasilitasi kelompok usaha pangan lokal

Di sisi lain, produksi dan produktivitas pertanian juga terus didorong agar ketersediaan bahan pangan tetap terjaga. Berbagai kegiatan dilakukan untuk terus menjaga ketersediaan produk pertanian (termasuk pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan) antara lain peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana, penyediaan bibit dan benih, peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya, penyediaan asuransi petani dan nelayan, penyediaan subsidi bunga kredit bagi petani, pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi, serta rehabilitasi sarana penampungan air (embung).

4. Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan *stunting*

Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan *stunting* merupakan kebijakan Nasional yang harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut juga telah dan akan terus didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan menjadi program prioritas pada tahun 2024. Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah akan dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial antara lain bantuan siswa miskin (BSM), seragam siswa miskin, jaminan sosial, pemberian bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program Kartu Jateng Sejahtera (KJS), serta bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia

serta anak dan penyandang disabilitas. Selain program bantuan sosial tersebut terdapat program subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

2. Peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya peningkatan akses pekerjaan melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung akses pekerjaan bagi masyarakat miskin; peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan pelatihan; peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan; pendampingan dan penguatan kewirausahaan melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar; serta pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
3. Penurunan wilayah kantong kemiskinan dilakukan melalui sinergi kebijakan, antara lain pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan infrastruktur perumahan, jambanisasi, air minum dan sanitasi layak, peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Strategi utama tersebut didukung peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan reliabilitas data dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan secara *bottom up*. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan melalui pendekatan intervensi berbasis individu dan kewilayahan/spasial. Pendekatan individu menggunakan data mikro yang telah di verifikasi dan validasi serta terintegrasi dalam basis data kemiskinan yang dikelola oleh Dinas Sosial.

Untuk pendekatan kewilayahan difokuskan pada manfaat kolektif dengan skala dan cakupan lebih luas yang dampaknya bersifat jangka menengah dan panjang. Fokus pendekatan kewilayahan antara lain: 1) penanganan kemiskinan di kawasan kumuh, 2) peningkatan aksesibilitas di wilayah dengan kesulitan geografis tinggi, 3) peningkatan produktivitas pertanian, 4) pemberdayaan nelayan dan sektor perikanan, dan 5) pengembangan potensi lokal. Intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) tersebut dilaksanakan secara lintas sektor, terfokus, dan konvergen di wilayah dengan potensi dan permasalahan yang telah diidentifikasi.

Selanjutnya dalam rangka penurunan angka *stunting*, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah dan akan terus melaksanakan berbagai upaya terintegrasi antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan. Berbagai kegiatan dalam bentuk aksi konvergensi *stunting* di Jawa Tengah antara lain peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat; mengembangkan sistem surveilans gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai; pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita; Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kekurangan gizi; penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, dan bayi di bawah lima tahun; mendorong partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih serta sanitasi; pelatihan bagi peningkatan kompetensi pendidik PAUD yang berorientasi gizi; penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam

kegiatan posyandu; penyelenggaraan konseling kesehatan dan reproduksi kepada remaja di tingkat pendidikan menengah pertama dan sederajat; penguatan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap tingkatan pendidikan; mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kawasan Mandiri Pangan yang berkelanjutan; serta penyuluhan pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal.

Program lainnya yang menjadi prioritas untuk dilakukan pada tahun 2024 adalah penurunan angka pengangguran. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi dengan peningkatan sarana pratek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta optimalisasi BLK; pengembangan wirausaha baru; serta program padat karya di berbagai sektor.

5. Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi dan karhutla)

Dampak perubahan iklim semakin dirasakan di Jawa Tengah, terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim terjadi sebagai dampak dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat antara lain kekeringan, polusi, serta kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu penanganan dampak perubahan iklim menjadi salah satu program prioritas Jawa Tengah pada tahun 2024.

Berbagai upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat berdampak pada kekeringan antara lain pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), pengelolaan kebun raya, pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara, pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara, penerapan teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan, pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan, normalisasi/restorasi sungai, serta program konservasi kawasan lindung dan daerah resapan air melalui pengembangan komoditas perkebunan. Selanjutnya upaya mitigasi terhadap kekeringan antara lain dilaksanakan dengan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan konservasi air tanah serta implementasi nilai perolehan air di jawa tengah, pembangunan infrastruktur geologi dan konservasi air tanah berupa sumur resapan dangkal dan sumur pantau, pengelolaan hidrologi dan kualitas air sungai, serta droping air bersih (melalui mekanisme BTT berdasarkan SK kedaruratan bencana kabupaten/kota).

Selanjutnya dalam rangka pengurangan polusi dilakukan kegiatan antara lain pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut; pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan; pengelolaan hidrologi dan kualitas air sungai; serta optimasi lahan dengan penggunaan pupuk organik. Sedangkan dalam upaya

pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan upaya pengendalian, pengawasan, dan perlindungan hutan, mengoptimalkan fungsi pengawas hutan dan lahan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat akan risiko kebakaran hutan dan lahan terutama di musim kemarau.

6. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi

Pendidikan vokasi menjadi salah satu dari sepuluh program prioritas Jawa Tengah tahun 2024 dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan memiliki keterampilan serta kompetensi yang lebih baik. Program prioritas ini lebih diarahkan pada penguatan kualitas pendidikan SMK di Jawa Tengah dalam rangka mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pendidikan SMK antara lain sinkronisasi kurikulum pendidikan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Sinkronisasi ini menjadi penting agar kurikulum pendidikan SMK sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri.

Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMK antara lain fasilitasi pendampingan ujian kompetensi keahlian (UKK) SMK, peningkatan sarana prasarana pendidikan SMK khususnya alat praktek, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan SMK *boarding* dan semi *boarding* Jawa Tengah, serta pemberian BOP dan BOSDA untuk SMK. Peningkatan kualitas, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja juga dilaksanakan oleh sektor lainnya antara lain melalui pelatihan khusus tenaga kerja di balai latihan kerja (BLK) dan di balai-balai industri, penyediaan sarana pelatihan di balai-balai tersebut, serta peningkatan sarana pratek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

7. Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif

Salah satu sektor unggulan perekonomian daerah Jawa Tengah adalah sektor pariwisata. Sebagai salah satu sektor unggulan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan program pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu dari sepuluh program prioritas pada tahun 2024. Pengembangan sektor pariwisata pada tahun 2024 difokuskan pada upaya peningkatan promosi pariwisata, pengembangan aplikasi layanan pariwisata dan monitoring pariwisata, serta penyelenggaraan berbagai even pariwisata antara lain even *sport tourism*, kuliner festival, dan *e-sport tournament*.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong peningkatan daya saing sektor UMKM berbasis ekonomi kreatif karena sektor UMKM juga merupakan salah satu sektor unggulan daerah Jawa Tengah yang menopang perekonomian masyarakat Jawa Tengah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong berkembangnya UMKM berbasis ekonomi kreatif antara lain melakukan pelatihan bagi pelaku UMKM, fasilitasi pengembangan pasar berbasis digital, fasilitasi pembiayaan dan modal, pendampingan berkelanjutan, fasilitasi pengembangan teknologi dan inovasi, fasilitasi perlindungan hak atas kekayaan intelektual, serta promosi dan publikasi produk/karya kreatif dengan penyelenggaraan berbagai even festival produk/karya kreatif. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk menciptakan ekosistem

ekonomi kreatif di tiap wilayah kabupaten/kota melalui perwujudan kabupaten/ kota kreatif.

8. Pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi

Ekonomi sirkular adalah sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear. Ekonomi sirkular bukan hanya membahas pengelolaan limbah yang lebih baik dengan lebih banyak melakukan daur ulang, namun ekonomi sirkular juga mencakup serangkaian intervensi yang luas di semua sektor ekonomi, seperti efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah mulai mengembangan sistem ekonomi sirkular. Pada tahun 2024, pengembangan sistem ekonomi sirkular juga menjadi salah satu program prioritas yang akan dilakukan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan sistem ekonomi sirkular di Jawa Tengah antara lain pengelolaan sampah dan limbah, pengembangan produk pangan organik, fasilitasi pengembangan industri hijau, pemulihan lahan berkelanjutan, rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang ekonomi sirkular.

Upaya lain dalam pengembangan ekonomi sirkular yang penting adalah terkait dengan pembangunan energi berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Di Jawa Tengah, bauran energi baru terbarukan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung dengan berbagai upaya di antaranya pengembangan dan pembangunan infrastruktur EBT terutama biogas, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) *rooftop*, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pemanas air tenaga surya (PATS), dan gas rawa. Selain itu juga dilakukan upaya untuk mendorong pengembangan desa mandiri energi, dan pendampingan transisi energi kepada seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

9. Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pelayanan kepada publik merupakan salah satu fungsi dan peran utama penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang dinamis. Salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam perwujudan pelayanan publik adalah dengan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pengembangan pelayanan publik berbasis SPBE ini menjadi salah satu program prioritas Jawa Tengah pada tahun 2024. Bentuk kegiatan dari program ini antara lain pengembangan sistem informasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, sistem tata naskah dinas elektronik (*e-office*), sistem pelayanan kepegawaian terpadu, sistem pelayanan masyarakat terintegrasi, sistem pelayanan pengaduan, dan didukung penguatan keamanan sistem informasi. Selain itu, dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan kebijakan yang mewajibkan setiap perangkat daerah untuk mengembangkan satu inovasi pelayanan publik dalam satu tahun.

10. Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN)

Salah satu upaya perwujudan reformasi birokrasi di Jawa Tengah adalah penerapan manajemen berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabel. Untuk itu, dalam proses manajemen menjadi penting untuk dilakukan pengawasan terhadap setiap proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi, dalam bentuk reviu atau audit.

Pada tahun 2024, salah satu program prioritas daerah Jawa Tengah adalah meningkatkan pengawasan internal baik pengawasan terhadap organisasi maupun pengawasan terhadap seluruh ASN. Pengawasan terhadap organisasi yang dilakukan adalah dalam rangka menjalankan fungsi *quality assurance*, asistensi, dan *consulting* pada proses manajemen pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta tidak menimbulkan *fraud* di kemudian hari. Berbagai upaya dilakukan untuk perwujudan pengawasan tersebut antara lain penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mendorong penerapan manajemen risiko dalam manajemen pemerintahan, penguatan kapasitas APIP, serta penguatan saber pungli.

Selanjutnya pengawasan terhadap seluruh ASN Jawa Tengah dilakukan dalam rangka penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk aparatur yang profesional dan fungsional, integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur. Upaya yang dilakukan antara lain dengan sosialisasi dan edukasi kepada ASN dalam mewujudkan ASN Berakhlak, penyelenggaraan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, pelatihan teknis dan kompetensi ASN dalam rangka mewudkan ASN yang profesional dan fungsional, dan pengembangan sistem merit.

Berikut ini dapat digambarkan keselarasan dan konsistensi antara: 1) tujuan daerah, sasaran daerah, prioritas daerah, dan sepuluh program prioritas daerah tahun 2024, 2) tema pembangunan daerah dan prioritas daerah tahun 2024 dengan RPD Tahun 2024-2026, dan 3) tema pembangunan daerah dan prioritas daerah tahun 2024 dengan permasalahan daerah dan isu strategis tahun 2024.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 4.1
Gambaran Keselarasan Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Prioritas Daerah, dan 10 (Sepuluh) Program Prioritas Daerah Tahun 2024

Tabel 4.3.
Konsistensi Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024, serta Konsistensi Permasalahan Daerah, Isu Strategis, dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2024

RPD Tahun 2024-2026	RKPD Tahun 2024		
Arah Kebijakan Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	**Tema Pembangunan** Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas		
Prioritas	**Prioritas Daerah**	**Isu Strategis**	**Permasalahan Daerah**
Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	- Masih cukup tingginya angka kemiskinan - Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif	Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi era disrupsi

RPD Tahun 2024-2026	RKPD Tahun 2024		
Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana
Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	- Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi - Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

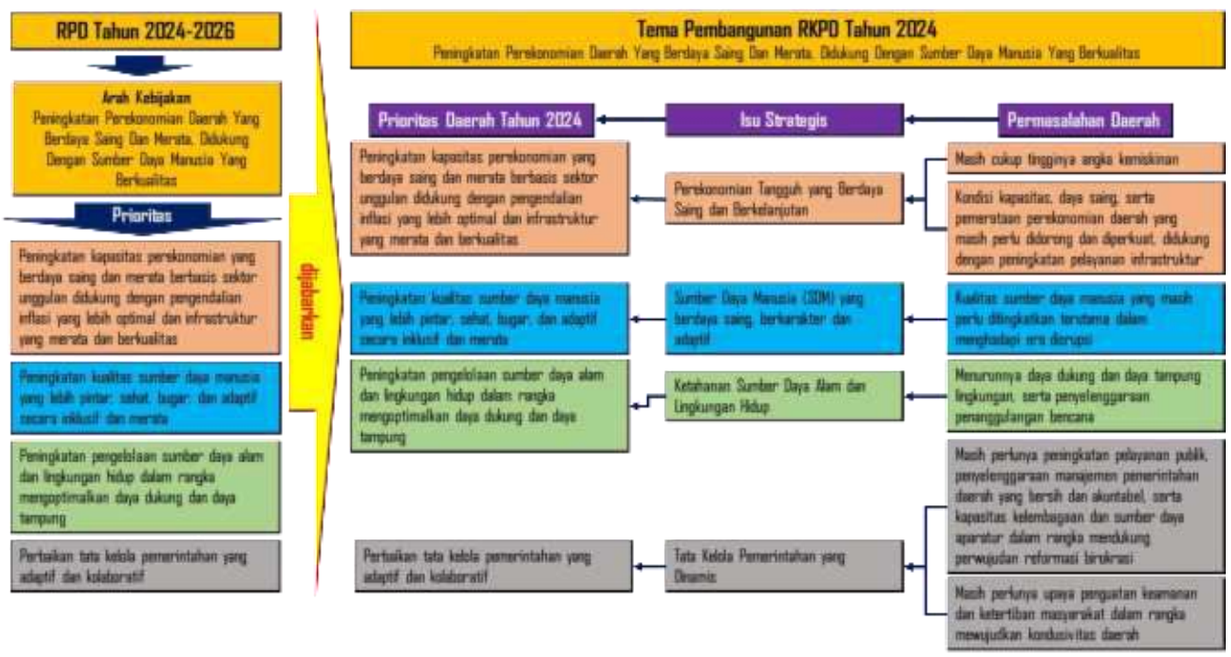

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 4.2
Gambaran Konsistensi Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024, serta Konsistensi Permasalahan Daerah, Isu Strategis, dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2024

Selanjutnya penjabaran dukungan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka perwujudan tema dan prioritas daerah tahun 2024 selengkapnya tertuang dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.4.
Program Prioritas Daerah Mendukung Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah Disertai Pagu Indikatif Tahun 2024

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari **Indikator Kinerja Tujuan Daerah** **PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah** **Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%** **Rasio Gini 0,364**									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran Daerah 1 (S1)									
Meningkatnya perekonomian Tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan								11.373.494.038.000	
			PD. 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas					11.373.494.038.000	
IK1. S1. Pertumbuhan Ekonomi	4,70 - 5,50	%						11.321.491.165.000	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM				14.261.500.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PENYEDIAAN AIR MINUM					
					Persentase akses air minum jaringan perpipaan	54,32	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				2.978.123.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
					Persentase akses air limbah domestik layak	91,92	%		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				340.675.501.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
					Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	95,52	%		
					Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	86,14	%		
					Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	85,23	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	88,49	%		
					Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	89,43	%		
					Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	83,65	%		
					Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	99,95	%		
					Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	85,51	%		
					Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	94,17	%		
					Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	93,65	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	91,61	%		
					Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	94,90	%		
					Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	88,12	%		
					Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	93,82	%		
					Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	86,78	%		
					Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	91,18	%		
					Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	93,17	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	94,78	%		
					Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	47,50	%		
					Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	41,68	%		
					Persentase panjang jalan yang dileger	75,79	%		
					Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	100	%		
					Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	100	%		
					Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	12,85	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	31,88	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				14.917.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dam Kawasan Permukiman
					Persentase rumah layak huni yang disediakan	0,12	%		
					Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	2,73	%		
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				3.108.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dam Kawasan Permukiman
					Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	3,18	%		
					Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100	%		
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				1.725.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dam Kawasan Permukiman

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman	40,00	%		
				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				215.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dam Kawasan Permukiman
					Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100	%		
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2.666.576.000	Satual Polisi Pamong Praja
					Persentase penegakan produk hukum daerah	80	%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				9.479.940.000	Dinas Sosial

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	7,7	%		
				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				100.000.000	Dinas Sosial
					Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	100	%		
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				56.760.528.000	Dinas Sosial
	1				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	1,92	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	0,07	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	0,07	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	0,08	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	0,10	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	0,06	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	0,06	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	0,05	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	0,09	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	0,07	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	0,09	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	0,11	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	0,08	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	0,06	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	0,12	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	0,04	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	0,12	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	0,03	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	0,11	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	0,06	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	0,11	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	0,06	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	0,11	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	0,03	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	0,03	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	0,04	%		
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	0,06	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	0,05	%		
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				157.256.160.000	Dinas Sosial
					Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	100	%		
					Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	80	%		
					Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	0,02	%		
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA				2.225.500.000	Dinas Sosial

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	100	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				359.000.000	Dinas Sosial
					Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola	100	%		
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				3.337.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
					Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	87,8	kg/kapita/ tahun		
					Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)	0,62	Angka		
					Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	87,8	kg/kapita/ tahun		
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				3.980.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
					Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	0,01	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				2.815.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
					Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	80	%		
					Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan	80	%		
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				675.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)	6,85	%		
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				1.625.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa	100	%		
					Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa	100	%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				2.450.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	8,96	%		
					Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	100	%		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				127.393.110.000	Dinas Perhubungan
					Rasio trayek angkutan jalan	0,51	Angka		
					Rasio pemanfatan terminal	0,218	Angka		
					Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	0,5	Angka		
					Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,24	Angka		
					Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,01	Angka		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,2	Angka		
					Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,23	Angka		
					Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,17	Angka		
					Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,21	Angka		
					Rasio konektivitas perkotaan	0,481	Angka		
					Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	0,38	Angka		
					Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,97	Angka		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,97	Angka		
					Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,98	Angka		
					Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,97	Angka		
					Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,98	Angka		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,97	Angka		
					Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	0,981	Angka		
					Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,81	Angka		
					Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,81	Angka		
					Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,81	Angka		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,81	Angka		
					Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,81	Angka		
					Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,81	Angka		
					Persentase perpindahan moda angkutan umum	51,72	%		
					Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	65,38	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				459.100.000	Dinas Perhubungan
					Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	0,31	Angka		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	0,2	Angka		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				1.266.866.000	Dinas Perhubungan
					Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	0,04	Angka		
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				2.500.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Persentase koperasi berkualitas	25,02	%		
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				6.513.853.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Persentase SDM koperasi yang berkualitas	10	%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				8.901.787.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Persentase koperasi provinsi produktif	48,09	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				9.072.340.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Persentase usaha mikro mandiri	81,2	%		
					Persentase pertumbuhan wirausaha baru	23	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				6.408.609.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Persentase UMKM siap bermitra	21,06	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				705.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan	50	%		
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				1.100.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	46	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	50	%		
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				1.649.910.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	90	%		
					Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	%		
					Persentase pemenuhan standar pelayanan	100	%		
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				1.510.218.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	20	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				524.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Terpadu Satu Pintu
					Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	10	%		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.793.728.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	%		
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				760.245.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Persentase produksi garam	1	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				32.670.252.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	63	%		
					Persentase produksi perikanan tangkap	5	%		
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	72	%		
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong	72,72	%		
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	81,82	%		
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	70	%		
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	62,62	%		
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	81	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	100	%		
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	100	%		
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	63,63	%		
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	72	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				13.050.491.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Produksi perikanan budidaya	600000	Ton		
					Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	100	%		
					Persentase produksi ikan konsumsi air laut	5	%		
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				4.533.575.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	13,33	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				123.700.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Jumlah kunjungan wisatawan	49.985.228	Orang		
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				825.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	6	Kabupaten/Kota		
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				9.115.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	48,98	%		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				92.949.520.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Kesehatan Hewan
					Jumlah populasi ternak potong	3726434	(ST)/ (AU)		
					Jumlah populasi ternak perah	112876	(ST)/ (AU)		
					Jumlah populasi ternak petelur	246615	(ST)/ (AU)		
					Persentase fasilitasi obat hewan	1	%		
					Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan	4	Dokumen		
					Persentase produksi dan distribusi semen beku	1	%		
					Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging	1	%		
					Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu	1	%		
					Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur	1	%		
					Produksi kedelai	52657	Ton		
					Produksi jagung	3576577	Ton		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari

Indikator Kinerja Tujuan Daerah

PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah

Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%

Rasio Gini 0,364

Sasaran Daerah			Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	Target	Satu-an							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Produksi padi	9594280	Ton		
					Persentase luas lahan yang dioptimasi	2,5	%		
					Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi	90	%		
					Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani	2,5	%		
					Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan	100	%		
					Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan	3	%		
					Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta	85	%		
					Produksi bawang merah	515000	Ton		
					Produksi cabai	341000	Ton		
					Produksi durian	149668	Ton		
					Produksi jahe	34862	Ton		
					Produksi melati	24627	Ton		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	85	%		
					Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya	2	%		
					Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan	3	%		
					Persentase layanan sertifikasi benih	100	%		
					Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	85	%		
					Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1	%		
					Produksi kopi	25927	Ton		
					Produksi tebu	2554553	Ton		
					Produksi kelapa	166687	Ton		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				5.564.297.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	10	%		
					Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	10	%		
					Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	10	%		
					Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	7420274	m		
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				14.732.035.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis	4	Dokumen		
					Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali	3	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara	4	Dokumen		
					Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan	4	Dokumen		
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				2.635.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
					Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam	5	%		
					Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	15	%		
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				20.740.985.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong	1,02	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah	3,11	%		
					Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur	2,27	%		
					Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	2,5	%		
					Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih	100	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				4.315.593.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah	60	%		
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	60	%		
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	60	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara	60	%		
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	60	%		
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	60	%		
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo	60	%		
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	60	%		
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	60	%		
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	60	%		
					Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak	60	%		
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	60	%		
					Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	60	%		
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				117.640.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	10	%		
					Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah	8,00	%		
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				634.445.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi	10	%		
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				335.444.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi	30	%		
					Persentase kinerja realisasi pupuk	90	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				2.980.978.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase kenaikan nilai ekspor non migas	2	%		
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				3.482.628.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen	1	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	5	%		
					Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	10	%		
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				1.450.443.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	10	%		
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				30.869.870.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase pertumbuhan produksi industri agro	2,25	%		
					Persentase pertumbuhan produksi industri non agro	2,25	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	3,45	%		
					Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	85	%		
					Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	4,38	%		
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				290.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	7	%		
					Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	10	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				823.525.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	1,62	%		
					Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	2	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				10.146.505.350.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100	%		
					Persentase penetapan APBD tepat waktu	100	%		
					Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	100	%		
					Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	100	%		
					Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	100	%		
IK2. S1. Inflasi	3,00 ± 1	%						8.074.896.000	

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				6.093.935.000	Dinas Ketahanan Pangan
					Rata-rata ketercukupan pangan	1,25	Angka		
					Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	0,064	Angka		
					Rasio cadangan pangan masyarakat	0,62	Angka		
					Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	60	%		
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				1.980.961.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota	10	%		
IK3. S1. Tingkat Pengangguran Terbuka	5,44 - 4,94	%						39.743.117.000	
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				180.415.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	62,85	%		
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				30.176.915.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	38,14	%		
					Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	4,4	%		
					Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	2,3	%		
					Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	2,88	%		
					Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	9,45	%		
					Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	13,13	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	46,9	%		
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				1.780.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	45,05	%		
					Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	68,1	%		
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				1.685.787.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	98	%		
					Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	49,75	%		
					Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	44,27	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	96,15	%		
				PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				5.700.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	89,58	%		
					Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	26,4	%		
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				220.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	3,61	%		
IK4. S1. Nilai Tukar Petani	107,45	Angka						4.184.860.000	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				1.137.715.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Indeks harga yang diterima oleh nelayan	108,27	Angka		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				68.970.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	111,27	Angka		
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				2.330.025.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Jumlah produksi olahan ikan	160000	Ton		
					Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4	%		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				400.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	10	%		
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				248.150.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV)	2,8	%		
Sasaran Daerah 2 (S2)									
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif								4.864.402.301.000	
			PD. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata					4.864.402.301.000	
IK1. S2. Indeks Pembangunan Manusia	73,43	Angka						4.768.135.062.000	
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				3.708.924.637.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	77,81	%		
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	28,57	%		
					Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	65	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	36	Angka		
					Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	67,78	%		
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	50	%		
					Persentase angka putus sekolah SMA	2,3	%		
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	84,74	%		
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	87,73	%		
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	3,63	%		
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	44,94	%		
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	25,69	%		
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	1,25	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	69,8	%		
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	88,25	%		
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	2,52	%		
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	79	%		
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	10	%		
					Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	10	%		
					Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	80,3	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	1,92	%		
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	78,7	%		
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	93,71	%		
					APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	79,86	%		
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	90	%		
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	90	%		
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	1,96	%		
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	80	%		
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	81	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	77,11	%		
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	2,2	%		
					Persentase angka putus sekolah SMK	0,026	%		
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	76,12	%		
					Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	60	%		
					Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	0,55	Angka		
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	57,35	%		
					Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	50,35	%		
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	1,67	%		
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	0,9	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	90,54	%		
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	3,22	%		
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	79	%		
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	54,59	%		
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	2,87	%		
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	69,8	%		
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	75,57	%		
					Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	10,53	%		
					Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	10	Angka		
					Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	10	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	68,18	%		
					Persentase angka putus sekolah SLB	3,53	%		
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	2,74	%		
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	85,55	%		
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	72,83	%		
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	76,59	%		
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	1	%		
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	40,11	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				751.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	82,21	Angka		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	81,77	Angka		
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	86,06	Angka		
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	88,34	Angka		
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	83,27	Angka		
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	86,49	Angka		
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	85,3	Angka		
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	89,03	Angka		
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	89,06	Angka		
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	85,85	Angka		
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	83,27	Angka		
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	88,83	Angka		
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	81,22	Angka		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				341.362.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	76,2	%		
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				742.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	100	%		
					Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	15	%		
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	25	%		
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	10	%		
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	4,76	%		
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	100	%		
					Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	93,93	%		
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	100	%		
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	20	%		
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	3	%		
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	25	%		
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	100	%		
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	100	%		
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	100	%		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				857.819.545.000	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
					Persentase pemanfaatan informasi kesehatan	80	%		
					Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	34,28	%		
					Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang	100	%		
					Persentase ketersediaan obat dan vaksin	80	%		
					Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa	100	%		
					Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting	51,42	%		
					Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK	83	%		
					Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa	71,42	%		
					Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta	95	%		
					Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	42,85	%		
					Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang	57,14	%		
					Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	28,57	%		
					Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	28,57	%		
					Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten	28,57	%		
					Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	100	%		
					Persentase pemenuhan fasilitas layanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	100	%		
					Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	42,85	%		
					Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang	57,14	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo	100	%		
					Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Dr. Moewardi	100	%		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	66,6	%		
					Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang	100	%		
					Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63,9	%		
					Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa	63,9	%		
					Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM	80	%		
					Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%		
					Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%		
					Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%		
					Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	100	%		
					Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta	100	%		
					Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RS Khusus Mata	40	%		
					Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia	60	%		
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				937.959.000	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
					Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	98	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	80	%		
					Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	30	%		
					Persentase SDM kesehatan yang terlatih	20	%		
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				667.000.000	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
					Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	75	%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				1.888.259.000	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
					Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi	82,85	%		
					Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	28,57	%		
					Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,85	%		
					Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	28,57	%		
					Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	28,57	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,85	%		
					Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo	100	%		
					Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Surakarta	95	%		
					Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%		
					Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RS Khusus Mata	50	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				196.062.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase peningkatan perolehan medali	28,18	%		
					Jumlah masyarakat yang bugar	750	Orang		
					Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	50	Orang		
IK2. S2. Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,27	Angka						91.363.923.000	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				23.675.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Jumlah wirausaha muda mandiri	8	Orang		
					Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	50	Orang		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				6.028.042.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	19,17	%		
					Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	23,76	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase cakupan pelestarian seni	100	%		
					Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	47,61	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				23.705.940.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Tingkat partisipasi seni tradisi	8,89	%		
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				298.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase akses literasi sejarah	52,9	%		
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				704.085.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase cagar budaya berperingkat nasional	12,71	%		
					Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	25,13	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				2.265.120.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Nilai survey kepuasan pengunjung museum	89,85	%		
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				34.418.638.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	80,56	%		
					Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	23,08	%		
					Nilai survey kepuasan masyarakat	80	Nilai		
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				268.298.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	84,67	%		
IK3. S2. Indeks Pembangunan Gender	93,53	Angka						1.475.000.000	
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1.375.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	60	%		
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	14,29	%		
IK4. S2. Indeks Pembangunan Keluarga	58,20	Angka						3.428.316.000	
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				1.052.958.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	11	%		
					Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	%		
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	14,29	%		
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				290.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	82,85	%		
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				495.358.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Rasio korban kekerasan terhadap anak	11,5	per 100.000 penduduk		
					Persentase korban kekerasan anak terlayani	100	%		
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				305.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	61,11	%		
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				695.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	65,58	%		
					Unmetneed	10	%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				440.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	32	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran Daerah 3 (S3)									
Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup								251.307.499.000	
			PD. 3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung					251.307.499.000	
IK1. S3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,55	Angka						246.382.499.000	
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				104.843.791.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
					Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air	61,31	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	64,31	%		
					Indeks kinerja sistem irigasi	69,11	Angka		
					Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi	52,37	%		
					Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	77,36	Angka		
					Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	92,21	%		
					Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100	%		
					Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	62,68	Angka		
					Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	34,78	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal	53,26	%		
					Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100	%		
					Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	71,8	Angka		
					Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	54,6	%		
					Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	50,04	%		
					Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100	%		
					Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	62,85	Angka		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	50,00	%		
					Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	100	%		
					Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	67,34	Angka		
					Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	77,78	%		
					Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100	%		
					Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	72,65	Angka		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	76,5	%		
					Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	100	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				63.844.279.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
					Persentase akses air minum layak	91,92	%		
					Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	%		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				5.670.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Penataan Ruang
					Persentase implementasi pemanfaatan ruang	68	%		
					Persentase tertib ruang	56	%		
					Persentase ketersediaan rencana tata ruang	60,71	%		
					Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100	%		
					Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100	%		
					Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100	%		
					Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100	%		
					Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	100	%		
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				778.748.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	100	%		
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				8.548.361.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	4,76	%		
					Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya	2,85	%		
					Persentase pengujian kualitas air	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pemantauan kualitas udara	100	%		
					Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	100	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1.538.667.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	2,02	%		
					Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden	2,6	%		
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				133.740.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Persentase limbah B3 yang terkelola	80	%		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN				844.280.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
					Persentase rekomendasi lingkungan hidup	100	%		
					Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	50	%		
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				1.904.836.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya	10,5	%		
					Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah	31,43	%		
					Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	25	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				240.732.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Persentase pengaduan yang ditangani	100	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				1.968.700.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Persentase sampah yang tertangani	42	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				2.581.455.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	3,7	%		
					Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	1,39	%		
					Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	3,7	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	5	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				44.225.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	44,44	%		
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.963.639.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	70	%		
					Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	2	%		
					Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	2	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	2	%		
					Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	61	%		
					Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	61	%		
					Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	61	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				18.758.156.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	35,4	%		
					Persentase lahan kritis tertangani	0,47	%		
					Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	100	%		
					Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1	0,02	%		
					Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 1	1,38	%		
					Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 1	100	%		
					Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2	0,04	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 2	100	%		
					Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 2	1,72	%		
					Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3	0,03	%		
					Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 3	100	%		
					Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 3	1,64	%		
					Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4	0,03	%		
					Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 4	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 4	1,46	%		
					Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5	0,04	%		
					Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 5	100	%		
					Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 5	1,29	%		
					Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6	0,09	%		
					Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 6	100	%		
					Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 6	2,15	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8	0,04	%		
					Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 8	100	%		
					Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 8	1,03	%		
					Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9	0,04	%		
					Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 9	100	%		
					Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9	1,46	%		
					Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10	0,03	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 10	100	%		
					Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 10	1,03	%		
					Persentase peningkatan produksi bibit	-40	%		
					Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11	0,03	%		
					Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 11	100	%		
					Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 11	1,29	%		
					Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7	0,09	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 7	100	%		
					Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 7	1,55	%		
				PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				2.966.293.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	10	%		
					Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	40	%		
					Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 1	5	%		
					Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 1	100	%		
					Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 2	5	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 2	100	%		
					Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 3	5	%		
					Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 3	100	%		
					Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 4	5	%		
					Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 4	100	%		
					Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 5	5	%		
					Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 5	100	%		
					Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 6	5	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 6	100	%		
					Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 8	5	%		
					Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 8	100	%		
					Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 9	5	%		
					Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 9	100	%		
					Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 10	5	%		
					Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 10	100	%		
					Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura	70	Angka		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	100	%		
					Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 11	5	%		
					Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 7	5	%		
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				5.313.155.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	2,5	%		
					Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1	0,3	%		
					Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2	0,2	%		
					Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3	0,2	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4	0,2	%		
					Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5	0,3	%		
					Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6	0,2	%		
					Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8	0,2	%		
					Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9	0,2	%		
					Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10	0,2	%		
					Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11	0,2	%		
					Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7	0,3	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				551.982.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	10	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				2.725.496.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah	27,5	%		
					Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	1,6	%		
					Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	3,4	%		
					Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	1,7	%		
					Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	2,2	%		
					Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	4,1	%		
					Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	1,8	%		
					Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	2,4	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	1,6	%		
					Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	2,7	%		
					Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	100	%		
					Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	2,9	%		
					Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	2,8	%		
					Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	1,6	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				7.684.499.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	590300,484	SBM		
					Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	39608,43	SBM		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	23599,9	SBM		
					Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	125685,73	SBM		
					Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	122,33	SBM		
					Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	91,75	SBM		
					Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	39480,034	SBM		
					Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	78666,36	SBM		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu	39363,76	SBM		
					Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	78562,37	SBM		
					Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak	39394,34	SBM		
					Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	86438,18	SBM		
					Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	39287,3	SBM		
				PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				13.477.465.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	63,81	%		
					Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	49,7	%		
					Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	51,09	%		
					Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	49,97	%		
					Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	49,36	%		
					Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	49,96	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	49,95	%		
					Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	49,66	%		
					Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	49,57	%		
					Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	49,59	%		
					Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	51,86	%		
					Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	49,64	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	49,08	%		
IK2. S3. Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	4,00	%						4.925.000.000	
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				4.925.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	0,12	%		
					Persentase penanganan darurat bencana	100	%		
					Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik	2,86	%		
					Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	2	%		
Sasaran Daerah 4 (S4)									
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis								12.037.489.765.000	

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PD. 4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif					12.037.489.765.000	
IK1. S4. Indeks Reformasi Birokrasi	81,50	Angka						12.037.489.765.000	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.077.719.213.000	Semua Perangkat Daerah
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	%		Seluruh Perangkat Daerah
					Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	%		Seluruh Perangkat Daerah
					Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi	82	%		RSUD Dr. Moewardi
					Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	82	%		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
					Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo	53,25	%		RSUD Tugurejo
					Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo	35	%		RSUD Kelet Donorejo
					Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	43	%		RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta	33	%		RSJD Surakarta
					Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	46,5	%		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				18.699.123.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
					Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	5,83	%		
					Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	11,94	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				4.048.300.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
					Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	45,38	%		
					Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	43,49	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.775.000.000	Satual Polisi Pamong Praja
					Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum	29,57	%		
					Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah	67,15	%		
					Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina	40,03	%		
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				150.000.000	Satual Polisi Pamong Praja
					Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				229.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	25	%		
				PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				400.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dam Kawasan Permukiman
					Persentase fasilitasi penetapan lokasi	100	%		
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				600.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dam Kawasan Permukiman
					Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				590.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dam Kawasan Permukiman
					Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	100	%		
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				240.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	97	%		
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL				220.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98%	97	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				240.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	16,67	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				24.523.773.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Nilai keterbukaan informasi publik	31	Angka		
					Nilai survey kepuasan komunikasi publik	78	Angka		
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				13.442.779.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	72	%		
					Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	15	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				1.257.329.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	24	%		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				2.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	25	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				780.346.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	25,97	%		
					Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	100	%		
					Persentase peningkatan pengunjung arsip	19	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				103.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	12,19	%		
					Persentase arsip yang diselamatkan	19,47	%		
				PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				1.710.656.000	Sekretariat Daerah
					Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	66	%		
					Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	85,71	%		
					Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	88,1	%		
					Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	60	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	14,29	%		
					Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	64,28	%		
					Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	50	%		
					Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	88,73	%		
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				3.783.000.000	Sekretariat Daerah
					Tingkat efektivitas kerjasama daerah	95	%		
					Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	95	%		
					Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	95	%		
				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				140.639.161.000	Sekretariat Daerah

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	81	%		
					Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	82	%		
					Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	54	%		
				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				2.438.990.000	
					Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	96	%		
					Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	96	%		
					Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	96	%		
					Persentase kabupaten/kota peduli HAM	96	%		
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				4.912.642.000	Sekretariat Daerah

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	87	%		
					Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	85	%		
					Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	85	%		
					Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	83	%		
					Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	78	%		
					Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	85	%		
					Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	81	%		
					Persentase nilai kemandirian BLUD	55	%		
				PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				2.505.000.000	Sekretariat Daerah

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	90	%		
					Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	80	%		
					Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	81	%		
				PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				1.685.000.000	Sekretariat Daerah
					Persentase capaian pelaksanaan APBD	98,7	%		
					Persentase capaian pelaksanaan APBN	95,5	%		
					Persentase realisasi bantuan keuangan	85	%		
					Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	85	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	100	%		
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				390.574.350.000	Sekretariat DPRD
					Persentase layanan bagian humas	95	%		
					Persentase fasilitasi penyusunan raperda	95	%		
				PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				5.814.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi	100	%		
					Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi	100	%		
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				6.653.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	100	%		
					Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian	100	%		
					Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100	%		
					Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	100	%		
					Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian	100	%		
					Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				6.114.433.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	84,02	%		
					Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu	100	%		
					Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	100	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				32.644.010.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan	-25,14	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan	28,17	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang	11,59	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang	18,71	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	-16,7	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	20,29	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang	12,45	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	41,78	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	-15,14	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	19,33	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	19,62	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan	13,51	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	-20,86	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora	13,4	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora	19,93	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora	12,4	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	20,16	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	-18,49	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	20,31	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1	24,91	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang	38,33	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo	4,96	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1	18,18	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang	15,23	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang	13,44	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo	23,68	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	-21,85	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo	12,21	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	20,87	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	-12,81	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	24,01	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	22,01	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	22,39	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta	3,8	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	-23,43	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen	25,05	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	20,24	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta	19,79	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen	20,82	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta	6,58	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen	13,41	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang	30,76	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	-22,24	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo	13,38	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	-24,77	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	20,95	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang	11,83	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	-18,63	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang	11,27	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	20,21	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas	25,25	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	-17,02	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	20,99	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	20,84	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas	19,52	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten	24,85	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas	13,75	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	-25,89	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati	16,61	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten	18,99	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati	15,79	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten	13,42	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung	32,03	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung	23,36	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung	13,59	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	-20,87	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	21,35	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati	13,58	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	-24,67	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal	-25,92	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	20,26	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	20,93	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	-18,76	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal	12,2	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	19,45	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen	19,63	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap	23,27	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen	26,51	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	19,25	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap	16,42	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen	8,21	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan	22,34	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	-25,1	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap	11,83	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	20,49	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	19,89	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan	20,87	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	-13,57	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang	34,47	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang	19,55	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang	13,59	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	-25,13	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	22,12	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	20,24	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan	13,12	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal	66,86	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal	14,12	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	-20,94	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	23	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	25,8	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	19,94	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo	1,76	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	-25,7	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	-25,99	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang	-53,02	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang	16,85	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang	9,11	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	-13,62	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	21,76	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	20,57	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara	22,63	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	20,94	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	14,57	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II	6,61	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara	14,71	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	28,72	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	11,97	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II	18,66	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara	19	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes	44	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga	13,77	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga	-15,51	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes	20,1	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II	12,53	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	20,9	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	-22,19	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes	12,88	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	-17,94	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	20,9	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KAbupaten Wonogiri	12,75	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	10,98	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	-20,99	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	-22,26	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	20,09	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	20,4	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	45,72	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	20,83	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus	12,4	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	30,62	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	21,49	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	21,98	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus	18,96	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar	9,35	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus	7,24	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	-16,8	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara	13,44	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	-21,23	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	21,21	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	-25,11	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	20,31	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	20,31	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali	23,05	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali	19,89	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali	13,03	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	-25,7	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	20,48	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III	21,98	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III	15,09	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III	12,2	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	-17,96	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	20,2	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	9,5	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang	23,93	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang	13,7	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	-20,16	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	19,97	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga	2,24	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga	23,51	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga	6,69	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	20,52	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	-25,36	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal	32,43	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak	23,16	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak	20,8	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal	18,31	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak	10,78	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal	12,95	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	-24,27	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	-25,77	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	20,75	%		
					Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	19,8	%		
					Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	72	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain	-7,67	%		
					Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan	100	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal	13,27	%		
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				13.243.893.000	Badan Kepegawaian Daerah
					Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	100	%		
					Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	100	%		
					Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	100	%		
					Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	100	%		
					Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	100	%		
					Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	100	%		
					Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	100	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				19.589.676.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
					Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	100	%		
					Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	100	%		
					Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	100	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	85	%		
					Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	3,5	Angka		
					Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	100	%		
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				5.050.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
					Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi	100	%		
					Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	100	%		
					Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi	100	%		
					Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi	100	%		
				PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				2.772.186.000	Badan Penghubung

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase ketercapaian pelayanan penghubung	100	%		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				6.073.727.000	Inspektorat
					Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	83	%		
					Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	85	%		
					Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	85	%		
					Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	85	%		
					Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	85	%		

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				2.766.222.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	10,2	%		
					Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korups (IEPK) level 3	10,2	%		
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2.168.341.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Indeks Ideologi Pancasila	3	Nilai		
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.022.991.617.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari Indikator Kinerja Tujuan Daerah PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96% Rasio Gini 0,364									
Sasaran Daerah			**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Daerah**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PD Penanggung Jawab**
Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	**Target**	**Satu-an**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	75	Nilai		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				76.846.013.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Indeks kinerja ormas	75,34	Nilai		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				1.031.422.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Indeks toleransi	74,1	%		
					Indeks penguatan dampak ekonomi	3	%		
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				138.463.763.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Indeks kewaspadaan Nasional	73	Angka		
			TOTAL					**28.526.693.603.000**	

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

4.2.4. Keselarasan RKPD Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024

Rencana kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 ditetapkan selain dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024, juga disusun dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2024. Keselarasan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dengan RKP Tahun 2024 ditunjukkan dengan keselarasan tema pembangunan, prioritas, sasaran dan indikator sasaran, target pengembangan wilayah, dan dukungan program prioritas daerah. Keselarasan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.5.
Keselarasan Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

No	RKP Tahun 2024	RKPD Tahun 2024
A	**Tema Pembangunan**	
	Mempercepat **Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**	Peningkatan **Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata**, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas
B	**Prioritas**	
1	Memperkuat **ketahanan ekonomi** untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan **kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata** berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan **infrastruktur yang merata** dan berkualitas
2	Mengembangkan wilayah untuk **mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan**	
3	Meningkatkan **sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing**	Peningkatan **kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif** secara inklusif dan merata
4	**Revolusi mental** dan **pembangunan kebudayaan**	
5	Memperkuat **infrastruktur** untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan **infrastruktur yang merata dan berkualitas**
6	Membangun **lingkungan hidup**, meningkatkan **ketahanan bencana**, dan **perubahan iklim**	Peningkatan **pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup** dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan **transformasi pelayanan publik**	Perbaikan **tata kelola pemerintahan** yang adaptif dan kolaboratif

Sumber: Bappenas, 2023 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 4.6.
Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Indikator	Target RKP Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2024
1	2	3	4
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0 – 5,4	4,70 – 5,50
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,26 – 4,96	5,44 – 4,94
3	Rasio Gini (Angka)	0,374 – 0,477	0,364
4	Penurunan emisi GRK (%)	27,27	-
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,99 – 74,02	73,43
6	Tingkat Kemiskinan (%)	9,50 – 10,00	9,76 – 8,96
7	Nilai Tukar Petani	105 – 108	107,45
8	Nilai Tukar Nelayan*)	107 – 110	105

Sumber: Bappenas, 2023 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023
*Keterangan: *) Indikator sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan*

Tabel 4.7.
Keselarasan Target Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024 dengan Target Pengembangan Wilayah Jawa Tengah Dalam RKP Tahun 2024

No	Indikator	Target Jawa Tengah dalam RKP Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2024
1	2	3	4
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0 – 5,4	4,70 – 5,50
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,50 – 10,00	9,76 – 8,96
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,26 – 4,96	5,44 – 4,94

Sumber: Bappenas, 2023 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 4.8.
Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
PN 1	**Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)**		
PP1	**Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)**		**7.684.499.000**
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	7.684.499.000
PP2	**Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi**		**107.569.287.000**
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	104.843.791.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	2.725.496.000

No	Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
PP3	**Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan**		**148.962.596.000**
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	8.530.935.000
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	763.000.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.815.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	92.533.194.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.964.297.000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	14.980.185.000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.635.000.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	20.740.985.000
PP4	**Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan**		**51.616.134.000**
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.471.342.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	32.731.667.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	13.119.461.000
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.963.639.000
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.330.025.000
PP5	**Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi**		**25.674.249.000**
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.500.000.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	6.513.853.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	8.901.787.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.350.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	6.408.609.000
PP6	**Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi**		**37.472.523.000**
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	705.000.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.100.000.000

No	Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.649.910.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.510.218.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	524.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	30.869.870.000
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	290.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	823.525.000
PP7	**Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri**		**10.982.539.000**
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	117.640.000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	634.445.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.316.405.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.980.978.000
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.482.628.000
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.450.443.000
PP8	**Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi**		**138.173.575.000**
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.533.575.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	123.700.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	825.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	9.115.000.000
PN 2	**Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan**		**10.115.524.699.000**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5.670.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	675.000.000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.625.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.450.000.000

No	Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	220.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	10.104.884.699.000
PN 3	**Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing**		
PP1	**Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan**		**1.700.000.000**
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	240.000.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	220.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	240.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	305.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	695.000.000
PP2	**Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial**		**591.381.586.000**
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	432.049.926.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	157.106.160.000
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.225.500.000
PP3	**Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan**		**2.321.762.837.000**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.892.500.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	425.769.619.000
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	937.959.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	667.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.888.259.000
PP4	**Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas**		**3.689.017.849.000**
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.687.182.187.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	751.800.000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	341.362.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	742.500.000
PP5	**Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda**		**24.495.476.000**

No	Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.292.360.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.052.958.000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	250.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	229.800.000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	290.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	495.358.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	360.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	20.525.000.000
PP6	**Pengentasan Kemiskinan**		**216.792.361.000**
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	21.742.450.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	78.105.779.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.978.123.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	14.917.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	9.479.940.000
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100.000.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	56.760.528.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	150.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	359.000.000
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	82.640.000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	900.000.000
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	3.217.500.000
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	80.000.000

No	Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	7.722.340.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.150.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	89.140.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.120.525.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	416.326.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.936.730.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	9.894.340.000
PP7	**Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing**		**235.585.117.000**
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	180.415.000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	30.176.915.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.780.000.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.685.787.000
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	5.700.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	196.062.000.000
PN 4	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**		
PP1	**Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter**		**2.168.341.000**
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.168.341.000
PP2	**Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia**		**33.001.987.000**
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	6.028.042.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	23.705.940.000
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	298.800.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	704.085.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.265.120.000

No	Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
PP3	**Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial**		**140.170.583.000**
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	139.139.161.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.031.422.000
PP4	**Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter**		**39.736.936.000**
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	34.418.638.000
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	268.298.000
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.050.000.000
PN 5	**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**		
PP1	**Infrastruktur Pelayanan Dasar**		**22.022.123.000**
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	18.699.123.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.108.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000
PP2	**Infrastruktur Ekonomi**		**473.842.877.000**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	340.675.501.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	4.048.300.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	127.393.110.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	459.100.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.266.866.000
PP3	**Infrastruktur Perkotaan**		**1.725.000.000**
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000
PP4	**Energi dan Kelistrikan**		**7.898.718.000**
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	4.315.593.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.583.125.000
PP5	**Transformasi Digital**		**13.442.779.000**
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	13.442.779.000
PN 6	**Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim**		

No	Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
PP1	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**		**41.392.138.000**
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	778.748.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	8.548.361.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.538.667.000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	133.740.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	844.280.000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.904.836.000
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	240.732.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.968.700.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.781.218.000
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	18.758.156.000
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	2.966.293.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.376.425.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	551.982.000
PP2	**Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim**		**4.925.000.000**
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.925.000.000
PN 7	**Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik**		**1.022.991.617.000**
PP1	**Konsolidasi demokrasi**		**1.022.991.617.000**
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.022.991.617.000
PP2	**Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**		**8.779.078.825.000**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.204.012.941.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	24.523.773.000

No	Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.257.329.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.000.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	780.346.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	103.000.000
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.710.656.000
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.783.000.000
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.500.000.000
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.438.990.000
		PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	4.912.642.000
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.505.000.000
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.685.000.000
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	390.574.350.000
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.814.000.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.653.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	41.620.651.000
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.114.433.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	32.644.010.000
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	13.243.893.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19.589.676.000
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	2.772.186.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.073.727.000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.766.222.000
PP3	**Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional**		**219.901.352.000**
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.441.576.000
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	150.000.000

No	Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	76.846.013.000
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	138.463.763.000
		TOTAL	**28.526.693.603.000**

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

4.2.5. Inovasi Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 dikembangkan berbagai inovasi kebijakan pemerintah daerah. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yaitu Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, serta mendukung pada kebijakan nasional tahun 2024 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Inovasi kebijakan tersebut sebagai berikut.

1. Program "Tuku Lemah Oleh Omah"

Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni masih menjadi salah satu permasalahan yang ada di Jawa Tengah. Kondisi ini menjadi tugas besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengatasi tingginya kesenjangan antara angka ketersediaan dan kebutuhan rumah atau disebut *backlog*. Berdasarkan data dari Disperakim Provinsi Jawa Tengah angka *backlog* di Jawa Tengah pada akhir tahun 2022 sebanyak 372.246 unit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menekan angka *backlog* dengan beberapa program perumahan bersubsidi. Salah satunya adalah program "Tuku Lemah Oleh Omah".

Program Tuku Lemah Oleh Omah adalah program rumah subsidi dari Provinsi Jawa Tengah yang diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu membeli rumah sendiri. Program ini dilaksanakan melalui mekanisme pemberian bantuan sosial material bangunan. Implementasi dari program "Tuku Lemah Oleh Omah" yaitu:

a. Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PB *Backlog*)

Salah satu bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Povinsi Jawa Tengah dalam menyediakan rumah yang layak huni adalah dengan menyediakan bantuan stimulan bagi masyarakat untuk pembangunan rumah dalam rangka pemenuhan *backlog* di Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut PB *backlog*). Bentuk bantuan yang diberikan adalah bantuan sosial barang dengan nilai bantuan yaitu 35 juta rupiah untuk pembelian material bangunan dengan sistem pembelanjaan dilakukan oleh kelompok masyarakat (swakelola) dan 1,8 juta rupiah untuk upah tenaga padat karya. Bantuan yang diberikan berupa stuktur RUSPIN dan komponen arsitektur (dinding, atap, dan lainnya). Beberapa keunggulan RUSPIN yaitu waktu perakitan cepat, hanya dibutuhkan waktu 2 hari untuk merakit rumah

tipe 36 (1 bulan siap ditempati), komponen ringan sehingga mudah dirakit tanpa alat bantu mekanis, mendukung konsep rumah tumbuh, dan sudah teruji tahan gempa (Puslitbang Kementerian PUPR).

Kriteria penerima bantuan adalah:

1) Masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah;
2) Tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
3) Penghasilan dibawah Rp. 3 juta/bulan;
4) Berusia produktif;
5) Bersedia swadaya;
6) Tidak boleh disewakan/dialihkan kepemilikannya;
7) Memiliki lahan dengan kepemilikan yang sah, sesuai dengan tata ruang dan aman dari bencana. Jika belum memiliki lahan, dapat membentuk komunitas (PB Komunitas) dan membeli lahan secara bersama-sama dalam 1 hamparan untuk kemudian dipecah sesuai kavling.

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 sebanyak 1.254 unit rumah PB *backlog* telah dibangun melalui anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 4.3
Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Provinsi Jawa Tengah (PB *Backlog*)

b. Bantuan Sosial Pembangunan Baru Relokasi (PB Relokasi)

PB relokasi merupakan bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat kepada masyarakat miskin yang terkena relokasi program pemerintah. Sasaran dari bantuan ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di rusunawa, rumah liar, sempadan sungai, lokasi rawan bencana, lahan milik pemerintah (KAI, Pelindo, Pemakaman Umum), dimana lokasi-lokasi ini telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk dilakukan relokasi dan harus mencari tempat tinggal baru.

Bantuan stimulan PB relokasi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi yaitu "fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah". Kriteria penerima bantuan PB relokasi dikhususkan bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah, sedangkan kriteria lainnya sama dengan PB *backlog*. Ada 2 jenis PB relokasi:

1) Rumah Tapak (1 lantai)

Besarnya nilai bantuan yaitu 35 juta rupiah untuk bantuan pembelian material bangunan dan 1,8 juta rupiah untuk upah tenaga padat karya. Untuk struktur dan komponen bangunan sama dengan PB *backlog* .

2) Rumah Vertikal/ "OPTIMIS (Omah Panel Tingkat Milik Sejahtera)"

Besarnya nilai bantuan yaitu 50 juta rupiah untuk pembelian material dan 1,8 juta rupiah untuk upah tenaga padat karya. Bantuan yang diberikan berupa struktur RUSPIN 2 lantai tipe 36 (lantai 1: 18 m^2; lantai 2: 18 m^2) dan komponen arsitektur (dinding, atap, dan lainnya).

Gambar 4.4
Pembangunan Baru Relokasi di Provinsi Jawa Tengah (PB Relokasi)

c. Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana (PB Bencana)

Bantuan stimulan kepada masyarakat miskin yang terdampak bencana khususnya yang mengalami tingkat kerusakan berat/roboh atau berada di lokasi rawan bencana melalui bantuan sosial berupa bantuan stimulan material bahan bangunan. Merupakan upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan SPM Perumahan yaitu "penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi". Nilai bantuan sebesar 50 juta rupiah untuk pembelian material bangunan dan 1,8 juta rupiah untuk upah tenaga padat karya. Mekanime dan kriteria penerima bantuan sama dengan PB *backlog* dan PB relokasi.

Gambar 4.5
Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah (PB Bencana)

Melalui Program "Tuku Lemah Oleh Omah" ini terdapat 2 inovasi yang ditonjolkan yaitu:

1) Inovasi Struktur Bangunan
   - Teknologi unggul RUSPIN
   - Efisiensi biaya
   - Efisiensi waktu
   - Jaminan mutu
   - Mudah direplikasi
   - Dapat dikembangkan
2) Inovasi Pemberdayaan Masyarakat
   - Berbasis komunitas
   - Swakelola Pokmas
   - Berbasis lingkungan
   - tata ruang yang berkelanjutan

2. Pengembangan Desa Wisata

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang cukup beragam mulai dari wisata alam, budaya, maupun hasil buatan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian, Jawa Tengah bertekad mengembangkan pariwisata

sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah baik pada skala provinsi hingga skala pemerintah desa.

Dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala desa yang terkait dengan sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk memberdayakan seluruh potensi wisata di desa dengan membentuk dan mengembangkan Desa Wisata. Selain itu juga guna mendukung pengembangan desa wisata, saat ini Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

Kehadiran Desa Wisata diharapkan mampu memberikan dampak ganda (*multiplier effec*t) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Wisata tersebut. Pada sisi yang lain, keberadaan Desa Wisata merupakan salah satu jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar wisata, dimana orientasi pilihan wisatawan telah mengalami pergeseran pada pilihan-pilihan wisata yang menyajikan keasrian wilayah pedesaan, pola hidup masyarakat pedesaan, wisata kembali ke alam (*back to nature*), akomodasi yang mampu memberikan interaksi dengan penduduk setempat (*homestay*) dan produk yang berskala kecil namun unik.

Harapannya dengan Desa Wisata ini produk wisata akan lebih bernuansa natural (alami) sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaan yang ada. Disisi lain pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga menjadi sangat vital, dimana desa wisata diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubah bagi kemajuan pengembangan suatu wilayah/daerah.

Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah telah mengalami perkembangan dari segi jumlah dari tahun 2019-2022 sebagai berikut:

Gambar 4.6
Perkembangan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Jumlah desa wisata terus mengalami kenaikan, namun belum ada data tentang perkembangan kenaikan kelas/perkembangan dari rintisan ke berkembang atau ke maju maupun sebaliknya.

Dalam rangka mendorong pengembangan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah guna menghidupkan perekonomian masyarakat sampai pada tingkat desa, Pemerintah Provinsi memiliki kebijakan pemberian bantuan kepada pemerintah desa di Jawa Tengah dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Adapun dukungan bantuan keuangan yang sudah diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pemberdayaan desa wisata adalah sebagai berikut.

Gambar 4.7
Perkembangan Alokasi Bantuan Keuangan Desa Wisata di Jawa Tengah Tahun 2020-2023

Secara konsisten dari tahun 2020-2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah konsen terhadap pembangunan dan pemberdayaan desa wisata melalui pemberian bankeu desa wisata. Dimana Desa wisata yang telah menerima bantuan dari tahun 2020-2023 berjumlah 604 Desa, dengan total bankeu sebesar 84,3 M.

Desa Wisata Jawa Tengah selain telah mengalami perkembangan dari segi jumlah. Kinerja Desa Wisata di Jawa Tengah juga terlihat dari prestasi di tingkat nasional dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia, antara lain sebagai berikut prestasinya:

1. Tahun 2021
   - Juara 1 ADWI kategori Souvenir (Desa Wisata Sumber Bulu, Kab. Karanganyar);
   - Juara 2 ADWI Kategori Desa Wisata Rintisan (Desa Wisata Pandanrejo, Kab. Purworejo);
   - Juara 3 ADWI kategori Desa Wisata Berkembang (Desa Wisata Karanganyar, Kab. Magelang);
   - Juara 2 ADWI kategori Desa Wisata Maju (Desa Wisata Dieng Kulon, Kab. Banjarnegara);
   - Juara 3 ADWI kategori Souvenir (Desa Wisata Cikakak, Kab. Banyumas);
   - Peringkat 5 ADWI kategori Homestay (Desa Wisata Sangiran, Kab. Sragen);
   - Juara 3 kategori alam BCA Desa Wisata Awards 2021 (Desa Wisata Nadulang, Kab. Pemalang);
   - Juara 1 kategori kreatif BCA Desa Wisata Awards 2021 (Desa Wisata Ngrombo, Kab. Sukoharjo);
   - Juara 2 kategori kreatif BCA Desa Wisata Awards 2021 (Desa Wisata Pagak, Kab. Banjarnegara);

- Juara 1 kategori budaya BCA Desa Wisata Awards 2021 (Desa Wisata Karangturi, Kab. Rembang);
- Juara terbaik kategori digital BCA Desa Wisata Awards 2021 (Desa Wisata Kemuning, Kab. Karanganyar);

2. Tahun 2022
   - 50 Besar ADWI tahun 2022 (Desa Wisata Bugisan, Kab. Klaten dan Desa Wisata Sembungan, Kab. Wonosobo);
   - Juara 1 ADWI Desa Wisata Rintisan (Desa Sambungan);
   - Juara Harapan 2 ADWI Kategori Digital dan Kreatif (Desa Bugisan);
   - Juara 1 Anugerah Pesona Indonesia (API) Awards 2022 kategori Destinasi Belanja Terbaik (Desa Wisata Asap Indah, Desa Wonosari, Kabupaten Demak);
   - Juara 1 Anugerah Pesona Indonesia (API) Awards 2022 kategori Dataran Tinggi (Dusun Girpasang, Kabupaten Klaten);
   - Juara 3 Anugerah Pesona Indonesia (API) Awards 2022 Kategori Wisata Olahraga dan Petualangan (Kalitalang Bike Park , Kabupaten Klaten).

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1. Kebijakan Umum

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah memperhatikan berbagai faktor terutama yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, dalam RKPD Tahun 2024 ini, selain memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), pengembangan wilayah juga memperhatikan 17 (tujuh belas) wilayah ekoregion yang berada di Jawa Tengah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion di Indonesia.

A. 5 (lima) Ekoregion yang seluruhnya berada di wilayah Jawa Tengah
   1) Ekoregion kompleks dataran fluvial Batang – Demak – Pati – Blora. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Batang, Blora, Demak, Grobogan, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Rembang, Semarang.
   2) Ekoregion kompleks pegunungan vulkanik Gunung Muria. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Jepara, Kudus, dan Pati.
   3) Ekoregion kompleks perbukitan vulkanik Gunung Slamet – Merapi. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud
   4) Ekoregion kompleks perbukitan struktural Gunung Beser – Wadaslintang
   5) Ekoregion kompleks dataran fluvial Cilacap

B. 1 (satu) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Banten – DIY – Jakarta – Jawa Barat - Jawa Tengah – Jawa Timur yaitu ekoregion kompleks dataran organic/ coral Jawa. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Jepara, Kendal, dan Rembang.

C. 1 (satu) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Banten – Jakarta – Jawa Barat dan Jawa Tengah yaitu Ekoregion kompleks dataran fluvial Cilegon – Indramayu – Pekalongan. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Brebes, Tegal, Pemalang, dan Batang.

D. 1 (satu) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Banten – Jawa Barat dan Jawa Tengah yaitu Ekoregion kompleks pegunungan vulkanik Gunung Halimun, Gunung Salak, dan Gunung Sawal. Kabupaten di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Cilacap.

E. 1 (satu) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Jawa Barat dan Jawa Tengah yaitu ekoregion kompleks perbukitan struktural Jonggol – Sumedang – Cilacap. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Banyumas, Cilacap, Brebes, dan Tegal.

F. 4 (empat) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Jawa Timur dengan Jawa Tengah yaitu:
   1) Ekoregion kompleks perbukitan struktural Kendal – Pati – Rembang – Tuban – Gresik. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Batang, Blora, Boyolali, Demak, Grobogan, Karanganyar, Kendal, Pati, Semarag, Sragen, Surakarta.
   2) Ekoregion kompleks dataran struktural Rembang – Tuban. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Blora, Grobogan, Kudus, Pati, dan Rembang.

3) Ekoregion kompleks pegunungan vulkanik Lawu Utara. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri.
4) Ekoregion kompleks perbukitan karst Pati – Rembang – Tuban. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Blora, Kudus, Pati, Rembang, Grobogan

G. 3 (tiga) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Jawa Timur, DI. Yogyakarta, dan Jawa Tengah
1) Ekoregion kompleks dataran vulkanik Bantul – Nganjuk – Probolinggo. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Boyolali, Karanganyar, Klaten, dan Magelang.
2) Ekoregion kompleks perbukitan struktural Wonosari – Trenggalek. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri.
3) Ekoregion kompleks perbukitan karst Gunungkidul. Kabupaten di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Wonogiri.

Sementara itu, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Arah diarahkan pada sektor pertanian, industri dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah. Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan di Jawa Tengah harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang serta melakukan upaya mitigasi dan adaptasi dan penanganan yang bersifat hulu-hilir. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan degradasi lingkungan yang menjadi ancaman di Jawa Tengah terutama pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi pengembangan tinggi dan sangat tinggi. Selain itu, dalam rangka untuk pemerataan pembangunan di Jawa Tengah maka upaya pembangunan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan/disparitas antar wilayah maupun di dalam wilayah melalui peningkatan aksesibilitas dan sumberdaya manusia, pengoptimalan sektor unggulan.

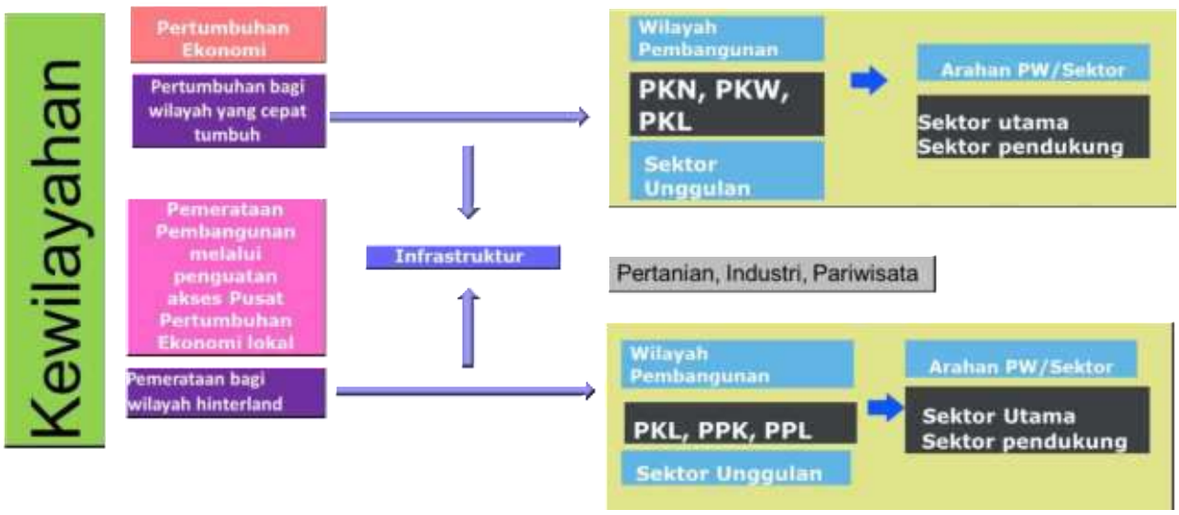

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 5.1
Konsep Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

5.2. Arahan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Kondisi umum wilayah yang dikaitkan dengan adaptasi dan mitigasi terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim, pengembangan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 4 (empat) koridor yaitu:

1. Koridor yang dikembangkan dengan percepatan, pengendalian dan rehabilitasi sebagai upaya pengurangan risiko bencana di sepanjang Koridor Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa;
2. Koridor yang dikembangkan dengan memantabkan pembangunan serta pengendalian di sepanjang koridor Semarang hingga Solo dan Koridor Jepara-Kudus-Rembang;
3. Koridor yang dikembangkan dengan percepatan dengan mitigasi berada pada koridor Utara-Selatan di bagian barat Jawa Tengah di sepanjang Koridor Brebes hingga Cilacap dan koridor Rembang-Blora di bagian timur Jawa Tengah; dan
4. Koridor yang dikembangkan dengan percepatan dan upaya konservasi karena merupakan bagian hulu di Jawa Tengah berada pada koridor wilayah tengah Jawa Tengah.

Atas dasar itu, pengembangan wilayah Jawa Tengah ditujukan pada upaya: (1) ekspansi/perluasan yaitu memperluas cakupan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah; dan (2) konsolidasi/pemantapan yaitu mengintensifkan sistem keruangan yang ada supaya sesuai dengan peran dan fungsinya. Melalui tujuan dimaksud, maka pola pengembangan yang dilakukan adalah secara (1) Dispersi/Menyebar berupa penyebaran kegiatan ke seluruh bagian wilayah; (2) Konsentrasi/Mengumpul berupa pemusatan kegiatan pada pusat-pusat tertentu.

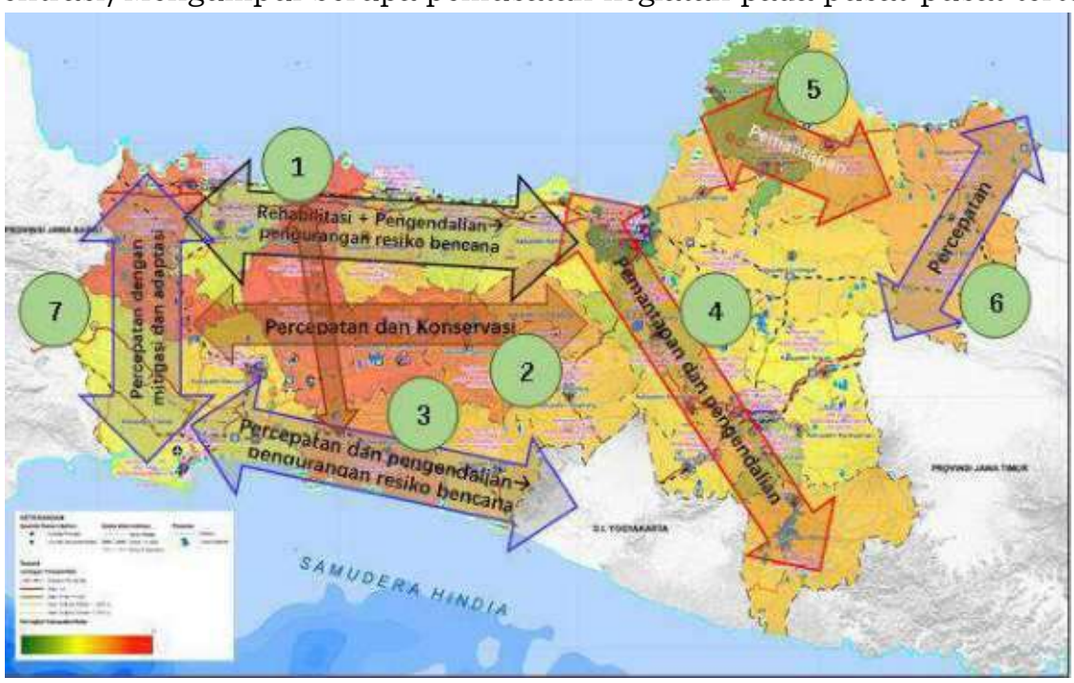

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Revisi RTRW)

Gambar 5.2
Arahan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Strategi penanganan yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan gambar di atas adalah sebagai berikut.

1. Strategi penanganan (1): rehabilitasi dan pengendalian pengurangan risiko bencana, di antaranya:

a. Merehabilitasi prasarana perkotaan terdampak bencana perubahan iklim di wilayah pesisir utara (Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak);
b. Mitigasi bencana dengan penguatan desain struktur infrastruktur, adaptasi dan harmoni dengan alam;
c. Pengendalian pertumbuhan perkotaan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung;
d. Optimalisasi dan pengembangan kawasan industri;
e. Pelestarian dan pengendalian lahan sawah dilindungi;

2. Strategi penanganan (2): peningkatan pembangunan dan konservasi dengan pemanfaatan jasa lingkungan, di antaranya:
   a. Pemantapan pusat pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan konservasi lingkungan untuk wisata hijau; pengembangan wisata hijau (berbasis konservasi);
   b. Pengendalian (pengawasan dan penertiban) dan rehabilitasi kawasan lindung;
   c. Pengembangan prasarana dan sarana yang sesuai untuk mendukung mitigasi bencana;
   d. Optimalisasi pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata strategis.
3. Strategi penanganan (3): percepatan dan pengendalian guna pengurangan risiko bencana dan pengendalian ruang pertahanan negara, di antaranya:
   a. Pemantapan jalur ekonomi lintas selatan;
   b. Inisiasi pengembangan kawasan industri di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap;
   c. Peningkatan desain struktur untuk mitigasi bencana terhadap tsunami dan gempa tektonik;
   d. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
   e. Pemantapan sistem perkotaan menuju perwujudan perkotaan yang kompak;
   f. Pengendalian ruang pesisir untuk pertahanan negara.
4. Strategi penanganan (4) dan (5): pemantapan dan pengendalian koridor Semarang, Solo, Jogja dan Jepara-Kudus-Pati, di antaranya:
   a. Penguatan prasarana dan sarana untuk mendukung pengembangan kawasan wisata Borobudur-Temanggung-Dieng, Borobudur, Boyolali, Solo;
   b. Penguatan jalur Jepara-Kudus-Juwana-Pati.
5. Strategi penanganan (6) dan (7): percepatan dan mitigasi bencana, di antaranya:
   a. Peningkatan akses di Brebes-Cilacap dan Blora-Rembang;
   b. Peningkatan kerapatan jaringan pendukung di Brebes-Cilacap dan Blora-Rembang;
   c. Pengembangan kawasan perbatasan;
   d. Penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk pengendali banjir dan kekeringan.

5.3. Arahan Per Wilayah Pengembangan

Wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) wilayah pengembangan (WP) meliputi WP Kedungsepur, WP Jekutibanglor, WP Purwomanggung, WP Subosukawonosraten, WP Bregasmalang, WP Barlingmas-

cakeb, dan WP Petanglong. Pengembangan tujuh WP tersebut bertujuan untuk lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk, serta menciptakan pemerataan pembangunan berciri kuat terciptanya produk unggulan.

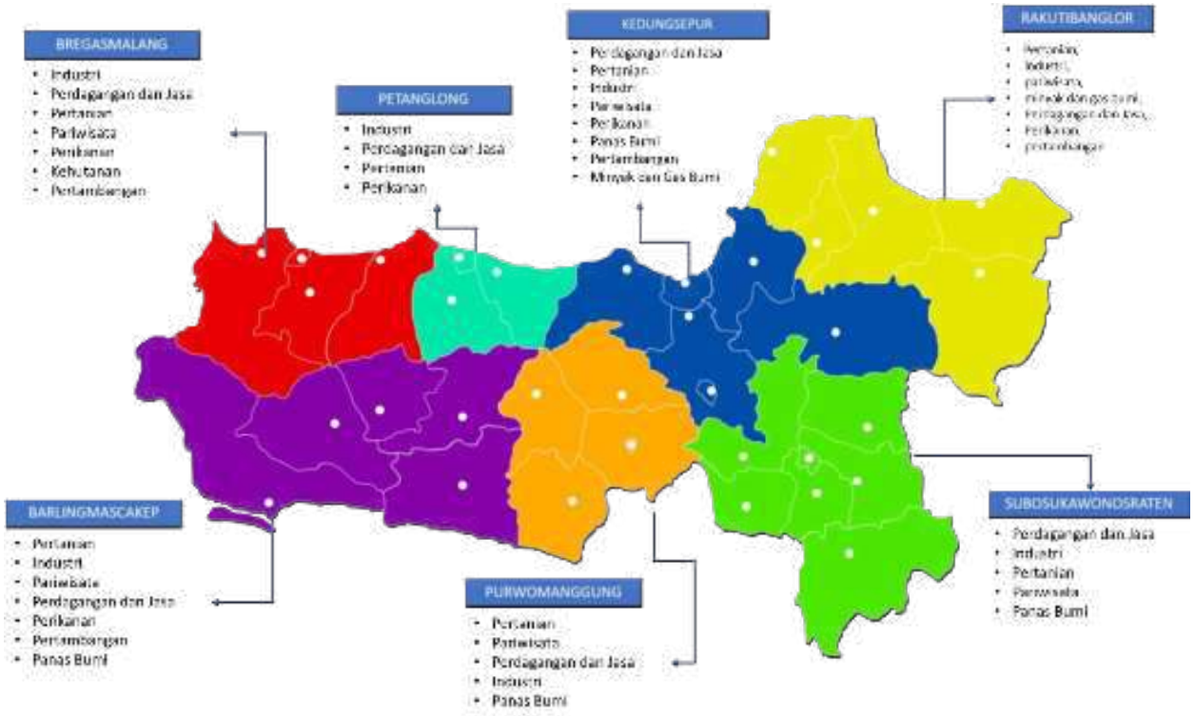

Sumber: Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Gambar 5.3
Sektor Unggulan Wilayah Pengembangan Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Arahan pengembangan wilayah di tujuh wilayah pengembangan tersebut pada tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.3.1. Wilayah Pengembangan (WP) Kedungsepur

a. Analisis kinerja pembangunan WP Kedungsepur

Kondisi WP Kedungsepur dapat digambarkan memiliki kesenjangan/ disparitas tinggi. Hal ini ditunjukkan dari gambaran Kota Semarang dan Kota Saltiga yang memiliki PDRB per kapita tinggi di atas rata-rata nasional, serta Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata Jawa Tengah. Sedangkan Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan memiliki PRDB per kapita di bawah rata-rata Jawa Tengah. Kondisi tersebut menggambarkan terjadi kesenjangan/disparitas antara *primary city* dengan *secondary city*.

Selanjutnya, untuk capaian kinerja pembangunan makro di WP Kedungsepur yang masih memerlukan perhatian karena di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah dari aspek penanganan pengangguran. Capaian tingkat pengangguran terbuka (TPT) empat kabupaten/kota di WP Kedungsepur pada tahun 2022 di bawah capaian TPT provinsi. Secara rata-rata angka kemiskinan di WP Kedungsepur juga memerlukan perhatian karena di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Secara lengkap capaian kinerja indikator makro pembangunan di WP Kedungsepur pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut..

Tabel 5.1.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kabupaten Grobogan	5,98	11,80	4,40	70,97
2	Kabupaten Demak	5,25	12,09	6,11	73,76
3	Kabupaten Semarang	5,31	7,27	4,81	74,67
4	Kabupaten Kendal	5,69	9,48	7,34	73,19
5	Kota Semarang	5,73	4,25	7,60	84,08
6	Kota Salatiga	5,53	4,73	5,58	84,35
Rata-rata WP		**5,58**	**8,27**	**5,97**	**76,84**
Jawa Tengah		**5,31**	**10,93**	**5,57**	**72,79**
Nasional		**5,31**	**9,57**	**5,86**	**72,91**

Sumber: BPS, 2023

Di WP Kedungsepur terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah di antaranya sektor perdagangan dan jasa, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, *real estate*, serta penyediaan akomodasi dan pengadaan air. Kawasan strategis di WP Kedungsepur yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya antara lain Kawasan Masjid Agung Demak (Kawasan Strategis Provinsi/KSP) dan Candi Gedongsongo (KSP);
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain Kawasan Perkotaan Kedungsepur (Kawasan Strategis Nasional/KSN), Kawasan Industri (KI) Kendal–Semarang–Demak (KSP), dan Kawasan Agropolitan Semarboyong (KSP);
c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup antara lain Kawasan Rawa Pening (KSP).

b. Analisis daya saing WP Kedungsepur

Nilai rata-rata Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) WP Kedungsepur tahun 2022 adalah sebesar 3,577, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,531. Nilai ini merupakan yang tertinggi kedua jika dibandingkan dengan WP lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Dalam tinjauan internal WP Kedungsepur, nilai IDSD Kota Semarang merupakan yang tertinggi yakni sebesar 3,937. Untuk nilai IDSD Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal berada di atas rata-rata nilai IDSD WP Kedungsepur dengan nilai masing-masing sebesar 3,812 dan 3,628. Di sisi lain, nilai IDSD Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak berada di bawah rata-rata nilai IDSD WP Kedungsepur, dengan nilai masing-masing sebesar 3,499, 3,481, dan 3,107. Secara umum, nilai IDSD WP Kedungsepur ini memiliki kecenderungan yang rendah pada dimensi pendidikan, keuangan daerah, dan infrastruktur transportasi. Selain itu, penilaian pada dimensi teknologi dan stabilitas pasar, beberapa kabupaten/kota memiliki nilai sangat rendah terutama Kabupaten Demak.

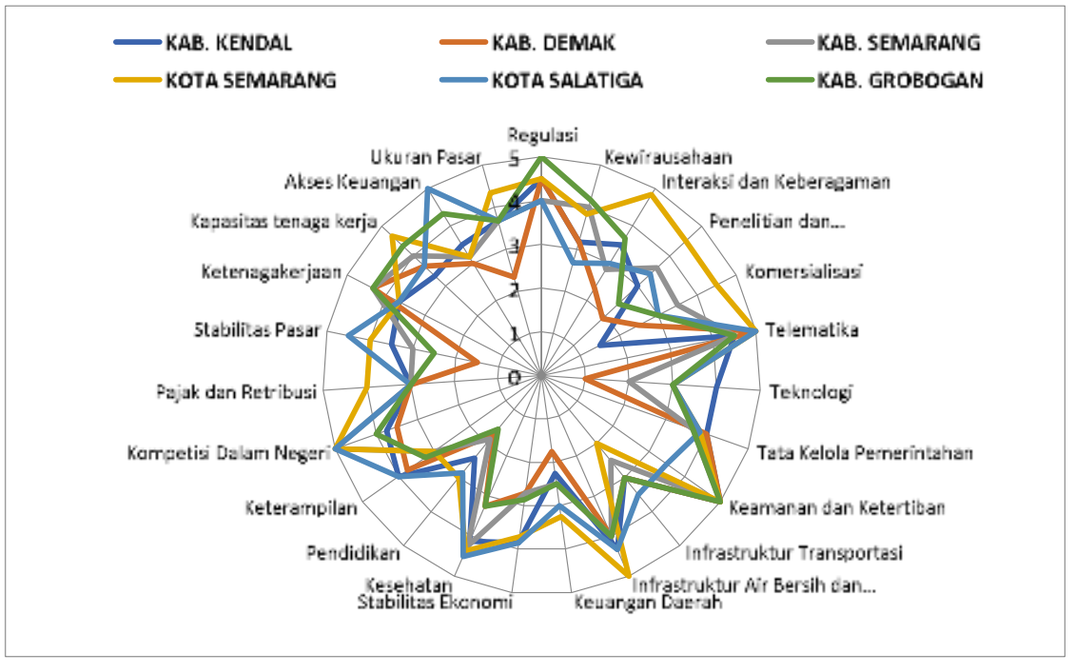

Sumber: Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5.4
Nilai IDSD Kabupaten/Kota di WP Kedungsepur Tahun 2022

Kondisi daya saing WP Kedungsepur masih berada pada tahap penguatan kapasitas daya saing. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai beberapa indikator faktor pendukung daya saing yang masih rendah, antara lain pada dimensi teknologi dan stabilitas pasar. Beberapa indikator yang berkontribusi pada rendahnya nilai daya saing wilayah ini antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya investasi nasional, rendahnya kapasitas infrastruktur jalan, serta kolaborasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi.

Dengan memperhatikan potensi pengembangan perdagangan dan jasa pada wilayah ini, serta memperhatikan fungsi dan peran, maka penguatan interaksi antarkabupaten/kota perlu ditingkatkan dalam rangka efisiensi. Berkaitan dengan hal ini, maka perlu peningkatan kapasitas infrastruktur jalan dan kreativitas untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta penguatan investasi produktif yang memiliki *multiplier effect* terhadap ekonomi lokal tinggi. Di samping itu, penguatan kolaborasi perlu dilakukan antara lain dengan perguruan tinggi lokal untuk peningkatan inovasi dan teknologi.

c. Analisis daya dukung dan daya tampung terhadap air dan pangan di WP Kedungsepur

Daya dukung dan daya tampung air dan pangan di wilayah Kedungsepur telah terlampaui. Dari 6 (enam) Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur status daya dukung dan daya tampung air nya telah terlampaui semua. Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air sehingga diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui pembangunan waduk, bendungan, pengendalian beban pencemar pada sungai serta pemulihan kerusakan *catchment area* pada daerah hulu untuk memenuhi kebutuhan air yang ada di Jawa Tengah.

Daya dukung dan daya tampung pangan yang telah terlampaui yaitu di Kota Semarang dan Kota Salatiga. Sedangkan Kabupaten Semarang, Kendal, Grobogan dan Demak status daya dukung dan daya tampung pangan masih belum

terlampaui. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

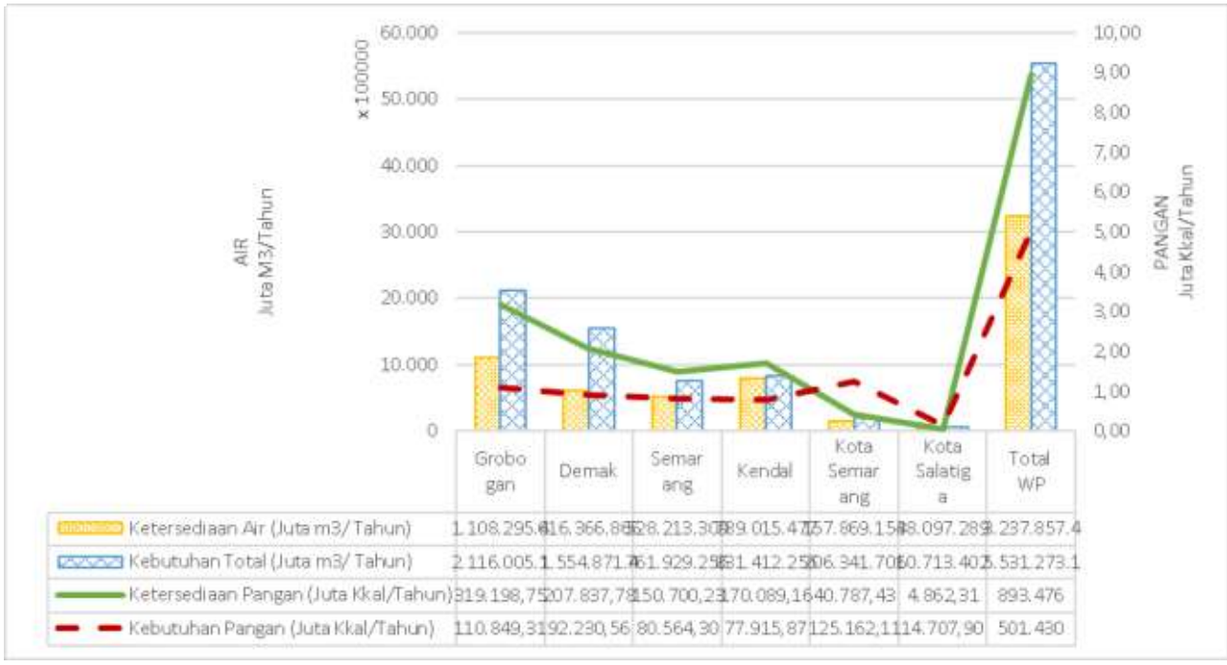

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, 2023

Gambar 5.5
Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur

d. Sasaran kinerja pembangunan WP Kedungsepur

Pengembangan wilayah Kedungsepur tahun 2024 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator makro yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.2.
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kabupaten Grobogan	4,00 – 6,00	10,03 – 10,64	4,18	72,10
2	Kabupaten Demak	5,55 – 5,94	11,02 – 10,42	6,10 – 5,10	73,92
3	Kabupaten Semarang	5,20 – 5,60	7,10 -6,34	4,50 – 4,00	75,20
4	Kabupaten Kendal	5,50 – 5,95	9,39 – 8,15	5,43	75,61
5	Kota Semarang	5,70 – 6,50	4,00 – 3,82	7,60 – 6,50	84,4 – 86,00
6	Kota Salatiga	5,29 – 5,96	4,32 – 4,18	5,70 – 5,20	85,10

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

e. Indikasi program pembangunan WP Kedungsepur

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja indikator makro pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan beberapa strategi dan rencana program yang terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Di WP Kedungsepur terdapat beberapa proyek strategis nasional (PSN), program prioritas strategis nasional (*Majorproject* RPJMN), indikasi program penataan ruang (RTRW) dan rencana program sektoral yang dapat menjadi pengungkit pembangunan, di antaranya:

1. PSN antara lain pembangunan jalan tol (Semarang–Demak, Bawen–Yogyakarta, dan Semarang *Harbour*); pengembangan kereta api Jakarta–Surabaya; pengembangan *underground* Simpang Lima Kota Semarang; pembangunan Bendung Jragung Kabupaten Semarang; rehabilitasi daerah irigasi Glapan (Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan); pembangunan SPAM Semarang Barat, dan pembangunan transmisi pipa gas ruas Cirebon–Semarang;
2. RPJMN antara lain pengembangan kereta api kecepatan tinggi Pulau Jawa (Jakarta–Semarang); pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan metropolitan Semarang; pengamanan pesisir perkotaan pantura Jawa (Kota Semarang dan Kabupaten Demak); revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan tambak di pantura Jawa;
3. RTRW antara lain memadukan pembangunan Kota Semarang dan wilayah sekitarnya didasarkan pada sektor unggulan yang meliputi perdagangan dan jasa, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, *real estate*, penyediaan akomodasi, pengadaan air, dan pariwisata;
4. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) antara lain pengembangan jaringan dan layanan kereta api regional Joglosemar dan Kedungsepur; dan pengembangan jaringan dan layanan kereta api perkotaan Semarang.

Terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada tahun 2024 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten/kota di WP Kedungsepur antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya melalui:
    a. Penyediaan rumah/unit hunian untuk golongan menengah bawah seperti pekerja industri di wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) Semarang-Kendal-Demak dan Kabupaten Grobogan, serta petani yang lahannya ditetapkan sebagai bagian dari LSD;
    b. Peningkatan layanan penyediaan air bersih pada permukiman di kampung pesisir dan padat;
    c. Peningkatan jaminan ketersediaan pangan (makanan pokok baik nabati maupun hewani);
    d. Pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.
2. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas di antaranya melalui peningkatan pendidikan kejuruan yang dibutuhkan sektor industri di WPPI dan Kawasan peruntukan industri (KPI);
3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di antaranya melalui peningkatan pelayanan, sebaran dan kualitas pelayanan kesehatan ditingkat bawah (puskesmas-polindes) terutama di kawasan perbatasan dan perdesaan yang aksesnya masih rendah;
4. Peningkatan sektor ketenagakerjaan di antaranya melalui:
    a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
    b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;

c. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* prasarana dan sarana balai latihan kerja (BLK) dan SMK;
d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
e. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.

5. Pemantapan ketahanan pangan di antaranya melalui:
   a. Pengendalian alih fungsi lahan baku sawah (LSD) ataupun LP2B (sawah utama);
   b. Peningkatan pasokan air baku, khususnya di masa tanam kedua dan ketiga;
   c. Rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi (DI) Dolok, dan DI Penggaron;
   d. Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Kedung Pengilon, DI Pelayaran Sayung Batu, DI Sidopangus, DI Guntur, DI Sucen, DI Senjoyo, Di Dolok, DI Sojomerto;
   e. Rehabilitasi Embung Triharjo, Embung Bancak;
   f. Pemeliharaan Embung Ngerjo;
   g. Penyediaan pasar stasiun agro untuk memudahkan petani menjual produk dan untuk menjaga tingkat harga (menghindari tengkulak).
6. Peningkatan ketahanan air dan lahan berbasis ekoregion di antaranya ditempuh melalui:
   a. Peningkatan ketahanan air, utamanya:
      1) Normalisasi sistem Sungai Silandak Semarang, anak sungai Rawa Pening;
      2) Pembangunan perkuatan tebing Sungai Blukar, Sungai Bodri, Sungai Kendal;
      3) Pemeliharaan Sungai Kendal, Sungai Buntu, Sungai Waridin, Sungai Aji, Sungai Blorong, Sungai Bodri, Sungai Blukar, Sungai Kuto, Sungai Bulanan, Sungai Damar, Sungai Kedondong;
      4) Rehabilitasi pesisir Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang;
      5) Fasilitasi pembangunan waduk dan bendungan di antaranya Waduk Jragung dengan salah satu fungsinya sebagai SPAB Jragung untuk menyediakan SPAM Kota Semarang – Grobogan - Demak, Bendungan Bodri Kabupaten Kendal, Bendung Karet Sungai Bodri Kabupaten Kendal;
      6) Kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Semarang-Demak, CAT Kudus, CAT Kendal, CAT Subah, CAT Sumowono, CAT Ungaran, CAT Rawapening, CAT Salatiga, CAT Magelang-Temanggung;
      7) Pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
   b. Peningkatan ketahanan lahan, utamanya rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS Tuntang, DAS Bodri, DAS Garang; serta pengawasan usaha pertambangan serta penertiban PETI di Wilayah Kedungsepur.

7. Peningkatan daya saing pariwisata di antaranya melalui:
   a. Dukungan promosi bersama untuk daya tarik wisata Jateng *Valley*, wisata religi, kawasan wisata Rawa Pening, Candi Gedongsongo, serta pengembangan daya tarik Kota Lama dan kampung wisata di pinggiran Kota Semarang;
   b. Pengembangan desa wisata berbasis konservasi di dataran tinggi (Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal);
   c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
   d. Fasilitasi *event* promosi pariwisata di kawasan strategis pariwisata provinsi (KSPP) Kota Semarang dan sekitarnya, KSPP Gedongsongo–Rawa Pening dan sekitarnya, dan kawasan pengembangan pariwisata provinsi (KPPP) Kendal dan sekitarnya.
8. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di antaranya melalui:
   a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
   b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan;
   c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
   d. Pendampingan pelatihan *digital marketing* bagi pelaku UMKM.
9. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di antaranya melalui:
   a. Menjaga kemantapan jalan provinsi utamanya pada koridor Semarang - Purwodadi - Blora, Purwodadi – Gemolong – Solo; koridor Singget (ke arah Cepu), Salatiga – Gubug;
   b. Penyediaan layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) pada koridor Stasiun Tawang – Terminal Bawen, Terminal Mangkang – Weleri dan Terminal Penggaron – Gubug via Godong;
   c. Pengembangan simpul transportasi, utamanya peningkatan Terminal Tipe B Purwodadi.
10. Peningkatan ketahanan energi di antaranya melalui fasilitasi pengembangan transmisi SUTET Ungaran-Ampel-Pedan sirkit II, fasilitasi gardu induk (GI) 150 KV KTT KEK Kendal dan SUTT Inc (Weleri – Kaliwungu) dan Tambak Lorok II / Gajah dan SUTT Inc (Sayung – Kudus); pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (Biogas, Gas Rawa, PLTMH, PLTS Atap); fasilitasi pemanfaatan energi alternatif berbasis potensi lokal (pengembangan panas bumi WKP Gunung Ungaran dan WKP Umbul Telomoyo), dan fasilitasi pembangunan pipa gas distribusi Semarang-Batang-Cirebon.

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan kabupaten/kota yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan simpul transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota (terminal tipe C) dan *re-routing* trayek angkutan perkotaan dan/atau pedesaan sebagai upaya integrasi rencana pengembangan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan;
2. Peningkatan penyediaan jaringan jalan wisata antar kabupaten di antaranya ruas jalan kabupaten penghubung Kabupaten Semarang – Kabupaten Demak, Ruas Ambarawa – Limbangan – Bawang;
3. Peningkatan kapasitas jalan antar pusat PKL dan PPK untuk meningkatkan aksesibilitas ke pusat-pusat pertumbuhan/produksi di perdesaan;

4. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, di antaranya melalui penanganan *stunting* dengan peningkatan kualitas air bersih dan peningkatan pengetahuan orang tua terkait pemberian gizi dan pola asuh anak.

Arah pengembangan wilayah untuk WP Kedungsepur secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut.

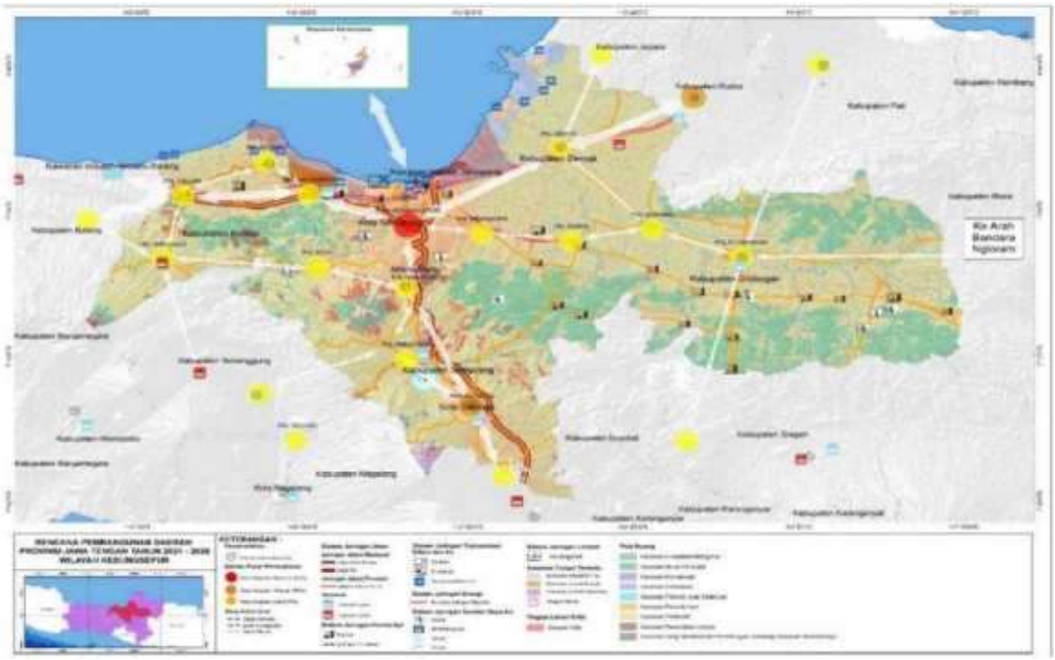

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5.6
Arah Pengembangan WP Kedungsepur

5.3.2. Wilayah Pengembangan Jekutibanglor

a. Analisis kinerja pembangunan WP Jekutibanglor

WP Jekutibanglor merupakan gabungan dari 2 (dua) WP yaitu WP Wanarakuti dan WP Banglor. Secara umum, WP ini menghadapi permasalahan di bidang pendidikan, perekonomian, dan sumber daya lingkungan yang menyebabkan angka kemiskinan tinggi, sejalan dengan tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Kondisi makro pembangunan wilayah Jekutibanglor saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.3.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Jekutibanglor Tahun 2022

No	Kabupaten	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kabupaten Jepara	5,95	6,88	4,10	73,15
2	Kabupaten Kudus	2,23	7,41	3,21	75,89
3	Kabupaten Pati	5,56	9,33	4,45	73,14
4	Kabupaten Blora	2,68	11,53	3,70	69,95
5	Kabupaten Rembang	5,55	14,65	1,76	71,00
Rata-rata WP		**4,39**	**9,96**	**3,44**	**72,63**
Jawa Tengah		**5,31**	**10,93**	**5,57**	**72,79**
Nasional		**5,31**	**9,57**	**5,86**	**72,91**

Sumber: BPS, 2023

Lokasi WP Jekutibanglor berada di utara Jawa Tengah dengan potensi yang dapat dioptimalkan adalah perdagangan dan jasa, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, penyediaan akomodasi, penggalian dan pertambangan. Kawasan strategis yang ada di wilayah pengembangan ini adalah Kawasan Industri Rembang; destinasi pariwisata Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya; kawasan strategis pariwisata Rembang – Lasem dan sekitarnya, serta kawasan pengembangan pariwisata Blora – Cepu dan sekitarnya. Kawasan strategis ini dapat dijadikan daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan.

b. Analisis daya saing WP Jekutibanglor

Nilai rata-rata IDSD WP Jekutibanglor tahun 2022 adalah sebesar 3,271, menurun dari rata-rata tahun sebelumnya yang sebesar 3,392. Nilai rata-rata IDSD wilayah ini merupakan yang tertinggi ke-5. Dalam tinjauan internal WP Jekutibanglor, nilai IDSD yang tertinggi adalah di Kabupaten Rembang sebesar 3,619. Nilai IDSD Kabupaten Kudus merupakan tertinggi ke-2 di wilayah ini dengan nilai sebesar 3,385. Selain itu, nilai IDSD pada Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Blora, masing-masing sebesar 3,238, 3,196, dan 2,917, berada di bawah rata-rata nilai IDSD WP Jekutibanglor. Secara umum nilai ini masih relatif rendah pada dimensi pendidikan, teknologi, serta penelitian dan pengembangan.

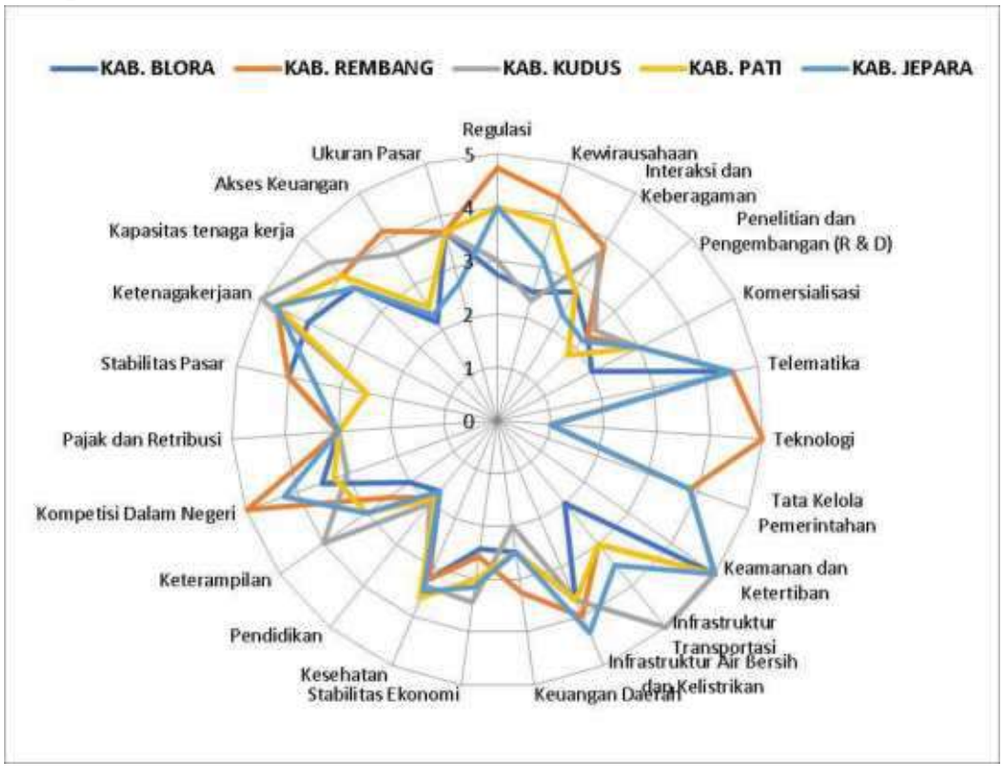

Sumber: Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5.7
Nilai IDSD Kabupaten di WP Jekutibanglor Tahun 2022

Kondisi daya saing WP Jekutibanglor masih berada pada tahap penguatan kapasitas daya saing. Beberapa indikator pada faktor pendukung daya saing wilayah ini masih lemah khususnya pada jumlah masyarakat berpendidikan tinggi maupun berkeahlian (*skilled*), rendahnya kolaborasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi, serta geliat ekonomi lokal pada sektor UMKM yang cenderung pasif. Dalam rangka mendukung pengembangan potensi perdagangan dan jasa pada

wilayah ini maka diperlukan program dalam rangka meningkatkan pendidikan masyarakat, khususnya yang berorientasi pada penguasaan IPTEK serta kemampuan keahlian (*skill*). Di samping itu, perlu penguatan investasi produktif yang memiliki *multiplier effect* terhadap ekonomi lokal tinggi, serta penguatan kolaborasi perlu dilakukan antara lain dengan perguruan tinggi lokal untuk peningkatan inovasi dan teknologi.

c. Analisis daya dukung dan daya tampung air dan pangan di WP Jekutibanglor

Kondisi daya dukung dan daya tampung air di lima kabupaten wilayah Jekutibanglor telah terlampaui. Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air sehingga diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui pembangunan waduk, bendungan, serta rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

Sementara itu status daya dukung dan daya tampung pangan di Jekutibanglor belum terlampaui. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

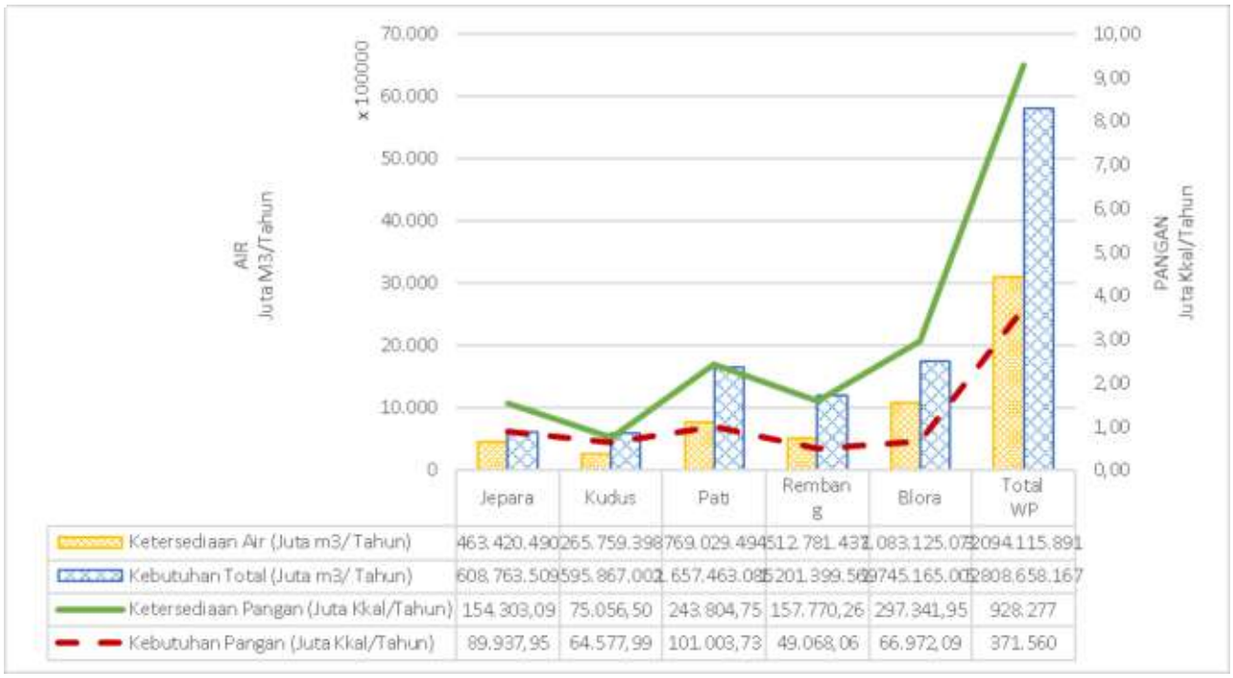

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045,2023

Gambar 5.8
Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Jekutibanglor

d. Sasaran kinerja pembangunan WP Jekutibanglor

Pengembangan wilayah Jekutibanglor untuk tahun 2024 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.4.
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Jekutibanglor Tahun 2024

No	Kabupaten	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kabupaten Jepara	5,20 – 6,20	6,65 – 5,95	4,00 – 3,60	74,00
2	Kabupaten Kudus	2,50 – 3,50	6,96	3,19	76,32 – 76,78
3	Kabupaten Pati	4,36 – 5,28	8,58 - 8,3	3,66 – 3,32	74,34
4	Kabupaten Blora	5,37 – 6,06	10,31-10,23	4,27 – 3,88	71,1
5	Kabupaten Rembang	4,53 – 5,33	13,35-13,19	3,38 – 3,07	72,04

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

e. Indikasi program pembangunan WP Jekutibanglor

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja indikator makro pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan beberapa strategi dan rencana program yang terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Di WP Jekutibanglor terdapat beberapa proyek strategis nasional (PSN), program prioritas strategis nasional (*Majorproject* RPJMN), indikasi program penataan ruang (RTRW) dan rencana program sektoral yang dapat menjadi pengungkit pembangunan, di antaranya:

1. PSN antara lain pembangunan Bendungan Randugunting;
2. RPJMN antara lain pembangunan desa terpadu; pengembangan komoditas unggulan kopi; peningkatan komoditas unggulan tebu; pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap;
3. RTRW antara lain pengembangan sektor unggulan berbasis pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, perikanan, pertambangan dan pariwisata; peningkatan kualitas jalur logistik ke Pelabuhan Tanjung Mas dari kawasan peruntukkan industri (KPI); peningkatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih; serta peningkatan kerapatan dan kualitas jalan khususnya jalan penghubung antarkabupaten dan antarpusat kegiatan lokal;
4. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) antara lain reaktivasi dan peningkatan (revitalisasi) jalur kereta api Semarang-Demak–Kudus–Pati–Juwana–Rembang–Lasem–Jatirogo–Bojonogoro.

Selain itu, terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada tahun 2024 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten di WP Jekutibanglor antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya melalui
   a. Peningkatan penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
   b. Peningkatan layanan air bersih;
   c. Peningkatan layanan sanitasi dan persampahan di kawasan perkotaan/ permukiman padat;
   d. Pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.
2. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas di antaranya melalui peningkatan akses pendidikan dasar sembilan tahun.
3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di antaranya melalui peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (Parang-Nyamuk).

4. Peningkatan sektor ketenagakerjaan di antaranya melalui:
   a. Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (pengolahan non kayu, pengolahan bahan baku lokal (kayu jati), dan lain-lain);
   b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
   c. *Upskilling* terhadap instruktur serta *upgrading* prasarana dan sarana BLK dan SMK;
   d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;
   e. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
5. Pemantapan ketahanan pangan di antaranya melalui:
   a. Pengembangan kegiatan mina industri (perikanan budidaya bandeng) dan perikanan tangkap (kepiting/rajungan); dan perlindungan lahan pangan berkelanjutan;
   b. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Siwayut, DI Kramat, DI Logung;
   c. Pemeliharaan jaringan irigasi DI Medani, DI Kedungsapen, DI Widodaren, DI Bakalan, DI Sentul, Di Siwayut, DI Kedungwaru, DI Kramat, DI Logung;
   d. Pemeliharaan Embung Dengkek, Embung Tegalrejo, LS Ngilen.
6. Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion diantaranya ditempuh melalui:
   a. Peningkatan ketahanan air, utamanya pada fasilitasi penanganan DAS Sungai Juwana, dan fasilitasi inisiasi proses pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dadi Muria; pembangunan Bendungan Karangnongko; pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Lasem, CAT Randublatung, CAT Watuputih, CAT Semarang-Demak, CAT Jepara, CAT Pati-Rembang; serta pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
   b. Peningkatan ketahanan lahan, utamanya pada pengelolaan pertambangan terutama pada jalur tambang di Kendeng; rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Serang, DAS Juwana; lanjutan inisiasi Tahura Muria; pengawasan usaha pertambangan; serta penertiban PETI.
7. Peningkatan daya saing pariwisata di antaranya melalui:
   a. Fasilitasi integrasi pengembangan daya tarik wisata (DTW) Karimunjawa dan aglomerasi wisata religi Pati-Kudus-Demak (Raden Patah, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Kudus);
   b. Pengembangan destinasi wisata baru berbasis potensi lokal (eks desa pertambangan minyak tradisional, kereta api mesin uap dengan bahan bakar kayu jati), dan wisata alam (karst dan hutan jati);
   c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;

d. Fasilitasi *event* promosi pariwisata di wilayah kawasan strategis pariwisata provinsi (KSPP) Karimunjawa dan sekitarnya, KSPP Demak–Kudus dan sekitarnya, serta kawasan pengembangan pariwisata provinsi (KPPP) Pati dan sekitarnya.

8. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di antaranya melalui:
   a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
   b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan;
   c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
   d. Pendampingan pelatihan *digital marketing* bagi pelaku UMKM.
9. Peningkatan investasi di antaranya melalui inisiasi proses pembangunan kawasan industri utamanya memfasilitasi investor masuk, mendorong pemberian insentif, serta kemudahan berusaha;
10. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di antaranya melalui:
    a. Menjaga kemantapan jalan provinsi utamanya pada ruas Lasem – Sale (perbatasan Provinsi Jawa Timur); koridor Cepu – Singget (ke arah Grobogan), koridor Jepara – Keling – Pati, koridor Juwana – Ngawen;
    b. Peningkatan fasilitas keselamatan jalan dengan pemasangan LPJU utamanya pada ruas jalan perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur (Lasem – Sale);
    c. Pengembangan simpul transportasi di antaranya melalui fasilitasi optimalisasi Bandara Ngloram Cepu Kabupaten Blora; fasilitasi optimalisasi Pelabuhan Pengumpan Regional Sluke Rembang; fasilitasi lanjutan rencana reaktivasi jalur non aktif kereta api Semarang – Rembang – Bojonegoro.
11. Peningkatan ketahanan energi di antaranya melalui fasilitasi pengembangan gardu induk 150kV Kudus II/Nalumsari dan SUTT Inc (Kudus – Jepara); fasilitasi rencana pengembangan lapangan pertama (POD I) lapangan RBG Blok I wilayah Kerja Blora; pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (biogas, gas rawa, PLTMH, PLTS atap).

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan kabupaten yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di antaranya melalui penuntasan jalan akses menuju Bandara Ngloram;
2. Peningkatan status Terminal Tipe C Lasem Rembang dan di Kabupaten Jepara menjadi terminal tipe B;
3. Penyediaan infrastruktur dasar industri (jalan menuju KPI dan ketersediaan air baku untuk mendukung industri);
4. Penanganan sampah dan limbah B3 di antaranya melalui percepatan pengembangan TPST;
5. Peningkatan daya saing pariwisata di antaranya melalui pengembangan Kota Pusaka Lasem.

Arah pengembangan wilayah untuk WP Jekutibanglor secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut

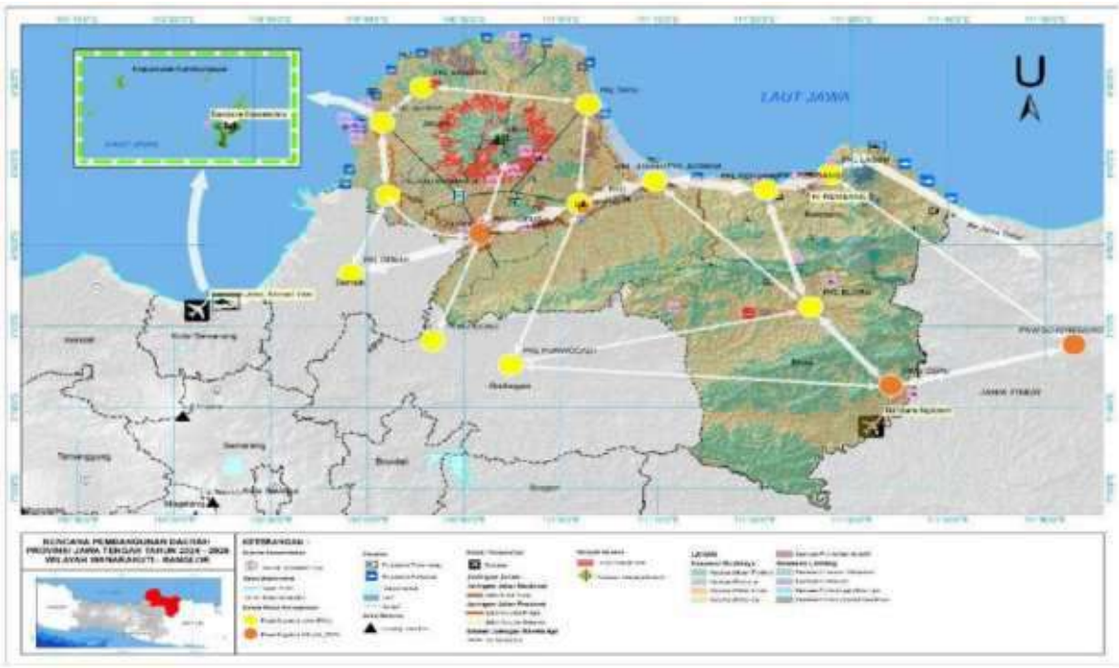

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5.9
Arah Pengembangan WP Jekutibanglor

5.3.3. Wilayah Pengembangan Purwomanggung

a. Analisis kinerja pembangunan WP Purwomanggung

Wilayah pengembangan Purwomanggung berpusat di kawasan Perkotaan Magelang meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. WP Purwomanggung memiliki kesenjangan/disparitas rendah. Kondisi PDRB per kapita Kabupaten berada dibawah rata-rata Jawa Tengah, IPM tidak terlalu jauh disparitasnya dan tingkat kemiskinan mayoritas masih berada diatas rata-rata Jawa Tengah dan Nasional. Secara lengkap capaian kinerja empat indikator makro pembangunan di WP Purwomanggung yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.5.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Purwomanggung Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kabupaten Purworejo	5,36	11,53	4,45	73,60
2	Kabupaten Wonosobo	5,02	16,17	5,01	68,89
3	Kabupaten Magelang	5,46	11,09	4,97	70,85
4	Kabupaten Temanggung	5,20	9,33	2,54	70,77
5	Kota Magelang	5,77	7,10	6,71	80,39
Rata-rata WP		**5,36**	**11,04**	**4,74**	**72,90**
Jawa Tengah		**5,31**	**10,93**	**5,57**	**72,79**
Nasional		**5,31**	**9,57**	**5,86**	**72,91**

Sumber: BPS, 2023

Di WP Purwomanggung terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah di antaranya perdagangan dan jasa,

pengadaan air, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, informasi dan komunikasi, dan *real estate*. Kawasan strategis yang berada di WP Purwomanggung yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain:

a. Kawasan strategis nasional (KSN) dari sudut kepentingan sosial budaya (KSN Borobudur dan sekitarnya); kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya (kawasan Candi Dieng);
b. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup (KSN Taman Nasional Gunung Merapi); kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan lingkungan hidup (kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, kawasan Dataran Tinggi Dieng, kawasan Gunung Sindoro-Sumbing);
c. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain kawasan agropolitan Semarboyong (Semarang, Boyolali, Magelang), dan Sobobanjar (Wonosobo, Banjarnegara).

b. Analisis daya saing WP Purwomanggung

Nilai rata-rata IDSD WP Purwomanggung tahun 2022 adalah sebesar 3,457 meningkat cukup tinggi dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya yang sebesar 3,107. Dalam tinjauan internal WP Purwomanggung, nilai IDSD pada Kota Magelang merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 4,124, diikuti oleh Kabupaten Magelang sebesar 3,476. Untuk nilai IDSD Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo berada di bawah rata-rata nilai IDSD WP Purwomanggung dengan nilai masing-masing sebesar 3,420, 3,247, dan 3,016. Secara umum, nilai IDSD wilayah ini cenderung rendah pada dimensi pendidikan, komersialisasi, pajak dan retribusi, serta stabilitas ekonomi.

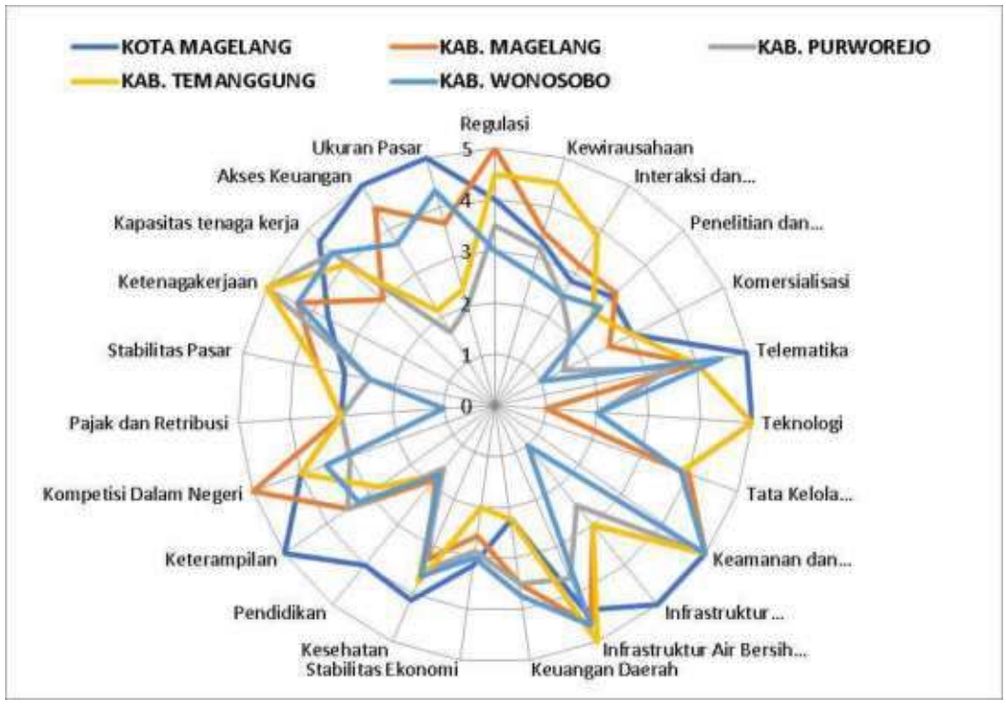

Sumber: Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5.10
Nilai IDSD Kabupaten/Kota di WP Purwomanggung Tahun 2022

Kondisi daya saing WP Purwomanggung memiliki kelemahan pada beberapa indikator antara lain pada rendahnya komersialisasi terhadap inovasi teknologi, kurangnya kolaborasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi, serta

rendahnya pendapatan daerah. Di samping itu, masyarakat wilayah ini memiliki ciri tingkat pendidikan yang rendah, namun berkeahlian (*skilled*), serta dukungan pemerintah untuk peningkatan *skill* melalui sekolah vokasi dan balai latihan kerja sangat tinggi. Dengan memperhatikan potensi pengembangan perdagangan dan jasa pada wilayah ini, maka diperlukan program yang mampu mengungkit tingkat pendidikan masyarakat khususnya yang berorientasi pada penguasaan IPTEK. Di samping itu, perlu program peningkatan kreativitas untuk pendapatan daerah, serta riset dan inovasi teknologi perlu diarahkan pada penguatan hilir untuk mendorong peningkatan komersialisasi. Selain itu juga perlu penguatan kolaborasi, khususnya dengan perguruan tinggi lokal untuk peningkatan inovasi dan teknologi.

c. Analisis daya dukung dan daya tampung air dan pangan di WP Purwomanggung

Status daya dukung dan daya tampung air dan pangan di wilayah Purwomanggung secara garis besar masih baik dengan status daya dukung dan daya tampung air yang belum terlampaui. Namun demikian kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air sehingga diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui penanganan sedimentasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, dan pengembangan kebun regional.

Di sisi lain status daya dukung dan daya tampung pangan di wilayah Purwomanggung telah terlampaui. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

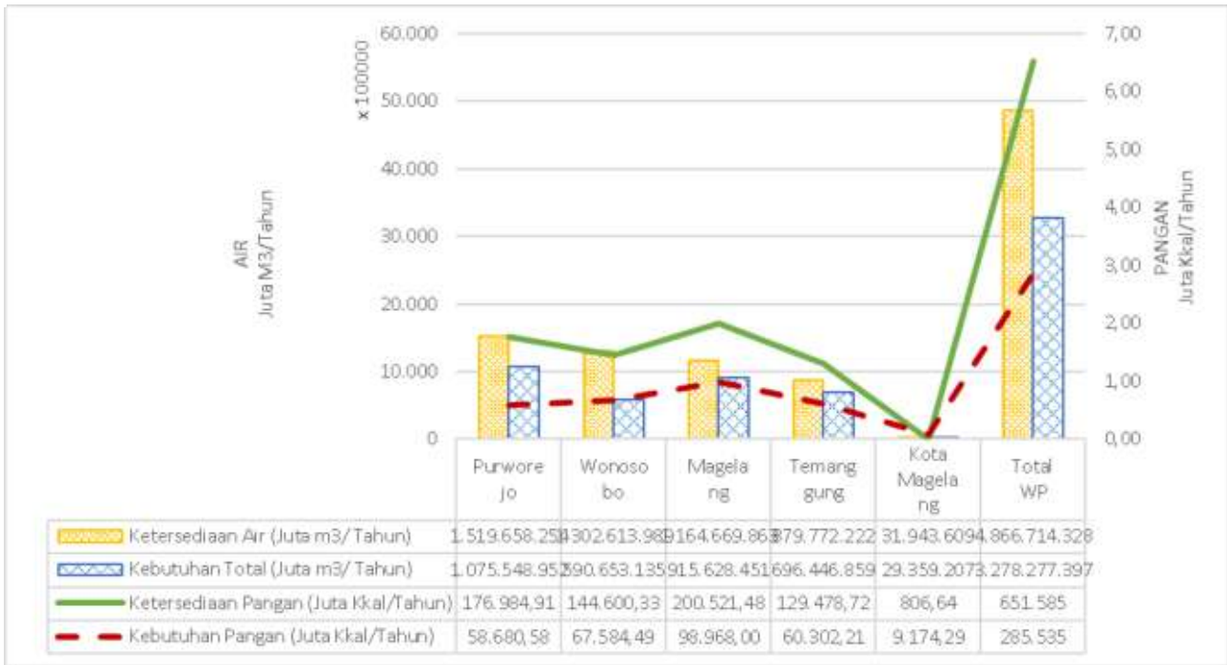

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, 2023

Gambar 5.11
Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Purwomanggung

d. Sasaran kinerja pembangunan WP Purwomanggung

Pengembangan wilayah Purwomanggung tahun 2024 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator makro yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.6.
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Purwomanggung Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kabupaten Purworejo	4,57 - 5,57	10,62 – 9,45	3,27	74,21
2	Kabupaten Wonosobo	3,60 - 4,70	15,08 – 14,50	3,00 – 4,00	70,20
3	Kabupaten Magelang	4,14 – 5,26	10,07 – 9,32	4,91– 4,48	71,42
4	Kabupaten Temanggung	5,27	8,50	2,52	71,77
5	Kota Magelang	5,13-5,77	6,80 – 6,36	6,50 – 5,80	81,94

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

e. Indikasi program pembangunan WP Purwomanggung

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja indikator makro pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan beberapa strategi dan rencana program yang terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Di WP Purwomanggung terdapat beberapa proyek strategis nasional (PSN) dan indikasi program penataan ruang (RTRW) yang dapat menjadi pengungkit pembangunan, di antaranya:

1. PSN antara lain pembangunan jalan tol ruas tol Bawen-Yogya Kabupaten Magelang; pembangunan jalan Magelang-Kaliangkrik-batas Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang; peningkatan jalan akses ke Zona Otorita Borobudur dari Purworejo (Benowo-Bener atau Sedayu-Loano) Kabupaten Purworejo; peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur Kabupaten Magelang; pembangunan tempat pembuangan akhir atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPA/TPST) regional Kabupaten Magelang; peningkatan terminal tipe A Tidar Kota Magelang; pengembangan panas bumi WKP Dieng Area Dieng Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara; pengembangan *geopark* Dieng Kabupaten Wonosobo; pembangunan sekolah vokasi pariwisata/SMK Pariwisata Kabupaten Magelang; pembangunan sekolah vokasi pariwisata/SMK Pariwisata, pembangunan Bendungan Bener, pembangunan *double track* jalur selatan Kabupaten Purworejo;
2. RTRW antara lain pengembangan kawasan perkotaan Purworejo–Kutoarjo menjadi pusat kegiatan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi perdagangan dan jasa, pengadaan air, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, informasi dan komunikasi, *real estate*, dan pariwisata.

Terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada tahun 2024 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten/kota antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya melalui pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.
2. Peningkatan sektor ketenagakerjaan di antaranya melalui:
   a. Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (*handycraft*, makanan minuman, produk hasil pertanian), serta pariwisata;

b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
c. *Upskilling* terhadap instruktur dan *upgrading* prasarana dan sarana BLK dan SMK;
d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;
e. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.

3. Pemantapan ketahanan pangan di antaranya melalui:
   a. Pengembangan *food estate*, pengembangan subterminal agribisnis (STA) Temanggung;
   b. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Galeh, DI Kalibutek;
   c. Pemeliharaan jaringan irigasi DI Loning Kragilan, DI Tangsi, DI Catgawen, DI Watujagir, DI Soropadan, DI Galeh, DI Kalibutek.
4. Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion di antaranya ditempuh melalui:
   a. Peningkatan ketahanan air, utamanya pada kerjasama antarwilayah dalam penangan sedimentasi DAS Bodri, Serayu, dan Bogowonto; pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Wonosobo, CAT Kebumen-Purworejo, CAT Magelang-Temanggung, CAT Subah, CAT Sumowono; dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
   b. Peningkatan ketahanan lahan utamanya pada rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Progo, DAS Serayu, DAS Bogowonto, DAS Wawar Medono; inisiasi pengembangan *Geopark* Kawasan Dieng (Wonosobo – Banjarnegara); persiapan pembangunan TPST Regional Magelang, pembangunan fasilitasi sarana TPS3R di wilayah KSPN Borobudur; dan pengawasan usaha pertambangan serta penertiban PETI.
5. Peningkatan daya saing pariwisata di antaranya melalui:
   a. Dukungan promosi dan *event* wisata di kawasan DPP Borobudur-Dieng;
   b. Pengembangan daya tarik wisata di wilayah Purworejo berbasis pelestarian hutan;
   c. Pengembangan desa wisata berbasis pertanian, perkebunan, kawasan hutan, dan kearifan lokal;
   d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
   e. Fasilitasi *event* promosi pariwisata di wilayah DPP Borobudur-Dieng dan sekitarnya.
6. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di antaranya melalui:
   a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
   b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan;
   c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
   d. Pendampingan pelatihan *digital marketing* bagi pelaku UMKM.

7. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah di antaranya melalui:
   a. Menjaga kemantapan jalan provinsi utamanya pada koridor Kertek – Kaliangkrik, koridor Blabak – Jrakah Ke Arah Boyolali; Bruno – Kutoarjo – Ketawang – Jaringan Jalan Selatan – Selatan; ruas Parakan-Patean;
   b. Penyediaan layanan angkutan umum dikawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) pada koridor Kutoarjo Kabupaten Purworejo – Terminal Borobudur Kabupaten Magelang;
   c. Pengembangan simpul transportasi diantaranya melalui lanjutan pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo (Tahap IV).
8. Peningkatan ketahanan energi di antaranya melalui fasilitasi pengembangan panas bumi WKP Dieng Area Dieng Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara; pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (Biogas, gas rawa, PLTMH, PLTS atap).

Arah pengembangan wilayah untuk WP Purwomanggung secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut

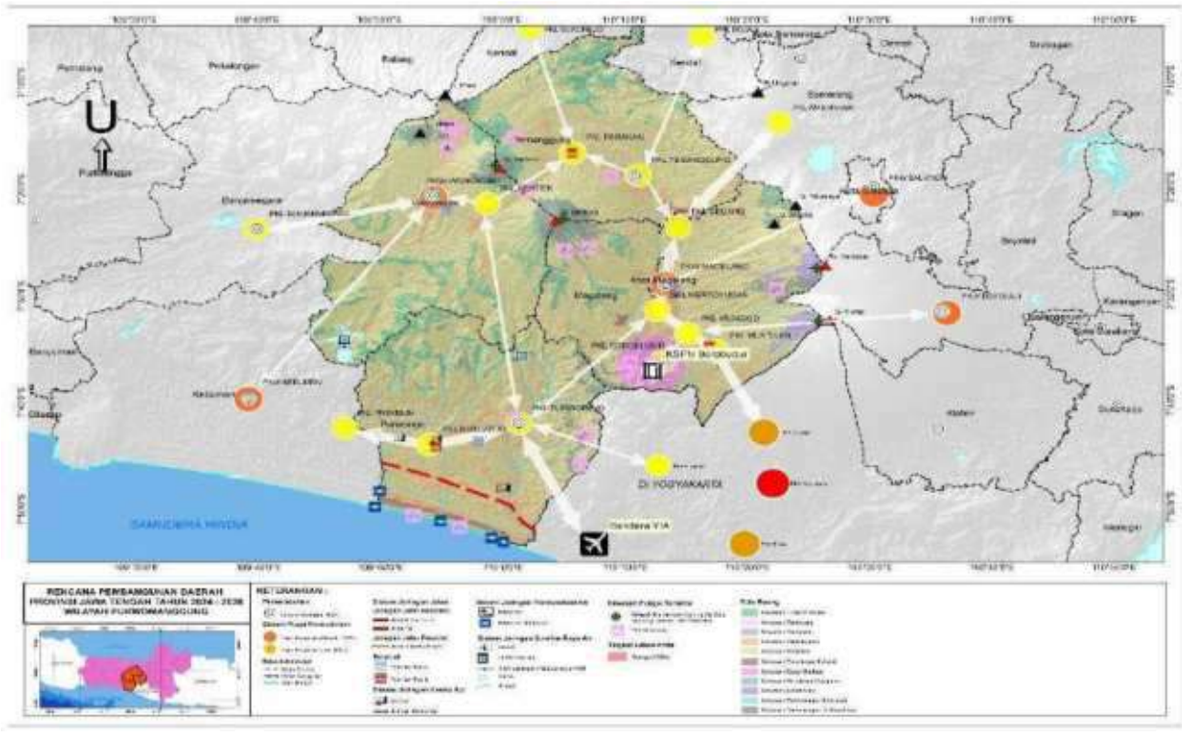

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5.12
Arah Pengembangan WP Purwomanggung

5.3.4. Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten

a. Analisis kinerja pembangunan WP Subosukawonosraten

Wilayah pengembangan Subosukawonosraten berpusat di kawasan perkotaan Surakarta yang meliputi Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, dan Kota Surakarta. Wilayah pengembangan ini mempunyai kesenjangan/disparitas sedang. Kondisi PDRB per kapita antar kabupaten/kota tidak terpaut jauh dan tingkat kemiskinan mayoritas berada dibawah rata-rata Jawa Tengah dan Nasional. Kondisi makro pembangunan wilayah Subosukawonosraten saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.7.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kabupaten Boyolali	6,33	9,82	4,92	74,97
2	Kabupaten Sukoharjo	5,61	7,61	2,47	77,94
3	Kabupaten Karanganyar	5,87	9,85	5,70	76,58
4	Kabupaten Wonogiri	5,63	10,99	1,95	71,04
5	Kabupaten Sragen	5,76	12,94	4,69	74,65
6	Kabupaten Klaten	5,90	12,33	4,31	76,95
7	Kota Surakarta	6,25	8,84	5,83	83.08
Rata-rata WP		**5,90**	**10,34**	**4,27**	**76,46**
Jawa Tengah		**5,31**	**10,93**	**5,57**	**72,79**
Nasional		**5,31**	**9,57**	**5,86**	**72,91**

Sumber: BPS,2023

Di WP Subosukawonosraten terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah di antaranya industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, perdagangan dan jasa, pengadaan air, penyediaan akomodasi, dan *real estate*. Kawasan strategis di WP Subosukawonosraten yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya (KSN Prambanan dan KSN Sangiran); kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya (Candi Cetho–Sukuh, Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran);
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain KSP kawasan agropolitan Girisuka dan Semarboyong; KSP kawasan perkotaan Subosukawonostraten; dan KSP pariwisata terpadu (kawasan Surakarta dan sekitarnya);

1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup antara lain KSP Gunung Lawu.

b. Analisis daya saing WP Subosukawonosraten

Berdasarkan perhitungan nilai IDSD pada tahun 2022, kewilayahan Subosukawonosraten merupakan kewilayahan dengan nilai tertinggi dengan rata-rata nilai 3,62. Bila dilihat secara internal di wilayah Subosukawonosraten, nilai IDSD Kota Surakarta merupakan nilai tertinggi dengan total rata-rata nilai 4,36 atau menjadi posisi tertinggi di Jawa Tengah. Setelah Kota Surakarta, nilai rata-rata kabupaten/kota di wilayah Subosukawonosraten ini secara berurutan adalah Kabupaten Sragen (4,15), Kabupaten Wonogiri (3,85), Kabupaten Sukoharjo (3,39), Kabupaten Karanganyar (3,28), Kabupaten Klaten (3,19), dan nilai terendah adalah Kabupaten Boyolali (3,15).

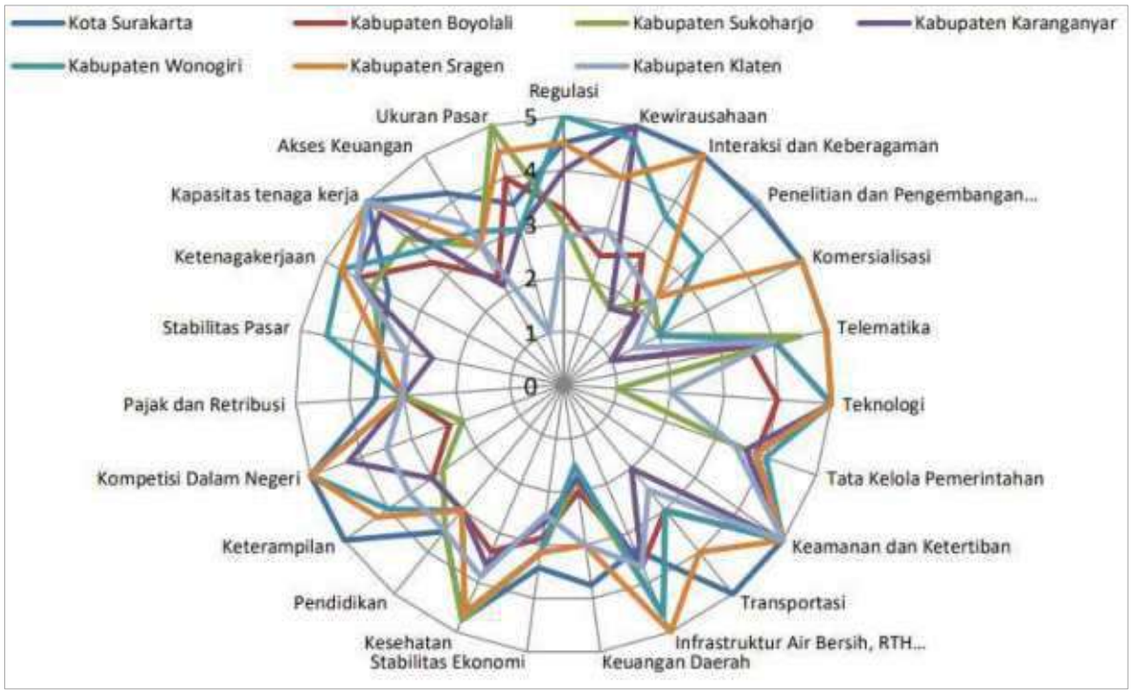

Sumber: Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5.13
Nilai IDSD Kabupaten/Kota di WP Subosukawonosraten Tahun 2022

Kondisi daya saing WP Subosukawonosraten masih pada tahap kapasitas berperan pada tingkat basis kecuali Kabupaten Wonogiri dan Kota Surakarta yang sudah mampu berada pada tahap efisiensi pasar dan inovasi sebagai penunjang daya saing. Untuk itu perlu peningkatan faktor penguat dan penunjang daya saing serta efisiensi pasar untuk meningkatkan kapasitas yang berperan dalam kewilayahan. Sedangkan Kabupaten Wonogiri dan Kota Surakarta dapat menjadi *leading actor* dalam peningkatan daya saing daerah di WP Subosukawonosraten.

c. Analisis daya dukung dan daya tampung air dan pangan di WP Subosukawonosraten

Status daya dukung dan daya tampung air di 6 kabupaten/kota di WP Subosukawonosraten telah terlampaui semua kecuali Kabupaten Wonogiri. Namun demikian daya dukung daya tamping air di Kabupaten Wonogiri akan terlampaui dalam waktu dekat. Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air sehingga diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui penanganan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengembangan SPAM regional.

Sementara itu status daya dukung dan daya tampung pangan di WP Subosukawonosraten belum terlampauai, kecuali untuk Kota Surakarta yang sudah tidak memungkinkan adanya pengembangan untuk lahan pertanian. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

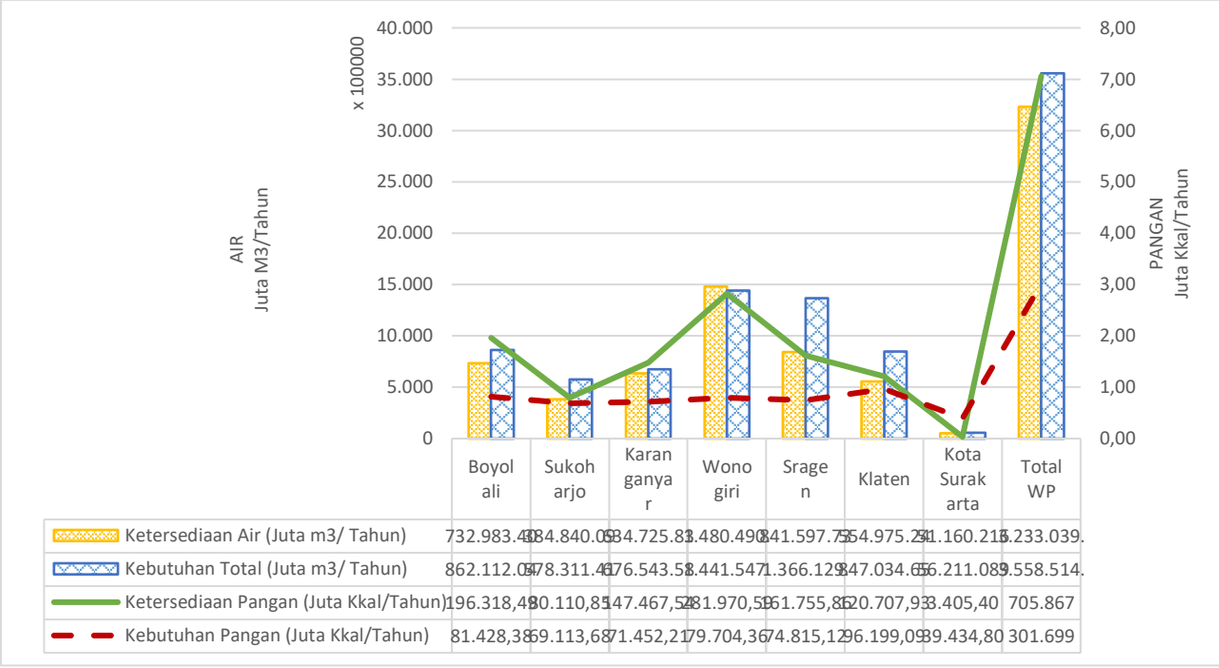

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, 2023

Gambar 5.14
Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten

d. Sasaran kinerja pembangunan WP Subosukawonosraten

Pengembangan wilayah Subosukawonosraten tahun 2024 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.8.
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kabupaten Boyolali	5,65 – 6,50	7,18 – 5,68	3,92	76,31
2	Kabupaten Sukoharjo	4,90 - 5,37	7,20 – 6,96	4,57 – 4,48	78,06
3	Kabupaten Karanganyar	6,00	8,52	5,30	77,20
4	Kabupaten Wonogiri	6,00	9,18 – 6,62	1,95 – 1,75	73,60
5	Kabupaten Sragen	5,90	11,18	4,00	75,21
6	Kabupaten Klaten	6,00-6,50	11,09	4,00	77,30
7	Kota Surakarta	6,30	7,56	5,62 – 5,10	84,02

Sumber: Bappeda Provnsi Jawa Tengah, 2023

e. Indikasi program pembangunan WP Subosukawonosraten

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja indikator makro pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan beberapa strategi dan rencana program yang terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Di WP Subosukawonosraten terdapat beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang dapat menjadi pengungkit pembangunan di antaranya:

a. Penambahan lingkup Tol Solo–Yogyakarta–Kulonprogo;
b. Pengembangan Bandara Adi Soemarmo;
c. Pembangunan Bendungan Pidekso Kabupaten Wonogiri dan Bendungan Jlantah Kabupaten Karanganyar; dan

d. Pembangunan SPAM regional Wososukas (Wonogiri, Solo, Sukoharjo dan Karanganyar).

Selain itu, terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada tahun 2024 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten/kota antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya melalui pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.
2. Peningkatan sektor ketenagakerjaan di antaranya melalui:
   a. Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (*handycraft*, makanan minuman, produk hasil pertanian, *furniture*), serta pariwisata;
   b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
   c. *Upskilling* terhadap instruktur dan *upgrading* prasarana dan sarana BLK dan SMK;
   d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;
   e. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Pemantapan ketahanan pangan di antaranya melalui:
   a. Perlindungan lahan sawah dilindungi (LSD);
   b. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Bapang, DI Cengklik, DI Klego, DI Wonotoro, DI Kepoh, DI Munggur;
   c. Pemeliharaan jaringan irigasi DI Jetu, DI Braholo, DI Cangkring, DI Lemahbang II, DI Nglasem, DI Sidomakmur, DI Walikan, DI Pulo, DI Bonggo, DI Kepoh, DI Trani, DI Jaban, DI Plosowareng, DI Cengklik, DI Gunung Maling, DI Majegan, DI Ngasem, DI Pakelan, DI Pundung, DI Tritis, DI Bapang, DI Parean, DI Garat, DI Klego, DI Tlatar/ Pager;
   d. Peningkatan ketersediaan air baku irigasi untuk masa tanam kedua dan ketiga.
4. Peningkatan daya saing pariwisata di antaranya melalui:
   a. Dukungan promosi dan *event* wisata di kawasan destinasi pariwisata prioritas (DPP) Solo–Sangiran;
   b. Pengembangan desa wisata dan fasilitas pendukungnya;
   c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
   d. Fasilitasi *event* promosi pariwisata di wilayah DPP Solo–Sangiran;
   e. Fasilitasi integrasi pengembangan daya tarik wisata (DTW) Sangiran–Prambanan–Borobudur.
5. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di antaranya melalui:
   a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
   b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan;
   c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
   d. Pendampingan pelatihan *digital marketing* bagi pelaku UMKM.

6. Peningkatan investasi di antaranya melalui fasilitasi pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI) di Kabupaten Wonogiri;
7. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah di antaranya melalui:
   a. Menjaga kemantapan jalan provinsi utamanya pada koridor Surakarta – Grobogan; Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri; koridor Wonogiri – ke arah perbatasan dengan Jawa Timur; koridor Klaten – Boyolali, koridor Boyolali - Jrakah – ke arah Kabupaten Magelang; koridor Palur – Karanganyar – Tawangmangu – ke arah Jawa Timur;
   b. Penyediaan layanan angkutan umum dikawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) pada koridor Solo – Sumberlawang via Sangiran dan Solo – Sukoharjo – Wonogiri;
   c. Peningkatan fasilitas keselamatan jalan dengan pemasangan LPJU utamanya pada jalan akses menuju Kawasan *Geopark* Gunung Sewu (Wuryantoro – Eromoko – Pracimantoro);
   d. Fasilitasi optimalisasi layanan integrasi antar moda transportasi untuk mewujudkan Subosukowonosraten sebagai salah satu pintu masuk ke Jawa Tengah dalam hal menunjang pengembangan pariwisata.
8. Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion di antaranya ditempuh melalui:
   a. Peningkatan ketahanan air utamanya pada pembangunan jaringan Daerah Irigasi Pidekso Kabupaten Wonogiri; fasilitasi dan pembangunan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Regional (SPAM Regional) Wososukas; pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Karanganyar-Boyolali, CAT Wonosari, CAT Ngawi-Ponorogo, dan CAT Eromoko; dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
   b. Peningkatan ketahanan lahan utamanya pada rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Solo, Kawasan Merapi dan Lawu (Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen); pemantapan kawasan Tahura KGPA Mangkunegoro I, fasilitasi sarana TPS3R di daerah pengembangan pariwisata, inisiasi pengembangan *Geopark* Kawasan Bayat; reklamasi bekas tambang (Klaten, Boyolali, Wonogiri), dan pengawasan usaha pertambangan serta penertiban PETI.
9. Peningkatan ketahanan energi, diantaranya melalui fasilitasi pengembangan transmisi SUTET Ungaran-Ampel-Pedan sirkit II, fasilitasi pengembangan transmisi rekondukturing SUTT 150 kV Outlet GITET Ampel; serta pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (biogas, gas rawa, PLTMH, PLTS atap).

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan kabupaten/kota yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan simpul transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota (terminal tipe C), utamanya yang dilewati oleh rencana pengembangan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan; dan
2. Pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) Putri Cempo secara terintegrasi.

Arah pengembangan wilayah untuk WP Subosukawonosraten secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut.

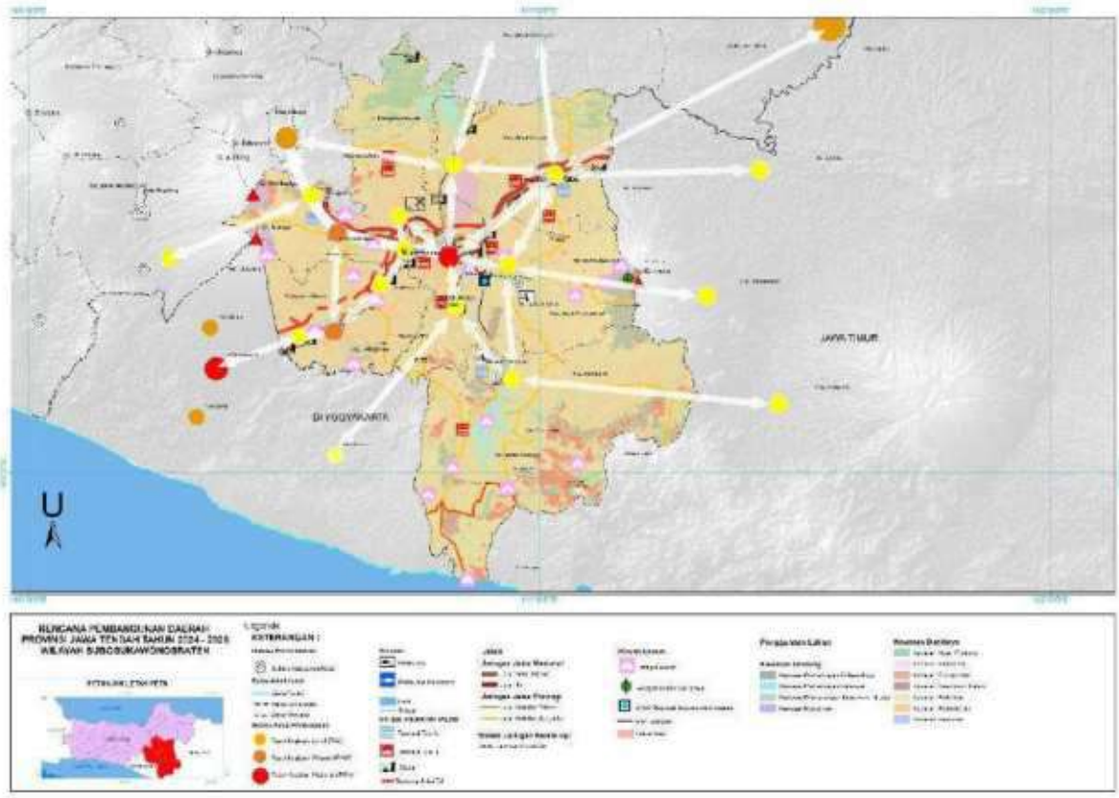

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5.15
Arah Pengembangan WP Subosukawonosraten

5.3.5. Wilayah Pengembangan Bregasmalang

a. Analisis kinerja pembangunan WP Bregasmalang

Wilayah Pengembangan Bregasmalang berpusat di kawasan perkotaan Tegal meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. memiliki kesenjangan/disparitas sedang. Kondisi PDRB per kapita masing-masing kabupaten/kota tidak terpaut terlalu jauh namun mayoritas di bawah rata-rata Jawa Tengah kecuali Kota Tegal diatas rata-rata nasional. IPM semua kabupaten/kota dibawah rata-rata Jawa Tengah. Secara lengkap capaian kinerja indikator makro pembangunan di WP Bregasmalang meliputi pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.9.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kabupaten Brebes	5,61	16,05	9,48	67,03
2	Kabupaten Tegal	5,14	7,90	9,64	69,53
3	Kabupaten Pemalang	5,08	15,06	6,63	67,19
4	Kota Tegal	5,16	7,91	6,68	76,15
Rata-rata WP		**5,25**	**11,73**	**8,11**	**69,98**
Jawa Tengah		**5,31**	**10,93**	**5,57**	**72,79**
Nasional		**5,31**	**9,57**	**5,86**	**72,91**

Sumber: BPS, 2023

WP Bregasmalang berlokasi di utara jawa dengan wilayah perairan pantai yang cukup panjang. Di WP Bregasmalang terdapat beberapa sektor unggulan sebagai potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah, di antaranya industri, perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Kawasan strategis yang berada di WP Bregasmalang yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain kawasan industri Brebes, kawasan agropolitan Manggamas, dan kawasan perkotaan Bregasmalang (KSP).

b. Analisis daya saing WP Bregasmalang

Nilai rata-rata IDSD pada WP Bregasmalang tahun 2022 adalah sebesar 3,202, meningkat dari rata-rata nilai tahun sebelumnya yang sebesar 3,002. Masih seperti tahun sebelumnya, nilai rata-rata daya saing pada wilayah ini merupakan yang terendah dibandingkan wilayah lain di Jawa Tengah. Secara umum dimensi yang perlu diungkit pada wilayah ini adalah pada dimensi pendidikan, komersialisasi, dan keuangan daerah.

Dalam tinjauan internal WP Bregasmalang, nilai IDSD pada Kabupaten Tegal merupakan yang tertinggi yakni sebesar 3,318, diikuti oleh nilai IDSD Kota Tegal sebesar 3,299, dan nilai tersebut berada di atas rata-rata nilai IDSD WP Bregasmalang. Adapun nilai IDSD Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang, masing-masing sebesar 3,197 dan 2,994, berada di bawah rata-rata daya saing wilayah Bregasmalang. Mengingat nilai daya saing pada wilayah Bregasmalang merupakan yang terendah, maka perhatian terhadap dimensi daya saing, khususnya pendidikan, komersialisasi, dan keuangan daerah di keempat kabupaten/kota di WP Bregasmalang perlu ditingkatkan.

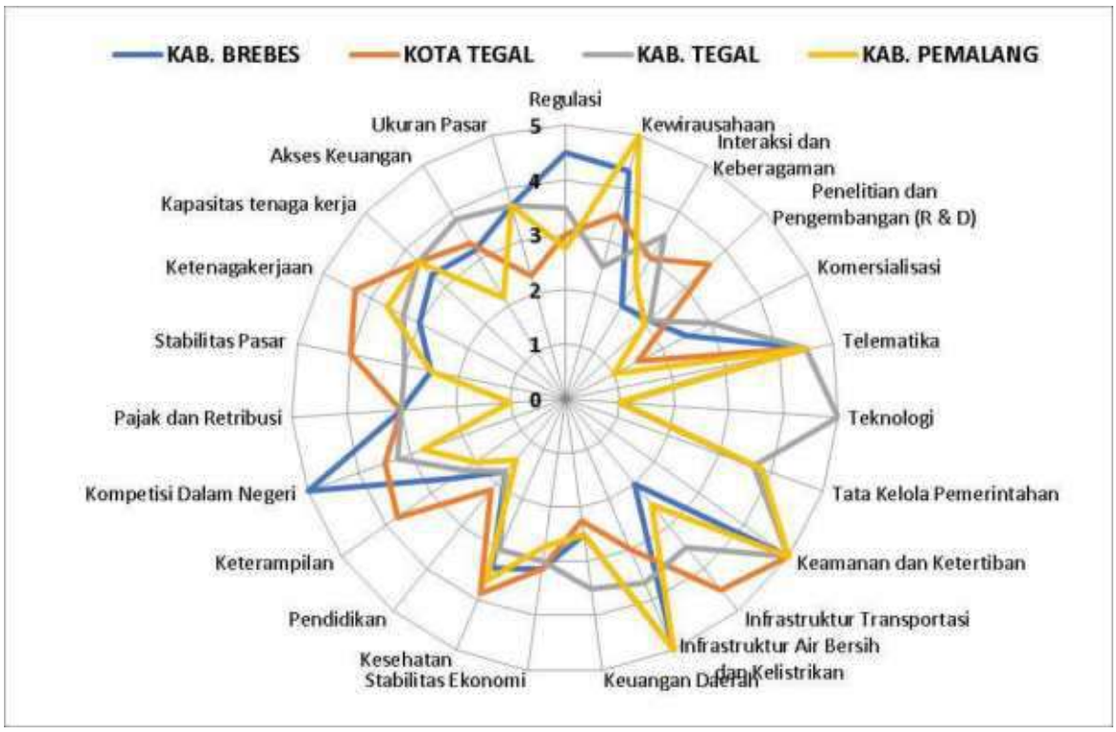

Sumber: Diolah berdasarkan hasil Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5.16
Nilai IDSD Kabupaten/Kota di WP Bregasmalang Tahun 2022

Kondisi daya saing WP Bregasmalang masih berada pada tahap penguatan kapasitas daya saing. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai pada beberapa indikator faktor pendukung daya saing yang masih lemah, antara lain pada relatif rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, angka kemiskinan yang tinggi, lemahnya investasi nasional, dan geliat ekonomi lokal pada sektor UMKM yang cenderung pasif. Mengacu pada arah pengembangan WP Bregasmalang untuk pengembangan potensi industri serta perdagangan dan jasa, diperlukan program yang mampu optimal mengungkit tingkat pendidikan masyarakat, baik pendidikan tinggi maupun vokasi, di samping mendorong investasi produktif yang memiliki *multiplier effect* terhadap ekonomi lokal tinggi.

c. Analisis daya dukung dan daya tampung air dan pangan di WP Bregasmalang

Berdasarkan perhitungan daya dukung dan daya tampung air, wilayah Bregasmalang status daya dukung dan daya tampung air sudah terlampaui kecuali Kabupaten Brebes. Meski demikian melihat persentase antara kebutuhan dan ketersediaan air daya dukung daya tamping air di Kabupaten Brebes juga akan segera terlampaui. Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air sehingga diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui pembangunan bendung, pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Regional (SPAM Regonal) dan konservasi sumber air/CAT.

Sedangkan status daya dukung dan daya tampung pangan di wilayah Bregasmalang hanya Kota Tegal yang telah terlampaui mengingat ketersediaan lahan di Kota Tegal sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan menjadi area pertanian. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

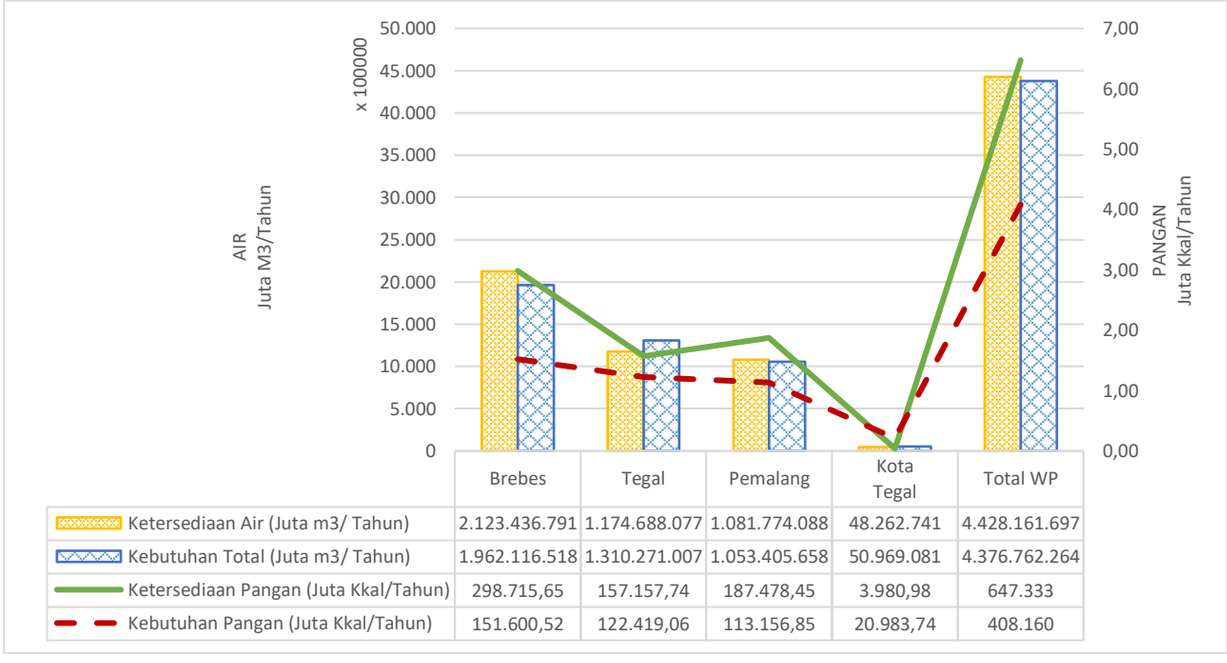

	Brebes	Tegal	Pemalang	Kota Tegal	Total WP
Ketersediaan Air (Juta m3/ Tahun)	2.123.436.791	1.174.688.077	1.081.774.088	48.262.741	4.428.161.697
Kebutuhan Total (Juta m3/ Tahun)	1.962.116.518	1.310.271.007	1.053.405.658	50.969.081	4.376.762.264
Ketersediaan Pangan (Juta Kkal/Tahun)	298.715,65	157.157,74	187.478,45	3.980,98	647.333
Kebutuhan Pangan (Juta Kkal/Tahun)	151.600,52	122.419,06	113.156,85	20.983,74	408.160

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, 2023

Gambar 5.17
Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Bregasmalang

d. Sasaran kinerja pembangunan WP Bregasmalang

Pengembangan wilayah Bregasmalang tahun 2024 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.10.
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kabupaten Brebes	5,65 – 5,84	15,5 – 14,75	9,41 – 8,55	67,5 – 68,3
2	Kabupaten Tegal	5,20 – 5,50	7,80 – 7,10	9,64 – 9,40	71,00
3	Kabupaten Pemalang	4,80 – 5,40	15,18 – 14,18	6,48 – 5,88	68,95
4	Kota Tegal	5,00 – 6,00	6,65 - 5,79	6,53 – 5,93	77,01

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

e. Indikasi program pembangunan WP Bregasmalang

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja indikator makro pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan beberapa strategi dan rencana program yang terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Di WP Bregasmalang terdapat beberapa proyek strategis nasional (PSN), program prioritas strategis nasional (*Majorproject* RPJMN), indikasi program penataan ruang (RTRW) yang dapat menjadi pengungkit pembangunan, di antaranya:

1. PSN antara lain pengembangan jalur kereta api Jakarta–Surabaya, dan pembangunan transmisi pipa gas ruas Cirebon–Semarang;
2. RPJMN antara lain revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan tambak di pantura Jawa;
3. RTRW antara lain pembangunan jalan menuju kawasan industri (KI) Brebes, peningkatan akses Brebes menuju ke selatan, serta konservasi dan pengendalian kawasan atas.

Selain itu, terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada tahun 2024 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten/kota di WP Bregasmalang antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya melalui penyediaan perumahan untuk MBR perkotaan dan sekitar KPI/KI; penyediaan jaringan air bersih permukiman sekitar KPI dan KI; penyediaan jaringan sanitasi dan persampahan permukiman sekitar KPI dan KI; serta pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.
2. Peningkatan sektor ketenagakerjaan di antaranya melalui:
   a. Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (*handycraft*, makanan minuman, produk hasil pertanian), pertanian hortikultura, serta pariwisata (agrowisata);
   b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
   c. *Upskilling* terhadap instruktur dan *upgrading* prasarana dan sarana BLK dan SMK;
   d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;

e. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.

3. Pemantapan ketahanan pangan di antaranya melalui:
   a. Pelestarian LSD/LP2B;
   b. Penataan air untuk kebutuhan pertanian dan industri-domestik;
   c. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Pesayangan, DI Kemaron, DI Sidapurna, DI Gondang, DI Parakan Kidang;
   d. Pemeliharaan jaringan irigasi DI Lenggor, DI Karanganyar, DI Gondang, DI Parakan Kidang, DI Beji, DI Kemaron, DI Pesayangan, DI Sidapurna, DI Gangsa Lumingsir, DI Mejagong;
   e. Rehabilitasi Embung Kabukan.
4. Peningkatan daya saing pariwisata di antaranya melalui:
   a. Pendampingan pengemasan produk wisata alam dataran tinggi (pengemasan *geopark* atau kawasan ekonomi esensial/KEE) agar potensi unik tetap lestari;
   b. Fasilitasi jalan wisata dari Pemalang menuju dataran tinggi;
   c. Dukungan dan fasilitasi promosi dan *event* wisata di Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal;
   d. Pengembangan desa wisata serta fasilitas pendukungnya;
   e. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
5. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di antaranya melalui:
   a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
   b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan;
   c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
   d. Pendampingan pelatihan *digital marketing* bagi pelaku UMKM.
6. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah di antaranya melalui:
   a. Menjaga kemantapan jalan provinsi utamanya koridor Pemalang – Randudongkal – ke arah Kabupaten Purbalingga, koridor Salem – Bumiayu – Sirampok ke arah Pemalang, Kersana – Salem – ke arah Kabupaten Cilacap;
   b. Pengembangan simpul transportasi diantaranya melalui fasilitasi optimalisasi Pelabuhan Pengumpul Tegal.
7. Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion di antaranya ditempuh melalui:
   a. Peningkatan ketahanan air utamanya pada pengendalian banjir dengan perkuatan tebing, sungai/anak sungai Pemali I dan II, Sungai Comal; normalisasi/restorasi Sungai Rambut, Sungai Conang, pembangunan Bendung Karet (Sungai Pemali, Sungai Kabuyutan, Sungai Babakan, dan Sungai Cisanggarung Kabupaten Brebes); pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Regional (SPAM Regional) Bregas; dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
   b. Peningkatan ketahanan lahan utamanya pada rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Pemali, DAS Gangsa, DAS Cacaban, DAS Comal, DAS Babakan; pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove (KEE Kaliwlingi dan KEE Mojo); pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air

tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Tegal-Brebes, CAT Lebaksiu, dan CAT Pekalongan-Pemalang.

8. Peningkatan ketahanan energi di antaranya melalui pembangunan pipa gas transmisi Cirebon-Semarang; Pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (biogas, gas rawa, PLTMH, PLTS atap).

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan kabupaten/kota yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan agropolitan Manggamas;
2. Penyediaan infrastruktur pendukung KPI dan KI terutama jalan menuju KPI/KI dan jaringan air bersih (penyediaan air baku) dan peningkatan ruang jalur perembetan dari *exit* tol untuk ruang-ruang pemasaran/penarik kegiatan baru.

Arah pengembangan wilayah untuk WP Bregasmalang secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut.

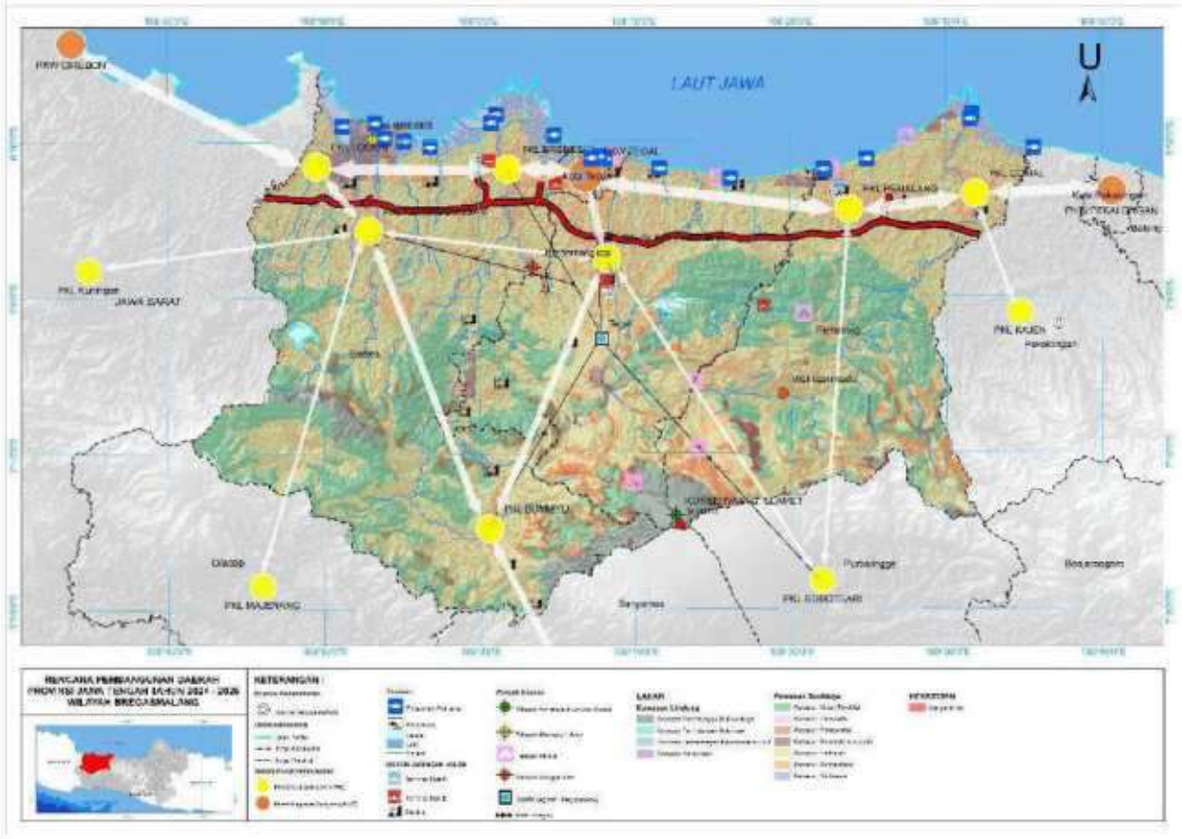

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5.18
Arah Pengembangan WP Bregasmalang

5.3.6. Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb

a. Analisis kinerja pembangunan WP Barlingmascakeb

Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb berpusat di kawasan perkotaan Purwokerto meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen. Wilayah pengembangan ini memiliki kesenjangan/disparitas tinggi dikarenakan PDRB per kapita Kabupaten Cilacap diatas rata-rata Jawa Tengah dan kabupaten lainnya di bawah rata-rata Jawa Tengah. Kondisi sumber daya manusia tidak merata dan investasi berfokus pada *primary city* sehingga terjadi kesenjangan antara *primary city* dengan *secondary city*. Pencapaian kinerja pembangunan makro pada WP

Barlingmascakeb masih membutuhkan upaya ekstra dengan prioritas adalah penanganan kemiskinan mengingat capaian pada tahun 2022 di semua kabupaten/kota wilayah ini di bawah capaian Jawa Tengah dan Nasional. Secara lengkap capaian makro pembangunan di WP Barlingmascakeb pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.11.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Barlingmascakeb Tahun 2022

No	Kabupaten	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kabupaten Banjarnegara	5,29	15,52	6,38	68,61
2	Kabupaten Purbalingga	5,41	15,30	5,23	69,54
3	Kabupaten Banyumas	5,86	12,84	6,05	73,17
4	Kabupaten Cilacap	5,13	11,02	9,62	70,99
5	Kabupaten Kebumen	5,79	16,41	5,92	70,79
Rata-rata WP		**5,49**	**14,22**	**6,64**	**70,62**
Jawa Tengah		**5,31**	**10,93**	**5,57**	**72,79**
Nasional		**5,31**	**9,57**	**5,86**	**72,91**

Sumber: BPS, 2023

Di WP Barlingmascakeb terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah di antaranya pertambangan dan penggalian, pengadaan air, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, informasi dan komunikasi, *real estate*, dan pertanian. Kawasan strategis di WP Barlingmascakeb yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain KSP kawasan industri terpadu (Cilacap dan Kebumen), KSP kawasan agropolitan Sobobanjar (Wonosobo-Banjarnegara), Manggaemas (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas), kawasan strategis pariwisata terpadu (Kawasan Borobudur–Dieng–Kebumen);
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup antara lain KSN kawasan Pangandaran–Kalipuncang–Segara Anakan–Nusakambangan (Pacangsanak); kawasan dataran tinggi Dieng, serta kawasan lereng Gunung Slamet dan sekitarnya (KSP).

b. Analisis daya saing WP Barlingmascakeb

Nilai rata-rata IDSD WP Barlingmascakeb tahun 2022 adalah sebesar 3,240, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,258. Dalam tinjauan internal, nilai IDSD tertinggi adalah pada Kabupaten Purbalingga dengan nilai sebesar 3,519, yang dilanjutkan dengan nilai IDSD Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas masing-masing sebesar 3,357 dan 3,255. Untuk nilai IDSD Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara berada di bawah rata-rata nilai IDSD WP Barlingmascakeb dengan nilai masing-masing sebesar 3,061 dan 3,008. Nilai daya saing WP Barlingmascakeb relatif rendah pada dimensi pendidikan, komersialisasi, pajak dan retribusi, serta keuangan daerah.

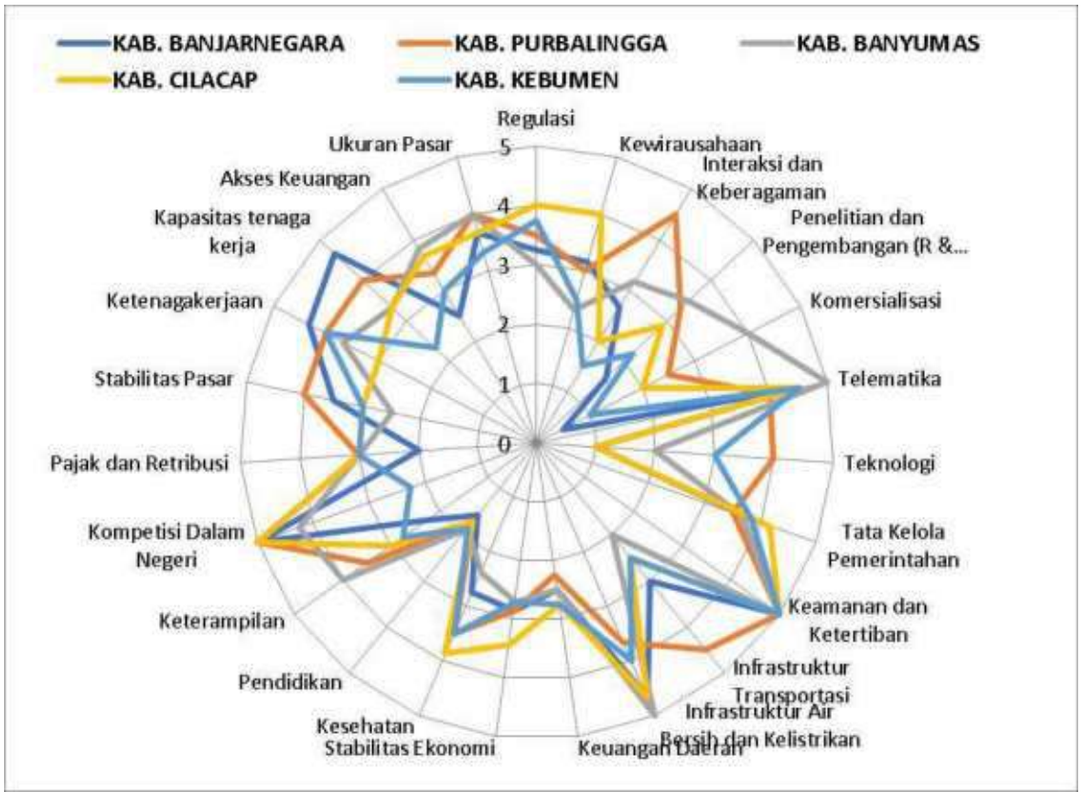

Sumber: Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5.19
Nilai IDSD Kabupaten di WP Barlingmascakeb Tahun 2022

Kondisi daya saing wilayah Barlingmascakeb memiliki kelemahan pada beberapa indikator, antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian masyarakat, rendahnya pendapatan daerah, lemahnya investasi nasional, rendahnya pertumbuhan dan dukungan permodalan untuk petani, nelayan, dan UMKM. Dalam rangka mendukung pengembangan potensi pertanian, serta pertambangan dan penggalian, maka diperlukan upaya meningkatkan pendidikan masyarakat, khususnya yang berorientasi pada peningkatan inovasi dan teknologi pertanian dan pertambangan. Di samping itu, dukungan permodalan pada sektor pertanian perlu dioptimalkan, di samping peningkatan investasi yang diarahkan untuk hilirisasi hasil pertanian.

c. Analisis daya dukung dan daya tampung air dan pangan di WP Barlingmascakeb

Status daya dukung dan daya tampung air dan pangan di wilayah Barlingmascakeb belum terlampaui semua. Namun demikian kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air sehingga diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui rehabilitasi dan konservasi DAS di wilayah tersebut. Selain itu untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

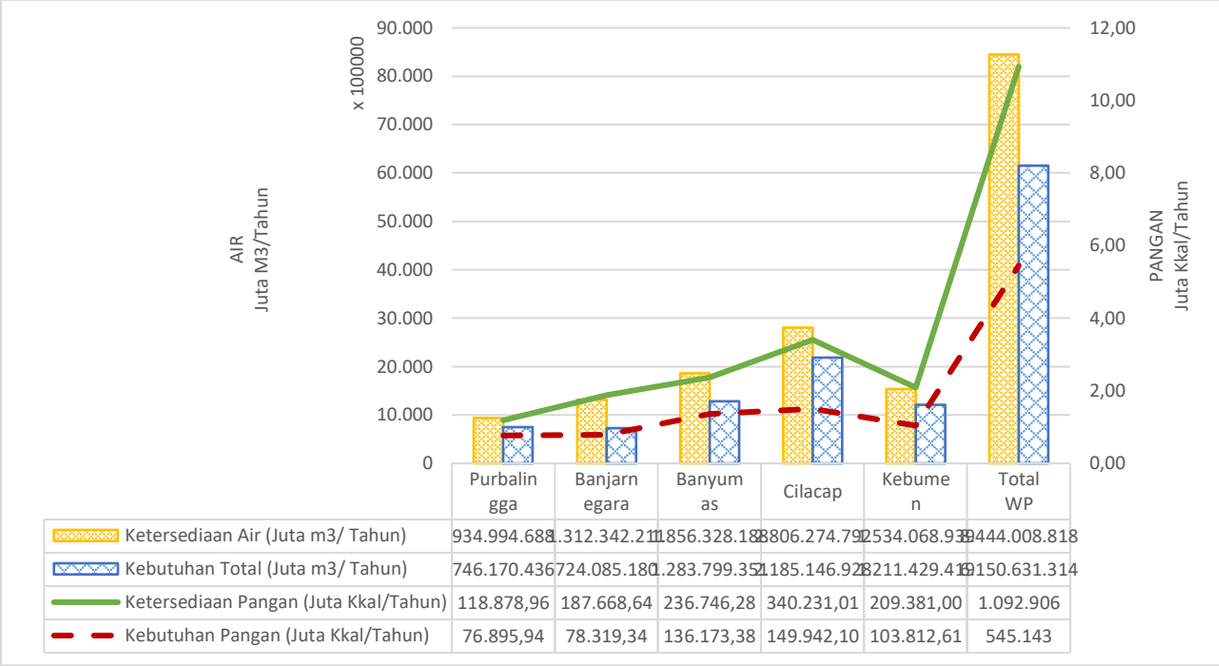

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, 2023

Gambar 5.20
Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb

d. Sasaran kinerja pembangunan WP Barlingmascakeb

Pengembangan wilayah Barlingmascakeb tahun 2022 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.12.
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Barlingmascakeb Tahun 2024

No	Kabupaten	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kabupaten Banjarnegara	4,50 – 5,50	14,46 – 13,59	6,54 – 5,94	69,74
2	Kabupaten Purbalingga	5,00 – 6,00	14,5 – 13,5	5,40 – 4,70	70,16
3	Kabupaten Banyumas	5,90 – 6,40	10,90 – 9,96	6,00 – 5,61	75,50
4	Kabupaten Cilacap	5,20 – 6,00	10,33	7,24	71,74
5	Kabupaten Kebumen	5,20 - 5,80	14,00 - 15,00	5,30 - 5,40	71,2 - 71,80

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

e. Indikasi program pembangunan WP Barlingmascakeb

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja makro pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan beberapa strategi dan rencana program yang terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Di WP Barlingmascakeb terdapat beberapa proyek strategis nasional (PSN) di antaranya pembangunan *double track* Jawa Selatan, dan pembangunan bahan bakar hijau (*green diesel bio refinery revamping* RU IV Cilacap).

Selain itu, terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada tahun 2024–2026 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten di WP Barlingmascakeb antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya melalui:
   a. Peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman di perbatasan terutama penyediaan air bersih;

b. Pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.

2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di antaranya melalui peningkatan sebaran dan kualitas pelayanan kesehatan di desa-desa kawasan perbatasan.
3. Peningkatan sektor ketenagakerjaan di antaranya melalui:
   a. Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor pertambangan dan penggalian (las), minyak, perdagangan dan jasa (otomotif, listrik, ac);
   b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
   c. *Upskilling* terhadap instruktur dan *upgrading* prasarana dan sarana BLK dan SMK;
   d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;
   e. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan*supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
4. Pemantapan ketahanan pangan di antaranya melalui
   a. Pencegahan alih fungsi lahan pertanian(lahan baku sawah)/LSD;
   b. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Buniayu, DI Piasa, DI Kebasen, DI Banjaran;
   c. Pemeliharaan jaringan irigasi DI Kalisapi, DI Krenceng, DI Banjaran, DI Cijalu;
   d. Rehabilitasi Embung DAS Kalong;
   e. Pemeliharaan Embung Bunter; dan
   f. Pembangunan pasar agro.
5. Peningkatan daya saing pariwisata di antaranya melalui:
   a. Pengembangan paket wisata aglomerasi wisata budaya Borobudur, Temanggung, dataran tinggi Sindoro-Sumbing;
   b. Pengembangan wisata hijau (wisata berbasis konservasi alam) melalui penerapan *ecotourism* di desa wisata dataran tinggi Sindoro-Sumbing;
   c. Peningkatan promosi dan pemasaran wisata berbasis alam (*geopark*).
   d. Dukungan promosi dan *event* wisata di kawasan DPP Nusakambangan–Baturraden;
   e. Pengembangan desa wisata;
   f. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
   g. Fasilitasi *event* promosi pariwisata di wilayah DPP Nusakambangan–Baturraden.
6. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di antaranya melalui:
   a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
   b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan;
   c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
   d. Pendampingan pelatihan *digital marketing* bagi pelaku UMKM.
7. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah di antaranya melalui:
   a. Fasilitasi peningkatan jalur logistik (JLSS) sesi Cilacap Kebumen;

b. Menjaga kemantapan jalan provinsi utamanya pada koridor Sokaraja – Purbalingga – Bobotsari - ke arah Pemalang; Purbalingga – Klampok, Purwokerto - Baturaden; koridor Karang Pucung – Cukangleuleus..
c. Penyediaan layanan angkutan umum dikawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) pada koridor Purwokerto – Purbalingga;
d. Pengembangan simpul transportasi utamanya pada fasilitasi optimalisasi Bandara JB. Soedirman Purbalingga;

8. Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion diantaranya ditempuh melalui:
   a. Peningkatan ketahanan air utamanya pada pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Sidareja, CAT Majenang, CAT Nusakambangan, CAT Cilacap, CAT Kroya, CAT Banyumudal, CAT Purwokerto-Purbalingga, CAT Karangkobar, dan CAT Kebumen-Purworejo; penanganan limbah tahu (pembangunan IPAL UMKM di Kabupaten Purbalingga); dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
   b. Peningkatan ketahanan lahan utamanya pada rehabilitasi dan konservasi di Segara Anakan, penanganan lahan kritis di DAS Citanduy, DAS Serayu, DAS Wawar Medono, Dataran Tinggi Dieng, Gunung Slamet; inisiasi *Geopark* Kawasan Karangsambung dan *Geopark* Kawasan Dieng (Wonosobo - Banjarnegara); inisiasi penetapan KEE Segara Anakan; serta inisiasi penyediaan prasarana dan sarana sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) Regional Banjarnegara – Purbalingga.
9. Peningkatan ketahanan energi di antaranya melalui fasilitasi pengembangan transmisi SUTET 500 kV Rawalo/Kesugihan – Incomer (Adipala – Cilacap); fasilitasi pengembangan transmisi SUTT 150 kV Lomanis-Inc (Semen Nusantara – Rawalo), fasilitasi pengembangan panas bumi WKP Baturaden dan pembangunan Pertamina RDMP RU IV Cilacap; Pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (biogas, gas rawa, PLTMH, PLTS atap).

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan kabupaten yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain sebagai berikut:

1) Penyediaan layanan angkutan umum perkotaan Purwokerto dan sekitarnya;
2) Peningkatan aksesibilitas ke Bandara JB. Soedirman.

Arah pengembangan wilayah untuk WP Barlingmascakeb secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut.

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5.21
Arah Pengembangan WP Barlingmascakeb

5.3.7. Wilayah Pengembangan Petanglong

a. Analisis kinerja pembangunan WP Petanglong

WP Petanglong berada di sisi utara Jawa Tengah dengan batas bagian utara berupa Laut Jawa yang berpusat di kawasan perkotaan Pekalongan meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan. WP Petanglong memiliki kesenjangan/disparitas rendah. Kondisi makro pembangunan wilayah Petanglong saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.13.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kabupaten Pekalongan	5,11	9,67	3,23	70,81
2	Kabupaten Batang	5,97	8,98	6,64	69,45
3	Kota Pekalongan	5,76	7,00	4,98	75,90
Rata-rata WP		5,61	**8,55**	**4,95**	**72,05**
Jawa Tengah		**5,31**	**10,93**	**5,57**	**72,79**
Nasional		**5,31**	**9,57**	**5,86**	**72,91**

Sumber: BPS, 2023

Di WP Petanglong terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah di antaranya perdagangan dan jasa, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, penyediaan akomodasi, pertambangan dan penggalian, informasi dan komunikasi, dan *real estate*. Kawasan strategis yang

berada di WP Petanglong yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan industri terpadu Batang (KSP), dan kawasan perkotaan Petanglong (KSP).

b. Analisis daya saing WP Petanglong

Nilai rata-rata IDSD WP Petanglong tahun 2022 adalah sebesar 3,462, sedikit meningkat dari rata-rata tahun sebelumnya 3,405. Nilai rata-rata ini merupakan yang tertinggi ke-3 pada perwilayahan di Jawa Tengah, di bawah WP Subosukawonosraten dan WP Kedungsepur. Dalam tinjauan internal wilayah Petanglong, nilai IDSD pada Kabupaten Pekalongan merupakan yang tertinggi yakni sebesar 3,589. Untuk nilai IDSD Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan lebih rendah, masing-masing sebesar 3,432 dan 3,366, yang keduanya berada di bawah rata-rata nilai daya saing wilayah Petanglong. Secara umum, nilai IDSD pada WP Petanglong ini rendah pada dimensi komersialisasi, pendidikan, dan teknologi.

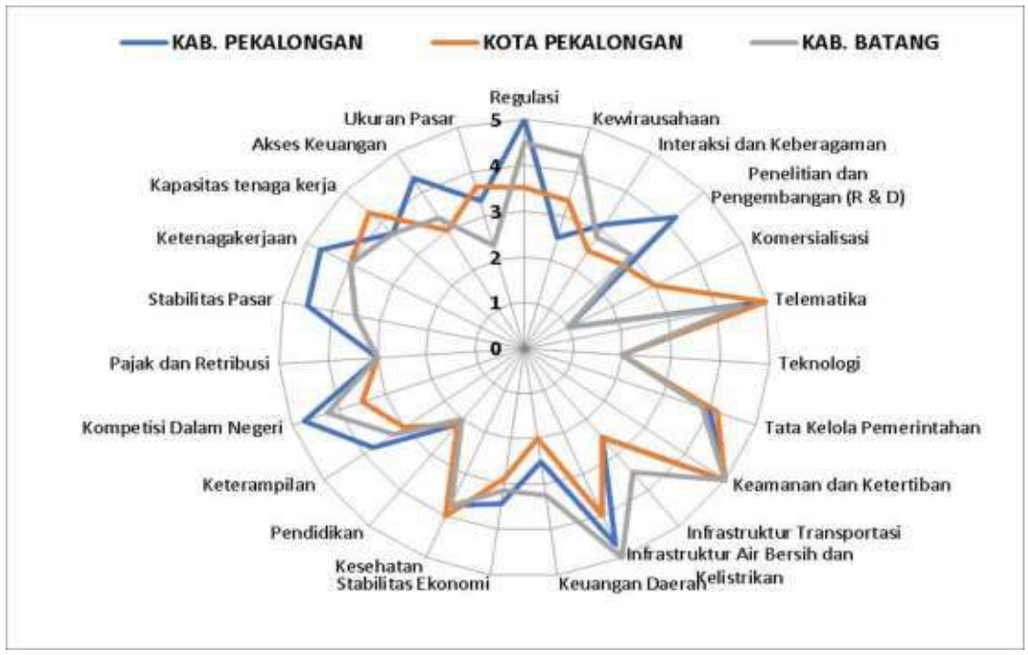

Sumber: Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5.22
Nilai IDSD Kabupaten/Kota di WP Petanglong Tahun 2022

Kondisi daya saing WP Petanglong masih berada pada tahap penguatan kapasitas daya saing. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai pada beberapa indikator faktor pendukung daya saing yang masih lemah, antara lain pada dimensi pendidikan, komersialisasi, dan teknologi. Beberapa indikator yang menyebabkan rendahnya dimensi ini antara lain dipengaruhi oleh jumlah komersialisasi riset dan kondisi *techno park*, rendahnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, serta komersialisasi terhadap inovasi teknologi. Dengan memperhatikan potensi pengembangan perdagangan dan jasa, serta keberadaan kawasan industri di wilayah ini, diperlukan program yang mampu optimal mengungkit tingkat pendidikan masyarakat, khususnya yang berorientasi pada penguasaan IPTEK serta kemampuan keahlian (*skill*). Di samping itu, program riset dan inovasi teknologi perlu diarahkan pada penguatan hilir untuk mendorong peningkatan komersialisasi.

c. Analisis daya dukung dan daya tampung air dan pangan di WP Petanglong

Di wilayah Petanglong status daya dukung dan daya tampung air dan pangan belum terlampaui kecuali Kota Pekalongan. Meski demikian kecenderungan penurunan daya dukung air maupun pangan akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air dan pangan. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung air diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui pembangunan waduk, pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Regional (SPAM Regional), serta konservasi sumber air di CAT. Sedangkan untuk peningkatan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

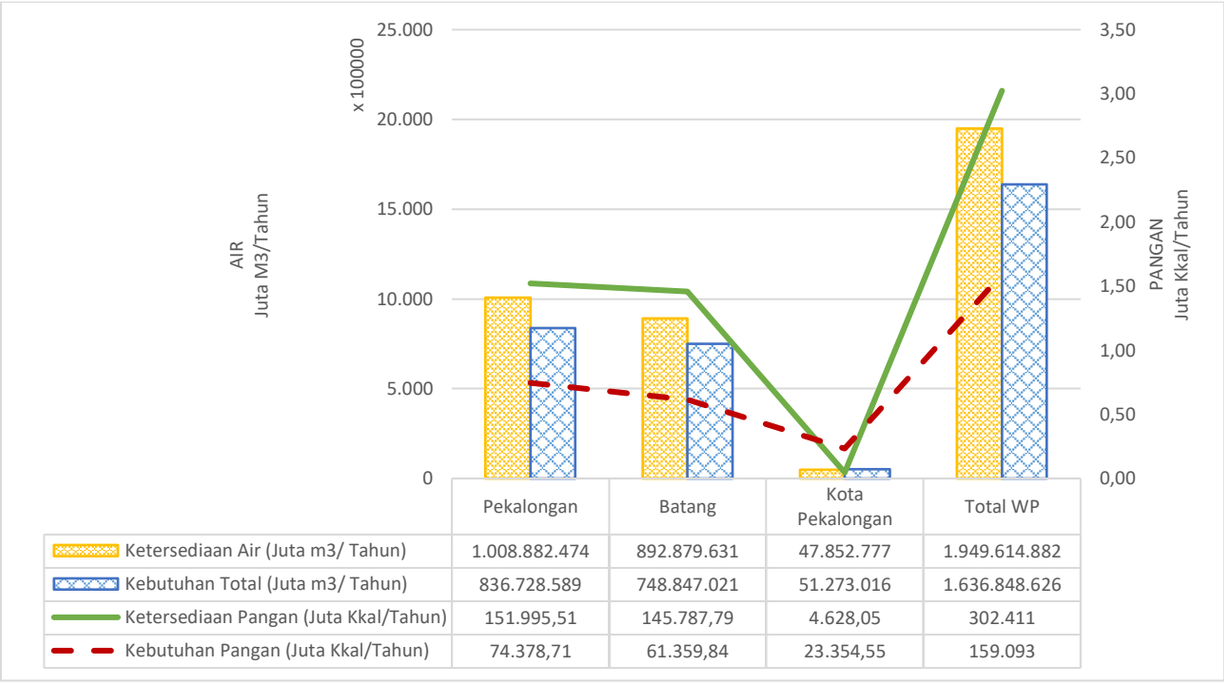

	Pekalongan	Batang	Kota Pekalongan	Total WP
Ketersediaan Air (Juta m3/ Tahun)	1.008.882.474	892.879.631	47.852.777	1.949.614.882
Kebutuhan Total (Juta m3/ Tahun)	836.728.589	748.847.021	51.273.016	1.636.848.626
Ketersediaan Pangan (Juta Kkal/Tahun)	151.995,51	145.787,79	4.628,05	302.411
Kebutuhan Pangan (Juta Kkal/Tahun)	74.378,71	61.359,84	23.354,55	159.093

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, 2023

Gambar 5.23
Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Petanglong

d. Sasaran kinerja pembangunan WP Petanglong

Pengembangan wilayah Petanglong tahun 2024 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.14.
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kabupaten Pekalongan	5,50 - 5,75	9.10 - 8,70	3,10 - 3,00	72,00
2	Kabupaten Batang	5,70 - 6,20	8,34 - 7,90	5,60	70,04
3	Kota Pekalongan	5,40 - 5,80	6,30 - 5,93	4,50 – 4,70	76,70

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

e. Indikasi program pembangunan WP Petanglong

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja makro pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan beberapa strategi dan rencana program yang terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Di WP Petanglong terdapat beberapa proyek strategis nasional (PSN), dan program prioritas strategis nasional (*Majorproject* RPJMN), yang dapat menjadi pengungkit pembangunan, di antaranya:

1. PSN antara lain pengembangan kereta api Jakarta–Surabaya, pembangunan kawasan industri terpadu (KIT) Batang, dan pembangunan transmisi pipa gas ruas Cirebon – Semarang;
2. RPJMN antara lain pengamanan pesisir perkotaan pantura Jawa, dan revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan tambak di pantura Jawa.

Keberadaan KIT Batang berpotensi untuk mengembangkan konsep mega wilayah pengembangan (MWP)/super koridor wilayah Petanglong–Kedungsepur sebagai *prime mover* pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada tahun 2024–2026 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten/kota di WP Petanglong antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya melalui pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.
2. Peningkatan sektor ketenagakerjaan di antaranya melalui:
    a. Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (batik, makanan minuman, produk hasil pertanian dan perikanan);
    b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
    c. *Upskilling* terhadap instruktur dan *upgrading* prasarana dan sarana BLK dan SMK;
    d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;
    e. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Pemantapan ketahanan pangan di antaranya melalui rehabilitasi jaringan irigasi DI Sudikampir, DI Tapak Menjangan, DI Asem Siketek, DI Kedungdowokramat.
4. Peningkatan daya saing pariwisata di antaranya melalui:
    a. Dukungan promosi dan *event* wisata di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan;
    b. Pengembangan desa wisata beserta fasilitas pendukungnya;
    c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
    d. Fasilitasi *event* promosi pariwisata di wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan.

5. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di antaranya melalui:
   a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
   b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan;
   c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
   d. Pendampingan pelatihan *digital marketing* bagi pelaku UMKM.
6. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah di antaranya dengan menjaga kemantapan jalan provinsi utamanya pada ruas koridor Kesesi (Perbatasan Pemalang) – Kajen – Bawang – ke arah Sukorejo Kabupaten Kendal; koridor Pekalongan – Kajen – Ke Arah Banjarnegara dan Wonosobo (pendukung aksesibilitas kawan dieng dari utara);
7. Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion di antaranya ditempuh melalui:
   a. Peningkatan ketahanan air utamanya pada pengendalian banjir dengan pembangunan tebing Sungai Bremi Meduri; pemeliharaan Sungai Sragi Lama, Sungai Sragi Baru, Sungai Bremi, Sungai Meduri, Sungai Welo, Sungai Sengkarang, Sungai Kupang, Sungai Sambong, Sungai Sipung, Sungai Sana, Sungai Urang; fasilitasi Pembangunan Waduk Petanglong; pembangunan IPAL UMKM di Kota Pekalongan; pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Pekalongan-Pemalang dan CAT Subah; pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
   b. Peningkatan ketahanan lahan di antaranya melalui rehabilitasi lahan kritis di DAS Kupang, dan Kawasan Dieng (Pekalongan, Batang), lanjutan inisiasi KEE Petungkriyono; serta pengawasan usaha pertambangan serta penertiban PETI.

c. Peningkatan ketahanan energi di antaranya melalui pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (biogas, gas rawa, PLTMH, PLTS atap); dan fasilitasi pembangunan pipa gas distribusi Semarang-Batang-Cirebon.

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan kabupaten/kota yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain peningkatan aksesibilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional Batang (eksisting) dan peningkatan ruas jalan Bawang–Dieng. Arah pengembangan wilayah untuk WP Petanglong secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut.

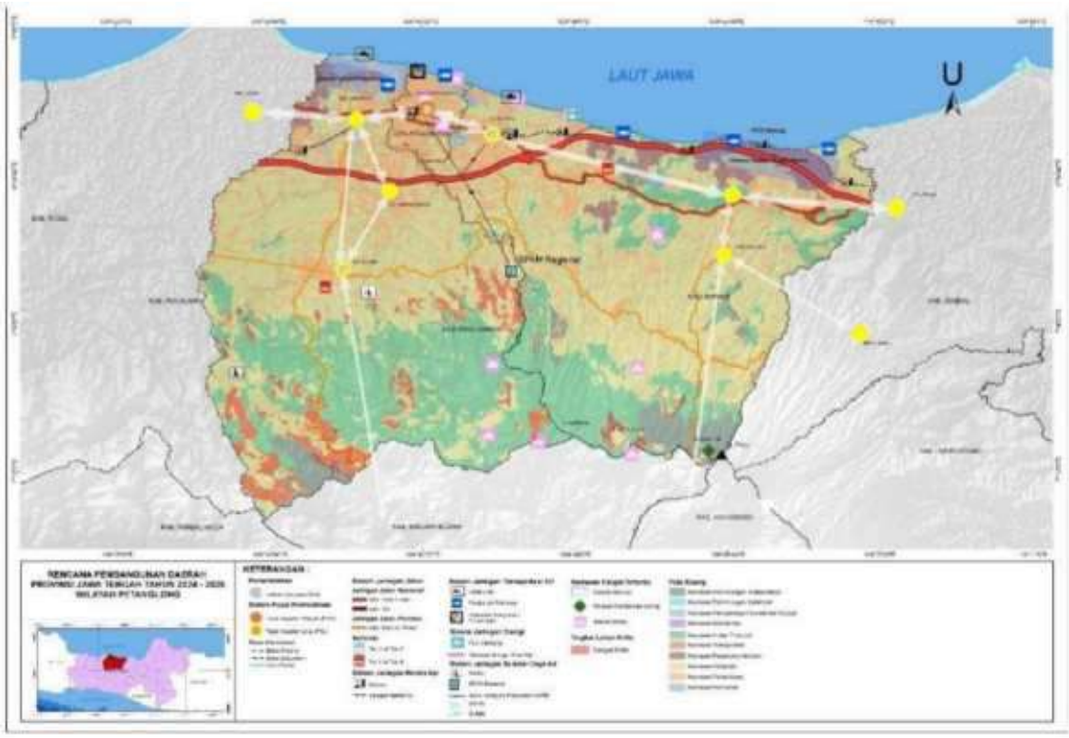

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5.24
Arah Pengembangan WP Petanglong

5.4. Arahan Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Provinsi

Ketimpangan pembangunan dan pelayanan publik terjadi pada wilayah perbatasan daerah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena fokus dan arah pembangunan yang belum cermat, kondisi geografis yang kurang menguntungkan, serta kurangnya dukungan prasarana dan sarana infrastruktur dan pelayanan publik seperti pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat serta sosial). Di sisi lain wilayah perbatasan mempunyai fungsi yang strategis sebagai etalase gambaran daerah/wilayah bersangkutan.

Dalam rangka mendorong pembangunan di wilayah perbatasan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif dan intensif melakukan sinergi pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada lima konsep pengembangan pembangunan wilayah perbatasan, yaitu:

1. Keterpaduan dan sinergi penggunaan sumberdaya untuk menyerasikan pembangunan antarwilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan;
2. Keselarasan adalah keberlanjutan pembangunan;
3. Penanganan konflik/potensi konflik;
4. Pemanfaatan bersama adalah pemanfaatan fasilitas/prasarana dan sarana pada wilayah perbatasan; dan
1. Pengawasan dan penanganan bersama adalah upaya pelaksanaan/ implementasi peraturan.

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2024

Pembangunan daerah tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Pada tahun pertama RPD Tahun 2024-2026, kebijakan pembangunan tahun 2024 diarahkan pada tema **"Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas"** dengan prioritas daerah difokuskan pada peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas; peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata; peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung; serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2024 tersebut didukung dengan rencana pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan akan belanja dan pembiayaan daerah. Tahun 2024, kerangka pendanaan daerah Jawa Tengah diproyeksikan mengalami peningkatan. Meskipun meningkat namun proyeksi kerangka pendanaan tahun 2024 dihadapkan pada tantangan dan risiko dari faktor global/nasional/regional baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis.

Berikut adalah proyeksi kerangka pendanaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Pendapatan daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp27,114 triliun, belanja daerah sebesar Rp28,526 triliun, dan pembiayaan netto sebesar Rp1,411 triliun.

Tabel 6.1.
Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH		**18.500.149.320.000**
1	Pajak Daerah	15.754.387.924.000
2	Retribusi Daerah	1.728.627.388.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	687.553.929.000
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	329.580.079.000
PENDAPATAN TRANSFER		**8.591.957.067.000**
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.591.957.067.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		**22.750.000.000**
JUMLAH PENDAPATAN		**27.114.856.387.000**
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		**16.340.057.242.000**
1	Belanja Pegawai	7.582.510.238.000
2	Belanja Barang dan Jasa	6.015.482.875.000

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
3	Belanja Subsidi	1.000.000.000
4	Belanja Hibah	2.723.004.129.000
5	Belanja Bantuan Sosial	18.060.000.000
BELANJA MODAL		**2.056.751.662.000**
BELANJA TAK TERDUGA		**25.000.000.000**
BELANJA TRANSFER		**10.104.884.699.000**
1	Belanja Bagi Hasil	7.105.634.568.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	2.999.250.131.000
JUMLAH BELANJA		**28.526.693.603.000**
SURPLUS/DEFISIT		**(1.411.837.216.000)**
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**1.481.837.216.000**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	581.837.216.000
2	Pencairan dana cadangan	900.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**70.000.000.000**
1	Penyertaan modal	70.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO		**1.411.837.216.000**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		**0**

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2023

6.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2023 dijabarkan dalam enam urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pilihan, dua unsur pendukung urusan pemerintahan, enam unsur penunjang urusan pemerintahan, satu unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan satu unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pemerataan layanan prasarana dan sarana pendidikan berbasis pendataan; peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, prasarana dan sarana terutama bagi pendidikan vokasi; peningkatan tata kelola pendidikan dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan multipihak; serta peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi informasi.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada pengembangan kurikulum adaptif berorientasi *softskill* dan pendidikan karakter.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan pendidikan.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan kesehatan reproduksi melalui pemenuhan prasarana dan sarana, sumber daya manusia, penyusunan regulasi, perbaikan *baseline* data, pemenuhan standar operasional (SOP); peningkatan pelayanan kesehatan santun usia lanjut sesuai standar; pencegahan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat; pendampingan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di 35 kabupaten/kota; deteksi dini penyakit menular dan tidak menular di 35 kabupaten/kota; pengendalian vektor demam berdarah *dengue* dan malaria di kabupaten/kota dengan kasus tinggi; penyusunan rencana epidemologi dan peningkatan respon kejadian luar biasa (KLB) serta krisis kesehatan; penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa/bencana skala provinsi; pendampingan pelayanan bagi orang dalam gangguan jiwa (ODGJ); pemantauan imunisasi dasar rutin dan advokasi untuk pemenuhan *universal child immunization* (UCI) desa; fasilitasi akreditasi kesehatan primer dan rujukan di 35 kabupaten/kota; cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; penguatan rumah sakit dalam kesiapan tanggap darurat krisis kesehatan dan bencana dengan penyiapan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT); pelayanan pengujian kalibrasi; serta pemenuhan prasarana dan sarana di tujuh RSUD/RSJD.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat provinsi dan advokasi dukungan pemda; peningkatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan; serta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan; penyediaan logistik (obat-obatan, *reagensia*, bahan habis pakai dan makan minum) di tujuh RSUD/RSJD; pengembangan tanaman obat tradisional di 35 kabupaten/kota; serta penyediaan obat, *reagen* dan vaksin esensial untuk 35 kabupaten/kota.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kampanye perubahan perilaku; pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan dan peningkatan peran serta masyarakat (ormas, kader, dunia usaha, perguruan tinggi, mitra, dan lainnya); peningkatan cakupan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui perbaikan *baseline* data,

peningkatan koordinasi, bimbingan teknis; implementasi germas di UPT; penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan di berbagai media, bakti sosial, *daycare*, *home visit/home care*, edukasi pasien dan keluarga pasien serta masyarakat yang dilakukan oleh tujuh RSUD/RSJD, dan *follow up* pasien kusta.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan provinsi; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana dan sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; peningkatan *flood forecasting and warning system (FFWS)*; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi. Kegiatan-kegiatan diatas sekaligus untuk mendukung peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim sektor air.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, pembangunan prasarana sarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui inisiasi penyediaan prasarana dan sarana sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat di kabupaten/kota.

d. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

e. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar tujuh meter dengan muatan sumbu terberat (MST) delapan ton, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan penggantian jembatan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antarwilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase

jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.

f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin (PB *backlog*), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.

d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi, serta upaya pembinaan dan pengendalian program.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penanganan daerah

rawan kebakaran, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), unit layanan inklusi disabilitas (Unit LIDi), penyusunan dokumen kajian risiko bencana (KRB) dan rencana penanggulangan bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas telantar, anak telantar, warga lanjut usia (lansia) telantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar-warga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal serta penyaluran bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan, pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan dan mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), pelatihan *housekeeping, tour guide, waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *online e-makaryo*, pelayanan antarkerja lintas daerah kabupaten/kota berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah provinsi.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan, penarikan pekerja anak, pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak (PPA), penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian obyek keamanan dan keselamatan (K3) di perusahaan, serta pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, rehabilitasi *rice milling unit*/RMU dan gudang cadangan pangan pemerintah, pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penanganan kerawanan pangan pada lokasi prioritas risiko *stunting*, pengembangan desa mandiri pangan melalui fasilitasi usaha produktif pada lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan dan implementasi pengelolaan serta pencegahan pemborosan pangan *(food loss and waste).*

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui penetapan lokasi.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

c. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Program ini diarahkan pada fasilitasi peksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui fasilitasi pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan, peningkatan pemantauan terhadap badan air permukaan dan kualitas udara ambien, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan sinergi peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan ruang terbuka hijau/RTH, serta pengelolaan Kebun Raya Baturraden.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan/AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan–upaya pemantauan

lingkungan/UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup/ DELH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain penyelesaian persiapan pembangunan TPST Regional Magelang.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blanko KTP-el di kabupaten/kota.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di kabupaten/kota.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerja sama antardesa melalui fasilitasi kerja

sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerja sama antarkawasan perdesaan di Jawa Tengah.

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fasilitasi penysunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yange mengatur tentang desa, melaksanakan evaluasi perkembangan desa serta melaksankan penilaian melalui penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan, melaksanakan fasilitasi terhadap penetapan dan penegasan batas desa, pembinaan manajemen pemerintahan desa sekaligus fasilitasi terhadap pelaksanaan Program Pembinaan Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa – P3PD), fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pengelolaan aset desa, pembinaan percepatan pembangunan desa melalui Bantuan Keuangan Desa, serta pembinaan terhadap pencatatan data dan informasi pemerintah desa.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa, serta peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendukung pembangunan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam satu daerah provinsi berupa operasionalisasi layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan; pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan dan peningkatan terminal; penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan

fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di ruas jalan provinsi.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi berupa fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan dermaga sungai yang melayani trayek lintas kabupaten/kota; penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses pelimpahan aset); penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis izin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antarperangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, layanan *data center,* pengembangan kehumasan, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM), pengelolaan konten, *website,* dan media sosial terkait informasi pembangunan Jawa Tengah, menyaring/*filter* terhadap berita *hoax* dan berita *fake,* serta peningkatan pelayanan informasi publik, pengembangan kapasitas SDM PPID, dan monev keterbukaan informasi badan publik.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan pendampingan pengelolaan ekosistem terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province,* mengembangkan dan mengelola integrasi layanan SPBE melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP), penerbitan dokumen tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK), koordinasi pengembangan layanan Jawa Tengah Cerdas, serta fasilitasi internet desa di 17 kabupaten dalam rangka mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem (PKE), pemenuhan *data center facilities rated III,* layanan *bandwidth* internet untuk perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah serta pengembangan kapasitas SDM pengelola infrastruktur TIK.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Jawa Tengah.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerja sama antarkoperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Jawa Tengah dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian

pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan melalui peningkatan jiwa kepemimpinan, kepeloporan serta pemberdayaan pemuda dan kewirausahaan pemuda.

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga melalui peningkatan penyadaran dan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, pemetaan potensi atlet, serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** yang diarahkan pada perwujudan *big data* klaster pertanian, pariwisata dan pendidikan, integrasi portal data menuju layanan data terbuka dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Jawa Tengah, serta pengembangan geospasial dalam rangka mendukung Satu Peta Jawa Tengah dan peningkatan kapasitas SDM pengelola peta geospasial.

15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada optimalisasi kinerja tim *computer security insident response team* (CSIRT), baik di perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah maupun pendampingan bagi tim CSIRT Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, peningkatan layanan *pentest* dalam rangka meningkatkan keamanan siber, peningkatan literasi keamanan informasi (*security awareness*), peningkatan capaian Indeks KAMI melalui penerapan standar ISO 27001 tentang Standar Manajemen Keamanan Informasi, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keamanan informasi (siber) dan persandian.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui pengembangan kebudayaan.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, serta organisasi kebudayaan.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui pelestarian sejarah lokal.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan cagar budaya berbasis pendataan dan pengembangan kerjasama multipihak dan lintas sektor.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui peningkatan pengelolaan permuseuman.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan provinsi sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan dan perluasan akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid serta penyediaan bahan literasi.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan dan perluasan akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi dan perangkat daerah provinsi, serta lembaga kearsipan daerah (LKD) kabupaten/kota melalui peningkatan kepatuhan penyelenggaraan kearsipan sesuai standar pada LKD dan perangkat daerah.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip melalui perlindungan dan penyelamatan arsip pada perangkat daerah tingkat provinsi dan arsip statis pada LKD.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada pengelolaan kawasan konservasi; pemberdayaan masyarakat pesisir melalui fasilitasi prasarana dan sarana usaha sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan; penanaman bibit mangrove; dan fasilitasi teknologi usaha garam rakyat sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional di Jawa Tengah.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; fasilitasi alat penangkapan ikan dengan sasaran masyarakat miskin; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan gerai perizinan kapal perikanan.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budi daya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; revitalisasi prasarana dan sarana loka budi daya; pengembangan kawasan budi daya; fasilitasi prasarana budi daya ikan yang fokus pada sasaran penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem); dan penanganan hama penyakit ikan.

d. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budi daya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di Jawa Tengah melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) yang fokus pada sasaran penurunan *stunting*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate* of *analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; serta penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri; pengembangan daya tarik

wisata unggulan; penetapan kawasan stategis pariwisata provinsi; perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerbitan tanda usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata provinsi; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana kota kreatif melalui sosialisasi dan pendampingan pengisian borang; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI), pembinaan teknis, pendampingan dan fasilitasi HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, subsidi suku bunga kredit, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi kartu tani sebagai *database* petani dan lahan, revitalisasi kebun benih, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian, serta pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan aset balai dan program padat karya. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), fasilitasi *good farming practices* (GFP) dan revitalisasi balai budidaya dan pembibitan ternak.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani tembakau. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan dan P3KE melalui program Banter Melaju, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, serta fasilitasi inovasi peternakan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV), serta perbaikan pola konsumsi dan gizi keluarga rawan *stunting*.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (supra).

4. Kehutanan

Rencana program prioritas urusan Kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Hutan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK); pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m^3/tahun; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; dan perbenihan tanaman hutan, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi; pengolahan hayati bahan baku hasil hutan bukan kayu, pembudidayaan HHBK dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya, pengawasan perizinan pengolahan HHBK, rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m^3/tahun,

pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m^3/tahun, fasilitasi pemenuhan komitmen izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUPHHK) dengan kapasitas produksi <6000 m^3/tahun; penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL), pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan; penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar, sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih, sertifikasi mutu bibit, pengawasan peredaran benih dan/atau bibit, pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan.

a. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran *(appendix*) CITES untuk kewenangan daerah provinsi, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, pengelolaan taman hutan raya (tahura) provinsi, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi, perencanaan pengelolaan tahura, pengamanan kawasan tahura provinsi, pengawetan tumbuhan, satwa, serta habitat tahura provinsi, pemulihan ekosistem atau penutupan kawasan sesuai rencana pengelolaan tahura provinsi, kerja sama penyelenggaraaan tahura provinsi, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di sekitar tahura provinsi.

b. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan, penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan, penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial.

c. Program Pengolahan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS, pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, serta optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program ini diarahkan pada pengelolaan air tanah berbasis konservasi melalui kegiatan Kajian Konservasi pada Zona Rusak CAT di Jawa Tengah, Pemetaan Potensi Air Tanah pada Kawasan Bentang Alam Karst di Jawa Tengah, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah untuk menjaga keseimbangan neraca air tanah; penyusunan kajian studi kelayakan perizinan air tanah pada wilayah sungai dalam daerah provinsi; Kajian Penyusunan Nilai Harga Air Baku serta Bobot Nilai Air untuk Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

di Jawa Tengah. Program ini juga ditujukan dalam mendukung pengembangan potensi warisan geologi Provinsi Jawa Tengah, yang mana pada tahun 2024 akan dilaksanakan jelajah *Geopark*/*Geoheritage* beserta pendampingan dalam penetapan *Geoheritage*. Selain itu, program ini juga ditujukan meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah, sehingga diharapkan akan mengurangi resiko akibat bencana geologi (*geological hazard*) termasuk di dalamnya adalah kegiatan monitoring kejadian *Land Subsidence* di pesisir Jawa Tengah.

b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program ini diarahkan untuk terwujudnya kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan menerapkan *good mining practice* melalui Penyusunan Perda Pengelolaan Pertambangan di Jawa Tengah; kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; penyusunan persetujuan teknis izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pengembangan sistem layanan pertambangan minerba; pemberian penghargaan *good mining practice* sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha pertambangan yang telah memenuhi kategori *good mining practice*; penertiban kegiatan PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dengan pelaksanaan Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB di Jawa Tengah; Penyusunan wilayah pertambangan rakyat di Jawa Tengah; serta peningkatan kompetensi SDM pada bidang pertambangan dengan melaksanakan bimbingan teknis kepada Mahasiswa Kebumian dan evaluasinya. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya keseimbangan neraca sumber daya mineral melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral; penyusunan statistik pertambangan; dan pelaksanaan rapat koordinasi terkait akomodasi wilayah pertambangan dalam RTRW Kabupaten/Kota. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi usaha pertambangan melalui kegiatan penetapan harga patokan mineral beserta pengendalian; pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; Intensifikasi potensi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Jawa Tengah, serta pelaksanaan rekonsiliasi data produksi di Jawa Tengah.

a. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dan transisi energi daerah dengan meningkatkan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) dalam bauran energi melalui kegiatan pembangunan maupun pengembangan prasarana sarana EBT utamanya pengembangan Biogas, *Biogenic shallow gas* (Gas Rawa), Pompa air tenaga surya, dan PLTS Atap; meningkatkan akses energi bagi masyarakat terutama EBT, pengembangan energi baru terbarukan melalui kajian potensi EBT di Jawa Tengah; meningkatkan edukasi dan peluang *green jobs* kepada masyarakat terhadap pemanfaatan energi alternatif dengan kegiatan pendamping energi; pelatihan instalatur PLTS *Rooftop*, pelatihan instalatur Gas Rawa; pengembangan desa mandiri energi melalui penghargaan DME (Desa Mandiri Energi) sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang telah memenuhi kategori DME inisiatif, DME berkembang, dan DME mapan; serta pemberian penghargaan Hemat Energi dan Air (HEA) sebagai bentuk apresiasi

terhadap pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor Industri yang telah menerapkan perilaku budaya hemat energi dan air.

b. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi daerah dengan meningkatan kehandalan pasokan listrik; meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita; serta pemerataan dan keterjangkauan akses untuk masyarakat terhadap energi listrik melalui pemenuhan akses listrik terhadap masyarakat miskin yang belum berlistrik; evaluasi regulasi dan atau kebijakan Ketenagalistrikan Daerah; serta sosialisasi penerapan gaya hidup dengan menggunakan peralatan berbasis listrik atau *electrifying lifestyle*. Selain itu, program ini juga diarahkan meningkatkan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) melalui kegiatan Inspeksi keselamatan ketenagalistrikan; Koordinasi K2 bersama *stakeholder* terkait di Jawa Tengah; pendampingan pemantauan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan serta fasilitasi peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan dalam rangka mendukung K2 dan evaluasinya di Jawa Tengah.

6. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada penerbitan surat keterangan asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan angka pengenal importir (API) melalui *post audit* dan verifikasi ekspor/impor di kabupaten/kota.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Jawa Tengah, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Jawa Tengah dengan pemberdayaan sumber daya produk subtitusi impor, *export coaching program* (ECP), *coaching program for new exporters* (CPNE), pemetaan potensi desa ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerjasama, penilaian

eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/*Indonesian trade promotion center* (ITPC).

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM dan pesona produk kriya Jawa Tengah.

7. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM).

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan nonagro.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, izin usaha kawasan industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

8. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi antarpemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, dan pelatihan transmigrasi lokal.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi umum yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat daerah.

b. Program Penataan Organisasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

c. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama antarpemerintah; fasilitasi kerja sama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerja sama daerah; evaluasi pelaksanaan kerja sama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

d. Program Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan nonpelayanan dasar.

e. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah nonlitigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

f. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD).

g. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi

pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

h. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi

Program ini diarahkan pada kegiatan penunjang pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan, serta perencanaan dan evaluasi kinerja sekretariat DPRD.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah** yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *assestment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan sistem merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis tekonologi informasi yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis, fungsional, dan manajerial yang komprehensif bagi ASN didukung dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah,

pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

6. Penghubung

Rencana program prioritas unsur penghubung yang akan dilaksanakan adalah **Program Pelayanan Penghubung**, yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

G. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**.

Rincian rencana kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 beserta pagu indikatifnya dapat dilihat pada lampiran Buku III. Rekapitulasi rencana kerja program prioritas beserta pagu indikatifnya pada masing-masing urusan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
X.XX	NON URUSAN		
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.096.512.941.000
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.708.924.637.000
1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	751.800.000
1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	341.362.000
1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	742.500.000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	857.819.545.000
1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	937.959.000
1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	667.000.000
1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.888.259.000
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	104.843.791.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	78.105.779.000
1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.978.123.000
1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	18.699.123.000
1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	340.675.501.000
1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	4.048.300.000
1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5.670.000.000
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	14.917.000.000
1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.108.000.000
1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000
1.04.06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.441.576.000
1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.925.000.000
1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	150.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	9.479.940.000
1.06.03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100.000.000
1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	56.760.528.000
1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	157.256.160.000
1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.225.500.000
1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	359.000.000
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	180.415.000
2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	30.176.915.000
2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.780.000.000
2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.685.787.000
2.07.06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	5.700.000.000
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.375.000.000
2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.052.958.000
2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	250.000.000
2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	229.800.000
2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	290.000.000
2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	495.358.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	9.430.935.000
2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	3.980.500.000
2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.815.000.000
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2.10.03		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000
2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000
2.10.06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	778.748.000
2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	8.548.361.000
2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.538.667.000
2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	133.740.000
2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	844.280.000
2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.904.836.000
2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	240.732.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.968.700.000
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	240.000.000
2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	220.000.000
2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	240.000.000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	675.000.000
2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.625.000.000
2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.450.000.000
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	305.000.000
2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	695.000.000
2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	440.000.000
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	127.393.110.000
2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	459.100.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.266.866.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	24.523.773.000
2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	13.442.779.000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.500.000.000
2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	6.513.853.000
2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	8.901.787.000
2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	9.072.340.000
2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	6.408.609.000
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	705.000.000
2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.100.000.000
2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.649.910.000
2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.510.218.000
2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	524.000.000
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	23.675.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	196.062.000.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.257.329.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.000.000.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	6.028.042.000
2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	23.705.940.000
2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	298.800.000
2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	704.085.000
2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.265.120.000
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	34.418.638.000
2.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	268.298.000
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	780.346.000
2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	103.000.000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.341.700.000
3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	33.852.192.000
3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	13.119.461.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.963.639.000
3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.330.025.000
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.533.575.000
3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	123.700.000.000
3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	825.000.000
3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	9.115.000.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	92.949.520.000
3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.964.297.000
3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	14.980.185.000
3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.635.000.000
3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	20.740.985.000
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		
3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	18.758.156.000
3.28.04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	2.966.293.000
3.28.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	5.313.155.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
3.28.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	551.982.000
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
3.29.02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	2.725.496.000
3.29.03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	4.315.593.000
3.29.05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	7.684.499.000
3.29.06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	13.477.465.000
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	117.640.000
3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	634.445.000
3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.316.405.000
3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.980.978.000
3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.482.628.000
3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.450.443.000
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	30.869.870.000
3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	290.000.000
3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	823.525.000
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	
3.32.03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	220.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.710.656.000
4.01.03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.783.000.000
4.01.04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	140.639.161.000
4.01.05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.438.990.000
4.01.06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.912.642.000
4.01.07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.505.000.000
4.01.08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.685.000.000
4.02	SEKRETARIAT DPRD		
4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	390.574.350.000
5.01	PERENCANAAN		
5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.814.000.000
5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.653.000.000
5.02	KEUANGAN		
5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	10.146.505.350.000
5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.114.433.000
5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	32.644.010.000
5.03	KEPEGAWAIAN		
5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	13.243.893.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19.589.676.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.050.000.000
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG		
5.07.02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	2.772.186.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
6.01	INSPEKTORAT DAERAH		
6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.073.727.000
6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.766.222.000
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.168.341.000
8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.022.991.617.000
8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	76.846.013.000
8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.031.422.000
8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	138.463.763.000
TOTAL			**28.526.693.603.000**

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target Capaian 2024	Perangkat Daerah Koordinator
1	2	3	4	5
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	45,82	Sekretariat Daerah
2	Angka Kemiskinan	%	9,76-8,96	Sekretariat Daerah
3	Rasio Gini	Angka	0,364	Sekretariat Daerah
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70 - 5,50	Sekretariat Daerah
5	Inflasi	%	3,0 ± 1	Sekretariat Daerah
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,44 - 4,94	Sekretariat Daerah
7	Nilai Tukar Petani	Angka	107,45	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,43	Sekretariat Daerah
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	60,27	Sekretariat Daerah
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,03	Sekretariat Daerah
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	58,20	Sekretariat Daerah
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,55	Sekretariat Daerah
13	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	4,00	Sekretariat Daerah
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,50	Sekretariat Daerah

7.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah, serta IKU perangkat daerah. Indikator kinerja daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**		
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	45,82
2	Angka Kemiskinan	%	9,76-8,96
3	Rasio Gini	Angka	0,364
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70 - 5,50
5	Inflasi	%	3,0 ± 1
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,44 - 4,94
7	Nilai Tukar Petani	Angka	107,45
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,43
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	60,27
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,03
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	58,20
B	**Aspek Pelayanan Umum**		
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar		
	Pendidikan		
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,94
2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,08
	Kesehatan		
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,60
2	Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2,00
3	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	%	60,00
4	Persentase ketercapaian intervensi spesifik dalam penurunan *stunting*	%	80,00
5	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa	%	78,00
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100,00
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar	%	49,89
8	Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi	%	87,00
9	Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	90,00
10	Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90,00
11	Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo	%	88,00
12	Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo	%	98,00
13	Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	98,17
14	Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi	%	100,00
15	Persentase capaian SPM di RS Mata	%	100,00
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap	%	91,29
2	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	44,48
3	Persentase kondisi jembatan provinsi baik	%	91,18
4	Persentase akses air minum aman	%	40,43

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
5	Persentase akses air limbah domestik aman	%	10,97
6	Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	49,42
7	Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air	%	61,78
8	Persentase keterwujudan penataan ruang	%	61,57
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	%	14,29
2	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	%	0,04
3	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	55,21
	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	82,00
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,74
	Sosial		
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	0,55
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar		
	Tenaga Kerja		
1	Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28,60
2	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%	62,85
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Juta Rp	56,00
4	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	9,24
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	45,05
6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	91,07
7	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	81,53
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	40,00
2	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	4,25
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	66,00
	Pangan		
1	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83,00
	Pertanahan		
1	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	100,00
2	Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agrarian	%	100,00
	Lingkungan Hidup		
1	Indeks Kualitas Air	Angka	50,66
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	85,01
3	Indeks Pencemaran Air	Angka	3,37
4	Indeks SO2 dan NO2	Angka	0,37
	Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1	Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah	Nilai	4,00
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah	%	0,7318

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,13
	Perhubungan		
1	Indeks pelayanan transportasi	Angka	6,05
2	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,38
3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	16,098
4	*On time performance* layanan transportasi	%	83,22
	Komunikasi dan Informatika		
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,07
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	12,53
2	Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah	%	0,29
3	Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah	%	7,16
	Penanaman Modal		
1	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4,00
2	Persentase realisasi PMA dan PMDN	%	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90,00
	Kepemudaan dan Olahraga		
1	Sport Development Index (SDI)	%	0,42
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	56,85
	Statistik		
1	Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah	%	32,00
	Persandian		
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	636,00
	Kebudayaan		
1	Angka Melek Budaya	%	52,32
	Perpustakaan		
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	16,00
	Kearsipan		
1	Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	94,00
	Urusan Pilihan		
	Kelautan dan Perikanan		
1	Produksi perikanan	Ton	927.350
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	105,00
3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	Angka	110,00
	Pariwisata		
1	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	8,01
2	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rupiah	1.686.000.000.000
	Pertanian		
1	Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	%	3,00
2	Nilai Tukar Petani Peternakan	Angka	100,50
3	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	0,58
4	NTP Tanaman Pangan	Angka	105,19
5	NTP Hortikultura	Angka	108,11
6	NTP Perkebunan Rakyat	Angka	100,59
	Kehutanan		
1	Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	42,45

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
2	Luas tutupan lahan	Ha	1.022.457
	Energi dan Sumber Daya Mineral		
1	Presentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	18,41
2	Tingkat konsumsi tenaga listrik	kWh/kapita	768,10
3	Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka	3,60
4	Persentase penerapan *Good Mining Practice*	%	53,00
	Perdagangan		
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4,51
	Perindustrian		
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3,25
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
	Sekretariat Daerah		
1	Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	36,10
2	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80,00
pe	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90,00
4	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90,00
	Sekretariat DPRD		
1	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	90,00
2	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	%	75,00
3	Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	%	75,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
	Perencanaan		
1	Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	100,00
2	Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi	%	100,00
3	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional	%	100,00
	Keuangan		
1	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah	%	13,09
2	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain	%	-7,67
3	Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	97,75
4	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	84,02
	Kepegawaian		
1	Indeks Sistem Merit	Angka	0,86
	Pendidikan dan Pelatihan		
1	Indeks Kompetensi ASN	Angka	3,07
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	8,67
3	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	100,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
	Penelitian dan Pengembangan		
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	72,50
	Pengelolaan Penghubung		
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	85,00
	Unsur Pengawasan Pemerintahan		
1	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3,00
2	Level kapabilitas APIP	Level	3,00
3	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Level	3,00
	Unsur Pemerintahan Umum		
1	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,745
C	**Aspek Daya Saing**		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,55
2	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	4,00
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,50

7.3. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Indikator kinerja program tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.3.
Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	65	%	
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	36	Angka	
	Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	67,78	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	50	%	
	Persentase angka putus sekolah SMA	2,3	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase angka putus sekolah SMK	0,026	%	
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	60	%	
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	0,55	Angka	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	57,35	%	
	Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	50,35	%	
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	10,53	%	
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	10	Angka	
	Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	10	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	68,18	%	
	Persentase angka putus sekolah SLB	3,53	%	
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	80,3	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	10	%	
	Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	10	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	1,67	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	0,9	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	90,54	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	76,59	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	1	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	40,11	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	2,87	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	69,8	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	75,57	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	25,69	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	1,25	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	69,8	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	1,92	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	78,7	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	93,71	%	
	APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	79,86	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	90	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	90	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik	2,74	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	SMA, SMK dan SLB CABDIN VII			
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	85,55	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	72,83	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	77,11	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	2,2	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	76,12	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	3,22	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	79	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	54,59	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	77,81	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	28,57	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	84,74	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	87,73	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	3,63	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	44,94	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	1,96	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	80	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	81	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	88,25	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	2,52	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	79	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	89,06	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	81,22	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	83,27	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	81,77	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	88,34	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	86,49	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	88,83	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	89,03	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	85,85	Angka	
	Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	82,21	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	83,27	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	85,3	Angka	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	86,06	Angka	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	76,2	%	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	15	%	
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	93,93	%	
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	3	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	10	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	20	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI			
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	25	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	25	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	4,76	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD
	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	34,28	%	
	Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting	51,42	%	
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia	60	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63,9	%	
	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa	63,9	%	
	Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi	100	%	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	66,6	%	
	Persentase pemanfaatan informasi kesehatan	80	%	
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	80	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	42,85	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang	57,14	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang	100	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa	100	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa	71,42	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	42,85	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang	57,14	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten	100	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten	28,57	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati	100	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	28,57	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	28,57	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM	80	%	
	Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK	83	%	
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Dr. Moewardi	100	%	
	Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	100	%	
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	100	%	
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo	100	%	
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	%	
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	%	
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta	95	%	
	Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta	100	%	
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%	
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%	
	Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RS Khusus Mata	40	%	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD
	Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	80	%	
	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	98	%	
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	30	%	
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih	20	%	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				Dinas Kesehatan
	Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	75	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD
	Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi	82,85	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,85	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	28,57	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,85	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	28,57	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	28,57	%	
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo	100	%	
	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	%	
	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Surakarta	95	%	
	Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%	
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RS Khusus Mata	50	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
	Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air	61,31	%	
	Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	64,31	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi	69,11	Angka	
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi	52,37	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	62,68	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	34,78	%	
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal	53,26	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	71,8	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	54,6	%	
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	50,04	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	62,85	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	50	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	100	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	67,34	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	77,78	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	77,36	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	92,21	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	72,65	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	76,5	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase akses air minum layak	91,92	%	
	Persentase akses air minum jaringan perpipaan	54,32	%	
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase akses air limbah domestik layak	93,58	%	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	5,83	%	
	Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	11,94	%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase panjang jalan yang dileger	75,79	%	
	Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	100	%	
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	47,5	%	
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	41,68	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	95,52	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	86,14	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	85,23	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	88,49	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	89,43	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	83,65	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	99,95	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	85,51	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	94,17	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	93,65	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	91,61	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	94,9	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	88,12	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	93,82	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	86,78	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	91,18	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	93,17	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	94,78	%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	12,85	%	
	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	31,88	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	45,38	%	
	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	43,49	%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase implementasi pemanfaatan ruang	68	%	
	Persentase tertib ruang	56	%	
	Persentase ketersediaan rencana tata ruang	60,71	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase rumah layak huni yang disediakan	0,12	%	
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	2,73	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	3,18	%	
	Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100	%	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman	40	%	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum	29,57	%	
	Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah	67,15	%	
	Persentase penegakan produk hukum daerah	80	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina	40,03	%	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	100	%	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	0,12	%	
	Persentase penanganan darurat bencana	100	%	
	Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	2	%	
	Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik	2,86	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Dinas Sosial
	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	7,7	%	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				Dinas Sosial
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Dinas Sosial
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	1,92	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	0,07	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	0,07	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	0,08	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	0,1	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	0,06	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	0,06	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	0,09	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	0,05	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	0,07	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	0,09	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	0,11	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	0,08	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	0,06	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	0,12	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	0,04	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	0,12	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	0,03	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	0,11	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	0,06	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	0,11	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	0,06	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	0,11	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	0,03	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	0,03	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	0,04	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	0,06	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	0,05	%	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Dinas Sosial
	Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	100	%	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Dinas Sosial
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	80	%	
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	0,02	%	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Dinas Sosial
	Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	sesuai SPM Bidang Sosial			
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				Dinas Sosial
	Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	62,85	%	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	38,14	%	
	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	4,4	%	
	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	2,3	%	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	2,88	%	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	9,45	%	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	46,9	%	
	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan	13,13	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	produktivitas dan/atau kewirausahaan			
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	45,05	%	
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	68,1	%	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	98	%	
	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	49,75	%	
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	44,27	%	
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	96,15	%	
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	89,58	%	
	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	26,4	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
				Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	60	%	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	11	%	
	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	%	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	14,29	%	
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	14,29	%	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
				Keluarga Berencana
	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	25	%	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	82,85	%	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Rasio korban kekerasan terhadap anak	11,5	per 100.000 penduduk	
	Persentase korban kekerasan anak terlayani	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Dinas Ketahanan Pangan
	Rata-rata ketercukupan pangan	1,25	Angka	
	Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	0,064	Angka	
	Rasio cadangan pangan masyarakat	0,62	Angka	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	60	%	
	Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)	0,62	Angka	
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	87,8	kg/kapita/tahun	
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	87,8	kg/kapita/tahun	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				Dinas Ketahanan Pangan
	Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	0,01	%	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				Dinas Ketahanan Pangan
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	80	%	
	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan	80	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase fasilitasi penetapan lokasi	100	%	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	100	%	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	100	%	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya	2,85	%	
	Persentase pengujian kualitas air	100	%	
	Persentase pemantauan kualitas udara	100	%	
	Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	100	%	
	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	4,76	%	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	2,02	%	
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden	2,6	%	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase limbah B3 yang terkelola	80	%	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase rekomendasi lingkungan hidup	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	50	%	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya	10,5	%	
	Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah	31,43	%	
	Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	25	%	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase pengaduan yang ditangani	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase sampah yang tertangani	42	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	97	%	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen	97	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	akta kelahiran usia 0-17 diatas 98%			
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	16,67	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)	6,85	%	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa	100	%	
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa	100	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
				Pencatatan Sipil
	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	8,96	%	
	Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya	100	%	
	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	61,11	%	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	65,58	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Unmetneed	10	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	32	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Dinas Perhubungan
	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	0,38	Angka	
	Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	0,981	Angka	
	Rasio trayek angkutan jalan	0,51	Angka	
	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	65,38	%	
	Rasio pemanfatan terminal	0,218	Angka	
	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	0,5	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,24	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,97	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana	0,81	Angka	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Perhubungan Wilayah I Kelas A			
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,01	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,97	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,81	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,2	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,98	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,81	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,23	Angka	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,97	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,81	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,17	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,98	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,81	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,21	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,97	Angka	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,81	Angka	
	Rasio konektivitas perkotaan	0,481	Angka	
	Persentase perpindahan moda angkutan umum	51,72	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				Dinas Perhubungan
	Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	0,31	Angka	
	Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	0,2	Angka	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				Dinas Perhubungan
	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	0,04	Angka	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai survey kepuasan komunikasi publik	78	Angka	
	Nilai keterbukaan informasi publik	31	Angka	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	72	%	
	Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	15	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase koperasi berkualitas	25,02	%	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase SDM koperasi yang berkualitas	10	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase koperasi provinsi produktif	48,09	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase usaha mikro mandiri	81,2	%	
	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	23	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase UMKM siap bermitra	21,06	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan	50	%	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	46	%	
	Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	50	%	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
				Terpadu Satu Pintu
	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	90	%	
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	%	
	Persentase pemenuhan standar pelayanan	100	%	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	20	%	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	10	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah wirausaha muda mandiri	8	Orang	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	50	Orang	
	Persentase peningkatan perolehan medali	28,18	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah masyarakat yang bugar	750	Orang	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	50	Orang	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	24	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	25	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	19,17	%	
	Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	23,76	%	
	Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	47,61	%	
	Persentase cakupan pelestarian seni	100	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Tingkat partisipasi seni tradisi	8,89	%	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase akses literasi sejarah	52,9	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase cagar budaya berperingkat nasional	12,71	%	
	Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	25,13	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Nilai survey kepuasan pengunjung museum	89,85	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	80,56	%	
	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	23,08	%	
	Nilai survey kepuasan masyarakat	80	Nilai	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	84,67	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	25,97	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	100	%	
	Persentase peningkatan pengunjung arsip	19	%	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	12,19	%	
	Persentase arsip yang diselamatkan	19,47	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase produksi garam	1	%	
	Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	5	%	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	3,7	%	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	1,39	%	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	3,7	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase produksi perikanan tangkap	5	%	
	Indeks harga yang diterima oleh nelayan	108,27	Angka	
	Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	44,44	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	72	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong	72,72	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	81,82	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	70	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	62,62	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	81	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	100	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	100	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	63,63	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	63	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	72	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	100	%	
	Persentase produksi ikan konsumsi air laut	5	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Produksi perikanan budidaya	600000	Ton	
	Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	111,27	Angka	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	70	%	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	2	%	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	61	%	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	2	%	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	61	%	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	2	%	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah	61	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	kerja Cabdin Wilayah Timur			
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah produksi olahan ikan	160000	Ton	
	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	13,33	%	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah kunjungan wisatawan	49.985.228	Orang	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	6	Kabupaten/Kota	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	48,98	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
				Pertanian dan Perkebunan
	Jumlah populasi ternak potong	3726434	(ST)/(AU)	
	Jumlah populasi ternak perah	112876	(ST)/(AU)	
	Jumlah populasi ternak petelur	246615	(ST)/(AU)	
	Persentase fasilitasi obat hewan	1	%	
	Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan	4	Dokumen	
	Persentase produksi dan distribusi semen beku	1	%	
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging	1	%	
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu	1	%	
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur	1	%	
	Persentase luas lahan yang dioptimasi	2,5	%	
	Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi	90	%	
	Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani	2,5	%	
	Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan	100	%	
	Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan	3	%	
	Produksi kedelai	52657	Ton	
	Produksi jagung	3576577	Ton	
	Produksi padi	9594280	Ton	
	Produksi bawang merah	515000	Ton	
	Produksi cabai	341000	Ton	
	Produksi durian	149668	Ton	
	Produksi jahe	34862	Ton	
	Produksi melati	24627	Ton	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Produksi kopi	25927	Ton	
	Produksi tebu	2554553	Ton	
	Produksi kelapa	166687	Ton	
	Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya	2	%	
	Persentase layanan sertifikasi benih	100	%	
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	85	%	
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta	85	%	
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	85	%	
	Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan	3	%	
	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1	%	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	10	%	
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	10	%	
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	10	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	10	%	
	Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	7420274	m	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis	4	Dokumen	
	Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali	3	%	
	Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV)	2,8	%	
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara	4	Dokumen	
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan	4	Dokumen	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam	5	%	
	Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	15	%	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Perkebunan

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong	1,02	%	
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah	3,11	%	
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur	2,27	%	
	Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	2,5	%	
	Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	35,4	%	
	Persentase lahan kritis tertangani	0,47	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	100	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1	0,02	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 1	1,38	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	ditangani di wilayah CDK 1			
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2	0,04	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 2	100	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 2	1,72	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3	0,03	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 3	100	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 3	1,64	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4	0,03	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 4	100	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 4	1,46	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5	0,04	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	ditangani di wilayah CDK 5			
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 5	1,29	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6	0,09	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 6	100	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 6	2,15	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8	0,04	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 8	100	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 8	1,03	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9	0,04	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 9	100	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9	1,46	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10	0,03	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 10	100	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 10	1,03	%	
	Persentase peningkatan produksi bibit	-40	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11	0,03	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 11	100	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 11	1,29	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7	0,09	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 7	100	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 7	1,55	%	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	10	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	40	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 1	5	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 1	100	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 2	5	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 2	100	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 3	5	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 3	100	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 4	5	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 4	100	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 5	5	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 5	100	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 6	5	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 6	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 8	5	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 8	100	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 9	5	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 9	100	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 10	5	%	
	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura	70	Angka	
	Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	100	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 11	5	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 7	5	%	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	2,5	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1	0,3	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3	0,2	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5	0,3	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7	0,3	%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	10	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah	27,5	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	1,6	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	3,4	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	1,7	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	2,2	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	4,1	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	1,8	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	2,4	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	1,6	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	2,7	%	
	Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	100	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	2,9	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	2,8	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	1,6	%	
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	60	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	60	%	
	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	100	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	60	%	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	590300,484	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	39608,43	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	23599,9	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	125685,73	SBM	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	122,33	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	91,75	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	39480,034	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	78666,36	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu	39363,76	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	78562,37	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak	39394,34	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	86438,18	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	39287,3	SBM	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	63,81	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	49,7	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	51,09	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	49,97	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	49,36	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	49,96	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	49,95	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	49,66	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	49,57	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	49,59	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2)	51,86	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Wilayah Semarang Demak			
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	49,64	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	49,08	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	10	%	
	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah	8	%	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi	10	%	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota	10	%	
	Persentase kinerja realisasi pupuk	90	%	
	Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi	30	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan nilai ekspor non migas	2	%	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen	1	%	
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	5	%	
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	10	%	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	10	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase pertumbuhan produksi industri agro	2,25	%	
	Persentase pertumbuhan produksi industri non agro	2,25	%	
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	3,45	%	
	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	85	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	4,38	%	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	7	%	
	Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	10	%	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	1,62	%	
	Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	2	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	3,61	%	
SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	66	%	
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor	85,71	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	kematangan organisasinya			
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	88,1	%	
	Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	60	%	
	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	14,29	%	
	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	64,28	%	
	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	50	%	
	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	88,73	%	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				Sekretariat Daerah
	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	95	%	
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	95	%	
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	95	%	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				Sekretariat Daerah
	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	81	%	
	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	82	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	54	%	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				Sekretariat Daerah
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	96	%	
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	96	%	
	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	96	%	
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	96	%	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Sekretariat Daerah
	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	87	%	
	Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	85	%	
	Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	85	%	
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	83	%	
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	78	%	
	Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	85	%	
	Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	81	%	
	Persentase nilai kemandirian BLUD	55	%	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				Sekretariat Daerah
	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	90	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	80	%	
	Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	81	%	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				Sekretariat Daerah
	Persentase capaian pelaksanaan APBD	98,7	%	
	Persentase capaian pelaksanaan APBN	95,5	%	
	Persentase realisasi bantuan keuangan	85	%	
	Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	85	%	
	Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	100	%	
SEKRETARIAT DPRD				
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				Sekretariat DPRD
	Persentase layanan bagian humas	95	%	
	Persentase fasilitasi penyusunan raperda	95	%	
PERENCANAAN				
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	100	%	
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian	100	%	
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian	100	%	
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100	%	
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100	%	
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi	100	%	
	Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi	100	%	
KEUANGAN				
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	100	%	
	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	100	%	
	Persentase penetapan APBD tepat waktu	100	%	
	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100	%	
	Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	84,02	%	
	Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu	100	%	
	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Badan Pengelola Pendapatan Daerah
	Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah	100	%	
	Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	72	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain	-7,67	%	
	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan	100	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1	24,91	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1	18,18	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	-21,85	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	20,87	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II	6,61	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II	18,66	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II	12,53	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	-17,94	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	20,09	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III	21,98	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III	15,09	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III	12,2	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	-17,96	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	20,2	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	9,5	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang	23,93	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang	13,7	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	-20,16	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	19,97	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga	2,24	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga	23,51	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga	6,69	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	20,52	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	-25,36	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal	32,43	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal	18,31	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal	12,95	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	-25,77	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	20,75	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak	23,16	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak	20,8	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak	10,78	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset	-24,27	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	daerah UPPD Kabupaten Demak			
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	19,8	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan	22,34	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan	20,87	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan	13,12	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	-20,94	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	19,94	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta	3,8	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta	19,79	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta	6,58	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	-22,24	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	20,21	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten	24,85	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten	18,99	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten	13,42	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	-24,67	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	20,93	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen	19,63	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen	26,51	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air	8,21	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen			
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	-25,1	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	19,89	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	23	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	25,8	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo	1,76	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	-25,99	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	20,94	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	11,97	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	20,9	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KAbupaten Wonogiri	12,75	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	-20,99	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	20,4	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	30,62	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	21,98	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar	9,35	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	-16,8	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	21,21	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali	23,05	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali	19,89	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali	13,03	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	-25,7	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	20,48	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati	16,61	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati	15,79	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati	13,58	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	-18,76	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	19,45	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora	13,4	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora	19,93	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora	12,4	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	-18,49	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	20,31	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang	11,59	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang	18,71	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang	12,45	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	-15,14	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	19,33	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus	12,4	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus	18,96	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus	7,24	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	-21,23	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	20,31	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara	22,63	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara	14,71	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara	19	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	-22,19	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	10,98	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor	-25,14	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	(PKB) UPPD Kota Pekalongan			
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan	28,17	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	-16,7	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	20,29	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	41,78	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	19,62	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan	13,51	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	-20,86	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	20,16	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang	38,33	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang	15,23	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang	13,44	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	-23,43	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	20,24	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang	30,76	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang	11,83	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang	11,27	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	-17,02	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	20,84	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal	-25,92	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal	12,2	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	19,25	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	20,49	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal	66,86	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal	14,12	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	-25,7	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	20,57	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal	13,27	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes	44	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)	20,1	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	UPPD Kabupaten Brebes			
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes	12,88	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	-22,26	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	20,83	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas	25,25	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas	19,52	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas	13,75	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	-25,89	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	20,26	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap	23,27	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap	16,42	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap	11,83	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	-13,57	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	20,24	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	14,57	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	28,72	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga	13,77	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga	-15,51	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	20,9	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor	45,72	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	(PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara			
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	21,49	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara	13,44	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	-25,11	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	20,31	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang	-53,02	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang	16,85	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang	9,11	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	-13,62	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan	21,76	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	aset daerah UPPD Kota Magelang			
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang	34,47	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang	19,55	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang	13,59	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	-25,13	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	22,12	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen	25,05	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen	20,82	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen	13,41	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	-18,63	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	20,99	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo	4,96	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo	23,68	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo	12,21	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	-12,81	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	22,01	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung	32,03	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung	23,36	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung	13,59	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset	-20,87	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	daerah UPPD Kabupaten Temanggung			
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	21,35	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	24,01	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	22,39	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo	13,38	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	-24,77	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	20,95	%	
KEPEGAWAIAN				
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Badan Kepegawaian Daerah
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	100	%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	100	%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100	%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	100	%	
	Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	100	%	
	Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	100	%	
	Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	100	%	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	100	%	
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	100	%	
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	100	%	
	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	85	%	
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	3,5	Angka	
	Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	100	%	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Badan Riset dan Inovasi Daerah

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi	100	%	
	Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	100	%	
	Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi	100	%	
	Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi	100	%	
PENGELOLAAN PENGHUBUNG				
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				Badan Penghubung
	Persentase ketercapaian pelayanan penghubung	100	%	
INSPEKTORAT DAERAH				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				INSPEKTORAT
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	83	%	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	85	%	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	85	%	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	85	%	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	85	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				INSPEKTORAT
	Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	10,2	%	
	Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korups (IEPK) level 3	10,2	%	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Ideologi Pancasila	3	Nilai	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks kewaspadaan Nasional	73	Angka	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks kinerja ormas	75,34	Nilai	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks toleransi	74,1	%	
	Indeks penguatan dampak ekonomi	3	%	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	75	Nilai	
NON URUSAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	%	Seluruh Perangkat Daerah

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	%	
	Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi	82	%	RSUD Dr. Moewardi
	Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	82	%	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo	55,25	%	RSUD dr. ADHYATMA, MPH
	Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo	35	%	RSUD dr. REHATTA
	Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	43	%	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta	33	%	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
	Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	46,5	%	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

BAB VIII
PENUTUP

Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 menjadi tahun yang cukup penting karena di tahun 2024 menjadi landasan awal untuk perencanaan tahun berikutnya dalam periode RPD Tahun 2024-2026. Untuk itu maka dalam RKPD Tahun 2024 memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Serangkaian program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2024 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

RKPD Tahun 2024 disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (*outcome*), terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, berbasis risiko (*riskbased planning*), dan berbasis pada riset (*researchbased planning*), dengan pendekatan *money follow programme* dan *programme follow result*, dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. RKPD Tahun 2024 akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024. Kebijakan dalam RKPD Tahun 2024 harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 dalam rangka mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD Tahun 2024 juga menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk didalamnya masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah Jawa Tengah.

Sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024. Dengan demikian diharapkan akan tercapai cita-cita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 yakni “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”.

PJ GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA
IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I
DAFTAR TABEL III
BUKU II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022 1
2.1. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama 1
2.2. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah 2
2.3. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program 17
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 17
1. Urusan Pendidikan 17
2. Kesehatan 33
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 42
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 51
5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat 52
6. Sosial 54
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 60
1. Tenaga Kerja 60
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 63
3. Pangan 65
4. Pertanahan 67
5. Lingkungan Hidup 68
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 72
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 73
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 75
9. Perhubungan 77
10. Komunikasi dan Informatika 80
11. Koperasi dan UKM 81
12. Penanaman Modal 83
13. Kepemudaan dan Olahraga 85
14. Statistik 86
15. Persandian 86
16. Kebudayaan 87
17. Perpustakaan 88
18. Kearsipan 90

C. Urusan Pilihan 91
1. Perikanan dan Kelautan 91
2. Pariwisata 96
3. Pertanian 97
4. Kehutanan 102
5. Energi dan Sumber Daya Mineral 112
6. Perdagangan 117
7. Perindustrian 119
8. Transmigrasi 121
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 121
1. Sekretariat Daerah 121
2. Sekretariat DPRD 127
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 128
1. Perencanaan 128
2. Keuangan 130
3. Kepegawaian 156
4. Pendidikan dan Pelatihan 157
5. Penelitian dan Pengembangan 158
6. Penghubung 160
2.4. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 160
2.5. Unsur Pemerintahan Umum 162

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 1
Tabel 2. 2 Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 2
Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan 17
Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan 33
Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..42
Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 51
Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 52
Tabel 2. 8 Capaian Kinerja Urusan Sosial 54
Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja 60
Tabel 2. 10 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 63
Tabel 2. 11 Capaian Kinerja Urusan Pangan 66
Tabel 2. 12 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan 67
Tabel 2. 13 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 68
Tabel 2. 14 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 72
Tabel 2. 15 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ...73
Tabel 2. 16 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 75
Tabel 2. 17 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan 77
Tabel 2. 18 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika 81
Tabel 2. 19 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM 81
Tabel 2. 20 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal 83
Tabel 2. 21 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 85
Tabel 2. 22 Capaian Kinerja Urusan Statistik 86
Tabel 2. 23 Capaian Kinerja Urusan Persandian 87
Tabel 2. 24 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan 87
Tabel 2. 25 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan 89
Tabel 2. 26 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan 90
Tabel 2. 27 Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan 91

Tabel 2. 28 Capaian Kinerja Pariwisata 96
Tabel 2. 29 Capaian Kinerja Urusan Pertanian 97
Tabel 2. 30 Capaian Kinerja Kehutanan 102
Tabel 2. 31 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral..... 112
Tabel 2. 32 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan 117
Tabel 2. 33 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian 119
Tabel 2. 34 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi..... 121
Tabel 2. 35 Capaian Kinerja Sekrateriat Daerah 121
Tabel 2. 36 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD 127
Tabel 2. 37 Capaian Kinerja Perencanaan 128
Tabel 2. 39 Capaian Kinerja Kepegawaian 156
Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan 157
Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan 158
Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Pengawasan 160
Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum..... 162

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

BUKU II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022

2.1. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Koordinator
			Target 2022	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	15	15,38	102,53	●	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	79	80,31	101,66	●	Sekretariat Daerah
3	Angka Kemiskinan	%	10,49-10,30	10,98	95,54	▼	Sekretariat Daerah
4	Indeks Gini	Angka	0,35	0,366	95,63	▼	Sekretariat Daerah
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75-5,69	5,57	96,87	▼	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,20-5,20	5,31	126,43	●	Sekretariat Daerah
7	Inflasi	%	3,0±1	5,63	53,29	▼	Sekretariat Daerah
8	PDRB per kapita	Juta Rupiah	39,56	42,15	106,55	●	Sekretariat Daerah
9	Indeks Williamson	Angka	0,57	0,656	86,89	▼	Sekretariat Daerah
10	Nilai Tukar Petani	Angka	103,56	107,27	103,58	●	Sekretariat Daerah
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,49	72,79	100,41	●	Sekretariat Daerah
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,18	92,83	100,71	●	Sekretariat Daerah
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,52	67,53	100,01	●	Sekretariat Daerah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

2.2. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah

Capaian indikator kinerja daerah merupakan capaian indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggaran pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.

Tabel 2. 2
Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022			Status
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1	Angka Kemiskinan	%	10,49-10,30	10,98	95,54	
2	Indeks Gini	Angka	0,35	0,366	95,63	
3	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	9,38-9,22	10,02	93,61	
4	Persentase penduduk miskin perdesaan	%	11,65-11,45	10,98	106,10	
5	Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	433,38	NA	NA	NA
6	Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	61,5	NA	NA	NA
7	Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	30	NA	NA	NA
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75-5,69	5,57	103,23	
9	Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	7,48	NA	NA	NA
10	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,20-5,20	5,31	126,43	
11	Inflasi	%	3,0±1	5,63	53,29	
12	PDRB per kapita	Juta Rupiah	41,46	42,15	101,66	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022			Status
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
13	Indeks Williamson	Angka	0,57	0,656	86,89	
14	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	3	NA	NA	NA
15	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	2,93	NA	NA	NA
16	Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	2,82	5,87	208,16	
17	Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	15,3	NA	NA	NA
18	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4,00-5,00	11,72	293-234,4	
19	Nilai Tukar Petani	Angka	103,56	107,27	103,58	
20	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,58	72,79	100,29	
21	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,96	7,93	NA	NA
22	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,88	12,81	NA	NA
23	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,53	74,57	100,05	
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,18	92,83	100,71	
B	Aspek Pelayanan Umum					
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	PENDIDIKAN					
1	Disparitas APK SMA/SMK/SLB	%	8,76	8,78	100,23	
2	Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar	%	83,8	83,83	100,04	
3	Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB	Angka	0,07	0,07	100,00	
4	Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik	%	99,15	99,85	100,71	
	KESEHATAN					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022			Status
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
5	Angka Kematian Ibu	100.000/ KH	88	84,6	104,02	
6	Angka Kematian Balita	1.000/KH	10,45	8,2	127,44	
7	Angka Kematian Bayi	1.000/KH	7,9	7,02	112,54	
8	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0,2	0,23	115,00	
9	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	63	63	100,00	
10	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	100	100,00	
11	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	%	74	85,08	114,97	
12	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	72	86,43	120,04	
13	Persentase Capaian SPM di RSUD Dr. Moewardi	%	83	86,03	103,65	
14	Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	89	89,87	100,98	
15	Persentase Capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90	91,11	101,23	
16	Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Kelet Donorejo	%	85	86,73	102,04	
17	Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	99,62	99,62	
18	Persentase Capaian SPM di RSJD Surakarta	%	82	98,56	120,20	
19	Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	95	98,35	103,53	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022			Status
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
20	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	13,3	14,21	106,84	
21	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	41,35	43,5	105,20	
22	Persentase akses layak air minum Jawa Tengah serta akses sanitasi layak bagi masyarakat	%	88,83	88,97	100,16	
23	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	91,55	92,49	101,03	
24	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	%	65,2	65,81	100,94	
25	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	54,36	54,43	100,13	
26	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	76,04	77,19	101,51	
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
27	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	%	24,76	58,54	236,43	
28	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	25,27	15,75	137,67	
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
29	Persentase penanganan gangguan tramtibum di Jawa Tengah	%	100	100	100,00	
30	Persentase kepatuhan hukum, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	100	100	100,00	
31	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100	100	100,00	
32	Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	%	10	10,35	103,5	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022			Status
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
33	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	3	3,33	111,00	
34	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	100	100,00	
	SOSIAL					
35	Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	1,9	5,55	292,11	
36	Persentase peningkatan kapasitas bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	25,74	25,74	100,00	
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	TENAGA KERJA					
37	Persentase pengangguran yang ditangani	%	9,86	28,02	284,18	
38	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	24,24	70,52	290,92	
39	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	%	90,56	90,83	100,30	
40	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	Juta Rupiah	29,39	57,11	194,32	
41	Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	5,68	12,2	214,79	
42	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	91,07	88,1	103,37	
43	Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	28,57	34	119,01	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
44	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,15	7,47	109,10	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022			Status
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
45	Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	%	91,43	100	109,37	
46	Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di pemerintah daerah	%	34,27	36,11	105,37	
47	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	60	71,42	119,03	
48	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	%	80	80	100,00	
49	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,05	4,2	191,67	
50	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	72,62	73,78	101,59	
	PANGAN					
51	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	88,44	94,4	106,74	
52	Angka Konsumsi Energi	Kkal/kapita/hari	2.100	2018	96,10	
	PERTANAHAN					
53	Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	321,89	321,89	
	LINGKUNGAN HIDUP					
54	Indeks Pencemaran Air	%	3,45	3,17	108,83	
55	Indeks Pencemar SO2 dan NO2	%	0,2	0,2	100,00	
	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
56	Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan	%	100	100	100,00	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
57	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	50,34	82,27	163,43	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022			Status
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
58	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,2	2,15	102,27	
59	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	Angka	64,76	65,18	100,65	
60	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	54,38	56,1	103,16	
	PERHUBUNGAN					
61	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	47,38	54,98	116,04	
62	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	23,49	29,19	124,27	
63	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	46,67	46,67	100,00	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
64	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	3,83	3,7	96,61	
65	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka	3,53	3,5	99,15	
66	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	4,17	4,62	110,79	
	KOPERASI DAN UKM					
67	Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	9,88	9,94	100,61	
68	Persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	21,1	21,19	100,43	
	PENANAMAN MODAL					
69	Persentase Realisasi PMA dan PMDN	%	100	104,38	104,38	
70	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90	94,28	104,76	
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022			Status
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
71	Indeks Pembangunan Pemuda	%	55,15	54,5	98,2	
72	Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	0,63	0,63	100	
	STATISTIK					
73	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%	81,76	85,7	104,82	
	PERSANDIAN					
74	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level	3	3	100,00	
	KEBUDAYAAN					
75	Persentase Jenis seni budaya yang terlayani	%	6,2	6,2	100,00	
	PERPUSTAKAAN					
76	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	72,5	83,56	115,26	
	KEARSIPAN					
77	Nilai Pengelolaan Kearsipan LKD Provinsi	Angka	89,82	91,01	101,32	
	URUSAN PILIHAN					
	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
78	Produksi Perikanan	Ton	1.018.830,92	913011,18	89,61	
79	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	38,18	38,18	100	
	PARIWISATA					
80	Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	%	3,23	3,39	104,95	
	PERTANIAN					
81	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	%	11,6	9,94	85,69	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022			Status
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
82	Persentase kenaikan produksi daging, susu, telur	%	3,92	4,31	109,95	
	KEHUTANAN					
83	Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,43	0,43	100	
84	Luas Tutupan Lahan (LTV)	km^2	10.223,65	10224,6	100,01	
85	Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan	%	0,47	-3,79	-806,38	
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
86	Persentase izin usaha pertambangan operasi produksi melaksanakan *good mining practice* (GMP)	%	43,5	80,32	184,64	
87	Indeks ketersediaan air tanah	Angka	3,05	3,67	120,33	
88	Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1	1,45	145,00	
89	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	14,85	15,76	106,13	
	PERDAGANGAN					
90	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	2,82	4,32	153,19	
	PERINDUSTRIAN					
91	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	2,93	3,88	132,42	
	TRANSMIGRASI					
92	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%	3,18	5,28	166,04	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DAERAH					
93	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85	86,51	101,78	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022			Status
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
94	Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80	80,43	100,54	
95	Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%	76	76,92	101,21	
96	Persentase efektivitas penyelesaian masalah hukum	%	95	100	105,26	
97	Persentase efektivitas produk hukum daerah	%	95	100	105,26	
98	Persentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	%	40	42,86	107,15	
99	Efektivitas kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	%	90	100	111,11	
100	Ketercapaian laba BUMD	%	70	98,17	140,24	
101	Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang SDA	%	80	82,61	103,26	
102	Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	%	85	85	100,00	
103	Efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah	%	88	91,97	104,51	
104	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	85	92,15	108,41	
105	Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	%	60,98	65,85	107,99	
106	Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B keatas	%	83,67	91,83	109,75	
107	Persentase OPD dengan Nilai Kematangan Organisasi dalam ketegori minimal sedang	%	75,61	100	132,26	
108	Nilai IKM layanan Biro Umum	%	78	82,22	105,41	
	SEKRETARIAT DPRD					
109	Indeks Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	%	88,5	90,33	102,07	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022			Status
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	PERENCANAAN					
110	Persentase perencanaan pembangunan yang berkualitas	%	90	90	100,00	
	KEUANGAN					
111	Persentase peningkatan pajak daerah	%	10,58	4,58	43,29	
112	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan lain yang sah	%	2,26	2,65	117,26	
113	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	100	100	100,00	
114	Persentase tata kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	70	77,2	110,29	
	KEPEGAWAIAN					
115	Persentase distribusi penempatan PNS dalam Jabatan	%	100	100	100,00	
116	Persentase pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100	100	100,00	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
117	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	35,92	38,19	106,32	
118	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	25	50,97	203,88	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
119	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	67	71,32	106,45	
120	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	4	4,12	103,00	
	PENGELOLAAN PENGHUBUNG					
121	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	84	85	101,19	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022			Status
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
122	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100,00	
123	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,18	3,26	102,51	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
124	Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,97	3,75	126,26	
125	Indeks Ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,12	4,1	131,41	
C	Aspek Daya Saing					
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	15	15,38	102,53	
2	Indeks Toleransi	Angka	75,9	73,68	97,08	
3	Persentase tindak pidana yang tertangani	%	87	92,15	105,92	
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	79	80,31	101,66	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86	86,5	100,58	
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,27	3,98	121,71	
7	Nilai SAKIP	Angka	84	NA	NA	NA
8	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,49	3,42	97,99	
9	Opini BPK	Opini	WTP	NA	NA	NA
10	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	38	40,55	106,71	
11	Indeks Sistem Merit	Angka	0,72	0,82	113,89	
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,52	67,53	100,01	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2022			Status
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
13	Indeks Kualitas Air	Angka	50,6	50,63	100,06	
14	Indeks Kualitas Udara	Angka	84,95	85,14	100,22	
15	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	51,2	41,86	81,76	
16	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	3,56	3,65	102,53	

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100%

:Perlu Upaya Keras < 100%

NA : Data Belum Tersedia

Capaian indikator kinerja daerah yang berjumlah 165 indikator terdapat 137 indikator telah tercapai, 11 belum rilis data dan 17 indikator tidak mencapai target Tahun 2022 yaitu:

1. Angka Kemiskinan dikarenakan ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama periode Maret 2022 - September 2022 antara lain Pemerintah menerapkan kebijakan menaikkan harga BBM mulai tanggal 3 September 2022 sebagai akibat adanya kenaikan harga minyak dunia akibat perang Ukraina-Rusia. Kenaikan harga BBM memberikan dampak secara tak langsung pada inflasi berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Selama periode Maret 2022 - September 2022, mengalami inflasi sebesar 3,87 persen. Dampak ke kemiskinan cukup serius dikarenakan semakin tinggi laju inflasi, khususnya inflasi pangan akan semakin tinggi garis kemiskinan. Inflasi bisa menaikkan garis kemiskinan karena harga barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan. Kenaikan inflasi akan diikuti dengan penurunan daya beli jika tidak diikuti kenaikan pendapatan, terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. Mengingat Garis kemiskinan diukur dengan pendekatan pengeluaran atau konsumsi, maka Garis Kemiskinan sangat sensitif terhadap perubahan harga.
2. Indeks Gini dikarenakan pada September Tahun 2022 menurun (membaik) sebesar 0,002 poin dari 0,368 pada Tahun 2021 menjadi sebesar 0,366 Tahun 2022. Rinciannya indeks gini di perkotaan sebesar 0,392 (turun 0,001) dan indeks gini di perdesaan sebesar 0,326 (naik 0,002). Fenomena peningkatan ketimpangan yang tinggi di Kawasan perkotaan mencerminkan bahwa golongan masyarakat berpenghasilan rendah lebih terpapar dampak pelemahan ekonomi yang lebih besar dibandingkan golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Capaian indeks gini Provinsi Jawa Tengah merupakan yang terendah sepulau jawa setelah Provinsi Jawa Timur sebesar 0,365 dan lebih baik dari nasional sebesar 0,381. Upaya dilakukan untuk menurunkan indeks gini di Jawa Tengah

antara lain dengan meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro kecil melalui program Kredit Usaha Rakyat dan Program Kredit Mitra Jateng 25, pendidikan vokasi, pengembangan wirausaha di masyarakat, pengembangan sektor industri pengolahan dan pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja, mempermudah layanan izin usaha melalui aplikasi Online Single Submission (OSS).

3. Persentase penduduk miskin perkotaan dikarenakan masih terdapat efek memar (*scarring effect*) dampak dari pandemic covid-19 yang efeknya lebih terasa pada penduduk miskin di perkotaan. Selain itu kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM mulai tanggal 3 September 2022 sebagai akibat adanya kenaikan harga minyak dunia akibat perang Ukraina-Rusia memberikan dampak secara tak langsung pada inflasi berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Penduduk miskin di perkotaan lebih sensitive akan hal tersebut dikarenakan intensitas aktivitas perekonomian dan mobilitas penduduk di perkotaan yang lebih tinggi, khususnya pada sektor informal dan UMKM, menyebabkan dampak Covid-19 dan kenaikan harga terhadap kemiskinan di perkotaan lebih tinggi. Di sisi lain, wilayah perkotaan bukan basis produksi komoditi pangan, sehingga inflasi pangan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.
4. Inflasi dikarenakan adanya andil inflasi dari kenaikkan harga BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan Solar, akibat gejolak ekonomi global perang Rusia-Ukraina serta kenaikkan harga beras, telur ayam ras dan bawang merah akibat curah hujan yg tinggi mengakibatkan penurunan produktivitas. Upaya yg telah dilakukan Pemprov Jateng dalam pengendalian inflasi adalah penanganan pada dampak inflasi (Program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat) dan pada upaya pengendalian inflasi (Menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi antar daerah, dan optimalisasi peran TPID).
5. Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohutomo dikarenakan beberapa faktor diantaranya :
   a. Pada Instalasi Rawat Jalan
      - Pada indikator jam buka pelayanan sesuai ketentuan, dikarenakan DPJP melakukan kegiatan visite terlebih dahulu & menghadiri jadwal program ECT

   b. Pada Instalasi Rawat Inap
      - Indikator Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa tidak kembali dalam perawatan dalam waktu ≤1 bulan. Dikarenakan beberapa factor yaitu penderita tidak minum obat, tidak control ke dokter secara teratur, kurangnya dukungan dari keluarga.
      - Jam visite dokter spesialis, dikarenakan keterbatasan jumlah poliklinik rawat jalan mengakibatkan banyaknya pasien yg dilayani sehingga jam selesai pelayanan melebihi dari yang ditentukan berakibat pada jam visite dokter terlambat.
   c. Pada Instalasi Pelayanan Pengelolaan Limbah
      - Indikator baku mutu limbah, karena terdapat 1 indicator yang tidak memenuhi syarat yakni mikrobiologi atau bakteriologis dalam air limbah melebihi ambang batas yang telah ditentukan
6. Angka Konsumsi Energi dikarenakan capaian angka konsumsi energi beberapa kelompok pangan dibawah AKE ideal diantaranya adalah kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak dan

kacang-kacangan.

7. Indeks Domain Tata Kelola SPBE dikarenakan belum dinilainya data dukung Pergub dan dokumen arsitektur yang berpengaruh pada Indikator Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE, Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
8. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE dikarenakan belum dinilainya data dukung Pergub dan dokumen arsitektur yang juga berpengaruh pada pada Indikator Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data.
9. Indeks Pembangunan Pemuda dikarenakan capaian Tahun 2022 sebesar 54,5% merupakan capaian Tahun 2021 (Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2022 belum dirilis oleh pusat).
10. Produksi Perikanan dikarenakan:
    a. Kondisi sarpras pelabuhan yang overcapacity;
    b. Penurunan sumberdaya ikan; dan
    c. Sebagian besar nelayan kecil belum menerapkan teknologi
11. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dikarenakan belum optimalnya capaian kinerja indikator tersebut disebabkan adanya penurunan luas tanam dan produktivitas yang diakibatkan oleh serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan bencana banjir. Namun demikian telah dilakukan beberapa upaya untuk mengatasinya antara lain penerapan kebijakan Indeks Pertanaman (IP) 400 untuk komoditas padi, yaitu tanam 4 kali dalam 1 tahun pada lahan yang sama; perlindungan petani melalui fasilitasi premi asuransi usaha tani; dan penerapan pengendalian hama terpadu.
12. Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB dikarenakan pada tahun 2022 hasil tebangan kayu bulat dan hasil hutan kayu lebih rendah dari tahun sebelumnya serta harga kayu yang jauh lebih rendah
13. Persentase peningkatan pajak daerah dikarenakan ketidakmampuan dan/atau ketidakmauan wajib pajak membayar tepat waktu sebelum jatuh tempo serta kelangkaan pasokan chip semikonduktor yang berdampak pada stok kendaraan bermotor baru dan penjualan kendaraan bermotor turun drastis.
14. Indeks Persepsi Anti Korupsi dikarenakan penghitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) semula dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia sejak tahun 2021 dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melalui Survey Penilaian Integritas (SPI). Terdapat perbedaan metode penilaian dimana KemenPAN-RB melakukan survey kepada 100 orang pejabat struktural secara acak di lingkungan Pemprov Jateng. Sedangkan KPK melakukan survey kepada Expert (akademisi, pengusaha), Penerima Manfaat layanan, dan Internal Pegawai Lingkup Pemprov Jateng.
15. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dikarenakan penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) saat ini merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 tahun 2021, terdapat perubahan kriteria dimana kelas penutupan lahan pertanian lahan kering campur tidak masuk dalam formulasi perhitungan IKTL. Kelas penutupan lahan ini merupakan areal hutan rakyat yang menjadi kewenangan Provinsi untuk melakukan intervensi.

2.3. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
	APK SLB	%	69,1	89,16	129,03		Bidang Pembinaan Diksus
	APK SLB Cabdin I	%	164,88	143,10	86,79		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	APK SLB Cabdin II	%	55,45	110,37	199,04		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	APK SLB Cabdin III	%	71,99	122,07	169,57		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	APK SLB Cabdin IV	%	63,65	1142,17	1794,45		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	APK SLB Cabdin IX	%	64,7	69,56	107,51		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	APK SLB Cabdin V	%	120,05	134,05	111,66		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	APK SLB Cabdin VI	%	55,45	73,33	132,24		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	APK SLB Cabdin VII	%	188,11	195,79	104,08		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	APK SLB Cabdin VIII	%	67,26	57,64	85,70		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	APK SLB Cabdin X	%	49,8	67,98	136,51		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	APK SLB Cabdin XI	%	30,1	61,83	205,42		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	APK SLB Cabdin XII	%	48,77	51,34	105,27		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	APK SLB Cabdin XIII	%	80,65	96,29	119,39		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	APK SMA	%	27,3	29,14	106,74		Bidang Pembinaan SMA
	APK SMA Cabdin I	%	34,63	38,64	111,58		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	APK SMA Cabdin II	%	30,14	32,15	106,67		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	APK SMA Cabdin III	%	28,51	28,80	101,02		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	APK SMA Cabdin IV	%	25,45	25,69	100,94		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	APK SMA Cabdin IX	%	23,06	24,80	107,55		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	APK SMA Cabdin V	%	34,23	35,07	102,45		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	APK SMA Cabdin VI	%	25,87	25,98	100,43		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	APK SMA Cabdin VII	%	48,67	50,27	103,29		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	APK SMA Cabdin VIII	%	29,71	29,06	97,81		CABANG DINAS

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
							PENDIDIKAN VIII
	APK SMA Cabdin X	%	23,11	23,64	102,29		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	APK SMA Cabdin XI	%	29,8	30,50	102,35		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	APK SMA Cabdin XII	%	21,8	21,91	100,50		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	APK SMA Cabdin XIII	%	28,75	30,42	105,81		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	APK SMK	%	49,4	52,59	106,46		Bidang Pembinaan SMK
	APK SMK Cabdin I	%	49,83	50,29	100,92		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	APK SMK Cabdin II	%	35,5	43,15	121,55		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	APK SMK CAbdin III	%	41,82	44,92	107,41		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	APK SMK Cabdin IV	%	44,47	45,16	101,55		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	APK SMK Cabdin IX	%	48,2	54,40	112,86		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	APK SMK Cabdin V	%	55,61	56,10	100,88		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	APK SMK Cabdin VI	%	52,91	52,25	98,75		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	APK SMK Cabdin VII	%	64,5	64,17	99,49		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	APK SMK Cabdin VIII	%	50,72	47,91	94,46		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	APK SMK Cabdin X	%	53,45	53,97	100,97		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	APK SMK Cabdin XI	%	51,64	56,71	109,82		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	APK SMK Cabdin XII	%	57,4	58,97	102,74		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	APK SMK Cabdin XIII	%	52,89	57,59	108,89		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik	%	100	99,62	99,62		Bidang Ketenagaan Dikbud
	Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik	%	99,97	99,93	99,96		Bidang Ketenagaan Dikbud
	Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik	%	99,94	99,89	99,95		Bidang Ketenagaan Dikbud
	Persentase prasarana sarana SLB Cabdin II sesuai standar	%	98,63	98,65	100,02		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	87,86	87,32	99,39		Bidang Ketenagaan Diksus
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin I	%	89,85	90,02	100,19		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin III	%	85,8	86,67	101,01		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IV	%	80,91	84,77	104,77		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IX	%	79,2	83,02	104,82		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin V	%	94,57	92,57	97,89		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VI	%	85,4	86,64	101,45		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VII	%	87,23	83,97	96,26		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VIII	%	80,97	85,97	106,18		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin X	%	89,13	87,97	98,70		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XI	%	92,86	87,14	93,84		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XII	%	92,19	85,84	93,11		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XIII	%	81,1	80,80	99,63		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Persentase prasarana sarana SMA Cabdin II sesuai standar	%	73,5	76,71	104,37		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	72,5	74,11	102,22		Bidang Pembinaan SMA
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin I	%	76,56	76,61	100,07		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin III	%	66,85	72,38	108,27		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IV	%	68,88	68,51	99,46		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IX	%	77,76	80,91	104,05		CABANG DINAS

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
							PENDIDIKAN IX
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin V	%	67,8	71,66	105,69		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VI	%	76,87	76,87	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VII	%	74,53	78,35	105,13		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VIII	%	76,12	75,94	99,76		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin X	%	99,69	64,90	65,10		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XI	%	77,8	76,63	98,50		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XII	%	71,95	66,93	93,02		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XIII	%	75,25	73,78	98,05		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Persentase prasarana sarana SMK Cabdin II sesuai standar	%	87,9	87,64	99,70		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	88,9	89,36	100,52		Bidang Pembinaan SMK
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin I	%	88,8	89,10	100,34		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin III	%	87,3	90,13	103,24		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IV	%	85,11	86,43	101,55		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IX	%	89,95	89,90	99,94		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin V	%	89,80	89,72	99,91		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VI	%	88,21	89,55	101,52		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VII	%	92,25	93,28	101,12		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VIII	%	88,95	88,41	99,39		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin X	%	92,5	88,94	96,15		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XI	%	88,75	89,49	100,83		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XII	%	90,3	90,91	100,68		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XIII	%	84,15	85,14	101,18		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Persentase SMA Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT	%	85,9	96,62	112,48		Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
	Persentase SMK Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT	%	75,85	89,07	117,43		Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang	%	18,46	13,46	72,91		Bidang Pembinaan Diksus
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I	%	0,77	3,85	500,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II	%	0,77	0,00	0,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III	%	0,77	0,00	0,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV	%	0,77	0,00	0,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX	%	2,69	3,46	128,62		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V	%	0,77	1,92	249,35		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI	%	0,77	0,00	0,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII	%	3,85	2,69	69,87		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Prosentase keikutsertaan	%	3,46	0,77	22,25		CABANG DINAS

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII						PENDIDIKAN VIII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X	%	1,15	0,76	66,09		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI	%	0,77	0,00	0,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII	%	1,15	0,00	0,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII	%	0,77	0	0,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang	%	8,44	11,02	130,57		Bidang Pembinaan SMA
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I	%	3,1	2,41	77,74		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II	%	0,6	0,69	115,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III	%	0,17	1,03	605,88		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA	%	0,17	0,00	0,00		CABANG DINAS

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV						PENDIDIKAN IV
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX	%	0,43	0,86	200,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V	%	0,43	0,60	139,53		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI	%	0,17	0,00	0,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII	%	0,86	1,89	219,77		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII	%	0,69	1,89	273,91		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X	%	0,43	0,60	139,53		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI	%	0,86	0,26	30,23		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII	%	0,34	0,00	0,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA	%	0,17	0,78	458,82		CABANG DINAS

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII						PENDIDIKAN XIII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang	%	20,04	28,82	143,81		Bidang Pembinaan SMK
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I	%	4,01	4,20	104,74		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II	%	0,76	0,00	0,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III	%	2,86	7,60	265,73		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV	%	0,38	0,00	0,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX	%	1,15	5,34	464,35		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V	%	1,53	0,95	62,09		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI	%	0,95	0,38	40,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang	%	2,29	3,81	166,38		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	berjenjang Cabdin VII						
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII	%	2,1	1,91	90,95		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X	%	0,95	3,43	361,05		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI	%	1,34	0,00	0,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII	%	1,34	0,00	0,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII	%	0,38	1,14	300,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							
	Persentase serapan kurikulum SLB	%	98,75	100,00	101,27		Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin I	%	100	100	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin II	%	100	100	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin III	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IV	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
							PENDIDIKAN IV
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IX	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin V	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VI	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VII	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VIII	%	100	100,00	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin X	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin I	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin II	%	100	99,98	99,98		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin III	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IV	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IX	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin V	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VI	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
							PENDIDIKAN VI
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VII	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VIII	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin X	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XI	%	100	99,95	99,95		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XII	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin I	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin II	%	100	100	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin III	%	99,69	100,00	100,31		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IV	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IX	%	100	100	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin V	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VI	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VII	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VIII	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin X	%	100	99,93	99,93		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Prersentase serapan kurikulum SMA	%	100	99,98	99,98		Bidang Pembinaan SMA
	Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XI	%	100	100,00	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XII	%	100	100,00	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XIII	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Presentase serapan kurikulum SMA Cabdin XIII	%	100	99,97	99,97		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XI	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XIII	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Prosentase serapan kurikulum SMK Cabdin XII	%	100	100,00	100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Prsentase serapan kurikulum SMK	%	99,3	100,00	100,70		Bidang Pembinaan SMK
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
	Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB	%	0,26	0,87	334,62		Bidang Ketenagaan Dikbud
	Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA	%	0,07	1,81	2.585,71		Bidang Ketenagaan Dikbud

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK	%	0,07	1,92	2.742,86		Bidang Ketenagaan Dikbud
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							
	Persentase Ijin Pendidikan Khusus yang disetujui	%	100	100,00	100,00		Bidang Pembinaan Diksus
	Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMA yang diterbitkan	%	100	110,00	110,00		Bidang Pembinaan SMA
	Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMK yang diterbitkan	%	95	96,15	101,21		Bidang Pembinaan SMK

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100%

:Perlu Upaya Keras < 100%

NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 179 indikator kinerja dengan 56 indikator tidak mencapai target Tahun 2022 yang dikarenakan antara lain.

1. Indikator APK SLB (Cabdin 1, 6, 8); APK SMA (Cabdin 8); APK SMK (Cabdin 6, 7, 8) dikarenakan perubahan metode perhitungan/penentuan *baseline* (*cut off* siswa);
2. Indikator persentase guru SMA, SMK, SLB memenuhi kualifikasi akademik dikarenakan pasca peralihan guru PPPD masih banyak yang belum berkualifikasi S1/D4, namun motivasi untuk memperoleh gelar pendidikan S1/D4 rendah karena mengingat faktor usia (mendekati masa purna);
3. Indikator persentase prasarana sarana SLB (Induk, Cabdin 5, 7, 10, 11, 12, 13); SMA (Cabdin 4, 8, 10, 11, 12, 13); SMK (Cabdin 2, 5, 8, 9, 10) sesuai standar dikarenakan penurunan porsi APBD & DAK fisik untuk pengadaan sarpras;
4. Indikator prosentase keikutsertaan peserta didik SLB (Induk, Cabdin 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12); SMA (Cabdin 1, 4, 6, 11, 12); SMK (Cabdin 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12) dalam even lomba nasional yang berjenjang dikarenakan belum dilaksanakannya perlombaan tingkat nasional;
5. Indikator persentase serapan kurikulum SMA (Induk, Cabdin 2, 11, 13); SMK (Cabdin 9, 10) dikarenakan terdapat siswa yang tidak mengikuti ujian dikarenakan meninggal / tidak melanjutkan sekolah;

2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM)	%	0	0	NA	NA	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
	Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100	100	100,00		RSJD Surakarta
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif	%	85,71	100	116,67		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
	Persentase Kabupaten/Kota dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga baik	%	85	85	100,00		Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan	%	57,14	57,14	100,00		Bidang Kesehatan Masyarakat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Cakupan Kesehatan Balita						
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Bayi	%	57,14	57,14	100,00		Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu	%	22,86	57,14	249,96		Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	%	74	74	100,00		Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	100,00		Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase Kabupaten/Kota	%	100	100	100,00		Balai Kesehatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam						Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan KLB/Bencana < 24 Jam	%	100	100	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa	%	49	49	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Pati	%	71,42	71,42	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang	%	42,85	71,42	166,67		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Pati	%	71,42	71,42	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian	%	71,4	71,4	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa						Wilayah Ambarawa
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten	%	71,42	71,42	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas magelang	%	57,14	71,42	124,99		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang	%	71,42	71,42	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten	%	71,42	71,42	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang	%	71,42	71,42	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase ketersediaan Informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	100	100	100,00		Bidang Sumber Daya Kesehatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	70	70	100,00		Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Ambarawa	%	91	91	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Klaten	%	91	91	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Magelang	%	91	91	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Pati	%	91	91	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Semarang	%	91,3	93,75	102,68		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu	%	42,85	42,86	100,02		Bidang Pelayanan Kesehatan
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	90	98,41	109,34		RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	100	100,00		RSUD Dr. Moewardi
	Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan	%	90	90,00	100,00		RSJD Surakarta

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	upaya kesehatan masyarakat						
	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	85	100	117,65		RSUD Tugurejo
	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	100	100,00		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	100	100,00		RSUD Kelet Donorejo
	Prosentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit menular	%	60	65	108,33		Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Prosentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan	Kabupaten/Kota	35	35	100,00		Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
	Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes PAK	Sertifikat	4	4	100,00		Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
	Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM	%	66,7	66,7	100,00		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
	Prosentase pemenuhan upaya kesehatan	%	100	100	100		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
	Persentase pemanfaatan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	70	76,8	109,71		Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	0	100	600,00		RSUD Kelet Donorejo
	Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	98	100	102,04		RSJD Surakarta
	Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlatih	%	30	30	100,00		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	%	91	99,53	109,37		Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							
	Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan	%	67	67	100,00		Bidang Sumber Daya Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
BIDANG KESEHATAN							
	Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%	20	20	100,00		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	100	100,00		RSUD Kelet Donorejo
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	17,71	28,67	161,89		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	90	108,27	103,69		RSJD Surakarta
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	85	109,73	129,09		RSUD Dr. Moewardi
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	107,69	107,69		RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%	20	39,04	195,20		RSUD Tugurejo
	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	51,43	88,57	172,21		Bidang Kesehatan Masyarakat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran	%	50	50	100,00		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa	%	71	71	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten	%	71,42	71,42	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang	%	74,42	86,71	120,01		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati	%	71,42	71,42	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya	%	71,42	71,42	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang						Wilayah Semarang
	Prosentase pelanggan yang menjalin kemitraan dengan Balabkes PAK	%	58	58	100,00		Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100%

:Perlu Upaya Keras < 100%

NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 64 indikator kinerja seluruh indikator berstatus telah tercapai.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
	Persentase Daerah Irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	100,00	100,00		Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100	100,00		Balai PSDA Bodri Kuto

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100	100,00		Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	100	100,00		Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	100	100,00		Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase daerah irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	100	100,00		Balai PSDA Serayu Citanduy
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	100,00	100,00		Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100	100,00		Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100	100,00		Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	91,70	91,70		Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	100	100,00		Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah	%	100	100	100,00		Balai PSDA Serayu Citanduy

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Balai PSDA Serayu Citanduy						
	Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi	%	82,8	82,80	100,00		Bidang Irigasi dan Air Baku
	Persentase luasan daerah bebas genangan banjir	%	20,4	20,62	101,08		Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	%	62	62,00	100,00		Bidang Irigasi dan Air Baku
	Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti	%	44,03	44,03	100		Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis
	Persentase Prasarana dan sarana Air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	100,00	100,00		Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100	100,00		Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100	100,00		Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase prasarana sarana airbaku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	100	100,00		Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	100	100,00		Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	100	100,00		Balai PSDA Serayu Citanduy

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase sungai dalam kondisi baik	%	52,25	52,32	100,13		Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
	Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100	100,00		Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100	100,00		Balai PSDA Pemali Comal
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
	Persentase akses layak air minum perdesaan	%	81,55	84,08	103,10		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase akses layak air minum perkotaan	%	92,15	92,45	100,33		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab./kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota	%	89,39	89,39	100,00		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
N SISTEM AIR LIMBAH							
	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%	89,5	90,38	100,98		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							
	Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	14,21	14,21	100,00		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							
	Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang diperiksa keandalannya	%	14,21	14,21	100,00		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
	Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan	%	100	100	100,00		Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%	97,63	89,23	91,40		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%	95,49	93,01	97,40		Balai Pengelolaan Jalan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
							Wilayah Magelang
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	90,6	97,69	107,83		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	94,92	96,05	101,19		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	79,53	84,87	106,71		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	%	95,33	98,69	103,52		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	%	92,99	96,5	103,77		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	%	95,39	93,63	98,15		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	91,52	83,33	91,05		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	44,53	46,32	104,02		Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan	%	39,18	40,78	104,08		Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Pembangunan Wilayah Timur						
	Persentase panjang jalan yang dileger	%	99,71	99,71	100,00		Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	%	81,74	81,74	100,00		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang	%	91,89	91,89	100,00		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	%	91,49	91,49	100,00		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	86,07	86,07	100,00		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	88,82	88,62	99,77		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	%	84,13	84,13	100,00		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	%	92,66	92,66	100,00		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	%	84,24	84,24	100,00		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
	Persentase panjang jembatan provinsi	%	92,92	92,92	100,00		Balai Pengelolaan Jalan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo						Wilayah Wonosobo
	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan	%	85,33	85,33	100,00		Balai Pengujian dan Peralatan
	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	88,61	114,86	129,62		Balai Pengujian dan Peralatan
	Persentase perencanaan, pengawasan, dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	83,33	83,33		Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	100	100	100,00		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	16,54	16,54	100,00		Balai Jasa Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
	Persentase Dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun	%	21,98	21,98	100,00		Bidang Penataan Ruang
	Persentase dokumen RTR Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	%	60,14	71,51	118,91		Bidang Penataan Ruang
	Persentase Implementasi	%	76,95	77,68	100,95		Bidang Penataan Ruang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang						
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	75,13	76,70	102,09	●	Bidang Penataan Ruang
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	100	100	●	Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100	100,00	●	Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100	100,00	●	Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	98,40	98,40	▼	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	100	100,00	●	Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	100	100,00	●	Balai PSDA Serayu Citanduy

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 68 indikator kinerja. Terdapat 60 indikator telah mencapai target Tahun 2022 dan 8 indikator tidak mencapai target Tahun 2022 dikarenakan hal-hal sebagai berikut antara lain; Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo dikarenakan kejadian banjir pada Triwulan 4 Tahun 2022 cenderung menyebabkan sedikit kerusakan infrastruktur sungai. Serta menurut wilayah sungainya termasuk kewenangan pusat, sehingga beberapa kejadian banjir pada triwulan 4 ditangani Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian indikator program sebagai berikut.

Tabel 2. 6
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
	Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	6,71	6,71	100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	11,84	11,86	100,16		Bidang Perumahan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	17,5	27,5	157,14		Bidang Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	23,37	29,97	128,24		Bidang Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman	%	100	100	100,00		Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja. Seluruh indikator berstatus telah tercapai.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 7
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
KETERTIBAN UMUM							
	Persentase anggota Linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya	%	0,06	1,03	1716,67		Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
	Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran terhadap tramtibum	%	3,94	23,42	594,42		Bidang Pembinaan Masyarakat
	Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan	%	100	100	100,00		Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
	Persentase Pemeliharaan Tramtibum Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	%	100	100	100,00		Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
	Persentase pemenuhan logistik bencana	%	100	100	100,00		Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase penanganan darurat kebencanaan	%	100	100	100,00		Bidang Penanganan Darurat
	Persentase penurunan risiko bencana	%	1	2	200,00		Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Persentase rehab rekon pasca bencana	%	100	100	100,00		Bidang Logistik dan Peralatan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja seluruhnya telah mencapai target.

6. Sosial

Kinerja penyelenggaran urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 8
Capaian Kinerja Urusan Sosial

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	25,74	25,74	100,00		Bidang Pemberdayaan Sosial
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mnendapatkan penanganan	%	100	100	100,00		Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti	%	3,28	3,28	100,00		Bidang Rehabilitasi Sosial
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Panti	%	0,14	0,14	100,00		Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya						
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	0,11	0,11	100,00		Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	0,11	0,11	100,00		Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	0,18	0,18	100,00		Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	0,1	0,1	100,00		Panti Pelayanan Sosial Cepiring
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	0,17	0,17	100,00		Panti Pelayanan Sosial Dewanata
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti	%	0,14	0,14	100,00		Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Pelayanan Sosial Dharma Putera						
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	0,06	0,06	100,00		Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	%	0,09	0,09	100,00		Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	0,13	0,13	100,00		Panti Pelayanan Sosial Mandiri
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi utomo	%	0,12	0,12	100,00		Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	0,18	0,18	100,00		Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti	%	0,17	0,17	100,00		Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu						
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	0,06	0,06	100,00		Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	0,13	0,13	100,00		Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	0,08	0,08	100,00		Panti Pelayanan Sosial Pendowo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	0,13	0,13	100,00		Panti Pelayanan Sosial Penganthi
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	0,12	0,12	100,00		Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti	%	0,22	0,22	100,00		Panti Pelayanan Sosial Raharjo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Pelayanan Sosial Raharjo						
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	0,14	0,14	100,00		Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	0,07	0,07	100,00		Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	0,07	0,07	100,00		Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	0,18	0,18	100,00		Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	0,06	0,06	100,00		Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti	%	0,11	0,11	100,00		Panti Pelayanan Sosial Turusgede

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Pelayanan Sosial Turusgede						
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	0,17	0,17	100,00		Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	0,1	0,1	100,00		Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
	Persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan	%	0,23	0,38	165,22		Bidang Penanganan Fakir Miskin
	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	1,46	5,53	378,77		Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Persentase Rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan	%	100	100	100,00		Bidang Rehabilitasi Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
	Persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100,00		Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							
	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola	%	100	100	100,00		Bidang Pemberdayaan Sosial

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 35 indikator kinerja berstatus telah tercapai.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaran urusan Tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 9
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%	28,57	34	119,01		Sekretariat
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
S TENAGA KERJA							
	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	37,5	37,5	100,00		Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	7,89	12,20	154,63		Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	1,9	4,13	217,37		Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%	46,62	68,72	147,40		Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	8,2	9,44	115,12		Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A
	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	4	4,01	100,25		Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	2	2,45	122,50		Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	%	6,5	13,38	205,85		Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							
	Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal	%	60	70,52	117,53		Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	55	55,26	100,47		Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	97,7	97,7	100,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49,65	54,59	109,95		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	90,56	98,57	108,85		Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	36	36,24	100,67		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN							
	Persentase peningkatan perusahaan memiliki	%	25,89	25,9	100,04		Balai Keselamatan Kerja Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	kategori baik dalam penerapan K3						
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	86,21	89,56	103,89		Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100%

:Perlu Upaya Keras < 100%

NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 indikator kinerja seluruh indikator berstatus telah tercapai.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 10
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	Per 100.000	6,42	7,9	123,05		Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
	Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring	%	15	20	133,33		Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat
	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	5,7	4,38	166,67		Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender	%	35	63,88	182,51		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak	%	35	63,88	182,51		Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi	%	15	20	133,33		Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
	Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama	%	94,28	100	106,07		Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	%	20	20	100,00		Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
	Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring	%	15	20	133,33		Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat
	Rasio korban kekerasan terhadap anak	Per 100.000	12,46	7,09	175,74		Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 indikator kinerja telah tercapai.

3. Pangan

Kinerja penyelenggaran urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 11
Capaian Kinerja Urusan Pangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
	Angka Konsumsi Beras	kg/kapita/tahun	92,3	87,9	105,01		Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
	CV harga pangan strategis (beras)	%	4,9	2,14	228,97		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
	Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas	kkal/kapita/hari	3731	3797	101,77		Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
	Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	Ton	0,61	2,41	395,08		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
	Prosentase penurunan daerah rawan pangan	%	1	58,73	5873		Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
	Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	80	80,79	100,99		Bidang Keamanan Pangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Prosentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamaman Pangan	%	80	90,76	113,45		Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100%

:Perlu Upaya Keras < 100%

NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus telah tercapai.

4. Pertanahan

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanahan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 12
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
KEPENTINGAN UMUM							
	Persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	596,81	596,81		Bidang Pertanahan
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							
	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	%	100	134,15	134,15		Bidang Pertanahan
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							
	Persentase pelaksanaan reforma agraria	%	100	234,57	234,57		Bidang Pertanahan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100%

:Perlu Upaya Keras < 100%

NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja, dengan seluruh indikator berstatus telah tercapai

5. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaran urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 13
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	%	100	100	100,00		Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara	%	8,57	8,57	100,00		Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase pemantauan kualitas udara ambien	%	100	105,65	105,65		Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	Persentase pengujian kualitas air	%	100	102,73	102,73		Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	10	10	100		Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
							Pencemaran Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	1,91	3,82	200		Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani di Kebun Raya Baturraden	%	0,14	0,14	100,00		Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	74,87	74,87	100,00		Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan
	Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%	100	100	100		Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
	Persentase kabupaten/kota yang jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya	%	17,14	17,14	100,00		Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	%	50	50	100,00		Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan
	Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	%	100	100	100		Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100	100,00		Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase sampah yang dikelola	%	80	61,17	76,46		Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100%

:Perlu Upaya Keras < 100%

NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan lingkungan hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 14 indikator kinerja. Terdapat 13 indikator telah tercapai dan 1 indikator tidak mencapai target Tahun 2022 yaitu: Persentase sampah yang dikelola. Indikator ini belum tercapai dikarenakan data sampah tahun 2022 hanya terkumpul 34 kab/kota (Kota Pekalongan belum mengumpulkan data) sehingga belum bisa menggambarkan pengelolaan sampah secara keseluruhan. Sementara itu timbunan sampah yang ada semakin bertambah jumlahnya sehingga dibutuhkan TPST regional untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang ada.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja penyelenggaran urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 14
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase Kab/Kota yg seluruh penduduk wajib KTP terfasilitasi perekaman KTP-el	%	95	99,95	105,21		Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
	Persentase Kab/Kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen Akta Kelahiran usia 0-17 diatas 95%	%	92	100	108,66		Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
	Persentase institusi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	75	92,5	123,33		Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100%

:Perlu Upaya Keras < 100%

NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus telah tercapai.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 15
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENATAAN DESA							
	Persentase desa yang memiliki Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat	%	87,01	135,06	155,22		Bidang Penataan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA							
	Persentase pengembangan kawasan perdesaan	%	86	118	137,21		Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
	Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	%	2,85	19,62	688,42		Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
	Persentase Desa dengan Sistem Informasi Desa	%	14,61	44,53	304,79		Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
	Persentase rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum	%	100	100	100,00		Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
	Presentase fasilitasi regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa	%	100	100	100,00		Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
MASYARAKAT HUKUM ADAT							
	Persentase Desa yang telah memiliki BUMDesa	%	70,43	92,04	130,68		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	%	2,62	3,12	119,08		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100%

:Perlu Upaya Keras < 100%

NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja, seluruh indikator berstatus telah tercapai.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaran urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 16
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							
	Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	25	25	100,00		Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat
	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan	%	19,44	42,86	220,47		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Kependudukan) 5 Bidang						
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
	Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	29,5	29,58	100,27	●	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
	Unmeetneed KB	%	12,89	11,63	110,83	●	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan	%	96,25	97,79	101,60	●	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
	Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota	%	25	25	100,00	●	Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat
	Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan	%	90,5	91,56	101,17	●	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja seluruh indikator telah tercapai.

9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaran urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 17
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	%	5,03	5,49	109,15		Bidang Angkutan Jalan
	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	%	31,92	31,92	100,00		Balai Transportasi Jawa Tengah
	Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis	%	58,33	60	102,86		Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	%	24,48	30,03	122,67		Bidang Lalu Lintas
	Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	%	8,67	8,9	102,65		Bidang Lalu Lintas
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	%	49,91	51,2	102,58		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Perhubungan Wilayah III Kelas A						Wilayah III Kelas A
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	40,88	42,77	104,62		Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	50,97	52,41	102,83		Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	78,71	79,71	101,27		Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	82,72	83,92	101,45		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	65,49	66,43	101,44		Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
	Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	%	87,65	124,87	142,46		Bidang Angkutan Jalan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	43,75	50	114,29		Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	35	40	114,29		Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	21,88	28,13	128,56		Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	19,23	23,08	120,02		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	20,69	27,59	133,35		Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	53,85	61,54	114,28		Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan	%	21,62	28,13	130,11		Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
	Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	%	28,57	28,57	100,00		Bidang Angkutan Jalan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							
	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	%	37,5	37,5	100,00		Bidang Pelayaran
	Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	%	66,96	78,39	117,07		Balai Transportasi Jawa Tengah
	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	%	47,01	49,25	104,76		Bidang Pelayaran
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN							
	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	%	15,73	17,88	113,67		Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 24 indikator kinerja berstatus telah tercapai.

10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 18
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
	Nilai Survei Kepuasan Komunikasi Publik	%	78	81	103,85	●	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Persentase badan publik yang terbuka	%	92	92	100,00	●	Bidang Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
	Persentase Aplikasi yang Diintegrasikan	%	70	70	100,00	●	Bidang E-Government
	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi	%	70	70	100,00	●	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja berstatus telah tercapai.

11. Koperasi dan UKM

Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 19
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							
	Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi	%	66,00	77,56	117,52		Bidang Pengawasan
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							
	Persentase Jml KSP/KSPPS Prov dng Kategori Sehat	%	23,50	23,73	100,98		Bidang Pengawasan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							
	Persentase SDM KUMKM yang terampil	%	82	99,26	121,05		Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
	Persentase Koperasi Provinsi yang berkualitas	%	18,00	35,59	197,72		Bidang Kelembagaan
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
	Persentase Usaha Mikro menuju kecil	%	12,59	31,45	249,80		Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase Usaha Kecil menuju Menengah	%	23	30,97	134,65		Bidang Bina Usaha

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja dengan 6 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus telah tercapai.

12. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai beirkut.

Tabel 2. 20
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
	Persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan	%	100	100	100,00		Bidang Perencanaan dan Pengembangan
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							
	Rasio Izin Usaha terhadap kepeminatan penanaman modal	%	8	8,99	112,38		Bidang Promosi PM
	Rasio realisasi kemitraan usaha terhadap kepeminatan kemitraan Usaha	%	20	20	100,00		Bidang Promosi PM

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan	%	92	100	108,70	●	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
	Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100,00	●	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
	Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan	%	94	99,6	105,96	●	Bidang Pelayanan Perizinan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
	Persentase realisasi proyek penanaman modal	%	15	16,66	111,07	●	Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							
	Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	80	104,53	130,66	●	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja seluruh indikator berstatus telah tercapai.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 21
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
	Persentase capaian kapasitas kepemudaan	%	64,06	64,06	100,00		Bidang Kepemudaan
	Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda	%	13,04	13,04	100,00		Bidang Kepemudaan
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
	Persentase atlet PPLOP yang berprestasi	%	13,89	13,89	100,00		Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	43,33	43,33	100,00		Bidang Keolahragaan
	Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik	%	100	100	100,00		Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja dan seluruh indikator telah tercapai

14. Statistik

Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 22
Capaian Kinerja Urusan Statistik

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
	Persentase Ketersediaan data sektoral	%	95	108	113,68		Bidang Statistik

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator yang berstatus telah tercapai.

15. Persandian

Kinerja penyelenggaran urusan persandian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 23
Capaian Kinerja Urusan Persandian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
	Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi > 80	%	66,67	70	104,99		Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator yang berstatus telah tercapai.

16. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaran urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 24
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
	Persentase seni budaya Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	%	88,75	91,43	103,02		Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
	Presentase ragam budaya terlayani	%	2,9	2,9	100,00		Bidang Pembinaan Kebudayaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							
	Presentase jenis seni tradisi terlayani	%	6,2	6,2	100,00		Bidang Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							
	Persentase sumber belajar berbasis budaya	%	0,39	0,39	100,00		Bidang Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							
	Persentase status cagar budaya	%	22,71	22,71	100,00		Bidang Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							
	Survei Kepuasan Pengunjung Museum	Angka	89,65	89,36	99,68		Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator. Terdapat 5 indikator kinerja telah tercapai dan 1 indikator tidak tercapai yaitu Survei Kepuasan Pengunjung Museum dikarenakan status pandemi yang belum dicabut, sehingga tingkat kunjungan museum masih belum optimal.

17. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai bertikut.

Tabel 2. 25
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
	Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka	%	80,5	81,37	101,08		Bidang Pengelolaan Perpustakaan
	Persentase Partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus, Kabupaten/Kota dalam pembudayaan gemar membaca	%	50	50	100,00		Bidang Pengembangan Perpustakaan
	Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi	%	80	80	100,00		Bidang Pengelolaan Perpustakaan
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan	%	59,82	59,82	100,00		Bidang Pengembangan Perpustakaan
	Persentase Perluasan Jejaring Kemitraan	%	80	93,33	116,66		Bidang Pengembangan Perpustakaan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100%

:Perlu Upaya Keras < 100%

NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator. Kinerja seluruh indikator program urusan perpustakaan teracapai. Capaian tertinggi pada indikator persentase perluasan jejaring kemitraan dari target 80% tercapai 93,33% dikarenakan meningkatnya permintaan Kerjasama perpustakaan dari beberapa universitas.

18. Kearsipan

Kinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 26
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							
	Persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan	%	79	81,17	102,75	●	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
	Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip	%	92,78	92,8	100,02	●	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	%	85,11	85,11	100,00	●	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator yang seluruhnya berstatus telah tercapai.

C. Urusan Pilihan

1. Perikanan dan Kelautan

Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 27
Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	2,5	2,5	100,00		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	1	1	100,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	1	1	100,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	0,5	0,57	114,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir	%	5	5	100,00		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase Peningkatan Produksi Garam	%	0,1	0,05	50,00		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1	1	100,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1	1	100,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1	1	100,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	100	100,00		Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	90	90,00		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	63,64	63,64	100,00		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	72,73	90,91	125,00		Pelabuhan Perikanan Pantai

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
							Wonokerto Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	72,73	72,73	100,00		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	90,91	90,91	100,00		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	90,91	90,91	100,00		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	90,91	90,91	100,00		Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	90,91	90,91	100,00		Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	90,91	90,91	100,00		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	100	100,00		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,1	0,04	40,00		Bidang Perikanan Tangkap
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	%	100	100	100,00		Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
	Persentase Peningkatan Produksi Benih	%	2	2,5	125,00		Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
	Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya	%	0,2	0,2	100,00		Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan	%	71	71	100		Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	%	2	2	100,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	%	2	2	100,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran	%	2	2	100,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	sektor kelautan dan perikanan						Timur Kelas A
	Persentase peran aktif kelompok masyaraka pengawas dalam pengawasan sdkp	%	40	40	100,00		Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu	%	2	2	100,00		Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan	%	2	7,12	356		Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 31 target indikator kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan terdapat 28 indikator tercapai dan 3 indikator tidak tercapai yaitu:

1. Persentase Peningkatan Produksi Garam tidak tercapai dikarenakan bulan produksi relatif pendek disertai dengan adanya kemarau basah, dimana saat musim kemarau namun terkadang masih turun hujan pada waktu-waktu tertentu, sehingga masa panen garam tidak melimpah seperti tahun-tahun sebelumnya.
2. Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan dikarenakan tidak adanya petugas syahbandar sebagai pihak yang memiliki kewenangan menerbitkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar).
3. Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikarenakan terjadi kenaikan Harga BBM per September 2022 yang menyebabkan kebutuhan operasional nelayan meningkat dengan modal yang sama, sehingga menyebabkan nelayan memilih tidak melaut.

2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaran urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 28
Capaian Kinerja Pariwisata

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	%	9	69,57	100,00		Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
	Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	%	56	88,4	157,86		Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	11.530.429	43.864.056	380,42		Bidang Pemasaran Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Persentase Kota Kreatif	%	5,71	11,43	200,18		Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Kompetensi	%	50,69	73,81	145,61		Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 5 target indikator kinerja Urusan Pariwisata seluruh indikator berstatus telah tercapai.

3. Pertanian

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 29
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah Populasi ternak	(ST)/(AU)	3819014	3.926.192	102,81		Bidang Budidaya

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase layanan Sertifikasi benih	%	100	100	100,00		Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
	Persentase Penambahan Jumlah Alsintan	%	1,98	4	202,02		Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlengsungan usaha tani di Jawa Tengah	%	5	5	100,00		Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengolah Hasil	%	2,5	2,5	100,00		Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
	Persentase peningkatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan	%	1	1	100,00		Bidang Veteriner
	Persentase Peningkatan Produksi bawang merah, cabe, durian, melati dan jahe	%	10,8	10,8	100,00		Bidang Hortikultura
	Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan	%	3	3	100,00		Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A
	Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas	%	1,5	1,37	91,33		Balai Benih TPH wilayah Banyumas
	Persentase peningkatan produksi benih di	%	1,5	1,5	100,00		Balai Benih TPH wilayah Semarang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Balai Benih TPH wilayah Semarang						
	Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta	%	1,5	1,18	78,67		Balai Benih TPH wilayah Surakarta
	Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku	%	1	0,81	81,00		Balai Inseminasi Buatan Kelas A
	Persentase Peningkatan Produksi Kopi, Tebu, Kelapa	%	3,1	3,1	100,00		Bidang Perkebunan
	Persentase Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai	%	2,9	2,55	87,93		Bidang Tanaman Pangan
	Persentase peningkatan produksi ternak	%	1	1,07	107,00		Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A
	Persentase penyaluran pupuk subsidi	%	100	93,25	93,25		Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik	%	0,5	19,87	3974,00		Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan	%	1	310	31000,00		Bidang Prasarana,

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
							Sarana dan Penyuluhan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase penurunan pemotongan betina produktif	%	10	1,54	15,40		Bidang Veteriner
	Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5	5	100,00		Balai veteriner semarang
	Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5	5	100,00		Balai veteriner boyolali
	Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5	5	100,00		Bidang Veteriner
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Persentase penurunan serangan organisme penganggu tanaman (OPT)	%	0,15	1,63	1086,67		Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	%	7	10	142,86		Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
	Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan	%	14	372	2657,14		Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian	%	100	100	100,00		BALAI PELATIHAN PERTANIAN
	Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	%	3819014	3.926.192	102,81		Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
	Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian	%	100	100	100,00		BALAI PELATIHAN PERTANIAN

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 26 target indikator kinerja Urusan Pertanian terdapat 20 indikator tercapai dan 6 indikator tidak mencapai target Tahun 2022 yaitu:

1. Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas dan di Balai Benih TPH wilayah Surakarta dikarenakan adanya penurunan luas perbanyakan benih dan serangan OPT, sehingga perlu dilakukan yaitu intensifikasi lahan melalui penggunaan varietas benih unggul dan bermutu, serta pengendalian hama terpadu melalui penerapan *Early Warning System.*
2. Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku dikarenakan Produktivitas bull menurun karena sudah memasuki masa afkir, dan adanya kebijakan penundaan replacement bull sebagai dampak wabah penyakit mulut dan kuku sehingga produksi bull yang ada saat itu tidak optimal.
3. Persentase Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai dikarenakan adanya penurunan luas tanam sehingga mempengaruhi produktivitas tanaman. Penurunan luas tanam dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu dampak perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Upaya yang perlu dilakukan yaitu penerapan kebijakan Indeks Pertanaman (IP) 400 yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman

melalui sistem tanam sebanyak 4 kali dalam 1 tahun pada lahan yang sama.

4. Persentase penyaluran pupuk subsidi dikarenakan adanya pembatasan alokasi pupuk bersubsidi hanya untuk jenis pupuk Urea dan NPK sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, kendala penggunaan kartu tani, serta penyesuaian e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang membuat beberapa wilayah kehilangan alokasi pupuk bersubsidi.
5. Persentase penurunan pemotongan betina produktif dikarenakan terjadinya wabah penyakit PMK menyebabkan terjadinya pemotongan pada ternak sakit termasuk diantaranya sapi dan kerbau produktif untuk mengurangi kerugian peternak. Banyak terdapat betina produktif yang berada di lokasi dekat kasus terkena kebijakan potong paksa karena adanya PMK.

4. Kehutanan

Kinerja penyelenggaran urusan kehutanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 30
Capaian Kinerja Kehutanan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di BSPTH	%	0,91	0,91	100,00		Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil I	%	1,38	1,38	100,00		CDK I
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil II	%	1,45	1,5	103,45		CDK II
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil III	%	1,49	1,69	113,42		CDK III

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IV	%	1,68	1,68	100		IXCDK IV
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IX	%	2,33	2,19	93,99		CDK IX
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil V	%	1,51	1,54	101,99		CDK V
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VI	%	2,4	2,25	93,75		CDK VI
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VII	%	3,06	3,34	109,15		CDK VII
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VIII	%	1,79	1,88	105,03		CDK VIII
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil X	%	1,98	2,41	121,72		CDK X
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil XI	%	2,41	2,62	108,71		CDK XI
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani	%	100	100	100,00		Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil I	%	100	100	100,00		CDK I

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil II	%	100	100	100,00		CDK II
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil III	%	100	100	100,00		CDK III
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IV	%	100	100	100,00		CDK IV
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IX	%	100	100	100,00		CDK IX
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil V	%	100	100	100,00		CDK V
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VI	%	100	100	100,00		CDK VI
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VII	%	100	100	100,00		CDK VII

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VIII	%	100	100	100,00		CDK VIII
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil X	%	100	100	100,00		CDK X
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil XI	%	100	100	100,00		CDK 11
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	27,08	27,08	100,00		Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I	%	0,62	0,62	100,00		CDK I
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II	%	0,62	0,62	100,00		CDK II
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III	%	0,51	0,51	100,00		CDK III
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang	%	0,62	0,62	100,00		CDK IV

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	berkelanjutan di CDK Wil IV						
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX	%	0,62	0,62	100,00		CDK IX
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil V	%	0,72	0,72	100,00		CDK V
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VI	%	0,72	0,72	100,00		CDK VI
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII	%	0,72	0,72	100,00		CDK VII
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII	%	0,51	0,51	100,00		CDK VIII
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X	%	0,51	0,51	100,00		CDK X
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil XI	%	0,51	0,51	100,00		CDK 11
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI							Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
DAN EKOSISTEMNYA							
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif	%	100	100	100,00		Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil I	%	100	100	100,00		CDK I
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil II	%	100	100	100,00		CDK II
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil III	%	100	100	100,00		CCDK III
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IV	%	100	100	100,00		CDK IV
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IX	%	100	100	100,00		CDK IX
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil V	%	100	100	100,00		CDK V
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VI	%	100	100	100,00		CDK VI
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VIII	%	100	100	100,00		CDK VIII
	Persentase konservasi ekosistem	%	100	100	100,00		CDK X

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	yang dikelola secara efektif di CDK Wil X						
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Kebun Raya Baturraden	%	0,09	0,09	100,00		Kebun Raya Baturraden
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Tahura KGPAA Mangkunagoro I	%	0,14	0,14	100,00		Tahura KGPAA Mangkunagoro I
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani	%	100	100	100,00		Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil I	%	100	100	100,00		CDK I
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil II	%	100	100	100,00		CDK II
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil III	%	100	100	100,00		CDK III
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IV	%	100	100	100,00		CDK IV
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IX	%	100	100	100,00		CDK IX

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil V	%	100	100	100,00		CDK V
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VI	%	100	100	100,00		CDK VI
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VII	%	100	100	100,00		CDK VII
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VIII	%	100	100	100,00		CDK VIII
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil X	%	100	100	100,00		CDK X
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil XI	%	100	100	100,00		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	20	20	100,00		Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil I	%	2,4	2,4	100,00		CDK I
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil II	%	1,6	1,6	100,00		CDK II
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil III	%	1,6	1,6	100,00		CDK III
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IV	%	1,6	1,6	100,00		CDK IV
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IX	%	1,6	1,6	100,00		CDK IX
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil V	%	2,4	2,4	100,00		CDK V
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VI	%	1,6	1,6	100,00		CDK VI
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VII	%	2,4	2,4	100,00		CDK VII
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VIII	%	1,6	1,6	100,00		CDK VIII
	Presentase peningkatan kelas kelompok	%	1,6	1,6	100,00		CDK X

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	masyarakat di CDK Wil X						
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil XI	%	1,6	1,6	100,00		CDK XI
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase jumlah DAS yang tertangani	%	5	5	100,00		Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	17,46	17,74	101,60		Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100%

:Perlu Upaya Keras < 100%

NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 74 target indikator kinerja Urusan Kehutanan terdapat 72 indikator tercapai dan 2 indikator tidak mencapai target Tahun 2022 yaitu :

1. Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VI dikarenakan ketersediaan bibit yang tidak mencukupi saat waktu yang tepat untuk pelaksanaan penanaman
2. Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IX dikarenakan ketersediaan bibit yang tidak mencukupi saat waktu yang tepat untuk pelaksanaan penanaman serta preferensi masyarakat terhadap bibit tanaman kehutanan yang masih kurang (disebabkan jika tanaman kehutanan sudah tumbuh besar, tajuknya akan menutupi tanaman budidaya semusim yang berakibat menurunnya produktifitas)

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian indikator kin-erja program sebagai berikut.

Tabel 2. 31
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase pelayanan pengujian air tanah	%	100	100	100,00		Laboratorium Energi dan SDM Kelas A
	Persentase pengambilan air tanah	%	55,48	48,22	115,06		Bidang Geologi dan Air Tanah
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	12,54	9,62	130,35		Cabang Dinas ESDM Kendeng Muria
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	0,6	0,58	103,45		Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	5,33	5,18	102,90		Cabang Dinas ESDM Merapi
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	14,74	12,85	114,71		Cabang Dinas ESDM Semarang Demak
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	1,16	1,07	108,41		Cabang Dinas ESDM Serayu Selatan
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	0,25	0,23	108,70		Cabang Dinas ESDM Serayu Tengah
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	2,89	2,77	104,33		Cabang Dinas ESDM Serayu Utara

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	3,29	2,84	115,85		Cabang Dinas ESDM Sewu Lawu
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	1,1	1,07	102,80		Cabang Dinas ESDM Slamet Selatan
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	0,97	0,79	122,78		Cabang Dinas ESDM Slamet Utara
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	4,17	3,38	123,37		Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	8,43	7,83	107,66		Cabang Dinas ESDM Ungaran Telomoyo
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase Good Mining Practice	%	88,74	89,00	100,29		Bidang Mineral dan Batubara
	Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Muria	%	4,23	5,39	127,42		Cabang Dinas ESDM Kendeng Muria
	Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Selatan	%	11,55	14,25	123,38		Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan
	Persentase good mining practice Wilayah Merapi	%	12,68	10,15	80,05		Cabang Dinas ESDM Merapi
	Persentase good mining practice Wilayah Semarang Demak	%	4,79	4,23	88,31		Cabang Dinas ESDM Semarang Demak
	Persentase good mining practice Wilayah Serayu Selatan	%	4,51	4,89	108,43		Cabang Dinas ESDM Serayu Selatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase good mining practice Wilayah Serayu Tengah	%	3,94	4,23	107,36		Cabang Dinas ESDM Serayu Tengah
	Persentase good mining practice Wilayah Serayu Utara	%	6,48	5,68	87,65		Cabang Dinas ESDM Serayu Utara
	Persentase good mining practice Wilayah Sewu Lawu	%	5,63	5,28	93,78		Cabang Dinas ESDM Sewu Lawu
	Persentase good mining practice Wilayah Slamet Selatan	%	14,37	13,68	95,20		Cabang Dinas ESDM Slamet Selatan
	Persentase good mining practice Wilayah Slamet Utara	%	10,7	12,67	118,41		Cabang Dinas ESDM Slamet Utara
	Persentase good mining practice Wilayah Solo	%	6,76	5,46	80,77		Cabang Dinas ESDM Solo
	Persentase good mining practice Wilayah Ungaran Telomoyo	%	3,1	3,00	96,77		Cabang Dinas ESDM Ungaran Telomoyo
	Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara	%	100	100,00	100,00		Laboratorium Energi dan SDM Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi	tCO2e	105.618	105.793,91	100,17		Bidang Energi Baru terbarukan
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Muria	tCO2e	1.317,38	1.317,38	100,00		Cabang Dinas ESDM Kendeng Muria
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Selatan	tCO2e	353,46	353,46	100,00		Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Merapi	tCO2e	2.784,67	2.860,45	102,72		Cabang Dinas ESDM Merapi
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Semarang Demak	tCO2e	19.770,81	19.770,81	100,00		Cabang Dinas ESDM Semarang Demak
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Selatan	tCO2e	545,92	565,32	103,55		Cabang Dinas ESDM Serayu Selatan
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Tengah	tCO2e	745,62	748,89	100,44		Cabang Dinas ESDM Serayu Tengah
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Utara	tCO2e	841,96	863,51	102,56		Cabang Dinas ESDM Serayu Utara
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Sewu Lawu	tCO2e	376,99	397,98	105,57		Cabang Dinas ESDM Sewu Lawu
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Selatan	tCO2e	77.317,80	77.317,80	100,00		Cabang Dinas ESDM Slamet Selatan
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Utara	tCO2e	287,99	288,65	100,23		Cabang Dinas ESDM Ungaran Slamet Utara
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Solo	tCO2e	421,84	465,52	110,35		Cabang Dinas ESDM Solo
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Ungaran Telomoyo	tCO2e	370,09	370,09	100,00		Cabang Dinas ESDM Ungaran Telomoyo
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase pemenuhan listrik	%	31,49	37,21	118,16		Bidang Ketenagalistrikan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	bagi rumah tangga miskin						
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria	%	2,26	2,96	130,97		Cabang Dinas ESDM Kendeng Muria
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan	%	3,86	4,14	107,25		Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi	%	2,98	3,04	102,01		Cabang Dinas ESDM Merapi
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak	%	1,45	1,47	101,38		Cabang Dinas ESDM Semarang Demak
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan	%	3,39	3,96	116,81		Cabang Dinas ESDM Serayu Selatan
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah	%	2,21	3,73	168,78		Cabang Dinas ESDM Serayu Tengah
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara	%	2,3	2,63	114,35		Cabang Dinas ESDM Serayu Utara
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu	%	1,85	2,04	110,27		Cabang Dinas ESDM Sewu Lawu
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan	%	4,02	5,25	130,60		Cabang Dinas ESDM Slamet Selatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara	%	4,02	5,25	130,60		Cabang Dinas ESDM Ungaran Slamet Utara
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo	%	1,59	1,95	122,64		Cabang Dinas ESDM Solo
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1,55	1,83	118,06		Cabang Dinas ESDM Ungaran Telomoyo

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100%

:Perlu Upaya Keras < 100%

NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 54 indikator. Terdapat 47 indikator telah tercapai dan 7 indikator tidak mencapai target Tahun 2022. Tujuh indikator yang tidak tercapai pada program Pengelolaan Mineral dan Batubara diantaranya Persentase good mining practice Wilayah Merapi, Wilayah Semarang Demak, Wilayah Serayu Utara, Wilayah Sewu Lawu, Wilayah Slamet Selatan, Wilayah Solo, Wilayah Ungaran Telomoyo dikarenakan setelah dikembalikannya kewenangan izin usaha pertambangan ke daerah berdasarkan terbitnya Perpres 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Minerba pada tanggal 11 April 2022 maka daerah masih membutuhkan proses penyesuaian dan integrasi sistem perizinan dengan Pemerintah Pusat. Proses serah terima data maupun berkas-berkas perizinan dari Kementerian ESDM baru dapat terlaksana pada Triwulan III Tahun 2022. Selain itu, juknis pengawasan dari Kementerian ESDM baru terbit di TW IV Tahun 2022, sehingga kegiatan pengawasan dan pengendalian pada sektor minerba belum optimal. Adanya ketidaksesuaian tata ruang antara WIUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dengan RTRW Kab./Kota, sehingga beberapa izin tidak dapat dilanjutkan.

6. Perdagangan

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 32
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA di Jawa Tengah	%	7	9,28	132,57		Bidang Perdagangan Luar Negeri
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi	%	0,19	2,40	1263,16		Bidang Perdagangan Dalam negeri
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center)	%	12	9,88	121,46		Bidang Perdagangan Dalam negeri
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Nilai ekspor non migas	Juta US$	7.076	11.210,92	158,44		Bidang Perdagangan Luar Negeri
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan	%	4	1,60	250,00		Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Semarang)	%	4,17	25,22	604,80		BPSMB Semarang
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Surakarta)	%	5	5,96	119,20		BPSMB Surakarta
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri	%	8	8,55	106,88		Bidang Perdagangan Dalam negeri

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100%

:Perlu Upaya Keras < 100%

NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja dengan seluruh indikator telah mencapai target Tahun 2022.

7. Perindustrian

Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 33
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4,31	4,38	101,62		Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	3,17	3,55	111,99		Balai Industri Logam dan Kayu Kelas A
	Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro	%	3,00	3,39	113		Bidang Industri Agro
	Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro	%	3	5,55	185,00		Bidang Industri Non Agro
	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	70	84,36	120,51		Balai Industri Produk Tekstil dan alas Kaki Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	7,20	720,00		Bidang Industri Agro
	Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	2	4,55	227,50		Bidang Industri Non Agro

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinera seluruhnya telah mencapai target Tahun 2022.

8. Transmigrasi

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 34
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%	3,18	3,99	125,47	●	Balai pelatihan kerja dan transmigrasi Kelas A
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3,18	5,28	166,04	●	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja seluruhnya telah tercapai.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaran Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 35
Capaian Kinerja Sekrateriat Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM							Sekretariat Daerah
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	100	100		Biro Umum
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga	%	100	100	100		Biro Umum
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	100		Biro Umum
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	%	100	100	100		Biro Adm Bangda
	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	%	100	100	100		Biro Organisasi
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem	%	100	100	100		Biro Adm Bangda
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ	%	100	100	100		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	%	100	100	100		Biro Hukum
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan	%	100	100	100		Biro ISDA

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	SDA dan Asisten Ekbang						
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra	%	100	100	100		Biro Kesejahteraan rakyat
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	100	100		Biro Organisasi
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan	%	100	100	100		Biro Pemerintahan dan OTDA
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	%	100	100	100		Biro Perekonomian
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI							Sekretariat Daerah
	Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	%	85,36	85,36	100		Biro Organisasi
	Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	%	85,71	85,71	100		Biro Organisasi
	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	77,14	77,14	100		Biro Organisasi
	Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	81,58	85,88	105,27		Biro Organisasi
	Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	29,27	29,27	100		Biro Organisasi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	%	91,84	91,84	100		Biro Organisasi
	Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	%	73,17	87,8	119,99		Biro Organisasi
	Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	%	73,65	73,65	100		Biro Organisasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							Sekretariat Daerah
	Efektivitas kerjasama daerah	%	90	100	111,11		Biro Pemerintahan dan OTDA
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	90	100	111,11		Biro Pemerintahan dan OTDA
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	90	100	111,11		Biro Pemerintahan dan OTDA
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT							Sekretariat Daerah
	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	%	90	91,64	101,82		Biro Kesejahteraan rakyar
	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	%	90	100	111,11		Biro Kesejahteraan rakyar
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	40	40	100,00		Biro Kesejahteraan rakyar
PROGRAM FASILITASI DAN							Sekretariat Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
KOORDINASI HUKUM							
	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	%	95	100	105,26		Biro Hukum
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	95	100	105,26		Biro Hukum
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	95	100	105,26		Biro Hukum
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	%	95	100	105,26		Biro Hukum
PROGRAM PEREKONOMIA NDANPEMBANG UNAN							Sekretariat Daerah
	Nilai kemandirian BLUD	%	50	69,34	138,68		Biro Perekonomian
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	80	87,5	109,38		Biro Perekonomian
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	75	75	100,00		Biro Perekonomian
	Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	95	98,99	104,20		Biro ISDA

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	90	97,05	107,83		Biro ISDA
	Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87	93,42	107,38		Biro ISDA
	Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	%	75	85,71	114,28		Biro Perekonomian
	Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	%	80	94,59	118,24		Biro Perekonomian
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	85	95,27	112,08		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	93	94,8	101,94		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi	%	90	90	100,00		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							Sekretariat Daerah
	Capaian Pelaksanaan APBD	%	98	99,09	101,11		Biro Adm Bangda
	Capaian Pelaksanaan APBN	%	95	98,99	104,20		Biro Adm Bangda

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	80	92	115,00		Biro Adm Bangda
	Persentase realisasi bantuan keuangan	%	83	99,57	119,96		Biro Adm Bangda
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100	100	100,00		Biro Adm Bangda

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 47 indikator kinerja seluruhnya berstatus telah tercapai.

2. Sekretariat DPRD

Kinerja unsur Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 36
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI							Sekretariat DPRD
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD	%	100	100	100,00		Bagian Umum

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD	%	100	100	100,00		Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA	%	95	95	100,00		Bagian Persidangan
	Persentase Layanan Bagian Humas	%	95	95	100,00		Bagian Humas

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja dengan status tercapai.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaran unsur Perencanaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 37
Capaian Kinerja Perencanaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan	%	90	90	100,00		

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan						
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor	%	90	90	100,00		Bidang Kajian dan Pengembangan
	Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup	%	90	90	100,00		Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
	Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	90	90	100,00		Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
	Presentasi konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian	%	90	90	100,00		Bidang Perekonomian

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja dengan 1 indikator tercapai dan 4 indikator akan tercapai.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaran unsur Keuangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 38
Capaian Kinerja Keuangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	%	1	100	10000,00		Sekretariat
	Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	%	100	100	100,00		Sekretariat
	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	%	100	100	100,00		Bidang Anggaran
	Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	100	100,00		Bidang Akuntansi
	Persentase realisasi serapan APBD	%	92	98,65	107,23		Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	70	77,2	110,29		Bidang Aset daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							Badan Pengelola Pendapatan Daerah
	Persentase Objek Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertangani	%	8	8	100		Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
							Kabupaten Demak
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
							Kabupaten Boyolali
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
							Kabupaten Batang
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Tegal	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
							Kabupaten Banjarnegara
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Magelang	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo	%	8	8	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
	Persentase Pemanfaatan Informasi Pendapatan Daerah	%	95	95	100		Bidang Pengelolaan Data dan Pegembangan Pendapatan
	Persentase Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah	%	90	100,85	112,06		Bidang Evaluasi dan Pembinaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
`	Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	%	9,13	8,96	98,14		Bidang Retribusi dan Pendapatan lain
	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB	%	10,03	8,35	83,25		Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I	%	5,72	5,28	92,31		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II	%	5,44	5,10	93,75		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III	%	-1,72	-1,83	93,99		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang	%	13,93	12,14	87,15		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga	%	21,52	17,12	79,55		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal	%	6,43	5,65	87,87		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak	%	7,67	6,27	81,75		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan	%	10,48	8,35	79,68		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta	%	9,93	8,92	89,83		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten	%	8,34	6,99	83,81		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen	%	18,90	15,53	82,17		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	16,96	14,45	85,20		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri	%	11,63	9,61	82,63		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar	%	12,29	10,29	83,73		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali	%	16,34	12,87	78,76		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati	%	3,21	2,50	77,88		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora	%	-1,70	-1,93	88,08		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang	%	15,75	12,02	76,32		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus	%	13,82	10,67	77,21		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara	%	7,22	5,45	75,48		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan	%	26,53	22,51	84,85		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan	%	18,54	14,86	80,15		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang	%	5,67	4,89	86,24		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang	%	1,21	1,01	83,47		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal	%	6,27	5,34	85,17		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal	%	10,15	8,30	81,77		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes	%	4,36	3,91	89,68		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas	%	13,68	11,11	81,21		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap	%	2,70	2,26	83,70		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga	%	31,14	24,62	79,06		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	19,12	14,80	77,41		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang	%	15,71	12,19	77,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang	%	14,69	11,05	75,22		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen	%	14,44	11,27	78,05		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo	%	15,45	12,48	80,78		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung	%	17,17	12,93	75,31		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo	%	23,35	16,87	72,25		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
	Persentase Peningkatan Penerimaan Lain lain Pendapatan Yang sah	%	0,08	0,10	125,00		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok	%	10,86	12,14	111,79		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP	%	13,26	14,46	109,05		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II	%	-0,08	-0,09	88,89		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III	%	106,62	144,33	135,37		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang	%	21,50	23,50	109,30		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga	%	4,35	4,41	101,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal	%	32,47	46,22	142,35		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak	%	26,99	26,11	96,74		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan	%	29,76	31,80	106,85		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta	%	1,09	0,98	89,91		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase peningkatan penerimaan PAP	%	10,82	10,85	100,28		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	UPPD Kabupaten Klaten						Kabupaten Klaten
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen	%	-72,67	-6,11	1.189,36		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	4,35	3,44	79,08		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri	%	38,20	34,91	91,39		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar	%	32,48	31,88	98,15		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali	%	14,91	15,78	105,84		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati	%	20,36	21,26	104,42		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora	%	39,40	36,78	93,35		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase peningkatan penerimaan PAP	%	24	24,59	102,46		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	UPPD Kabupaten Rembang						Kabupaten Rembang
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus	%	-78	406,05	100,00		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara	%	15	16,45	109,67		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan	%	60	71,21	118,68		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang	%	53,35	57,07	106,97		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang	%	12,19	13,03	106,89		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal	%	10,53	12,21	115,95		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes	%	4,32	4,66	107,87		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase peningkatan penerimaan PAP	%	8,62	9,41	109,16		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	UPPD Kabupaten Banyumas						Kabupaten Banyumas
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap	%	7,85	7,73	98,47		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga	%	57,91	74,06	127,89		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-2,63	-1,62	162,35		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Magelang	%	50,29	52,57	104,53		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang	%	23,11	24,38	105,50		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen	%	22,40	22,93	102,37		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo	%	11,60	11,76	101,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung	%	4,38	5,10	116,44		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
							Kabupaten Temanggung
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo	%	2,92	2,92	100,00		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
	Persentase Peningkatan Penerimaan PBBKB	%	8	8,34	104,25		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB	%	7,11	6,99	98,31		Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I	%	5,42	4,85	89,48		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II	%	5,39	5,73	106,31		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III	%	1,87	1,73	92,51		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang	%	-1,62	-1,46	110,96		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga	%	-11,87	-10,31	115,13		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal	%	18,34	16,25	88,60		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak	%	7,58	7,39	97,49		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan	%	9,70	9,32	96,08		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta	%	-4,60	-4,23	108,75		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten	%	7,87	7,30	92,76		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen	%	11,15	10,71	96,05		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	19,66	18,43	93,74		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri	%	0,46	0,47	102,17		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar	%	19,10	16,58	86,81		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali	%	16,22	15,43	95,13		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati	%	4,36	4,33	99,31		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora	%	0,19	0,20	105,26		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang	%	-1,97	-1,87	105,35		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus	%	2,07	2,08	100,48		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara	%	12,94	12,69	98,07		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan	%	-27,27	-12,79	213,21		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan	%	29,80	25,37	85,13		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang	%	25,43	22,43	88,20		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang	%	17,27	15,71	90,97		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Tegal	%	-30,09	-13,28	226,58		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal	%	42,59	30,81	72,34		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes	%	17,69	14,77	83,49		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas	%	12,17	11,49	94,41		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap	%	11,11	10,63	95,68		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga	%	1,27	1,32	103,94		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	25,87	21,24	82,10		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Magelang	%	-53,99	18,21	100		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang	%	18,77	16,06	85,56		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen	%	12,12	11,27	92,99		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo	%	-2,62	-2,38	110,08		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung	%	13,87	12,03	86,73		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo	%	13,95	12,86	92,19		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	%	3,91	3,76	96,16		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada	%	2,74	2,68	97,81		Unit Pelayanan Pendapatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	UPPD Kota Semarang I						Daerah Kota Semarang I
	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II	%	3,40	3,08	90,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III	%	7,38	6,75	91,46		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang	%	2,02	2,06	101,98		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga	%	1,09	1,13	103,67		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal	%	1	1,05	105,00		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak	%	0,86	0,88	102,33		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan	%	3	3,11	103,67		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada	%	9,94	10,28	103,42		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	UPPD Kota Surakarta						
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten	%	9,84	9,95	101,12		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen	%	9,18	9,60	104,58		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	2,19	2,26	103,20		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri	%	1,72	1,77	102,91		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar	%	0,46	0,47	102,17		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali	%	8,91	9,08	101,91		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati	%	-26,09	-26,70	97,72		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada	%	6,49	6,74	103,85		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	UPPD Kabupaten Blora						Kabupaten Blora
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang	%	2,03	1,95	96,06		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus	%	1,62	1,73	106,79		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara	%	1,41	1,61	114,18		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan	%	1,29	1,31	101,55		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan	%	2,49	2,65	106,43		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang	%	0	0	100,00		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang	%	10	10,10	101,00		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase peningkatan penerimaan	%	14,29	9,48	66,34		Unit Pelayanan Pendapatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal						Daerah Kota Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal	%	1,76	1,94	110,23		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes	%	9,16	9,27	101,20		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas	%	0	0	100,00		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap	%	1,40	1,44	102,86		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga	%	1,11	1,16	104,50		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	0,82	0,82	100,00		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang	%	7,27	7,63	104,95		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada	%	1,35	1,73	128,15		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	UPPD Kabupaten Magelang						Kabupaten Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen	%	11,15	11,46	102,78	●	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo	%	6,50	6,65	102,31	●	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung	%	3,68	4,22	114,67	●	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo	%	10,95	11,02	100,64	●	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki 193 indikator, realisasi pada tahun 2022 terdapat 114 indikator yang capaiannya melebihi 100% dan 79 indikator memiliki capaian dibawah 100%. Dari jumlah 79 indikator kinerja yang tidak mencapai target. Pada indikator kinerja persentase peningkatan penerimaan PKB terdapat 35 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu pada Persentase Peningkatan Penerimaan PKB pada Bidang PKB, UPPD Kota Semarang I, UPPD Kota Semarang III, UPPD Kabupaten Kendal, UPPD Kabupaten Demak, UPPD Kabupaten Grobogan, UPPD Kabupaten Klaten, UPPD Kabupaten Sragen, UPPD Kabupaten Sukoharjo, UPPD Kabupaten Karanganyar, UPPD Kabupaten Boyolali, UPPD Kabupaten Pati, UPPD Kabupaten Jepara, UPPD Kabupaten Pekalongan, UPPD Kabupaten Batang, UPPD Kabupaten Pemalang, UPPD Kabupaten Tegal, UPPD Kabupaten Brebes, UPPD Kabupaten Banyumas, UPPD Kabupaten Cilacap, UPPD Kabupaten

Banjarnegara, UPPD Kabupaten Magelang, UPPD Kabupaten Kebumen, UPPD Kabupaten Temanggung, UPPD Kabupaten Wonosobo. Ketidaktercapaian target dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, belum pulihnya kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi covid 19.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan penerimaan BBNKB terdapat 38 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu pada Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB Bidang PKB, UPPD Kota Semarang I, UPPD Kota Semarang II, UPPD Kota Semarang III, UPPD Kabupaten Semarang, UPPD Kota Salatiga, UPPD Kabupaten Kendal, UPPD Kabupaten Demak, UPPD Kabupaten Grobogan, UPPD Kota Surakarta, UPPD Kabupaten Klaten, UPPD Kabupaten Sragen, UPPD Kabupaten Sukoharjo, UPPD Kabupaten Wonogiri, UPPD Kabupaten Karanganyar, UPPD Kabupaten Boyolali, UPPD Kabupaten Pati, UPPD Kabupaten Blora, UPPD Kabupaten Rembang, UPPD Kabupaten Kudus, UPPD Kabupaten Jepara, UPPD Kota Pekalongan, UPPD Kabupaten Pekalongan, UPPD Kabupaten Batang, UPPD Kabupaten Pemalang, UPPD Kota Tegal, UPPD Kabupaten Tegal, UPPD Kabupaten Brebes, UPPD Kabupaten Banyumas, UPPD Kabupaten Cilacap, UPPD Kabupaten Purbalingga, UPPD Kabupaten Banjarnegara, UPPD Kota Magelang, UPPD Kabupaten Magelang, UPPD Kabupaten Kebumen, UPPD Kabupaten Purworejo, UPPD Kabupaten Temanggung, UPPD Kabupaten Wonosobo. Ketidaktercapaian target dikarenakan adanya fenomena kelangkaan pasokan chip semikonduktor yang berdampak pada stok dan penjualan motor baru. Data dari Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) menunjukkan angka penjualan kendaraan bermotor roda dua selama Mei tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis. Selama periode tersebut penjualan domestik pasar roda dua hanya sebanyak 248.235 unit. Angka ini turun sekitar 43% jika dibandingkan pencapaian bulan sebelumnya atau April 2022 yang membukukan penjualan 439.472 unit. Setiap pendaftaran unit kendaraan bermotor baru, selain dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan tarif sebesar 12,5% juga dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif untuk kepemilikan pertama pribadi sebesar 1,5%. Dengan demikian, tidak tercapainya pendapatan BBNKB juga berdampak langsung terhadap penerimaan PKB. sehingga mempengaruhi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan terdapat 8 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu pada Persentase Peningkatan Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II, UPPD Kabupaten Demak, UPPD Kota Surakarta, UPPD Kabupaten Sukoharjo, UPPD Kabupaten Wonogiri, UPPD Kabupaten Karanganyar, UPPD Kabupaten Blora, UPPD Kabupaten Cilacap. Ketidaktercapaian target dikarenakan ada beberapa yang tutup, adanya pengurangan produksi dan ada beberapa potensi air permukaan dalam perbaikan jaringan pipa.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan penerimaan retribusi kayada terdapat 7 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu pada Persentase

Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Bidang Retribusi dan PL, UPPD Kota Semarang I, UPPD Kota Semarang II, UPPD Kota Semarang III, UPPD Kabupaten Pati, UPPD Kabupaten Rembang, dan UPPD Kota Tegal. Ketidaktercapaian target diantaranya karena sewa gedung pertemuan yang sepi peminat, beberapa penyewa lahan yang mengundurkan diri, pemanfaatan sewa digital sign di UPPD Kota Semarang I, II, dan III yang semula di sewa oleh PT. SPJT sudah tidak diperpanjang lagi, serta adanya penyesuaian khususnya pemakaian kekayaan daerah pada obyek retribusi kantin sekolah karena kantin belum sepenuhnya beroperasi dan sedang dalam masa transisi pasca pandemi covid19.

Indikator kinerja persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mencapai target merupakan konsekuensi logis atas divestasi atau penarikan modal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pemegang saham kepada PT. SPJT pada tahun 2022 sehingga berakibat pada menurunnya laba perusahaan dan menurunnya pembagian deviden.

3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran unsur Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 38
Capaian Kinerja Kepegawaian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							Badan Kepegawaian Daerah
	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100		Bidang Mutasi
	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	100	100	100		Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	%	80	80	100		Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
	Presentase penanganan kasus kepegawaian	%	100	100	100		Bidang Pembinaan dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
							Kesejahteraan Pegawai
	Presentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	80	210	262,5		Unit Penilaian Kompetensi ASN kelas A
	Presentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	80	80	100		Bidang Informasi Kepegawaian

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100%

:Perlu Upaya Keras < 100%

NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja dengan status tercapai

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaran unsur pendidikan dan pelatihan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 39
Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	Skor	3,5	3,55	101,43		Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
	Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	%	100	100	100		Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional	%	100	100	100		Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial	%	100	100	100		Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	%	100	100	100		Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
	Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	%	79	89,23	112,95		Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
	Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	%	80	97,65	122,06		Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja dengan status tercapai.

5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran urusan penelitian dan pegembangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 40
Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang ekonomi dan industri	%	20	20	100		UPT Brida
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	%	20	20	100		UPT Brida
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	20	20	100		UPT Brida
	Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Ekonomi dan Industri	%	84	84	100,00		UPT Brida
	Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya	%	84	84	100,00		UPT Brida

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	84	84	100,00		UPT Brida

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100%

:Perlu Upaya Keras < 100%

NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja dengan 6 indikator akan tercapai

6. Penghubung

Kinerja penyelenggaran unsur penghubung ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG							Badan Penghubung
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung	%	100	100	100		Badan Penghubung

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100%

:Perlu Upaya Keras < 100%

NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Penghubung ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja dengan status tercapai.

2.4. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Kinerja penyelenggaran unsur pengawasan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 41
Capaian Kinerja Pengawasan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	85	107,87	126,91		Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan akuntabilitas Keuangan Daerah
	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus	%	85	112,5	132,35		Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus
	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	85	127,27	149,73		Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja PD
	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	85	122,78	144,45		Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	85	127,06	149,48		Sekretariat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
	Nilai Self Assessment RB Provinsi	Nilai	85	88,35	103,94		Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan RB
	Persentase Capaian Aksi Stranas PK	%	75	84,2	112,27		Inspektur Pembantu Bidang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
							Pengawasan RB
	Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi	%	100	100	100,00		Sekretariat
	Persentase Nilai MCP korsupgah	%	85	94,02	110,61		Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan RB
	Persentase Penerapan MR di OPD	%	10	10	100,00		Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan RB

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100%

:Perlu Upaya Keras < 100%

NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Pemerintahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus telah tercapai.

2.5. Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaran unsur pemerintahan umum ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 42
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,14	4,2	133,76		Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,1	4	129,03		Bidang Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,92	3,2	109,59		Bidang Ketahanan Bangsa
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang	Nilai	3,23	3,25	100,62		Bidang Ketahanan Bangsa

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
	Kesatuan Bangsa dan Politik						
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,7	4,8	177,78		Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Pemerintahan Umum ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus telah tercapai.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA
IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**5.238.338.908.000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74.57		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**5.178.892.703.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3.2	5.178.892.703.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						5.178.892.703.000		
						Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	5.153.572.939.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.032.592.069.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	5.032.592.069.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.029.965.692.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	32844	5.029.965.692.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.626.377.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.626.377.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					325.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	325.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				75.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	3	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					425.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	425.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				250.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	3	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				50.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	2	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	3	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.666.635.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.666.635.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				200.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				646.635.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	646.635.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.100.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	1.100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				70.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	2	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				70.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					810.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	50	810.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				100.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	4		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				310.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	50	310.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					114.899.235.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	114.899.235.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.488.592.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	2.488.592.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				112.190.643.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	112.190.643.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.855.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	100	1.855.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				240.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	17	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	200	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Bulan	12	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				75.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	3	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.000.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	210	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	250	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.511.650.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					362.150.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	362.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				72.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	72.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				149.150.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	149.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					230.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	8	230.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	30	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					499.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	499.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				278.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	278.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				210.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					370.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	509	370.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	369		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	493	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.321.150.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					448.650.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	448.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.650.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					80.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	6	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	5	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					358.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	358.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				198.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	198.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					434.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	434.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				9.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	12	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.302.399.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					416.399.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	416.399.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				158.399.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	10	158.399.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					55.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	13	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	7	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					366.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	366.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					450.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	97	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				12.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	22	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	68	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.285.850.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.600.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	6.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.600.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	6.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					607.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	607.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				287.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Paket	1	287.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					57.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	57.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	57.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					452.300.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	452.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				188.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	188.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				255.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	255.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					162.450.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	162.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.300.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.250.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya Yang Dipelihara	Unit	24	12.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				61.900.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2	61.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	10	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.576.150.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					478.950.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	478.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	38.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	24	4.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				48.250.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	48.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				235.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	235.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					650.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	650.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	5	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					335.200.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	335.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	108.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				207.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	207.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	18	107.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.491.900.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					245.100.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	2	245.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				97.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	97.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	8	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Paket	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.800.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Paket	12	78.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					749.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	749.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				273.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	273.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				475.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	475.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					465.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	280	465.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	60		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	210	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	3	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				195.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	195.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				155.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	155.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.483.150.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					366.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	366.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					120.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	22	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	15	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					483.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	483.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				220.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					464.150.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	68	464.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	45	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				9.150.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	3	9.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				350.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.496.150.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					377.150.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	377.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				99.550.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	99.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				179.600.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	179.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					606.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	606.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	7	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				546.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	546.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					394.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan		394.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				188.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	188.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	119.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	40	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	55	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				29.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.888.150.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	100	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					510.150.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	1	510.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				93.800.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	93.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				190.350.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	190.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					435.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	435.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				235.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	235.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					448.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	448.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				192.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	192.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					465.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	465.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	Unit	3	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.567.200.000	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					35.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				35.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					231.550.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	231.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				31.015.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	31.015.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				52.752.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	52.752.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33.207.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	33.207.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.695.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	19.695.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.506.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	17.506.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.875.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	7.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	68.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					146.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	146.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				6.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.800.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	5	40.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.767.050.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.767.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				660.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	660.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	15.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.088.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.088.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					386.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	28	386.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.800.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	8	39.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				203.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	203.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.229.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					430.000.000		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	430.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					95.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					319.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	319.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					355.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	10	355.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	24	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				110.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.141.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					492.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	492.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					379.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	379.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					190.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	27	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.795.365.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					424.354.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	424.354.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				45.990.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	45.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.909.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	56.909.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				51.480.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	51.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.210.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	33.210.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.250.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	10.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				57.515.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	57.515.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				169.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	169.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					196.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	80	196.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	3		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				126.200.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	23	126.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.918.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.918.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				543.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	543.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.374.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.374.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					211.311.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	21	211.311.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				66.711.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	66.711.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				89.600.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	250	89.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.196.500.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					388.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	388.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					127.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	20	127.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				127.500.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	127.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					426.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	426.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				216.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	216.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					255.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	15	255.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.336.150.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					359.150.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	359.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				80.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				99.150.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	99.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					152.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	152.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				132.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	132.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset Tak Berwujud yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					445.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	445.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	11	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					350.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	20	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.698.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					431.650.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	431.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.650.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	29.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				65.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					503.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	12	503.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				70.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				133.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	8	133.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					436.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	21	436.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				179.050.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	179.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				241.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	241.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					327.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	145	327.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				37.100.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	37.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	60	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	21	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	49	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**59.446.205.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.18	59.446.205.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						59.446.205.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	59.446.205.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					59.446.205.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Angka	100	59.446.205.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				59.234.455.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	59.234.455.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				211.750.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	6	211.750.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan inklusif									**3.710.760.299.000**		
						Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.94		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.08		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan								**1.126.294.609.000**		
						APK SMA, SMK dan SLB	%	82.92	1.126.294.609.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						1.125.210.747.000		
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	%	90.54	620.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					400.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I	%	76.65	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.003			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					200.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I	%	90	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah mebel sekolah yang tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					20.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I	%	90.05	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				20.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	%	76.59	1.300.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					200.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II	%	30.228	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	4	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						
						Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						
						Jumlah Ruang Laboratorium Kompuer yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						
						Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					950.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II	%	40.571	950.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				400.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	3	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				300.000.000		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	10	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				100.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN II	%	72	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	%	75.57	1.050.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					500.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III	%	72.39	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				300.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	3	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					400.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III	%	90.14	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III	%	86.68	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	%	25.69	1.238.383.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					688.383.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV	%	73.4	688.383.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				688.383.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	3	688.383.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					400.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IV	%		400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah ruang guru/ kepala sekolah ruang guru/ kepala sekolah/ TU yang telah direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				300.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit	60	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IV	%	84.83	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	%	54.59	2.200.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					800.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX	%	24.82	800.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				300.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				300.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	4	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.250.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX	%	88.42	1.250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				300.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				450.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	4	450.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				300.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	4	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	4	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX	%	83.06	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	4	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	%	93.71	1.150.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					500.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V	%	69.33	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				350.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	350.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					500.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V	%	88.08	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				350.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	6	350.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V	%	92.5	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	%	79.86	1.550.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					350.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI	%	80	350.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						
						Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						
						Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.050.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI	%	88	1.050.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				300.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				600.000.000		
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VI	%	87	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	%	72.83	850.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					350.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII	%	50.27	350.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Fisika Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Kimia Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Kompuer Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Bahasa Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					400.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII	%	64.17	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				400.000.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	5	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					100.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII	%	188.16	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				100.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	5	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	%	77.11	1.000.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					450.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	%	78.3	450.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				350.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	350.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				100.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					300.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	%	89.5	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					250.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	%	81.05	250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	3	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	%	77.81	970.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					260.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X	%	66.88	260.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				260.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	260.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					560.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X	%	88.97	560.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				300.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				260.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	260.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X	%	89.97	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	%	87.73	1.250.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					500.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI	%	82.39	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				350.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	350.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				150.000.000		
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					300.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI	%	84.39	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					450.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI	%	83.39	450.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				300.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	3	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	%	81	875.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					500.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII	%	75	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				350.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	350.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					300.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII	%	91.2	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah ruang guru/ kepala sekolah ruang guru/ kepala sekolah/ TU yang telah direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII	%	93	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				75.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	%	88.25	650.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					300.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII	%	75.25	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitas	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				100.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	2	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					250.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII	%	84.76	250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa						
						Jumlah unit pembangunan RPS	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium						
						Jumlah unit pembangunan Laboratorium	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah unit Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas sekolah	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah ruang guru/ kepala sekolah ruang guru/ kepala sekolah/ TU yang telah direhabilitasi	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				250.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	2	250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XIII	%	81.11	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Parasana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Unit			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah						
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	%	10.53	79.403.729.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					79.403.729.000		
						Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan	Angka	20	79.403.729.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				102.281.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1	102.281.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				509.700.000		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	509.700.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				28.948.791.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	30	28.948.791.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah				40.000.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	493	40.000.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				439.422.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	6	439.422.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0077			Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah						
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				9.403.535.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	58	9.403.535.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	%	65	423.372.183.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					423.372.183.000		
						Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan	Angka	550	423.372.183.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				2.277.600.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	7	2.277.600.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				1.929.795.000		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	6	1.929.795.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0011			Pembangunan Perpustakaan Sekolah						
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0		Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				21.595.968.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	75	21.595.968.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				46.248.692.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	98	46.248.692.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				2.498.325.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	14	2.498.325.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika				745.875.000		
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	745.875.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia				2.502.266.000		
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	2.502.266.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer				726.975.000		
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	726.975.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa				297.675.000		
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	297.675.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				682.500.000		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	682.500.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0028			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						
						Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah				121.750.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2	121.750.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				212.760.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	45	212.760.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				4.748.962.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	38	4.748.962.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium				3.404.700.000		
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	7	3.404.700.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				1.202.850.000		
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	1.202.850.000	Bidang Pembinaan SMA	
						Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	%	60	578.408.526.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					578.408.526.000		
						Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan	Angka	246	578.408.526.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa				41.344.526.000		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	35	41.344.526.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium				13.580.880.000		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	40	13.580.880.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0		Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0007			Pembangunan Perpustakaan Sekolah						
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0		Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				8.963.120.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	56	8.963.120.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				81.000.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1000	81.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				411.020.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	45	411.020.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik						
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				22.500.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	150	22.500.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0075			Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah						
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	Angka	10	5.706.203.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					5.706.203.000		
						Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB	Angka	10	1.421.707.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0070			Pembangunan Ruang Kelas Baru				1.421.707.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	8	1.421.707.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB	Angka	3	4.284.496.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0001			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				4.284.496.000		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	4.284.496.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	Angka	36	15.460.850.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.460.850.000		
						Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru	Angka	8	2.660.850.000	Bidang Pembinaan SMA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.0072			Pembangunan Ruang Kelas Baru				2.660.850.000		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	9	2.660.850.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan	Angka	306	12.800.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0001			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				12.800.000.000		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	3	12.800.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	Angka	0.55	8.155.873.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					8.155.873.000		
						Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK	Angka	20	3.459.300.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0064			Pembangunan Ruang Kelas Baru				3.459.300.000		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	20	3.459.300.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK	Angka	2	4.696.573.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0001			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				4.696.573.000		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	2	4.696.573.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						341.362.000		
						Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	%	76.2	341.362.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
				Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi					341.362.000		
						Jumlah kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB	Orang	23659	341.362.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	
		1.01.04.1.01.0002			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				341.362.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	4	341.362.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						742.500.000		
						Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	%	100	35.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					35.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Dokumen	5	35.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.05.1.02.0001			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				35.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	5	35.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	%	15	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					50.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas	Dokumen	20	50.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.05.1.01.0001			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	15	50.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	%	93.93	65.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					65.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan	Dokumen	65	65.000.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.05.1.01.0001			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				65.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	65	65.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	3	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN I	Dokumen	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	100	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN II	Angka	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Angka	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN II	Angka	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Angka	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN II	Angka	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	100	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN III	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN III	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN III	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%	10	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN IV	Dokumen		20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN IV	Dokumen		20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN IV	Dokumen		10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	25	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN IX	Dokumen	66	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX	Dokumen	154	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN IX	Dokumen	14	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	3	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%	20	45.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN V	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN V	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		
						Jumlah kajian perijinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN V	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	100	25.000.000		
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VI	Dokumen	1	10.000.000		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen	Dokumen	1	10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VI	Dokumen	1	10.000.000		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000		
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VI	Dokumen	1	5.000.000		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000		
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%	100	50.000.000		
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VII	Dokumen	2	20.000.000		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VII	Dokumen	2	20.000.000		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000		
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VII	Dokumen	2	10.000.000		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	10.000.000		
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	100	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VIII	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VIII	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VIII	Dokumen	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	25	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN X	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN X	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN X	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%	4.76	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XI	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XI	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XI	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	100	22.500.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XII	Dokumen	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XII	Dokumen	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					2.500.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XII	Dokumen	1	2.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				2.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	2.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%	100	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XIII	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	12	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XIII	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	12	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XIII	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	12	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
	Meningkatnya mutu pendidikan								**2.562.723.240.000**		
						Nilai karakter siswa sekolah menengah	Angka	85.44	751.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						751.800.000		
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	Angka	89.06	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I	Angka	25	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I	Angka	126	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	126	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I	Angka	5	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	Angka	81.22	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	Angka	55	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	Angka	107	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	Angka	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	%	100	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	Angka	83.27	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	Angka	24	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	Angka	50	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	Angka	6	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	Angka	81.77	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	%	100	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang tersusun	Dokumen	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	%	0	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang tersusun	Dokumen	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	%	100	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	Angka	85.85	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	Angka	66	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	Angka	154	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	Angka	14	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	Angka	88.34	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	Unit	60	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	60	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	Unit	108	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	108	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	Angka	29	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	29	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	Angka	86.49	37.500.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					30.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	Angka	33	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas Yang Tersusun	Dokumen	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	Angka	26	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejururan Yang Tersusun	Dokumen	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	Angka	3	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus Yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	Angka	88.83	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII	Angka	25	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII	Angka	50	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII	Angka	5	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	Angka	89.03	47.150.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					32.150.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	Angka	32	16.075.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				16.075.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	16.075.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	Angka	19	16.075.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				16.075.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	16.075.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	Angka	13	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	Angka	82.21	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	Angka	60	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	20	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	Angka	146	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	4	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	Angka	8	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	Angka	83.27	54.150.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					44.150.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	Angka	41	21.760.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				21.760.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	21.760.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	Angka	112	22.390.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				22.390.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	22.390.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					10.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	Angka	4	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				10.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	Angka	85.3	46.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					39.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	Angka	35	19.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				19.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	19.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	Angka	75	19.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				19.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	19.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	Angka	2	7.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	Angka	86.06	47.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					35.200.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	Angka	55	16.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				16.600.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	16.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	Angka	79	18.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				18.600.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	18.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					11.800.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	Angka	7	11.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				11.800.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	11.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	Angka	66.08	2.561.971.440.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						2.561.971.440.000		
						Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	%	68.18	999.317.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					999.317.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional	Angka	15	999.317.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				999.317.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	15	999.317.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	%	50	1.399.983.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					1.399.983.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional	Angka	93	1.399.983.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.399.983.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	93	1.399.983.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	1.67	275.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I	Angka	9	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I	Angka	15	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	18	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I	Angka	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	2	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	1	275.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II	Angka	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	132	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II	Angka	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	85	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II	Angka	1	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	2.87	230.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					80.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III	Angka	5	80.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				80.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	80.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					80.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III	Angka	11	80.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				80.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	80.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					70.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III	Angka	2	70.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				70.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	3	70.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%	1.25	275.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV	Siswa	2	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	133	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IV	Siswa		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	86	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV	Siswa	2	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	27	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	3.22	275.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX	Angka	0.52	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	25	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX	Angka	5.6	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX	Angka	2.8	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	10	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%	1.92	275.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V	Angka	8	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V	Angka	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	6	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V	Angka	2	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Unit	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	90	262.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					95.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI	Angka	20	95.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				95.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	132	95.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					95.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI	Angka	20	95.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				95.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	80	95.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					72.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI	Angka	5	72.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				72.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	30	72.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%	2.74	245.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					90.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII	Angka	20	90.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				90.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	15	90.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					90.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII	Angka	6	90.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				90.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	5	90.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					65.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII	Angka	5	65.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				65.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	5	65.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	2.2	265.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					90.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	Angka	4	90.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				90.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	90.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	Angka	5	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	Angka	5	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	28.57	203.150.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					68.150.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X	Angka	5	68.150.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				68.150.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	80	68.150.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X	Angka	5	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	146	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					60.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X	Angka	3	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				60.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	4	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%	3.63	275.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI	Angka	5	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	30	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI	Angka	6	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	40	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI	Angka	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	16	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	1.96	275.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII	Angka	4	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik yang diperoleh Satuan Pendidikan SMA	Siswa	30	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII	Angka	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII	Angka	2	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	5	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%	2.52	251.150.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					76.150.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	Angka	11	76.150.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				76.150.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	5	76.150.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	Angka	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	Angka	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	%	57.35	1.690.777.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.690.777.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional	Angka	2315	1.690.777.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.690.777.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	2315	1.690.777.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	%	10	460.140.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					128.180.000		
						Jumlah Guru SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	2500	128.180.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.01.0051			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				128.180.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	2500	128.180.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					236.360.000		
						Jumlah Guru SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	4500	236.360.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.02.0043			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				236.360.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	4500	236.360.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					95.600.000		
						Jumlah Guru SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	275	95.600.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.03.0050			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus				95.600.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	275	95.600.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	%	80.3	1.267.136.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					593.689.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang bersertifikat kompetensi	Angka	12976	593.689.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
		1.01.02.1.01.0051			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				593.689.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	12976	593.689.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					551.002.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang bersertifikat kompetensi	Angka	931	551.002.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0043			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				551.002.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	931	551.002.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					122.445.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang bersertifikat kompetensi	Angka	690	122.445.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.03.0050			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus				122.445.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	690	122.445.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	%	0.9	51.220.222.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					19.310.125.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	Siswa	44100	19.235.125.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				19.235.125.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	27	19.235.125.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	Siswa	14148	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	98	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					30.000.778.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	Siswa	68100	29.925.778.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				29.925.778.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	134	29.925.778.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	Siswa	68100	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	125	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.909.319.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	Siswa	1920	1.874.319.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.874.319.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	25	1.874.319.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	Siswa	4694	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	27	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	%	40.11	25.856.463.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					13.996.360.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	Siswa	344	13.925.535.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				13.925.535.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	1	13.925.535.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	Siswa	8932	70.825.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				70.825.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	1	70.825.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					10.542.432.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	Siswa	456	10.471.607.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				10.471.607.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	1	10.471.607.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	Siswa	11634	70.825.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				70.825.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	1	70.825.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.317.671.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	Siswa	52	1.282.671.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.282.671.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	1	1.282.671.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	Siswa	136	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	1	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	%	69.8	36.181.840.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.859.005.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III	Siswa	34735	15.799.005.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				15.799.005.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	56	15.799.005.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III	Siswa	10845	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				60.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					18.061.047.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III	Siswa	53851	18.001.047.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				18.001.047.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	101	18.001.047.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Siswa	8979	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				60.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.261.788.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Siswa	1699	2.231.788.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.231.788.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	2.231.788.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Siswa	375	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				30.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	%	69.8	19.590.981.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					9.673.999.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	Siswa	27157	9.598.999.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				9.598.999.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	58	9.598.999.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	Siswa	8500	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	58	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					8.976.209.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	Siswa		8.901.209.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				8.901.209.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	9	8.901.209.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	Siswa		75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					940.773.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	Siswa	983	905.773.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				905.773.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	11	905.773.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	Siswa	172	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	11	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	%	79	58.001.687.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					21.135.417.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	Siswa	13.227	21.060.417.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				21.060.417.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	21.060.417.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	Siswa	13.227	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					34.979.000.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	Siswa	91.092	34.904.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				34.904.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	34.904.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	Siswa	91.092	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.887.270.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	Siswa	2.009	1.852.270.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.852.270.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	1.852.270.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	Siswa	2.009	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	%	78.7	34.124.340.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					16.289.680.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	Siswa	30217	16.214.680.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				16.214.680.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	16.214.680.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	Siswa	11531	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	100	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					17.216.098.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	Siswa	30843	17.141.098.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				17.141.098.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	17.141.098.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	Siswa	10645	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	100	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					618.562.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	Siswa	314	583.562.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				583.562.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	583.562.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	Siswa	100	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	100	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	%	90	35.527.775.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.041.528.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	Siswa	27992	14.969.528.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				14.969.528.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan (SMA) yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	100	14.969.528.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	Siswa	11853	72.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				72.000.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	100	72.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					18.794.723.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	Siswa	29182	18.722.723.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				18.722.723.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	100	18.722.723.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	Siswa	22627	72.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				72.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	100	72.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.691.524.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	Siswa	886	1.658.524.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.658.524.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	100	1.658.524.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	Siswa	175	33.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				33.000.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	100	33.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	%	85.55	20.548.779.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					9.773.913.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	Siswa	30588	9.698.913.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				9.698.913.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	9.698.913.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	Siswa	10457	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					9.850.129.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	Siswa	41422	9.775.129.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				9.775.129.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	9.775.129.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	Siswa	10457	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					924.737.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	Siswa	498	889.737.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				889.737.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	889.737.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	Siswa	428	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	%	76.12	30.331.942.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					17.002.857.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Siswa	36375	16.927.857.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				16.927.857.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	16.927.857.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	Siswa	11517	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					12.486.459.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII	Siswa	60850	12.411.459.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				12.411.459.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	12.411.459.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	Siswa	19625	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					842.626.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII	Siswa	1490	807.626.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				807.626.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	807.626.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	Siswa	445	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	%	84.74	33.424.059.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					18.494.384.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	Siswa	39572	18.424.384.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				18.424.384.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	79	18.424.384.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	Siswa	40292	70.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				70.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	79	70.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					14.130.557.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	Siswa	90337	14.057.557.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				14.057.557.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	146	14.057.557.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	Siswa	91489	73.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				73.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	146	73.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					799.118.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	Siswa	1622	766.118.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				766.118.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	8	766.118.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	Siswa	1698	33.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				33.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	8	33.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	%	44.94	18.261.166.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					11.240.033.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	Siswa	27922	11.190.033.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				11.190.033.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	41	11.190.033.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	Siswa	8715	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				50.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	41	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					6.267.687.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	Siswa	52588	6.217.687.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				6.217.687.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	112	6.217.687.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	Siswa	15625	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				50.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	112	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					753.446.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	Siswa	636	718.446.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				718.446.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	718.446.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	Siswa	126	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	%	80	30.462.565.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					16.373.696.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	Siswa	34737	16.308.946.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				16.308.946.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	65	16.308.946.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	Siswa	11579	64.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				64.750.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	65	64.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					12.485.195.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	Siswa	92662	12.420.445.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				12.420.445.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	146	12.420.445.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	Siswa	30888	64.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				64.750.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	146	64.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.603.674.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	Siswa	1651	1.588.674.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.588.674.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	5	1.588.674.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	Siswa	550	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	5	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	%	79	26.065.345.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					13.522.411.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	Siswa	24700	13.447.411.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				13.447.411.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	57	13.447.411.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	Siswa	8030	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	57	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					11.318.002.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	Siswa	46645	11.243.002.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				11.243.002.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	89	11.243.002.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	Siswa	14904	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	89	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.224.932.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	Siswa	1401	1.189.932.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.189.932.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	9	1.189.932.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	Siswa	320	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	57	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	%	10	327.910.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					109.920.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	40	109.920.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				109.920.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Unit	4	109.920.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					122.910.000		
						Jumlah Sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	60	122.910.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				122.910.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	6	122.910.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					95.080.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	30	95.080.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				95.080.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Unit	4	95.080.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	10	84.146.475.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					84.146.475.000		
						Jumlah siswa penerima dana BOS SLB	Angka	21100	83.429.585.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0052			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				83.429.585.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Siswa	21100	83.429.585.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi	Angka	5	716.890.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				656.708.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	20	656.708.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				60.182.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	190	60.182.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	67.78	713.149.986.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					713.149.986.000		
						Jumlah siswa penerima dana BOS SMA	Siswa	426370	706.100.384.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0053			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				706.100.384.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Siswa	426370	706.100.384.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi	Angka	1	7.049.602.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				6.939.648.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	876	6.939.648.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				109.954.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	3	109.954.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	50.35	1.335.551.252.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.335.551.252.000		
						Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK	Siswa	1274225	1.318.196.111.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0046			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				1.318.196.111.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Unit	1274225	1.318.196.111.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi	Angka	2	17.355.141.000	Bidang Pembinaan SMK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				17.325.141.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	7200	17.325.141.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				30.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	1593	30.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun								**21.742.450.000**		
						Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	Angka	70.93	21.742.450.000		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						21.742.450.000		
						Persentase angka putus sekolah SLB	%	3.53	1.237.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.237.500.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa		900.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0044			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus				900.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa	2000	900.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
						Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin	Angka	4363	337.500.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0038			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				337.500.000		
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2250	337.500.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase angka putus sekolah SMA	%	2.3	9.967.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					9.967.000.000		
						Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin	Siswa	39100	9.967.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0039			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				4.947.000.000		
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	32980	4.947.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0045			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas				5.020.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa	6000	5.020.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase angka putus sekolah SMK	%	0.026	10.537.950.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					10.537.950.000		
						Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin	Angka	51000	10.537.950.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0031			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				7.537.950.000		
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	50253	7.537.950.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				3.000.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa	7000	3.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat									**33.001.987.000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	
						Angka Melek Budaya	%	52.32		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan								**23.895.790.000**		
						Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	%	28.23	23.895.790.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						189.850.000		
						Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	%	47.61	189.850.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					189.850.000		
						Persentase SDM Kebudayaan berkompeten	%	5.22	189.850.000	SEKSI KESENIAN	
		2.22.02.1.01.0002			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				189.850.000		
						Jumlah peserta pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	1726	189.850.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						23.705.940.000		
						Tingkat partisipasi seni tradisi	%	8.89	23.705.940.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					23.705.940.000		
						Persentase Lembaga Seni aktif berkarya	%	21.16	23.705.940.000	SEKSI KESENIAN	
		2.22.03.1.01.0003			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				23.705.940.000		
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	652	23.705.940.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
	Meningkatnya pelestarian budaya								**6.513.676.000**		
						Persentase karya budaya berperingkat nasional	%	15.89	6.513.676.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						3.729.072.000		
						Persentase cakupan pelestarian seni	%	100	2.603.640.000		
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					2.603.640.000		
						Jumlah kelompok seni yang difasilitasi	Kelompok	220	2.603.640.000		
		2.22.02.1.02.0001			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				2.603.640.000		
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jenis	25	2.603.640.000		OPD Provinsi
						Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	%	19.17	1.125.432.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					1.125.432.000		
						Persentase partisipasi Pemanfaatan OPK Peringkat Nasional	%	61.9	1.125.432.000	SEKSI KESENIAN	
		2.22.02.1.02.0001			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				1.125.432.000		
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yangDilakukan Pelindungan, Pengembangan danPemanfaatan	Buah	26	1.125.432.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						519.484.000		
						Persentase cagar budaya berperingkat nasional	%	12.71	519.484.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					261.040.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Cagar Budaya Berperingkat Provinsi	%	7.89	261.040.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	
		2.22.05.1.01.0002			Penetapan Cagar Budaya				261.040.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Ditetapkan	Buah	242	261.040.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					258.444.000		
						Persentase partisipasi pemanfaatan cagar budaya	%	88.37	258.444.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	
		2.22.05.1.02.0003			Pemanfaatan Cagar Budaya				258.444.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan	Buah	22	258.444.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; PROVINSI LAIN ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						2.265.120.000		
						Nilai survey kepuasan pengunjung museum	%	89.85	2.265.120.000	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A	
				Pengelolaan Museum Provinsi					2.265.120.000		
						Jumlah pengunjung museum	Orang	55000	2.265.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		2.22.06.1.01.0001			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				625.000.000		
						Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	Buah	1950	625.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.22.06.1.01.0003			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				1.220.120.000		
						Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Kegiatan	7	1.220.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.22.06.1.01.0004			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				420.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	4	420.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan								**2.592.521.000**		
						Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	%	22.44	2.592.521.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						2.109.120.000		
						Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	%	23.76	2.109.120.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					2.109.120.000		
						Persentase OPK yang Berdaya	%	22.97	2.109.120.000	SEKSI KESENIAN	
		2.22.02.1.01.0001			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				2.109.120.000		
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Buah	144	2.109.120.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						298.800.000		
						Persentase akses literasi sejarah	%	52.9	298.800.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi					298.800.000		
						Persentase Peningkatan Karya Literasi sejarah (tokoh sejarah, peristiwa bersejarah, toponimi, sejarah yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia)	%	52.9	298.800.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	
		2.22.04.1.01.0003			Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah				197.920.000		
						Jumlah Dokumen Data dan informasi Sejarah yang dapat di akses masyarakat	Dokumen	538	197.920.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		2.22.04.1.01.0004			Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal				100.880.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Penulisan Sejarah Lokal, Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Dokumen	171	100.880.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						184.601.000		
						Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	%	25.13	184.601.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					184.601.000		
						Persentase cagar budaya layak uji peringkat	%	6.95	184.601.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	
		2.22.05.1.02.0001			Pelindungan Cagar Budaya				103.551.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Buah	271	103.551.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.22.05.1.02.0002			Pengembangan Cagar Budaya				81.050.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Buah	9	81.050.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
JUMLAH									**8.982.101.194.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									**488.278.268.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.6		Dinas Kesehatan	
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN.								**480.253.689.000**		
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar	%	49.89	480.253.689.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						478.933.730.000		
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	66.6	433.950.926.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					300.000.000		
						Persentase faskes lainnya yang dipenuhi Fasilitas Sapras, alkes , SDM sesuai dengan ketentuan	%	100	300.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				300.000.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di fasilitasi Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Unit	2	300.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase RS yang dipenuhi Fasilitas Sapras, alkes , SDM sesuai dengan ketentuan	%	100		SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit						
						Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	0		SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					433.084.689.000		
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Lainnya sesuai Standar	%	98.88	432.049.926.000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.0016			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				432.049.926.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	20	432.049.926.000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Ketentuan	%	66.48	541.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	
		1.02.02.1.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				83.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	10	83.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.02.0020			Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				458.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	25	458.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase Faskes rujukan Sesuai Ketentuan	%	66.6	493.763.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
		1.02.02.1.02.0023			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				493.763.000		
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	20	493.763.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					566.237.000		
						Prosentase RS kelas B dan faslitas Pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar	%	100	566.237.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
		1.02.02.1.04.0001			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				166.237.000		
						Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	20	166.237.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				400.000.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	167	400.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	80	36.655.801.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					36.655.801.000		
						Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Vaksin	%	80	36.655.801.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				36.655.801.000		
						Pengadaan Obat, Bahan Medis Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan	Paket	8	36.655.801.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa	%	100	963.900.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					963.900.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	963.900.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan	Unit	2		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				25.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	1	25.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				938.900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	3	938.900.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten	%	100	1.221.028.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					624.618.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	624.618.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah Alat Kesehatan, / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan	Unit	0		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				62.400.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	2	62.400.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				562.218.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	562.218.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					596.410.000		
						Angka Kepuasan Pasien di Balkesmas	Angka	86.5	596.410.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				596.410.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	2	596.410.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang	%	100	1.431.740.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					990.740.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	990.740.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan	Unit	0		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				40.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	2	40.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				950.740.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	950.740.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					441.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Angka Kepuasan Pasien	Angka	87	441.000.000		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				441.000.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	2	441.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati	%	100	1.047.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					819.000.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	819.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang disediakan	Unit	0		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				57.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	4	57.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				762.000.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	762.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					228.000.000		
						Angka Kepuasan Pasien di balkesmas	Angka	84	228.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				228.000.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	2	228.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang	%	100	856.325.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					765.200.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	765.200.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan	Paket	2		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				65.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	4	65.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				700.200.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	7	700.200.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					91.125.000		
						Angka Kepuasan Pasien	Angka	87.7	91.125.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				91.125.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	2	91.125.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM	%	80	1.071.000.000	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.056.300.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di BKIM	%	80	1.056.300.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah Alat Kesehatan, / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan	Paket	10		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				20.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	2	20.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				1.036.300.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	6	1.036.300.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					7.700.000		
						Persentase Pelayanan Kesehatan di BKIM Provinsi Jawa Tengah sesuai standar	%	95	7.700.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0009			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	4		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				7.700.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit tidak menular	Dokumen	4	7.700.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					7.000.000		
						Angka kepuasan pelanggan di BKIM	%	85	7.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				7.000.000		
						Jumlah Mutu Layanan kesehatan di BKIM yang sesuai INM	Angka	2	7.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK	%	83	1.286.010.000	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					819.740.000		
						Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah provinsi	%	100	819.740.000	SEKSI PELAYANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
						Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Unit	0		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	Unit	0		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0013			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						
						Jumlah alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan faskes regional/regional maintenance center yang di sediakan dan dipelihara	Unit	0		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				819.740.000		
						Jumlah Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	17	819.740.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
						Persentase kab/kota yang mendapatkan pelayanan laboratorium dan PAK sesuai standar pelayanan yang berlaku	%	62.8		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0009			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						
						jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promkes	Dokumen	0		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					466.270.000		
						angka kepuasan pelanggan	Angka		466.270.000		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				466.270.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	3	466.270.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pemanfaatan informasi kesehatan	%	80	450.000.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					450.000.000		
						Persentase Ketersediaan Informasi Kesehatan Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	%	88	450.000.000	SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	
		1.02.02.1.03.0002			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				450.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	6	450.000.000	SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	OPD Provinsi
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						652.959.000		
						Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	80	500.000.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					500.000.000		
						Persentase SDMK yang kompeten dan bermutu	%	90	500.000.000	SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		1.02.03.1.02.0002			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				500.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDMK	Dokumen	5	500.000.000	SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
						Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	%	98	152.959.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					152.959.000		
						Persentase pelatihan yang sesuai standart	%	98	152.959.000	SEKSI PELATIHAN	
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				152.959.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	Orang	30	152.959.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						667.000.000		
						Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	%	75	667.000.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)					667.000.000		
						Presentase penerbitan pengakuan PBF Cabang & Cabang PAK	%	80	667.000.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
		1.02.04.1.01.0001			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				667.000.000		
						Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Angka	90	667.000.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
	MENINGKATNYA KESEHATAN KELOMPOK USIA PADA DAUR HIDUP								**2.888.637.000**		
						Persentase kabupaten/kota yang menyelengggarakan pelayanan kesehatan lansia	%	60	100.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						100.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia	%	60	100.000.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		
						Prosentase Kab Kota Denganpelayanan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 70%	%	60	100.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	2	100.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2	2.788.637.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.765.378.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	%	34.28	1.765.378.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.765.378.000		
						Prosentase Kab/Kota dengan Kesehatan Kerja dan olahraga yang baik	%	51.43	200.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.02.1.02.0007			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				200.000.000		
						Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Dokumen	4	200.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Prosentase kab kota dengan kesling yang baik	%	57.14	550.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				550.000.000		
						Jumlah dokumen has?l pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dokumen	4	550.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Prosentase kab kota dengan Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 70%	%	54.28	100.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	2	100.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Prosentase Kabupaten Kota dengan pelayanan kehamilan sesuai standar (K6) minimal 70%	%	62.85	915.378.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				915.378.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	4	915.378.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.023.259.000		
						Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi	%	82.85	850.000.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					582.000.000		
						Persentase kab/kota yang melaksanakan penggerakan Germas	%	82.85	582.000.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				582.000.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	4	582.000.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					268.000.000		
						Persentase Kab/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan PHBS di Jawa Tengah	%	22.85	268.000.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		1.02.05.1.02.0001			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				268.000.000		
						Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	Dokumen	12	268.000.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	28.57	27.500.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					27.500.000		
						Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	Kabupaten/Kota	2	27.500.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				27.500.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	2	27.500.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	28.57	19.200.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					19.200.000		
						Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	%	28.57	19.200.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				19.200.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	4	19.200.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42.85	59.599.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					59.599.000		
						Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	%	5	59.599.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				59.599.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	4	59.599.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	28.57	29.440.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					29.440.000		
						Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	%	28.57	29.440.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				29.440.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	4	29.440.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42.85	37.520.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					37.520.000		
						Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	%	28.57	37.520.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				37.520.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	4	37.520.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PM DAN PTM SERTA KESWA								**4.373.430.000**		
						Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	1.475.716.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.475.716.000		
						Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	1.475.716.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.475.716.000		
						Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap	%	98.9	975.000.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				975.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Dokumen	4	975.000.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kejadian bencana yang difasilitasi penanganan krisis kesehatan	%	100	500.716.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				250.716.000		
						Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Provinsi sesuai standar	Orang	25000	250.716.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.02.0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				250.000.000		
						Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang sesuai standar	Orang	1968	250.000.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.02.0018			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota						
						Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasai penerapan SPM bidang kesehatan lintas Kab/Kota	Dokumen	0		SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa	%	78	2.897.714.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2.897.714.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	%	63.9	700.000.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					700.000.000		
						Persentase kab/kota yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan PM dengan standar capaian HIV dan TB	%	34.3	700.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				700.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	9	700.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa	%	63.9	650.000.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					650.000.000		
						Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM dan Keswa	%	71.4	650.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				500.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	5	500.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.0013			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				150.000.000		
						Tersedianya dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	2	150.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa	%	71.42	698.160.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					276.960.000		
						Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100	276.960.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	8000		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				276.960.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4	276.960.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					421.200.000		
						Angka Kepuasan Pasien	Angka	85.5	421.200.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				421.200.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	86	421.200.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten	%	28.57	187.661.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					187.661.000		
						Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100	187.661.000	SEKSI PELAYANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas)	Orang	8000		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				187.661.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4	187.661.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang	%	57.14	255.661.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					255.661.000		
						Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100	255.661.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				35.000.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	8000	35.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				220.661.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	2	220.661.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	%	28.57	165.661.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					165.661.000		
						Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100	165.661.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas)	Orang	8000		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				165.661.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4	165.661.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang	%	57.14	240.571.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					240.571.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penangulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100	240.571.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				43.810.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas)	Orang	8000	43.810.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				196.761.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4	196.761.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
	MENURUNNYA PERMASALAHAN GIZI								**762.512.000**		
						Persentase ketercapaian intervensi spesifik untuk penurunan stunting	%	80	762.512.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						762.512.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting	%	51.42	656.622.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					656.622.000		
						Prosentase Kab/Kota dengan pengukuran Balita Usia 0-59 bulan berdasarkan surveilans gizi minimal 30%	%	57.14	656.622.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				656.622.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	656.622.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	28.57		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
						Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif	Kabupaten/ Kota	2		SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif						
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	4		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	28.57		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
						Jumlah kab/kota yang difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS)	Kabupaten/ Kota	2		SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif						
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS)	Dokumen	4		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	42.85	50.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					50.000.000		
						Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif	Kabupaten/Kota	2	50.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS)	Dokumen	7	50.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	28.57	25.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					25.000.000		
						Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS)	Kabupaten/Kota	2	25.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS)	Dokumen	4	25.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	42.85	30.890.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					30.890.000		
						Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif	Kabupaten/Kota	2	30.890.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				30.890.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	4	30.890.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**155.224.127.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	85		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**154.774.127.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	154.774.127.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						154.774.127.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	4.911.000.000	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.544.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	2.544.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.544.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	2.544.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					169.240.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	169.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.200.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	32.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.040.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	100.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang disediakan	Unit	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.997.343.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.997.343.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				680.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	680.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.296.343.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.296.343.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					190.417.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	190.417.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		
						JUmlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.417.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	60.417.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.134.201.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					840.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	840.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				840.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	840.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					168.093.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	168.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				113.093.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	113.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	2		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.046.108.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.046.108.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				262.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	262.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				782.708.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	782.708.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					80.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	60	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				15.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	4.313.990.000	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.273.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	2.273.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.273.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	2.273.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					171.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	171.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	2	117.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.655.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.655.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				65.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				738.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	738.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	31.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				820.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	820.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					184.490.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	184.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				65.500.000		
						Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya pada perangkat daerah yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun	Unit	5	65.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.990.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50	40.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				43.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.419.300.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					179.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	179.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				49.990.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	49.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.010.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	20.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				64.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	64.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					27.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	46	27.500.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1		SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1		SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3	27.500.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.057.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.057.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.353.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.353.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					155.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	48	155.800.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				28.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	28.800.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	6.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				36.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	36.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	80.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.975.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					970.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	970.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				970.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	970.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					160.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu						
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; ACEH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					755.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	755.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				255.000.000		
						Mengukur hasil dari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perangkat daerah dalam satu tahun	Laporan	4	255.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				500.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	130.739.043.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					120.690.967.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	120.690.967.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				119.840.967.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	540	119.840.967.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				700.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	700.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	2	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	5	100.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					606.769.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	606.769.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				75.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0004			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				531.769.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	Laporan	4	531.769.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					120.960.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	120.960.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				70.960.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	4	70.960.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	25	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.265.213.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.265.213.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				53.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	53.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				246.283.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	246.283.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.088.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	13.088.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				49.699.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	49.699.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				456.013.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	456.013.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				271.630.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	3	271.630.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.774.934.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	6.774.934.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.128.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	2.128.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				91.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	91.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.535.234.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	4.535.234.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.280.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	1.280.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				517.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	517.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	100.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				492.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	492.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				170.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.735.059.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.000.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.000.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					348.909.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	348.909.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.995.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.995.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.765.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	49.765.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.685.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	14.685.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.110.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	35.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				23.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				199.354.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	199.354.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					989.150.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	989.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				279.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	279.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				708.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	708.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					397.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	397.000.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				110.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10	110.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				77.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	80	77.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				60.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	2	60.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				90.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	90.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	60.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.926.440.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.452.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	1.452.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.452.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	1.452.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					253.990.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	253.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.730.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	15.730.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.675.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	29.675.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.875.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	31.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.350.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	25.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.750.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	8.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				142.610.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	142.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> DESA BEJALEN
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.031.150.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.031.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				695.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	695.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					189.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	189.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				72.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	72.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.800.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	160	29.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				30.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				43.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	43.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.620.094.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.400.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	1.400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.400.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Dokumen	4	1.400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.824.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	60.824.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu						
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.824.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	60.824.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.101.270.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.101.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				870.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				357.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	357.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				742.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	742.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					58.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	58.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				58.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	58.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	2		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**450.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.9	450.000.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						450.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	62.5	450.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					450.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	90	450.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	200.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
JUMLAH									**643.502.395.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSUD Dr. Moewardi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									**94.564.509.000**		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.6			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD DR MOEWARDI								**94.564.509.000**		
						Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi	%	87	94.564.509.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						94.564.509.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Dr. Moewardi	%	100	94.564.509.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					94.564.509.000		
						Persentase pemenuhan alat kedokteran/kesehatan pelayanan	%	85	94.564.509.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				94.564.509.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	94.564.509.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan alat kedokteran	%	100			
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit						
						Jumlah Prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
						Jumlah Sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
						Persentase penyediaan telemedicine RS	%	60			
		1.02.02.1.01.0020			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	1		SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pelaksanaan pelaporan indikator mutu RS sebagai pendukung dokumen perijinan & akreditasi RS	%	90			
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	7		SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
						Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih RSUD Dr. Moewardi	%	30			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	2			
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						
						Jumlah Sumber Daya Manusia KesehatanKompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	700		BAGIAN DIKLAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Dr. Moewardi	%	90			
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi							
						Persentase pelaksanaan advokasi pemberdayaan, kemitraan peningkatan peran serta masyarakat & lintas sektor	Kegiatan	3			
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan,Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peranserta Masyarakat dan Lintas Sektor TingkatDaerah Provinsi	Dokumen	3		SUB BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**1.120.346.298.000**		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	85			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**1.120.346.298.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	1.120.346.298.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.120.346.298.000		
						Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi	%	82	962.500.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					962.500.000.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	100	962.500.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				962.500.000.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	962.500.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	157.846.298.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					157.846.298.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	24	157.846.298.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				157.846.298.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	1300	157.846.298.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100			
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	2		SUB BAGIAN ORGANISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.05.0004			Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian						
						Jumlah pemutakhiran dokumen pada sistem informasi kepegawaian	Dokumen	12		SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1		SUB BAGIAN MUTASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah										
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.9			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100			
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1		SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2		SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
JUMLAH									**1.214.910.807.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									**79.141.157.000**		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.6			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO								**79.141.157.000**		
						Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	90	79.141.157.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						79.141.157.000		
						Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	79.141.157.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					79.141.157.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarpras dan alkes untuk UKP rujukan dan UKM, UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100	79.141.157.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				79.141.157.000		
						Jumlah pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medis fasilitas layanan kesehatan	Paket	1	79.141.157.000	SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0020			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
						Jumlah Ketersediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Paket	1		SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit						
						Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	10		SEKSI PERAWATAN RAWAT INAP	OPD Provinsi
						Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1		SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1		SEKSI PENUNJANG TERAPI	
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	100			
		1.02.02.1.04.0002			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit						
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan RS kelas B	%	100		SEKSI PENJAMINAN MUTU PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
						Persentase capaian SDM kesehatan yang terlatih RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	20			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	5			
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	360		SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100			
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi							
						Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan	Kegiatan	3			
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektoral Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	3		SUBBAGIAN TATA USAHA HUKUM DAN HUMAS	OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**605.409.567.000**		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	85			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**605.409.567.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	605.409.567.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						605.409.567.000		
						Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	82	508.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					508.000.000.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Parsial	%	96	508.000.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				508.000.000.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	508.000.000.000	SUBBAGIAN AKUNTANSI	OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	97.409.567.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					97.409.567.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	97.409.567.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				97.409.567.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	823	97.409.567.000	SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI	OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100			
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
						Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	12		SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1			
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit Kendaraan dinas operasional yang diadakan	Unit	1		SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA NON MEDIS	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah										
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.9			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100			
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2		SUBBAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4		SUBBAGIAN MONITORING EVALUASI	
JUMLAH									**684.550.724.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSUD Tugurejo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									**21.863.444.000**		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.6			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD TUGUREJO								**21.863.444.000**		
						Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90	21.863.444.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						21.863.444.000		
						Persentase pemenuhan fasilitas layanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	%	100	363.444.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
						Persentase penyediaan sarana dan prasarana UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100			
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit						
						Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					363.444.000		
						Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	363.444.000		
		1.02.02.1.02.0022			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				363.444.000		
						Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit	Dokumen	12	363.444.000	SUB BAGIAN ORPEG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	%	100	21.500.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					21.500.000.000		
						Persentase penyediaan layanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100	21.500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				21.500.000.000		
						Jumlah alat kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	Unit	1	21.500.000.000	SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0020			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
						Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Unit	1		SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penyediaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100			
		1.02.02.1.01.0013			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						
						Jumlah alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintainance center yang disediakan dan dipelihara	Unit	1		SEKSI PENUNJANG NON MEDIK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						
						Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1		SEKSI PENUNJANG MEDIK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penyediaan penunjang layanan keperawatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100			
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						
						Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1		SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Tugurejo	%	33			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							
						Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	Kegiatan	5			
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						
						Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	Orang	400		SUB BAGIAN DIKLAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
						Persentase ketercapaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Tugurejo	%	100			
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi							
						Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	3			
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	3		SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**300.265.481.000**		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	85			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**300.265.481.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	300.265.481.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						300.265.481.000		
						Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo	%	55.25	211.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					211.000.000.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	83.41	211.000.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				211.000.000.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	6	211.000.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	89.265.481.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					89.265.481.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	89.265.481.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				89.265.481.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	765	89.265.481.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	2		SUB BAGIAN AKUNTANSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100			
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Dokumen	4500		SUB BAGIAN TU HUKUM DAN HUMAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah										
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.9			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100			
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11		SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3		SUB BAGIAN MONEV	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**322.128.925.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSUD Kelet Donorejo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									**52.600.000.000**		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.6			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD KELET DONOREJO								**52.600.000.000**		
						Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo	%	88	52.600.000.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						52.400.000.000		
						Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo	%	100	52.400.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					51.000.000.000		
						Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	51.000.000.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				20.000.000.000		
						Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	Unit	17	20.000.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.0020			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
						Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Unit			SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				31.000.000.000		
						Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	50		SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	31.000.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						
						Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah obat serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan	Paket	1		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.400.000.000		
						Persentase penyediaan layanan dan alkes untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100	1.400.000.000		
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4		SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.02.0022			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1.400.000.000		
						Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit	Dokumen	12	1.400.000.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Kelet Donorejo	%	30			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	5			
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						
						Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	Orang	100		SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						200.000.000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo	%	100	200.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					200.000.000		
						Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Kegiatan	3	200.000.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				200.000.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peranserta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	3	200.000.000	SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**95.285.271.000**		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	85			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**95.285.271.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	95.285.271.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						95.285.271.000		
						Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo	%	35	54.700.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peningkatan Pelayanan BLUD					54.700.000.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	88	54.700.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				54.700.000.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	4	54.700.000.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	40.585.271.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					40.585.271.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	14	40.585.271.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				40.585.271.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	291	40.585.271.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah										
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.9			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100			
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	11		SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	9		SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
JUMLAH									**147.885.271.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									**42.071.656.000**		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.6			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO								**42.071.656.000**		
						Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo	%	98	42.071.656.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						41.871.656.000		
						Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	21.371.656.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					21.000.000.000		
						Persentase Pemenuhan Fasilitasi Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100			
		1.02.02.1.01.0020			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	1		SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	21.000.000.000		
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				21.000.000.000		
						Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	4		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	21.000.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					371.656.000		
						Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	371.656.000		
		1.02.02.1.02.0022			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				371.656.000		
						Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	Dokumen	12	371.656.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	20.500.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					20.500.000.000		
						Persentase Pemenuhan Fasilitas Bahan Habis Pakai Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100			
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						
						Jumlah Bahan Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1		SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	20.500.000.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				20.500.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	12	20.500.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0013			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						
						Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	1		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						
						Jumlah Obat di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
						Persentase Pengelolaan Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	%	100			
		1.02.02.1.02.0013			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Dokumen	12		SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Pengelolaan Layanan Kesehatan Orang dengan Penyalahguna NAPZA	%	100			
		1.02.02.1.02.0014			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA						
						Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis	Orang	10		SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	20			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							
						Jumlah jenis kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi Latsar, Diklatpim, Peningkatan Kompetensi	Kegiatan	3			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						
						Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	Orang	10		SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah jenis kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi seminar, diklat, bimtek, workshop, simposium	Kegiatan	5			
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						
						Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	Orang	110		SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						200.000.000		
						Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	200.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					200.000.000		
						Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan bakti sosial	Kegiatan	1	7.875.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				7.875.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	4	7.875.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan home care, home visit, dropping	Kegiatan	3	99.930.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				99.930.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	4	99.930.000	SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan RSTD	Kegiatan	1	92.195.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				92.195.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	4	92.195.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**129.537.748.000**		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	85			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**129.537.748.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	129.537.748.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						129.537.748.000		
						Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	43	59.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					59.000.000.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	89	58.940.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				58.940.000.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN AKUNTANSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	58.865.000.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Cost Recovery Rate Parsial	%	89	60.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				60.000.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	70.537.748.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					70.537.748.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	70.537.748.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				70.537.748.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	457	70.537.748.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah										
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.9			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100			
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	12		SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3		SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**171.609.404.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSJD Surakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									**36.575.729.000**		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.6			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD SURAKARTA								**36.575.729.000**		
						Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	98.17	36.575.729.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						36.375.729.000		
						Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta	%	95			
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
						Persentase Pemenuhan Fasilitas Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	95			
		1.02.02.1.01.0020			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	1		SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Pemenuhan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	95			
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit						
						Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta	%	100	470.000.000		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					470.000.000		
						Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	470.000.000		
		1.02.02.1.02.0022			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				470.000.000		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	12	470.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta	%	95	35.905.729.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					35.905.729.000		

						Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	95	35.905.729.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				20.000.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	20.000.000.000	SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.0013			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						
						Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	1		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				15.905.729.000		
						Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	15.905.729.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						
						Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	Paket	3		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	Paket	2		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
						Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100			
		1.02.02.1.02.0014			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA						
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	Orang	60		SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100			
		1.02.02.1.02.0013			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Dokumen	12		SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan	%	100			
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1		SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Surakarta	%	35			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	5			
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						
						Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Orang	208		SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						200.000.000		
						Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Surakarta	%	95	200.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					200.000.000		
						Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	3	200.000.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	12	200.000.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase capaian kegiatan promosi di tingkat provinsi RSJD Surakarta	%	95			
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi							
						Jumlah kegiatan Advokasi, Kemitraan, dan Kerjasama Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	2			
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	2		SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**116.528.737.000**		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	85			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**116.528.737.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	116.528.737.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						116.528.737.000		
						Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta	%	33	48.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					48.000.000.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	95	48.000.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				48.000.000.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	48.000.000.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1		SUB BAGIAN AKUNTANSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Cost Recovery Rate Parsial	%	95			
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1		SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	68.528.737.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					68.528.737.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	68.528.737.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				68.528.737.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	493	68.528.737.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100			
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	12		SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah										
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.9			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100			
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10		SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	7		SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
JUMLAH									**153.104.466.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									**26.680.000.000**		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.6			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD DR. SOEDJARWADI								**26.680.000.000**		
						Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi	%	100	26.680.000.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						26.480.000.000		
						Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	4.500.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					4.500.000.000		
						Persentase Pemenuhan Fasilitas Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100			
		1.02.02.1.01.0020			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	1		SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	4.500.000.000		
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				4.500.000.000		
						Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	3.500.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	1.000.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	480.000.000		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					480.000.000		
						Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	480.000.000		
		1.02.02.1.02.0022			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				480.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit	Dokumen	12	480.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	21.500.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					21.500.000.000		
						Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	21.500.000.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				21.500.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	9	21.500.000.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100			
		1.02.02.1.01.0013			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						
						Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	1		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	3		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
						Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100			
		1.02.02.1.02.0014			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA						
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Orang	11		SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100			
		1.02.02.1.02.0013			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	12		SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						35.000.000		
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	30	35.000.000		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					35.000.000		
						Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi Latsar, Diklatpim, Administrasi Dasar	Kegiatan	3			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	10		SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi seminar, diklat, bimtek, workshop, simposium	Kegiatan	4	35.000.000		
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				35.000.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	138	35.000.000	SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						165.000.000		
						Persentase capaian kegiatan advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100			
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi							
						Jumlah Kegiatan Advokasi, Kemitraan dan Kerjasama Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	2			
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	2		SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	165.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					165.000.000		
						Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	7	165.000.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				165.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	7	165.000.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**100.339.294.000**		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	85			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**100.339.294.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	100.339.294.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						100.339.294.000		
						Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	46.5	49.300.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					49.300.000.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	95	49.300.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				49.300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	49.300.000.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	51.039.294.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					51.039.294.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	51.039.294.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				51.039.294.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	331	51.039.294.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah										
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.9			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100			
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan keuangan)	Laporan	1		SUB BAGIAN AKUNTANSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100			
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10		SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3		SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
JUMLAH									**127.019.294.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Rumah Sakit Khusus Mata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									**19.538.000.000**		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.6			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RS MATA								**19.538.000.000**		
						Persentase capaian SPM di RS Mata	%	100	19.538.000.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						19.188.000.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RS Khusus Mata	%	40	19.188.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					19.088.000.000		
						Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	40	19.088.000.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						
						Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	Paket	65			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0020			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				600.000.000		
						Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Unit	1	600.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				14.500.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Paket	4	14.500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				3.988.000.000		
						Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	2.411.650.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah obat serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan	Paket	3	1.576.350.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
						Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	30			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.02.0022			Operasional Pelayanan Rumah Sakit						
						Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit	Dokumen	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	30	100.000.000		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				100.000.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	1	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						250.000.000		
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih	%	20	250.000.000		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					250.000.000		
						Junlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	2	250.000.000		
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				250.000.000		
						Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	Orang	20	250.000.000		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						100.000.000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RS Khusus Mata	%	50	100.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		
						jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan	Kegiatan	8	100.000.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				100.000.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	0	69.750.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	4	30.250.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah											
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	85			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
						Cost Recovery Rate Total RS Khusus Mata	%	20			
				Peningkatan Pelayanan BLUD							
						Cost Recovery Rate Parsial	%				
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	40			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen				
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah										
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.9			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	80			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	1			
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**19.538.000.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Jalan Provinsi									**340.675.501.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**	
						Persentase jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor dan kondisi permukaan mantap	%	67.88		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor								**172.116.330.000**		
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	44.48	172.116.330.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						172.116.330.000		
						Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	%	100	6.212.367.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					6.212.367.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	Dokumen	8	6.212.367.000	SEKSI RANCANG BANGUN	
		1.03.10.1.01.0041			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				2.652.062.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	Dokumen	4	2.652.062.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.10.1.01.0043			Survey Kondisi Jalan/Jembatan				3.560.305.000		
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	4	3.560.305.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	%	41.68	59.161.042.000	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					59.161.042.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Km	3.49	59.161.042.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.003			Rehabilitasi Jalan						
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Barat	Km			SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.003			Rekonstruksi Jalan						
						Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan di Wilayah Barat	Km			SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.03.10.1.01.003			Pembangunan Jembatan						
						Panjang Jembatan yang Dibangun di Wilayah Barat	m			SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.003			Penggantian Jembatan						
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian di Wilayah Barat	m			SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.003			Pemeliharaan Berkala Jalan						
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Barat	Km			SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.0040			Pelebaran Jalan Menuju Standar				59.161.042.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Barat	Km	3.49	59.161.042.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		1.03.10.1.01.004			Pembangunan Jalan						
						Panjang Jalan yang Dibangun di Wilayah Barat	Km	0		SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	47.5	68.135.780.000	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					68.135.780.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Km	1	68.135.780.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan						
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Timur	Km			SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
		1.03.10.1.01.0031			Rekonstruksi Jalan						
						Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan di Wilayah Timur	Km			SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.10.1.01.0032			Pembangunan Jembatan						
						Panjang Jembatan yang Dibangun di Wilayah Timur	m	0		SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	OPD Provinsi
		1.03.10.1.01.0036			Penggantian Jembatan				58.090.000.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian di Wilayah Timur	m	37.2	58.090.000.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.03.10.1.01.0038			Pemeliharaan Berkala Jalan						
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala di Wilayah Timur	Km			SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
		1.03.10.1.01.0040			Pelebaran Jalan Menuju Standar				10.045.780.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Timur	Km	1	10.045.780.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.03.10.1.01.0042			Pembangunan Jalan						
						Panjang Jalan yang Dibangun di Wilayah Timur	Km			SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
						Persentase panjang jalan yang dileger	%	75.79	583.380.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					583.380.000		
						Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N	Km	1386.03	583.380.000	SEKSI RANCANG BANGUN	
		1.03.10.1.01.0044			Pengelolaan Leger Jalan				583.380.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	8	583.380.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	%	12.85	7.866.953.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					7.866.953.000		
						Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Tersedia	Unit	53	7.866.953.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				7.866.953.000		
						Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah	Unit	1	425.000.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara	Unit	31	2.366.953.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah persediaan bahan/material konstruksi penanganan kerusakan khusus	Unit	5575	5.075.000.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km	0		SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	24.301.808.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					24.301.808.000		
						Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah	Dokumen	10	5.621.795.000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	
		1.03.10.1.01.0029			Pelebaran Jembatan				1.000.000.000		
						Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan jembatan	m2	1000	1.000.000.000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	
		1.03.10.1.01.0040			Pelebaran Jalan Menuju Standar				4.621.795.000		
						Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	m2	1690	4.621.795.000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	
						Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan	Dokumen	13	18.680.013.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	
		1.03.10.1.01.0024			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi				7.434.889.000		
						Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen)	Dokumen	32	7.434.889.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				3.401.136.000		
						Panjang Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	m	0.05	3.401.136.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				7.843.988.000		
						Panjang Jalan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	Km	0.45	7.843.988.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	31.88	5.855.000.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					5.855.000.000		
						Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi	Sertifikat	1100	5.855.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	
		1.03.10.1.01.0028			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				5.855.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	0		SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001	Dokumen	2	354.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah pemeliharaan alat uji	Unit	60	204.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah penambahan alat uji	Unit	6	4.068.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu	Orang	60	789.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi	Sertifikat	1100	440.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap								**168.559.171.000**		
						Persentase kondisi jembatan provinsi baik	%	91.18	20.468.795.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						20.468.795.000		
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	%	83.65	1.435.910.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.435.910.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap	m	2871.82	1.435.910.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.002			Rehabilitasi Jembatan						
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Cilacap	m			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.03.10.1.01.002 6			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.435.910.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Cilacap	m	2871.82	1.435.910.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.03.10.1.01.002			Pelebaran Jembatan						
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Cilacap	m			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	%	93.65	1.082.400.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.082.400.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang	m	2164.8	1.082.400.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.002			Rehabilitasi Jembatan						
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Magelang	m			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		1.03.10.1.01.002 6			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.082.400.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Magelang	m	2164.8	1.082.400.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		1.03.10.1.01.002			Pelebaran Jembatan						
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Magelang	m			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	%	93.82	3.365.975.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					3.365.975.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati	m	2482.95	3.365.975.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.002			Rehabilitasi Jembatan				2.128.000.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Pati	m	7	2.128.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		1.03.10.1.01.002 6			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.237.975.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pati	m	2475.95	1.237.975.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		1.03.10.1.01.002			Pelebaran Jembatan						
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Pati	m			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	%	88.49	1.452.510.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.452.510.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pekalongan	m	2905.02	1.452.510.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0025			Rehabilitasi Jembatan						
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Pekalongan	m	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.452.510.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pekalongan	m	2905.02	1.452.510.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		1.03.10.1.01.0029			Pelebaran Jembatan						
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Pekalongan	m			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	%	91.18	3.838.590.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					3.838.590.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi	m	3682.18	3.838.590.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0025			Rehabilitasi Jembatan				2.028.000.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Purwodadi	m	61	2.028.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.810.590.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Purwodadi	m	3621.18	1.810.590.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.03.10.1.01.0029			Pelebaran Jembatan						
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Purwodadi	m			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	%	85.51	2.213.975.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					2.213.975.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang	m	1781.95	2.213.975.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0025			Rehabilitasi Jembatan				1.328.000.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Semarang	m	10	1.328.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				885.975.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Semarang	m	1771.95	885.975.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0029			Pelebaran Jembatan						
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Semarang	m			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	%	94.78	4.397.800.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					4.397.800.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta	m	4942.6	4.397.800.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0025			Rehabilitasi Jembatan				1.928.000.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Surakarta	m	3	1.928.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				2.469.800.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Surakarta	m	4939.6	2.469.800.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.03.10.1.01.0029			Pelebaran Jembatan						
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Surakarta	m			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	%	86.14	1.018.500.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.018.500.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Tegal	m	2037	1.018.500.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0025			Rehabilitasi Jembatan						
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Tegal	m	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.018.500.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Tegal	m	2037	1.018.500.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.10.1.01.0029			Pelebaran Jembatan						
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Tegal	m			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	%	94.9	1.663.135.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.663.135.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo	m	2092.57	1.663.135.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0025			Rehabilitasi Jembatan				628.000.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Wonosobo	m	22.3	628.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.035.135.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Wonosobo	m	2070.27	1.035.135.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.03.10.1.01.0029			Pelebaran Jembatan						
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Tegal Wonosobo	m			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaaan mantap	%	91.29	148.090.376.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						148.090.376.000		
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	%	89.43	10.129.976.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					10.129.976.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap	Km	206.24	10.129.976.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				2.234.000.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap	Km	1.34	2.234.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap	Km			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				7.895.976.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Cilacap	Km	204.9	7.895.976.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	%	94.17	10.748.200.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					10.748.200.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang	Km	261.08	10.748.200.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				1.674.000.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang	Km	1.1	1.674.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				9.074.200.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Magelang	Km	259.98	9.074.200.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	%	88.12	10.821.800.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					10.821.800.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati	Km	249.26	10.821.800.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				1.524.000.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Pati	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Pati	Km	1	1.524.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Pati	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				9.297.800.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Pati	Km	248.26	9.297.800.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	%	85.23	14.704.200.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					14.704.200.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	Km	254.16	14.704.200.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				4.036.000.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan	Km			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan	Km	2	4.036.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan	Km			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				10.668.200.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Pekalongan	Km	252.16	10.668.200.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	%	86.78	21.848.200.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					21.848.200.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Km	379.69	21.848.200.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				4.024.000.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi	Km			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi	Km	0.6	4.024.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi	Km			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				17.824.200.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Purwodadi	Km	379.09	17.824.200.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	%	99.95	14.858.450.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					14.858.450.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang	Km	220.38	14.858.450.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				5.966.000.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Semarang	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Semarang	Km	1.65	5.966.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Semarang	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				8.892.450.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Semarang	Km	218.68	8.892.450.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	%	93.17	32.673.250.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					32.673.250.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Km	414.11	32.673.250.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				19.314.000.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta	Km			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta	Km	11.6	19.314.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta	Km			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				13.359.250.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Surakarta	Km	402.51	13.359.250.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	%	95.52	15.153.700.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					15.153.700.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal	Km	201.84	15.153.700.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				8.047.000.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal	Km	0.1	3.000.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal	Km	2	5.047.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal	Km			SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				7.106.700.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Tegal	Km	199.84	7.106.700.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	%	91.61	17.152.600.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					17.152.600.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	248.56	17.152.600.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				7.558.000.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo	Km	5	7.558.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo	Km	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				9.594.600.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	243.56	9.594.600.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**116.428.954.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	60		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**115.688.954.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	95.8	115.688.954.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						115.688.954.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.665.051.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					314.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	314.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	720	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				181.300.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	181.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					760.251.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	760.251.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				114.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	114.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				638.651.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	638.651.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					590.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	56	590.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				140.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	48	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	96.916.364.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					81.419.826.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	45	81.419.826.000	SUBBAG KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				78.965.506.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	477	78.965.506.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.014.320.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.014.320.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				440.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	19	440.000.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					558.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	13	558.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				558.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	13	558.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					657.250.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	657.250.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				657.250.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	590	657.250.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.588.750.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.588.750.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				116.360.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	116.360.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				455.140.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	455.140.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				84.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	84.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				21.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2172	21.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.737.350.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	1.737.350.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				85.900.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	85.900.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				69.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	69.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.399.660.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	565	4.399.660.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				1.303.500.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	438	1.303.500.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.096.160.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	127	3.096.160.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.609.278.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	50	4.609.278.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	24.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.750.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.750.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.835.278.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	26	2.835.278.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.683.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	438	2.683.600.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.233.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	30	1.233.600.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				800.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	800.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				650.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	405	650.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.679.091.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					263.010.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	263.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.550.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	7.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				29.960.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	29.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Dokumen	12	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					547.371.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	547.371.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				121.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	121.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				421.871.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	421.871.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					868.710.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	65	868.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				144.710.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	144.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	8	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				124.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	51	124.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.718.698.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					207.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	207.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.220.098.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.220.098.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				238.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	238.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				978.548.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	978.548.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					291.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	61	291.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				133.300.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	133.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				57.800.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	49	57.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.361.518.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					321.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	321.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				45.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	336	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				190.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.187.658.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.187.658.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				220.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				962.658.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	962.658.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					852.860.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	47	852.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				125.300.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7	125.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				660.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	660.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				67.560.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	36	67.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.243.632.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					226.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	226.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	14.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				33.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					441.532.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	441.532.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				65.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	65.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				373.832.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	373.832.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					575.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	41	575.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	150.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				380.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	380.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	30	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	840.217.000	Balai Jasa Konstruksi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					139.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	139.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.400.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.400.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.600.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				81.600.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	81.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					525.717.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	525.717.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	85.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				438.917.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	438.917.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					175.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	43	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	38	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.325.778.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					344.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	344.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				52.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				43.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	43.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				216.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	216.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.105.258.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.105.258.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				181.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	181.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				918.258.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	918.258.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					876.520.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	76	876.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				152.660.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10	152.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				650.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	650.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				73.860.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	60	73.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.985.207.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					217.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	217.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.800.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	60.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	384	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					670.602.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	670.602.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				170.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				492.602.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	492.602.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.097.305.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	58	1.097.305.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.805.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	150.805.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				900.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	900.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	46	46.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.160.950.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					292.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	292.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				39.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	336	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					476.244.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	476.244.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				93.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	93.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				377.244.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	377.244.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					392.206.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	33	392.206.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				127.206.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7	127.206.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				230.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	230.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	24	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.891.093.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					315.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	315.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	702	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					624.093.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	624.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				520.593.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	520.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					952.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	77	952.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				107.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	107.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				750.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	750.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				95.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	55	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.901.355.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					254.388.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	254.388.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.128.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.128.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.480.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	33.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.800.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				33.480.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	33.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				167.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	167.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					558.087.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	558.087.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				105.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				447.687.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	447.687.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.088.880.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	93	1.088.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				129.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	129.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				900.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	900.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				59.280.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	85	59.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**740.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.1	740.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						740.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	740.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					740.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	740.000.000	SUBBAG PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				420.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	21	420.000.000	SUBBAG PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				320.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	45	320.000.000	SUBBAG PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (IRB)									**22.747.423.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**	
						Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	%	33.6		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah								**22.747.423.000**		
						Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	49.42	22.747.423.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						18.699.123.000		
						Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	5.83	18.195.000.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					18.195.000.000		
						Jumlah Lokasi Komplek BGMD yang Diberi Bantuan Teknis Pada Tahun N	Lokasi	60	18.195.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	
		1.03.08.1.01.0012			Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Peserta mengikuti pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung kepada penyelenggara bangunan gedung, dan masyarakat	Orang	160	100.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung negara	Orang	80	50.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.08.1.01.0018			Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota				180.000.000		
						Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	60	180.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.08.1.01.0019			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				17.865.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	2	17.865.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi
						Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	11.94	504.123.000		
				Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					504.123.000		
						Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n	Lokasi	123	504.123.000		
		1.03.08.1.01.0019			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				504.123.000		
						Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis sampai dengan tahun Ke-n	Dokumen	1	504.123.000		OPD Provinsi
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						4.048.300.000		
						Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	45.38	200.000.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					200.000.000		
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Dokumen	1	200.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	
		1.03.11.1.01.0012			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				200.000.000		
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	320	200.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	43.49	3.848.300.000	Balai Jasa Konstruksi	
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					2.635.445.000		
						Jumlah Tenaga Bidang Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi	Orang	10579	2.635.445.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		1.03.11.1.01.0011			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				1.467.445.000		
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	Orang	1600	1.467.445.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.01.0014			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				1.168.000.000		
						Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	Orang	800	1.168.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi					750.000.000		
						Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Kegiatan	5	750.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.03.11.1.02.0008			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				650.000.000		
						Jumlah Data Dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen	2	218.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengadaan Buku Konstruksi	Buah	125	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani	Kegiatan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah stand pameran yang dilaksanakan	Unit	4	356.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.02.0009			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI				100.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	Orang	80	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					462.855.000		
						Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi	Dokumen	1	462.855.000		
		1.03.11.1.03.0006			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				462.855.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Laporan	4	462.855.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (LH)									**63.844.279.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**	
						Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	%	33.6		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Akses Air Minum Aman								**63.844.279.000**		
						Persentase akses air minum aman	%	40.43	63.844.279.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						63.844.279.000		
						Persentase akses air minum layak	%	91.92	3.844.274.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					3.844.274.000		
						Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Layak Th-N (Jiwa)	Orang	33760434	3.844.274.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.0015			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				2.386.184.000		
						Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun (fs, rispam, ded, amdal) (dokumen) Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)	Dokumen	4	2.386.184.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.03.1.01.0016			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1.458.090.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota)	Kabupaten/ Kota	29	1.458.090.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi
						Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas	%	100	60.000.005.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	

						kabupaten/kota					
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					60.000.005.000		
						Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota	Liter	20	60.000.005.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.0017			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				60.000.005.000		
						Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/detik)	Liter	120	60.000.005.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Kapasitas Peningkatan SPAM Regional (Liter/detik)	Liter	0		SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (PE)									**17.239.623.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**	
						Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	%	33.6		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman								**2.978.123.000**		
						Persentase akses air limbah domestik aman	%	10.97	2.978.123.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						2.978.123.000		
						Persentase akses air limbah domestik layak	%	93.58	2.978.123.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional					2.978.123.000		
						Jumlah Penduduk yang Sudah Mempunyai Akses Air Limbah Domestik Layak Th-N	Orang	34724662	2.978.123.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	
		1.03.05.1.01.0013			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat				2.024.000.000		
						Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	RT/KK	0		SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi
						Kapasitas pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional (m3)	m3	35	2.024.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	m2			SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	
		1.03.05.1.01.0014			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				954.123.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi dalam pengelolaan air limbah domestik (Kab/Kota)	Kabupaten/ Kota	18	954.123.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.05.1.01.0015			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						
						Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen)	Dokumen	0		SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Akses Air Minum Aman								**14.261.500.000**		
						Persentase akses air minum aman	%	40.43	14.261.500.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						14.261.500.000		
						Persentase akses air minum jaringan perpipaan	%	54.32	14.261.500.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					14.261.500.000		
						Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jiwa)	Orang	19950683	14.261.500.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.0017			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				14.261.500.000		
						Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa	Lokasi	25	14.261.500.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi
JUMLAH									**560.935.780.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**94.856.617.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Angka	31.45		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah								**93.756.617.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	93.756.617.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						93.756.617.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	674.142.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					70.698.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	70.698.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.514.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	23.514.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.584.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	1.584.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.600.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	7	6.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					307.849.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	307.849.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				849.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	849.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				199.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	199.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				108.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					295.595.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	37	295.595.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				142.752.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	24	142.752.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				106.493.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	106.493.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.350.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	46.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	739.202.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					68.150.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	68.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.128.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	19.128.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.041.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.041.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.061.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	3.061.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.130.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	6	11.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.790.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	24	19.790.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					290.220.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	27	290.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				912.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	3	912.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202.980.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	202.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				86.328.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	86.328.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					380.832.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	90	380.832.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				146.200.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	146.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				127.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	127.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				107.382.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	67	107.382.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	469.653.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					77.266.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	77.266.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.575.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	17.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.825.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	14	13.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	2.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.353.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	3	6.353.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37.313.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	37.313.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					187.588.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	15	187.588.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				838.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	838.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				122.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	122.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				64.650.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	64.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					204.799.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	32	204.799.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				86.450.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	86.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.349.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	9	48.349.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	798.698.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					72.672.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	72.672.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	10	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.392.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	4.392.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.780.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	10	8.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					246.179.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	25	246.179.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.179.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.179.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				185.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	185.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				60.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					479.847.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	60	479.847.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				165.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	27	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				260.637.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	260.637.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				54.210.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	31	54.210.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	581.883.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					106.361.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	106.361.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.672.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	19.672.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.809.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.809.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.380.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	8.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					218.458.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	218.458.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				958.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	958.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				120.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				97.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	97.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					257.064.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	49	257.064.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				117.580.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	30	117.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				68.768.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	68.768.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.716.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	25	70.716.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di Balai PSDA Pemali Comal	%	100	997.495.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					104.900.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	104.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34.900.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	34.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					430.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	430.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				254.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	254.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				175.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					462.395.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	33	462.395.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				280.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	280.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				62.395.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	46	62.395.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	89.495.544.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					78.913.659.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	78.913.659.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				77.413.659.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	500	77.413.659.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.500.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	1.500.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					267.784.000		
						Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	267.784.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				267.784.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	267.784.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					275.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	275.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	480	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				100.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	100	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.978.665.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	77	1.978.665.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.186.335.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	1.186.335.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				60.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				47.350.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	47.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	8.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				42.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	42.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				184.080.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Dokumen	12	184.080.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				250.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	3	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					770.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	29	770.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				630.000.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	630.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar						
						Jumlah unit alat besar yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				140.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	28	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.697.644.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	3.697.644.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				68.874.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	68.874.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				683.980.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	683.980.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.500.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	2.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				444.790.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	444.790.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.592.792.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	410	3.592.792.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.353.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	50	1.353.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.491.882.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.491.882.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				747.910.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	285	747.910.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah								**1.100.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Angka	3.15	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.100.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	1.100.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.100.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				600.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3	600.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah									**110.513.791.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang**	
						Indeks Pelayanan Sumberdaya Air dan Penataan Ruang	Angka	61.67		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya Keterwujudan Penataan Ruang								**5.670.000.000**		
						Persentase keterwujudan penataan ruang	%	61.57	5.670.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						5.670.000.000		
						Persentase implementasi pemanfaatan ruang	%	68	1.000.000.000	Bidang Penataan Ruang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					1.000.000.000		
						Jumlah dokumen implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang	Dokumen	6	1.000.000.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.03.0004			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				700.000.000		
						Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	4	700.000.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.03.0006			Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				300.000.000		
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	2	300.000.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan rencana tata ruang	%	60.71	1.970.000.000	Bidang Penataan Ruang	
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi					1.190.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	3	1.190.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.01.000			Penetapan RTRW Provinsi				990.000.000		
						Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan	Dokumen	1	720.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
						Jumlah Perda RTRW Provinsi	Dokumen	1	270.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.01.0009			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang				200.000.000		
						Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	300	200.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang					780.000.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Dokumen	11	780.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.02.0008			Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota				630.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	10	630.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.02.0013			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	1	150.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	72.097.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					72.097.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Dokumen	1	72.097.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				72.097.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Dokumen	1	72.097.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	96.321.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					96.321.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Dokumen	1	96.321.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				96.321.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Dokumen	1	96.321.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	97.638.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					97.638.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Dokumen	1	97.638.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				97.638.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	97.638.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	72.961.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					72.961.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Dokumen	1	72.961.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				72.961.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai Progo Bogowonto Luk Ulo	Dokumen	1	72.961.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	76.171.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					76.171.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Dokumen	1	76.171.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				76.171.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Dokumen	1	76.171.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	67.200.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					67.200.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Dokumen	1	67.200.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				67.200.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	67.200.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tertib ruang	%	56	2.217.612.000	Bidang Penataan Ruang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					1.766.693.000		
						Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	Dokumen	5	1.766.693.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1.766.693.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	5	1.766.693.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Penataan Ruang					450.919.000		
						Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang	Dokumen	2	450.919.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.4.06.0001			Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat				275.428.000		
						Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen	1	275.428.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.4.06.0003			Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan				175.491.000		
						Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen	1	175.491.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air								**104.843.791.000**		
						Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air	%	61.78	104.843.791.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						104.843.791.000		
						Indeks kinerja sistem irigasi	Angka	69.11	5.549.732.000	Bidang Irigasi dan Air Baku	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					5.549.732.000		
						Jumlah DI yang direhab	Unit	5	4.749.732.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.02.0014			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				4.749.732.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	1	4.749.732.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi	Dokumen	3	800.000.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0037			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi				800.000.000		
						Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Unit	3	530.675.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kelembagaan Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Unit	1	269.325.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Angka	67.34	8.492.841.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					8.492.841.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Bengawan Solo	%	72.99	8.492.841.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				8.492.841.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara diwilayah BPSDA Bengawan Solo	Km	6.58	8.492.841.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Angka	71.8	6.812.193.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					6.812.193.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	70.24	6.812.193.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				6.812.193.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Km	15.55	6.812.193.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Angka	62.68	7.779.399.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					7.779.399.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	60.33	7.779.399.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				7.779.399.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Km	202.39	7.779.399.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Angka	77.36	4.382.586.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					4.382.586.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	63	4.382.586.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				4.382.586.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Km	134.51	4.382.586.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Angka	62.85	4.627.878.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					4.627.878.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serang Lusi Juana	%	59.13	4.627.878.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				4.627.878.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Km	156.787	4.627.878.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Angka	72.65	5.455.543.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					5.455.543.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serayu Citanduy	%	72.65	5.455.543.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				5.455.543.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy.	Km	191.8	5.455.543.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	64.31	2.810.081.000	Bidang Irigasi dan Air Baku	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.810.081.000		
						Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kondisi fisik tampungan air yang terbangun	Dokumen	2	134.241.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0090			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				134.241.000		
						Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Unit	1	134.241.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						jumlah laporan peningkataan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama dan pengelolaan aset	Dokumen	4	1.700.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET	
		1.03.02.1.01.0075			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				1.700.000.000		
						Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	2	700.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset	Laporan	2	1.000.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Total Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun	Unit	92	975.840.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.01.0078			Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya				975.840.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	1	975.840.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0120			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya						
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	0		SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	3.000.000.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.000.000.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	3.000.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				3.000.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Bengawan Solo	Dokumen	5	3.000.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	2.444.996.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.444.996.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	2.444.996.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				2.444.996.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Dokumen	5	2.444.996.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	3.847.324.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.847.324.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	3.847.324.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				3.847.324.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Dokumen	5	3.847.324.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	1.847.037.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.847.037.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	1.847.037.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1.847.037.000		
						Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Dokumen	5	1.847.037.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	2.761.321.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.761.321.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	2.761.321.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				2.761.321.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Serang Lusi Juana	Dokumen	5	2.761.321.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	2.928.844.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.928.844.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	2.928.844.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				2.928.844.000		
						Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA Serayu Citanduy	Dokumen	5	2.928.844.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	77.78	1.474.912.000	Balai PSDA Bengawan Solo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.474.912.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	33.33	1.474.912.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				1.474.912.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Unit	10	1.474.912.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	54.6	726.958.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					726.958.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	9.09	726.958.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				726.958.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Unit	8	726.958.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	34.78	1.612.694.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.612.694.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	1.612.694.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				1.612.694.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Unit	8	1.612.694.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	92.21	332.993.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					332.993.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	332.993.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				332.993.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Unit	2	332.993.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	50	1.454.872.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.454.872.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	15	1.454.872.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				1.454.872.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Unit	5	1.454.872.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	76.5	605.321.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					605.321.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	10	605.321.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				605.321.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Unit	2	605.321.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi	%	52.37	16.170.547.000	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					16.170.547.000		
						akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun	Km	2	7.960.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.01.0079			Normalisasi/Restorasi Sungai				800.000.000		
						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Km	1.5	800.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0096			Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						
						Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Km	0		SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0102			Pembangunan Check Dam						
						Jumlah Check Dam yang Dibangun	Unit	0		SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0118			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				7.160.000.000		
						Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Km	0.5	7.160.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	Kegiatan	1	742.510.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0090			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				742.510.000		
						Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Unit	4	742.510.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir	Km	2	7.468.037.000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				7.468.037.000		
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	2	7.468.037.000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	%	50.04	3.866.137.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.866.137.000		
						Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	3.866.137.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				3.866.137.000		
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Km	3.53	3.866.137.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	53.26	6.996.727.000	Balai PSDA Pemali Comal	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					6.996.727.000		
						Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	6.996.727.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				6.996.727.000		
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	6.45	6.996.727.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air	%	61.31	8.862.855.000	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					8.143.355.000		
						Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA	Dokumen	6	1.624.274.000	SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1.174.274.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	1.174.274.000	SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0104			Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)				450.000.000		
						Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	Unit	3	450.000.000	SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi	Dokumen	14	1.979.574.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0087			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				638.574.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	11	638.574.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0117			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi				1.341.000.000		
						Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	3	1.341.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA	Dokumen	5	4.539.507.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	
		1.03.02.1.01.0121			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				2.933.000.000		
						Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	2	2.933.000.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0122			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				1.606.507.000		
						Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Dokumen	2	1.606.507.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					719.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi	Dokumen	1	719.500.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	
		1.03.02.1.02.0032			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa				719.500.000		
						Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	1	719.500.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									**205.370.408.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat									**19.965.000.000**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	
						Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	%	44.79		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase rumah layak huni dan terjangkau yang terpenuhi	%	69.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat								**15.132.000.000**		
						Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	%	14.29	6.830.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						6.830.000.000		
						Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	2.73	6.830.000.000	Bidang Perumahan	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Dokumen	2	100.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.01.0011			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	2	100.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Dokumen	1	100.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.02.0001			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				100.000.000		
						Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang	250	100.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					5.180.000.000		
						Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Unit	160	5.180.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1.04.02.1.03.0001			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				3.080.000.000		
						Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit	125	3.080.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.02.1.03.0004			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				2.100.000.000		
						Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit	35	2.100.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					1.450.000.000		
						Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit	11225	1.450.000.000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	
		1.04.02.1.04.0006			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				1.450.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Laporan	1	1.450.000.000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	%	0.04	8.302.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						8.087.000.000		
						Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	0.12	8.087.000.000	Bidang Perumahan	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					325.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan Penyedian Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	2	325.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.01.0010			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				325.000.000		
						Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen	2	325.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					80.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	80.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.02.0009			Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				80.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang	100	80.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					7.682.000.000		
						Jumlah Unit Pembangunan Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi	Unit	150	7.682.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1.04.02.1.03.0004			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				7.682.000.000		
						Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	Unit	50	2.648.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	Unit	100	5.034.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						215.000.000		
						Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	215.000.000	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah					215.000.000		
						Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	Dokumen	1	215.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
		1.04.06.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah				215.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan	1	215.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman								**4.833.000.000**		
						Persentase penurunan kawasan kumuh	%	55.21	4.833.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						3.108.000.000		
						Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	885.000.000	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					885.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	Dokumen	1	180.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.01.0017			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				180.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	1	180.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	Dokumen	2	395.000.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	
		1.04.03.1.01.0008			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				215.000.000		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen	1	215.000.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.03.1.01.0017			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				180.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	1	180.000.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	Dokumen	2	310.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		1.04.03.1.01.0017			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				310.000.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi	Laporan	2	310.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	%	3.18	2.223.000.000	Bidang Kawasan Permukiman	
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					85.000.000		
						Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun	Laporan	3	85.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.01.0018			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh				85.000.000		
						Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	3	85.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					2.138.000.000		
						Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun	Laporan	3	270.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/						

		1.04.03.1.02.0002			Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				270.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	3	270.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	
						Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas	Ha	35	1.868.000.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.02.0003			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				100.000.000		
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit	563	100.000.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.03.1.02.0014			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1.768.000.000		
						Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	Ha	35	1.768.000.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						1.725.000.000		
						Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman	%	40	1.725.000.000	Bidang Kawasan Permukiman	
				Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman					1.725.000.000		
						Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Laporan	2	1.725.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.05.1.01.0002			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman				1.620.000.000		
						Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	2	1.620.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.05.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				105.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	2	105.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**21.926.113.000**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	76		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**20.892.113.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	20.892.113.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						20.892.113.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	20.892.113.000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.970.338.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	14.970.338.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.274.338.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	79	14.274.338.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				605.300.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	605.300.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25.700.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	25.700.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				10.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	12	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					180.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				155.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					140.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				30.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	2	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				30.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	50	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				10.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	10	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.990.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.990.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				300.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				20.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.070.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	1.070.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				300.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.152.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	80	1.152.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				165.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	20	165.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				987.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	60	987.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.709.775.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	1.709.775.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				185.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	185.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				574.775.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	574.775.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				950.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	950.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					750.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	252	750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				260.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	30	260.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	130	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				350.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	70	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**1.034.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.45	1.034.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.034.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	1.034.000.000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.034.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.034.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				600.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	600.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				434.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	11	434.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan									**1.590.000.000**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	
						Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	%	100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase reforma agraria yang difasilitasi	%	100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum								**400.000.000**		
						Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	100	400.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM						400.000.000		
						Persentase fasilitasi penetapan lokasi	%	100	400.000.000	Bidang Pertanahan	
				Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi					400.000.000		
						Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Dokumen	1	400.000.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	
		2.10.03.1.01.0001			Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				400.000.000		
						Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen	5	400.000.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	
	Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah								**1.190.000.000**		
						Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria	%	100	1.190.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						600.000.000		
						Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100	600.000.000	Bidang Pertanahan	
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					600.000.000		
						Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	Dokumen	3	600.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	
		2.10.04.1.01.0001			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	Dokumen	1	100.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	150.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.10.04.1.01.0002			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				350.000.000		
						Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	10	350.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						590.000.000		
						Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	%	100	590.000.000	Bidang Pertanahan	
				Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					590.000.000		
						Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	Lokasi	10	590.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	
		2.10.06.1.01.0002			Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota				163.460.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	22	163.460.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.10.06.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah				426.540.000		
						Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	Dokumen	2	5.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	Dokumen	7	421.540.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									**43.481.113.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum (PE)									**2.666.576.000**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
						Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	82		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah								**2.666.576.000**		
						Skor kinerja penegakan produk hukum daerah	Angka	6.1	2.666.576.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.666.576.000		
						Persentase penegakan produk hukum daerah	%	80	2.666.576.000	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					250.000		
						Persentase Penerapan SPM Trantibumlinmas	%	100	250.000	SEKSI PENINDAKAN	
		1.05.02.1.01.0015			Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				250.000		
						Persentase warga negara yang menperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	100	250.000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur					2.566.326.000		
						Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina dan diawasi	Orang	300	180.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
		1.05.02.1.02.0002			Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				65.000.000		
						Jumlah pelanggar yang diawasi	Orang	200	65.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.02.0003			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				115.000.000		
						Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina	Orang	100	65.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
						Pemetaan pelanggaran Perda dan Pergub	Dokumen	4	50.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
						Persentase pelanggar Perda dan Pergub yang ditangani	%	100	2.386.326.000	SEKSI PENINDAKAN	
		1.05.02.1.02.0001			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				435.650.000		
						jumlah peserta sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	Orang	372	435.650.000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.02.0003			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1.950.676.000		
						Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang ditindak	Orang	100	1.950.676.000	SEKSI PENINDAKAN	
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi					100.000.000		
						Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan PPNS	Dokumen	2	100.000.000	SEKSI PENINDAKAN	
		1.05.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				100.000.000		
						Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	100	100.000.000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum (RB)									**1.925.000.000**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
						Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	82		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat								**1.925.000.000**		
						Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas)	Angka	12.4	1.925.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.775.000.000		
						Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum	%	29.57	725.000.000	Bidang Pembinaan Masyarakat	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					725.000.000		
						Jumlah kelompok masyarakat yang dilakukan penyuluhan	Kelompok	170	163.290.000	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	
		1.05.02.1.01.0017			Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				163.290.000		
						Jumlah Mitra trantib yang dibina	Kelompok	35	21.438.000	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sekolah, kelompok masyarakat dan BUMD yang dibina	Kelompok	135	141.852.000	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah wilayah yang dilakukan pemetaan potensi rawan trantibum	Kabupaten/ Kota	35	561.710.000	SEKSI KEWASPADAAN	
		1.05.02.1.01.0014			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				425.000.000		
						Jumlah peserta konsolidasi kewaspadaan gangguan trantibum	Orang	140	425.000.000	SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.0017			Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				136.710.000		
						Jumlah dokumen pendataan daerah rawan tramtib	Dokumen	1	66.145.000	SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah kasus gangguan trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini	Kasus	10	70.565.000	SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah	%	67.15	600.000.000	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					600.000.000		
						Jumlah penanganan gangguan tramtibum	Kegiatan	74	420.000.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	
		1.05.02.1.01.0017			Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				238.060.000		

						Jumlah kegiatan pengamanan strategis dan tk Provinsi	Kegiatan	25	89.300.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah kegiatan pengawalan pejabat VVIP	Kegiatan	15	54.910.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah patroli pengendalian tramtibum	Kegiatan	24	93.850.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.0019			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				181.940.000		
						Jumlah operasi penertiban trantibum (pekat, lintas kabkota, cipta kondisi, perbatasan prov.)	Kegiatan	10	148.890.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unjuk rasa yang tertangani	%	100	33.050.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah upaya pencegahan gangguan tramtibum di Jawa Tengah	Kegiatan	18	180.000.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	
		1.05.02.1.01.0017			Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				132.900.000		
						Jumlah kawasan tertib yang dibina	Lokasi	8	79.365.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pembinaan trantibum	Orang	120	53.535.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.0019			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				47.100.000		
						Jumlah penertiban PNS	Kegiatan	10	47.100.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina	%	40.03	450.000.000	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					450.000.000		
						Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang diberdayakan	Kelompok	245	125.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	
		1.05.02.1.01.0016			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				125.000.000		
						Jml mobilisasi Satlinmas untuk membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban, penanggulangan dan pencegahan bencana	Kegiatan	0		SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pemutakhiran data Satgas Linmas dan Satlinmas	Dokumen	2	125.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang dilakukan penguatan kelembagaannya	Kelompok	245	325.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS	
		1.05.02.1.01.0018			Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				325.000.000		
						Jml personil Satgas Linmas dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	400	325.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	%	100	150.000.000	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	
				Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran					150.000.000		
						Jumlah Kab/kota yang telah dilakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	Kabupaten/Kota	35	150.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	
		1.05.04.1.01.0022			Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	2	150.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**19.290.855.000**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	72		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**19.063.760.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	19.063.760.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						19.063.760.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	19.063.760.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.800.594.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	13	12.800.594.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.459.594.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	80	12.459.594.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				303.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	303.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				38.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	38.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					125.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				125.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					729.200.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	729.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				140.000.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	2	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				44.200.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	8	44.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				545.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	1740	545.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					995.806.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	995.806.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				45.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				160.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				64.556.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	64.556.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				76.250.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	76.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				125.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					57.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	21	57.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	20	57.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.662.439.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	2.662.439.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	3.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				380.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	380.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.279.039.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	2.279.039.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.693.721.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	75	1.693.721.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				450.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				188.721.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	52	188.721.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.040.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.040.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**227.095.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	227.095.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						227.095.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	227.095.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					227.095.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	227.095.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				117.500.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8	117.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				109.595.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	109.595.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
JUMLAH									**23.882.431.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana									**4.925.000.000**	**Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
						Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.74		Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Darurat dan Analisis Kebencanaan								**1.500.000.000**		
						Angka kematian akibat bencana per 1.000.000 jiwa	Angka	0.57	1.500.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						1.500.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik	%	2.86	1.100.000.000	Bidang Logistik dan Peralatan	
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					100.000.000		
						Persentase sarpras PB yang terpenuhi	%	100	100.000.000	SEKSI PERALATAN	
		1.05.03.1.02.0014			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	1	100.000.000	SEKSI PERALATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					1.000.000.000		
						Persentase logistik penyelamatan dan evakuasi yang terpenuhi	%	100	1.000.000.000	SEKSI LOGISTIK	
		1.05.03.1.03.0004			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.000.000.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	5000	1.000.000.000	SEKSI LOGISTIK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penanganan darurat bencana	%	100	400.000.000	Bidang Penanganan Darurat	
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					125.000.000		
						Persentase kejadian bencana yang terpenuhi kajiannya	%	100	125.000.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA DARURAT	
		1.05.03.1.02.0015			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana				125.000.000		
						Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yangDikembangkan Kapasitas Teknis danManajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	200	125.000.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA DARURAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					175.000.000		
						Persentase jumlah bencana yang dilakukan kaji cepat	%	100	50.000.000		
		1.05.03.1.03.0002			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				50.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	35	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kejadian bencana yang tertangani	%	100	125.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	
		1.05.03.1.03.0003			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				50.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	35	50.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.03.0005			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	75.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					100.000.000		
						Persentase sinkronisasi data bencana pusat dan daerah	%	100	100.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	
		1.05.03.1.04.0017			Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				100.000.000		
						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	35	100.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kapasitas Upaya Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan								**3.200.000.000**		
						Persentase wilayah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	%	4.47	3.200.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						3.200.000.000		
						Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0.12	3.200.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi					1.200.000.000		
						Persentase masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana	%	0.01	1.200.000.000	SEKSI PENCEGAHAN	
		1.05.03.1.01.0002			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)				1.100.000.000		
						Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana(Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	3000	1.100.000.000	SEKSI PENCEGAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.01.0003			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	100.000.000	SEKSI PENCEGAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					2.000.000.000		
						Persentase upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0.33	650.000.000	SEKSI PENCEGAHAN	
		1.05.03.1.02.0013			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana				500.000.000		
						Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Desa	25	500.000.000	SEKSI PENCEGAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.02.0016			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				150.000.000		
						Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	200	150.000.000	SEKSI PENCEGAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan	7	1.350.000.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	
		1.05.03.1.02.0012			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	1	100.000.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.02.0017			Penyusunan Rencana Kontijensi				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	100.000.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.02.0018			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						
						Jumlah Dokumen Rencana PenanggulanganKedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	0		SEKSI KESIAPSIAGAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.05.03.1.02.0019			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				100.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan GladiKesiapsiagaan	Laporan	1	100.000.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.02.0021			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana				1.050.000.000		
						Jumlah Peralatan Pelindung Diri TerhadapBencana	Unit	119	1.050.000.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Upaya Pemulihan Bencana								**225.000.000**		
						Persentase upaya pemulihan pasca bencana yang difasilitasi	%	100	225.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						225.000.000		
						Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	%	2	225.000.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					225.000.000		
						Persentase Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB yang terlaksana	%	100	50.000.000	SEKSI REHABILITASI	
		1.05.03.1.04.0019			Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga danKemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						persentase pelaksanaan pemulihan pasca bencana	%	100	175.000.000	SEKSI REKONSTRUKSI	
		1.05.03.1.04.0007			Penanganan Pasca Bencana Provinsi				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	100.000.000	SEKSI REKONSTRUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.04.0020			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				75.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	1	75.000.000	SEKSI REKONSTRUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**12.931.963.000**		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	77			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**12.706.963.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	12.706.963.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						12.706.963.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	12.706.963.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.526.631.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	7.526.631.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.226.631.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	40	7.226.631.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	300.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	40	2.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	40	3.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.127.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.127.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	10.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	25.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	10	25.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	2.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	50.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.000.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	1.000.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	15.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	200.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	200.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.963.332.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	2.963.332.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	500.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				480.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	480.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.482.832.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	2.482.832.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					785.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	139	785.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				500.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	56	500.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	50.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	200.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	75	35.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**225.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.12	225.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						225.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	225.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					225.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	225.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	100.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				125.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	125.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									**17.856.963.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)									**226.181.128.000**	**Dinas Sosial**	
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	0.55		Dinas Sosial	
	Meningkatnya kemandirian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berkelanjutan								**3.550.000.000**		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial	%	0.02	3.550.000.000	Dinas Sosial	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						3.550.000.000		
						Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	%	0.02	3.550.000.000	Bidang Penanganan Fakir Miskin	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					3.550.000.000		
						Jumlah PPKS Keluarga yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian	Orang	200	1.250.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN	
		1.06.05.1.02.0002			Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.250.000.000		
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Orang	200	1.250.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 1)	Orang	400	1.150.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN	
		1.06.05.1.02.0003			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				1.150.000.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	400	1.150.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 2)	Orang	400	1.150.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN	
		1.06.05.1.02.0003			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				1.150.000.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	400	1.150.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial								**9.838.940.000**		
						Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	7.7	9.838.940.000	Dinas Sosial	
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						9.479.940.000		
						Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	7.7	9.479.940.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					150.000.000		
						Jumlah penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan sumbangan lintas daerah kab./kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Dokumen	100	150.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau BarangJumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	100	150.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi					9.329.940.000		
						Jumlah PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas	Orang	1076	8.392.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.02.0001			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				150.000.000		
						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	100	150.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0002			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi				7.112.000.000		
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	576	7.112.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0004			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi				1.130.000.000		
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Orang	100	1.130.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	
						Jumlah PSKS yang mendapatkan penyuluhan sosial	Orang	1000	937.940.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.02.0003			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi				937.940.000		
						Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Orang	1000	937.940.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						359.000.000		
						Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola	%	100	359.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	
				Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi					359.000.000		
						Jumlah stakeholder yang berperan dalam pananaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Orang	300	300.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	
		1.06.07.1.01.0002			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				300.000.000		
						Jumlah stakeholder yang berperan serta dalam penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Orang	200	300.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah TMPN Provinsi yang dikelola	Unit	100	59.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	
		1.06.07.1.01.0001			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.07.1.01.0002			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				9.000.000		
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Unit	1	9.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Terpenuhinya Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang layak dan tepat sasaran								**153.556.160.000**		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	%	80	153.556.160.000	Dinas Sosial	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						153.556.160.000		
						Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	%	80	153.556.160.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					153.556.160.000		
						Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	Orang	12764	153.556.160.000	SEKSI JAMINAN SOSIAL	
		1.06.05.1.02.0001			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				153.556.160.000		
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	12764	153.556.160.000	SEKSI JAMINAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terpenuhinya Perlindungan Sosial bagi korban bencana yang memenuhi SPM Bidang Sosial								**2.325.500.000**		
						Persentase jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	%	0.06	2.325.500.000	Dinas Sosial	
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						100.000.000		
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	100.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal					100.000.000		
						Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	Orang	100	100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.03.1.01.0001			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				100.000.000		
						Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100	100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						2.225.500.000		
						Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	2.225.500.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi					2.225.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	Orang	1500	1.509.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
		1.06.06.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				649.000.000		
						Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	1500	649.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0002			Penyediaan Sandang				225.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	1500	225.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0003			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				100.000.000		
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	1500	100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0004			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				385.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	1000	385.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0005			Pelayanan Dukungan Psikososial				150.000.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	1000	150.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	Orang	1450	716.500.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.06.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				141.500.000		
						Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	250	141.500.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0002			Penyediaan Sandang				75.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	250	75.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0003			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				50.000.000		
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	250	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0004			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				375.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	1450	375.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0005			Pelayanan Dukungan Psikososial				75.000.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	250	75.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial								**56.910.528.000**		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	%	0.2	56.910.528.000	Dinas Sosial	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						56.760.528.000		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	%	1.92	4.696.250.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.157.500.000		
						Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	2100	2.157.500.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.000			Penyediaan Permakanan				1.907.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	2100	1.907.500.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				100.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	100.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	150.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.677.500.000		
						Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	1700	1.677.500.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				1.502.500.000		
						Jumlah Orang yang Pendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	1700	1.502.500.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				175.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	175.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					380.000.000		
						Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	400	380.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				380.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	400	380.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					481.250.000		
						Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	250	481.250.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				306.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	250	306.250.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				175.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Dokumen	4	175.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	0.06	1.644.055.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.102.100.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	100	99.425.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				34.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	34.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				25.425.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	25.425.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				30.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	20	30.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	100	1.002.675.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				795.875.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	795.875.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				182.800.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	182.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				24.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	24.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					541.955.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	50	79.050.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				53.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	53.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6.050.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	6.050.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				15.000.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	50	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	4	5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	50	462.905.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				393.375.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	393.375.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				62.330.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	62.330.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				7.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	7.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	0.06	1.653.075.000	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.208.951.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	110	106.008.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				35.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	35.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				27.008.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	27.008.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				11.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	11.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				33.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	20	33.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	110	1.102.943.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				875.463.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	875.463.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				201.080.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	201.080.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				26.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	26.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					444.124.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	40	73.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				52.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	40	52.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				5.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	40	5.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				12.000.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	40	12.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				4.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	4	4.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	40	370.324.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				314.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	40	314.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				49.864.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	40	49.864.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				5.760.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	40	5.760.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	0.11	2.689.741.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					562.965.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	50	79.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				53.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	53.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				11.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	11.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	9.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang	4	5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	50	483.665.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				393.375.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	393.375.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				83.090.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	83.090.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				7.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	7.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					2.126.776.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	195	171.559.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu danAlat Bantu Peraga Sesuai KebutuhanKewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				43.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	195	43.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				50.059.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	195	50.059.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				19.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	195	19.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				58.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	39	58.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	195	1.955.217.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.551.957.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	195	1.551.957.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				356.460.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	185	356.460.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				46.800.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak HuniKewenangan Provinsi	Orang	195	46.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	0.06	1.539.100.000	Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.539.100.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	Orang	140	135.355.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				38.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	140	38.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				41.355.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	140	41.355.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				14.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	140	14.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				42.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	7	42.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring	Orang	140	1.403.745.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.114.225.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	140	1.114.225.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				255.920.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	140	255.920.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				33.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	140	33.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	0.12	3.040.564.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.396.509.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	130	126.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang			SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				61.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	130	61.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				27.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	130	27.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				24.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	24.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				13.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	4	13.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	130	1.270.009.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.022.775.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	130	1.022.775.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				216.034.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	130	216.034.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				31.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	130	31.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.102.100.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	100	99.425.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				34.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	34.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				25.425.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	25.425.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				30.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	20	30.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	100	1.002.675.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				795.875.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	795.875.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				182.800.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	182.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				24.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	24.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					541.955.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	50	79.050.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				53.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	53.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6.050.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	6.050.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				15.000.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	50	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	4	5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	50	462.905.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				393.375.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	393.375.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				62.330.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	62.330.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				7.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	7.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	0.08	2.133.920.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					460.932.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	50	74.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				52.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	52.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				10.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	10.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	7.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				4.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	4	4.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	50	386.932.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				314.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	314.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				66.472.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	66.472.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				5.760.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	5.760.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					998.288.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	75	253.575.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	75	24.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				214.575.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	75	214.575.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	75	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				7.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	4	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	75	744.713.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				590.063.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	75	590.063.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				141.150.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	75	141.150.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				13.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	75	13.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					674.700.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	60	73.095.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				30.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	60	30.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				19.095.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	60	19.095.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	120	6.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				18.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	60	18.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	60	601.605.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				477.525.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	60	477.525.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				109.680.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	60	109.680.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				14.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	60	14.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	0.03	1.071.400.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.071.400.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	80	268.880.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80	24.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				228.880.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80	228.880.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				8.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	8.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				8.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	4	8.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	80	802.520.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				629.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80	629.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				158.720.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80	158.720.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				14.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80	14.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	%	0.05	1.576.740.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.576.740.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	120	391.320.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	120	24.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				343.320.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	120	343.320.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				12.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	120	12.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				12.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	12.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	120	1.185.420.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				944.100.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	120	944.100.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				219.720.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	219.720.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				21.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	120	21.600.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	0.07	1.929.325.000		
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					613.525.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	50	122.150.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	24.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				88.150.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	88.150.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	4	5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	50	491.375.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				393.375.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	393.375.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				89.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	89.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				9.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	9.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.315.800.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	120	112.590.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				36.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	120	36.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				28.590.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	120	28.590.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				12.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	120	12.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				36.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	24	36.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	120	1.203.210.000		
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				955.050.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	120	955.050.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				219.360.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	219.360.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				28.800.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	120	28.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	0.07	1.703.306.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					567.765.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	50	79.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				53.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	53.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				11.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	11.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	9.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	4	5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	50	488.465.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				393.375.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	393.375.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				83.090.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	83.090.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				12.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	12.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					1.135.541.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	110	117.150.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				59.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	110	59.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				14.150.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	110	14.150.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				33.000.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	110	33.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				11.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	4	11.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	110	1.018.391.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				865.425.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	110	865.425.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				137.126.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins	Orang	110	137.126.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				15.840.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/WismaLayak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	110	15.840.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	0.11	2.618.668.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					928.241.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo	Orang	85	97.850.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang			SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				56.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	85	56.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				16.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	85	16.700.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				16.150.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	85	16.150.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				8.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen	4	8.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	85	830.391.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				668.738.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	85	668.738.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				141.253.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	85	141.253.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				20.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	85	20.400.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.690.427.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	170	116.550.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				65.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	170	65.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				9.050.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	170	9.050.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				25.500.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	170	25.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				17.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	4	17.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo WIdodo	Orang	170	1.573.877.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				1.337.475.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PemenuhanKebutuhan Permakanan Sesuai dengan StandarGizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	170	1.337.475.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				211.922.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	170	211.922.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				24.480.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	170	24.480.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	0.1	2.529.433.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.529.433.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Orang	240	184.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang			SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				72.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	240	72.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				43.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	240	43.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				45.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	240	45.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				24.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	4	24.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Orang	240	2.344.633.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.888.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	240	1.888.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				398.833.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	240	398.833.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				57.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	240	57.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	0.03	1.055.080.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.055.080.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	80	268.880.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80	24.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				228.880.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80	228.880.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				8.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	8.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				8.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	8.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	80	786.200.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				629.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80	629.400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				142.400.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80	142.400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				14.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80	14.400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	0.09	2.117.461.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.117.461.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Orang	200	163.601.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang			SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				68.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	68.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				37.601.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	37.601.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				38.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	38.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen	4	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Orang	200	1.953.860.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.573.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	1.573.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				332.360.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	332.360.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				48.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	48.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	0.05	1.388.213.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.388.213.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Orang	125	171.850.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				108.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	125	108.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				27.100.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	125	27.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				23.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	23.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				12.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	4	12.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo	Orang	125	1.216.363.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				983.438.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	125	983.438.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				207.725.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	125	207.725.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				25.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	125	25.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	0.06	1.758.523.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					818.048.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	75	92.550.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				55.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	75	55.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				15.300.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	70	15.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				14.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	14.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				7.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen	4	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	75	725.498.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				590.063.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	75	590.063.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				124.635.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins	Orang	75	124.635.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				10.800.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	70	10.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					940.475.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	70	238.270.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	70	24.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				200.270.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	70	200.270.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	70	7.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				7.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	7.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	70	702.205.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				550.725.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	70	550.725.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				138.880.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	70	138.880.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				12.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	70	12.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	0.07	1.870.067.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					928.241.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	85	928.241.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				668.738.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	85	668.738.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				141.253.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	85	141.253.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				20.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	85	20.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang			SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				56.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	85	56.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				16.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	85	16.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				16.150.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	16.150.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				8.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	4	8.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					941.826.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	85	89.552.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				32.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	85	32.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				23.052.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	85	23.052.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				8.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	85	8.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				25.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	17	25.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	85	852.274.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				676.494.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	85	676.494.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				155.380.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	85	155.380.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				20.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	85	20.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	0.12	3.390.403.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.499.502.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	140	131.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				62.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	140	62.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				29.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	140	29.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				26.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	26.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				14.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen	4	14.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	140	1.367.702.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.101.450.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	140	1.101.450.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				232.652.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	140	232.652.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				33.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	140	33.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.323.050.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	330.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	24.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				286.100.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	286.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	992.950.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				786.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	786.750.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				188.200.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	188.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				18.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	18.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					567.851.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	50	66.513.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				29.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	29.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				17.513.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	17.513.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	10	5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				15.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	10	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	50	501.338.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				397.938.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	397.938.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				91.400.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	91.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				12.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	12.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	0.11	2.893.978.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.220.453.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	210	168.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				69.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	210	69.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				39.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	210	39.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				39.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	39.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				21.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	4	21.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	210	2.051.553.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.652.175.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	210	1.652.175.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				348.978.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	210	348.978.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				50.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Unit	210	50.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					673.525.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	50	177.050.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	24.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				143.050.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	143.050.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	4	5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	50	496.475.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				393.375.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	393.375.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				94.100.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	94.100.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				9.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	9.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	0.04	995.251.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					995.251.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Orang	90	92.843.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				33.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	90	33.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				23.843.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	90	23.843.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	90	9.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				27.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	18	27.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Orang	90	902.408.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				716.288.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	90	716.288.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				164.520.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	90	164.520.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				21.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	90	21.600.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	0.04	1.202.325.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.202.325.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	90	299.490.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	90	24.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				257.490.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	90	257.490.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	90	9.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				9.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	4	9.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	90	902.835.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				708.075.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	90	708.075.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				178.560.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	90	178.560.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				16.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak HuniKewenangan Provinsi	Orang	90	16.200.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	0.11	2.739.619.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.859.979.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	175	150.351.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang			SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				65.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	175	65.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				34.101.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	175	34.101.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				33.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	33.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				17.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar	Dokumen	4	17.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha	Orang	175	1.709.628.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.376.813.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	175	1.376.813.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				290.815.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	175	290.815.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				42.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	175	42.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					879.640.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	80	85.280.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				60.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80	60.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				9.280.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80	9.280.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				8.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	8.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				8.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	4	8.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	80	794.360.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				629.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80	629.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				150.560.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80	150.560.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				14.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80	14.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	0.03	990.638.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					990.638.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Orang	75	253.575.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	75	24.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				214.575.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	75	214.575.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	75	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				7.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Orang	75	737.063.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				590.063.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	75	590.063.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				133.500.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	75	133.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				13.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	75	13.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	0.06	1.592.526.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.592.526.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Orang	145	138.647.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				38.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provins	Orang	145	38.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				42.147.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	145	42.147.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				14.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	145	14.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				43.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	28	43.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Orang	145	1.453.879.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.154.019.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	145	1.154.019.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				265.060.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	145	265.060.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				34.800.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	145	34.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	0.09	2.079.091.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					562.966.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	50	79.301.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				53.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	53.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				11.801.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	11.801.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	9.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	4	5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	50	483.665.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				393.375.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	393.375.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				83.090.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	83.090.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				7.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	7.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.516.125.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	150	109.050.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				63.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	150	63.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				8.550.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	150	8.550.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				22.500.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	150	22.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA			15.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	4	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	150	1.407.075.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				1.180.125.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	150	1.180.125.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				205.350.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	150	205.350.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				21.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	150	21.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	%	0.08	2.155.641.000	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.160.390.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Orang	100	94.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				63.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	63.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				11.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	11.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	4	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Orang	100	1.065.790.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				841.650.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	841.650.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				206.140.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	206.140.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				18.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	18.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					995.251.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya	Orang	90	92.843.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				33.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	90	33.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				23.843.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	90	23.843.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	90	9.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				27.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	18	27.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Orang	90	902.408.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				716.288.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	90	716.288.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				164.520.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	90	164.520.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				21.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	90	21.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	0.06	1.706.135.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.706.135.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	130	421.930.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	130	24.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				371.930.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses keLayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	130	371.930.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				13.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	130	13.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				13.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	13.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	130	1.284.205.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				1.022.775.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	130	1.022.775.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				238.030.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	130	238.030.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				23.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	130	23.400.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						150.000.000		
						Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	%	100	150.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
				Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal					150.000.000		
						Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan	Dokumen	200	150.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.05.1.01.0001			Pengangkatan Anak antar WNI				150.000.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	200	150.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**137.357.093.000**	**Dinas Sosial**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	94.1		Dinas Sosial	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**136.357.093.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87.5	136.357.093.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						136.357.093.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	227.300.000	Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					85.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	100	85.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					81.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	81.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				79.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	79.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	Unit	4	60.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	13.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	138.900.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	50.200.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	17.200.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				3.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	3.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	20.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	60.400.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				59.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	59.400.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					28.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	28.300.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	4.800.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	20.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	272.600.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					82.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	82.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gerung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					123.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Laporan	4	123.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				121.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	121.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					66.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Unit	4	66.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	19.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	377.300.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					134.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	134.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				44.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	44.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.000.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					131.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Laporan	4	131.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				127.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	127.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					111.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Unit	8	111.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	17.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	341.100.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					119.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	119.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	40.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				10.500.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					139.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Laporan	4	139.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				136.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	136.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					81.900.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Unit	6	81.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	246.100.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					87.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	87.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					99.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Laporan	4	99.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				97.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	97.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					58.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Unit	4	58.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	261.000.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					92.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	100	92.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	109.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				107.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	107.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					58.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Unit	4	58.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	2	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	332.100.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					114.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	114.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	40.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				10.500.000		
						Jumlah paket/bahan material yang disediakan	Paket	2	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					130.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Laporan	4	130.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				127.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	127.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					86.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Unit	4	86.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	279.000.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					101.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	101.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	40.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					116.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Laporan	4	116.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				114.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	114.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Unit	4	60.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	13.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	165.000.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	100	55.200.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	17.200.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				3.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	3.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	25.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Unit	0		Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Laporan	4	70.300.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				69.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	69.300.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Unit	2	39.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	20.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	15.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	243.400.000	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					95.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	100	95.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		
						Jumlah paket/bahan material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	32.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					93.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Laporan	4	93.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				91.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	91.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Unit	4	54.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	7.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	220.200.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					87.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	87.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					74.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Laporan	4	74.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				72.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	72.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Unit	4	57.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	384.400.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					154.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	154.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				44.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	44.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.000.000		
						Jumlah paket bahan material yg disediakan	Paket	2	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	57.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					115.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Laporan	4	115.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				111.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	111.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					115.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Unit	4	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	219.800.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					82.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	82.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					76.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Laporan	4	76.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				74.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	74.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Unit	4	60.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	191.000.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	60.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	17.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				3.500.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	2	3.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	30.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					83.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	83.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				82.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	82.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					47.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		47.300.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	10.800.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	Unit	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	20.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	15.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	301.300.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					119.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	119.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	40.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				10.500.000		
						Jumlah paket bahan material yg disediakan	Paket	2	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					102.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Laporan	4	102.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	99.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					79.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Unit	4	79.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	214.200.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					90.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	90.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					62.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Laporan	4	62.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	60.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Unit	4	61.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	14.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	339.900.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					119.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	119.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	40.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				10.500.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					126.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Laporan	4	126.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				123.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	123.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					93.900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Unit	6	93.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	23.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	129.587.993.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					105.409.013.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	105.409.013.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				103.759.013.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	599	103.759.013.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.250.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	1.250.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				250.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	4	250.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				150.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	150.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					150.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	150.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				145.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	145.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					175.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				125.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	4	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	10	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.291.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.291.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				75.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				80.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				420.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	420.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				36.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	36.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				100.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				120.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.330.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	1.330.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					275.780.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	275.780.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				105.780.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	8	105.780.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				170.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					18.082.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	18.082.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				713.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	713.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				17.119.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	17.119.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.205.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	3.205.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				160.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				340.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	340.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.380.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	2.380.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	365.800.000	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					107.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	107.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	40.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				10.500.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					165.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Laporan	4	165.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	162.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					92.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Unit	6	92.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	22.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	269.500.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					100.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	100.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Mengukur penyediaan jasa surat menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos dan kelengkapan jasa lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					112.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Laporan	4	112.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Unit	4	57.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	10.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	221.100.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					92.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	92.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	38.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					74.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Laporan	4	74.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				72.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	72.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Unit	4	54.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	267.300.000	Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					80.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	100	80.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.500.000		
						umlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	17.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					127.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Laporan	4	127.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	125.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					59.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Unit	4	59.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	12.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	157.600.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	60.200.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	17.200.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				3.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	3.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	30.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	54.900.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				53.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	53.900.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	42.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				6.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	20.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	15.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	131.700.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	50.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	17.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				3.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	3.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	20.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Unit	0		Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Laporan	4	53.800.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				52.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	52.800.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					27.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Unit	2	27.700.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	4.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	20.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	166.000.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					70.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	100	70.200.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	17.200.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				3.500.000		
						Jumlah paket/bahan material yang disediakan	Paket	2	3.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	40.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Unit	0		Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Laporan	4	37.300.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	36.300.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					58.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Unit	2	58.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	12.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	20.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	25.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	160.500.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	100	60.200.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	17.200.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				3.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	3.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	30.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Unit	0		Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					56.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Laporan	4	56.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				55.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	55.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					44.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Unit	2	44.300.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	7.800.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	20.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	15.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	275.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					102.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	102.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					112.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Laporan	4	112.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Unit	4	60.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**1.000.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	79.8	1.000.000.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.000.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	1.000.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.000.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.000.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				500.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
JUMLAH									**363.538.221.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**89.193.895.000**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**87.838.589.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85.1	87.838.589.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						87.838.589.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	5.623.085.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					40.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	40.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	40.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen				
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					155.119.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	155.119.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	0	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				119.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	119.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.00			Penyediaan Bahan/Material						
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	0	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				146.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	146.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.242.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	1.242.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar						
						Jumlah unit alat besar yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				264.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	264.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				978.500.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	978.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					902.681.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	902.681.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	0	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				770.681.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	770.681.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.282.585.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	3.282.585.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				40.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.230.585.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	3.230.585.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	664.213.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	34.800.000		
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34.800.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	34.800.000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	9.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	9.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					78.931.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	78.931.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000		
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0			
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.101.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0	1.101.000		
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	14.000.000		
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen				
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				11.700.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	1	11.700.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.300.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	5.300.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.830.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	42.830.000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit				
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	0			
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0			
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0			
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0			
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					469.450.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	469.450.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	500.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				68.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	68.000.000		
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				400.950.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	400.950.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					72.032.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	72.032.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	1	35.000.000		
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0			
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0			
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0			
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0			
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.032.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	37.032.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	900.000.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				45.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen				
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					15.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material						
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu						
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					838.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	838.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				218.352.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	218.352.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				619.648.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	619.648.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	900.000.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen				
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					80.965.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	80.965.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.010.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				9.990.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	1	9.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48.965.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	48.965.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					729.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	27	729.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				319.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	319.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				408.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	408.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.135.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	10	46.135.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.760.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7	27.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				4.375.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	27	4.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	900.000.000	Balai Keselamatan Kerja Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					38.600.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	24	38.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				37.280.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan	12	37.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.320.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	12	1.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					17.799.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	17.799.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				17.799.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	17.799.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					86.211.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	86.211.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.568.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	6.568.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.750.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	3.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.903.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12.903.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.450.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	6.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu						
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.540.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	46.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					620.640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	620.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.178.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.178.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				229.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	229.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				385.962.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	385.962.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					136.750.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	10	136.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				88.750.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	88.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	77.651.291.000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					69.400.261.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	69.400.261.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				68.591.333.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	420	68.591.333.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				606.246.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	606.246.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				142.152.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	142.152.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				60.530.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	60.530.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	0		SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					49.680.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	1	49.680.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0002			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						
						Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				49.680.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	1	49.680.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					102.220.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	102.220.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				36.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	36.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	10	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				22.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	20	22.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				33.920.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	10	33.920.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.296.142.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.296.142.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				133.460.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	133.460.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				85.445.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	85.445.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				82.212.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	82.212.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				990.025.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	990.025.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerahJumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	3	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				600.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					315.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	6	315.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				215.400.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	3	215.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.205.088.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	4.205.088.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21.765.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	21.765.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.238.323.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1.238.323.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				130.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.815.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	2.815.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.232.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.232.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				205.000.000		
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	5	205.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				42.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10	42.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				122.600.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	122.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	2		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				130.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	3	130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				583.200.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	583.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				82.650.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	82.650.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				67.050.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	67.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.200.000.000	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					54.000.000		
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				54.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen				
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					132.650.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	132.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.750.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	0	19.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.650.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0	6.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.360.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	0	13.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				10.312.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	0	10.312.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu						
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.578.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	0	82.578.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar						
						Jumlah unit alat besar yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					973.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	973.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	0	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				198.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	198.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				773.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	773.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	40.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				26.250.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	0	26.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**1.355.306.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.01	1.355.306.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.355.306.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	0	1.355.306.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.355.306.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	5	1.355.306.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				867.058.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	867.058.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				488.248.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	488.248.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Pengurangan Pengangguran									**39.743.117.000**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	
						Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28.6		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)								**5.700.000.000**		
						Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	81.53	5.700.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						5.700.000.000		
						Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	26.4	3.500.000.000		
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					3.500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	Laporan	60.16	3.500.000.000		
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				3.500.000.000		
						Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	Unit	90	3.500.000.000		
						Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	89.58	2.200.000.000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER	
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					2.200.000.000		
						Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	%	55.17	381.335.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
		2.07.06.1.01.0002			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan				381.335.000		
						Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	130	381.335.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	%	29.41	550.991.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				550.991.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Unit	155	550.991.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	%	62.08	1.267.674.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
		2.07.06.1.01.0001			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				1.267.674.000		
						Jumlah pekerja anak yg dikembalikan ke dunia pendidikan	Orang	30	313.490.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan pemeriksaan	Unit	30	60.423.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja	Unit	925	678.091.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Jumlah Perusahaan yang menerapkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja	Unit	30	46.470.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Jumlah Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan pemeriksaan	Unit	40	60.200.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Jumlah peserta yang mengikuti FGD optimalisasi pengawasan norma ketenagakerjaan	Orang	50	30.000.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Jumlah peserta yang mengikuti rakor pengawasan ketenagakerjaan	Orang	160	79.000.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
	Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja								**30.176.915.000**		
						Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	9.24	23.476.915.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						23.476.915.000		
						Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	38.14	394.183.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					250.000.000		
						Persentase penganggur atau pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri	%	30.77	250.000.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				197.044.000		
						Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Orang	40	197.044.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				52.956.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas	Unit	3	52.956.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
				Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja					144.183.000		
						Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga	%	29.09	144.183.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
		2.07.03.1.02.0001			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja				144.183.000		
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Unit	20	144.183.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	2.88	12.500.000.000	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					12.500.000.000		
						Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	%	100		SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
						Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	0		SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah dokumen TNA	Dokumen	0		SEKSI PEMASARAN	
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK	%	20		SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja						
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Unit	0		SEKSI PEMASARAN	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri	%	12.61	1.100.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.100.000.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Industri pada Tahun n	Orang	240	1.100.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri - DBHCHT (Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau)	%	24.94	1.500.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.500.000.000		
						Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan basis kompetensi di tahun n (DBHCHT)	Orang	260	1.500.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	0	9.900.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				9.900.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	13	9.900.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%	46.9	5.500.000.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					5.500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	%	33.33		SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
						Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	0		SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah dokumen TNA	Dokumen	0		SEKSI PEMASARAN	
						Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri) yang diberikan pelatihan	%	1.33	350.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				350.000.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	52	350.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase jumlah calon tenaga kerja yang diberikan pelatihan - DBHCHT	%	2.4	2.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				2.000.000.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (DBHCHT/Cukai) - (DBHCHT)	Orang	372	2.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1	%	25		SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja						
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Dokumen	2		SEKSI PEMASARAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	0	3.150.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				3.150.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	12	3.150.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	9.45	4.526.915.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					4.526.915.000		
						Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	%	66.67		SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
						Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	0		SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah dokumen TNA (Training NeedAsesment)	Dokumen	0		SEKSI PEMASARAN	
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BPK Trans	%	40		SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Dokumen	0		SEKSI PEMASARAN	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan di bidang Pertanian - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau)	%	6.4	2.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				2.000.000.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pertanian pada Tahun n (DBHCHT)	Orang	452	2.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian	%	64	649.715.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				649.715.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pertanian pada Tahun n	Orang	220	649.715.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	1.877.200.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				1.877.200.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	670	1.877.200.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	2.3	555.817.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					555.817.000		
						Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya	%	75	555.817.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				555.817.000		
						Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi yang tersertifikasi	Orang	113	555.817.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Juta Rupiah	56	6.700.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						6.700.000.000		
						Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	4.4	700.000.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					700.000.000		
						Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	%	21	700.000.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				700.000.000		
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi / Peningkatan Produktivitas	Unit	275	700.000.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
						Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	%	13.13	6.000.000.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					6.000.000.000		
						Jumlah lembaga (penyedia dan pengguna tenaga kerja) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga (penyedia dan pengguna tenaga) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA dikalikan 100 persen	Unit	19			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja						
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Unit	0			
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	%	71	1.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.000.000.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n - (DBHCHT)	Orang	500	1.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%	4.77	560.000.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				560.000.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	55	560.000.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	0	4.440.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				4.440.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	8	4.440.000.000	SEKSI PELATIHAN	
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah							
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%			SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah						
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Unit	0		SEKSI PELATIHAN	
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi							
						Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan	%			SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.04.0001			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						
						Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	0		SEKSI PELATIHAN	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah								**180.415.000**		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%	62.85	180.415.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						180.415.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	62.85	180.415.000	SEKRETARIAT	
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					180.415.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%	28.57	180.415.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0001			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				99.415.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja daerah provinsi	Dokumen	1	82.540.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
						Jumlah kab/kota yang di bina dalam penyusunan Rencana Kerja (RTK) Makro	Kabupaten/Kota	15	16.875.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0004			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				81.000.000		
						Jumlah kab/kota yang dibina dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Kabupaten/Kota	15	36.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
						Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) Mikro	Unit	15	45.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja								**2.000.000.000**		
						Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	45.05	2.000.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						1.780.000.000		
						Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	%	45.05	66.500.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					66.500.000		
						Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	%	19.37	66.500.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.03.0002			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				66.500.000		
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	200	66.500.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	68.1	1.713.500.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
				Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.435.883.000		
						Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota	%	60	795.921.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.0001			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja				159.581.000		
						Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	100	159.581.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.000			Pelayanan Antar Kerja				542.020.000		
						Jumlah masyarakat memperoleh informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja	Orang	500	498.090.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah perusahaan dilakukan Job Canvassing / Monitoring Penempatan Tenaga Kerja	Unit	8	15.280.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	75	28.650.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				19.310.000		
						Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100	19.310.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.0004			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)				75.010.000		
						Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam penempatan tenaga kerja	Unit	50	75.010.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .	%	51.85	639.962.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.01.000			Perluasan Kesempatan Kerja				639.962.000		
						Jumlah masyarakat berpartisipasi dalam pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya	Orang	30	186.220.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah petugas lapangan/ pendamping wirausaha mengikuti pemanduan	Orang	35	2.394.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	200	413.602.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah wirausaha baru binaan mengikuti pembinaan lanjutan/ upgrading/ short course	Orang	20	37.746.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi					264.577.000		
						Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	%	75	187.097.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.0004			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				187.097.000		
						Jumlah Keluarga PMI mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan	Orang	20	38.526.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	60	115.622.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah stakeholder PMI Purna yang terkoordinasi dalam upaya pengembangan Desmigratif	Unit	75	32.949.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	%	2.83	77.480.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.0001			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				74.480.000		
						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	50	21.580.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam pelindungan PMI	Unit	30	52.900.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.0003			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				3.000.000		
						Jumlah Layanan Terpadu Penempatan PMI yang terkoordinasi	Unit	9	3.000.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
				Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					13.040.000		
						Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	%	100	13.040.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.05.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				13.040.000		
						Jumlah perusahaan pengguna TKA terverifikasi dan layanan penggunaan TKA	Dokumen	15	9.040.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah Stakeholder menerima informasi kebijakan pengendalian dan penggunaan TKA	Unit	60	4.000.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						220.000.000		
						Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%	3.61		Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							
						Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan	%	80		SEKSI PELATIHAN	
		3.32.03.1.01.0006			Pelatihan Transmigrasi						
						Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dibidang pertanian	Orang	0		SEKSI PELATIHAN	
						Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3.61	220.000.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					220.000.000		
						Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	%	10	220.000.000	SEKSI TRANSMIGRASI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.32.03.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				220.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	5	220.000.000	SEKSI TRANSMIGRASI	
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial								**1.685.787.000**		
						Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	91.07	1.685.787.000		
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						1.685.787.000		
						Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	98	289.609.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota					289.609.000		
						Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	%	26.87	289.609.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.01.0001			Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial				113.982.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Unit	105	113.982.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.01.0002			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial				26.256.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Unit	105	26.256.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.01.0003			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				149.371.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan	70	149.371.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49.75	745.626.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					745.626.000		
						Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49.74	471.007.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.02.0001			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				216.683.000		
						Jumlah LKS yang terbentuk untuk mencegah perselisihan hubungan industrial	Unit	20	216.683.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.07.05.1.02.0003			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				24.512.000		
						Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang DiverifikasI	Unit	1000	24.512.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.02.0004			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi				229.812.000		
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Unit	1	229.812.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
						Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi	%	80	274.619.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.02.0005			Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				274.619.000		
						Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Unit	75	274.619.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
						Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96.15	235.787.000		
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					235.787.000		
						Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	%	96.15	74.677.000		
		2.07.05.1.02.0002			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				74.677.000		
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kasus	125	74.677.000		
						Prosentase perusahaan dengan kategori rawan / setengah rawan	%	36.7	161.110.000		
		2.07.05.1.02.0001			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				161.110.000		
						Jumlah perselisihan yang dicegah	Kasus	222	161.110.000		
						Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	44.27	414.765.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)					414.765.000		
						Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota	%	2.28	414.765.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.0001			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)				252.778.000		
						Jumlah Penetapan UMP	Laporan	1	252.778.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.0003			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)				49.356.000		
						Jumlah penetapan UMK	Laporan	1	49.356.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.0005			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				112.631.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	75	112.631.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
JUMLAH									**128.937.012.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Keluarga Berkualitas									**1.440.000.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	
						Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	%	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								**440.000.000**		
						Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha	%	100	440.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						440.000.000		
						Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	32	440.000.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
				Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					130.000.000		
						ASFR (Age Specific Fertility Rate)	Angka	19	130.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	
		2.14.04.1.01.0008			Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB				50.000.000		
						Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Kelompok	5	50.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.04.1.01.0020			Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja				80.000.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Kabupaten/ Kota	2	80.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					310.000.000		
						Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	30	310.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	
		2.14.04.1.02.0006			Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas				50.000.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten/ Kota	1	50.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.04.1.02.0007			Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota				80.000.000		
						Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	1	80.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui						

		2.14.04.1.02.0008			Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				180.000.000		
						Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kelompok	3	180.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota	%	0		Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat	
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
						Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga	%	0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.14.04.1.02.0008			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga						
						Jumlah mitra dan organisasi masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pembangunan ketahanan keluarga	Kelompok	0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terkendalinya Jumlah Penduduk								**1.000.000.000**		
						Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2.13	1.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						305.000.000		
						Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	0		Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat	
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi							
						Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	0		SEKSI DATA DAN INFORMASI	
		2.14.02.1.02.0008			Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						
						Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	0		SEKSI DATA DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	%	61.11	305.000.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					300.000.000		
						Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	Kabupaten/Kota	18	300.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.02.1.01.0002			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				70.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	2	70.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.0007			Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				80.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Dokumen	4	80.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.0015			Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain				20.000.000		
						Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Kabupaten/Kota	2	20.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.0017			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				130.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	4	130.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi					5.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.02.1.02.0008			Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						695.000.000		
						Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	%	65.58	595.000.000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE	
				Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					595.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	%	30.5	595.000.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03.1.01.0007			Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				325.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	40	325.000.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.03.1.01.0012			Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				270.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Kabupaten/Kota	18	270.000.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Unmetneed	%	10	100.000.000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE	
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB					100.000.000		
						Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	%	10	100.000.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03.1.02.0002			Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				100.000.000		
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kelompok	6	100.000.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan									**1.475.000.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	
						Pengeluaran perempuan per kapita	Ribu Rupiah	10100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan								**1.475.000.000**		
						Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	40	1.475.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						1.375.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	%	60	1.375.000.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					180.465.000		
						Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	%	10	180.465.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.02.1.01.0005			Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi						
						Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Dokumen	0		SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.02.1.01.0006			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				48.430.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Laporan	4	48.430.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.01.0007			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				82.640.000		
						Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Dokumen	80	82.640.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.01.0008			Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				49.395.000		
						Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Orang	55	49.395.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi					1.194.535.000		
						Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya	%	70	1.194.535.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.02.1.02.0003			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				1.149.535.000		
						Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang	290	1.149.535.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.02.0004			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				45.000.000		
						Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kelompok	6	45.000.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						100.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	14.29	100.000.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					100.000.000		
						Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak	%	100	100.000.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.04.1.01.0001			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				100.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	OPD	10	100.000.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								
						Persentase keterisian indikator oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) provinsi	%	0		Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat	
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi							

						Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	%	0		SEKSI DATA DAN INFORMASI	
		2.08.05.1.01.0001			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi						
						Jumlah ketersediaan dokumen data gender dan anak	Dokumen	0		SEKSI DATA DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**17.435.284.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	73.5		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**17.175.284.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87.9	17.175.284.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						16.114.484.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	90	959.759.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					336.264.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	336.264.000		
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				336.264.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	336.264.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	1.000.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	10	1.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.695.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	1.695.000		
		X.XX.01.1.07.000			Pengadaan Mebel				1.695.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	1.695.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	170.000.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	40.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				130.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	130.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					450.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		450.800.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	3.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				445.800.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	445.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	2.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	90	15.154.725.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.913.925.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	11.913.925.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.518.925.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	60	11.518.925.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				320.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	320.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					112.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	112.000.000		
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				110.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	110.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	2.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					266.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90	266.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				200.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				3.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	25	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				60.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	50	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					155.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				150.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	5	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.151.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.151.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				650.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.492.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.492.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					556.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	556.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				185.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	24	185.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				1.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				254.200.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	254.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				116.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	116.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						1.060.800.000		
						Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	%	25	1.060.800.000	SEKRETARIAT	
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					229.800.000		
						Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	%	9	229.800.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.08.05.1.01.0001			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi				229.800.000		
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	6	229.800.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					831.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	831.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		2.08.05.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.05.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				300.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.05.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.08.05.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.05.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	5	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.05.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				68.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	3	68.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.05.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.05.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				230.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	230.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		2.08.05.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.05.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				97.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	97.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**260.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.75	260.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						260.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	45	260.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					260.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	40	260.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				140.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	140.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	120.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak									**935.358.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	66		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak								**440.000.000**		
						Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	70	440.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						150.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	14.29	150.000.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					150.000.000		
						Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	%	100	150.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	
		2.08.04.1.03.0001			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		
						Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	20	150.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						290.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	%	82.85	290.000.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					240.000.000		
						Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	Kabupaten/Kota	4	240.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	
		2.08.06.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				90.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	90.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.06.1.01.0003			Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				150.000.000		
						Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	OPD	20	150.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					50.000.000		
						Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	Kelompok	20	50.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	
		2.08.06.1.02.0005			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				33.000.000		
						Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	1	33.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.06.1.02.0006			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak				17.000.000		
						Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	1	17.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	%	0		Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	Kelompok	0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.08.06.1.02.0005			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota						
						Jumlah lembaga mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak	Kelompok	0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.06.1.02.0006			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak						
						Jumlah peserta KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak								**495.358.000**		
						Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	75	495.358.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						495.358.000		
						Persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring	%			Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi	Kelompok	0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.08.07.1.03.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						
						Jumlah rapat koordinasi dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Kegiatan	0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase korban kekerasan anak terlayani	%	100	194.608.000		
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					194.608.000		
						Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	194.608.000		
		2.08.07.1.02.0005			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				76.868.000		
						Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan) / Jumlah Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Orang	1100	76.868.000		
		2.08.07.1.02.0006			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi				117.740.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Orang	35	117.740.000		
						Rasio korban kekerasan terhadap anak	per 100.000 penduduk	11.5	300.750.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
				Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					166.240.000		
						Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	%	31.4	166.240.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				50.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	50.750.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.01.0005			Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi				115.490.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	15	115.490.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							
						Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100		SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.02.0005			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.02.0006			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi						
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					134.510.000		
						Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	15	134.510.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.03.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	30.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.03.0004			Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi				10.000.000		
						Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Kegiatan	1	10.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.08.07.1.03.0006			Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi				10.000.000		
						Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.03.0007			Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi				15.000.000		
						Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	Orang	1	15.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.03.0008			Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan				69.510.000		
						Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	Orang	150	69.510.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan									**1.052.958.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	
						Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	5.4		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan								**1.052.958.000**		
						Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	4.25	1.052.958.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						1.052.958.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	%	11	858.350.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					125.750.000		
						Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan	%	43	125.750.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		2.08.03.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				50.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	50.750.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.01.0002			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				75.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	OPD	2	75.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100		SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		2.08.03.1.02.0001			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	0		SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi						
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	0		SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					732.600.000		
						Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	10	732.600.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		2.08.03.1.03.0001			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				50.000.000		
						Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03.0002			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				100.000.000		
						Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	10	100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03.0003			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi				30.000.000		
						Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	100	30.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03.0004			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				552.600.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	552.600.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring	%	0		Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
						Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi	Kelompok	0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.08.03.1.03.0004			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota	Orang	0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	194.608.000		
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					194.608.000		
						Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	194.608.000		
		2.08.03.1.02.0001			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				76.868.000		
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	95	76.868.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				117.740.000		
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	5	117.740.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									**22.338.600.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**24.142.048.000**	**Dinas Ketahanan Pangan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**23.338.048.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	23.338.048.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						23.338.048.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	22.126.048.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.314.697.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	17.314.697.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.544.697.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	93	16.544.697.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				370.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	370.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				400.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	400.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					140.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				120.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0005			Pengolahan Data Retribusi Daerah				10.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	4	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					240.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				240.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.251.851.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.251.851.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				104.351.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	104.351.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				112.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	112.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				620.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	620.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				195.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	195.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					263.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	20	263.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				263.500.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	20	263.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.076.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	1.076.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				770.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	770.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.830.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	76	1.830.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				250.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	24	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.500.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	40	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	%	100	1.212.000.000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					196.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP	%	100	196.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				101.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	101.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					290.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP	Unit	5	290.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				290.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	290.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					330.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	Laporan	36	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				150.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					356.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	Unit	12	356.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				306.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	306.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**804.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	5	804.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						804.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	804.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					804.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	804.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				420.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8	420.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				384.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	18	384.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (I)									**6.093.935.000**	**Dinas Ketahanan Pangan**	
						Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan								**4.070.000.000**		
						Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	%	10	4.070.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						4.070.000.000		
						Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	60	4.070.000.000	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					4.070.000.000		
						PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS USAHA PADA LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT	%	20	420.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.09.03.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				420.000.000		
						LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI	Kelompok	10	420.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
						PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA	%	5	2.500.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
		2.09.03.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				2.500.000.000		
						JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN MELALUI SISTEM LOGISTIK DAERAH	Dokumen	12	1.500.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
						VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN	Ton	550	1.000.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
						PROSENTASE SASARAN STABILISASI HARGA SESUAI DENGAN SOP	%	100	1.150.000.000	SEKSI HARGA PANGAN	
		2.09.03.1.01.0009			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi				1.150.000.000		
						JUMLAH INFORMASI HARGA PANGAN	Dokumen	12	150.000.000	SEKSI HARGA PANGAN	
						JUMLAH INTERVENSI HARGA PANGAN	Paket	3	1.000.000.000	SEKSI HARGA PANGAN	
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan								**2.023.935.000**		
						Angka Kecukupan Energi	kkal/kapita/h	3797	2.023.935.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						2.023.935.000		
						Rasio cadangan pangan masyarakat	Angka	0.62	307.150.000	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					307.150.000		
						PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT	%	20	307.150.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	
		2.09.03.1.02.0005			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				307.150.000		
						LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI/DIBINA	Kelompok	10	307.150.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	
						Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Angka	0.064	1.516.785.000	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					1.516.785.000		
						PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI	%	3	1.516.785.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	
		2.09.03.1.02.0005			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1.516.785.000		
						JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH YANG DIKELOLA	Ton	85	1.516.785.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Rata-rata ketercukupan pangan	Angka	1.25	200.000.000	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					200.000.000		
						JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN	Dokumen	1	200.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
		2.09.03.1.01.0013			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				200.000.000		
						JUMLAH LAPORAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG DISUSUN	Dokumen	12	200.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (PE)									**10.132.500.000**	**Dinas Ketahanan Pangan**	
						Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83		Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan								**5.217.500.000**		
						Persentase penanganan kecamatan rawan pangan	%	5	5.217.500.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						1.237.000.000		
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	kg/kapita/tahun	87.8	900.000.000	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	
				Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi					900.000.000		
						PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	Angka	33	900.000.000	SEKSI KONSUMSI PANGAN	
		2.09.03.1.04.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				900.000.000		
						JUMLAH DESA B2SA DI DAERAH RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI	Desa	12	900.000.000	SEKSI KONSUMSI PANGAN	
						Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)	Angka	0.62	337.000.000	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					337.000.000		
						PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT (DMP)	%	20	337.000.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	
		2.09.03.1.02.0005			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				337.000.000		
						LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DESA RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI/DIBINA	Kelompok	10	337.000.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						3.980.500.000		
						Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	%	0.01	3.980.500.000	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi					3.980.500.000		
						PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI	%	5	3.980.500.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
		2.09.04.1.02.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				3.980.500.000		
						JUMLAH DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI YANG DIFASILITASI	Desa	22	2.467.500.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						JUMLAH DESA STUNTING YANG DIINTERVENSI	Desa	15	750.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						JUMLAH PETA FSVA YANG DISUSUN	Dokumen	1	40.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						JUMLAH REKOMENDASI KEBUTUHAN KERAWANAN PANGAN LINTAS SEKTOR	Dokumen	1	40.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						TERSUSUNNYA DOKUMEN MENEJEMEN FOOD LOSS DAN ATAU FOOD WASTE	Dokumen	1	421.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						TERSUSUNNYA PETA KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI	Dokumen	1	262.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan								**4.915.000.000**		
						Skor PPH provinsi	Skor	94.5	4.915.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						2.100.000.000		
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/tahun	87.8	2.100.000.000	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					1.000.000.000		

						REKOMENDASI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA PANGAN LOKAL YANG DISUSUN	Dokumen	1	1.000.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	
		2.09.03.1.01.0002			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1.000.000.000		
						JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL DAN PANGAN POKOK LOKAL YANG DIFASILITASI	Kelompok	25	1.000.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	
				Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi					1.100.000.000		
						PPH Kab / Kota > 87	Angka	33	1.100.000.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
		2.09.03.1.04.0001			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				800.000.000		
						Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal	Lokasi	10	450.000.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
						Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibantukan	Paket	2500	350.000.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
		2.09.03.1.04.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				300.000.000		
						JUMLAH DESA B2SA YANG DIFASILITASI	Desa	3	250.000.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
						JUMLAH DOKUMEN ANALISIS PPH	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						2.815.000.000		
						Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	80	1.365.000.000	Bidang Keamanan Pangan	
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.365.000.000		
						JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN*	Dokumen	1	325.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				325.000.000		
						JUMLAH MASYARAKAT YANG TEREDUKASI TENTANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Orang	200	325.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	
						JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN**	Dokumen	1	400.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				400.000.000		
						JUMLAH SAMPEL PANGAN SEGAR YANG DIAWASI	sampel	200	400.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
						Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran	%	65	75.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				75.000.000		
						JUMLAH LOKASI PENGAWASAN IJIN EDAR	Lokasi	40	75.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
						PROSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA	%	15	565.000.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.09.05.1.01.0009			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				565.000.000		
						Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu	Kelompok	7	265.000.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	
						JUMLAH PELAKU USAHA YANG DIBINA DALAM PENERAPAN HIGIENE SANITASI	Kelompok	18	300.000.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	
						Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan	%	80	1.450.000.000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.450.000.000		
						Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai	Dokumen	2	1.450.000.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	
		2.09.05.1.01.0006			Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan				800.000.000		
						Jumlah dokumen sertifikat dan/atau registrasi yang diterbitkan	Dokumen	35	800.000.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	
		2.09.05.1.01.0010			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				650.000.000		
						Jumlah Sampel Pangan yang Diuji	sampel	100	650.000.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	
JUMLAH									**40.368.483.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas air									**7.830.876.000**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	
						Indeks Kualitas Air	Angka	50.66		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Menurunnya pencemaran air permukaan								**7.830.876.000**		
						Indeks Pencemaran Air	Angka	3.37	7.830.876.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						778.748.000		
						Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100	778.748.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi					444.398.000		
						Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup	Dokumen	6	444.398.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.1.01.0002			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi				444.398.000		
						Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen	6	444.398.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi					334.350.000		
						Jumlah Dokumen KLHS yang tervalidasi	Dokumen	45	334.350.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.1.02.0005			Pembinaan Penyelenggaraan KLHS				334.350.000		
						Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Dokumen	45	334.350.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						5.833.376.000		
						Persentase pengujian kualitas air	%	100	723.376.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					723.376.000		
						Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air	Dokumen	1	723.376.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				723.376.000		
						Jumlah titik pengujian kualitas air	sampel	550	723.376.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	4.76	5.110.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					5.110.000.000		
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	Unit	100	5.110.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.1.01.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				5.110.000.000		
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran air	Unit	135	5.110.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN						133.740.000		

			BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
						Persentase limbah B3 yang terkelola	%	80	133.740.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					133.740.000		
						Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola	Ton	1476440	133.740.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
		2.11.05.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				133.740.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 denganPemerintah dalam rangka Pengangkutan,Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	1	133.740.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						844.280.000		
						Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	50	287.541.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					287.541.000		
						Jumlah pelaku usaha berijin yang taat	Unit	20	287.541.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.06.1.01.0006			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				287.541.000		
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kegiatan	35	287.541.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
						Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%	100	556.739.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					556.739.000		
						Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan / diterbitkan	Dokumen	10	556.739.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.06.1.01.0001			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				556.739.000		
						Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang difasilitasi	Dokumen	10	556.739.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						240.732.000		
						Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	240.732.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi					240.732.000		
						Jumlah laporan aduan yang ditangani	Laporan	15	240.732.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.10.1.01.0007			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi				240.732.000		
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Laporan	15	240.732.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**144.518.678.000**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	70		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**143.732.127.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	143.732.127.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						143.732.127.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	132.060.493.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					126.657.549.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	126.657.549.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				126.507.809.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	677	126.507.809.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				68.602.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	1	68.602.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				81.138.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	81.138.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					145.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	145.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				145.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	145.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					383.272.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	383.272.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				51.272.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	51.272.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				332.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	40	332.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					863.608.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	863.608.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.440.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	80.440.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				51.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	51.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				77.300.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	77.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				73.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	73.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.668.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	1	5.668.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				125.700.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	125.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					947.839.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	947.839.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				609.124.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	609.124.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				318.715.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	318.715.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.292.896.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.292.896.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				600.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				130.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.550.896.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.550.896.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					770.329.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	770.329.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				378.570.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	19	378.570.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				124.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	124.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				217.759.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	217.759.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	1.277.458.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					37.700.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada KR Baturraden	Dokumen	1	37.700.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				37.700.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Balai Kebun Raya Baturraden	Paket	1	37.700.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					199.737.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada KR Baturraden	%	100	199.737.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.615.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden	Paket	1	4.615.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.897.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden	Paket	1	14.897.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				42.147.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Paket	1	42.147.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.945.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Paket	1	16.945.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				26.400.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden	Paket	1	26.400.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Dokumen	1	3.200.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Balai Kebun Raya Baturraden	Laporan	1	35.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56.533.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Balai Kebun Raya Baturraden	Laporan	1	56.533.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					152.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada KR Baturraden	Unit	1	152.500.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Paket	0		Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	5	17.500.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	0		Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	0		Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				135.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	1	135.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					374.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada KR Baturraden	Laporan	1	374.500.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Balai Kebun Raya Baturraden	Laporan	1	3.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				63.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan balai kebun raya baturraden	Laporan	1	63.500.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	1	8.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				300.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Laporan	1	300.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					513.021.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada KR Baturraden	Unit	1	513.021.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				66.870.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	2	66.870.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.345.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	1	3.345.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.806.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	17	45.806.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	5	200.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai kebun Raya Baturraden	Unit	3	50.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				147.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	5	147.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Tahura	%	100	1.484.601.000	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada TAHURA	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Balai Tahura	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					220.281.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada TAHURA	%	100	220.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.450.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai Tahura	Paket	1	12.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.668.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai tahura	Paket	1	14.668.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.328.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Balai Tahura	Paket	1	29.328.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Balai Tahura	Paket	1	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.800.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Balai Tahura	Paket	1	20.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Balai Tahura	Dokumen	1	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				17.375.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Balai Tahura	Laporan	1	17.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Balai Tahura	Laporan	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					90.394.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada TAHURA	Unit		90.394.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan Balai Tahura	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.894.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Balai Tahura	Unit	5	57.894.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Tahura	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Tahura	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Tahura	Unit	1	32.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					436.277.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada TAHURA	Laporan		436.277.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Balai Tahura	Laporan	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				74.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Balai Tahura	Laporan	1	74.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.625.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai Tahura	Laporan	1	6.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				353.652.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Tahura	Laporan	1	353.652.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					692.649.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada TAHURA	Unit		692.649.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				178.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Tahura	Unit	3	178.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				7.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara Balai Tahura	Unit	6	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Balai Tahura	Unit	7	33.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				278.212.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Tahura	Unit	4	278.212.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				128.687.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Tahura	Unit	2	128.687.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				66.750.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Tahura	Unit	3	66.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPL2H	%	100	735.147.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah BPL2H	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					242.897.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	242.897.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BPL2H	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.850.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BPL2H	Paket	1	9.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan BPL2H	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan BPL2H	Paket	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan BPL2H	Paket	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan BPL2H	Dokumen	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu BPL2H	Laporan	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				147.047.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi BPL2H	Laporan	1	147.047.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					120.470.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	120.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan BPL2H	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				110.470.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan BPL2H	Unit	6	110.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BPL2H	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BPL2H	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BPL2H	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170.830.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	170.830.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.350.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat BPL2H	Laporan	1	5.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				55.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BPL2H	Laporan	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BPL2H	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				110.480.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan BPL2H	Laporan	1	110.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					175.950.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	175.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				83.950.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BPL2H	Unit	3	83.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara BPL2H	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara BPL2H	Unit	1	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BSPTH	%	100	988.037.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					12.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BSPTH	Dokumen	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah BSPTH	Dokumen	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					134.922.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BSPTH	%	100	134.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.950.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BSPTH	Paket	1	3.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.747.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BSPTH	Paket	1	29.747.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.120.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan BSPTH	Paket	1	7.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan BSPTH	Paket	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.475.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan BSPTH	Dokumen	1	4.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan BSPTH	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu BSPTH	Laporan	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.630.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah BSPTH	Laporan	1	71.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					33.375.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BSPTH	Unit	1	33.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan BSPTH	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.375.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan BSPTH	Unit	10	33.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BSPTH	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BSPTH	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BSPTH	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					547.640.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BSPTH	Laporan	1	547.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.740.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat BSPTH	Laporan	1	1.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				129.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BSPTH	Laporan	1	129.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BSPTH	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				416.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan BSPTH	Laporan	1	416.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					260.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BSPTH	Unit	1	260.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				90.800.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BSPTH	Unit	3	90.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara BSPTH	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.300.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara BSPTH	Unit	12	14.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH	Unit	3	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH	Unit	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH	Unit	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 1	%		728.032.000	CDK 1	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 1	Dokumen	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					200.032.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1	%	100	200.032.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 1	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.032.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 1	Paket	1	25.032.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 1	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 1	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 1	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 1	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 1	Laporan	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 1	Laporan	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 1	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 1	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 1	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 1	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 1	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 1	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					352.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1	Laporan	1	352.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 1	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				87.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 1	Laporan	1	87.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 1	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				260.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 1	Laporan	1	260.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 1	Unit	1	166.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				106.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 1	Unit	3	106.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 1	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 1	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 1	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 10	%	100	689.845.000	CDK 10	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					11.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 10	Dokumen	1	11.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				11.300.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 10	Dokumen	1	11.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					140.845.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 10	%	100	140.845.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.010.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 10	Paket	1	4.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.564.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 10	Paket	1	9.564.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.325.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 10	Paket	1	4.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.076.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 10	Paket	1	16.076.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.652.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 10	Paket	1	4.652.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 10	Dokumen	1	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 10	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				73.618.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 10	Laporan	1	73.618.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					74.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 10	Unit	1	74.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 10	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.500.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 10	Unit	12	44.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 10	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 10	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 10	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					275.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 10	Laporan	1	275.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 10	Laporan	1	1.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				111.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 10	Laporan	1	111.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 10	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				163.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 10	Laporan	1	163.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					187.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 10	Unit	1	187.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				82.750.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 10	Unit	2	82.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 10	Unit	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.650.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 10	Unit	38	17.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				82.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10	Unit	1	82.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 11	%		777.735.000	CDK 11	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 11	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 11	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					197.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 11	%	100	197.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 11	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 11	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 11	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 11	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 11	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 11	Dokumen	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 11	Laporan	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 11	Laporan	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					128.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 11	Unit	1	128.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 11	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 11	Unit	5	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 11	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 11	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 11	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					251.482.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 11	Laporan	1	251.482.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 11	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 11	Laporan	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 11	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				190.482.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 11	Laporan	1	190.482.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					156.253.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11	Unit	1	156.253.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 11	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.253.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 11	Unit	20	2.253.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 11	Unit	20	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				79.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11	Unit	0	79.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 2	%	100	617.079.000	CDK 2	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					11.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 2	Dokumen	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				11.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 2	Dokumen	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					118.229.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 2	%	100	118.229.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.680.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 2	Paket	1	3.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.541.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 2	Paket	1	4.541.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.338.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 2	Paket	1	7.338.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.840.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 2	Paket	1	6.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.630.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 2	Paket	1	3.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 2	Dokumen	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.250.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 2	Laporan	1	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.450.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 2	Laporan	1	82.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					82.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 2	Unit	1	82.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				13.500.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 2	Paket	1	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				63.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 2	Unit	8	63.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 2	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 2	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 2	Unit	3	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					279.650.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 2	Laporan	1	279.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.050.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 2	Laporan	1	1.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 2	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 2	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				228.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 2	Laporan	1	228.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 2	Unit	1	125.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				66.600.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 2	Unit	2	66.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 2	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.100.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 2	Unit	37	14.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2	Unit	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 3	%	100	743.774.000	CDK 3	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.300.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 3	Dokumen	1	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.300.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 3	Dokumen	1	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					125.872.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 3	%	100	125.872.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 3	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.895.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 3	Paket	1	15.895.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 3	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 3	Paket	1	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.797.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 3	Paket	1	4.797.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 3	Dokumen	1	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 3	Laporan	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.780.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi CDK 3	Laporan	1	75.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					64.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 3	Unit	1	64.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 3	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 3	Unit	13	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 3	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 3	Unit	0	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 3	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					326.732.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 3	Laporan	1	326.732.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 3	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				66.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 3	Laporan	1	66.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 3	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				259.132.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 3	Laporan	1	259.132.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					223.870.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 3	Unit	1	223.870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				68.410.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 3	Unit	2	68.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 3	Unit	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.460.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 3	Unit	40	20.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3	Unit	4	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3	Unit	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3	Unit	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 4	%	100	669.430.000	CDK 4	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 4	Dokumen	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 4	Dokumen	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					194.990.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 4	%	100	194.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 4	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.615.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 4	Paket	1	14.615.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 4	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.170.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 4	Paket	1	9.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.125.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 4	Paket	1	10.125.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 4	Dokumen	1	4.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				29.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 4	Laporan	1	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				115.880.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 4	Laporan	1	115.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 4	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				11.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 4	Paket	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 4	Unit	10	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 4	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 4	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 4	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					331.740.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 4	Laporan	1	331.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 4	Laporan	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				78.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 4	Laporan	1	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 4	Laporan	0	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				249.240.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 4	Laporan	1	249.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					103.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 4	Unit	1	103.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				73.200.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 4	Unit	2	73.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				6.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 4	Unit	3	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 4	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4	Unit	3	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 5	%		635.447.000	CDK 5	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					13.374.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 5	Dokumen	1	13.374.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				13.374.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 5	Dokumen	1	13.374.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					104.605.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 5	%	100	104.605.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.350.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 5	Paket	1	3.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.687.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 5	Paket	1	6.687.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.693.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 5	Paket	1	8.693.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 5	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.687.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 5	Paket	1	6.687.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 5	Dokumen	1	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 5	Laporan	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.788.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 5	Laporan	1	61.788.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					192.478.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 5	Unit	1	192.478.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				14.917.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 5	Paket	1	14.917.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.061.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 5	Unit	5	20.061.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				157.500.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 5	Unit	1	157.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 5	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 5	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					261.990.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 5	Laporan	1	261.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 5	Laporan	1	2.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 5	Laporan	1	70.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 5	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				189.540.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 5	Laporan	1	189.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					63.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 5	Unit	1	63.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 5	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 5	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 5	Unit	12	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 5	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK5	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 5	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 6	%	100	549.095.000	CDK 6	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 6	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 6	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					167.595.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 6	%	100	167.595.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 6	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 6	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 6	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 6	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 6	Paket	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 6	Dokumen	1	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 6	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				99.795.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 6	Laporan	1	99.795.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 6	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 6	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 6	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 6	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 6	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 6	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					267.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 6	Laporan	1	267.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 6	Laporan	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 6	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 6	Laporan	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				210.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 6	Laporan	1	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					114.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 6	Unit	1	114.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				103.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 6	Unit	2	103.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				1.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 6	Unit	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 6	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 7	%	100	515.927.000	CDK 7	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 7	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 7	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					101.503.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 7	%	100	101.503.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 7	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.813.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 7	Paket	1	9.813.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 7	Paket	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 7	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.360.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 7	Paket	1	3.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.980.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 7	Dokumen	1	1.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.750.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 7	Laporan	1	13.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66.600.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 7	Laporan	1	66.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					71.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 7	Unit	1	71.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				25.400.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 7	Paket	1	25.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 7	Unit	4	46.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 7	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 7	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 7	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					137.524.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 7	Laporan	1	137.524.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 7	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 7	Laporan	1	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 7	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.524.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 7	Laporan	1	100.524.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					202.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 7	Unit	1	202.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				56.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 7	Unit	2	56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				1.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 7	Unit	10	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 7	Unit	18	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				137.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7	Unit	1	137.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 8	%	100	605.175.000	CDK 8	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.687.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 8	Dokumen	1	6.687.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.687.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 8	Dokumen	1	6.687.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					112.944.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 8	%	100	112.944.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.012.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 8	Paket	1	4.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.031.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 8	Paket	1	10.031.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.548.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 8	Paket	1	8.548.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.672.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 8	Paket	1	4.672.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.012.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 8	Paket	1	4.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.408.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 8	Dokumen	1	1.408.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.370.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 8	Laporan	1	13.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66.891.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 8	Laporan	1	66.891.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					74.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 8	Unit	1	74.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				13.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 8	Paket	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				61.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 8	Unit	4	61.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 8	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 8	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 8	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					232.660.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 8	Laporan	1	232.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 8	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 8	Laporan	1	36.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 8	Laporan	1	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				185.260.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 8	Laporan	1	185.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					178.884.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 8	Unit	1	178.884.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.153.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 8	Unit	2	50.153.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.009.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 8	Unit	30	3.009.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.061.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 8	Unit	40	20.061.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.600.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8	Unit	1	75.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.061.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8	Unit	1	20.061.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 9	%	100	654.852.000	CDK 9	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					4.012.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 9	Dokumen	1	4.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4.012.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 9	Dokumen	1	4.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					172.129.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 9	%	100	172.129.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.687.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 9	Paket	1	6.687.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.627.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 9	Paket	1	34.627.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				23.405.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 9	Paket	1	23.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.062.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 9	Paket	1	20.062.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.356.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 9	Paket	1	11.356.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 9	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 9	Laporan	1	20.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.592.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 9	Laporan	1	52.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					90.821.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 9	Unit	1	90.821.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				25.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 9	Paket	10	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.821.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 9	Unit	10	50.821.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 9	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 9	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 9	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					195.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 9	Laporan	1	195.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 9	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				45.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 9	Laporan	1	45.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 9	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				147.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 9	Laporan	1	147.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					192.890.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 9	Unit	1	192.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				76.500.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 9	Unit	2	76.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 9	Unit	20	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.581.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 9	Unit	20	37.581.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				46.809.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 9	Unit	1	46.809.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 9	Unit	1	26.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 9	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**786.551.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	786.551.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						786.551.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	786.551.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					786.551.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	786.551.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				399.520.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	399.520.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				387.031.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	387.031.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tutupan lahan									**27.589.586.000**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	
						Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	42.45		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya luasan tutupan lahan								**27.589.586.000**		
						Luas tutupan lahan	Ha	1022457	27.589.586.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						18.758.156.000		
						Persentase lahan kritis tertangani	%	0.47	120.366.000		
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					120.366.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove)	Ha	1776	120.366.000		
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				44.486.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL)	Dokumen	1	44.486.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				75.880.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Dokumen	3	75.880.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1	%	0.02	1.087.854.000	CDK 1	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.087.854.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK1	Ha	66	1.087.854.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				23.924.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 1	Dokumen	1	23.924.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				209.385.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 1	Ha	40	209.385.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				292.894.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 1	Ha	25	292.894.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				466.472.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK1	Unit	29	466.472.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				24.300.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 1	Laporan	1	24.300.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				70.879.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 1	Ha	1	70.879.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10	%	0.03	1.089.640.000	CDK 10	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.089.640.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 10	Ha	100	1.089.640.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				30.175.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 10	Dokumen	1	30.175.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				319.874.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 10	Ha	50	319.874.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				387.550.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 10	Ha	50	387.550.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				274.956.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 10	Unit	4	274.956.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				77.085.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 10	Dokumen	1	77.085.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11	%	0.03	1.001.937.000	CDK 11	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.001.937.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 11	Ha	130	1.001.937.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				33.405.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 11	Dokumen	1	33.405.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				236.000.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 11	Ha	78	236.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				391.495.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 11	Ha	52	391.495.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				320.976.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 11	Unit	16	320.976.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				20.061.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 11	Dokumen	1	20.061.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2	%	0.04	1.129.723.000	CDK 2	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.129.723.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK2	Ha	137	1.129.723.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				28.426.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 2	Dokumen	1	28.426.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				411.212.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 2	Ha	90	411.212.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				120.093.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 2	Ha	30	120.093.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				387.534.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 2	Unit	55	387.534.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				23.600.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 2	Laporan	1	23.600.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				158.858.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 2	Ha	17	158.858.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3	%	0.03	1.274.159.000	CDK 3	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.274.159.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK3	Ha	114	1.274.159.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				16.290.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 3	Dokumen	1	16.290.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				356.047.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 3	Ha	62	356.047.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				397.729.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 3	Ha	51	397.729.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				443.909.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 3	Unit	58	443.909.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				30.092.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 3	Dokumen	1	30.092.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				30.092.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 3	Ha	1	30.092.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4	%	0.03	1.082.500.000	CDK 4	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.082.500.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK4	Ha	120	1.082.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 4	Ha	1	20.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				400.000.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 4	Ha	100	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				150.000.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 4	Ha	15	150.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				410.000.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 4	Unit	12	410.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				10.500.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 4	Dokumen	1	10.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				92.000.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 4	Ha	10	92.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5	%	0.04	1.297.588.000	CDK 5	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.297.588.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 5	Ha	140	1.297.588.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				33.435.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 5	Dokumen	1	33.435.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				480.762.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 5	Ha	105	480.762.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				172.700.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 5	Ha	20	172.700.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				399.700.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 5	Unit	14	399.700.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				25.411.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 5	Dokumen	1	25.411.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				185.580.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 5	Ha	25	185.580.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6	%	0.09	1.377.789.000	CDK 6	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.377.789.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 6	Ha	330	1.377.789.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				33.435.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 6	Dokumen	1	33.435.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				325.119.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 6	Ha	150	325.119.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				328.870.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 6	Ha	175	328.870.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				483.068.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 6	Unit	32	483.068.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				66.870.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 6	Dokumen	1	66.870.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				140.427.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 6	Ha	5	140.427.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7	%	0.09	1.224.454.000	CDK 7	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.224.454.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 7	Ha	350	1.224.454.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				33.435.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 7	Dokumen	1	33.435.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				438.627.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 7	Ha	250	438.627.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				236.311.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 7	Ha	100	236.311.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				463.919.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 7	Unit	26	463.919.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				52.162.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK	Laporan	1	52.162.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8	%	0.04	966.058.000	CDK 8	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					966.058.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 8	Ha	145	966.058.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				6.687.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 8	Dokumen	1	6.687.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				246.299.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 8	Ha	90	246.299.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				201.420.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 8	Ha	52.5	201.420.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				369.338.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 8	Unit	16	369.338.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				50.153.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 8	Dokumen	1	50.153.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				92.161.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 8	Ha	3	92.161.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9	%	0.04	921.323.000	CDK 9	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					921.323.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 9	Ha	139	921.323.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				56.103.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 9	Dokumen	1	56.103.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				354.248.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 9	Ha	85	354.248.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				215.510.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 9	Ha	54	215.510.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				255.340.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 9	Unit	11	255.340.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				40.122.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 9	Dokumen	1	40.122.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	%	100	247.419.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					247.419.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan	Dokumen	1	247.419.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				247.419.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	Dokumen	1	247.419.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 1	%	100	79.244.000	CDK 1	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					79.244.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK1	Dokumen	1	79.244.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				79.244.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 1	Dokumen	1	79.244.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 10	%	100	53.400.000	CDK 10	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					53.400.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 10	Dokumen	1	53.400.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				53.400.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 10	Laporan	1	53.400.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 11	%	100	25.518.000	CDK 11	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					25.518.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 11	Dokumen	1	25.518.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				25.518.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 11	Dokumen	1	25.518.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 2	%	100	26.109.000	CDK 2	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					26.109.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK2	Dokumen	1	26.109.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				26.109.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 2	Dokumen	1	26.109.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 3	%	100	53.496.000	CDK 3	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					53.496.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK3	Dokumen	1	53.496.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				53.496.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 3	Laporan	1	53.496.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 4	%	100	37.400.000	CDK 4	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					37.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK4	Dokumen	1	37.400.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				37.400.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 4	Dokumen	1	37.400.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 5	%	100	50.000.000	CDK 5	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					50.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 5	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				50.000.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 5	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 6	%	100	91.931.000	CDK 6	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					91.931.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 6	Dokumen	1	91.931.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				91.931.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 6	Dokumen	1	91.931.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 7	%	100	57.000.000	CDK 7	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					57.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 7	Dokumen	1	57.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				57.000.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 7	Dokumen	1	57.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 8	%	100	50.153.000	CDK 8	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					50.153.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 8	Dokumen	1	50.153.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				50.153.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 8	Dokumen	1	50.153.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 9	%	100	47.000.000	CDK 9	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					47.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 9	Dokumen	1	47.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				47.000.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 9	Dokumen	1	47.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase peningkatan produksi bibit	%	-40	1.705.114.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
				Perbenihan Tanaman Hutan					1.705.114.000		
						Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi	Bibit	600000	1.496.053.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	
		3.28.03.1.09.0006			Pembangunan Sumber Benih				1.496.053.000		
						Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang diproduksi	Bibit	600000	1.207.323.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	
						Luas sumber benih yang dibangun	Ha	0.5	288.730.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	
						Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH	Sertifikat	75	209.061.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	
		3.28.03.1.09.0001			Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar				18.055.000		
						Jumlah rekomendasi teknis penetapan pengada/ pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	Dokumen	12	18.055.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0002			Sertifikasi Sumber Benih				14.715.000		
						Jumlah sertifikat sumber benih yang diterbitkan	Sertifikat	5	14.715.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0003			Sertifikasi Mutu Benih				23.405.000		
						Jumlah sertifikat mutu benih yang diterbitkan	Sertifikat	10	23.405.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0004			Sertifikasi Mutu Bibit				66.610.000		
						Jumlah sertifikat mutu bibit yang diterbitkan	Sertifikat	60	66.610.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0005			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit				86.276.000		
						Jumlah Data (Asal usul, jenis mutu) Benih Atau Bibit yang beredar	Dokumen	2	86.276.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	35.4	969.687.000		
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					404.563.000		
						Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan	Unit	70	404.563.000		
		3.28.03.1.03.0001			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				153.801.000		
						Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan berusaha pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi	Dokumen	4	153.801.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.03.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi				250.762.000		
						Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	Dokumen	12	250.762.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					230.774.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang	Unit	6	230.774.000		
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				150.530.000		
						Jumlah unit managemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit	6	150.530.000		
		3.28.03.1.06.0004			Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu				80.244.000		
						Jumlah unit managemen PBPHH HHBK skala kecil dan menengah yang tertib	Unit	2	80.244.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					334.350.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan	Unit	149	334.350.000		
		3.28.03.1.07.0001			Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				133.740.000		
						Jumlah unit managemen yang melaksanakan tertib pelaporan RKOPHH untuk pemegang PBPHH skala usaha kecil dan menengah	Unit	12	133.740.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				147.114.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPHH berkapasitas 2.000-6.000 m3/tahun	Unit	12	147.114.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07.0003			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			53.496.000		
						Jumlah permohonan PBPHH kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	Unit	12	53.496.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 1	%	1.38	398.034.000	CDK 1	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					300.939.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK1	Unit	5	300.939.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				300.939.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di wilayah CDK 1	Unit	5	300.939.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					97.095.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK1	Unit	11	97.095.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				97.095.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 1	Unit	11	97.095.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 10	%	1.03	147.267.000	CDK 10	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					107.050.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 10	Unit	3	107.050.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				107.050.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 10	Unit	3	107.050.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					40.217.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 10	Unit	9	40.217.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				40.217.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 10	Unit	9	40.217.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 11	%	1.29	349.730.000	CDK 11	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					273.730.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 11	Unit	3	273.730.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				273.730.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 11	Unit	3	273.730.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					76.000.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 11	Unit	12	76.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				76.000.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 11	Unit	12	76.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 2	%	1.72	564.437.000	CDK 2	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					521.621.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 2	Unit	4	521.621.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				521.621.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 2	Unit	4	521.621.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					42.816.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 2	Unit	16	42.816.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				42.816.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 2	Unit	16	42.816.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 3	%	1.64	185.752.000	CDK 3	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					135.569.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK3	Unit	6	135.569.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				135.569.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 3	Unit	6	135.569.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					50.183.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK3	Unit	13	50.183.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				50.183.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 3	Unit	13	50.183.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 4	%	1.46	139.900.000	CDK 4	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					101.450.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK4	Unit	3	101.450.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				101.450.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 4	Unit	3	101.450.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					38.450.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK4	Unit	14	38.450.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				38.450.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 4	Unit	14	38.450.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 5	%	1.29	160.000.000	CDK 5	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					100.000.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 5	Unit	3	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				100.000.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 5	Unit	3	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					60.000.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 5	Unit	12	60.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				60.000.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 5	Unit	12	60.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 6	%	2.15	134.489.000	CDK 6	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					75.320.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 6	Unit	9	75.320.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				75.320.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 6	Unit	9	75.320.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					59.169.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 6	Unit	16	59.169.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				59.169.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 6	Unit	16	59.169.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 7	%	1.55	281.408.000	CDK 7	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					263.108.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 7	Unit	3	263.108.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				263.108.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 7	Unit	3	263.108.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					18.300.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 7	Unit	15	18.300.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				18.300.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 7	Unit	15	18.300.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 8	%	1.03	133.740.000	CDK 8	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					100.305.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 8	Unit	3	100.305.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				100.305.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasitasi CDK 8	Unit	3	100.305.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					33.435.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 8	Unit	9	33.435.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				33.435.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 8	Unit	9	33.435.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9	%	1.46	196.537.000	CDK 9	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					128.960.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 9	Unit	4	128.960.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				128.960.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 9	Unit	4	128.960.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					67.577.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 9	Unit	13	67.577.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				67.577.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 9	Unit	13	67.577.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						2.966.293.000		
						Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura	Angka	70	1.473.793.000	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
				Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi					1.473.793.000		
						Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Dokumen	2	804.259.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	
		3.28.04.1.01.0006			Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi				86.931.000		
						Jumlah permohonan pelayanan pemanfaatan di tahura yang ditindaklanjuti	Dokumen	50	86.931.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0007			Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi				96.962.000		
						Jumlah kerja sama penyelenggaraan tahura yag dilaksanakan	Dokumen	2	96.962.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0008			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi				120.366.000		
						Jumlah kelompok masyarakat sekitar tahura yang ditingkatkan / diberdayakan	Kelompok	1	120.366.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0011			Perencanaan Pengelolaan TAHURA				500.000.000		
						Jumlah dokumen rencana pengelolaan Tahura (Jangka panjang dan jangka pendek) yang ditetapkan	Dokumen	2	500.000.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Ha	231.3	669.534.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.01.0002			Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi				338.364.000		
						Operasi kegiatan pengamanan kawasan tahura provinsi	Bulan	12	338.364.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0003			Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi				134.170.000		
						Luas kawasan tahura yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Ha	20	134.170.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0005			Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi				197.000.000		
						Luas areal tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	Ha	10	197.000.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	%	10	86.931.000		
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					86.931.000		
						Jumlah pengendalian Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar	Dokumen	4	86.931.000		
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				86.931.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Laporan	4	86.931.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 1	%	5	32.101.000	CDK 1	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					32.101.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK1	Jenis	2	32.101.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				32.101.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 1	Dokumen	1	32.101.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 10	%	5	25.800.000	CDK 10	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					25.800.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 10	Jenis	2	25.800.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				25.800.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 10	Dokumen	1	25.800.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 11	%	5	53.496.000	CDK 11	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					53.496.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 11	Jenis	2	53.496.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				53.496.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 11	Dokumen	1	53.496.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 2	%	5	24.247.000	CDK 2	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					24.247.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK2	Jenis	2	24.247.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				24.247.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 2	Dokumen	1	24.247.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 3	%	5	66.870.000	CDK 3	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					66.870.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK3	Jenis	2	66.870.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				66.870.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 3	Dokumen	1	66.870.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 4	%	5	25.000.000	CDK 4	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					25.000.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK4	Jenis	2	25.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				25.000.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 4	Dokumen	1	25.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 5	%	5	26.748.000	CDK 5	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					26.748.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 5	Jenis	2	26.748.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				26.748.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 5	Dokumen	1	26.748.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 6	%	5	93.618.000	CDK 6	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					93.618.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 6	Jenis	2	93.618.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				93.618.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 6	Dokumen	1	93.618.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 7	%	5	15.485.000	CDK 7	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					15.485.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 7	Jenis	2	15.485.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				15.485.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 7	Dokumen	1	15.485.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 8	%	5	16.718.000	CDK 8	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					16.718.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 8	Jenis	2	16.718.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				16.718.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 8	Dokumen	1	16.718.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 9	%	5	101.560.000	CDK 9	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					101.560.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 9	Jenis	2	101.560.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				101.560.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 9	Dokumen	1	101.560.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	%	40	364.533.000		
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					364.533.000		
						Jumlah Pengendalian pengelolaan Konservasi ekosistem	Dokumen	7	364.533.000		
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				364.533.000		
						Jumlah dokumen perencanaan/pengendalian pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	Dokumen	7	364.533.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 1	%	100	19.545.000	CDK 1	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					19.545.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK1	Unit	1	19.545.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				19.545.000		
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 1	Kelompok	1	19.545.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 10	%	0		CDK 10	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam							
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 10	Unit	0		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 10	Kelompok	0		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 2	%	100	29.223.000	CDK 2	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					29.223.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK2	Unit	1	29.223.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				29.223.000		
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 2	Kelompok	1	29.223.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 3	%	100	68.104.000	CDK 3	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					68.104.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK3	Unit	1	68.104.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				68.104.000		
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 3	Kelompok	2	68.104.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 4	%	100	81.882.000	CDK 4	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					81.882.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK4	Unit	1	81.882.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				81.882.000		
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 4	Kelompok	2	81.882.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 5	%	100	31.429.000	CDK 5	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					31.429.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 5	Unit	1	31.429.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				31.429.000		
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 5	Kelompok	2	31.429.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 6	%	100	66.870.000	CDK 6	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					66.870.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 6	Unit	1	66.870.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				66.870.000		
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 6	Kelompok	1	66.870.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 8	%	100	14.795.000	CDK 8	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					14.795.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 8	Unit	1	14.795.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				14.795.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 8	Kelompok	1	14.795.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 9	%	100	20.625.000	CDK 9	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					20.625.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 9	Unit	1	20.625.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				20.625.000		
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 9	Kelompok	1	20.625.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	%	100	226.920.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					226.920.000		
						Jumlah Jenis Tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	Jenis	705	226.920.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				226.920.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Dokumen	1	226.920.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						5.313.155.000		
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2.5	533.894.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					533.894.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya	Kelompok	25	533.894.000	SEKSI PENYULUHAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				113.794.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitas	Orang	90	113.794.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				296.390.000		
						Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi	Dokumen	2	296.390.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				123.710.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian Perhutanan Sosial	Dokumen	2	123.710.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1	%	0.3	472.308.000	CDK 1	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					472.308.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK1	Kelompok	3	472.308.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				74.049.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 1	Orang	60	74.049.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				268.785.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 1	Kelompok	130	268.785.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				129.474.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 1	Unit	5	129.474.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10	%	0.2	372.271.000	CDK 10	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					372.271.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 10	Kelompok	2	372.271.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				133.491.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 10	Orang	60	133.491.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				182.505.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 10	Kelompok	105	182.505.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				56.275.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 10	Unit	5	56.275.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11	%	0.2	146.149.000	CDK 11	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					146.149.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 11	Kelompok	2	146.149.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				43.466.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 11	Orang	60	43.466.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				38.488.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 11	Kelompok	57	38.488.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				64.195.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 11	Unit	5	64.195.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2	%	0.2	379.732.000	CDK 2	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					379.732.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK2	Kelompok	2	379.732.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				53.890.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 2	Orang	60	53.890.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				181.950.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 2	Kelompok	101	181.950.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				143.892.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 2	Kelompok	5	143.892.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3	%	0.2	453.044.000	CDK 3	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					453.044.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK3	Kelompok	2	453.044.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				51.398.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 3	Orang	60	51.398.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				231.723.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 3	Kelompok	109	231.723.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				169.923.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 3	Unit	5	169.923.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4	%	0.2	605.295.000	CDK 4	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					605.295.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 4	Kelompok	2	605.295.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				116.445.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 4	Orang	60	116.445.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				298.970.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 4	Kelompok	54	298.970.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				189.880.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 4	Unit	5	189.880.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5	%	0.3	540.231.000	CDK 5	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					540.231.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 5	Kelompok	3	540.231.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				78.907.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 5	Orang	60	78.907.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				227.279.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 5	Kelompok	75	227.279.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				234.045.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 5	Unit	5	234.045.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6	%	0.2	422.146.000	CDK 6	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					422.146.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 6	Kelompok	2	422.146.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				53.496.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 6	Orang	60	53.496.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				198.040.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 6	Kelompok	107	198.040.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				170.610.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 6	Unit	5	170.610.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7	%	0.3	537.804.000	CDK 7	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					537.804.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 7	Kelompok	3	537.804.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				60.183.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 7	Orang	60	60.183.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				390.690.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 7	Kelompok	121	390.690.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				86.931.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 7	Unit	5	86.931.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8	%	0.2	525.082.000	CDK 8	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					525.082.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 8	Kelompok	2	525.082.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				73.557.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 8	Orang	60	73.557.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				384.655.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 8	Kelompok	72	384.655.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				66.870.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 8	Unit	5	66.870.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9	%	0.2	325.199.000	CDK 9	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					325.199.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 9	Kelompok	2	325.199.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				103.649.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 9	Orang	60	103.649.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				184.616.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 9	Kelompok	69	184.616.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				36.934.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 9	Unit	5	36.934.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						551.982.000		
						Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	%	10	551.982.000		
				Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					551.982.000		
						Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya	Unit	5	418.242.000		
		3.28.06.1.01.0002			Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS				150.610.000		
						Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Dokumen	10	150.610.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.06.1.01.0004			Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				267.632.000		
						Jumlah kelompok yang diberdayakan dalam pengelolaan DAS	Kelompok	5	267.632.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS	Dokumen	2	133.740.000		
		3.28.06.1.01.0001			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS				66.870.000		
						Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	Dokumen	1	66.870.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.06.1.01.0005			Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS				66.870.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah lembaga yang dibentuk dan/atau dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Unit	8	66.870.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas udara									**8.127.188.000**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	
						Indeks Kualitas Udara	Angka	85.01		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Menurunnya pencemaran udara								**8.127.188.000**		
						Indeks SO2 dan NO2	Angka	0.3698	8.127.188.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						2.714.985.000		
						Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya	%	2.85	1.197.361.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					1.197.361.000		
						Jumlah penurunan emisi grk di tingkat tapak	tCO2e	20000	1.107.361.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				1.107.361.000		
						Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen	1	126.439.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi aksi mitigasi/adaptasi perubahan iklim yang teregistrasi	Lokasi	100	980.922.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu udara emisi	Unit	100	90.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.1.01.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				90.000.000		
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran udara	Unit	135	90.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemantauan kualitas udara	%	100	784.554.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					784.554.000		
						Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara	Dokumen	1	784.554.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				784.554.000		
						Jumlah titik pengujian kualitas udara	sampel	1150	784.554.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	%	100	733.070.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					733.070.000		
						Jumlah Laporan Penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	Dokumen	1	733.070.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.0015			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi				733.070.000		
						Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi berdasarkan sistem mutu laboratorium lingkungan	Dokumen	72	356.070.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peralatan laboratorium yang terpelihara / terkalibrasi	Unit	70	377.000.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						1.538.667.000		
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	2.02	798.752.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi					798.752.000		
						Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani	Ha	50	798.752.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.04.1.01.0001			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				94.153.000		
						Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun / ditetapkan / dievaluasi	Dokumen	1	94.153.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.04.1.01.0004			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				554.483.000		
						Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	50	554.483.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.04.1.01.0006			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				150.116.000		
						Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Kehati	Orang	60	150.116.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden	%	2.6	739.915.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi					739.915.000		
						Jumlah unit pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden	Unit	2	739.915.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		2.11.04.1.01.0003			Pengelolaan Kebun Raya				739.915.000		
						Luas Kebun Raya yang dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	143.5	739.915.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						1.904.836.000		
						Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah	%	31.43	664.471.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					664.471.000		
						Jumlah Kab/Kota yang ditingkatnkan kapasitas pengurangan sampah	Kabupaten/Kota	1	664.471.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
		2.11.08.1.01.0005			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				664.471.000		
						Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat yang meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait pengurangan sampah	Kelompok	1	664.471.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
						Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	%	25	206.925.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					206.925.000		
						Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok)	Unit	2	206.925.000	SEKSI PENYULUHAN	
		2.11.08.1.01.0003			Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				206.925.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	Orang	400	206.925.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya	%	10.5	1.033.440.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					1.033.440.000		
						Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliaannya	Unit	158	1.033.440.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.08.1.01.0002			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				599.150.000		
						Jumlah sekolah peduli lingkungan	Unit	155	599.150.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.08.1.01.0005			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				434.290.000		
						Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Unit	3	434.290.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						1.968.700.000		
						Persentase sampah yang tertangani	%	42	1.968.700.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					1.968.700.000		
						Jumlah sampah tertangani	Ton	3388861	1.968.700.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
		2.11.11.1.01.0003			Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional						
						Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	0		SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.11.1.01.0005			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				1.968.700.000		
						Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan	Dokumen	1	1.968.700.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									**188.066.328.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Desa Mandiri									**4.750.000.000**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
						Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah	%	0.7318		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Kemandirian Desa di Jawa Tengah								**4.750.000.000**		
						Persentase Desa Mandiri di Jawa Tengah	%	6.16	4.750.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA								
						Presentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa	%	100		Bidang Penataan Desa	
				Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat							
						Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam rangka Penataan Desa	Desa	0		SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	
		2.13.02.1.01.0003			Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa						
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen	1		SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						675.000.000		
						Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)	%	6.85	675.000.000	Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa	
				Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi					675.000.000		
						Jumlah kerjasama yang di fasilitasi dalam pelaksanaan Kerjasama Desa	Buah	1	200.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA	
		2.13.03.1.01.0002			Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				200.000.000		
						jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama Desa yang Dilaksanakan	Dokumen	1	200.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA	OPD Provinsi
						Jumlah pengembangan kerjasama antar kawasan perdesaan di Jawa Tengah yang terfasilitasi	Kws	1	475.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	
		2.13.03.1.01.0003			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				475.000.000		
						jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	475.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	OPD Provinsi
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						1.625.000.000		
						Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa	%	100	600.000.000	Bidang Penataan Desa	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					600.000.000		
						Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi	Kabupaten/ Kota	35	220.000.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	
		2.13.04.1.01.0007			Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						
						Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dokumen	1		SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi
		2.13.04.1.01.0008			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				220.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	220.000.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Desa di Jawa Tengah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas Desa	Desa	15	50.000.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	
		2.13.04.1.01.0016			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi
						Jumlah Desa yang termonitor dalam penyusunan produk hukum desa	Desa	0		SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA	
		2.13.04.1.01.0003			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa						
						Jumlah dokumen hasil fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	1		SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA	OPD Provinsi
						Jumlah dokumen regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa yang difasilitasi dan direkomendasikan	Dokumen	50	330.000.000	SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA	
		2.13.04.1.01.0001			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa				330.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang Mengatur Desa	Dokumen	1	330.000.000	SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA	OPD Provinsi
						Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa	%	100	1.025.000.000	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					1.025.000.000		
						Jumlah ajuan dokumen tukar menukar tanah kas Desa yang difasilitasi dan direkomendasi	Dokumen	50	250.000.000	SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA	
		2.13.04.1.01.0006			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				250.000.000		
						Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	250.000.000	SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA	OPD Provinsi
						Jumlah anggota BPD yang dilatih dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Orang	0		SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	
		2.13.04.1.01.0011			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						
						Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas anggota BPD dalam manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	0		SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	OPD Provinsi
						Jumlah aparatur Kabupaten dan Kecamatan yang dilatih dalam penguatan manajemen Pemerintahan Desa	Orang	29	25.000.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	
		2.13.04.1.01.0002			Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				25.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1	25.000.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	OPD Provinsi
						Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan keuangan Desa	Orang	29	50.000.000	SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA	
		2.13.04.1.01.0005			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				50.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA	OPD Provinsi
						Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana pada Pemerintahan Desa	Kabupaten/Kota	29	500.000.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	
		2.13.04.1.01.0012			Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				500.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pembinaan percepatan pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan Desa	Dokumen	1	500.000.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	OPD Provinsi
						Jumlah Desa di Jawa Tengah yang menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik	Desa	10	200.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA	
		2.13.04.1.01.0018			Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota				200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen hasil fasilitasi pencatatan data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten	Dokumen	1	200.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA	OPD Provinsi
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						2.450.000.000		
						Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	8.96	525.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					525.000.000		
						Jumlah BUMDes dengan klasifikasi tumbuh/pemula dan berkembang yang di fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolanya	Unit	270	525.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	
		2.13.05.1.01.0005			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				525.000.000		
						Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa	Dokumen	1	525.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	OPD Provinsi
						Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya	%	100	1.775.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.775.000.000		
						Jumlah anggota LPMD/K di Jawa Tengah yang dilatih peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat	Orang	150	225.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.13.05.1.01.0002			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				225.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Dokumen	1	225.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
						Jumlah anggota Pokjanal Posyandu yang difasilitasi peningkatan kapasitas	Orang	35	50.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	
		2.13.05.1.01.0003			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	OPD Provinsi
						Jumlah Lembaga Adat/Satgas Pelestari Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	0		SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.13.05.1.01.0001			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat						
						Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	Dokumen	1		SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
						Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten/Kota	35	1.500.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	
		2.13.05.1.01.0009			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1.500.000.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Dokumen	1	1.500.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	OPD Provinsi
						Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	%	100	150.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		
						Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Jawa Tengah	Kali	1	100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.13.05.1.01.0007			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				100.000.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Dokumen	1	100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
						Jumlah Posyantek yang di fasilitasi revitalisasi peran dan fungsinya dalam pemanfaatan TTG di Jawa Tengah	Unit	0	50.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	
		2.13.05.1.01.0006			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				50.000.000		
						Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**18.535.714.000**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	70		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah								**18.105.714.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Dispermades	Angka	84.75	18.105.714.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18.105.714.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	18.105.714.000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.547.776.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	14.547.776.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.172.776.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	80	14.172.776.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				375.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	375.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0004			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						
						Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada PD	Bulan	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					745.438.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	745.438.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	10	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya penyediaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000		
						Jumlah Bulan Tercukupinya kebutuhan perlengkapan pendukung perkantoran	Bulan	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.438.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	10.438.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	4		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.152.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	2.152.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				547.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	547.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.575.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	1.575.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					560.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12	560.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				185.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	20	185.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				30.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah								**430.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Dispermades	Nilai	3	430.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						430.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	430.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					430.000.000		
						Jumlah jenis dokumen perencanaan, dan evaluasi yang disusun sesuai peraturan perundangan/jumlah jenis dokumen perencanaan, evaluasi yang disusun	%	100	430.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				300.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Dispermades yang tersusun	Dokumen	5	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				130.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja Dispermades yang tersusun	Dokumen	5	130.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									**700.000.000**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah	Nilai	4		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan								**700.000.000**		
						Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTPel, KIA, akta kelahiran dan buku pokok pemakaman) di Jawa Tengah	%	76	700.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						240.000.000		
						Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	97	240.000.000	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk	
				Pelayanan Pendaftaran Kependudukan					240.000.000		
						Persentase penduduk yang terfasilitasi perekaman KTP-el	%	98	240.000.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	
		2.12.02.1.01.0003			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				240.000.000		
						Jumlah dokumen hasil tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Provinsi	Dokumen	1	240.000.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	OPD Provinsi
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						220.000.000		
						Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98%	%	97	220.000.000	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk	
				Pelayanan Pencatatan Sipil					220.000.000		
						Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi Akta Kelahiran	%	97	220.000.000	SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL	
		2.12.03.1.01.0002			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi				220.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi	Dokumen	1	220.000.000	SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL	OPD Provinsi
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						240.000.000		
						Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	16.67	240.000.000	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk	
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					240.000.000		
						Persentase Institusi/Lembaga/Badan Hukum yang difasilitasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	100	240.000.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	
		2.12.04.1.03.0001			Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				240.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi	Dokumen	1	240.000.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	OPD Provinsi
JUMLAH									**23.985.714.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**63.544.745.000**	**Dinas Perhubungan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	78.28		Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**63.198.145.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80.25	63.198.145.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						63.198.145.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)	%	100	200.200.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					105.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				44.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	44.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					43.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				43.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	21	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	%	100	112.112.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	5	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					62.112.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	62.112.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	35.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.612.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.612.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)	%	100	138.840.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					72.840.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	72.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.840.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	9.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	11	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)	%	100	148.200.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					77.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	77.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.200.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	14.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				25.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	8	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	7	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	%	100	161.900.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					88.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	88.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				38.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	38.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					26.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				26.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	16	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	%	100	134.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	74.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				36.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	36.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					38.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	9	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	8	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	%	100	306.000.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					41.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	41.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					252.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	7	252.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				200.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat)	%	100	61.996.893.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					46.370.662.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	46.370.662.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				45.580.462.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	300	45.580.462.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				720.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	720.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				70.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	70.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.155.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1.155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.155.000.000		
						Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1.155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					125.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				105.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	150	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.145.900.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.145.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	48.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				112.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	112.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	40	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.590.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	1.590.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				60.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	8		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					11.062.931.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	11.062.931.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.589.225.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.589.225.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.469.706.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	9.469.706.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.137.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	283	1.137.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				687.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	73	687.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	24	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	92	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	93	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**346.600.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.2	346.600.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						346.600.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	346.600.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					346.600.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	346.600.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				261.600.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	261.600.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	85.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi									**129.119.076.000**	**Dinas Perhubungan**	
						Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6.053		Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah								**6.574.474.000**		
						Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	16.098	6.574.474.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						5.267.608.000		
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.81	404.650.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					404.650.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Unit	21596	404.650.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				363.800.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	363.800.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				40.850.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	40.850.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.81	115.950.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					115.950.000		
						Jumlah total kendaraan yang di ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Unit	989	115.950.000	KEPALA BALAI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				95.950.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	95.950.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				20.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	20.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.81	210.625.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					210.625.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Unit	2229	210.625.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				185.625.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	185.625.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				25.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	25.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.81	197.800.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					197.800.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Unit	6734	197.800.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				167.800.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	167.800.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				30.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.81	251.990.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					251.990.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Unit	3485	251.990.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				221.990.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	221.990.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				30.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.81	195.500.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					195.500.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Unit	3998	195.500.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				165.500.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	165.500.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				30.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	30.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.98	433.440.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					433.440.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.22	433.440.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				198.480.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	78	198.480.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				234.960.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	2	234.960.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.97	330.300.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					330.300.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.13	330.300.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				121.680.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	46	121.680.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				208.620.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	2	208.620.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.97	332.253.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					332.253.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.06	332.253.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				145.680.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	56	145.680.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				186.573.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	1	186.573.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.97	466.840.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					466.840.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.07	466.840.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				145.680.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	56	145.680.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				321.160.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	1	321.160.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.97	399.040.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					399.040.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.2	399.040.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				136.080.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	52	136.080.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				262.960.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	5	262.960.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.98	335.700.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					335.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.25	335.700.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				150.480.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	58	150.480.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				185.220.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	1	185.220.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Angka	0.981	235.000.000	Bidang Lalu Lintas	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					235.000.000		
						Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah	Unit	438363	235.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.07.0004			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				200.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	135	200.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				35.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	66	35.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0.38	1.358.520.000	Bidang Lalu Lintas	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					1.167.200.000		
						Rasio perlengkapan jalan terpasang	Angka	0.63	1.167.200.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	
		2.15.02.1.02.0002			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				1.167.200.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	154	1.167.200.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					116.320.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	Kabupaten/Kota	15	46.320.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	
		2.15.02.1.05.0003			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				46.320.000		
						Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	30	46.320.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ	Dokumen	12	70.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.05.0005			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				70.000.000		
						Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	6	70.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi					75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah rekomendasi / persetujuan andalalin di Jalan provinsi	Dokumen	329	75.000.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	
		2.15.02.1.06.0006			Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin				75.000.000		
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	58	75.000.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						40.000.000		
						Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Angka	0.2	40.000.000	Bidang Pelayaran	
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					40.000.000		
						Rasio fasilitas keselamatan penyeberangan sungai terpenuhi	Angka	0.11	40.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	
		2.15.03.1.10.0009			Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				40.000.000		
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia Provinsi	Unit	28	40.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN						1.266.866.000		
						Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0.04	1.266.866.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian					1.266.866.000		
						Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian	Angka	0.341	1.266.866.000	SEKSI PERKERETAAPIAN	
		2.15.05.1.01.0002			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian						
						Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen	0		SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi
		2.15.05.1.01.0003			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian				1.266.866.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	3	1.266.866.000	SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya konektivitas provinsi								**7.039.578.000**		
						Rasio konektivitas provinsi	Angka	0.38	7.039.578.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						6.620.478.000		
						Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Angka	0.5	80.000.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi					80.000.000		
						Rasio implementasi dokumen RIJLLAJ	Angka	0.47	80.000.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI	
		2.15.02.1.01.0007			Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				80.000.000		
						Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Laporan	2	80.000.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.2	160.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					160.000.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.25	160.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				160.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	160.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.01	50.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					50.000.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.25	50.000.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				50.000.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	50.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.24	100.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					100.000.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.25	100.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				100.000.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	100.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.23	50.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					50.000.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.25	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				50.000.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.21	160.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					160.000.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.25	160.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				160.000.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	160.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.17	50.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					50.000.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.25	50.000.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				50.000.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	50.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Rasio konektivitas perkotaan	Angka	0.481	874.690.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					874.690.000		
						Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	Angka	0.61	874.690.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	
		2.15.02.1.02.0002			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				874.690.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	6	874.690.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Rasio pemanfatan terminal	Angka	0.218	4.605.000.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					4.605.000.000		
						Rasio terminal tipe B dalam kondisi baik	Angka	0.37	4.605.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.03.0001			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				105.000.000		
						Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	1	105.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		2.15.02.1.03.0007			Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1.000.000.000		
						Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	1	1.000.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		2.15.02.1.03.0010			Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				3.500.000.000		
						Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	1	3.500.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; PURWOREJO --> KUTOARJO --> KELURAHAN KUTOARJO
						Rasio trayek angkutan jalan	Angka	0.51	490.788.000	Bidang Angkutan Jalan	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					40.000.000		
						Rasio angkutan barang yang berijin	Angka	0.3	40.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.08.0003			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				40.000.000		
						Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi D	Unit	216	40.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					160.788.000		
						Rasio kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Angka	0.71	160.788.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	
		2.15.02.1.09.0001			Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				90.500.000		
						Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan kewenangan provinsi	Dokumen	1	90.500.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.02.1.09.0002			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				70.288.000		
						Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan provinsi	Dokumen	7	70.288.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					115.000.000		
						Rasio jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	Angka	0.04	115.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	
		2.15.02.1.11.0001			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi				80.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi D	Dokumen	1	80.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		2.15.02.1.11.0002			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi				35.000.000		
						Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	35.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					100.000.000		
						Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	Angka	0.55	100.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.13.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				100.000.000		
						Jumlah angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit	22	100.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					35.000.000		
						Rasio angkutan taksi terpenuhi	Angka	0.43	35.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.14.0004			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				35.000.000		
						Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit	76	35.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					40.000.000		
						Rasio trayek yang ditetapkan pemukhtahiran tarif	Angka	1	40.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.15.0003			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				40.000.000		
						Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	40.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						419.100.000		
						Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	Angka	0.31	419.100.000	Bidang Pelayaran	
				Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam					60.000.000		

				Daerah Provinsi yang Bersangkutan							
						Rasio dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasrkan tingkatannya	Angka	0.2	60.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	
		2.15.03.1.03.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				60.000.000		
						Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	Unit	2	60.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas					70.000.000		
						Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	Angka	0.12	70.000.000	SEKSI ANGKUTAN LAUT	
		2.15.03.1.06.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				70.000.000		
						Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikDO :	Dokumen	8	70.000.000	SEKSI ANGKUTAN LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional					79.100.000		
						Berth occupancy ratio	Angka	0.44	79.100.000	SEKSI KEPELABUHANAN	
		2.15.03.1.09.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				79.100.000		
						Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian perizinan	Unit	8	79.100.000	SEKSI KEPELABUHANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.03.1.09.0003			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional						
						Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	0		SEKSI KEPELABUHANAN	OPD Provinsi
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					210.000.000		
						Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi	Angka	0.48	210.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.15.03.1.10.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				210.000.000		
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Laporan	1	210.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		2.15.03.1.10.0002			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	Unit	0		SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi
		2.15.03.1.10.0003			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaanara	Unit	0		SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum								**115.505.024.000**		
						On Time Performance layanan transportasi	%	83.22	115.505.024.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						115.505.024.000		
						Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	65.38	924.955.000	Bidang Angkutan Jalan	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					924.955.000		
						Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani	Orang	27014404	924.955.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.08.0002			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				924.955.000		
						Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	3	924.955.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perpindahan moda angkutan umum	%	51.72	114.580.069.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					114.580.069.000		
						Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan	Orang	6810676	114.580.069.000	SEKSI OPERASIONAL	
		2.15.02.1.08.0003			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				114.580.069.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	115	114.580.069.000	SEKSI OPERASIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**192.663.821.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan									**41.223.881.000**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3.07		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital Jawa Tengah								**2.000.000.000**		
						Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	636	2.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						2.000.000.000		
						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	%	25	2.000.000.000	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					1.040.000.000		
						Meningkatnya Ketersediaan Layanan yang Menerapkan Prinsip SMKI dan sumber daya pendukung yang memadai	%	20	1.040.000.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	
		2.21.02.1.01.0001			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi				221.200.000		
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	221.200.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi
		2.21.02.1.01.0002			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				283.500.000		
						Jumlah SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	100	283.500.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi
		2.21.02.1.01.0003			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				169.900.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	Laporan	20	169.900.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi
		2.21.02.1.01.0004			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				365.400.000		
						80% Perangkat Daerah Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	%	20	365.400.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi					960.000.000		
						Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Jaring Komunkasi Sandi	%	25	960.000.000	SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH	
		2.21.02.1.02.0001			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi				960.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik melalui Jaring Komunikasi Sandi	%	30	960.000.000	SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH	OPD Provinsi
	Meningkatnya Layanan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah								**37.966.552.000**		
						Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	3.62	9.252.779.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						9.252.779.000		
						Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	72	9.252.779.000	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					5.490.000.000		
						Tersedianya Domain dan SubDomain yang Aktif	Angka	1	5.490.000.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	
		2.16.03.1.01.0001			Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi				15.000.000		
						Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Buah	1	15.000.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.16.03.1.01.0002			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				75.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	1	75.000.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.16.03.1.01.0003			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				5.400.000.000		
						Jumlah Kapasitas Bandwidth(Mbps)	Angka	10000	5.400.000.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					3.762.779.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi layanan Pusat Data	OPD	41	3.273.279.000	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	
		2.16.03.1.02.0003			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah				3.273.279.000		
						Jumlah Server pada Pusat Data yang digunakan untuk sistem layanan terintegrasi	Buah	24	3.273.279.000	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.16.03.1.02.0008			Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah						
						Jumlah VPS atau Cloud Server yang terintegrasi dengan Pusat Data	Buah	135		SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah regulasi/SOP layanan Infrastruktur TIK	Dokumen	1	489.500.000	SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	
		2.16.03.1.02.0006			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				289.500.000		
						Jumlah regulasi/SOP yang tersosialisasikan	Dokumen	1	289.500.000	SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.16.03.1.02.0010			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				200.000.000		
						Jumlah SDM Pengelola Layanan Infrastruktur TIK	Orang	8	200.000.000	SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	2.8	4.190.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						4.190.000.000		
						Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	%	15	4.190.000.000	Bidang E-Government	
				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					4.190.000.000		
						Persentase Aplikasi Umum yang Terkelola	%	24	3.190.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	
		2.16.03.1.02.0007			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				3.190.000.000		
						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan atau Dikelola	Angka	10	3.190.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	
						Persentase Dokumen Tata Kelola e-Government yang diterbitkan	%	30	700.000.000	SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.16.03.1.02.0001			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				700.000.000		
						Jumlah Dokumen Tata Kelola Teknologi Informasi yang Diterbitkan	Angka	5	700.000.000	SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	
						Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem e-Government yang terintegrasi	%	15	300.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	
		2.16.03.1.02.0009			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas				300.000.000		
						Jumlah OPD atau Instansi yang mengimplementasikan inisiasi Smart Province sesuai Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas	Angka	10	300.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	
						Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya	%	100	24.523.773.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						24.523.773.000		
						Nilai keterbukaan informasi publik	Angka	31	2.383.000.000	Bidang Statistik	
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					2.383.000.000		
						Persentase Badan Publik yang Terbuka (Informatif)	%	76	2.383.000.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0006			Pelayanan Informasi Publik				583.000.000		
						Jumlah Daftar Informasi Publik Yang Dipublikasikan Badan Publik	Dokumen	82	583.000.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.16.02.1.01.0011			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1.800.000.000		
						Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi	%	86	1.800.000.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai survey kepuasan komunikasi publik	Angka	78	22.140.773.000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					22.140.773.000		
						Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan	Kelompok	60	6.100.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0010			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				350.000.000		
						Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Kelompok	20	350.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0012			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				5.750.000.000		
						Jumlah komunitas yang dikoordinasikan	Kelompok	40	5.750.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
						Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan	Konten	170	10.120.000.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0004			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				2.015.500.000		
						Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan	Konten	25	2.015.500.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0005			Pengelolaan Media Komunikasi Publik				4.696.600.000		
						Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Internal	Konten	65	4.696.600.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0007			Layanan Hubungan Media				823.910.000		
						Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Eksternal	Konten	40	823.910.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0008			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				2.583.990.000		
						Jumlah Konten yang Dikerjasamakan Dengan Pemangku Kepentingan	Konten	40	2.583.990.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
						Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum	Dokumen	173	5.920.773.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0002			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				751.327.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah rekomendasi analisis pendapat umum	Dokumen	80	751.327.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0003			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				1.283.816.000		
						Jumlah Rekomendasi Analisis Berita	Dokumen	90	1.283.816.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0009			Manajemen Komunikasi Krisis				3.885.630.000		
						Jumlah rekomendasi analisis agenda publik	Dokumen	3	3.885.630.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
	Meningkatnya Pelayanan Data Statistik Sektoral dan Geospasial								**1.257.329.000**		
						Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah	%	32	1.257.329.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						1.257.329.000		
						Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	%	24	1.257.329.000	Bidang Statistik	
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi					1.257.329.000		
						Persentase Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi	%	30	502.000.000	SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	
		2.20.02.1.01.0002			Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				502.000.000		
						Jumlah SDM yang mampu melakukan pengolahan data statistik dan geospasial	Angka	190	502.000.000	SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi
		2.20.02.1.01.000			Pengembangan Infrastruktur						
						Jumlah Infrastruktur Statistikyang Disediakan/Dikembangkan	Angka	0		SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Big Data	%	24	755.329.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
		2.20.02.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				197.500.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral dan Geospasial yang terkumpul melalui Portal Data	Angka	50	197.500.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.20.02.1.01.0003			Membangun Metadata Statistik Sektoral				253.000.000		
						Jumlah Metadata Statistik Sektoral dan Gespasial yang Dihimpun	Angka	40	253.000.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.20.02.1.01.0004			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						
						Jumlah PD yang terlibat dalam pengukuran pembangunanstatistik (IPS)	OPD	0		SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	OPD Provinsi
		2.20.02.1.01.0006			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah				304.829.000		
						Jumlah Analisis Statistik Sektoral dan Geospasial	Angka	4	304.829.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**27.186.611.000**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	68		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**26.536.611.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78	26.536.611.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						26.536.611.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	26.536.611.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.486.611.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	20.486.611.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.004.611.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	115	20.004.611.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				362.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	362.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				40.000.000		
						Jumlah laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	40.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				40.000.000		
						Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan	Dokumen	2	40.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				40.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	18	40.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					215.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selama satu tahun anggaran	Dokumen	3	215.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				185.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	185.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah, termasuk dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					110.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan selama satu tahun anggaran	%	100	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				20.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				75.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	10	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					891.200.000		
						Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran	%	100	891.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		
						jumlah barang peralatan rumah tangga yang disediakan	Buah	452	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				60.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	3	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.830.000		
						jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	20	4.830.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				99.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	75	99.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				511.870.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	100	511.870.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah, selama satu tahun anggaran	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				30.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.930.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun oleh perangkat daerah, selama satu tahun anggaran	Laporan	4	3.930.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.261.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1.261.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	19.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.640.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	5	2.640.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					873.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran	Unit	239	873.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				320.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	320.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	50	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				410.000.000		
						umlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	410.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				130.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**650.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	650.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						650.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	3	650.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					650.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	650.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				450.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	450.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	200.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									**68.410.492.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB									**33.396.589.000**		
						Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	12.53			
	Meningkatnya Koperasi Sehat Jawa Tengah								**2.500.000.000**		
						Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah	%	0.29	2.500.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						2.500.000.000		
						Persentase koperasi berkualitas	%	25.02	2.500.000.000	Bidang Pengawasan	
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.350.000.000		
						Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diperiksa	%	100	1.350.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
		2.17.03.1.01.0003			Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				1.350.000.000		
						Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit	140	1.350.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.150.000.000		
						Persentase Koperasi Simpan Pinjam Provinsi yang sudah diperiksa	%	100	1.150.000.000	SEKSI PENILAIAN KESEHATAN	
		2.17.03.1.02.0002			Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1.150.000.000		
						Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit	400	1.150.000.000	SEKSI PENILAIAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Omzet Koperasi dan UMKM Jawa Tengah								**30.896.589.000**		
						Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah	%	7.16	30.896.589.000		
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						6.513.853.000		
						Persentase SDM koperasi yang berkualitas	%	10	6.513.853.000	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					6.513.853.000		
						Persentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya	%	89	6.513.853.000	SEKSI PENYELENGGARA	
		2.17.05.1.01.0001			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				6.513.853.000		
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	1350	6.513.853.000	SEKSI PENYELENGGARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						8.901.787.000		
						Persentase koperasi provinsi produktif	%	48.09	8.901.787.000	Bidang Kelembagaan	
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					8.901.787.000		
						Persentase Jumlah Koperasi Provinsi yang mengalami peningkatan usahanya	%	36	2.166.901.000	SEKSI TATALAKSANA	
		2.17.06.1.01.0002			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				1.933.550.000		
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah,Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit	249	1.933.550.000	SEKSI TATALAKSANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.17.06.1.01.0006			Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				233.351.000		
						Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit	10	233.351.000	SEKSI TATALAKSANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.17.06.1.01.0008			Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
						Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit			SEKSI TATALAKSANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Presentase Koperasi Provinsi yang mengalami penguatan manajemen dan kelembagaannya	%	26.5	6.734.886.000	SEKSI ORGANISASI	
		2.17.06.1.01.0004			Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				494.405.000		
						Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok	10	494.405.000	SEKSI ORGANISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.17.06.1.01.0007			Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				444.788.000		
						Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Unit	100	444.788.000	SEKSI ORGANISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.17.06.1.01.0009			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				5.795.693.000		
						Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit	150	5.795.693.000	SEKSI ORGANISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						9.072.340.000		
						Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	23	1.350.000.000	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					1.350.000.000		
						Persentase SDM UMKM dan Wirausaha yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan usahanya	%	95.41	1.350.000.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.17.07.1.01.0002			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan				1.350.000.000		
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	1050	1.350.000.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase usaha mikro mandiri	%	81.2	7.722.340.000		
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					7.722.340.000		
						Persentase Usaha Mikro yang meningkat kapasitas usahanya	%	93.22	6.060.520.000		
		2.17.07.1.01.0001			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				1.058.940.000		
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit	240	1.058.940.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		2.17.07.1.01.0010			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil				149.791.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit	30	149.791.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.17.07.1.01.0011			Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha				3.252.295.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit	500	3.252.295.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.17.07.1.01.0012			Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil				1.599.494.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit	730	1.599.494.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Usaha Mikro yang meningkat pembiayaannya	%	93.81	1.661.820.000		
		2.17.07.1.01.0007			Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				1.661.820.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit	660	1.661.820.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						6.408.609.000		
						Persentase UMKM siap bermitra	%	21.06	6.408.609.000		
				Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah					6.408.609.000		
						Persentase UMKM yang difasilitasi kemitraannya	%		543.760.000		
		2.17.08.1.01.0001			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				543.760.000		
						Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar	Orang	70	543.760.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Usaha Kecil yang meningkat Produksi, Pengolahan, Pemasaran, Jaringan Usaha, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologinya	%	25	5.864.849.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.17.08.1.01.0001			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				3.068.704.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,Serta Desain dan Teknologi	Unit	385	3.068.704.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.08.1.01.0002			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM				234.859.000		
						Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	200	234.859.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.08.1.01.0003			Pengembangan Usaha Kecil				2.561.286.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit	150	2.561.286.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**29.442.181.000**	**Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**28.442.181.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89	28.442.181.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						28.442.181.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	4.577.280.000	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					440.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	440.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				65.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				145.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	145.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					80.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	46	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	6	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.587.180.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	3.587.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				883.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	883.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.657.580.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.657.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					470.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	81	470.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				18.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	2	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				302.100.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	302.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	50	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	23.864.901.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.154.447.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	38	17.154.447.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.289.447.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	7	16.289.447.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				495.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	495.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				155.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	155.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				40.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	12	40.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				175.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	175.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					110.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				110.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					158.070.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	158.070.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				73.070.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Paket	3	73.070.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.496.240.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.496.240.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				75.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				82.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	82.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				85.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				230.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	230.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				54.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	54.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				12.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				200.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.708.240.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	1.708.240.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000		
						Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					435.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	39	435.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				341.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	30	341.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				25.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	2	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				69.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	69.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.892.144.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	2.892.144.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.067.144.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.067.144.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					619.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	133	619.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				55.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	25	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	25	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				25.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	25	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				95.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	95.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				94.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	94.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**1.000.000.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	80	1.000.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.000.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%		1.000.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.000.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.000.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				540.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	540.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				460.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	460.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**62.838.770.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah									**18.793.728.000**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah								**18.489.381.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	80	18.489.381.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18.489.381.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	18.489.381.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.271.246.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	15.271.246.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.922.706.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	86	14.922.706.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				348.540.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	348.540.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					85.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				85.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					85.500.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	85.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				49.500.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	1	49.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				6.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					750.951.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	750.951.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				45.131.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	45.131.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				110.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				71.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	71.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				70.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				279.820.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	279.820.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	10.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	10.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.021.184.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	2.021.184.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				642.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	642.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.323.684.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.323.684.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					265.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	205	265.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	28	95.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	40	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	135	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Perangkat Daerah								**304.347.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	304.347.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						304.347.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	304.347.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					304.347.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	304.347.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				158.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	158.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				146.347.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	146.347.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan pertumbuhan penanaman modal									**5.489.128.000**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	
						Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan								**2.173.910.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	2.173.910.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						1.649.910.000		
						Persentase pemenuhan standar pelayanan	%	100	397.140.000	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan	
				Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					397.140.000		
						Persentase standar pelayanan sesuai ISO	%	80	163.101.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				163.101.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan Perizinan	Dokumen	1	123.101.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
						Jumlah Dokumen ISO yang diterapkan	Dokumen	1	40.000.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
						Presentase analisis pengembangan sarana prasarana layanan	%	100	234.039.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				234.039.000		
						Jumlah dokumen analisis pengembangan sarana prasarana layanan yang disusun	Orang	1	204.039.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja aparatur pelayanan	Dokumen	1	30.000.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
						Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	376.032.000	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan	
				Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					376.032.000		
						Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	376.032.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				376.032.000		
						Jumlah pelayanan fasilitasi penyelesaian pengaduan	Kali	60	55.120.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	
						Jumlah pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat	Kali	550	320.912.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	
						Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	90	876.738.000	Bidang Pelayanan Perizinan	
				Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					876.738.000		
						Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan	Dokumen	1000	294.060.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN	
		2.18.04.1.02.0007			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				263.380.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan	Unit	700	263.380.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN	
		2.18.04.1.02.0008			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				30.680.000		
						Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan	Kali	2	30.680.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN	
						Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan	Dokumen	1000	385.940.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
		2.18.04.1.02.0007			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				358.378.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan	Unit	700	358.378.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
		2.18.04.1.02.0008			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				27.562.000		
						Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan	Kali	2	27.562.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
						Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian	Dokumen	1000	196.738.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN	
		2.18.04.1.02.0007			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				170.378.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian	Unit	650	170.378.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN	
		2.18.04.1.02.0008			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				26.360.000		
						Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang perekonomian	Kali	2	26.360.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN	
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						524.000.000		
						Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	10	524.000.000	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
				Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi					524.000.000		
						Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Unit	1	355.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	
		2.18.06.1.01.0002			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				355.000.000		
						Jumlah dokumen analisis pengembangan aplikasi	Dokumen	1	355.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	
						Persentase data dan informasi penanaman modal yang dipublikasikan	%	100	169.000.000	SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	
		2.18.06.1.01.0002			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				169.000.000		
						Jumlah dokumen analisis data dan informasi penanaman modal	Dokumen	4	169.000.000	SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	
	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN								**3.315.218.000**		
						Persentase realisasi PMA dan PMDN	%	100	3.315.218.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						705.000.000		
						Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan	%	50	705.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					310.640.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	1	310.640.000	SEKSI PERENCANAAN	
		2.18.02.1.01.0001			Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				310.640.000		
						Jumlah Kajian Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	1	310.640.000	SEKSI PERENCANAAN	
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi					394.360.000		
						Jumlah Kajian IPRO Pengembangan Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang dipromosikan	Dokumen	1	394.360.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN	
		2.18.02.1.02.0005			Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi				394.360.000		
						Jumlah Kajian IPRO Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	1	394.360.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN	
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						1.100.000.000		
						Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	%	50	180.000.000	Bidang Promosi PM	
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					180.000.000		
						Jumlah kemitraan usaha yang dihasilkan	Dokumen	6	180.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA	
		2.18.03.1.01.0002			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				180.000.000		
						Jumlah fasilitasi kemitraan usaha	Kali	12	180.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA	
						Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	%	46	920.000.000	Bidang Promosi PM	
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					920.000.000		
						Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan	Dokumen	30	765.000.000	SEKSI PROMOSI	
		2.18.03.1.01.0002			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				707.500.000		
						Jumlah promosi penanaman modal	Kali	1	707.500.000	SEKSI PROMOSI	
		2.18.03.1.01.0003			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				57.500.000		
						Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun	Dokumen	1	57.500.000	SEKSI PROMOSI	
						Jumlah kepeminatan PMA/PMDN yang dilakukan pengawalan	Dokumen	30	155.000.000	SEKSI PEMBINAAN	
		2.18.03.1.01.0002			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				155.000.000		
						Jumlah fasilitasi dan/ atau monitoring kepeminatan PMA/PMDN	Kali	24	155.000.000	SEKSI PEMBINAAN	
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						1.510.218.000		
						Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%	20	1.510.218.000	Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM	
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					1.510.218.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disetujui	Unit	20000	161.470.000	SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	
		2.18.05.1.01.0005			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				161.470.000		
						Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan Penanaman Modal	Unit	2000	161.470.000	SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	
						Jumlah pelaku usaha dan/atau aparatur yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal	Orang	500	728.637.000	SEKSI PENGENDALIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.18.05.1.01.0006			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				728.637.000		
						Jumlah Pembinaan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kali	10	728.637.000	SEKSI PENGENDALIAN	
						Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan	Unit	150	450.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
		2.18.05.1.01.0004			Pengawasan Penanaman Modal				450.000.000		
						Jumlah kegiatan pengawasan kepatuhan ketentuan penanaman modal	Kali	75	450.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
						Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi	%	75	170.111.000	SEKSI PENGENDALIAN	
		2.18.05.1.01.0006			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				170.111.000		
						Jumlah laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal	Dokumen	10	170.111.000	SEKSI PENGENDALIAN	
JUMLAH									**24.282.856.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**48.708.773.000**		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	79.31			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**47.796.524.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75	47.796.524.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						47.796.524.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	42.190.568.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					27.628.568.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	27.628.568.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				26.578.568.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	170	26.578.568.000		
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.050.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1.050.000.000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					350.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	350.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				350.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	350.000.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					130.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	130.000.000		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0			
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	0			
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	30.000.000		
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	70	50.000.000		
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				50.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	30	50.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.957.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.957.000.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	100.000.000		
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	150.000.000		
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	100.000.000		
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	150.000.000		
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	100.000.000		
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				12.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	12.000.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				200.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	200.000.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.000.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	1.000.000.000		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000		
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				125.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dokumen	1	125.000.000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	50.000.000		
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0			
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	2	50.000.000		
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0			
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0			
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.020.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	10.020.000.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	20.000.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.250.000.000		
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	150.000.000		
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8.600.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	8.600.000.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.055.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	2.055.000.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				120.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	120.000.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				250.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	250.000.000		
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				35.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	12	35.000.000		
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	150.000.000		
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				100.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	12	100.000.000		
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.300.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	1.300.000.000		
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0			
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	100.000.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%		5.605.956.000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					125.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen		125.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				125.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	125.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					190.956.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%		190.956.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	40.000.000		
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000		
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.912.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	3.912.000		
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.444.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	6.444.000		
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.000.000		
						jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Dokumen	1	10.000.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.600.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	15.600.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	85.000.000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					300.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit		300.000.000		
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	3	150.000.000		
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				150.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	2	150.000.000		
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0			
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.298.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan		3.298.600.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.100.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	2.100.000.000		
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.138.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.138.600.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.691.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		1.691.400.000		
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	30.000.000		
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	100.000.000		
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit				
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.561.400.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.561.400.000		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**912.249.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.01	912.249.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						912.249.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	912.249.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					912.249.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	912.249.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				650.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	650.000.000		
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				262.249.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	262.249.000		
Meningkatkan Pembangunan Olahraga									**196.062.000.000**		
						Sport Development Index (SDI)	%	0.42			
	Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional kejuaraan Multievent								**194.462.000.000**		
						Peringkat nasional pada kejuaraan multievent	Peringkat	4	194.462.000.000		
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						194.462.000.000		
						Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	Orang	50	14.950.000.000		
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							
						Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan	Orang	50			
		2.19.03.1.01.0004			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan,						

					dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi						
						Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Orang	0			
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					750.000.000		
						Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	Orang	150	750.000.000		
		2.19.03.1.02.0004			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				500.000.000		
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	150	500.000.000		
		2.19.03.1.02.0006			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi				250.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	1	250.000.000		
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					14.200.000.000		
						Peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional	Orang		14.200.000.000		
		2.19.03.1.03.000			Seleksi Atlet Daerah				350.000.000		
						Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	500	350.000.000		
		2.19.03.1.03.0007			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				13.850.000.000		
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	280	13.850.000.000		
						Persentase peningkatan perolehan medali	%	28.18	179.512.000.000		
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					200.000.000		
						Peningkatan jumlah medali yang diperoleh pada jenjang pendidikan	Unit	50	200.000.000		
		2.19.03.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dokumen	1	200.000.000		
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					53.250.000.000		
						Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	Orang	500	53.250.000.000		
		2.19.03.1.02.0004			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				1.500.000.000		
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	1	1.500.000.000		
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	150			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.19.03.1.02.0005			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				350.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Dokumen	1	350.000.000		
		2.19.03.1.02.0006			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi				51.400.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	12	51.400.000.000		
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					126.062.000.000		
						Peningkatan jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional	Orang	120	126.062.000.000		
		2.19.03.1.03.0006			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				1.525.000.000		
						Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Orang	30	1.525.000.000		
		2.19.03.1.03.0007			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				1.350.000.000		
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	6000	1.000.000.000		
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	125	350.000.000		
		2.19.03.1.03.0008			Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				250.000.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	1	250.000.000		
		2.19.03.1.03.0009			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi				122.937.000.000		
						Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	700	122.937.000.000		
	Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat								**1.600.000.000**		
						Persentase tingkat kebugaran masyarakat	%	0.183	1.600.000.000		
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						1.600.000.000		
						Jumlah masyarakat yang bugar	Orang	750	1.600.000.000		
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					1.600.000.000		
						Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan	Unit	2	1.600.000.000		
		2.19.03.1.04.0003			Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	1	150.000.000		
		2.19.03.1.04.0005			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				1.450.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	4	1.450.000.000		
Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									**138.173.575.000**		
						Nilai tambah ekonomi kreatif	Rupiah	1686000000000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	8.01			
	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai kabupaten/kota kreatif								**825.000.000**		
						Jumlah kabupaten/kota kreatif	Kabupaten/	1	825.000.000		
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						825.000.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	Kabupaten/ Kota	6	825.000.000		
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif					625.000.000		
						Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang PMK3I	Kabupaten/	2	625.000.000		
		3.26.04.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				625.000.000		
						Penyediaan Sarana Prasarana Prasarana KaTa Kreatif	Unit	10	625.000.000		
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					200.000.000		
						Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi HKI	Orang	80	200.000.000		
		3.26.04.1.02.0008			Perlindungan Hasil Kreativitas				200.000.000		
						Dokumen Perlindungan Hasil kreativitas yang berupa kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif	Dokumen	80	200.000.000		
	Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan								**137.348.575.000**		
						Jumlah pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah	Rupiah	14054297	137.348.575.000		
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						4.533.575.000		
						Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	%	13.33	4.533.575.000		
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi					1.200.000.000		
						Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Lokasi	5	1.200.000.000		
		3.26.02.1.01.0008			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi				1.200.000.000		
						Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi jawa Tengah sesuai dengan tahapan (perintisan, pembangunan, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	5	1.200.000.000		
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					2.833.575.000		
						Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang terkelola	Lokasi	1	2.833.575.000		
		3.26.02.1.02.0007			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				2.308.575.000		
						Kawasan Strategis Pariwisata Povinsi yang dikembangkan	Orang	100	2.308.575.000		
		3.26.02.1.02.0009			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				525.000.000		
						Masyarakat Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Yang Diberdayakan	Lokasi	1	525.000.000		
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Usaha Pariwiata yang memiliki TDUP/NIB	Dokumen	100	500.000.000		
		3.26.02.1.04.0010			Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi						
						Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan	0			
		3.26.02.1.04.0013			Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata				500.000.000		
						Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Unit	350	500.000.000		
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						123.700.000.000		
						Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	49985228	123.700.000.000		
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					123.700.000.000		
						Pengguna Media Sarpras Pemasaran Pariwisata	Orang	400000	122.150.000.000		
		3.26.03.1.01.0001			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				117.225.000.000		
						Dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	117.225.000.000		
		3.26.03.1.01.0006			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4.925.000.000		
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	30	4.925.000.000		
						Tujuan Pasar Wisata Potensial	Lokasi	3	1.550.000.000		
		3.26.03.1.01.0005			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1.550.000.000		
						Hasil Pelaksanaan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	10	1.550.000.000		
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						9.115.000.000		
						Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	48.98	9.115.000.000		
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan					8.415.000.000		
						Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Orang	550	8.415.000.000		
		3.26.05.1.01.0008			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				5.800.000.000		
						Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	5.800.000.000		
		3.26.05.1.01.0014			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				1.665.000.000		
						orang yang mengikuti peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	300	1.665.000.000		
		3.26.05.1.01.0016			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				950.000.000		
						SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya	Orang	250	950.000.000		
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					700.000.000		
						Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif yang di latih dan disertifikasi	Orang	240	700.000.000		
		3.26.05.1.02.0001			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				225.000.000		
						Pelaku SDM Ekraf yang mengikuti pelatihan, bimtek dan pendampingan	Orang	80	225.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.26.05.1.02.0003			Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif				475.000.000		
						SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti sertifikasi kompetensi	Orang	160	475.000.000		
Meningkatkan Pembangunan Pemuda									**23.675.000.000**		
						Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	56.85			
	Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda								**13.775.000.000**		
						Persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda	%	11.05	13.775.000.000		
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						13.775.000.000		
						Jumlah wirausaha muda mandiri	Orang	8	13.775.000.000		
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					13.775.000.000		
						Jumlah wirausaha muda	Orang	100	3.150.000.000		
		2.19.02.1.01.0015			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi				3.150.000.000		
						Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	1000	3.150.000.000		
						Peningkatan jumlah lokus unggulan hasil pendampingan kepeloporan pemuda	Lokasi	100	7.280.000.000		
		2.19.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				3.155.000.000		
						Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	8000	3.155.000.000		
		2.19.02.1.01.0012			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi				4.125.000.000		
						Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dari seluruh kabupaten/kota	Orang	120	4.125.000.000		
		2.19.02.1.01.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi						
						Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	0			
						Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan; Kesehatan dan kesejahteraan; gender dan diskriminasi	Dokumen	3	3.345.000.000		
		2.19.02.1.01.0010			Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda				275.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen penghargaan pemuda provinsi yang berprestasi dan menerima penghargaan yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	Dokumen	2	275.000.000		
		2.19.02.1.01.0011			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi			720.000.000		
						Jumlah dokumen hasil koordinasi sinergis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi RAD/RAD Tingkat Provinsi	Dokumen	2	720.000.000		
		2.19.02.1.01.0014			Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi				2.350.000.000		
						Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	1500	2.350.000.000		
	Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda								**9.900.000.000**		
						Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda	%	37.25	9.900.000.000		
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						9.900.000.000		
						Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	Orang	50	9.900.000.000		
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi					9.900.000.000		
						Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan provinsi	Orang	125	9.900.000.000		
		2.19.02.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda				200.000.000		
						Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	Orang	120	200.000.000		
		2.19.02.1.02.0004			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				9.700.000.000		
						Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan provinsi	Dokumen	3	9.700.000.000		
JUMLAH									**406.619.348.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**34.501.051.000**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	73		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**34.330.051.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	34.330.051.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						34.330.051.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	34.330.051.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					29.418.240.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	29.418.240.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				29.176.560.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	155	29.176.560.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				241.680.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	241.680.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					95.720.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	95.720.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				90.720.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	90.720.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					799.135.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	799.135.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.135.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	45.135.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				155.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				9.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	9.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				90.000.000		
						jumlah paket bahan/material	Paket	1	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				175.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					253.616.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	253.616.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				243.616.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2	243.616.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.325.260.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	8	3.325.260.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.309.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	1.309.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.999.860.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3	1.999.860.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					423.080.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	423.080.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	15	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				102.754.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	102.754.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				160.326.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	160.326.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**171.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.85	171.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						171.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	171.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					171.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	171.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				135.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	135.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	36.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan									**883.346.000**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	
						Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	94		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi								**883.346.000**		
						Nilai hasil pengawasan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi	Nilai	95.32	883.346.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						780.346.000		
						Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	25.97	240.973.000	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
				Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					125.200.000		
						Jumlah unit LKD Prov/Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya	Unit	20	125.200.000	SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN	
		2.24.02.1.01.0003			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				125.200.000		
						Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan provinsi	Laporan	76	125.200.000	SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN	
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi					115.773.000		
						Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui SIKD	%	71.42	115.773.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN	
		2.24.02.1.03.0002			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				115.773.000		
						Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi	Laporan	42	115.773.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN	
						Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	%	100	302.775.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
				Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					25.000.000		
						Jumlah arsip dinamis inaktif Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian	Arsip	1000	25.000.000	SEKSI AKUISISI ARSIP	
		2.24.02.1.01.000			Penyusutan Arsip Dinamis				25.000.000		
						Jumlah Arsip Dinamis yang telah disusutkan	Arsip	1000	25.000.000	SEKSI AKUISISI ARSIP	
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi					277.775.000		
						Jumlah arsip statis yang tersusun daftar inventarisnya	Dokumen	10500	277.775.000	SEKSI PENGOLAHAN ARSIP	
		2.24.02.1.02.000			Akuisisi Arsip Statis				277.775.000		
						Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	1100	87.262.000	SEKSI PENGOLAHAN ARSIP	
						Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	10000	106.427.000	SEKSI PENGOLAHAN ARSIP	
						Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	500	84.086.000	SEKSI PENGOLAHAN ARSIP	
						Persentase peningkatan pengunjung arsip	%	19	236.598.000	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi					236.598.000		
						Jumlah arsip yang terlayankan	Arsip	800	60.398.000	SEKSI LAYANAN ARSIP	
		2.24.02.1.03.0001			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				60.398.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JIKN	1 petak /tahun	3000	60.398.000	SEKSI LAYANAN ARSIP	
						Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Unit	41	176.200.000	SEKSI PEMANFAATAN ARSIP	
		2.24.02.1.03.0002			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				176.200.000		
						Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi	Laporan	2	176.200.000	SEKSI PEMANFAATAN ARSIP	
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						103.000.000		
						Persentase arsip yang diselamatkan	%	19.47	53.000.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
				Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi					30.000.000		
						Jumlah Arsip yang terselamatkan akibat bencana berskala Provinsi	Arsip	150	30.000.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
		2.24.03.1.02.0001			Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				30.000.000		
						Jumlah Arsip yg dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana	Arsip	150	30.000.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
				Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi					23.000.000		
						Jumlah khazanah arsip statis LKD Provinsi yang dialihmediakan	Arsip	256500	23.000.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
		2.24.03.1.04.0002			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				23.000.000		
						Jumlah daftar arsip yg dilakukan Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Arsip	6500	23.000.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
						Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	%	12.19	50.000.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
				Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun					50.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk pemusnahan arsip (retensi <10 tahun)	OPD	5	50.000.000	SEKSI AKUISISI ARSIP	
		2.24.03.1.01.0001			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				50.000.000		
						Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yg memiliki retensi dibawah 10 tahun	Arsip	3000	50.000.000	SEKSI AKUISISI ARSIP	
Meningkatkan Literasi Masyarakat									**34.686.936.000**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	
						Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	16		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat								**34.686.936.000**		
						Nilai tingkat kegemaran membaca	Nilai	73	34.686.936.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						34.418.638.000		
						Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	80	7.682.654.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					923.969.000		
						Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Jenis	6	139.969.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.01.0007			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				39.969.000		
						Jumlah layanan perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yg dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Jenis	5	39.969.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.01.0015			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO 20000	Unit	1	100.000.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
						Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	4.9	784.000.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0009			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				784.000.000		
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Eks	9470	784.000.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					6.758.685.000		
						Jumlah masyarakat yang menjadi agen literasi	Orang	20	29.360.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.02.0004			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				29.360.000		
						Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah provinsi yang dikembangkan	Unit	1	29.360.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
						Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Orang	2657000	6.729.325.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.02.0002			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				6.729.325.000		
						Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Unit	7	6.729.325.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
						Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	%	80.56	26.605.584.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					26.605.584.000		
						Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi	Unit	5	26.500.584.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0002			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				26.465.584.000		
						Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan SNP di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Unit	3	26.465.584.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0016			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				35.000.000		
						Jumlah data dan informasi perpustakaan	Dokumen	1	35.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN	
						Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi	Orang	10	105.000.000	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0004			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				30.000.000		
						Jumlah perpustakaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Unit	2	30.000.000	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0006			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				75.000.000		
						Jumlah tenaga perpustakaan yg ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk. Daerah provinsi	Orang	15	75.000.000	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
						Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	%	23.08	130.400.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan	
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					130.400.000		
						Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Kegiatan	2	130.400.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.02.1.02.0001			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				62.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan literasi pada sat pendidikan menengah dan pendidikn khusus	Lokasi	3	62.800.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.02.1.02.0003			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				27.600.000		
						Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Orang	8	27.600.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.02.1.02.0006			Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi				40.000.000		
						Jumlah duta baca Tingkat daerah provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	1	40.000.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						268.298.000		
						Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	84.67	268.298.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
				Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi					99.970.000		
						Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Umum Prov Jateng	Unit	184	99.970.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.01.0001			Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				23.470.000		
						Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eks	2600	23.470.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.01.0002			Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				76.500.000		
						Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Unit	3	76.500.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
				Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah					51.000.000		
						Jumlah naskah Katalog Induk Derah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	Dokumen	2	51.000.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.02.0001			Penerbitan Katalog Induk Daerah				39.200.000		
						Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang diterbitkan	Dokumen	4350	39.200.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.02.0002			Penerbitan Bibliografi Daerah				11.800.000		
						Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan	Dokumen	1	11.800.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi					42.328.000		
						Jumlah koleksi naskah kuno yang dialihmediakan	Eks	25	42.328.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.03.0002			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				42.328.000		
						Jumlah Naskah Kuno yang dilakukan Pengembangan yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eks	5	42.328.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
				Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					75.000.000		
						Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah	Eks	367	75.000.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.04.0001			Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				40.000.000		
						Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eks	2	40.000.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.23.03.1.04.0002			Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				35.000.000		
						Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eks	167	35.000.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
JUMLAH									**70.071.333.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan									**3.536.710.000**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
						Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Angka	107.78		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)								**2.330.025.000**		
						Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/ta	40.12	2.330.025.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						2.330.025.000		
						Jumlah produksi olahan ikan	Ton	160000	1.162.075.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					111.000.000		
						Persentase Unit Pengolahan Ikan yang terdata	%	20	111.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.01.0001			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				20.000.000		
						Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi perijinan	Orang	30	20.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.06.1.01.0003			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				91.000.000		
						Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan Data	Kabupaten/ Kota	35	91.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					1.031.075.000		
						Jumlah jenis pelatihan peningkatan keterampilan dan kompetensi	Jenis	2	292.360.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.02.0002			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				292.360.000		
						Jumlah SDM dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang meningkat keterampilannya	Orang	300	292.360.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
						Jumlah Poklahsar yang Meningkat Usahanya	Unit	5	206.670.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.02.0002			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				206.670.000		
						Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi akses permodalan dan kemitraan	Orang	90	19.470.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana yang diberikan kepada pengolah dan pemasar	Paket	10	187.200.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
						Jumlah Usaha Kelautan dan Perikanan yang dipromosikan	Unit	35	532.045.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.02.0002			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				532.045.000		
						Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN	Orang	2000	462.045.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
						Jumlah Pengolah dan Pemasar yang difasilitasi Pemasaran	Orang	120	70.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					20.000.000		
						Jumlah Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.03.0001			Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				20.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Penyedia Layanan Jasa Logistik yang dibina	Orang	25	20.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
						Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	1.167.950.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					1.167.950.000		
						Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan	Sertifikat	400	993.163.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.0002			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				993.163.000		
						Jumlah Dokumen ISO 17025:2017	Dokumen	1	864.473.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Prasarana Laboratorium Penujian Yang Memadai	Paket	2	118.690.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Sarana Laboratorium Pengujian Yang Memadai	Unit	2	10.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Rekomendasi sertifikat Good Manufacturing Product (GMP) yang diterbitkan	Sertifikat	100	63.745.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.0001			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				63.745.000		
						Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina kelayakan dasar	Unit	80	63.745.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)	Dokumen	1	111.042.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.0001			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				111.042.000		
						Jumlah Dokumen ISO 17065:2012 dan ISO 9001:2015	Dokumen	2	73.337.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						JUmlah DOkumen Kesesuaian Produk Yang Akan Disertifiasi	Dokumen	5	14.885.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya	Orang	20	22.820.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan								**1.137.715.000**		
						Nilai Tukar Nelayan	Angka	105	1.137.715.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						1.137.715.000		
						Indeks harga yang diterima oleh nelayan	Angka	108.27	1.137.715.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					1.137.715.000		
						Jumlah Nelayan yang memperoleh perlindungan	Orang	10100	1.137.715.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
		3.25.03.1.01.0002			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				1.137.715.000		
						Jumlah Dokumen Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan	Dokumen	1	6.935.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Nelayan yang diberikan premi asuransi	Orang	10000	1.087.855.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah nelayan yang terdaftar kartu nelayan	Orang	100	32.670.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah RTP yang difasilitasi usahanya	Kelompok	1	10.255.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
						Jumlah nelayan yang meningkat ketrampilan dan kompetensi	Orang	60		SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0003			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						
						Jumlah Nelayan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	60		SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
	Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan								**68.970.000**		
						Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Angka	110	68.970.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						68.970.000		
						Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	Angka	111.27	68.970.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					68.970.000		
						Jumlah Pembudidaya Ikan yang Meningkat Keterampilannya	Orang	60	68.970.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				68.970.000		
						Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang di fasilitasi sosialisasi kelembagaan	Kelompok	1	17.360.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
						Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti pelatihan	Orang	50	51.610.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan									**4.589.319.000**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
						Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	%	0.75		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif								**4.589.319.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	%	62	4.589.319.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						2.581.455.000		
						Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	5	715.287.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					715.287.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Lokasi	1	404.715.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				404.715.000		
						Jumlah kajian pencadangan kawasan konservasi	Dokumen	1	404.715.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha yang diverifikasi persyaratan KKPRL	Orang	5	310.572.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				310.572.000		
						Jumlah dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	Dokumen	5		SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah stakeholder yang melaporkan data kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Unit	20		SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Stakeholder yang memahami peraturan perundang-undangan	Orang	200	179.955.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Yang Dimanfaatkan	Lokasi	10	130.617.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	3.7	773.390.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					748.540.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Lokasi	2	342.248.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				342.248.000		
						Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi	Dokumen	2	62.740.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk	Unit	2	218.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	Orang	60	61.508.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi	Ha	2	406.292.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				406.292.000		
						Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	20000	291.292.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan	Unit	5	115.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					24.850.000		
						Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	%	100	24.850.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.0003			Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional				24.850.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	%	100	24.850.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	1.39	300.554.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					273.679.000		
						Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi	Ha	2	273.679.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				273.679.000		
						Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	20000	273.679.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					26.875.000		
						Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	%	100	26.875.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.0003			Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional			26.875.000		
						Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	%	100	26.875.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	3.7	792.224.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					758.999.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Lokasi	2	424.557.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				424.557.000		
						Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi	Dokumen	2	80.800.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk	Unit	2	318.897.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	Orang	60	24.860.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi	Ha	2	334.442.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				334.442.000		
						Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	20000	223.274.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan	Unit	5	111.168.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					33.225.000		
						Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	%	100	33.225.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.0003			Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional			33.225.000		
						Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	%	100	33.225.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						44.225.000		
						Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	%	44.44	44.225.000	Bidang Perikanan Tangkap	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					44.225.000		
						Jumlah lokasi yang dilindungi SDI nya	Lokasi	1	44.225.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0003			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				44.225.000		
						Jumlah Nelayan Yang Mengetahui Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Ramah Lingkungan	Orang	100	44.225.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.963.639.000		
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	61	106.809.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					106.809.000		
						Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan	Kali	10	106.809.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				106.809.000		
						Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	30	106.809.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	61	155.143.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					155.143.000		
						Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan	Kali	10	155.143.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				155.143.000		
						Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	20	155.143.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	61	236.050.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					236.050.000		
						Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan	Kali	10	236.050.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				236.050.000		
						Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	30	236.050.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	%	70	664.642.000	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					575.604.000		
						Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kelompok	35	87.900.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0004			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				87.900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)yang Menerima Sarana dan prasarana	Kelompok	5	87.900.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	18	54.040.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0001			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				22.220.000		
						Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	60	22.220.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				17.270.000		
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	60	17.270.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0003			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				14.550.000		
						Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	60	14.550.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil	%	100	433.664.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0001			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				15.830.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	%	100	15.830.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				311.519.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	%	100	311.519.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0003			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				106.315.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	%	100	106.315.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					89.038.000		
						Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	180	14.870.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0001			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya				14.870.000		
						Jumlah pelaku usaha pada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	60	14.870.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.05.1.02.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya					
						Jumlah pelaku usaha pada usaha pembudidaya di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	60		SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
						Jumlah pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	60		SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
						Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya	%	100	74.168.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0001			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya			13.693.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	13.693.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya			26.425.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	26.425.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			34.050.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	34.050.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	

						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	2	298.765.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					250.820.000		
						Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	%	100	250.820.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0001			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				28.261.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	24	28.261.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				215.099.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	56	215.099.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0003			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				7.460.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	24	7.460.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					47.945.000		
						Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	47.945.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0001			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya				21.235.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhanpada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	15	21.235.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				9.420.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	30	9.420.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				17.290.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	30	17.290.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	2	252.836.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					78.573.000		
						Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	%	100	78.573.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0001			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				55.950.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	15	55.950.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				11.656.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	30	11.656.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0003			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				10.967.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	18	10.967.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					174.263.000		
						Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	174.263.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0001			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya				63.900.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhanpada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	15	63.900.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				53.140.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Orang	15	53.140.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

						Sesuai denganKewenangannya					
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				57.223.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Orang	30	57.223.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	2	249.394.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					116.275.000		
						Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	%	100	116.275.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0001			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				54.115.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	30	54.115.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				6.620.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	30	6.620.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0003			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				55.540.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	30	55.540.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					133.119.000		
						Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	133.119.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0001			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya				41.815.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhanpada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	18	41.815.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				42.470.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	18	42.470.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				48.834.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	30	48.834.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**55.485.767.000**		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**54.684.089.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83	54.684.089.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						54.684.089.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	138.280.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					19.665.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	19.665.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				600.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.355.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	2.355.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.710.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	16.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.150.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	45.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.950.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				43.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					73.465.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	73.465.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.765.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	15.765.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	90.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					14.640.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	14.640.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.640.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	5.640.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.360.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	45.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				39.360.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	39.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	10.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					20.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.850.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	9.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.650.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	8.650.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					33.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	33.000.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				32.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	32.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					47.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	47.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	17.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	253.000.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					25.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					203.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	203.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	276.500.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					22.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	101.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					153.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	153.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				136.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	136.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	161.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					92.700.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	92.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	80.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.200.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	7.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					29.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	29.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				27.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	27.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					38.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	38.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	19.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	4.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	77.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					15.260.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	15.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.100.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	9.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.160.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	5.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	30.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					31.240.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	31.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				16.240.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	16.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	50.599.009.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					45.906.850.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	45.906.850.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				44.832.270.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	327	44.832.270.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				917.580.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	917.580.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				157.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	157.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					315.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	315.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				150.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.121.546.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.121.546.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				215.125.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	215.125.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				77.870.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	77.870.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				631.551.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	631.551.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				14.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	14.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.067.613.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	1.067.613.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar						
						Jumlah unit alat besar yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				507.613.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	507.613.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				260.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	260.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.438.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.438.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				430.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	430.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.000.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					650.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				280.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	280.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				240.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	154.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					30.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					71.000.000		
						Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal	Unit	1	71.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	168.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					35.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					78.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	15.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				57.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	57.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	342.100.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					82.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	82.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					189.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	189.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	186.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	94.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					24.240.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	24.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				420.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.270.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	7.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.550.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	16.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	39.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				39.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.460.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	30.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.510.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	14.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.950.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	106.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					20.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	8.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	42.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					44.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	44.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	14.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	131.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					23.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	23.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.200.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					58.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	58.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				56.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	608.000.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					33.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					458.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	458.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				453.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	453.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					117.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	117.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	172.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					16.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	16.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	4.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	119.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				117.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	117.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	35.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	898.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					11.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					867.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	867.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				865.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	865.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					19.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	19.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.800.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	316.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					224.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	224.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				216.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	216.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	55.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				53.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	36.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	21.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**801.678.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	82	801.678.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						801.678.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	801.678.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					801.678.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	801.678.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				399.178.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	399.178.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				402.500.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	402.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan									**46.480.988.000**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
						Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	%	1		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Produksi Garam								**760.245.000**		
						Produksi garam	Ton	133320	760.245.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						760.245.000		
						Persentase produksi garam	%	1	760.245.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					760.245.000		
						Jumah KUGAR yang meningkat kompetensinya	Kelompok	25	63.700.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				63.700.000		
						Jumlah petambak garam yang difasiltasi dan dibina	Orang	125	63.700.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Kelompok	4	89.140.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				89.140.000		
						Jumlah masyarakat pesisir yang meningkat kapasitas usahanya	Orang	100	89.140.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya	Kelompok	5	594.605.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				594.605.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang diberikan ke petambak garam	Jenis	2	307.880.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Luas lahan garam yang menerapkan teknologi	Ha	20	286.725.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sentra garam rakyat yang didata potensinya	Lokasi	5	12.800.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				12.800.000		
						Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data potensi garam	Kabupaten/Kota	9	12.800.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Produksi Perikanan								**45.720.743.000**		
						Produksi perikanan	Ton	927350	45.720.743.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						32.670.252.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong	%	72.72	733.964.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					733.964.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	5	301.660.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				301.660.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	80	68.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	65	14.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	18.860.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	60	200.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	5	36.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				36.500.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	40	11.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	70	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	14	54.404.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				54.404.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	54.404.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	40		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	5		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan						
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	15		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	20	341.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				341.400.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	4	341.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	100	481.375.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					481.375.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	9	358.710.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				358.710.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	2700	284.392.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	100	50.368.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	16.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	300	7.950.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	19.425.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				19.425.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	2700	1.550.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	100	17.875.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	29	94.340.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				94.340.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	94.340.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	65	1.440.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				1.440.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	1.440.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	85	6.660.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				6.660.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	30000	6.660.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	6	800.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				800.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	800.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	%	63.63	587.181.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					587.181.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	5	31.215.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				31.215.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	60	16.600.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	45	6.555.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	4.060.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	45	4.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	3	26.791.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				26.791.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	50	12.025.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	60	14.766.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	40	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				40.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	3	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	50	107.975.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				107.975.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	2	107.975.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	50	50.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				50.000.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	50	50.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	65	331.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				331.200.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	50	331.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	%	70	1.105.369.000		
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.105.369.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	9	69.350.000		
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				69.350.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	2700	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	1000	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	19.700.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	100	19.650.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	6	34.290.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				34.290.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	1000	16.740.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	2	17.550.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	5	20.000.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				20.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	50	458.710.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				458.710.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	458.710.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	5	20.000.000		
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				20.000.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	3000	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	5	503.019.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				503.019.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	503.019.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	%	72	581.985.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					581.985.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	5	65.295.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				65.295.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	128	30.220.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	10	17.725.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	8.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	30	9.350.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	3	25.005.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				25.005.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	110	18.545.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	42	6.460.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	20	18.805.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				18.805.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	18.805.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	40	200.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				200.000.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	200.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	7	11.880.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				11.880.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	10	11.880.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	30	261.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				261.000.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	3	261.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	%	63	4.746.790.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					4.746.790.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	5	120.068.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				120.068.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	30	73.860.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	108	21.233.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	9.575.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	90	15.400.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	351.868.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				351.868.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	165	341.868.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	25	10.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	30		SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan						
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1		SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	54	4.272.854.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				4.272.854.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	4.272.854.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	50	2.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				2.000.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	80	2.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	20		SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan						
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	2		SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	%	81	905.895.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					905.895.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	6	312.285.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				312.285.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	300	232.095.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	50	10.440.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	61.250.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	100	8.500.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	4	23.275.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				23.275.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	150	10.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	100	13.275.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	42	8.775.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				8.775.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	8.775.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	55	175.100.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				175.100.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	175.100.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	20		SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan						
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	100		SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	7	386.460.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				386.460.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	2	386.460.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	100	1.120.316.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.120.316.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	6	113.011.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				113.011.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	3500	9.825.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	3000	40.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	30.186.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	80	33.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	5	123.269.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				123.269.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	3000	79.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	10	44.069.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	42.86	60.960.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				60.960.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	60.960.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	100	74.600.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				74.600.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	74.600.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	25	33.876.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				33.876.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	3000	33.876.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	3.7	714.600.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				714.600.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	714.600.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	62.62	886.910.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					886.910.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	6	75.940.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				75.940.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	100	13.435.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	10	14.865.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	17.640.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	60	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	6	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				40.000.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	3500	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	43	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	20	74.990.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				74.990.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	74.990.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	46	325.570.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				325.570.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	325.570.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	6	11.910.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				11.910.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	60	11.910.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	18	358.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				358.500.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	2	358.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	%	72	1.216.749.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.216.749.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	9	824.845.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				824.845.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	2500	657.408.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	100	108.650.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	44.577.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	300	14.210.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	66.682.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				66.682.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	1100	5.400.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	100	61.282.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	16	7.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				7.200.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	7.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	60	203.250.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				203.250.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	203.250.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	85	32.212.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				32.212.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	7000	32.212.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	15	82.560.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				82.560.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	82.560.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	%	81.82	534.952.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					534.952.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	7	21.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				21.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	900	2.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	70	7.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	2.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	40	9.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	4		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan						
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	40		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	70		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	14	70.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				70.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	70.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	39	433.352.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				433.352.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	433.352.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	5	3.900.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				3.900.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	10	3.900.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	9	6.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				6.500.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	4	6.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase produksi perikanan tangkap	%	5	19.768.766.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					17.617.430.000		
						Jumlah pelabuhan yang menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan	Dokumen	3	17.491.025.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
		3.25.03.1.01.0002			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				17.491.025.000		
						Jumlah KUB yang difasilitasi Kelembagaannya	Kelompok	2	20.285.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelabuhan perikanan yang ditingkatkan tata kelola dan operasional kepelabuhanannya	Lokasi	1	17.470.740.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah produksi perikanan yang didaratkan	Ton	327350	126.405.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
		3.25.03.1.01.0001			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				126.405.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaporkan Data	Kabupaten/Kota	34	126.405.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					2.151.336.000		
						Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan	Unit	240	1.046.336.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.03.1.02.0003			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				1.046.336.000		
						Jumlah Kapal Perikanan yang Terdaftar Melalui TDKP	Unit	160	245.436.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi alokasi usaha perikanan yang dikeluarkan	Unit	40	800.900.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Kapal Perikanan yang menerapkan teknologi Penangkapan Ikan	%	0.25	1.105.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0003			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				1.105.000.000		
						Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Unit	50	1.105.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi kapal yang menerapkan Teknologi Penangkapan Ikan	Lokasi	1		SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						13.050.491.000		
						Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	853.195.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					853.195.000		
						Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani	Kasus	350	447.150.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	
		3.25.04.1.05.0006			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				447.150.000		
						Jumlah Kab/Kota yang Melaporkan Data Peredaran Obat Ikan	Kabupaten/Kota	35	45.070.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Lokasi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Lokasi	35	389.480.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaku Usaha yang Terakses Informasi Kesehatan Ikan dan Lingungan	Orang	350	12.600.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pengguna Layanan Pengujian	%	20	391.045.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				391.045.000		
						Jumlah Parameter Pengujian	Unit	1	150.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium	sampel	400	59.337.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Sertifikasi Laboratorium yang memenuhi standar teknis (2 Sertifikat)	Sertifikat	2	181.708.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkat Kompetensinya	%	29	15.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				15.000.000		
						Jumlah jenis pelatihan yang diikuti petugas	Jenis	5	15.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase produksi ikan konsumsi air laut	%	5	9.976.701.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					2.173.755.000		
						Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut	Jenis	1	20.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				20.000.000		
						Jumlah Tenaga Teknis (SDM) Loka yang Meningkat Keterampilannya	Orang	10	20.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Lokasi	1	2.153.755.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.04.1.05.0002			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1.582.400.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang direhabilitasi/dibangung	Unit	5	1.582.400.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				571.355.000		
						Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	Kg	11500	571.355.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat					7.802.946.000		
						Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	Lokasi	9	7.802.946.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
		3.25.04.1.06.0002			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7.802.946.000		
						Jumlah Ikan Endemik Lokal yang di Produksi	Ekor	100000	41.000.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Kolam yang dilakukan Rehabilitasi	Unit	9	2.490.905.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Produksi Benih Unggul	Ekor	30000000	345.000.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Produksi Calon Induk Bermutu	Ekor	5000	2.767.380.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	Kg	10000	2.158.661.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Produksi perikanan budidaya	Ton	600000	2.220.595.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					249.650.000		
						Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Ijin Usaha	Orang	117	249.650.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.01.0002			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				170.670.000		
						Jumlah unit pembenihan yang memiliki sertifikat CPIB	Unit	5	115.730.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit pembesaran ikan yang memiliki SP4 CBIB / sertifikat CBIB	Unit	10	43.520.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit produksi pakan ikan yang memiliki sertifikat CPPIB	Unit	1	11.420.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.01.0003			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan				78.980.000		
						Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan data	Kabupaten/Ko	35	78.980.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					1.970.945.000		
						Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Jenis	2	1.970.945.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1.970.945.000		
						Jumlah kelompok yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya	Kelompok	30	1.970.945.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									**110.092.784.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kesejahteraan peternak									**648.150.000**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	
						Nilai Tukar Petani Peternakan	Angka	100.5		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Meningkatnya nilai tambah produk hasil ternak								**648.150.000**		
						Persentase nilai tambah produk hasil ternak	%	4.5	648.150.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						400.000.000		
						Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	%	10	400.000.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Penataan Prasarana Pertanian					400.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	Unit	11	400.000.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
		3.27.03.1.01.0019			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan				400.000.000		
						Jumlah pelaku usaha pengolahan produk ternak yang terfasilitasi promosi & akses pasar	Kelompok	5	97.945.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
						Jumlah pelaku usaha terfasilitasi sertifikasi produk peternakan	Kelompok	1	44.450.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
						Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi sarpras pengolahan & pemasaran	Kelompok	10	183.350.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
						Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan pengolahan dan pemasaran	Orang	100	74.255.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						248.150.000		
						Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV)	%	2.8	248.150.000	Bidang Veteriner	
				Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan					248.150.000		
						Jumlah unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV	Buah	12	248.150.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		3.27.04.1.03.0001			Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit				248.150.000		
						Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi NKV	Unit	35	59.800.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
						jumlah sasaran yang terfasilitasi pembinaan higiene sanitasi	Unit	10	188.350.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**52.410.203.000**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	70		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**51.966.013.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	51.966.013.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						51.966.013.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.900.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					230.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	230.500.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1		Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				130.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	130.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	35.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	45.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	500.000	Balai veteriner semarang	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1		Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1		Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1		Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1		Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1		Balai veteriner semarang	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.529.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.529.500.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	200.000.000	Balai veteriner semarang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	40.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.287.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.287.500.000	Balai veteriner semarang	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					140.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	140.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	30.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	25.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1		Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				5.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	Balai veteriner semarang	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	3.568.500.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					458.050.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	458.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.300.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				117.135.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	117.135.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.615.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	50.615.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				260.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	260.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.952.950.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.952.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				285.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	285.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.667.950.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.667.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					157.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	157.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				96.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	96.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	11.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.900.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					432.790.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	432.790.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				28.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	28.500.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.250.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	11.250.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.820.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	21.820.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.140.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	100.140.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				46.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	46.500.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.020.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	24.020.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				192.060.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	192.060.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	8.500.000	Balai veteriner boyolali	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					106.210.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	106.210.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				57.210.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	57.210.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				1.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	1.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	18.000.000	Balai veteriner boyolali	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	30.000.000	Balai veteriner boyolali	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.128.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.128.500.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	240.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	28.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				855.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	855.500.000	Balai veteriner boyolali	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					232.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	232.500.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				44.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	44.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	52.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				60.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	60.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				1.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	1.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				52.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	52.500.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	23.000.000	Balai veteriner boyolali	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	3.902.565.000	Balai Inseminasi Buatan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					826.225.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	826.225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				31.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	31.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				53.950.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	53.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				265.450.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	265.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.600.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	18.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				142.675.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	142.675.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				293.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	293.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.050.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	1.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					428.886.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	428.886.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				285.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	285.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				1.500.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				132.386.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	132.386.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.444.480.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.444.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.480.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	11.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				260.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	260.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.160.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.202.974.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.202.974.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				167.794.000		
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	1	167.794.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				283.180.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	283.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				336.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	336.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				1.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	40.694.948.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					35.240.648.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	35.240.648.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				34.954.948.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	205	34.954.948.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				266.400.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	266.400.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	1.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				16.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	16.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				900.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	900.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	1	900.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					204.300.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	204.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3.000.000		
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				700.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				600.000		
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					34.300.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	1	34.300.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0002			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				600.000		
						Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	Dokumen	1	600.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				33.700.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	1	33.700.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					47.684.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	47.684.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7.500.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	7.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.074.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	5.074.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35.110.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	35.110.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					482.562.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	482.562.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				32.484.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	32.484.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.341.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	55.341.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.698.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	18.698.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				80.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				41.300.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	41.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				45.050.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	45.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				188.164.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	188.164.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.275.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	10.275.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6.250.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	6.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					98.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	98.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				2.500.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	2.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.250.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	40.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				2.500.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	2.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				3.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.121.604.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	4.121.604.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				650.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.464.804.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	3.464.804.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					465.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	465.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				197.500.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	197.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				500.000		
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	1	500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				4.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				145.600.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	145.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				30.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				30.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**444.190.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.2	444.190.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						444.190.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	444.190.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					444.190.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	444.190.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				222.095.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	222.095.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				222.095.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	222.095.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan									**57.508.598.000**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	
						Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	%	3		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Tercapainya Produksi Daging								**53.614.080.000**		
						Produksi daging	Kg	457685292	53.614.080.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						26.857.861.000		
						Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan	Dokumen	4	11.222.610.000	Bidang Veteriner	
				Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor					11.222.610.000		
						Jumlah laporan pengawasan pelaku usaha obat hewan dan produk hewan	Laporan	4	11.222.610.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
		3.27.02.1.06.0001			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				11.222.610.000		
						Jumlah pelaku usaha obat hewan dan alsin obat hewan yang diawasi	Unit	3	189.535.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
						Jumlah pelaku usaha yang mendapat pembinaan keamanan produk hewan	Unit	12	11.033.075.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
						Jumlah populasi ternak potong	(ST)/(AU)	3726434	9.204.580.000	Bidang Budidaya	
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi					28.480.000		
						Jumlah kelompok peternak potong yang meningkat skala usaha nya	Kelompok	10	20.000.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				20.000.000		
						Jumlah kelompok ternak potong yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak	Kelompok	5	20.000.000	SEKSI PRODUKSI	
						Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak potong	Buah	2	8.480.000	SEKSI PRODUKSI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				8.480.000		
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak potong yang menerapkan Good Farming Practices (GFP)	Unit	2		SEKSI PRODUKSI	
						Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak potong	Orang	50	8.480.000	SEKSI PRODUKSI	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					9.176.100.000		
						Jumlah pelaku usaha pakan ternak potong yang produknya sesuai standar kualitas pakan	Unit	2	3.598.060.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				3.598.060.000		
						Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak potong	Orang	50	14.310.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak potong	Unit	4	3.583.750.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
						Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak potong	Buah	1	5.578.040.000	SEKSI PERBIBITAN	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				5.578.040.000		
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak potong yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP)	Unit	2	44.670.000	SEKSI PERBIBITAN	
						jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak potong	Orang	50	39.310.000	SEKSI PERBIBITAN	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak potong	Unit	4	5.494.060.000	SEKSI PERBIBITAN	
						Persentase fasilitasi obat hewan	%	1	102.390.000	Bidang Veteriner	
				Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor					102.390.000		
						Jumlah hewan/ternak yang difasilitasi obat hewan	Ekor	10000	102.390.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
		3.27.02.1.06.0001			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				102.390.000		
						Jumlah obat hewan yang di fasilitasi	Unit	10000	102.390.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
						Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging	%	1	3.180.846.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					3.180.846.000		
						Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi daging	%	1	513.125.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				513.125.000		
						Jumlah produksi ternak nonruminansia potong	Ekor	20013	513.125.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	
						Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi daging	%	1	2.667.721.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				2.667.721.000		

						Jumlah bibit ternak ruminansia potong yang ber SKLB	Ekor	60	989.550.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
						Jumlah produksi ternak ruminansia potong	Ekor	143	1.678.171.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
						Persentase produksi dan distribusi semen beku	%	1	3.147.435.000	Balai Inseminasi Buatan Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					3.147.435.000		
						Jumlah Produksi semen segar	Angka	26250	2.038.500.000	SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				2.038.500.000		
						Jumlah Ternak Pejantan Yang Layak Diproses semen bekunya	Ekor	26	2.038.500.000	SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI	
						Persentase semen beku yang dihasilkan dari semen segar yang layak diproduksi	%	80	1.108.935.000	SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1.108.935.000		
						Jumlah semen beku yang terdistribusi	Dosis	420000	1.108.935.000	SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						333.410.000		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	%	10	333.410.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Penataan Prasarana Pertanian					333.410.000		
						Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak potong	Kelompok	3	2.820.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2.820.000		
						Jumlah kelompok ternak potong yang terfasilitasi rekayasa teknologi peternakan	Kelompok	3	2.820.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
						Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak potong	Unit	1	6.480.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				6.480.000		
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak potong	Orang	30	6.480.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak potong	Kelompok	4	324.110.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				324.110.000		
						Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak potong	Unit	4	324.110.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						14.732.035.000		
						Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis	Dokumen	4	10.968.185.000	Bidang Veteriner	
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					10.968.185.000		
						Jumlah Laporan situasi penyakit menular strategis (PHMS)	Laporan	4	10.968.185.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	
		3.27.04.1.01.0007			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				10.968.185.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Ternak /hewan Tersurveilans PHMS	Ekor	2000	10.783.185.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	
						Jumlah ternak/hewan yang tervaksinasi	Ekor	100000	185.000.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	
						Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan	Dokumen	4	800.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi					800.000.000		
						Jumlah laporan hasil pengujian sampel	Laporan	4	589.275.000	Balai veteriner boyolali	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				589.275.000		
						Jumlah sampel yang diuji Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Selatan	sampel	25700	589.275.000	Balai veteriner boyolali	
						Jumlah laporan lalu lintas ternak	Laporan	4	124.692.000	Balai veteriner boyolali	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				124.692.000		
						Jumlah ternak yang diperiksa di pos lalu lintas wilayah Jateng Selatan	Ekor	1650000	124.692.000	Balai veteriner boyolali	
						Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan	Laporan	4	86.033.000	Balai veteriner boyolali	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				86.033.000		
						Jumlah Hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Selatan	Ekor	13850	86.033.000	Balai veteriner boyolali	
						Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara	Dokumen	4	800.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi					800.000.000		
						Jumlah laporan hasil pengujian sampel	Laporan	4	593.283.000	Balai veteriner semarang	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				593.283.000		
						Jumlah sampel yang diuji Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Utara	sampel	25000	593.283.000	Balai veteriner semarang	
						Jumlah laporan lalu lintas ternak	Laporan	4	87.300.000	Balai veteriner semarang	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				87.300.000		
						Jumlah Ternak yang diperiksa di pos lalu lintas wilayah jateng Utara	Ekor	1700000	87.300.000	Balai veteriner semarang	
						Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan	Laporan	4	119.417.000	Balai veteriner semarang	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				119.417.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Utara	Ekor	14250	119.417.000	Balai veteriner semarang	
						Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali	%	3	2.163.850.000	Bidang Veteriner	
				Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan					2.163.850.000		
						Jumlah RPH yang tidak melakukan pemotongan betina produktif	Unit	3	2.163.850.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		3.27.04.1.03.0001			Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit				2.163.850.000		
						Jumlah sasaran RPH yang diawasi pemotongan betina produktif	Unit	5	2.163.850.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						11.690.774.000		
						Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong	%	1.02	11.690.774.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					11.690.774.000		
						Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak potong yang terbentuk	Kelompok	10	11.690.774.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
		3.27.07.1.03.0006			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				11.690.774.000		
						Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak potong	Kelompok	34	11.433.338.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
						Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak potong	Orang	1920	257.436.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
	Tercapainya Produksi Susu								**825.289.000**		
						Produksi susu	Kg	93864946	825.289.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						616.309.000		
						Jumlah populasi ternak perah	(ST)/(AU)	112876	118.890.000	Bidang Budidaya	
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi							
						Jumlah kelompok peternak perah yang meningkat skala usaha nya	Kelompok	6		SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan						
						Jumlah kelompok ternak perah yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak	Kelompok	5		SEKSI PRODUKSI	
						Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak perah	Buah	2		SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan						
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak perah yang menerapkan Good Farming Practices (GFP)	Unit	2		SEKSI PRODUKSI	
						Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak perah	Orang	50		SEKSI PRODUKSI	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					118.890.000		
						Jumlah pelaku usaha pakan ternak perah yang produknya sesuai standar kualitas pakan	Unit	2	33.420.000	SEKSI PAKAN TERNAK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				33.420.000		
						Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak perah	Orang	50	14.310.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak perah	Unit	4	19.110.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
						Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak perah	Buah	1	85.470.000	SEKSI PERBIBITAN	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				85.470.000		
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak perah yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP)	Unit	1	29.650.000	SEKSI PERBIBITAN	
						jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak perah	Orang	50	55.820.000	SEKSI PERBIBITAN	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak perah	Unit	2		SEKSI PERBIBITAN	
						Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu	%	1	497.419.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					497.419.000		
						Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi susu	%	1	497.419.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				497.419.000		
						Jumlah bibit ternak ruminansia perah yang ber SKLB	Ekor	2	159.940.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
						Jumlah produksi ternak ruminansia perah	Ekor	9	337.479.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						60.110.000		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	%	10	60.110.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Penataan Prasarana Pertanian					60.110.000		
						Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak perah	Kelompok	1	49.700.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				49.700.000		
						Jumlah kelompok ternak perah yang terfasilitasi rekayasa teknologi peternakan	Kelompok	1	49.700.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
						Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak perah	Unit	1	10.410.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				10.410.000		
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak perah	Orang	20	10.410.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak perah	Kelompok	2		SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak perah	Unit	2		SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						148.870.000		
						Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah	%	3.11	148.870.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					148.870.000		
						Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak perah yang terbentuk	Unit	2	148.870.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
		3.27.07.1.03.0006			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				148.870.000		
						Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak perah	Kelompok	14	90.060.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
						Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak perah	Orang	360	58.810.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
	Tercapainya Produksi Telur								**3.069.229.000**		
						Produksi telur	Kg	344872727	3.069.229.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						2.384.765.000		
						Jumlah populasi ternak petelur	(ST)/(AU)	246615	481.530.000	Bidang Budidaya	
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi					371.520.000		
						Jumlah kelompok peternak petelur yang meningkat skala usaha nya	Kelompok	4	284.450.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				284.450.000		
						Jumlah kelompok ternak petelur yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak	Kelompok	5	284.450.000	SEKSI PRODUKSI	
						Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak petelur	Buah	1	87.070.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				87.070.000		
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak petelur yang menerapkan Good Farming Practices (GFP)	Unit	1	43.630.000	SEKSI PRODUKSI	
						Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak petelur	Orang	30	43.440.000	SEKSI PRODUKSI	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					110.010.000		
						Jumlah pelaku usaha pakan ternak petelur yang produknya sesuai standar kualitas pakan	Unit	2	58.520.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				58.520.000		
						Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak petelur	Orang	30	13.310.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak petelur	Unit	4	45.210.000	SEKSI PAKAN TERNAK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak petelur	Buah	1	51.490.000	SEKSI PERBIBITAN	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				51.490.000		
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak petelur yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP)	Unit	1	31.150.000	SEKSI PERBIBITAN	
						jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak petelur	Orang	30	20.340.000	SEKSI PERBIBITAN	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak petelur	Unit	4		SEKSI PERBIBITAN	
						Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur	%	1	1.903.235.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					1.903.235.000		
						Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi petelur	%	1	1.903.235.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1.903.235.000		
						Jumlah produksi ternak nonruminansia petelur	Ekor	26530	1.903.235.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						606.480.000		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	%	10	606.480.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Penataan Prasarana Pertanian					606.480.000		
						Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak petelur	Unit	1	6.480.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				6.480.000		
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak petelur	Orang	30	6.480.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak petelur	Kelompok	2	600.000.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				600.000.000		
						Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak petelur	Unit	2	600.000.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						77.984.000		
						Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur	%	2.27	77.984.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					77.984.000		
						Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak petelur yang terbentuk	Kelompok	1	77.984.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
		3.27.07.1.03.0006			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				77.984.000		
						Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak petelur	Kelompok	4	45.420.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
						Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak petelur	Orang	200	32.564.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
JUMLAH									**110.566.951.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Memantapkan Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan sebagai wujud Kontribusi Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan di Jawa Tengah									**79.113.239.000**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	
						Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	0.58		Dinas Pertanian dan Perkebunan	
	Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura								**1.278.433.000**		
						Persentase peningkatan produksi bawang merah	%	2.5	240.800.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						240.800.000		
						Produksi bawang merah	Ton	515000	240.800.000	Bidang Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					240.800.000		
						Jumlah Luas Panen Bawang Merah	Ha	51500	240.800.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				240.800.000		
						Jumlah Luas Tanam Bawang Merah	Ha	8	240.800.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi cabe	%	1.5	318.081.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						318.081.000		
						Produksi cabai	Ton	341000	318.081.000	Bidang Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					318.081.000		
						Jumlah Luas Panen Cabai	Ha	43718	318.081.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				318.081.000		
						Jumlah Luas Tanam Cabai	Ha	15	318.081.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi durian	%	2.5	437.276.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						437.276.000		
						Produksi durian	Ton	149668	437.276.000	Bidang Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					437.276.000		
						Jumlah Luas Panen Alpukat	Ha	13773	80.000.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				80.000.000		
						Jumlah Luas Tanam Alpukat	Ha	4	80.000.000	SEKSI TANAMAN BUAH	OPD Provinsi
						Jumlah Luas Panen Durian	Ha	11973	357.276.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				357.276.000		
						Jumlah Luas Tanam Durian	Ha	4	357.276.000	SEKSI TANAMAN BUAH	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi jahe	%	3	237.276.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						237.276.000		
						Produksi jahe	Ton	34862	237.276.000	Bidang Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					237.276.000		
						Jumlah Luas Panen Jahe	Ha	1599	237.276.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				237.276.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Luas Tanam Jahe	Ha	1	202.276.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	OPD Provinsi
						Jumlah Luas Tanam Kencur	Ha	1	35.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi melati	%	2	45.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						45.000.000		
						Produksi melati	Ton	24627	45.000.000	Bidang Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					45.000.000		
						Jumlah Luas Panen Melati	Ha	1.099	45.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				45.000.000		
						Jumlah Luas Tanam Melati	Ha	1	45.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	OPD Provinsi
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan								**51.902.680.000**		
						Persentase peningkatan produksi jagung	%	0.2	319.086.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						319.086.000		
						Produksi jagung	Ton	3576577	319.086.000	Bidang Tanaman Pangan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					319.086.000		
						Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (jagung)	Ha	583385	319.086.000	SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				319.086.000		
						Capaian luas tanam bantuan benih Jagung dan Serealia Lainnya	Ha	200	319.086.000	SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi kedelai	%	0.2	166.358.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						166.358.000		
						Produksi kedelai	Ton	52657	166.358.000	Bidang Tanaman Pangan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					166.358.000		
						Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (kedelai)	Ha	31241	166.358.000	SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				166.358.000		
						Capaian luas tanam bantuan benih kedelai	Ha	50	166.358.000	SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi padi	%	0.2	51.417.236.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						35.394.582.000		
						Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan	%	3	16.700.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					16.700.000.000		
						Jumlah kelembagaan pengelola alsintan	Unit	580	16.700.000.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				16.700.000.000		
						Jumlah kelompok tani yang difasilitasi alsintan	Kelompok	580	16.700.000.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	OPD Provinsi
						Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya	%	2	5.745.643.000	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					5.745.643.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah informasi harga pasar yang disebarluaskan	Komoditi	3	55.773.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				55.773.000		
						Jumlah kab/kota yang dipublikasikan informasi harga pasar	Kabupaten/Kota	34	55.773.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Jumlah kelompok pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya	Kelompok	105	5.370.196.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				5.370.196.000		
						Angka persentase susut hasil padi	%	10.15	12.330.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Jumlah alat pasca panen perkebunan/tanaman pangan/hortikultura	Unit	105	5.357.866.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Jumlah kelompok pengolah hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya	Kelompok	4	319.674.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				319.674.000		
						Jumlah alat pengolah hasil perkebunan/tanaman pangan/hortikultura	Paket	35	319.674.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta	%	85	2.426.960.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.426.960.000		
						Jumlah produksi benih Buah	Batang	10000	797.464.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				797.464.000		
						Jumlah Produksi benih Tanaman Buah	Batang	10000	797.464.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih Kedelai	Ton	0.8	19.447.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				19.447.000		
						Jumlah Produksi benih Palawija	Ton	0.8	19.447.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih Kentang	Ton	8	355.712.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				355.712.000		
						Jumlah Produksi benih Sayur	Ton	8	355.712.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih Padi	Ton	84	1.156.351.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				1.156.351.000		
						Jumlah Produksi benih Padi	Ton	84	1.156.351.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih Planlet	Batang	12000	97.986.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				97.986.000		
						Jumlah Produksi Planlet benih	Batang	12000	97.986.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	%	85	2.024.498.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.024.498.000		
						Jumlah pengembangan tanaman hias	Batang	12000	192.965.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				192.965.000		
						Jumlah pengembangan Tanaman Hias	Batang	12000	192.965.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih bawang merah	Ton	3	72.375.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				72.375.000		
						Jumlah luas Perbanyakan Benih Bawang Merah	Ha	0.5	72.375.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih padi	Ton	92.5	1.003.279.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				1.003.279.000		
						Jumlah luas Perbanyakan Benih Padi	Ha	25	1.003.279.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih palawija	Ton	0.425	7.910.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				7.910.000		
						Jumlah luas Perbanyakan Benih Palawija	Ha	0.5	7.910.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah Produksi benih tanaman buah	Batang	1000	747.969.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				747.969.000		
						Jumlah perbanyakan benih Tanaman Buah	Batang	1000	747.969.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	%	85	2.443.280.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.443.280.000		
						Jumlah perbanyakan benih tanaman buah	Batang	2000	539.802.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				539.802.000		
						Jumlah perbanyakan benih tanaman buah	Batang	2000	539.802.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih padi	Ton	181.3	1.878.478.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				1.878.478.000		
						Luas perbanyakan benih padi	Ha	49	1.878.478.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih palawija	Ton	0		SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan						
						Luas perbanyakan benih palawija	Ha	0		SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih sayuran	Ton	0.2	25.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				25.000.000		
						Luas perbanyakan benih sayuran	Ha	0.2	25.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi sayuran	Ton	0		SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan						
						Luas pengembangan sayuran	Ha	0		SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi tanaman hias	Batang	0		SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan						
						Jumlah pengembangan tanaman hias	Batang	0		SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Persentase layanan sertifikasi benih	%	100	697.966.000		
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					697.966.000		
						Pengawasan peredaran benih perkebunan	Bulan	12	34.065.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				34.065.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Terpantaunya mutu benih tanaman perkebunan yang beredar	Bulan	12	34.065.000		
						Pengawasan peredaran benih Tanaman Pangan	Bulan	12	174.568.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				174.568.000		
						Terpantaunya mutu benih tanaman pangan yang beredar	Bulan	12	174.568.000		
						Pengujian laboratorium hortikultura	Lembar	100	22.210.000		
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				22.210.000		
						Terbitnya sertifikat benih tanaman hortikultura	Lembar	100	22.210.000		
						Pengujian laboratorium tanaman pangan	Lembar	900	33.870.000		
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				33.870.000		
						Terbitnya sertifikat benih tanaman pangan	Lembar	900	33.870.000		
						Sertifikasi benih hortikultura buah	Batang	300000	47.640.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				47.640.000		
						Tersedianya benih hortikultura tanaman buah bersertifikat	Batang	300000	47.640.000		
						Sertifikasi benih hortikultura sayuran	Ha	100	76.700.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				76.700.000		
						Terpantaunya mutu benih tanaman hortikultura yang beredar	Bulan	12	59.100.000		
						Tersedianya benih hortikultura tanaman sayuran	Ton	1200	17.600.000		
						Sertifikasi benih padi	Ha	3200	265.568.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				265.568.000		
						Tersedianya benih padi bersertifikat	Ton	12800	265.568.000		
						Sertifikasi benih palawija	Ha	600	25.050.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				25.050.000		
						Tersedianya benih palawija bersertifikat	Ton	720	25.050.000		
						Sertifikasi benih tanaman perkebunan	Batang	500000	18.295.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				18.295.000		
						Tersedianya benih tanaman perkebunan	Batang	500000	18.295.000		
						Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan	%	100	75.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					75.000.000		
						jumlah LKMA yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan	Unit	100	75.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				75.000.000		
						Jumlah LKMA yang difasilitasi kegiatan pembiayaan	Orang	100	75.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	OPD Provinsi
						Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani	%	2.5	416.326.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					416.326.000		
						luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha tani	Ha	0	416.326.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				416.326.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Luas lahan yang difasilitasi kegiatan asuransi	Ha	0	416.326.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	OPD Provinsi
						Persentase luas lahan yang dioptimasi	%	2.5	151.065.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					151.065.000		
						jumlah luasan lahan yang dioptimasi	Ha	20	151.065.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				151.065.000		
						jumlah benih mendukung optimasi lahan	Kg	250	4.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	OPD Provinsi
						jumlah pupuk organik mendukung optimasi lahan	Ton	10	147.065.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	OPD Provinsi
						Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi	%	90	2.808.312.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					2.808.312.000		
						jumlah kab/kota yang menyalurkan pupuk sesuai alokasi	Kabupaten/Kota	35	2.808.312.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				2.808.312.000		
						Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi distribusi pupuk	Orang	100	2.808.312.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	OPD Provinsi
						Produksi padi	Ton	9594280	1.905.532.000	Bidang Tanaman Pangan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					1.905.532.000		
						Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (padi)	Ha	1686165	1.905.532.000	SEKSI PADI	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1.905.532.000		
						Capaian luas tanam bantuan benih Padi	Ha	825	1.905.532.000	SEKSI PADI	OPD Provinsi
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						4.564.297.000		
						Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	m	7420274	4.564.297.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Penataan Prasarana Pertanian					4.564.297.000		
						Persentase Jaringan irigasi alternatif	%	5	4.070.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.03.1.01.0001			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				4.070.000.000		
						Jaringan Irigasi Alternatif yang difasilitasi (unit)	Unit	176	4.070.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	OPD Provinsi
						Persentase jaringan irigasi tersier yang baik	%	1.88	494.297.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.03.1.01.0001			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				494.297.000		
						jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi (m)	m	225	494.297.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	OPD Provinsi
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						2.635.000.000		
						Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam	%	5	50.000.000	Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					50.000.000		
						Luasan lahan yang terdampak Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang bisa ditangani	%	5	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	
		3.27.05.1.01.0002			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				50.000.000		
						Luasan lahan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang tertangani	Ha	10	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	%	15	2.585.000.000	Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					2.585.000.000		
						Luasan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terhadap luas pengembangan tanaman	%	15	2.585.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	
		3.27.05.1.01.0001			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				2.585.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Agens Pengendali Hayati (APH) yang diproduksi dan digunakan untuk pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Liter	400	29.173.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Luasan pengendalian OPT tanaman hortikultura (bawang merah, bawang putih, cabe)	Ha	20	39.370.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Luasan pengendalian OPT tanaman pangan (padi, jagung kedelai)	Ha	40	232.362.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Luasan pengendalian OPT tanaman perkebunan (tebu, kelapa, kopi)	Ha	20	2.284.095.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						8.823.357.000		
						Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2.5	5.463.357.000	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	
				Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					270.000.000		
						Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2.5	270.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
		3.27.07.1.01.0004			Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				270.000.000		
						Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	100	270.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	OPD Provinsi
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					5.088.130.000		
						Persentase jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan	%	0.2	5.088.130.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
		3.27.07.1.02.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				5.088.130.000		
						Jumlah kelompok tani yang difasilitasi promosi pemasaran	Kelompok	30	79.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	OPD Provinsi
						Jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	30	5.009.130.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	OPD Provinsi
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					105.227.000		
						Persentase peningkatan jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi	%	20	105.227.000	SEKSI BINA USAHA	
		3.27.07.1.03.0006			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				105.227.000		
						Jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi	Unit	1	105.227.000	SEKSI BINA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih	%	100	3.360.000.000	BALAI PELATIHAN PERTANIAN	
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					3.360.000.000		
						Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian	Orang	2100	3.360.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		3.27.07.1.02.0001			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				2.040.000.000		
						Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM pertanian	Orang	1200	2.040.000.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi
		3.27.07.1.02.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				1.320.000.000		
						Optimalisasi capaian sasaran teknis SDM pertanian	Orang	900	1.320.000.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan								**25.932.126.000**		
						Persentase peningkatan produksi kelapa	%	0.009	1.318.078.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1.318.078.000		
						Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	1	1.148.078.000	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					1.148.078.000		
						Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman rempah dan penyegar	%	1	440.883.000	SEKSI PRODUKSI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				440.883.000		
						Produksi tanaman rempah dan penyegar	Kg	35000	302.245.000	SEKSI PRODUKSI	
						Produksi tanaman rempah dan penyegar	Kg	55000	138.638.000	SEKSI PRODUKSI	
						Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman semusim	%	1	520.926.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				520.926.000		
						Produksi tanaman semusim	Ton	1200	520.926.000	SEKSI PRODUKSI	
						Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman tahunan	%	1	186.269.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				186.269.000		
						Produksi tanaman tahunan	Butir	35000	186.269.000	SEKSI PRODUKSI	
						Produksi kelapa	Ton	166687	170.000.000		
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					170.000.000		
						Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kelapa	Ha	50	170.000.000		
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				170.000.000		
						Jumlah sarana produksi tanaman kelapa yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Batang	1000	130.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah sarana produksi tanaman tahunan lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Batang	1500	40.000.000		OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi kopi	%	0.009	280.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						280.000.000		
						Produksi kopi	Ton	25927	280.000.000	Bidang Perkebunan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					280.000.000		
						Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kopi	Ha	40	280.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				280.000.000		
						Jumlah sarana produksi tanaman kopi yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Batang	12500	260.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	OPD Provinsi
						Jumlah sarana produksi tanaman tanaman rempah dan penyegar lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Batang	800	20.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi tebu	%	0.009	24.334.048.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						24.334.048.000		
						Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan	%	3	2.172.440.000	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.172.440.000		
						Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar siap salur	%	3	242.472.000	SEKSI BENIH	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				242.472.000		
						Tersedianya benih tanaman rempah dan penyegar siap tanam	Batang	10000	242.472.000	SEKSI BENIH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman semusim siap salur	%	3	1.823.334.000	SEKSI BENIH	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				1.823.334.000		
						Tersedianya benih tanaman semusim siap tanam	Batang	34500	1.823.334.000	SEKSI BENIH	
						Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman tahunan siap salur	%	4	106.634.000	SEKSI BENIH	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				106.634.000		
						Tersedianya benih tanaman tahunan siap tanam	Batang	1500	106.634.000	SEKSI BENIH	
						Produksi tebu	Ton	2554553	22.161.608.000		
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					22.161.608.000		
						Peningkatan luas tanaman produktif (TM) tebu	Ha	300	22.161.608.000		
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				22.161.608.000		
						Jumlah bantuan pupuk anorganik untuk tanaman semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Kg	1798800	20.561.608.000		OPD Provinsi
						Jumlah sarana produksi tanaman semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Batang	43200	1.500.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah sarana produksi tanaman tebu yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Kg	1500	100.000.000		OPD Provinsi
Meningkatkan Kesejahteraan Petani											
						NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Angka	108.56			
	Meningkatnya NTP Hortikultura										
						NTP Hortikultura	Angka	108.11			
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
						Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura	%	1.5			
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian							
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	5			
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian						
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	5			
	Meningkatnya NTP Perkebunan										
						NTP Perkebunan Rakyat	Angka	100.59			
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
						Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan	%	1.5			
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian							
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	2			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian						
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	2			
	Meningkatnya NTP Tanaman Pangan										
						NTP Tanaman Pangan	Angka	105.19			
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
						Persentase peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan	%	1.5			
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian							
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	3			
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian						
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	3			
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**145.411.699.000**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	100		Dinas Pertanian dan Perkebunan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**144.726.699.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	144.726.699.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						144.726.699.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	945.000.000	BALAI PELATIHAN PERTANIAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					77.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					180.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				25.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				130.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					432.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	432.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				180.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					256.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	256.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				76.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	76.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	725.000.000	Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					105.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					435.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	435.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				225.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	225.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					165.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				125.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	102.412.070.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					96.377.408.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	96.377.408.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				92.016.449.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	618	92.016.449.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4.360.959.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	4.360.959.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					230.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	230.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				180.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				45.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	20	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					915.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	915.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				70.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	5	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				45.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	5	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	20	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					484.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	13	484.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	2		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	3		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				289.300.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	289.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				195.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3	195.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.182.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.182.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	5	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.100.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				135.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	2	135.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				935.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	935.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.148.362.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	25	2.148.362.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				750.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	17	750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				389.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	389.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				227.788.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	227.788.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				336.574.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	336.574.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				445.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	445.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	15.091.030.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					105.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.914.110.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	3.914.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.914.110.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	16	3.914.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					235.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	235.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				80.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.836.920.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	10.836.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.720.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	36.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				7.090.900.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	9	7.090.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.669.300.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	3.669.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	3.942.704.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					16.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				16.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					86.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	86.400.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1			OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0	10.000.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000		OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen				OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	10.000.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.400.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	46.400.000		OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	8		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					344.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	344.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	135.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				194.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	194.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.495.704.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	3.495.704.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				107.400.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	107.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.033.304.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	49	1.033.304.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.355.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	2.355.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	754.450.000	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					42.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				42.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					70.680.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	70.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.900.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.280.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu						
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	7	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					371.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	371.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				179.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	179.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				190.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.370.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	70.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.620.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	42.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	27.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	11.087.000.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					2.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.310.417.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	3.310.417.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.238.417.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.238.417.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	5	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	10	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					315.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	315.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				130.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.459.083.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	7.459.083.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				7.386.583.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	7.386.583.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	9.769.445.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					114.695.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	114.695.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.155.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	26.155.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Laporan	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.540.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	43.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.029.750.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	5.029.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	10		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.029.750.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	6	5.029.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					351.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	351.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.268.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	4.268.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				65.000.000		
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				56.200.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	56.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.427.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	9	2.427.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.720.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	1.720.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**685.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	100	685.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						685.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	685.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					685.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	685.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				450.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	450.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				235.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	21	235.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
JUMLAH									**224.524.938.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan ketahanan energi									**21.161.964.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
						Indeks Ketahanan Energi	Angka	4.5		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam Bauran Energi								**7.684.499.000**		
						Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	18.41	7.684.499.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN						7.684.499.000		
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	SBM	590300.484	1.461.221.000		
				Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi					1.461.221.000		
						Persentase desa yang melaksanakan Konservasi Energi di Jawa Tengah	%	28.72	1.461.221.000		
		3.29.05.1.10.0002			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				1.461.221.000		
						Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED di Jawa Tengah	Dokumen	5	423.286.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah	Orang	2534	1.037.935.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	SBM	23599.9	216.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					216.000.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria	Orang	203	216.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				216.000.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Kendeng Muria	Unit	7	216.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	SBM	78666.36	655.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					655.000.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	Orang	240	655.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				655.000.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Kendeng Selatan	Unit	7	655.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	SBM	86438.18	538.500.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					538.500.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Merapi	Orang	495	538.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				538.500.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Merapi	Unit	10	538.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak	SBM	39394.34	482.878.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					482.878.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Semarang Demak	Orang	204	482.878.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				482.878.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Semarang Demak	Unit	17	482.878.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	SBM	122.33	274.500.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					274.500.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan	Orang	60	274.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				274.500.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Selatan	Unit	4	274.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	SBM	39287.3	282.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					282.000.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Tengah	Orang	177	282.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				282.000.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Tengah	Unit	4	282.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	SBM	125685.73	705.500.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					705.500.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara	Orang	375	705.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				705.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Utara	Unit	11	705.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu	SBM	39363.76	418.500.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					418.500.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Sewu Lawu	Orang	150	418.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				418.500.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Sewu Lawu	Unit	5	418.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	SBM	78562.37	695.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					695.000.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Selatan	Orang	96	695.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				695.000.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Slamet Selatan	Unit	5	695.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	SBM	91.75	207.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					207.000.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Utara	Orang	45	207.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				207.000.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Slamet Utara	Unit	3	207.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	SBM	39608.43	934.400.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					934.400.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Solo	Orang	270	934.400.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				934.400.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Solo	Unit	41	934.400.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	SBM	39480.034	814.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					814.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	Orang	219	814.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				814.000.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Ungaran Telomoyo	Unit	25	814.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
	Terpenuhinya kebutuhan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat								**13.477.465.000**		
						Tingkat konsumsi tenaga listrik	KWh/Kapita	768.1	13.477.465.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						13.477.465.000		
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	63.81	1.101.207.000		
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					1.101.207.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	30.19	1.101.207.000		
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1.101.207.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Jawa Tengah	Laporan	28	1.101.207.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	%	51.09	490.200.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					58.350.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria	%	100	58.350.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				58.350.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Muria	Dokumen	35	58.350.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					86.700.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	%	4.78	86.700.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				86.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Kendeng Muria	Laporan	50	86.700.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					345.150.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Muria	%	97.39	345.150.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				45.250.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng Muria	Dokumen	1	45.250.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				299.900.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Muria	RT/KK	200	299.900.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	%	49.66	1.615.558.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					55.000.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Selatan	%	100	55.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					55.000.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	20	55.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					166.780.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	%	1.93	166.780.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				166.780.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Kendeng Selatan	Laporan	55	166.780.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					1.393.778.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Selatan	%	97.39	1.393.778.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				86.728.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	1	86.728.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.307.050.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Selatan	RT/KK	950	1.307.050.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	%	49.64	1.026.240.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					67.350.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Merapi	%	100	67.350.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					67.350.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Merapi	Dokumen	35	67.350.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					82.200.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	%	1.89	82.200.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				82.200.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Merapi	Laporan	35	82.200.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					876.690.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Merapi	%	97.39	876.690.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				75.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Merapi	Dokumen	1	75.750.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				800.940.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Merapi	RT/KK	550	800.940.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	%	51.86	731.050.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					100.000.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Semarang Demak	%	100	100.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				100.000.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Semarang Demak	Dokumen	60	100.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					95.000.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	%	6.34	95.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				95.000.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Semarang Demak	Laporan	50	95.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					536.050.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Semarang Demak	%	97.39	536.050.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				36.000.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Semarang Demak	Dokumen	1	36.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				500.050.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Semarang Demak	RT/KK	350	500.050.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	%	49.36	1.253.615.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					39.650.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Selatan	%	100	39.650.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				39.650.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Selatan	Dokumen	20	39.650.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					51.975.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	%	1.34	51.975.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				51.975.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Selatan	Laporan	25	51.975.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					1.161.990.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Selatan	%	97.39	1.161.990.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				38.400.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Selatan	Dokumen	1	38.400.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.123.590.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Selatan	RT/KK	800	1.123.590.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	%	49.08	1.470.690.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					55.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Tengah	%	100	55.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				55.000.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Tengah	Dokumen	20	55.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					87.500.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	%	0.78	87.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				87.500.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Tengah	Laporan	25	87.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					1.328.190.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Tengah	%	97.39	1.328.190.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				76.400.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Tengah	Dokumen	1	76.400.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.251.790.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Tengah	RT/KK	900	1.251.790.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	%	49.97	513.790.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					48.000.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Utara	%	100	48.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				48.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Utara	Dokumen	25	48.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					103.500.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	%	2.56	103.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				103.500.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Utara	Laporan	55	103.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					362.290.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Utara	%	97.39	362.290.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				34.300.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Utara	Dokumen	1	34.300.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				327.990.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Utara	RT/KK	200	327.990.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	%	49.57	1.061.465.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					47.150.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Sewu Lawu	%	100	47.150.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					47.150.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Sewu Lawu	Dokumen	25	47.150.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					51.975.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	%	1.74	51.975.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				51.975.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Sewu Lawu	Laporan	25	51.975.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					962.340.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Sewu Lawu	%	97.39	962.340.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				33.200.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Sewu Lawu	Dokumen	1	33.200.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				929.140.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Sewu Lawu	RT/KK	650	929.140.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	%	49.59	1.479.790.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					52.500.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Selatan	%	100	52.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				52.500.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Selatan	Dokumen	35	52.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					73.680.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	%	1.78	73.680.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				73.680.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Selatan	Laporan	45	73.680.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					1.353.610.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Selatan	%	97.39	1.353.610.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				57.960.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Selatan	Dokumen	1	57.960.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.295.650.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Selatan	RT/KK	950	1.295.650.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	%	49.96	1.515.450.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					52.500.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Utara	%	100	52.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					52.500.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Utara	Dokumen	20	52.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					97.500.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	%	2.52	97.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				97.500.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Utara	Laporan	35	97.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					1.365.450.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Utara	%	97.39	1.365.450.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				64.100.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Utara	Dokumen	1	64.100.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.301.350.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Utara	RT/KK	950	1.301.350.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	%	49.7	800.010.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					49.470.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Solo	%	100	49.470.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					49.470.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Solo	Dokumen	25	49.470.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					87.040.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	%	2	87.040.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				87.040.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Solo	Laporan	45	87.040.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					663.500.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo	%	97.39	663.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				61.910.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Solo	Dokumen	1	61.910.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				601.590.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Solo	RT/KK	400	601.590.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	%	49.95	418.400.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					92.500.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Ungaran Telomoyo	%	100	92.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				92.500.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	45	92.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					125.000.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	%	2.52	125.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				125.000.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo	Laporan	50	125.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					200.900.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Ungaran Telomoyo	%	97.39	200.900.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				45.600.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	1	45.600.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				155.300.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Ungaran Telomoyo	RT/KK	100	155.300.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
Meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB									**4.315.593.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
						Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	2.13		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya produktivitas pemanfaatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan								**4.315.593.000**		
						Persentase penerapan Good Mining Practice (GMP)	%	53	4.315.593.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						4.315.593.000		
						Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	362.380.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					362.380.000		
						Persentase realisasi pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	362.380.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	
		3.29.03.1.01.0006			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut			362.380.000		
						Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut di Jawa Tengah	Laporan	240	362.380.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah	%	60	1.969.170.000		
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					1.720.770.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	%	60	1.720.770.000		
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1.720.770.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Jawa Tengah	Laporan	4	1.720.770.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan					248.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase deviasi harga pasar dengan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	%	10	248.400.000		
		3.29.03.1.07.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan				248.400.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam	Laporan	1	248.400.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	%	60	143.400.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				143.400.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	%	60	143.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				30.700.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria	Dokumen	15	30.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				112.700.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria	Laporan	30	112.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	%	60	196.650.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				196.650.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	%	60	196.650.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				52.725.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	29	52.725.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				143.925.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan	Laporan	55	143.925.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	%	60	232.500.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				232.500.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	%	60	232.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				75.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Merapi	Dokumen	50	75.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut				157.500.000		

					sampai dengan 12 Mil Laut						
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Merapi	Laporan	45	157.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak	%	60	170.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					170.000.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	%	60	170.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				59.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak	Dokumen	30	59.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				111.000.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak	Laporan	40	111.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	%	60	132.140.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					132.140.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	%	60	132.140.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin				32.400.000		

					Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan	Dokumen	10	32.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				99.740.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan	Laporan	40	99.740.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	%	60	100.975.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				100.975.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	%	60	100.975.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				20.725.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah	Dokumen	10	20.725.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				80.250.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah	Laporan	24	80.250.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara	%	60	142.400.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					142.400.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	%	60	142.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				37.400.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara	Dokumen	20	37.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				105.000.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara	Laporan	30	105.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	%	60	133.820.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					133.820.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu	%	60	133.820.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				47.500.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Sewu Lawu	Dokumen	25	47.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				86.320.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Sewu Lawu	Laporan	30	86.320.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	%	60	253.508.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				253.508.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	%	60	253.508.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				53.670.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan	Dokumen	21	53.670.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				199.838.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan	Laporan	45	199.838.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	%	60	199.500.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				199.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	%	60	199.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				62.500.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara	Dokumen	35	62.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				137.000.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara	Laporan	60	137.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	%	60	197.900.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				197.900.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	%	60	197.900.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				82.400.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Solo	Dokumen	50	82.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha				115.500.000		

					Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Solo	Laporan	35	115.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo	%	60	81.250.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					81.250.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo	%	60	81.250.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				22.500.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	15	22.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				58.750.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo	Laporan	20	58.750.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**54.876.920.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	71		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**53.908.232.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90.25	53.908.232.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						53.908.232.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.002.502.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					305.900.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	305.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				98.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	98.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	20.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				32.400.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	32.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				119.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	119.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					103.825.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	18	103.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				48.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.825.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	7	55.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					358.577.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	358.577.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				88.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	88.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				264.827.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	264.827.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	38	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				65.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	30	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	894.615.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					214.665.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	214.665.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.850.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	35.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.815.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	3.815.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				102.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	102.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					35.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	50	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				35.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					424.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	424.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				88.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	88.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				331.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	331.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					156.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	43	156.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				47.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	47.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				8.250.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	2	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	37	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	867.500.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					254.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	254.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				103.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	103.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				76.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	76.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					60.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	51	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				15.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	7	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					387.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	387.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				64.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	64.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				318.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	318.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					102.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	18	102.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	14	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	914.131.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					294.116.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	294.116.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				123.596.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	123.596.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.895.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	15.895.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	24.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.625.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				97.750.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	97.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					36.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	37	36.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.250.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	37	36.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					442.915.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	442.915.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				352.915.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	352.915.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					76.650.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	25	76.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.650.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	23.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				6.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	823.018.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					239.713.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	239.713.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.300.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	60.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.102.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	35.102.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				106.811.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	106.811.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					67.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	35	67.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				67.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	67.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					368.755.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	368.755.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				73.716.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	73.716.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				290.039.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	290.039.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					83.350.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	48	83.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.100.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	23.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.250.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	44	35.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.092.831.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					465.280.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	465.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				265.450.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	265.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	15.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.330.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	30.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				119.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	119.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.650.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	1.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.650.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	1.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					416.701.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	416.701.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				82.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	82.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				329.201.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	329.201.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					145.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	33	145.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	27	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	777.279.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					219.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	219.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.800.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	45.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.300.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	33.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.800.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				93.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	93.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					403.679.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	403.679.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	60.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				338.079.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	338.079.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	19	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				38.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	988.187.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					337.810.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	337.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				143.100.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	143.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.116.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	33.116.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.594.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	7.594.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				119.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	119.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					52.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	39	52.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				6.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.250.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	38	46.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					421.427.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	421.427.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.910.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				83.817.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	83.817.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				333.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	333.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					112.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12	112.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	45.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	936.664.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					279.429.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	279.429.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				125.379.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	125.379.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	26.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	19.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72.250.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	72.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					8.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	11	8.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				3.300.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					465.012.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	465.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				83.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	83.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				377.012.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	377.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.723.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	38	119.723.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				38.923.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	38.923.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.300.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	8	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	27	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	40.600.858.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.854.878.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	34.854.878.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				34.062.298.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	190	34.062.298.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				395.340.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	395.340.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				135.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	135.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				45.000.000		
						Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen	12	45.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				217.240.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	217.240.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					345.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	345.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				300.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				45.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					188.600.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	188.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				40.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	36	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				13.600.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	72	13.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				35.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	10	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.381.104.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.381.104.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				202.354.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	202.354.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				180.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				58.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	58.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				25.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					722.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	6	722.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				690.000.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	4	690.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				25.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.519.026.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	2.519.026.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	21.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				600.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	16.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.881.176.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.881.176.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					590.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	72	590.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				210.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	17	210.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.250.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	5.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	25	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	934.335.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					325.043.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	325.043.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				137.020.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	137.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.023.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	36.023.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				102.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	102.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					27.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	6	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				12.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410.592.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	410.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				87.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	87.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				318.192.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	318.192.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	47	107.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	42	32.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	934.640.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					396.940.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	396.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				220.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	220.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.440.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	28.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				102.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	102.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					11.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				11.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					376.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	376.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				71.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	71.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				300.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					86.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	19	86.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				38.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	38.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	8	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				28.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	7	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.120.672.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					414.158.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	414.158.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.400.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				225.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	225.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.400.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	17.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.858.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	33.858.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				102.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	102.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100.143.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	40	100.143.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				57.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	57.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				43.143.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	6	43.143.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					302.571.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	302.571.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				64.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				233.371.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	233.371.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					239.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	20	239.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				36.300.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	36.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.600.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	6	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				180.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	19.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.021.000.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					285.625.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	285.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				107.675.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	107.675.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				33.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	33.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				128.250.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	128.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					758.150.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	50	758.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				758.150.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	50	758.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					439.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	439.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				434.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	434.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					473.925.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	209	473.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				461.925.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	208	461.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**968.688.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	968.688.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						968.688.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	968.688.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					968.688.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	968.688.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				603.520.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	603.520.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				365.168.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	18	365.168.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan									**2.725.496.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
						Indeks Pengelolaan Air Tanah	Angka	301		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya konservasi air tanah								**2.725.496.000**		
						Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka	3.6	2.725.496.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN						2.725.496.000		
						Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	984.900.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					984.900.000		
						Persentase realisasi pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	984.900.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	
		3.29.02.1.03.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah				984.900.000		
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul di Jawa Tengah	Dokumen	1450	984.900.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah	%	27.5	709.346.000		
				Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					409.946.000		
						Jumlah cakupan wilayah penyediaan data geologi di Jawa Tengah	Kabupaten/ Kota	35	409.946.000		
		3.29.02.1.01.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah				409.946.000		
						Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi yang tersedia di Jawa Tengah	Dokumen	2	409.946.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					299.400.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Jawa Tengah	%	100	299.400.000		
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				299.400.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Jawa Tengah	Laporan	4	299.400.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	3.4	63.700.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					63.700.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Muria	%	100	63.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				63.700.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Muria	Laporan	25	63.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	2.4	46.900.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					46.900.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Selatan	%	100	46.900.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				46.900.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Selatan	Laporan	20	46.900.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	2.8	58.500.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					58.500.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Merapi	%	100	58.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				58.500.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Merapi	Laporan	25	58.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	2.9	148.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					148.000.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Semarang Demak	%	100	89.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				89.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Semarang Demak	Laporan	45	89.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Semarang Demak	%	100	59.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				59.000.000		
						Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Semarang Demak	Dokumen	30	59.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	2.2	47.700.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					47.700.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Selatan	%	100	47.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				47.700.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Selatan	Laporan	20	47.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	1.6	53.725.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					53.725.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Tengah	%	100	53.725.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				53.725.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Tengah	Laporan	20	53.725.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	1.7	154.800.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					154.800.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Utara	%	100	92.800.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				92.800.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Utara	Laporan	50	92.800.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Utara	%	100	62.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				62.000.000		
						Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Serayu Utara	Dokumen	30	62.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	1.6	79.500.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					79.500.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Sewu Lawu	%	100	79.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				79.500.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Sewu Lawu	Laporan	25	79.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	2.7	84.750.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					84.750.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Selatan	%	100	84.750.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				84.750.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Selatan	Laporan	25	84.750.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	4.1	183.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					183.000.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Utara	%	100	108.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				108.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Utara	Laporan	50	108.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Utara	%	100	75.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				75.000.000		
						Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Slamet Utara	Dokumen	40	75.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	1.6	63.250.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					63.250.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Solo	%	100	63.250.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				63.250.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Solo	Laporan	30	63.250.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1.8	47.425.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					47.425.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Ungaran Telomoyo	%	100	47.425.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				47.425.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo	Laporan	25	47.425.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
JUMLAH									**83.079.973.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**61.668.339.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	80		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**60.106.395.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86.1	60.106.395.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						60.106.395.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.233.040.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					86.280.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	86.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				86.280.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	5	86.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					307.260.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	307.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				112.260.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	8	112.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	2	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					120.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	9	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	9		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	3	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					516.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	516.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				176.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	176.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				340.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3	340.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					178.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	19	178.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				66.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	66.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.220.745.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					76.080.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	76.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				76.080.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	76.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9.366.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	9.366.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9.366.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	9.366.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					274.695.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	274.695.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				37.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	37.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.695.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	45.695.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				45.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	8	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					614.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	614.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				145.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	145.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				466.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	466.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					235.304.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	41	235.304.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				66.304.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	66.304.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				89.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	89.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	6.310.070.000	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					82.320.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	82.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				82.320.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	82.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					35.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				35.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					236.570.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	236.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				84.070.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	84.070.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				37.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	48	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	48	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.122.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	9	4.122.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.122.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	8	4.122.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.234.180.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	1.234.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				355.780.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	355.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				878.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	878.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					600.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	30	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	6	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				370.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	370.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	5.694.500.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					93.480.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	93.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				93.480.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	93.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					318.179.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	318.179.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				55.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				84.050.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	11	84.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.800.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	19.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.365.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	4.365.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				49.964.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	49.964.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.040.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	129	3.040.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.040.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	3	3.040.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.229.620.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	1.229.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.720.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				375.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	375.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				846.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	846.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					973.221.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	30	973.221.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	49.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				202.600.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	100	202.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				525.421.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	525.421.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				125.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	125.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	40.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.300.650.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					88.680.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	88.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				88.680.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	88.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					522.370.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	522.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.970.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	34.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				139.400.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	139.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	0	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				223.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	2	223.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					471.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	16	471.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				471.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0	471.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					772.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	772.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				285.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	285.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				487.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	487.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					401.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	41	401.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.100.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	30.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	3	57.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				45.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				134.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	134.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	29.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	0	43.347.390.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.385.190.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	34.385.190.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				33.264.030.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	204	33.264.030.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.009.760.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	1.009.760.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				21.575.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	21.575.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				80.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	2	80.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				9.825.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	9.825.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	0		SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					175.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				75.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					92.850.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	2	92.850.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0002			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				65.000.000		
						Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	Dokumen	2	65.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				27.850.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	2	27.850.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.295.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	3	1.295.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				150.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				75.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1.070.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	800	1.070.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.498.250.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.498.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				111.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	10	111.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				160.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				115.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	115.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				30.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				813.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	813.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				48.750.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	48.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					316.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	%	33	316.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				25.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	24	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				197.850.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	22	197.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				93.750.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	93.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.099.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	2	4.099.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.675.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.675.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.414.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	2.414.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.485.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	56	1.485.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	40	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				15.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				198.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	25	198.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				20.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				355.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	355.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				110.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	40	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				487.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	487.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah								**1.561.944.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.05	1.561.944.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.561.944.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	0	1.561.944.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.561.944.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.561.944.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				742.545.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	742.545.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				819.399.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	8	819.399.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan									**31.983.395.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
						Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3.25		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya persentase nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB								**31.983.395.000**		
						Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB	%	3.89	31.983.395.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						30.869.870.000		
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4.38	12.537.469.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					12.537.469.000		
						Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan dan Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan	Orang	100	12.537.469.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1.141.553.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	3	1.141.553.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN	
		3.31.02.1.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				11.395.916.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat di BIKDK	Dokumen	1	11.395.916.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN	
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	3.45	2.830.100.000	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					2.830.100.000		
						Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan dan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna	Orang	340	2.830.100.000	SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2.830.100.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2	2.830.100.000	SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN	
						Persentase pertumbuhan produksi industri agro	%	2.25	5.170.141.000	Bidang Industri Agro	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					5.170.141.000		
						Jumlah Informasi Industri Agro	Dokumen	1	85.630.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.02.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				85.630.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	85.630.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
						Jumlah Pelaku Industri Agro yang mendapatkan fasilitasi	Orang	12	3.383.911.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	
		3.31.02.1.01.0004			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1.443.815.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	2	1.443.815.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	
		3.31.02.1.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1.940.096.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1.940.096.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	
						Jumlah SDM Industri Agro Yang dilatih	Orang	200	1.700.600.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1.700.600.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2	1.700.600.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO	
						Persentase pertumbuhan produksi industri non agro	%	2.25	3.843.068.000	Bidang Industri Non Agro	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					3.843.068.000		
						Jumlah Informasi Industri Non Agro	Dokumen	1	40.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				40.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	40.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
						Jumlah Pelaku Industri Non Agro yang mendapatkan fasilitasi	Orang	9	2.966.838.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.0004			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1.318.480.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	2	1.318.480.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1.648.358.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1.648.358.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO	
						Jumlah SDM Industri Non Agro Yang dilatih	Orang	100	836.230.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				836.230.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	3	836.230.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO	
						Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	85	6.489.092.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					6.489.092.000		
						Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil dan alas kaki	Orang	2000	6.489.092.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				6.489.092.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	4	6.489.092.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL	
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						290.000.000		
						Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	7	80.000.000	Bidang Industri Agro	
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi					80.000.000		
						Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan	Dokumen	5	80.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.03.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi				40.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI,IPKI Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	40.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.03.1.01.0004			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				40.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	Dokumen	5	40.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
						Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	10	210.000.000	Bidang Industri Non Agro	
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi					210.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan	Dokumen	50	210.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.03.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi				25.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI,IPKI Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	25.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.03.1.01.0004			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				185.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	Dokumen	2	185.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						823.525.000		
						Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1.62	507.525.000	Bidang Industri Agro	
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					507.525.000		
						Jumlah penambahan Industri Agro dalam SIINAS	Unit	20	507.525.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.04.1.01.0001			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				394.692.000		
						Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	2	394.692.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.04.1.01.0002			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				40.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Provinsi melalui SIINaS	Dokumen	1	40.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.04.1.01.0003			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				72.833.000		
						Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas	Dokumen	1	72.833.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
						Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	2	316.000.000	Bidang Industri Non Agro	
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					316.000.000		

						Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Non Agro dalam SIINAS	Unit	28	316.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.04.1.01.0001			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				50.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.04.1.01.0002			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				25.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Provinsi melalui SIINaS	Dokumen	1	25.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.04.1.01.0003			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				241.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas	Dokumen	1	241.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (Inf)									**1.980.961.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
						Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4.51		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Terjaganya Inflasi Pangan Bergejolak								**1.980.961.000**		
						Inflasi pangan bergejolak	%	4	1.980.961.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						1.980.961.000		
						Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota	%	10	1.980.961.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi					76.665.000		
						Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau ketersediaannya	Komoditi	10	76.665.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.04.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				76.665.000		
						Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat distributor dan sub distributor	Laporan	2	76.665.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
				Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					1.904.296.000		
						Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang di pantau Harganya	Unit	34	487.656.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.04.1.02.0001			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				487.656.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	12	487.656.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
						Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas	Lokasi	35	1.416.640.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.04.1.02.0002			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1.416.640.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab / kota dalam 1 provinsi	Laporan	4	1.416.640.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (PE)									**9.001.578.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
						Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4.51		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya persentase nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB								**9.001.578.000**		
						Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	%	4.82	9.001.578.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						117.640.000		
						Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah	%	8	50.000.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri	
				Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)					50.000.000		
						Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal	%	3.5	50.000.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
		3.30.02.1.04.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				50.000.000		
						Jumlah dokumen penerbitan SKA	Dokumen	104000	50.000.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
						Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	%	10	67.640.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor					12.660.000		
						Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi SIUP MB	Unit	2	12.660.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.02.1.01.0001			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12.660.000		
						Jumlah SIUP MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perozonan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Dokumen	2	12.660.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan					42.100.000		

				Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi							
						Jumlah fasilitasi perijinan berusaha bagi distributor bahan berbahaya	Unit	15	42.100.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.02.1.02.0001			Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				42.100.000		
						Jumlah dokumen hasil fasilitasi perizinan berusaha terintegrasi secara elesktronik	Dokumen	15	42.100.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
				Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar					12.880.000		
						Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi Bahan Berbahaya	Unit	1	12.880.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.02.1.03.0001			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				12.880.000		
						Jumlah surat rekomendasi perdagangan besar/ Distribusi Bahan Berbahaya melalui OSS	Dokumen	1	12.880.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
						Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	%	0		Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar							
						Jumlah Pelaku Usaha Bahan Berbahaya Yang diawasi	Orang	0		SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.02.1.03.0003			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya						
						Jumlah laporan Pengawasan distribusi , pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	Laporan	0		SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						634.445.000		
						Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi	%	10	634.445.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas					634.445.000		
						Jumlah Pelaku Pasar Rakyat yang Dilatih	Orang	80	162.490.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
		3.30.03.1.01.0002			Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				162.490.000		
						Jumlah laporan persiapan pembangunan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	3	162.490.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
						Jumlah Persiapan dan Pembangunan Pusat Distribusi Regional dan Pusat DIstribusi Provinsi	Kegiatan	1	80.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
		3.30.03.1.01.0001			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				80.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	0	80.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
						Realisasi transaksi dipasar lelang	Kali	13	391.955.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.03.1.01.0003			Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas				391.955.000		
						Jumlah pengguna pasar lelang komoditas yang berpartisipasi	Orang	410	391.955.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						335.444.000		
						Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90	265.284.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya					265.284.000		
						Jumlah kegiatan pengadaan pupuk dan pestisida yang diawasi	Kegiatan	1	36.500.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.04.1.03.0002			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi				36.500.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi	Laporan	1	36.500.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
						Jumlah pelaku usaha distribusi pupuk bersubsidi yang diperiksa perizinannya	Orang	20	31.100.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.04.1.03.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida				31.100.000		
						jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida	Laporan	6	31.100.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.04.1.03.0005			Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi						
						Jumlah laporan hasil Pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan distribusi	Laporan	0		SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
						Jumlah pelaku usaha pupuk yang pendistribusiannya tidak sesuai ketentuan	Orang	15	197.684.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.04.1.03.0003			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi				197.684.000		
						Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90 %	Laporan	1	197.684.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
						Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi	%	30	70.160.000	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya					70.160.000		
						Jumlah Pelaku Usaha Pupuk Bersubsidi Yang diawasi	Orang	80	70.160.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.04.1.03.0005			Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi				70.160.000		
						Jumlah laporan hasil Pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan distribusi	Laporan	0	70.160.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						2.980.978.000		
						Persentase kenaikan nilai ekspor non migas	%	2	2.980.978.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri	
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					2.980.978.000		
						Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri	Dokumen	3	458.846.000	SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR	
		3.30.05.1.01.0004			Peningkatan Citra Produk Ekspor				458.846.000		
						Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	Komoditi	4	458.846.000	SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR	
						Jumlah Pelaku Usaha Yang Melakukan Ekspor	Orang	1400	1.157.191.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.30.05.1.01.0002			Pameran Dagang Lokal				1.157.191.000		
						Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	Orang	60	1.157.191.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
						Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi	Dokumen	2	1.364.941.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.05.1.01.0001			Pameran Dagang Internasional/Nasional				1.185.621.000		
						Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	Orang	7	1.185.621.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.05.1.01.0002			Pameran Dagang Lokal						
						Jumlah pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang lokal	Orang	0		SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.05.1.01.0003			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				179.320.000		
						Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang	Orang	107	179.320.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						3.482.628.000		
						Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen	%	1	1.642.266.000	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					845.190.000		
						Jumlah Laporan Aduan Masyarakat	Laporan	10	421.170.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		3.30.06.1.01.0002			Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen				46.835.000		
						Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang aktif	Kelompok	7	46.835.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		3.30.06.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen				374.335.000		
						Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani	Dokumen	10	374.335.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
						Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi	Orang	300	424.020.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		3.30.06.1.01.0001			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen				424.020.000		
						Jumlah Badan Penanganan Sengketa Konsumen (BPSK) yang aktif	Kelompok	1	424.020.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					575.056.000		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Standarisasi Industri	Orang	50	575.056.000	SEKSI STANDARISASI INDUSTRI	
		3.30.06.1.02.0006			Pemantauan Mutu Produk				31.860.000		
						Jumlah komoditi potensial yang dipantau	Komoditi	13	31.860.000	SEKSI STANDARISASI INDUSTRI	
		3.30.06.1.02.0007			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi				543.196.000		
						Jumlah sertifikat produk yang di terbitkan	Sertifikat	4	543.196.000	SEKSI STANDARISASI INDUSTRI	
				Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					222.020.000		
						Jumlah Barang Beredar Yang diawasi (Unit Barang)	Unit	100	222.020.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.06.1.03.0003			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				222.020.000		
						Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	Laporan	6	222.020.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	%	10	636.450.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A	
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					636.450.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu	Kegiatan	990	636.450.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0004			Pengembangan Layanan Kalibrasi				100.000.000		
						Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	990	100.000.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0005			Pengembangan Layanan Pengujian				536.450.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	40	536.450.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0006			Pemantauan Mutu Produk						
						Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi			SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0007			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi						
						Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat			SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	%	5	1.203.912.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A	
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					1.203.912.000		
						Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu	Kegiatan	2787	1.203.912.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0004			Pengembangan Layanan Kalibrasi				210.000.000		
						Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	980	210.000.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0005			Pengembangan Layanan Pengujian				793.912.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	1600	793.912.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0006			Pemantauan Mutu Produk						
						Jumlah komoditi ekspor yang dipantau	Komoditi	0		SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0007			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi				200.000.000		
						Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat	20	200.000.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						1.450.443.000		
						Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	%	10	1.450.443.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri					801.770.000		
						Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi	Orang	20	509.100.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.07.1.01.0002			Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				509.100.000		
						Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepesertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	Unit	20	509.100.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
						Jumlah pengembangan sistem informasi perdagangan	Kegiatan	1	292.670.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
		3.30.07.1.01.0002			Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				292.670.000		
						Jumlah data dan informasi Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Dokumen	1	292.670.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
				Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri					274.513.000		
						Jumlah Fasilitasi kemitraan	Dokumen	25	274.513.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.07.1.02.0002			Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				274.513.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan, dan jasa akomodasi	Kelompok	260	274.513.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
				Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					374.160.000		
						Jumlah orang yang mendapatkan edukasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Orang	1150	374.160.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.07.1.03.0002			Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				62.900.000		
						Jumlah laporan Sosialisasi peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Laporan	1	62.900.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.07.1.03.0005			Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				311.260.000		
						Jumlah laporan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stake holder dan tokoh masyarakat	Laporan	2	311.260.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
JUMLAH									**104.634.273.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**157.674.449.000**		
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	36.1			
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								**157.674.449.000**		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	3.395.656.000		
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						1.710.656.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	14.29	170.000.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					170.000.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	4	170.000.000		
		4.01.02.1.02.0001			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				170.000.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	Laporan	4	170.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%	85.71	150.470.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					150.470.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Dokumen	4	150.470.000		
		4.01.02.1.01.0002			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				150.470.000		
						Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota	Laporan	12	150.470.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%	64.28	272.861.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					272.861.000		
						Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	4	272.861.000		
		4.01.02.1.02.0002			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				272.861.000		
						Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota	Laporan	4	272.861.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	50	314.520.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					314.520.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	4	314.520.000		
		4.01.02.1.02.0004			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				314.520.000		
						Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan	Laporan	12	314.520.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	%	88.1	179.500.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					179.500.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	4	179.500.000		
		4.01.02.1.01.000			Penataan Analisis Jabatan				179.500.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota	Laporan	4	179.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%	60	95.785.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					95.785.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	4	95.785.000		
		4.01.02.1.02.0001			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				95.785.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD	Laporan	12	95.785.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	%	66	214.000.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					214.000.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	4	214.000.000		
		4.01.02.1.01.0001			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				214.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Laporan	12	153.680.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan koordinasi , fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah	Laporan	12	60.320.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	88.73	313.520.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					313.520.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	4	313.520.000		
		4.01.02.1.02.0005			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				313.520.000		
						Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Laporan	12	313.520.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						1.685.000.000		
						Persentase capaian pelaksanaan APBD	%	98.7	415.000.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					415.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	195.000.000		
		4.01.08.1.01.0001			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				195.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Laporan	12	195.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	220.000.000		
		4.01.08.1.01.0001			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				220.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Laporan	12	220.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian pelaksanaan APBN	%	95.5	210.000.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					210.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Dokumen	4	210.000.000		
		4.01.08.1.01.0002			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				210.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Laporan	8	210.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	%	85	467.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					467.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	4	120.000.000		
		4.01.08.1.02.0001			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				120.000.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	Dokumen	4	120.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	%	91	347.000.000		
		4.01.08.1.02.0002			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				347.000.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah	Dokumen	12	347.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	490.000.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					490.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	Dokumen	8	207.225.000		
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				207.225.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I	Dokumen	8	207.225.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	Dokumen	8	207.775.000		
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				207.775.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II	Dokumen	8	207.775.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	Dokumen	8	75.000.000		
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				75.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III	Dokumen	8	75.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	%	100	103.000.000		
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					103.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	103.000.000		
		4.01.08.1.02.0003			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				103.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	103.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	146.861.151.000		
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						3.783.000.000		
						Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	95	980.000.000		
				Pelaksanaan Tugas Pemerintahan					980.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Dokumen	8	980.000.000		
		4.01.03.1.01.0001			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				550.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan AdministrasiKebijakan Pemerintahan	Dokumen	4	550.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.03.1.01.0002			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				230.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi PelaksanaanPemerintahan Umum	Dokumen	4	230.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.03.1.01.0003			Fasilitasi Penataan Wilayah				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	4	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	1.630.000.000		
				Pelaksanaan Otonomi Daerah					1.630.000.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	3	225.000.000		
		4.01.03.1.02.0002			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				225.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	4	225.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	%	95	1.100.000.000		
		4.01.03.1.02.0001			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				1.100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	45	1.100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	305.000.000		
		4.01.03.1.02.0003			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				305.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	37	305.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%	95	1.173.000.000		
				Fasilitasi Kerjasama Daerah					1.173.000.000		
						Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	%	95	605.000.000		
		4.01.03.1.03.0001			Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah				605.000.000		
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri	Dokumen	9	485.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri	Dokumen	5	120.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	%	95	200.000.000		
		4.01.03.1.03.0002			Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta				200.000.000		
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri	Dokumen	6	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri	Dokumen	4	100.000.000		OPD Provinsi
						Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	%	95	368.000.000		
		4.01.03.1.03.0003			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				368.000.000		
						Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi	Laporan	4	153.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi	Laporan	4	107.550.000		OPD Provinsi
						Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	%	100	107.450.000		OPD Provinsi
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						140.639.161.000		
						Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	%	81	750.000.000		
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar					750.000.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	Dokumen	4	250.000.000		
		4.01.04.1.02.0002			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				250.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	8	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	Dokumen	4	250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.04.1.02.0001			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				250.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	8	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	Dokumen	4	250.000.000		
		4.01.04.1.02.0003			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				250.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	8	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	%	82	750.000.000		
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar					750.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	4	225.000.000		
		4.01.04.1.03.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				225.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	8	225.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	4	300.000.000		
		4.01.04.1.03.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				300.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	8	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan	Dokumen	4	225.000.000		
		4.01.04.1.03.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				225.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	Dokumen	8	225.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	54	139.139.161.000		
				Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual					139.139.161.000		
						Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	4	135.231.286.000		
		4.01.04.1.01.0001			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				135.231.286.000		
						Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan	Unit	750	135.231.286.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	Dokumen	4	3.907.875.000		
		4.01.04.1.01.0002			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				3.907.875.000		
						Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	Kegiatan	1	1.712.600.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Kegiatan	8	2.195.275.000		OPD Provinsi
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						2.438.990.000		
						Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	%	96	680.000.000		
				Fasilitasi Bantuan Hukum					680.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	Dokumen	12	680.000.000		
		4.01.05.1.02.0001			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				680.000.000		
						Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara	Perkara	11	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Perkara	200	480.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	293.076.000		
				Fasilitasi Bantuan Hukum					293.076.000		
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	12	293.076.000		
		4.01.05.1.02.0002			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				293.076.000		
						Jumlah dokumen kebijakan yang telah diharmonisasi berdasarkan perspektif HAM	Dokumen	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota	Kabupaten/Kota	35	103.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sengketa	7	190.076.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	96	874.368.000		
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					874.368.000		
						Jumlah dokumen kajian produk hukum	Dokumen	12	430.118.000		
		4.01.05.1.01.0003			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				430.118.000		
						Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12	287.168.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12	142.950.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	Dokumen	12	44.000.000		
		4.01.05.1.01.0002			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				44.000.000		
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12	44.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	12	400.250.000		
		4.01.05.1.01.0001			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				400.250.000		
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	Laporan	12	250.250.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	%	96	591.546.000		
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					591.546.000		
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	591.546.000		
		4.01.05.1.01.0004			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				591.546.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I	Dokumen	70	191.546.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II	Dokumen	75	210.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III	Dokumen	75	190.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	7.417.642.000		
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAND ANPEMBANGUNAN						4.912.642.000		
						Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	85	616.360.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					616.360.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	Dokumen	2	346.560.000		
		4.01.06.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				346.560.000		
						Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan	4	346.560.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	2	269.800.000		
		4.01.06.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				269.800.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	4	269.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	85	537.760.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					537.760.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	Dokumen	2	257.760.000		
		4.01.06.1.02.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				257.760.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	Laporan	4	257.760.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	2	280.000.000		
		4.01.06.1.02.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				280.000.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	4	280.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87	1.246.074.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					1.246.074.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	Dokumen	2	180.880.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				180.880.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	Laporan	4	180.880.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	2	199.880.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				199.880.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Laporan	4	199.880.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	Dokumen	2	865.314.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				865.314.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT	Laporan	2	600.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	Laporan	4	265.314.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%	81	300.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					300.000.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha	Dokumen	2	300.000.000		
		4.01.06.1.03.0002			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				300.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha	Laporan	4	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%	85	1.000.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					1.000.000.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	2	850.000.000		
		4.01.06.1.03.0001			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				850.000.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan	Laporan	4	850.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Dokumen	2	150.000.000		
		4.01.06.1.03.0003			Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan				150.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan	Laporan	4	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase nilai kemandirian BLUD	%	55	50.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					50.000.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	Dokumen	2	25.000.000		
		4.01.06.1.03.0004			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				25.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Laporan	2	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Dokumen	2	25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.06.1.03.0005			Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan				25.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah	Laporan	2	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	83	462.448.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					462.448.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	Dokumen	4	220.000.000		
		4.01.06.1.01.0001			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				220.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan	Laporan	8	220.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	4	242.448.000		
		4.01.06.1.01.0001			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				242.448.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro	Laporan	8	242.448.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	78	700.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					700.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	Dokumen	4	315.000.000		
		4.01.06.1.01.0002			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				315.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro	Laporan	8	315.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	4	385.000.000		
		4.01.06.1.01.0002			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				385.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan	Laporan	8	385.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						2.505.000.000		
						Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	%	90	1.355.000.000		
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1.355.000.000		
						Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	1.355.000.000		
		4.01.07.1.01.0001			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				280.000.000		
						Jumlah fasilitasi perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa	Laporan	4	180.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Penyusunan SHB	Laporan	2	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.0002			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				853.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing)	Laporan	12	700.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal	Laporan	4	153.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.0003			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				222.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	222.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%	81	506.000.000		
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					506.000.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	506.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.07.1.03.0001			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				157.000.000		
						Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah	Laporan	2	157.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.0002			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				173.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ	Laporan	4	173.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.0003			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				176.000.000		
						Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa	Laporan	4	176.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%	80	644.000.000		
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					644.000.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	644.000.000		
		4.01.07.1.02.0001			Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik				203.000.000		
						Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	Laporan	4	203.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.0002			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				315.000.000		
						Jumlah Laporan Pengembangan Sistem InformasiPengadaan Barang dan Jasa	Laporan	2	315.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.0003			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				126.000.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	126.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**205.630.432.000**		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**205.440.432.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	205.440.432.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						205.440.432.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	4.355.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					25.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	25.000.000		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	12	30.000.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					210.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	210.000.000		
		X.XX.01.1.11.0002			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				160.000.000		
						Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan	Paket	4	130.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan	Paket	4	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11.0003			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				50.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah	Orang	4	40.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Wakil Kepala Daerah	Orang	4	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					4.090.000.000		
						Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	%	100	4.090.000.000		
		X.XX.01.1.12.0001			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				2.950.000.000		
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	Paket	12	2.950.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.0002			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				40.000.000		
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	Paket	12	40.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.0003			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				1.100.000.000		
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	Paket	12	1.100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	437.104.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					437.104.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	437.104.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				362.104.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan	Laporan	24	362.104.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				75.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan	Laporan	16	75.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	261.800.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					261.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	261.800.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				236.800.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	236.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	%	100	526.209.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					350.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	%	100	350.000.000		
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				350.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT	Orang	800	350.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					176.209.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	%	100	176.209.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				166.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum	Laporan	12	166.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.209.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum	Laporan	12	10.209.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	%	100	811.595.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					400.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	100	400.000.000		
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				400.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	Orang	8000	400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					411.595.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	%	100	411.595.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				386.595.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	12	210.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	Laporan	12	176.595.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	12	15.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	Laporan	12	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	495.553.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					495.553.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	495.553.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	350.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				145.553.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	145.553.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	720.772.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					184.115.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	%	100	184.115.000		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				141.115.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	4	141.115.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				43.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	12	43.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					536.657.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	536.657.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				476.657.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	12	230.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi	Laporan	12	246.657.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				60.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	12	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi	Laporan	12	40.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100	840.452.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					840.452.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	%	100	840.452.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				806.246.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	425.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Laporan	12	381.246.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				34.206.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Laporan	12	24.206.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	290.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					290.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	%	100	290.000.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				275.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian	Laporan	12	275.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian	Laporan	12	15.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	17.286.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					165.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	%	100	165.000.000		
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				45.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	45.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				120.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	120.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan					14.870.753.000		
						Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan	Laporan	12	14.870.753.000		
		X.XX.01.1.13.0001			Penyiapan Materi Pimpinan				300.000.000		
						Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan	Dokumen	12	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13.0002			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				11.570.753.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Laporan	12	11.570.753.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13.0003			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				3.000.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan	Laporan	12	3.000.000.000		
				Fasilitasi Keprotokolan					2.250.247.000		
						Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Laporan	12	2.250.247.000		
		X.XX.01.1.14.0001			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				2.080.247.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	Laporan	12	2.080.247.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.0002			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				150.000.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Laporan	12	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.0003			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				20.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan	Laporan	1	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	179.415.947.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					108.516.013.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	108.516.013.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				106.601.013.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	106.601.013.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.540.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	1.540.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	12	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				75.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	75.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					742.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	742.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				442.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	442.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				300.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	12	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				20.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	12	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					7.418.996.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	7.418.996.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				352.437.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	352.437.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.718.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	500.718.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				425.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	425.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				120.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	120.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				150.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.241.605.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	4.241.605.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.629.236.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	1.629.236.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.835.500.000		
						Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Paket	2	3.835.500.000		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				810.500.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	810.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.025.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	50	3.025.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					24.231.213.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Laporan	12	24.231.213.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.000.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	7.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				631.213.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	631.213.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				16.600.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	16.100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	Laporan	4	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Laporan	2	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.658.908.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	833	6.658.908.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.775.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	182	1.775.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				87.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	30	87.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.400.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	300	1.400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.833.908.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	17	2.833.908.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				312.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	300	312.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					27.993.317.000		
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	27.993.317.000		
		X.XX.01.1.11.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				243.094.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang	2	243.094.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11.0004			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				27.750.223.000		
						Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang	2	27.750.223.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah								**190.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	190.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						190.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90	190.000.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					190.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	190.000.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				110.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah	Dokumen	6	110.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	Laporan	8	80.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									**363.304.881.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**206.595.103.000**	**Sekretariat DPRD**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	70		Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**38.038.533.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	76	38.038.533.000	Sekretariat DPRD	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						38.038.533.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	38.038.533.000	Bagian Umum	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.055.674.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	1.055.674.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.055.674.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	1.055.674.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					570.101.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	570.101.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				176.808.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	176.808.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				393.293.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	40	393.293.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan						
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	0		SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.785.842.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	3.785.842.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				435.701.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	8	435.701.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				133.879.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	133.879.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				480.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	480.500.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.600.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	1.600.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				980.400.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	980.400.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				155.362.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	155.362.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.026.130.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	991	4.026.130.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	6		SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				494.226.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	154	494.226.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.180.972.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	700	1.180.972.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.350.932.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	131	2.350.932.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					19.217.015.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	19.217.015.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				198.457.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	198.457.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.900.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	2.900.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				986.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	986.300.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				15.132.258.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	15.132.258.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.424.650.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1619	7.424.650.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				502.800.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	10	502.800.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.171.286.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	72	3.171.286.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				51.475.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	154	51.475.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.650.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	1.650.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.049.089.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1380	2.049.089.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					1.959.121.000		
						Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar	%	100	1.959.121.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.15.0002			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.393.000.000		
						Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	Paket	5	1.393.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.15.0003			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				566.121.000		
						Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	Orang	120	566.121.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**168.556.570.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.75	168.556.570.000	Sekretariat DPRD	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						168.556.570.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	168.556.570.000	BAGIAN KEUANGAN	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.112.567.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.112.567.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				812.567.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	812.567.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	20	300.000.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.097.128.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	24	20.097.128.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				19.092.128.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	124	19.092.128.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.005.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	24	1.005.000.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					147.346.875.000		
						Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar	%	100	147.346.875.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.15.0001			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				147.346.875.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Orang	120	147.346.875.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Pelayanan Kedewanan									**390.574.350.000**	**Sekretariat DPRD**	
						Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	90		Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia								**194.977.771.000**		
						Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	%	75	194.977.771.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						194.977.771.000		
						Persentase layanan bagian humas	%	95	194.977.771.000	Bagian Humas	
				Peningkatan Kapasitas DPRD					76.272.509.000		
						Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	76.272.509.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	
		4.02.02.1.04.0004			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				1.900.000.000		
						jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	Orang	42	1.900.000.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.04.0005			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				400.000.000		
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	8	400.000.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.04.0006			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				10.849.896.000		
						Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	Dokumen	7	10.849.896.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.04.0007			Penyusunan Program Kerja DPRD				63.122.613.000		
						Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Dokumen	6	63.122.613.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembahasan Kerja Sama Daerah					118.705.262.000		
						Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama	Dokumen	14	118.705.262.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	
		4.02.02.1.07.0002			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				118.705.262.000		
						jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	Dokumen	14	118.705.262.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terwujudnya hubungan antara Setwan dengan DPRD yang baik								**195.596.579.000**		
						Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	%	75	195.596.579.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						195.596.579.000		
						Persentase fasilitasi penyusunan raperda	%	95	195.596.579.000	Bagian Persidangan	
				Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD					7.128.600.000		
						Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan RAPERDA	Dokumen	21	7.128.600.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.01.0001			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				7.128.600.000		
						jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan Raperda	Dokumen	21	7.128.600.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembahasan Kebijakan Anggaran					1.618.590.000		
						Jumlah dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	2	1.618.590.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.02.000			Pembahasan APBD				1.618.590.000		
						jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Dokumen	2	1.618.590.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					15.229.190.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tercapainya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	15.229.190.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.03.0001			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				2.385.912.000		
						jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	48	2.385.912.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0002			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				2.385.912.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	48	2.385.912.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0003			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				2.385.912.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	48	2.385.912.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0004			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				2.385.912.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	48	2.385.912.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0005			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				2.385.912.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	48	2.385.912.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0006			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				850.630.000		
						Jumlah dokumen hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	2	850.630.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0007			Pengawasan Penggunaan Anggaran				2.449.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	31	2.449.000.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Peningkatan Kapasitas DPRD					3.440.000.000		
						Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen	6	3.440.000.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.04.0002			Pendalaman Tugas DPRD				3.440.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	3.440.000.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					70.956.205.000		
						Persentase tercapainya kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100	70.956.205.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.05.0001			Kunjungan Kerja dalam Daerah				30.763.680.000		
						Jumlah laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12	30.763.680.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.05.0002			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				175.000.000		
						Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen	1	175.000.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.05.0003			Pelaksanaan Reses				40.017.525.000		
						Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	24	40.017.525.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					552.490.000		
						Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	1	552.490.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.06.0001			Penyusunan Kode Etik DPRD				552.490.000		
						Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	Dokumen	1	552.490.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Tugas DPRD					96.671.504.000		
						Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen	37	96.671.504.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.08.0001			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				96.671.504.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	37	96.671.504.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									**597.169.453.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**41.348.132.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	70.1		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**40.771.679.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84	40.771.679.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						40.771.679.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	40.771.679.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					28.838.610.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	28.838.610.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				28.282.570.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	137	28.282.570.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				350.040.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	350.040.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				121.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	121.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				35.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	35.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					260.900.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	260.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				60.900.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	60.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					412.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	412.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				190.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	190.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				105.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				117.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	130	117.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.701.169.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.701.169.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				70.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				125.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				77.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	77.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				220.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				106.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	106.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				40.000.000		
						Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				180.200.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	180.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				894.969.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	894.969.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				82.000.000		
						Jumlah Laporan penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	82.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				906.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	906.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					790.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	44	790.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				225.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	12	225.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				215.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	215.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				350.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	28	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.420.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	4.420.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				47.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	47.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.340.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1.340.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.033.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	3.033.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.349.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1421	3.349.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				600.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	45	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				35.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	437	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	442	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				350.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	221	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				24.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	5	24.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.475.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	1.475.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				275.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	175	275.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				340.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasiv	Unit	92	340.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**576.453.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	%	2.91	576.453.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						576.453.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	576.453.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					576.453.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	576.453.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				276.453.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	276.453.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	12	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas									**12.467.000.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	
						Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Terwujudnya keselerasan dokumen perencanaan								**2.807.000.000**		
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional	%	100	2.807.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						943.000.000		
						Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi	%	100	943.000.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					943.000.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi yang sesuai amanah regulasi	Dokumen	4	943.000.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.03.0003			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				678.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	678.000.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.02.1.03.0004			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				265.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kab/kota yang dievaluasi	Dokumen	70	265.000.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						1.864.000.000		
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	495.000.000	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					495.000.000		
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Infrastruktur dan Perhubungan	Laporan	1	150.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	
		5.01.03.1.03.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				150.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Infrukstruktur dan perhubungan	OPD	3	150.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Laporan	1	125.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		5.01.03.1.03.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				125.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanahan	OPD	1	125.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup SDH LH	Laporan	1	220.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		5.01.03.1.03.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				220.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup SDA dan LH	OPD	3	220.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100	490.000.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					490.000.000		
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang Pemberdes	Laporan	1	140.000.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		5.01.03.1.01.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				140.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pemberdes	OPD	13	140.000.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kesos	Laporan	1	80.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		5.01.03.1.01.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				80.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kesejahteraan Sosial	OPD	11	80.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup PMS	Laporan	1	270.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	
		5.01.03.1.01.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				270.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pendidikan Mental Spiritual	OPD	5	270.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian	%	100	879.000.000	Bidang Perekonomian	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					879.000.000		
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Eknaker	Laporan	1	367.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	
		5.01.03.1.02.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				367.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja	OPD	6	367.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup KKI	Laporan	1	231.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	
		5.01.03.1.02.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				231.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kerja Sama Keuangan dan Investasi	OPD	3	231.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Tanlut	Laporan	1	281.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	
		5.01.03.1.02.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				281.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Tanlut	OPD	4	281.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	
	Terwujudnya kesesuaian dokumen perencanaan								**9.660.000.000**		
						Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi	%	100	9.660.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						4.871.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi	%	100	4.871.000.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					4.130.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan yang diamanahkan regulasi	Dokumen	2	4.130.000.000	SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.01.0006			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi				4.130.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Dokumen	2	4.130.000.000	SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					741.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen analisis data dan informasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen	1	741.000.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.02.0001			Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				601.000.000		
						Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	4	601.000.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.02.1.02.0004			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi				140.000.000		
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah	Buku	1	140.000.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						4.789.000.000		
						Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	1.498.000.000	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					1.498.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Infrastruktur dan Perhubungan	Dokumen	1	458.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	
		5.01.03.1.03.0004			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				458.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Infrastruktur dan Perhubungan	Laporan	4	458.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Dokumen	1	528.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		5.01.03.1.03.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				528.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanahan	Laporan	4	528.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup SDH LH	Dokumen	1	512.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		5.01.03.1.03.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				512.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup SDA dan LH	Laporan	4	512.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100	2.041.000.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					2.041.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Kesos	Dokumen	1	744.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		5.01.03.1.01.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				744.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Kesejahteraan Sosial	Laporan	4	744.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pemberdes	Dokumen	1	934.000.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.01.03.1.01.0004			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				934.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pemberdes	Laporan	4	934.000.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup PMS	Dokumen	1	363.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	
		5.01.03.1.01.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				363.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pendidikan Mental Spiritual	Laporan	4	363.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian	%	100	1.250.000.000	Bidang Perekonomian	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					1.250.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Eknaker	Dokumen	1	360.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	
		5.01.03.1.02.0004			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				360.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja	Laporan	4	360.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup KKI	Dokumen	1	520.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	
		5.01.03.1.02.0004			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				520.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Kerja Sama Keuangan dan Investasi	Laporan	4	520.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Tanlut	Dokumen	1	370.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	
		5.01.03.1.02.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				370.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Tanlut	Laporan	4	370.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**53.815.132.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**254.235.606.000**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	75		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**253.730.606.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	253.730.606.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						253.730.606.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	95	192.941.222.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					162.389.407.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	162.389.407.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				161.396.207.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	605	161.396.207.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				705.640.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	705.640.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				287.560.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	287.560.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen			SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					400.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerahJumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					150.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan						
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					9.818.880.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	9.818.880.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				125.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				300.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.018.880.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.018.880.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				25.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material						
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				450.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				900.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	900.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.257.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	3.257.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2.250.000.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	2.250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.007.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	1.007.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					13.530.935.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	13.530.935.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.462.007.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	2.462.007.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.558.928.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	9.558.928.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.500.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.395.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	3.395.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				800.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.000.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				95.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	95.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.500.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	95	1.446.679.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					278.092.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	100	278.092.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.270.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				43.540.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	43.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.600.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				9.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				96.114.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	96.114.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.753.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	14.753.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				91.315.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	91.315.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					784.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan	4	784.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				152.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	152.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				626.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	626.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					331.187.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	1	331.187.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				14.850.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	14.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				159.587.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	159.587.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	35.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				90.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	95	2.035.559.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					49.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	49.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				49.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	49.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					13.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				13.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					282.632.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas	%	100	282.632.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.480.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	18.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.200.000		
						umlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				131.797.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	131.797.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.655.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				88.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	88.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.353.767.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan	4	1.353.767.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				314.001.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	314.001.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.009.766.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.009.766.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					336.460.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	1	336.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				132.960.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	132.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	35.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				78.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	%	95	1.572.959.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					272.109.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang	%	100	272.109.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Paket	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				28.200.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Paket	1	28.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.100.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Paket	1	21.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				102.694.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Batang UPPD Kabupaten Batang	Paket	1	102.694.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.375.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	32.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.240.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	75.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					888.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	888.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	3.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				216.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	216.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				669.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	669.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					364.150.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	364.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				52.500.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	52.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				145.900.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	145.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.750.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	75.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	%	95	1.682.777.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD kabupaten Blora	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					257.821.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora	%	100	257.821.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				36.900.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Paket	1	36.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Paket	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				108.828.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakanUPPD Kabupaten Blora	Paket	1	108.828.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.960.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	15.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.133.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	70.133.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD kabupaten Blora	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.052.726.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora	Laporan	4	1.052.726.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				155.010.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	155.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				890.516.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	890.516.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					319.730.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD kabupaten Blora	Unit	1	319.730.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				14.400.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	14.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				99.630.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	99.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.200.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	25.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	95	1.534.126.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					44.250.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	44.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				44.250.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	44.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					278.726.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali	%	100	278.726.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.380.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	35.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				23.900.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	23.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.240.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	6.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				101.123.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	101.123.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.278.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	22.278.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.805.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	82.805.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Boyolali	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					892.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali	Laporan	4	892.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				199.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	199.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				689.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	689.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					318.850.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Boyolali	Unit	1	318.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.900.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	24.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				154.850.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	154.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.100.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	23.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	95	2.148.219.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen		42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					254.161.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes	%	100	254.161.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket	1	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				31.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket	1	31.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				11.250.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	11.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				97.765.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket	1	97.765.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.850.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	22.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74.296.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	74.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.484.866.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	1.484.866.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				390.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	390.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes UPPD Kabupaten Brebes	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.091.866.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	1.091.866.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					356.692.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	356.692.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.212.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	17.212.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				120.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	120.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				87.580.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	87.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				9.500.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	95	2.051.032.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					311.362.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap	%	100	311.362.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				38.200.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	38.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.850.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	11.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				151.756.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	151.756.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.512.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	25.512.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.244.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	61.244.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.223.071.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan	4	1.223.071.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				258.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	258.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				960.571.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	960.571.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					459.599.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	1	459.599.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.750.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	39.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				221.999.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	221.999.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				51.100.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	51.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.750.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	24.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	%	95	1.520.515.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					303.090.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak	%	100	303.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				49.850.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket	1	49.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.600.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket	1	27.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				115.312.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket	1	115.312.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.230.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	20.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.298.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	70.298.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					795.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	795.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				183.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	183.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				608.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	608.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					374.825.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	374.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				27.375.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	27.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				166.850.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	166.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.100.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	43.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	95	1.529.563.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					289.095.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan	%	100	289.095.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.800.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket	1	41.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.320.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket	1	19.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				100.900.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket	1	100.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.625.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	24.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				88.450.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	88.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					907.618.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	907.618.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				233.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	233.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				672.718.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	672.718.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					285.350.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	285.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				21.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				109.450.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	109.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				56.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasiUPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	25.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.400.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	95	1.624.741.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					257.028.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara	%	100	257.028.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.154.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.154.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.505.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	35.505.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.633.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	11.633.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.920.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	5.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				97.196.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	97.196.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				17.900.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	17.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.720.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	82.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					995.843.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara	Laporan	4	995.843.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.943.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	300.943.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				692.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	692.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					329.370.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1	329.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				16.950.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	16.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				156.320.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	156.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.800.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	54.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				46.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	46.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.800.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	46.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	95	1.570.857.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.360.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	43.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.360.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	43.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					273.582.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar	%	100	273.582.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.100.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.610.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	32.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	11.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				100.730.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	100.730.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.580.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	20.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				99.212.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	99.212.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					945.065.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan	4	945.065.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.990.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				172.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	172.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				768.575.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	768.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					308.850.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	1	308.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				143.900.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	143.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	39.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				88.350.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	88.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.900.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	29.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	95	1.385.857.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.450.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.450.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100	8.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	8.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					227.369.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	227.369.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.490.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.700.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	12.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.609.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	6.609.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				84.654.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	84.654.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.260.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	22.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.656.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	55.656.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					802.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	802.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				184.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	184.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				615.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	615.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					306.038.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	306.038.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				112.288.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	112.288.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharaJumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	60.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.250.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	95	1.533.147.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					328.902.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal	%	100	328.902.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.300.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	25.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.100.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				149.350.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	149.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.900.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	25.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74.252.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	74.252.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Kendal	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					862.450.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal	Laporan	4	862.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.150.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				234.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	234.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				626.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	626.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					299.795.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kendal	Unit	1	299.795.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26.270.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	26.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				97.775.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	97.775.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	54.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				78.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				43.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	95	2.357.813.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					45.014.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	45.014.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				45.014.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	45.014.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					288.790.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Klaten	%	100	288.790.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.954.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.954.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.204.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	12.204.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				136.333.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	136.333.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.693.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	35.693.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.606.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	90.606.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Klaten	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.650.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten	Laporan	4	1.650.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				317.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	317.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.329.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.329.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					364.009.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Klaten	Unit	1	364.009.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				29.250.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	29.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				143.759.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	143.759.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	100.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				7.900.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	7.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				34.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				33.600.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	33.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	95	1.458.374.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.700.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	6.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.700.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	6.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					250.724.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus	%	100	250.724.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.100.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Paket	1	6.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Paket	1	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.204.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Paket	1	12.204.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				9.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	9.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				95.055.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus UPPD Kabupaten Kudus	Paket	1	95.055.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				18.550.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	18.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83.965.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	83.965.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.250.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	1.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					836.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	836.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				226.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	226.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Laporan		1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				606.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	606.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					321.850.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	321.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12.750.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	12.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				109.300.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	109.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.800.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	39.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				103.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	103.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	37.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	95	1.714.081.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					273.599.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang	%	100	273.599.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.600.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	41.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.080.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	30.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	4.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				99.330.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	99.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.078.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	36.078.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				53.311.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	53.311.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Magelang	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.016.039.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang	Laporan	4	1.016.039.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				206.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	206.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				805.039.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	805.039.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					371.943.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Magelang	Unit	1	371.943.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			21.488.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	21.488.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			146.455.000			
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	146.455.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				87.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	87.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	%	95	1.594.919.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					237.629.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati	%	100	237.629.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.200.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket	1	41.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.300.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket	1	4.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				92.992.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket	1	92.992.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.090.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	19.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.847.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	68.847.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					989.790.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	989.790.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.080.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	1.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				290.160.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	290.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				698.550.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	698.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					305.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	305.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pati	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				138.900.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	138.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				84.900.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	84.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				45.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.200.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	9.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	95	1.509.566.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	15.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	15.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					286.059.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan	%	100	286.059.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket	1	6.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket				OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				51.380.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket	1	51.380.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket	1	19.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	6.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				113.804.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD KAbupaten Pekalongan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket	1	113.804.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.125.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	22.125.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				64.250.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	64.250.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	2.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					827.425.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	827.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				189.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	189.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				635.025.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	635.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					338.582.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	338.582.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.182.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	24.182.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				127.900.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	127.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				56.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	56.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	95	1.617.429.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	42.500.000		
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	42.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen				OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	10.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					271.366.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang	%	100	271.366.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket	1	12.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket				OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.250.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket	1	24.250.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket	1	5.750.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	7.200.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				118.579.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket	1	118.579.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.650.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	13.650.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87.437.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	87.437.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	2.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1			
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket				OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Unit				OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Unit				OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					879.925.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	879.925.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	1.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	180.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	2.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				696.425.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	696.425.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					413.638.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	413.638.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			20.438.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	20.438.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				179.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	179.200.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang	Unit				OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	44.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	12.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				110.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	110.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	39.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	8.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	%	95	1.444.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					276.084.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga	%	100	276.084.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.150.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket	1	4.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				38.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket	1	38.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket	1	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				110.329.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket	1	110.329.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.920.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	24.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.720.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	70.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.865.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	1.865.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					777.186.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	777.186.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				210.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	210.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				555.186.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	555.186.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					339.380.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	339.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.800.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	25.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				135.700.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	135.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				71.510.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	71.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				74.170.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	74.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.200.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	95	1.706.860.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					12.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					286.890.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	286.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				52.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.600.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				108.560.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	108.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				23.780.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	23.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.450.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	67.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.115.470.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.115.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.475.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				190.440.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	190.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				922.555.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	922.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					250.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				13.500.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				114.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	114.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.900.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	28.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.750.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	1.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.400.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.050.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	6.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	95	1.208.132.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.350.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	42.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.350.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					231.885.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang	%	100	231.885.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.560.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.280.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	32.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				74.360.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	74.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.460.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	19.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				84.425.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	84.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Rembang	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					626.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang	Laporan	4	626.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	150.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				453.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	453.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					297.297.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Rembang	Unit	1	297.297.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.250.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	17.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				159.497.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	159.497.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	39.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.800.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	95	2.250.395.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.250.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	42.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.250.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					291.482.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang	%	100	291.482.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.350.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	41.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.875.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	20.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				750.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				121.863.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	121.863.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				29.875.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	29.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.769.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	61.769.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.559.905.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang	Laporan	4	1.559.905.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				437.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	437.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.104.905.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.104.905.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					356.758.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Semarang	Unit	1	356.758.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				32.038.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	32.038.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				193.220.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	193.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	57.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				4.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	95	1.350.268.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.720.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	42.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.720.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					260.233.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen	%	100	260.233.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.750.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	32.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.840.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	6.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	6.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				91.888.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	91.888.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				34.475.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	34.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				81.880.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	81.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Sragen	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					748.725.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen	Laporan	4	748.725.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	186.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				558.825.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	558.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					298.590.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sragen	Unit	1	298.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				36.167.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	36.167.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				119.693.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	119.693.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.570.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	34.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				68.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	68.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.460.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	29.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	95	1.598.935.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.050.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	42.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.050.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	42.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					269.820.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	100	269.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.570.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket	1	8.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.975.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket	1	41.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.020.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket	1	18.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				9.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				109.867.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket	1	109.867.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.950.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	19.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.438.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	62.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					960.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	960.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	3.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	200.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				666.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	666.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					326.865.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	326.865.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				34.875.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	34.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.450.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	91.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				78.715.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	78.715.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				6.325.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	6.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	95	1.551.760.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					249.985.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal	%	100	249.985.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Paket	1	29.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				97.017.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal UPPD Kabupaten Tegal	Paket	1	97.017.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.075.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	11.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83.593.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	83.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					868.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	868.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				157.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	157.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				706.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	706.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					371.175.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	371.175.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				32.325.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	32.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				156.900.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	156.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Tegal	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	44.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Tegal	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	29.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	95	1.494.041.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					283.434.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung	%	100	283.434.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.640.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket		3.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				57.424.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	57.424.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.050.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				88.254.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	88.254.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.410.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	25.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.156.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	82.156.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					894.882.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan	4	894.882.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.410.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				168.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	168.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				722.872.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	722.872.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					273.225.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	1	273.225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				16.275.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	16.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				107.100.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	107.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.550.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	2.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				84.300.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	84.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	95	2.101.317.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.350.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	42.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.350.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					282.122.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri	%	100	282.122.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				42.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				114.932.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	114.932.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.390.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	19.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.200.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	75.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.394.850.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri	Laporan	4	1.394.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				318.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	318.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.073.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.073.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					381.995.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit	1	381.995.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				152.995.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	152.995.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				63.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	63.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	95	1.371.159.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.600.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	42.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.600.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					12.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen		12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					295.019.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo	%	100	295.019.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	41.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.794.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	19.794.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				100.950.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	100.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.575.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	22.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				93.200.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	93.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					699.040.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo	Laporan	4	699.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan		3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				541.040.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	541.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					322.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	1	322.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.500.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				6.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Magelang	%	95	1.159.538.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					282.321.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang	%	100	282.321.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	24.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.884.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	18.884.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.300.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				109.142.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	109.142.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.435.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	36.435.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.060.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	85.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Magelang	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					626.185.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Magelang	Laporan	4	626.185.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				158.610.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	158.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				465.875.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	465.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					202.532.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Magelang	Unit	1	202.532.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				19.192.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	19.192.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90.340.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	90.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.150.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	28.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.800.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	13.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.050.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	6.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	%	95	1.425.630.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					220.081.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan	%	100	220.081.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.175.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket	1	26.175.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				102.953.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket	1	102.953.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.800.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	9.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				54.403.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	54.403.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.250.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	1.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kota Pekalongan UPPD Kota Pekalongan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					866.959.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	866.959.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				197.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	197.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				667.059.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	667.059.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					286.090.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	286.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				21.190.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	21.190.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				161.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	161.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.200.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				8.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	20.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Salatiga	%	95	1.284.719.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.550.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	42.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.550.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					294.044.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga	%		294.044.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				72.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	72.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				29.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				87.017.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	87.017.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.527.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	20.527.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.900.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	68.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Salatiga	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					612.150.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga	Laporan	4	612.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				145.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	145.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				464.950.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	464.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					335.975.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Salatiga	Unit	1	335.975.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.625.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	20.625.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				113.100.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	113.100.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	52.750.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				98.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	98.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				33.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	33.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang I	%	95	2.086.245.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1	Dokumen	4	43.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	43.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang 1	Dokumen	4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					269.258.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang 1	%	100	269.258.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.025.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	22.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	24.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				128.384.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	128.384.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.300.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	16.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.949.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	67.949.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Semarang 1	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.531.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1	Laporan	4	1.531.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				321.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	321.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				280.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	280.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				928.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	928.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					235.987.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang 1	Unit	1	235.987.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				102.110.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	102.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	38.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				7.500.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				33.077.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	33.077.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				54.600.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	54.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang II	%	95	1.654.551.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					309.939.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II	%	100	309.939.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				46.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	46.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				38.340.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	38.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				109.874.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	109.874.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.240.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	30.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.485.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	62.485.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Semarang II	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.010.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II	Laporan	4	1.010.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				338.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	338.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	14.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				655.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	655.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					291.712.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang II	Unit	1	291.712.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.312.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	25.312.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	95.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit				OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	57.750.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	60.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.850.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.850.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	12.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang III	%	95	1.946.701.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					290.526.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III	%	100	290.526.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				54.100.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	54.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.300.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				112.876.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	112.876.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.850.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	24.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				64.400.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	64.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Semarang III	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.226.030.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III	Laporan	4	1.226.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				398.580.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	398.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				793.450.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	793.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					387.645.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang III	Unit	1	387.645.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.375.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	18.375.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.050.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	91.050.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit				OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				87.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	87.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				124.820.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	124.820.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.400.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	48.400.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	%	95	1.631.446.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					268.238.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta	%	100	268.238.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.350.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket	1	10.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.150.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket	1	1.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.950.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket	1	12.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.300.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	6.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				138.890.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket	1	138.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				26.565.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	26.565.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.833.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	70.833.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.200.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.041.725.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	1.041.725.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	1.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				290.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	290.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				750.025.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	750.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					278.983.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Surakarta	Unit	1	278.983.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				13.613.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Surakarta	Unit	1	13.613.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				96.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Surakarta	Unit	1	96.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kota Surakarta	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52.550.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Surakarta	Unit	1	52.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Surakarta	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.520.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta	Unit	1	47.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal	%	95	1.634.824.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Dokumen			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					286.774.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal	%	100	286.774.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				74.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Tegal	Paket	1	74.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Tegal	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				86.742.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Tegal UPPD Kota Tegal	Paket	1	86.742.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				17.650.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Tegal	Laporan	4	17.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.382.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Laporan	4	78.382.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Tegal	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kota Tegal	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kota Tegal	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kota Tegal	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.045.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Tegal	Laporan	4	1.045.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Tegal	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				295.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Tegal	Laporan	4	295.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal	Laporan			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				745.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal	Laporan	4	745.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					239.950.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Tegal	Unit	1	239.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				11.250.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Tegal	Unit	1	11.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78.700.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Tegal	Unit	1	78.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kota Tegal	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Tegal	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Tegal	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal	Unit	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**505.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka		505.000.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						505.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90	505.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					505.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	505.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				245.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	245.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				260.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	260.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
Tumbuhnya Pendapatan Asli Daerah									**32.644.010.000**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah	%	9.54		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	Tumbuhnya Pendapatan Pajak Daerah								**19.877.336.000**		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah	%	13.09	19.877.336.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						19.877.336.000		
						Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan	%	100	800.000.000	Bidang Evaluasi dan Pembinaan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					800.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB	Laporan	37	290.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0012			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				290.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	37	290.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain	Laporan	37	250.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				250.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelola Retribusi Daerah	Laporan	37	250.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya	Laporan	37	260.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA	
		5.02.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				260.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	37	260.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA	OPD Provinsi
						Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah	%	100	9.741.439.000	Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.741.439.000		
						Jumlah Dokumen Informasi data pendapatan yang tersusun	Dokumen	4	300.209.000	SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN	
		5.02.04.1.01.0009			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				300.209.000		
						Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	4	300.209.000	SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN	OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah yang terapkan	Dokumen	1	310.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN	
		5.02.04.1.01.0002			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				310.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	1	310.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	4	9.131.230.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	
		5.02.04.1.01.0014			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				9.131.230.000		
						Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	4	9.131.230.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	21.49	62.515.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					62.515.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	56502827	62.515.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				62.515.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	62.515.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	19.52	14.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					14.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	129061431	14.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				14.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	14.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang	%	15.23	19.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					19.800.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	66010309	19.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				19.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	19.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora	%	19.93	4.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD kabupaten Blora	Ribu Rupiah	53287860	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	19.89	10.850.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					10.850.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	86027843	10.850.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10.850.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	10.850.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	20.1	8.060.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					8.060.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	122881749	8.060.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				8.060.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	8.060.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	16.42	20.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.600.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	131099982	20.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	20.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak	%	20.8	5.625.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.625.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	133862327	5.625.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5.625.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	5.625.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%	20.87	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	106514734	3.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	3.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	14.71	2.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	11216149	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	21.98	1.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.300.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	100913477	1.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.300.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	1.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	20.82	47.080.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					47.080.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	70996348	47.080.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				47.080.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	47.080.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal	%	18.31	4.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.050.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	98162438	4.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.050.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	4.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	18.99	4.826.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.826.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	127166021	4.826.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.826.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	4.826.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	18.96	3.150.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.150.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	108150990	3.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3.150.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	3.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	19.55	32.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					32.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	91707989	32.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				32.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	32.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati	%	15.79	4.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.800.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	128176158	4.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	4.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	19.62	7.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.650.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	73163777	7.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				7.650.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	7.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%	11.83	2.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	86837242	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	28.72	4.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.050.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	66103862	4.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.050.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	4.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	23.68	14.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					14.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	52021712	14.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				14.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten PUrworejo	Dokumen	4	14.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang	%	18.71	31.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					31.000.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	533687340	31.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				31.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	31.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	23.93	9.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.750.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	119287834	9.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9.750.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	9.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen	%	26.51	3.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.000.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	101649001	3.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	3.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	25.8	11.340.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.340.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	121506495	11.340.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11.340.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	11.340.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	14.12	9.225.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.225.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	104767005	9.225.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9.225.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	9.225.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	23.36	1.575.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.575.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	47675810	1.575.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.575.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	1.575.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	20.9	25.850.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					25.850.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	57707065	25.850.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				25.850.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	25.850.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	22.39	1.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.350.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	52034940	1.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.350.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	1.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang	%	16.85	1.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	20760133	1.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	1.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan	%	28.17	4.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	45171795	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga	%	23.51	4.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	33464776	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1	%	18.18	2.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang 1	Ribu Rupiah	197889485	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II	%	18.66	2.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	171455875	2.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	2.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III	%	15.09	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	154291741	3.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	3.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta	%	19.79	20.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.000.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	130852551	20.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	20.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal	%	12.2	11.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.250.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	34106385	11.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	11.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	45.72	95.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					95.350.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	116276950	95.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				95.350.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD abupaten Banjarnegara	Dokumen	4	95.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	25.25	144.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					144.250.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	272205112	144.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				144.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	144.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang	%	38.33	142.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					142.800.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	114938906	142.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				142.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	142.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora	%	13.4	122.030.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					122.030.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	104635239	122.030.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				122.030.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	122.030.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	23.05	84.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					84.000.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	182016973	84.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				84.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	84.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	44	109.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					109.900.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	185332523	109.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				109.900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	109.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	23.27	111.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					111.000.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	262679537	111.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				111.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	111.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak	%	23.16	230.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					230.800.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	196403321	230.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				230.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	230.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%	22.34	87.320.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					87.320.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	183203586	87.320.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				87.320.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	87.320.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	22.63	176.125.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					176.125.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	205027570	176.125.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				176.125.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	176.125.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	30.62	130.100.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					130.100.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	200314126	130.100.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				130.100.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	130.100.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	25.05	149.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					149.750.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	149348619	149.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				149.750.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	149.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal	%	32.43	182.535.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					182.535.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	167855813	182.535.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				182.535.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	182.535.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	24.85	168.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					168.650.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	253334739	168.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				168.650.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	168.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	12.4	116.950.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					116.950.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kusus	Ribu Rupiah	194131847	116.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				116.950.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	116.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	34.47	118.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					118.400.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	181757673	118.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				118.400.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	118.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati	%	16.61	114.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					114.000.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	246391747	114.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				114.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	114.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%	30.76	192.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					192.750.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	168929535	192.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				192.750.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	192.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	14.57	148.100.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					148.100.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	119316596	148.100.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				148.100.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	148.100.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	4.96	141.950.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					141.950.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	99185663	141.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				141.950.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	141.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang	%	11.59	211.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					211.700.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	92824390	211.700.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				211.700.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	211.700.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	9.5	175.850.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					175.850.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	209805150	175.850.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				175.850.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	175.850.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Semarang	Unit	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		5.02.04.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		5.02.04.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		5.02.04.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen	%	19.63	192.640.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					192.640.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	197902569	192.640.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				192.640.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	192.640.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	23	118.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					118.000.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	217640859	118.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				118.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	118.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	66.86	92.950.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					92.950.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	195245988	92.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				92.950.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	92.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	32.03	98.075.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					98.075.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	102205992	98.075.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				98.075.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	98.075.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	11.97	97.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					97.900.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	137434953	97.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				97.900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	97.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	24.01	142.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					142.050.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	103637332	142.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				142.050.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	142.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang	%	-53.02	175.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					175.900.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	48307208	175.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				175.900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	175.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan	%	-25.14	160.969.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					160.969.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	70618341	160.969.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				160.969.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	160.969.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga	%	2.24	79.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					79.050.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	67295135	79.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				79.050.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	79.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1	%	24.91	168.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					168.650.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang 1	Ribu Rupiah	353504285	168.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				168.650.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	168.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II	%	6.61	255.840.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					255.840.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	296929774	255.840.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				255.840.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	255.840.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III	%	21.98	199.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					199.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	266732572	199.700.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				199.700.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	199.700.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta	%	3.8	177.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					177.800.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	262535338	177.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				177.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	177.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal	%	-25.92	163.594.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					163.594.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	66440861	163.594.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				163.594.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	163.594.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	41.78	110.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					110.200.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	125329754	110.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				110.200.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	110.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	%	72	3.526.623.000	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.526.623.000		
						Jumlah dokumen regulasi pelayanan PKB	Dokumen	1	1.141.638.000	SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0002			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				1.141.638.000		
						Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	1.141.638.000	SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PKB dan BBNKB yang terlaksana	Laporan	2	1.140.206.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.140.206.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	1.140.206.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan regulasi penanganan piutang PKB	Laporan	1	1.094.779.000	SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.094.779.000		
						Jumlah dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang pajak	Dokumen	12	1.094.779.000	SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase penanganan pengajuan keberatan PKB yang terselesaikan	%	100	150.000.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0011			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen	1	150.000.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
	Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain								**12.766.674.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain	%	-7.67	12.766.674.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						12.766.674.000		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	20.31	208.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					208.200.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	14340	208.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				208.200.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	208.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	20.26	301.341.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					301.341.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	29260	301.341.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				301.341.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	301.341.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	20.24	218.140.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					218.140.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang	Unit	14890	218.140.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				218.140.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	218.140.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	20.31	337.130.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					337.130.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora	Unit	11660	337.130.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				337.130.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	337.130.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	20.48	274.140.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					274.140.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali	Unit	16900	274.140.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				274.140.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	274.140.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	20.83	423.744.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					423.744.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes	Unit	28620	423.744.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				423.744.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	423.744.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	20.24	327.639.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					327.639.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	29710	327.639.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				327.639.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	327.639.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%	19.8	269.340.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					269.340.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak	Unit	21.68	269.340.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				269.340.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	269.340.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	19.94	354.005.000		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					354.005.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	21860	354.005.000		
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				354.005.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	354.005.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	10.98	371.190.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					371.190.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara	Unit	23470	371.190.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				371.190.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	371.190.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	21.21	333.140.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					333.140.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	16670	333.140.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				333.140.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	333.140.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	20.99	322.420.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					322.420.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen	Unit	17830	322.420.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				322.420.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	322.420.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	20.75	298.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					298.650.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal	Unit	19.86	298.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				298.650.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	298.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	20.93	361.760.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					361.760.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten	Unit	24860	361.760.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				361.760.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	361.760.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	20.31	274.540.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					274.540.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus	Unit	15390	274.540.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				274.540.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	274.540.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	22.12	315.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					315.650.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang	Unit	16410	315.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				315.650.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	315.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	19.45	329.460.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					329.460.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati	Unit	19990	329.460.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				329.460.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	329.460.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	20.16	279.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					279.800.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	16580	279.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				279.800.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	279.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	20.84	381.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					381.800.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	22960	381.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				381.800.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	381.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	%	20.9	384.860.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					384.860.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	15610	384.860.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				384.860.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	384.860.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	22.01	168.158.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					168.158.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo	Unit	9830	168.158.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				168.158.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	168.158.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	19.33	217.130.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					217.130.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang	Unit	9440	217.130.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				217.130.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	217.130.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	19.97	353.990.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					353.990.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang	Unit	19.38	353.990.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				353.990.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	353.990.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	19.89	359.690.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					359.690.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen	Unit	18470	359.690.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				359.690.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	359.690.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	20.94	204.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					204.300.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	17660	204.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				204.300.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	204.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	20.57	451.663.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					451.663.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal	Unit	26530	451.663.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				451.663.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	451.663.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	21.35	221.530.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					221.530.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	9480	221.530.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				221.530.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	221.530.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	20.4	347.030.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					347.030.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit	13820	347.030.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				347.030.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	347.030.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	20.95	183.450.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					183.450.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	9950	183.450.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				183.450.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	183.450.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	21.76	313.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					313.200.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Magelang	Unit	3420	313.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				313.200.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	313.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%	20.29	122.510.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					122.510.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan	Unit	7270	122.510.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				122.510.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	122.510.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	-25.36	106.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					106.600.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga	Unit	4.76	106.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				106.600.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	106.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	%	20.87	277.620.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					277.620.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang 1	Unit	24.31	277.620.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				277.620.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	277.620.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	20.09	321.148.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					321.148.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II	Unit	17.99	321.148.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				321.148.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	321.148.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	20.2	185.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					185.750.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III	Unit	16.15	185.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				185.750.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	185.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	20.21	397.010.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					397.010.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta	Unit	17470	397.010.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				397.010.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	397.010.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	20.49	164.736.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					164.736.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Tegal	Unit	7430	164.736.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				164.736.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	164.736.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	13.44	6.525.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.525.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	4236000	6.525.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				6.525.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	6.525.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas	%	13.75	41.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					41.500.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	937000	41.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				41.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	41.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang	%	13.44	33.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					33.750.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	428000	33.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				33.750.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	33.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora	%	12.4	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	98000	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali	%	13.03	9.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.000.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	198000	9.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				9.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	9.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes	%	12.88	1.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.800.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	265000	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap	%	11.83	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	4287000	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak	%	10.78	5.325.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.325.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	242000	5.325.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				5.325.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	5.325.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan	%	13.12	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	1145000	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara	%	19	1.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.500.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	14000	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	9.35	1.725.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.725.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	448000	1.725.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.725.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	1.725.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen	%	13.41	4.125.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.125.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	888000	4.125.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.125.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	4.125.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal	%	12.95	16.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					16.350.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	82000	16.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				16.350.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	16.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten	%	13.42	4.664.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.664.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	631000	4.664.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.664.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	4.664.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus	%	7.24	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	8500	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang	%	13.59	8.550.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					8.550.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	863000	8.550.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				8.550.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	8.550.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati	%	13.58	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	95000	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	13.51	20.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.700.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	388000	20.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				20.700.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	20.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang	%	11.27	2.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	256000	2.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				2.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	2.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	13.77	17.100.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					17.100.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	494000	17.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				17.100.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	17.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo	%	12.21	1.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.800.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	127000	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang	%	12.45	10.815.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					10.815.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	100000	10.815.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				10.815.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	10.815.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang	%	13.7	7.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.200.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	1616000	7.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				7.200.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	7.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen	%	8.21	1.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.800.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	8500	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	1.76	4.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	285000	4.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	4.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal	%	13.27	5.025.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.025.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	414000	5.025.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				5.025.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	5.025.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung	%	13.59	12.450.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					12.450.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	322000	12.450.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				12.450.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	12.450.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KAbupaten Wonogiri	%	12.75	4.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.200.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	366000	4.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.200.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	4.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	13.38	25.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					25.000.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	663000	25.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				25.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	25.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang	%	9.11	9.166.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.166.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	120000	9.166.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				9.166.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	9.166.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga	%	6.69	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	52000	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II	%	12.53	1.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.500.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	645000	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III	%	12.2	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	408000	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta	%	6.58	300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					300.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	53000	300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				300.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain	%	-7.67	1.498.000.000	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.498.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Daerah	Dokumen	4	550.000.000	SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				550.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	550.000.000	SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok yang terlaksana	Laporan	4	468.000.000	SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN	
		5.02.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				468.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	468.000.000	SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Pendapatan Pajak Lain	Laporan	4	480.000.000	SUB BIDANG PAJAK LAIN-LAIN	
		5.02.04.1.01.0005			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				480.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	480.000.000	SUB BIDANG PAJAK LAIN-LAIN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-25.11	3.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.300.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	61558	3.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.300.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	3.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	-25.89	4.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.650.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	158620	4.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.650.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	4.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	-23.43	33.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					33.750.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	51779	33.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				33.750.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	33.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	-18.49	6.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.750.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	83368	6.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				6.750.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	6.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	-25.7	2.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.000.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	72200	2.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				2.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	2.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	-22.26	3.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.000.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	95532	3.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	3.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	-13.57	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	106928	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%	-24.27	2.175.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.175.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	63966	2.175.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				2.175.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	2.175.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	-20.94	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	112969	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	-22.19	1.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.500.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	191065	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-16.8	1.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.500.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	64288	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	-18.63	1.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	90430	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	-25.77	4.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.050.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	57952	4.050.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.050.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	4.050.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	-24.67	2.100.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.100.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	124288	2.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				2.100.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	2.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	-21.23	6.060.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.060.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	86951	6.060.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				6.060.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	6.060.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	-25.13	1.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.800.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	148336	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	-18.76	5.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.400.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	89338	5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				5.400.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-20.86	17.850.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					17.850.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	53951	17.850.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				17.850.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	17.850.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	-17.02	1.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.500.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	91716	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga	%	-15.51	2.100.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.100.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	61558	2.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				2.100.000		
						Tersedianya laporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	2.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	-12.81	7.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.200.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	58332	7.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				7.200.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	7.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	-15.14	4.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.350.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaat Aset Daerah UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	65971	4.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.350.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	4.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	-20.16	750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					750.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	111885	750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				750.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	-25.1	1.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.500.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	50463	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-25.99	4.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	79354	4.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	4.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	-25.7	9.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.300.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	60204	9.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				9.300.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	9.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	-20.87	1.155.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.155.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	62278	1.155.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.155.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	1.155.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-20.99	1.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.200.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	109465	1.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.200.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	1.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-24.77	11.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.500.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	78128	11.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				11.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	11.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	-13.62	1.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.350.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	53019	1.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.350.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	1.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%	-16.7	39.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					39.000.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	51552	39.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				39.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	39.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	20.52	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	51912	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	%	-21.85	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang 1	Ribu Rupiah	252349	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	-17.94	4.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.650.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	168076	4.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.650.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	4.650.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	-17.96	1.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.200.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	214290	1.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.200.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	1.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	-22.24	14.550.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					14.550.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	135689	14.550.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				14.550.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	14.550.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	19.25	4.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	207242	4.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	4.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
JUMLAH									**286.879.616.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**43.102.872.000**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	76		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**42.802.877.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	42.802.877.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						42.802.877.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	37.852.286.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					32.618.710.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	32.618.710.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				29.407.029.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	320	29.407.029.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.082.601.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	3.082.601.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				40.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	40.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				89.080.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	89.080.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.560.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.560.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	15	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				200.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				510.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	510.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	5	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	521		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.161.220.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.161.220.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				394.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	394.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				101.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	101.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.655.820.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.655.820.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.512.356.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	326	1.512.356.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				517.356.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	66	517.356.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				108.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	200	108.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				887.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	887.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	4.950.591.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					700.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	700.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	100.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				400.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	35000	400.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				49.950.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	49.950.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.050.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	150.050.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.231.949.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.231.949.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.200.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				189.066.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	189.066.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.041.683.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	2.041.683.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.018.642.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	730	2.018.642.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				130.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	15	130.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				70.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	350	70.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				630.442.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	350	630.442.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.188.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	1.188.200.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**299.995.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.6	299.995.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						299.995.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	299.995.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					299.995.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	299.995.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				149.200.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8	149.200.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.795.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	150.795.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah									**10.146.505.350.000**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
						Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	97.75		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan								**10.146.505.350.000**		
						Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	%	100	10.139.779.949.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						10.139.779.949.000		
						Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%	100	10.129.884.699.000	SEKRETARIAT	
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					10.129.884.699.000		
						Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun	Dokumen	1	10.129.884.699.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		5.02.02.1.05.0008			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2.999.250.131.000		
						Tersusunnya dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dokumen	1	2.999.250.131.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.05.0009			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				25.000.000.000		
						Tersusunnya laporan Dana Darurat dan Mendesak	Dokumen	1	25.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.05.0010			Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				7.105.634.568.000		
						Tersusunnya laporan Dana bagi Hasil Provinsi	Dokumen	1	7.105.634.568.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	%	100	710.450.000	SEKRETARIAT	
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					710.450.000		
						Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	105	710.450.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.02.1.02.0002			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				102.000.000		
						Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	102.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.0003			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				218.900.000		
						Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturanaerah tentang Perubahan APBDKabupaten/Kota dan Rancangan PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran PerubahanPBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	218.900.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.0004			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				218.900.000		
						Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	218.900.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.0005			Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				59.050.000		
						Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	59.050.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.0012			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				111.600.000		
						Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	111.600.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penetapan APBD tepat waktu	%	100	9.184.800.000	Bidang Anggaran	
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					9.184.800.000		
						Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Dokumen	8	4.884.670.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		5.02.02.1.01.0001			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				160.000.000		
						Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Dokumen	2	160.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.0007			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				4.724.670.000		
						Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.	Dokumen	2	4.724.670.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Dokumen	8	2.787.389.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.02.1.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				160.000.000		
						Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	2	160.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.0008			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2.627.389.000		
						Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.	Dokumen	2	2.627.389.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusunya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan.	Dokumen	35	1.512.741.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.01.0009			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1.512.741.000		
						Tersusunnya dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	35	1.512.741.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	%	100	3.925.303.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						3.925.303.000		
						Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	100	3.925.303.000	Bidang Akuntansi	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					3.925.303.000		
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun	Dokumen	1	983.373.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
		5.02.02.1.04.0002			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				400.000.000		
						Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Laporan	1	400.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.0011			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				583.373.000		
						Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	41	583.373.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun	Dokumen	1	568.350.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
		5.02.02.1.04.0008			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				220.000.000		
						Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	220.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.0009			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				348.350.000		
						Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	348.350.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun	Dokumen	1	2.373.580.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.04.0004			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				573.580.000		
						Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	1	573.580.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.0005			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				1.800.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	1	1.800.000.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase realisasi APBD	%	93.25	2.800.098.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						2.800.098.000		
						Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	%	100	2.800.098.000	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					2.270.792.000		
						Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	2	747.310.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
		5.02.02.1.03.0006			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				747.310.000		
						Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	43	747.310.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.0010			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						
						Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	0		SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra	Dokumen	1	763.271.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	
		5.02.02.1.03.0003			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				763.271.000		
						Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	4	763.271.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.0011			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						
						Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	0		SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun	Dokumen	1	760.211.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	
		5.02.02.1.03.0001			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						
						Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	0		SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.0009			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait				760.211.000		
						Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	49	760.211.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					529.306.000		
						Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan	Dokumen	2	529.306.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.02.1.06.0002			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				529.306.000		
						Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	529.306.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.06.0003			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi						
						Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	0		SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah									**6.114.433.000**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
						Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	84.02		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan								**6.114.433.000**		
						Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	6.114.433.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						6.114.433.000		
						Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	%	100	1.854.994.000	Bidang Aset Daerah	
				Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.854.994.000		
						Meningkatnya jumlah aset yang teramankan	Angka	70.76	1.704.994.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.0007			Pengamanan Barang Milik Daerah				1.704.994.000		
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1.704.994.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah	%	100	150.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.0009			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				150.000.000		
						Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	41	150.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	
						Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	%	84.02	1.456.439.000	Bidang Aset Daerah	
				Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.456.439.000		
						Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	Dokumen	1	1.456.439.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.0005			Penatausahaan Barang Milik Daerah				400.000.000		
						Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	400.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.03.1.01.0006			Inventarisasi Barang Milik Daerah				567.790.000		
						Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	41	567.790.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.03.1.01.0011			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	0		SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.03.1.01.0012			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				488.649.000		
						Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	84	488.649.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu	%	100	2.803.000.000	Bidang Aset Daerah	
				Pengelolaan Barang Milik Daerah					2.803.000.000		
						Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	2.803.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.0003			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				724.000.000		
						Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	724.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.0004			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				414.000.000		
						Tersedianya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	414.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.03.1.01.0008			Penilaian Barang Milik Daerah				220.000.000		
						Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	220.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.0010			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1.445.000.000		
						Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	1.445.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**10.195.722.655.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Kepegawaian Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**61.923.644.000**	**Badan Kepegawaian Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	80		Badan Kepegawaian Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah								**61.523.644.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	61.523.644.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						61.523.644.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	91	61.468.644.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					26.504.644.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	26.504.644.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.937.994.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	150	24.937.994.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.471.650.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	1.471.650.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	7	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	25.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	12		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					150.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	2	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				20.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	2	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					30.240.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	30.240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				30.000.000.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	2	30.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				200.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	20	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.534.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.534.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				150.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				14.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	14.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				180.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				140.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					320.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	320.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	4		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	3		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				150.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				170.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	6	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; ACEH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.730.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.730.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				900.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	12	900.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					970.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	27	970.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	27		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				225.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	27	225.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				25.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				500.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; ACEH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				220.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan	12	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	89.5	55.000.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%		55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu						
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**400.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	400.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						400.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	3	400.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				210.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	18	210.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				190.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	23	190.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN									**13.243.893.000**	**Badan Kepegawaian Daerah**	
						Indeks Sistem Merit	Angka	0.86		Badan Kepegawaian Daerah	
	Terwujudnya Distribusi Penempatan ASN Dalam Jabatan Yang Akurat dan Akuntabel								**9.755.000.000**		
						Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, dan manajemen kinerja	Angka	355.5	9.755.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						9.755.000.000		
						Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	%	100	4.010.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	
				Mutasi dan Promosi ASN					650.000.000		
						Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan	%	100	650.000.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
		5.03.02.1.02.000			Pengelolaan Promosi ASN				650.000.000		
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan	Orang	149	650.000.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Kompetensi ASN					3.050.000.000		
						Persentase Peningkatan Kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan	%	100	3.050.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	
		5.03.02.1.03.0004			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				2.650.000.000		
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang mengikuti ujian kedinasan	Orang	2000	200.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Jalur Pendidikan	Orang	66	2.450.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.03.0013			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				50.000.000		
						Jumlah jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimonitoring dan diberikan pembinaan	%	100	50.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.03.0014			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				350.000.000		
						Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan fungsional	Orang	1000	25.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen kepegawaian Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai perundang-undangan	Dokumen	1800	325.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					310.000.000		
						Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	%	100	310.000.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
		5.03.02.1.04.0002			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				310.000.000		
						Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terevaluasi dan terdatabase Kinerja, Sikap dan Perilakunya	Orang	40000	310.000.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	%	100	140.000.000	Bidang Mutasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Mutasi dan Promosi ASN					140.000.000		
						persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	%		140.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
		5.03.02.1.02.0001			Pengelolaan Mutasi ASN				140.000.000		
						Jumlah dokumen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang melakukan mutasi	Dokumen	350	140.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	5.605.000.000	Bidang Mutasi	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					5.605.000.000		
						persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	5.605.000.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	
		5.03.02.1.01.0002			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				130.000.000		
						Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai ASN Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan	Dokumen	1	130.000.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.01.0003			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				5.475.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Seleksi masuk dan Pembekalan bagi peserta didik Sekolah Kedinasan Provinsi Jawa Tengah	Orang	400	2.075.000.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah seleksi pengadaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan ASN Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Kegiatan	1	3.400.000.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terwujudnya Layanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi								**3.488.893.000**		
						Nilai aspek penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi	Angka	75.5	3.488.893.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						3.488.893.000		
						Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	%	100	315.000.000	Bidang Mutasi	
				Mutasi dan Promosi ASN					315.000.000		
						Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu	%		315.000.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
		5.03.02.1.02.0002			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				315.000.000		
						Jumlah penyelesaian Kenaikan Pangkat dan layanan administrasi kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1000	315.000.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	%	100	677.893.000	Bidang Informasi Kepegawaian	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					677.893.000		
						Persentase Layanan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	30	677.893.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	
		5.03.02.1.01.0010			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				400.000.000		
						Persentase Penyajian Informasi dan Layanan Kepegawaian Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota	%	30	400.000.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.01.0011			Pengelolaan Data Kepegawaian				277.893.000		
						Jumlah dokumen kepegawaian digital ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkelola	Dokumen	150000	224.023.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen kepegawaian fisik ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang terkelola	Dokumen	16900	53.870.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	%	100	1.001.000.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengembangan Kompetensi ASN					1.001.000.000		
						Persentase Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	%		1.001.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	
		5.03.02.1.03.0002			Pengelolaan Assessment Center				1.001.000.000		
						Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya	Orang	300	591.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya	Orang	400	180.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipetakan Potensinya	Orang	15000	230.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	280.000.000	Bidang Mutasi	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					280.000.000		
						persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	280.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
		5.03.02.1.01.0006			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				280.000.000		
						Jumlah Penyelesaian dokumen Pemberhentian ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	2200	280.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	%	100	1.215.000.000	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					310.000.000		
						Persentase Peningkatan Pemahaman atas Nilai Dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	%	100	310.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	
		5.03.02.1.01.0008			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				310.000.000		
						Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan Netralitas ASN	Orang	300	200.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Pemahaman ASN Provinsi Jawa Tengah tentang Radikalisme dan Intoleransi	%	100	110.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					905.000.000		
						Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN	%	100	905.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	
		5.03.02.1.04.0004			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				325.000.000		
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan	Orang	300	325.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0005			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai				90.000.000		
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota yang mendapatkan Tanda Jasa	Orang	2000	90.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0007			Pembinaan Disiplin ASN				190.000.000		
						Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang diberikan pembinaan disiplin	Orang	550	190.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0008			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				300.000.000		
						Persentase Penangangan Kasus dan Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	%	100	300.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									**75.167.537.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN									**19.589.676.000**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	
						Indeks Kompetensi ASN	Angka	3.07		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	TERPENUHINYA HAK PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN								**19.133.320.000**		
						Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	8.67	19.133.320.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						19.133.320.000		
						Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	Angka	3.5	327.501.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Pengembangan Kompetensi Teknis					29.726.000		
						Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen	3	29.726.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.01.0002			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				4.844.000		
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	4.844.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.01.0004			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				24.882.000		
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	18	4.327.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Angka	15	20.555.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					297.775.000		
						Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi	Dokumen	3	297.775.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.02.0006			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				59.550.000		
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	10	59.550.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.02.0008			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan				238.225.000		

					Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan						
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	13	41.631.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	Dokumen	1	38.739.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pelatihan yang diakreditasi	Jenis	1	95.307.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Angka	24	62.548.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%	100	1.350.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					1.350.000.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Orang	1140	1.350.000.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	
		5.04.02.1.02.0007			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1.350.000.000		
						Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	Orang	430	474.584.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	Orang	390	503.159.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	Orang	400	372.257.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	%	100	15.926.520.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					15.926.520.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial	Orang	2310	15.926.520.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	
		5.04.02.1.02.0007			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				15.926.520.000		
						Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	Orang	60	199.700.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Orang	200	2.530.248.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	Orang	230	2.292.580.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	Orang	120	2.104.945.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	Orang	1745	8.799.047.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	%	100	1.265.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	
				Pengembangan Kompetensi Teknis					1.265.000.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	Orang	2910	1.265.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	
		5.04.02.1.01.0003			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah				1.265.000.000		

					Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	Orang	920	429.818.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	Orang	850	423.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	Orang	1140	412.182.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	85	264.299.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Pengembangan Kompetensi Teknis					189.603.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen	3	189.603.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	
		5.04.02.1.01.0001			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				42.833.000		
						Jumlah metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1	1.500.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan analisi pengembangan kompetensi	Dokumen	2	41.333.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.01.0002			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				146.770.000		
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	20	146.770.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					74.696.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	3	74.696.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	
		5.04.02.1.02.0001			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional				70.547.000		
						Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1	1.500.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	Dokumen	2	20.049.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	24	48.998.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.02.0006			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				4.149.000		
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	4.149.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	TERPENUHINYA KEBUTUHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN								**456.356.000**		
						Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	100	456.356.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						456.356.000		
						Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	%	100	456.356.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					456.356.000		
						Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi	Dokumen	2	456.356.000	SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	
		5.04.02.1.02.0002			Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				37.655.000		
						Jumlah identifikasi kebutuhan skema sertifikasi	Dokumen	1	15.570.000	SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah kualifikasi asessor kompetensi yang dimiliki	Orang	2	22.085.000	SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.02.0003			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				418.701.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	Orang	300	418.701.000	SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH									**47.233.724.000**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	72		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**46.908.724.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	46.908.724.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						46.908.724.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	46.908.724.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					32.253.755.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	32.253.755.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				29.235.266.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	29.235.266.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.798.479.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	2.798.479.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				56.863.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	1	56.863.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				78.868.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat desa	Laporan	1	78.868.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				53.194.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah yang disusun	Laporan	1	53.194.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				31.085.000		
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	1	31.085.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					234.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	234.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				234.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	234.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					79.990.000		
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	79.990.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				79.990.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Laporan	1	79.990.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					230.400.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	230.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				49.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	10	49.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				181.400.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	181.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.996.289.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.996.289.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				173.093.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	173.093.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				188.196.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	188.196.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				374.165.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	374.165.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				305.060.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	305.060.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				76.200.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	76.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				36.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bulan	12	36.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				275.070.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Bulan	12	275.070.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.505.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Bulan	12	8.505.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				460.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	6	460.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					723.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Dokumen	1	723.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				588.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	66	588.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				120.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	31	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.647.440.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	9.647.440.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	4.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.428.890.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bulan	12	2.428.890.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.213.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	12	7.213.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.743.850.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Dokumen	1	1.743.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				149.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Bulan	12	149.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				30.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.000.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				564.250.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan	12	564.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**325.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	325.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						325.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	325.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					325.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	325.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				135.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	135.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				190.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	21	190.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**66.823.400.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Penghubung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Penghubung									**17.558.662.000**		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	71.5			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**17.483.662.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	17.483.662.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						17.483.662.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	17.483.662.000	Badan Penghubung	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.483.504.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	9.483.504.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.435.724.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	55	9.435.724.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				37.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	37.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				10.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					191.580.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	191.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				191.580.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	35	191.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					80.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				80.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	55	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA BARAT
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.572.178.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.572.178.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				71.860.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	71.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				154.372.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	154.372.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				18.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				581.946.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	581.946.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				700.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					127.650.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	199	127.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				127.650.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	36	127.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.834.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	4.834.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				812.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	812.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	89.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.908.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	3.908.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.194.150.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	1.194.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				675.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	34	675.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				11.150.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	11.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				224.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	16	224.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	8	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				234.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	234.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko di Badan Penghubung								**75.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	75.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						75.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	75.000.000	Badan Penghubung	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					75.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	21	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung									**2.772.186.000**		
						Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	85			
	Meningkatnya Pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah								**2.772.186.000**		
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	85	2.772.186.000		
		5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG						2.772.186.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan penghubung	%	100	2.772.186.000	Badan Penghubung	
				Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					2.772.186.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	%	100	485.000.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	
		5.07.02.1.01.0003			Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				485.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam Pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah di Jakarta	Kabupaten/ Kota	35	235.000.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi Produk Unggulan Jawa Tengah di Jakarta	Kabupaten/ Kota	35	250.000.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat	%	100	2.207.186.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.07.02.1.01.0001			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat				2.207.186.000		
						Jumlah Laporan Pelayanan terhadap Unsur Aparatur Pemerintah Jawa Tengah di Jakarta yang terpenuhi	Laporan	12	175.000.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Jumlah masyarakat yang menerima fasilitas Pelayanan Badan Penghubung	Orang	3684	2.032.186.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase Terpenuhinya fasilitasi Pengunjung Anjungan Daerah Jawa Tengah	%	100	80.000.000	SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH	
		5.07.02.1.01.0003			Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				80.000.000		
						Jumlah Kegiatan Anjungan Daerah Jawa Tengah	Kegiatan	6	80.000.000	SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
JUMLAH									**20.330.848.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
INSPEKTORAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**29.717.953.000**	**INSPEKTORAT**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	76		INSPEKTORAT	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**29.612.953.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83.6	29.612.953.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						29.612.953.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	29.612.953.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					23.955.557.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	23.955.557.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23.955.557.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	138	23.955.557.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					200.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	200.500.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	200.500.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					618.290.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	618.290.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				40.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				578.290.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	578.290.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan						
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					533.933.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	533.933.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				195.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	195.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				327.033.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	327.033.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Dokumen	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6.900.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	6.900.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					187.900.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	187.900.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar						
						Jumlah unit alat besar yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan	Unit	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				89.900.000		
						umlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2	89.900.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				98.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	98.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.732.020.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.732.020.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				230.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	230.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				667.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	667.600.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	30.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.804.420.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.804.420.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.384.753.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	70	1.384.753.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.800.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	11	39.800.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				369.038.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	23	369.038.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	20.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				120.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	120.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				80.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				605.915.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	605.915.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**105.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	105.000.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						105.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	105.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					105.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	105.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	60.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	45.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi									**8.839.949.000**		
						Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3			
	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah								**2.766.222.000**		
						Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Level	3	2.766.222.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						2.766.222.000		
						Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korups (IEPK) level 3	%	10.2	1.686.745.000	SEKRETARIAT	
				Pendampingan dan Asistensi					1.686.745.000		
						Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	4	1.686.745.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		6.01.03.1.02.0003			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1.686.745.000		
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	1.686.745.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	%	10.2	1.079.477.000	SEKRETARIAT	
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					198.940.000		
						Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kegiatan	1	198.940.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.01.0001			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				198.940.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Dokumen	1	198.940.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pendampingan dan Asistensi					880.537.000		
						Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi	Laporan	5	880.537.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.02.0002			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				880.537.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	49	880.537.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Peran Pengawasan Internal								**6.073.727.000**		
						Level Kapabilitas APIP	Level	3	6.073.727.000		
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						6.073.727.000		
						Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	%	83	579.243.000	SEKRETARIAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					579.243.000		
						Jumlah Dokumen Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semesteran	Dokumen	2	579.243.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
		6.01.02.1.01.0007			Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil				579.243.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	70	579.243.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	%	85	1.474.400.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.474.400.000		
						Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	100	1.474.400.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
		6.01.02.1.01.0002			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1.126.400.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	42	1.126.400.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		6.01.02.1.01.000			Reviu Laporan Keuangan				348.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	20	348.000.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	%	85	1.279.300.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					1.279.300.000		
						Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100	1.279.300.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	
		6.01.02.1.02.0001			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				200.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Laporan	4	200.000.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		6.01.02.1.02.0002			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1.079.300.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	20	1.079.300.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	%	85	1.420.914.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.420.914.000		
						Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	1.420.914.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		6.01.02.1.01.0001			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1.420.914.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	50	1.420.914.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	85	1.319.870.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.319.870.000		
						Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100	1.319.870.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
		6.01.02.1.01.0003			Reviu Laporan Kinerja				484.250.000		
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	60	484.250.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		6.01.02.1.01.0005			Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				835.620.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	30	835.620.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									**38.557.902.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Politik									**1.241.501.156.000**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
						Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	2.745		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya Ketahanan Bangsa								**80.045.776.000**		
						Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	2.89	80.045.776.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						2.168.341.000		
						Indeks Ideologi Pancasila	Nilai	3	2.168.341.000	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					2.168.341.000		
						Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	80	73.854.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.02.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				73.854.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Orang	50	73.854.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
						Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme	%	80	2.094.487.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.02.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				2.041.395.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1050	2.041.395.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.02.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				53.092.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4	53.092.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						76.846.013.000		
						Indeks kinerja ormas	Nilai	75.34	76.846.013.000	Bidang Ketahanan Bangsa	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					76.846.013.000		
						Skor variabel program dan kegiatan ormas	Skor	36.23	75.771.865.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.04.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				75.771.865.000		
						Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	35	75.771.865.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Skor variabel sumber daya ormas	Skor	39.11	1.074.148.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.04.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				925.498.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1200	925.498.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		8.01.04.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				148.650.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	320	148.650.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						1.031.422.000		
						Indeks penguatan dampak ekonomi	%	3	910.364.000	Bidang Ketahanan Bangsa	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					910.364.000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	85	910.364.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.05.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				910.364.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1210	910.364.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Indeks toleransi	%	74.1	121.058.000	Bidang Ketahanan Bangsa	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					121.058.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	%	85	121.058.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.05.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				70.090.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	100	70.090.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		8.01.05.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50.968.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	12	50.968.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> CILACAP
	Meningkatnya Stabillitas Politik								**1.161.455.380.000**		
						Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	2.6	1.161.455.380.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						1.022.991.617.000		
						IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	Nilai	75	1.022.991.617.000	Bidang Politik Dalam Negri	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.022.991.617.000		
						Persentase masyarakat yang paham pendidikan politik	%	89	1.616.822.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
		8.01.03.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1.616.822.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	1680	1.616.822.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	

						Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik	%	89	1.020.823.144.000	SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK	
		8.01.03.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1.020.823.144.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	4	1.020.823.144.000	SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK	
						Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi	%	89	551.651.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
		8.01.03.1.01.0002			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				187.620.000		
						Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	4	187.620.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
		8.01.03.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				364.031.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	180	364.031.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						138.463.763.000		
						Indeks kewaspadaan Nasional	Angka	73	138.463.763.000	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					138.463.763.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	%	72	761.090.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.06.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				761.090.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1000	761.090.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase penanganan konflik sosial	%	100	137.702.673.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.06.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				910.259.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	360	910.259.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		8.01.06.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				135.313.614.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	5	135.313.614.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		8.01.06.1.01.0006			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1.478.800.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Laporan	3	1.478.800.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**18.842.748.000**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**16.093.778.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88	16.093.778.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						16.093.778.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	16.093.778.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.061.779.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	10.061.779.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.826.659.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	54	9.826.659.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				222.120.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	222.120.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.500.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					80.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				80.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					320.500.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	320.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				60.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	80	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				230.500.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	280	230.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.496.806.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.496.806.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				180.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				85.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				25.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	50	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				55.650.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	55.650.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				721.156.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	24	721.156.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				60.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	8	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					886.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	41	886.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	5	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				801.000.000		
						Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Unit	27	801.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	9	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.430.693.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	84	2.430.693.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				450.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	36	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.973.693.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	36	1.973.693.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					818.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	352	818.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				225.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	21	225.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	50	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				110.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	80	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				410.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	410.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	200	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah								**2.748.970.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.5	2.748.970.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.748.970.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	2.748.970.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.748.970.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	2.748.970.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.081.440.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	16	1.081.440.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.667.530.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	20	1.667.530.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
JUMLAH									**1.260.343.904.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Riset dan Inovasi Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**20.631.203.000**		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	70.1			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**20.201.203.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84	20.201.203.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						20.201.203.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	84	20.201.203.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.508.730.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	19	15.508.730.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.065.170.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	45	15.065.170.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				223.560.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	223.560.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				110.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	110.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				110.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	110.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					155.388.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	155.388.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				135.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	135.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.388.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	20.388.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					375.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	375.000.000		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				300.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	50.000.000		
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	50	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.103.019.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.103.019.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				53.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	53.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.019.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	13.019.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				113.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	113.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				64.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	64.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				20.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				85.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	85.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	600.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					327.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	36	327.000.000		
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				25.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	6	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				252.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	252.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.601.266.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.601.266.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	7.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				567.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	567.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				230.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	230.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				796.766.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	796.766.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.130.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1.172	1.130.800.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				391.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	391.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				12.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	54	12.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				67.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	65	67.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				325.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	325.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				85.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	39	85.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**430.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.91	430.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						430.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	2.91	430.000.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					430.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	430.000.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				180.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	12	180.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi Daerah									**5.050.000.000**		
						Indeks Inovasi Daerah	Angka	72.5			
	Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah yang dimanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah								**5.050.000.000**		
						Persentase riset dan inovasi daerah yang diterapkan	%	100	5.050.000.000		
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						5.050.000.000		
						Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi	%	100	1.500.000.000		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					492.329.000		

						Jumlah dokumen fasilitasi penelitian dan pengembangan riset inovasi	Dokumen	1	492.329.000		
		5.05.02.1.01.0012			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				36.750.000		
						Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	1	36.750.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.01.0014			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				455.579.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	1	455.579.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi					1.007.671.000		
						Jumlah dokumen pemanfaatan riset inovasi	Dokumen	1	1.007.671.000		
		5.05.02.1.04.0003			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						
						Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Dokumen	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.04.0004			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				741.069.000		
						Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil hasil kelitbangan	Laporan	1	741.069.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.04.0005			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				266.602.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan fasilitasi Hak kekayaan Intelektual	Laporan	1	266.602.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi	%	100	1.000.000.000		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					1.000.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengembangan Infrastruktur	Dokumen	1	1.000.000.000		
		5.05.02.1.01.0003			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				505.807.000		
						Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	1	505.807.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.01.0004			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				494.193.000		
						Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	494.193.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	%	100	1.250.000.000		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							
						Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Dokumen	0			
		5.05.02.1.01.0001			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dokumen	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					204.400.000		
						Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Dokumen	1	204.400.000		
		5.05.02.1.02.0001			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				204.400.000		
						Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial	Dokumen	1	204.400.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					568.800.000		
						Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Dokumen	1	568.800.000		
		5.05.02.1.03.0002			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				204.400.000		
						Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	Dokumen	1	204.400.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.03.0003			Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah						
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.03.0004			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				204.400.000		
						Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas	Dokumen	1	204.400.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.03.0005			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan						
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.03.0006			Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral						
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	0			OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.03.0007			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				160.000.000		
						Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen	1	160.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi					476.800.000		
						Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	Dokumen	1	476.800.000		
		5.05.02.1.04.0002			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				476.800.000		
						Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen	1	476.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi	%	100	1.300.000.000		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					800.000.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Dokumen	1	800.000.000		
		5.05.02.1.01.0002			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				475.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2024			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen	1	475.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.01.0013			Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan				325.000.000		
						Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan diterbitkan	Dokumen	1	325.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi					500.000.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	1	500.000.000		
		5.05.02.1.04.0001			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				500.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									**25.681.203.000**		

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SETDA

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003